

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	: 28 September 2017	Tanggal Pembayaran dan Pengembalian Uang Pemesanan	: 5 Oktober 2017
Masa Penawaran Umum	: 2- 3 Oktober 2017	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 6 Oktober 2017
Tanggal Penjatahan	: 4 Oktober 2017	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 9 Oktober 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



WASKITA

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Properti dan Realty, Jasa Penyewaan, Investasi, Perdagangan, Pengelolaan Kawasan, dan Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di Bidang Jasa Konstruksi
Berkedudukan di Jakarta Timur

Kantor Pusat :

Gedung Waskita
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1710
Faks. (021) 8508506
website. www.waskita.co.id
e-mail. waskita@waskita.co.id

Memiliki 5 (lima) Kantor Divisi di Jakarta, 1 (satu) Kantor Divisi di Surabaya dan 1 (satu) Kantor Divisi di Palembang.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT,
UNTUK TAHAP PERTAMA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan berjumlah sebesar Rp1.369.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan berjumlah sebesar Rp1.631.000.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 6 Oktober 2020 untuk Seri A dan 6 Oktober 2022 untuk Seri B. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN, YAKNI TERTUNDANYA / TIDAK TERBAYARNYA TAGIHAN PROYEK DARI PEMBERI TUGAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LUKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN DALAM NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):

**A-(Idn)
(Single A Minus)**

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS

Obligasi yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
Penawaran atas Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Sekuritas
(Terafiliasi)



PT BNI Sekuritas
(Terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas
(Terafiliasi)



PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)

**WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.**

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya yang seluruhnya bernilai sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 1405 WK/DIR/2017 tanggal 11 Agustus 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. S-03961/BEI.PP3/07-2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah pihak yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab Daftar Istilah dan Singkatan.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
1.1. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI	2
1.2. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI	15
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI	17
III. PERNYATAAN UTANG	18
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	42
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	47
VI. FAKTOR RISIKO	74
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	76
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	77
8.1. RIWAYAT SINGKAT	77
8.2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	79
8.3. IZIN-IZIN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	81
8.4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING YANG DILAKUKAN PERSEROAN	82
8.5. ASET-ASET YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI PERSEROAN	160
8.6. ASURANSI	167
8.5. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”)	168
8.6. PENGURUS DAN PENGAWAS	169
8.7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> – GCG)	174
8.8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	181
8.9. STRUKTUR ORGANISASI	182
8.10. SUMBER DAYA MANUSIA	183
8.11. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	192
8.12. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN	199
8.13. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN ENTITAS ASOSIASI	200
8.14. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	208

8.15. BAHAN BAKU	231
8.16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)	231
8.17. PERSAINGAN	232
8.18. PEMASARAN	233
8.19. PROSPEK USAHA	233
8.20. PELANGGAN DAN DAYA SAING	234
8.21. KEUNGGULAN BERSAING	235
8.22. STRATEGI USAHA	237
IX. PERPAJAKAN	238
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	239
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	240
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	242
XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	251
XIV. AGEN PEMBAYARAN	256
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	257
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	259
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	301

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM pasal 1 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">A. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;B. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;C. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;D. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;E. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauF. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
Bapepam dan LK	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
BEI	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
Bunga Obligasi	<p>Berarti tingkat bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Daftar Pemegang Rekening	<p>Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.</p>
Denda	<p>Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.</p>
Dokumen Emisi	<p>Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Ringkas dan Pernyataan Pendaftaran serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.</p>

Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2., yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:<ol style="list-style-type: none">(i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau(ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; ataub. atas dasar pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Entitas Anak	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Negara Indonesia.</p>
Emisi	<p>Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat pada pasar perdana melalui Penawaran Umum dan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.</p>
EPC	<p>Berarti <i>Engineering, Procurement and Construction</i> yang merupakan pekerjaan yang mencakup perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi dengan melibatkan multi disiplin ilmu.</p>
Hari Bursa	<p>Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.</p>
Hari Kalender	<p>Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali.</p>
Hari Kerja	<p>Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.</p>
Hutang	<p>Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.</p>
Jumlah Terhutang	<p>Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.</p>
Kejadian Kelalaian	<p>Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan yang tercantum dalam Bab 1.1. Keterangan Mengenai Obligasi.</p>
Kemenkumham	<p>Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).</p>
Konfirmasi Tertulis	<p>Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.</p>

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi Obligasi bertugas mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masa Penawaran Obligasi	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Obligasi	Berarti surat hutang yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), dan jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017", yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya, yang akan dijual dan ditawarkan Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah)
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017	Berarti Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Perseroan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan dan Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No.21/2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Fitch	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam Prospektus ini dan dengan memperhatikan ketentuan UUPM dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No.VI.C.3	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No.VI.C.4	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No.VIII.G.12	Berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.11	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

POJK No. 7/ 2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas – Maret dua ribu tujuh belas) tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/ 2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas – Maret dua ribu tujuh belas) tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan - Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan - Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:30/POJK.04/2015 tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua - Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:55/POJK.04/2015 tanggal 22-12-2015 (dua puluh tiga - Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan - Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I No.53 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I di KSEI No. SP-0054/PO/KSEI/0717 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No.52 tanggal 21 Juli 2017 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No.47 tanggal 23 Agustus 2017 <i>juncto</i> Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No.63 tanggal 20 September 2017 yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I No.51 tanggal 21 Juli 2017 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I No.45 tanggal 23 Agustus 2017 <i>juncto</i> Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I No.61 tanggal 20 September 2017, yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah

Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Pasar Modal <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 7/2017, berikut dokumen-dokumennya yang disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan	Berarti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia	Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: i. kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau ii. dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia; tidak termasuk Entitas Anak.
Pihak Berelasi	Berarti, sesuai dengan PSAK 7, adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya a. Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang tersebut: - memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; - memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau - personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor b. Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika (salah satu); - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama - Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya. - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a). - Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terhutang pada Tanggal Emisi yaitu Obligasi, yang berjumlah sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang dari waktu ke waktu nilainya dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (<i>buyback</i>), dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, jumlah mana harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 7/2017.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal pembayaran yang merupakan tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi yang merupakan seluruh jumlah Pokok Obligasi kepada Perseroan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.
Turnkey	Berarti proyek dimana Perseroan menyediakan jasa dan dana untuk pelaksanaan proyek, kemudian konsumen akan membayar kembali seluruh kewajibannya atas jasa dan dana yang telah dilakukan oleh Perseroan setelah pekerjaan diselesaikan dengan persyaratan konsumen menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan

SINGKATAN ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

PMT	PT Prima Multi Terminal
WSE	PT Waskita Sangir Energi
WTR	PT Waskita Toll Road
WSBP	PT Waskita Beton Precast Tbk
WKR	PT Waskita Karya Realty
WKE	PT Waskita Karya Energi
PPTR	PT Pejagan Pemalang Toll Road
WBW	PT Waskita Bumi Wira

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama “Volker Aanneming Maatschappij N.V.” yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 126 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AH-0007778.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 03 April 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043583.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 03 April 2017 dimana para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

A. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, properti dan *realty*, jasa penyewaan, investasi, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi.

Tingginya peluang industri infrastruktur baik sektor pemerintah maupun swasta merupakan peluang utama para pemain di sektor industri konstruksi. Kebutuhan akan infrastruktur terutama pada *developing countries* di daerah Asia tiap tahunnya bertambah. Kebutuhan infrastruktur yang tinggi ini menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor konstruksi. Potensi pertumbuhan infrastruktur untuk tahun-tahun ke depan diprediksi akan masih terus bertambah terutama pada bidang energi dan transportasi seperti Listrik dan Jalan (Tol).

Pangsa sektor konstruksi dalam PDB terus meningkat sejalan dengan tingginya kebutuhan akan infrastruktur. Pangsa pertumbuhan sektor PDB nominal konstruksi di tahun 2013 mencapai angka 6,6%. Pada tahun 2014 Triwulan II, Laju Pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,17% dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan PDB pada Triwulan II 2013 yang sebesar 5,22%. (Sumber: BPS, 2014)

Seiring dengan bertambahnya *demand* terhadap industri konstruksi, sampai dengan tahun 2017 Pemerintah akan mempersiapkan dana sebesar Rp564 Triliun. Jumlah tersebut akan di alokasikan terhadap 5 (lima) sektor yang antara lain adalah Sumber Daya Air (SDA), Transportasi, Perumahan, Energi & Listrik, dan Pos & TI. (Sumber: BPS, 2014)

Pertumbuhan infrastruktur pada bidang transportasi seperti Jalan (Tol) dan jembatan di Indonesia diprediksikan akan mencapai 25% dari total semua proyek konstruksi. Infrastruktur pada bidang railroad dan powerplan (Energi & Listrik) menempati peringkat kedua dan ketiga dengan total nilai pertumbuhan mencapai 23% dan 17% sampai tahun 2020. Sehubungan dengan pertumbuhan tersebut, Pemerintah sudah mengalokasikan pendanaan terbesar pada pembangunan infrastruktur untuk sektor transportasi. (Sumber: BPS, 2014)

Alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat 22,26% menjadi Rp387,7 triliun dari sebelumnya Rp317,1 triliun pada APBN 2016. Anggaran infrastruktur melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa mendapat porsi terbesar yaitu sebesar Rp183,7 triliun. Anggaran infrastruktur melalui Belanja Kementerian dan Lembaga adalah sebesar Rp154,1 triliun, dimana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan porsi terbesar yaitu Rp98,7 triliun. (Sumber: BPS, 2014)

Perseroan melakukan perluasan kegiatan usaha dengan pengembangan pada bidang energi melalui pendirian WKE, pada bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol melalui pendirian WTR, pada bidang *precast* melalui pendirian WSBP, dan pada bidang *realty* melalui pendirian WKR.

B. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITAWARKAN

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017
- Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terdiri atas 2 (dua) Seri yaitu:
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri A sebesar Rp 1.369.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) ; dan
 - Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B sebesar Rp1.631.000.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar Rupiah).
- Jangka Waktu : a. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
b. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Tingkat Bunga Obligasi : a. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri A sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen); dan
b. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen).
- Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.
- Masa Penawaran Umum : 2 – 3 Oktober 2017.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Pembelian Kembali : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*). Obligasi dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, pembelian kembali Obligasi (*buy back*) tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender

sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan lebih lanjut dalam Bab I tentang Keterangan Mengenai Obligasi sesuai Peraturan No.VI.C.4

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

C. OBLIGASI PERSEROAN YANG BELUM DILUNASI

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif OJK	Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang (Rp juta)
1	PUB I Obligasi Waskita Karya Tahap I Tahun 2014	-	500.000	10,40%	3 (tiga) tahun	idA	10 November 2014	18 November 2017	500.000
2	PUB I Obligasi Waskita Karya Tahap II Tahun 2015	A	350.000	10,40%	3 (tiga) tahun	idA	10 November 2014	16 Oktober 2018	1.500.000
		B	1.150.000	11,1%	5 (lima) tahun			16 Oktober 2020	
3	PUB II Obligasi Waskita Karya Tahap I Tahun 2016	A	2.000.000	9,25%	3 (tiga) tahun	idA-	2 Juni 2016	10 Juni 2019	2.000.000
4	PUB II Obligasi Waskita Karya Tahap II Tahun 2016	A	900.000	8,50%	5 (lima) tahun	idA-	2 Juni 2016	28 September 2021	900.000
5	PUB II Obligasi Waskita Karya Tahap III Tahun 2017	A	747.000	8,50%	3 (tiga) tahun	idA-	3 Februari 2017	21 Februari 2020	747.000
		B	910.000	9,00%	5 (lima) tahun			21 Februari 2022	910.000
Total Obligasi Yang Masih Terhutang									6.557.000

Tidak ada pembatasan terkait penambahan utang Perseroan yang dapat membatasi penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 ini.

D. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil, Gedung dan EPC. Diantaranya pembelian bahan konstruksi, biaya peralatan, biaya subkontraktor serta upah tenaga kerja; dan
2. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan. Investasi tersebut akan dilakukan pada Entitas Anak dalam bentuk setoran modal. Entitas Anak yang akan menerima setoran modal diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Penyertaan modal kepada WTR untuk investasi dan pembiayaan proyek jalan tol sekitar 80% (delapan puluh persen).
 - b. Penyertaan modal kepada WKR untuk investasi dan pembiayaan proyek properti dan realti 20% (dua puluh persen).

Seluruh Investasi yang dilakukan Perseroan kepada Entitas Anak adalah dalam rangka ekspansi usaha yang akan memberikan kontribusi bagi keberlangsungan bisnis Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana diuraikan dalam Bab II tentang Rencana Penggunaan Dana.

E. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	100,000000000000

	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000001
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	8.963.697.886	896.369.788.600	66,0372016877
- Masyarakat*	4.610.011.563	461.001.156.300	33,9627983049
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.573.709.450	1.357.370.945.000	100,0000000000
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	
Seri B	12.426.290.550	1.242.629.055.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.426.290.550	1.242.629.055.000	

* Kepemilikan dibawah 5%

Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jabatan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Arif Baharudin	Komisaris	1.600.079	160.007.900	0,01%
2. Mohammad Choliq	Direktur Utama	26.433.934	2.643.393.400	0,19%
3. Agus Sugiono	Direktur	1.077.500	107.750.000	0,01%
4. Adi Wibowo	Direktur	10.081.600	1.008.160.000	0,07%
5. Nyoman Wiry Adnyana	Direktur	691.313	69.131.300	0,01%
6. Tunggul Rajagukguk	Direktur	1.493.486	149.348.600	0,01%
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		41.377.912	4.137.791.200	0,30%

F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*Member Firm of RSM International*), auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret	31 Desember	
	2017	2016	2015
Total Aset	68.115.476	61.433.012	30.309.111
Total Liabilitas	48.057.724	44.659.794	20.604.904
Total Ekuitas	20.057.752	16.773.218	9.704.207

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Pendapatan Usaha	7.354.796	3.071.542	23.788.322	14.152.753
Beban Pokok Pendapatan	(6.240.393)	(2.551.915)	(19.820.484)	(12.231.515)
Laba Bruto	1.114.403	519.627	3.967.838	1.921.238
Laba Sebelum Beban Keuangan, Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	977.568	412.070	3.145.782	1.446.986
Laba Sebelum Pajak	521.995	207.233	2.155.589	1.117.090

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Laba Periode Berjalan	425.672	124.112	1.813.069	1.047.591
Total laba komprehensif pada periode berjalan	419.732	117.852	1.809.183	1.567.118
Laba per saham:				
- Dasar (dalam satuan penuh)	27,09	10,96	147,48	90,19
- Dilusian (dalam satuan penuh)	-	-	147,47	90,18

* tidak diaudit

Rasio Keuangan Konsolidasian Penting

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2017	2016	2015
Rasio Pertumbuhan ⁽¹⁾			
Total Aset (%)	10,88	102,69	141,66
Total Liabilitas (%)	7,61	116,74	110,75
Total Ekuitas (%)	19,58	72,84	250,97
Pendapatan Usaha (%)	139,45	68,08	37,58
Laba Rugi Komprehensif (%)	256,15	15,45	232,10
Rasio Profitabilitas			
Marjin Laba Bruto (%) ⁽²⁾	15,15	16,68	13,58
Marjin <i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i> (EBITDA) (%) ⁽³⁾	14,70	15,61	15,59
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan (%) ⁽⁴⁾	5,71	7,61	11,07
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset (%) (disetahunkan) ⁽⁵⁾	2,63	3,95	4,89
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas (%) (disetahunkan) ⁽⁶⁾	9,25	13,70	16,80
Rasio Likuiditas			
Rasio kas (x) ⁽⁷⁾	0,27	0,34	0,40
Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>) (x) ⁽⁸⁾	1,27	1,26	1,13
EBITDA terhadap beban bunga (x) ⁽⁹⁾	2,47	3,78	6,49
Rasio Solvabilitas			
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x) ⁽¹⁰⁾	2,40	2,66	2,12
Rasio liabilitas terhadap total aset (x) ⁽¹¹⁾	0,71	0,73	0,68
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x) ⁽¹²⁾	1,29	1,50	0,83
Pinjaman berbunga terhadap EBITDA (x) (disetahunkan) ⁽¹³⁾	5,73	6,80	3,64

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.
- (2) Dihitung dengan membagi laba bruto dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi EBITDA dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (4) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang disetahunkan dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (5) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang disetahunkan dengan rata-rata jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan dengan periode/tahun sebelumnya.
- (6) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang disetahunkan dengan rata-rata jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan dengan periode/tahun sebelumnya.
- (7) Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (8) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (9) Dihitung dengan membagi laba sebelum beban penyusutan dan beban keuangan dengan beban keuangan, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (10) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (11) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (12) Dihitung dengan membagi jumlah pinjaman berbunga dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (13) Dihitung dengan membagi jumlah pinjaman berbunga dengan EBITDA yang disetahunkan, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

G. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	% Kepemilikan	Tahun Penyer-taan	Status Operasional	Penyertaan Melalui	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan	Kontribusi terhadap Laba Bersih Perseroan	Kontribusi terhadap Total Aset Perseroan	Kontribusi terhadap Total Liabilitas Perseroan
Entitas Anak Langsung										
1.	PT Waskita Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	72,63%	2014	sudah beroperasi	-	0,92%	-23,45%	40,45%	37,59%
2.	PT Waskita Beton Precast Tbk	Industri pabrikan	59,99%	2014	sudah beroperasi	-	0,93%	42,67%	20,27%	13,60%
3.	PT Waskita Karya Realty	Properti	99,99%	2015	sudah beroperasi	-	0,37%	2,18%	3,65%	0,73%
4.	PT Waskita Karya Energi	Energi	99,99%	2016	dalam tahap pengembangan	-	0,12%	-0,92%	0,48%	0,54%

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	% Kepemilikan	Tahun Penyer-taan	Status Operasional	Penyertaan Melalui	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan	Kontribusi terhadap Laba Bersih Perseroan	Kontribusi terhadap Total Aset Perseroan	Kontribusi terhadap Total Liabilitas Perseroan
Entitas Anak Tidak Langsung										
1.	PT Waskita Sangir Energi	Energi	85,00%	2016	sudah beroperasi	WKE	0,12%	n/a	n/a	n/a
2.	PT Pejagan Pemalang Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%**	2016	sudah beroperasi	PT Waskita Transjawa Toll Road	8,78%	n/a	n/a	n/a
3.	PT Waskita Bumi Wira	Pengusahaan Jalan Tol	55,00%*	2014	belum beroperasi	WTR	3,66%	n/a	n/a	n/a
4.	PT Cimanggung Cibitung Tollways	Pengusahaan Jalan Tol	90,00%*	2015	belum beroperasi	WTR	0,81%	n/a	n/a	n/a
5.	PT Waskita Transjawa Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%*	2015	sudah beroperasi	WTR	9,02%	n/a	n/a	n/a
6.	PT Trans Jabar Tol	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%*	2015	belum beroperasi	WTR	1,54%	n/a	n/a	n/a
7.	PT Semesta Marga Raya	Pengusahaan Jalan Tol	77,69%**	2010	sudah beroperasi	PT Waskita Transjawa Toll Road	0,58%	n/a	n/a	n/a
8.	PT Waskita Bali Mandara	Industri Pabrikasi	75,00%*	2015	belum beroperasi	WTR	0,00%	n/a	n/a	n/a
9.	PT Pemalang Batang Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%*	2016	belum beroperasi	WTR	0,24%	n/a	n/a	n/a
10.	PT Sriwijaya Markmore Persada	Pengusahaan Jalan Tol	98,00%*	2016	belum beroperasi	WTR	4,36%	n/a	n/a	n/a
11.	PT Tol Teluk Balikpapan	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%*	2016	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
12.	PT Waskita Wado Energi	Energi	99,95%	2016	belum beroperasi	WKE	0,00%	n/a	n/a	n/a
13.	PT Transjawa Paspro Jalan Tol	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%**	2017	belum beroperasi	PT Waskita Transjawa Toll Road	3,08%	n/a	n/a	n/a
14.	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Pengusahaan Jalan Tol	55,00%*	2017	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
Entitas Asosiasi										
1.	PT Solo Ngawi Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	40,00%*	2015	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	PT Cinere Serpong Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	35,00%*	2015	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	PT Ngawi Kertosono Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	40,00%*	2015	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Pengusahaan Jalan Tol	98,97%*	2014	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	PT Jasamarga Semarang Batang	Pengusahaan Jalan Tol	40,00%*	2016	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
6.	PT Utama Marga Waskita	Pengusahaan Jalan Tol	30,00%*	2017	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
7.	PT Citra Waspputowa	Pengusahaan Jalan Tol	25,00%*	2016	belum beroperasi	WTR, Perseroan	n/a	n/a	n/a	n/a
8.	PT Citra Karya Jabar Tol	Pengusahaan Jalan Tol	15,00%*	2016	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
9.	PT Prima Multi Terminal	Perdagangan dan Jasa	20,00%***	2014	belum beroperasi	Perseroan	n/a	n/a	n/a	n/a
10.	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Pengusahaan Jalan Tol	30,00%*	2014	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a

Ket: *) Persentase kepemilikan Perseroan melalui WTR

***) Presentase Kepemilikan Perseroan melalui PT Waskita Transjawa Toll Road.

****) Presentase Kepemilikan Perseroan

Pemahaman mengenai definisi “belum beroperasi” adalah “dalam masa proses pembangunan konstruksi”. Pendapatan usaha yang diperoleh dari Entitas yang belum beroperasi adalah pendapatan konstruksi yang diakui di badan usaha jalan tol, baik Entitas Anak Tidak Langsung maupun Entitas Asosiasi, sesuai ISAK 16.

Persentase kontribusi laba bersih, total aset dan total liabilitas Entitas Anak Tidak Langsung sudah terkonsolidasi pada laporan keuangan Entitas Anak Langsung Perseroan sementara keterangan mengenai tidak tersedianya persentase kontribusi laba bersih, total aset dan total liabilitas Entitas Asosiasi terhadap Perseroan dikarenakan oleh kepemilikan minoritas tidak terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perseroan.

H. FAKTOR RISIKO

1. Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

Risiko Usaha

1. Risiko Pembayaran
2. Risiko Kenaikan Harga Dan Ketersediaan Bahan Baku
3. Risiko Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Persaingan Usaha
5. Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
6. Risiko Sosial & Politik
7. Risiko Berkurangnya Proyek Dari Pelanggan Berulang

2. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab VI tentang Faktor Risiko.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK
TAHAP PERTAMA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan berjumlah sebesar Rp1.369.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan berjumlah sebesar Rp1.631.000.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 6 Oktober 2020 untuk Seri A dan 6 Oktober 2022 untuk Seri B. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA



Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):
A-(idn)
(Single A Minus)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha:

Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kantor Pusat :
Gedung Waskita
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340,
Indonesia
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1710
Faks. (021) 8508506
website. www.waskita.co.id
e-mail. waskita@waskita.co.id

Memiliki 5 (lima) Kantor Divisi di Jakarta, 1 (satu) Kantor Divisi di Surabaya dan 1 (satu) Kantor Divisi di Palembang.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN, YAKNI TERTUNDANYA / TIDAK TERBAYARNYA TAGIHAN PROYEK DARI PEMBERI TUGAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1.1. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

"Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017"

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dengan bunga tetap untuk masing-masing seri sebagai berikut:

- | | | |
|--------|---|--|
| Seri A | : | Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan berjumlah sebesar Rp1.369.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. |
| Seri B | : | Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan berjumlah sebesar Rp1.631.000.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. |

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 6 Oktober 2020 untuk Seri A dan 6 Oktober 2022 untuk Seri B. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Bunga Obligasi

- 1) Sifat dan besarnya tingkat bunga;
Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap.
- 2) Jadwal dan periode pembayaran:
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 3) Penghitungan bunga;
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- 4) Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
- 5) Tata cara pembayaran bunga;
 - (i) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - (ii) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
 - (iii) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - (iv) Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017	
	Seri A	Seri B
1	6 Januari 2018	6 Januari 2018
2	6 April 2018	6 April 2018
3	6 Juli 2018	6 Juli 2018
4	6 Oktober 2018	6 Oktober 2018
5	6 Januari 2019	6 Januari 2019
6	6 April 2019	6 April 2019
7	6 Juli 2019	6 Juli 2019
8	6 Oktober 2019	6 Oktober 2019
9	6 Januari 2020	6 Januari 2020
10	6 April 2020	6 April 2020
11	6 Juli 2020	6 Juli 2020
12	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
13		6 Januari 2021
14		6 April 2021
15		6 Juli 2021
16		6 Oktober 2021
17		6 Januari 2022
18		6 April 2022

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017	
	Seri A	Seri B
19		6 Juli 2022
20		6 Oktober 2022

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI HUTANG

- 1) Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
- 2) Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI

- 1) Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 2) Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Prospektus Bab XIII Prospektus ini perihal Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

- h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 14) Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
 - 15) Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
 - 16) Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
 - 17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan, mengakibatkan:
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Total Ekuitas Perseroan kecuali:
 - i. Jaminan Perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan;
 - ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar. Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas konsolidasi Perseroan dikurangi dengan aktiva tidak berwujud (*intangible asset*).
 - b) Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
 - c) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
 - d) Mengadakan penggabungan konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.

- e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:
 - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan.
 - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - 3) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 - f) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi;
 - g) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali untuk mendukung kegiatan usaha atau sehubungan dengan pembangunan, sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.
 - h) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.1 Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan ini akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk
- 1) Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Emisi.
 - 2) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - 3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b Perjanjian Perwaliamanatan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - 4) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.
 - 5) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
 - 6) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha usaha atau operasi Perseroan.
 - 7) Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
 - 8) Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan berikutnya pada setiap laporan keuangan (konsolidasi) tahunan Perseroan yang telah diaudit, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi, Perseroan diwajibkan menjaga financial performancenya sebagai berikut:
 - i. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu).
 - ii. Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 3 :1 (tiga berbanding satu);

- iii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5: 1 (satu koma lima berbanding satu);
Sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit. Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah biaya ditambah depresiasi dan Amortisasi.
- 9) Menyampaikan kepada Wali Amanat salinan dari laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan konsolidasi, yang disampaikan Perseroan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI.
 - 10) Khusus untuk penyerahan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana diatur di atas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.
 - 11) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
 - 12) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
 - 13) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan - No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) Tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan No. IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
 - 14) Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
 - 15) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - 16) Memberitahukan hasil RUPO kepada Wali Amanat yang digantikan-dalam hal terjadi penggantian Wali Amanat.
 - 17) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam daftar Pemegang Obligasi.
 - 18) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya hutang baru yang dibuat Perseroan, kecuali hutang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.
 - 19) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan.
 - 20) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini perihal Perpajakan.

WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan, PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.co.id
Up.: *Capital Market Services*

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/ atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/ atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan.

KELALAIAN PERSEROAN

- a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - 2) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*);
 - 3) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - 4) Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima perseratus);
 - 5) Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - 6) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - 7) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
 - 8) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan tentang hal-hal lain selain kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

b. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) Huruf a angka 1 sampai dengan 6 di atas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- 2) Huruf a angka 8 di atas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakuka penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- 3) Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;
 - b) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/ atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/ atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO:
 - a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

- h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO .
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
- (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a). Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - (c). RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU .
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (e). RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU .
 - (2). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.
 - (3). RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (5). RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
 - 9) Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 - 10) Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 - 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 - 12) Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianamanatan dan/ atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/ atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
 - 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 - 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

HAK DIUTAMAKAN ATAS UTANG

Kewajiban Perseroan berhubungan dengan atau berdasarkan Dokumen Perjanjian dan perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Perjanjian adalah kewajiban Perseroan yang berkedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36, sebagai berikut:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- b. Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang.
- c. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan No.40/SPN/WK/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Laporan No. SR117 0269 WK tanggal 2 Agustus 2017.
- d. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

LAIN-LAIN

- 1) Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- 2) Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
- 3) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
- 4) Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan mengenai Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak Perseroan ataupun Wali Amanat, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

Gedung Waskita

Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia

Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1710

Faks. (021) 8508506

website. www.waskita.co.id

e-mail. waskita@waskita.co.id

Wali Amanat:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.co.id
Up. : *Capital Market Services*

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

1.2. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

A. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No.IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Fitch.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan surat Fitch No.140/DIR/RAT/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

A-(idn)
(*Single A Minus*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan

B. PERTIMBANGAN (*RATIONALE*) DARI FITCH

Faktor-faktor penggerak peringkat tersebut adalah:

BUMN Konstruksi Terbesar; Pertumbuhan Order Book yang Kuat: Peringkat Perseroan mencerminkan statusnya sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi publik yang terbesar di Indonesia, berdasarkan EBITDA dan skala *order book*, bersamaan dengan keahlian perusahaan dalam membangun proyek infrastruktur besar. Peringkat tersebut juga didukung oleh pertumbuhan *order book* yang kuat, yang terkait dengan fokus pemerintah pada pengembangan infrastruktur, yang membawa pada perubahan strategi bisnis Perseroan. *Order book* Perseroan telah berkembang menjadi di atas Rp100triliun dan EBITDA menjadi sekitar Rp3,4triliun pada tahun 2016, atau setara dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 68% dan 76%, masing-masing, selama periode 2013-2016. Rasio *order book* rata-rata terhadap pendapatan Perseroan juga meningkat menjadi sekitar 3,5x pada 2015-2016 dari sekitar 2,0x pada tahun 2012- 2013.

Kepentingan Strategis terhadap Negara: Fitch percaya bahwa peringkat Perseroan mencerminkan kepentingan strategisnya yang tinggi bagi pemegang saham terbesarnya, yaitu Republik Indonesia (BBB-/Positif). Dalam penilaian Fitch, hubungan operasional dan strategis Perseroan dengan Pemerintah adalah kuat, sesuai dengan metodologi *Parent and Subsidiary Linkage* milik Fitch, dan oleh karena itu telah memberikan pengangkatan peringkat dua tingkat dari penilaian *standalone* di BBB+(idn). Penilaian Fitch tentang kepentingan Perseroan didasarkan pada status perusahaan sebagai perusahaan konstruksi BUMN terbesar di Indonesia, dan peran penting yang menyertainya, bersama dengan kontraktor BUMN lainnya, dalam program pengembangan infrastruktur Pemerintah yang agresif untuk jangka pendek sampai menengah.

Lebih jauh lagi, fakta bahwa Perseroan secara efektif mendanai proyek itu sendiri dan juga melakukan pra-pembiayaan untuk akuisisi lahan terlebih dahulu membuat perusahaan menjadi kunci manfaat bagi Pemerintah. Fitch juga mengharapkan Perseroan untuk memainkan peran penting dalam konsolidasi yang diharapkan dari perusahaan konstruksi Negara pada tahun-tahun mendatang, mengingat peran utamanya di sektor ini.

Leverage yang Tinggi: Fitch menilai peringkat *standalone* Perseroan pada 'BBB+(idn)', yang mencerminkan tingkat *leverage* yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pembanding lainnya, volatilitas arus kas operasi dan kemampuan perusahaan yang terbatas untuk mempertahankan arus kas bebas yang netral (FCF) mengingat perusahaan berada pada fase pertumbuhan yang cepat. Peringkat tersebut juga dimoderasi oleh ketergantungan perusahaan terhadap arus kas masuk yang besar dan relatif tidak pasti, yang berasal dari strategi daur ulang aset perusahaan, dan juga siklus jangka panjang bisnis konstruksi. Namun, Fitch yakin bahwa hal negatif ini diimbangi oleh skala operasi Perseroan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pembanding lainnya dan kemampuan perusahaan untuk mencari proyeknya sendiri, yang memberikan visibilitas pendapatan yang baik.

Peningkatan Profitabilitas: Paparan Perseroan yang meningkat terhadap proyek *turnkey* telah mendukung peningkatan profitabilitas; Perseroan melaporkan marjin EBITDA sebesar 14,2% pada tahun 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan 6,4% pada tahun 2013, karena proyek *turnkey* memungkinkan Perseroan untuk melakukan *pass-on* tambahan biaya pendanaan, yang terjadi selama masa konstruksi, kepada pelanggan. Kami memprakirakan marjin EBITDA untuk relatif stabil pada level 13%-15% selama 2017-2020.

Likuiditas yang Memadai: Pada akhir tahun 2016, kas Perseroan yang tersedia adalah sekitar Rp11triliun, cukup untuk mencakup jatuh tempo hutang jangka panjang sekitar Rp1triliun pada tahun 2017. Meskipun demikian, kami memprakirakan FCF negatif sebesar Rp18 triliun pada 2017 akan menambahkan tekanan terhadap likuiditas secara keseluruhan. Perseroan juga memiliki pinjaman jangka pendek sebesar Rp15triliun yang jatuh tempo pada 2017, yang diprakirakan Fitch akan di-*roll over*, mengingat profil operasional Perseroan sebagai kontraktor BUMN terbesar di Indonesia. Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp1,7triliun pada awal 2017 dan berencana menerbitkan tambahan Rp10triliun pada 2017-2018. Fitch percaya transaksi ini, jika berhasil, akan memperbaiki likuiditas Perseroan secara keseluruhan.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil, Gedung dan EPC. Diantaranya pembelian bahan konstruksi, biaya peralatan, biaya subkontraktor serta upah tenaga kerja; dan
2. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan. Investasi tersebut akan dilakukan pada Entitas Anak dalam bentuk setoran modal. Entitas Anak yang akan menerima setoran modal diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Penyertaan modal kepada WTR untuk investasi dan pembiayaan proyek jalan tol sekitar 80% (delapan puluh persen).
 - b. Penyertaan modal kepada WKR untuk investasi dan pembiayaan proyek properti dan realti 20% (dua puluh persen).

Seluruh Investasi yang dilakukan Perseroan kepada Entitas Anak adalah dalam rangka ekspansi usaha yang akan memberikan kontribusi bagi keberlangsungan bisnis Perseroan.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari kas internal yang dimilikinya atau melakukan pinjaman kepada pihak perbankan guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan di atas.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No.VI.C.4.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, setelah termasuk hitungan pajak, adalah kurang lebih setara dengan 0,2092% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

1. Biaya untuk jasa Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,0300%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,0200% biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,0050%, biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0050%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0373%, yang terdiri dari:
 - a. Biaya jasa Akuntan publik sebesar 0,0222%;
 - b. Biaya jasa Notaris sebesar 0,0033%
 - c. Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0118%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0658% yang terdiri:
 - a. Biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0125%
 - b. Biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,0533%;
4. Biaya lain-lain sebesar 0,0761% yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran OJK sebesar 0,0250%, biaya pencatatan Obligasi di KSEI sebesar 0,0123%, biaya pencatatan Obligasi di BEI sebesar 0,0050%, biaya penyelenggaraan *due diligence* dan *public expose* sebesar 0,0007%; biaya audit penjabatan sebesar 0,0050%; biaya percetakan prospektus, formulir-formulir, biaya iklan prospektus ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 0,0281%.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya sebagaimana telah disampaikan dalam pelaporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat Perseroan No. 1107/WK/DIR/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Laporan Realiasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp48.057.724 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp33.374.793 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp14.682.931 juta. Angka-angka ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Per 31 Maret 2017
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Bank Jangka Pendek	
Pihak Berelasi	6.318.058
Pihak Ketiga	4.475.056
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Pendek	2.692.519
Utang Usaha	
Pihak Berelasi	1.310.353
Pihak Ketiga	9.280.507
Utang Bruto Subkontraktor Pihak Ketiga	
Pihak Berelasi	29.635
Pihak Ketiga	6.936.237
Biaya yang Masih Harus Dibayar	173.976
Utang Pajak	190.068
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	455.104
Utang Bunga	5.218
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	5.392
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Jangka Pendek	153
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	1.502.517
Total Liabilitas Jangka Pendek	33.374.793
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang Bank Jangka Panjang	
Pihak Berelasi	4.862.083
Pihak Ketiga	145.904
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Jangka Panjang	175.000
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	
Pihak Berelasi	147.545
Pihak Ketiga	785.292
Liabilitas Pajak Tangguhan	8.421
Utang Lain-lain Jangka Panjang	
Pihak Berelasi	0
Pihak Ketiga	1.245.823
Utang Obligasi - Bersih	7.223.339
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Jangka Panjang	323
Liabilitas Imbalan Kerja	89.201
Total Liabilitas Jangka Panjang	14.682.931
Total Liabilitas	48.057.724

1. Liabilitas Jangka Pendek

a. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp10.793.114 juta, adapun rincian utang bank jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Per 31 Maret 2017
Pihak Berelasi	
Perseroan	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.807.543
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.225.213
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.125.654
Indonesia Eximbank	626.010
Entitas Anak - WSBP	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	945.633
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	293.000
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	295.005
Sub Jumlah	6.318.058
Pihak Ketiga	
Perseroan	
PT Bank Panin Tbk	1.299.284
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	949.882
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	699.375

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Per 31 Maret 2017
PT Bank UOB Indonesia	405.049
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	279.810
PT Bank Central Asia Tbk	141.656
Entitas Anak - WSBP	
PT Bank ICBC Indonesia	700.000
Sub Jumlah	4.475.056
Jumlah	10.793.114

Suku Bunga per Tahun	Per 31 Maret 2017
Perseroan	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9,00%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9,25%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9,18% - 10,00%
Indonesia Eximbank	8,75%
PT Bank Panin Tbk	8,50%
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	7,90% - 8,05%
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd	Ice Libor + minimum 1,1%
PT Bank UOB Indonesia	Jibor + 2,5%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	9,00%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk – Kredit Sindikasi	8,95%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	8,65%
Entitas Anak - WSBP	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,00%
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	10,00%
PT Bank ICBC Indonesia	9,75% - 10,00%

PERSEROAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BNI sebagai berikut:

- a. Kredit Modal Kerja *Revolving* Rp200.000.000.000.
- b. Kredit Modal Transaksional Rp1.800.000.000.000.
- c. Kredit Modal Kerja *Supply Chain Financing* (SCF) Rp1.425.000.000.000.
- d. Bank Garansi Rp2.625.000.000.000.
- e. *Letter of Credit* (L/C) atau SKBDN Rp270.000.000.000.

Berdasarkan surat No. 015/BIN/PK/2017 tanggal 27 Maret 2017, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 27 Maret 2017 dan jatuh tempo 26 Maret 2018. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Persediaan yang telah diikat akta fidusia No. 5 tanggal 13 Agustus 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-4831 HT.04.06.TH.2001/NTSD tanggal 26 Januari 2001 senilai Rp 8.268.049.363.
- b. Satu bidang tanah SHGB No. 724 tanggal 29 Maret 1988 sampai dengan 1 Desember 2027 seluas 2.098m² terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atas nama Perseroan senilai Rp1.500.000.000 sesuai dengan SHT No. 397/T/1988, senilai Rp31.000.000.000 sesuai dengan SHT.II No. 408/2004. Senilai Rp48.320.400.000 sesuai dengan SHT III No. 06386/2014 dan senilai Rp11.120.940.000 dimana SHT IV sedang dalam proses.
- c. Satu bidang tanah SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003 sampai dengan 20 April 2022, seluas 1.332 m², terletak di Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perseroan Cabang NTB senilai Rp1.332.000.000 sesuai dengan SHT.I No.687/2007 dan senilai Rp1.860.010.000 dimana SHT II sedang dalam proses.
- d. Satu bidang tanah SHGB No.2001 tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798 m², terletak di Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, atas nama Perseroan senilai Rp5.191.600.000 sesuai dengan SHT I No.323 dan senilai Rp9.779.660.000 sesuai SHT II No. 1375/2015.
- e. Satu Bidang tanah SHGB No. 4 tanggal 10 Nopember 1998 sampai dengan 19 Desember 2028 seluas 2.511 m², terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, Sumatera barat, atas nama Perseroan senilai Rp651.430.000 dan senilai Rp6.321.020.000 dimana SHT II sedang dalam proses.
- f. Satu bidang tanah SHGB No. 7 tanggal 10 Februari 1993 sampai dengan 7 Februari 2013 seluas 806 m², terletak di Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perseroan senilai Rp1.270.880.000 sesuai dengan SHT I No.3129/2001, senilai Rp460.020.000 sesuai dengan SHT II No. 1151/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 7 Februari 2033 dan senilai Rp3.474.910.000 sesuai SHT III No. 1846/2016.
- g. Satu bidang tanah SHGB No. 1518 tanggal 10 Maret 1998 sampai dengan 19 Juni 2036, seluas 1.004 m², terletak di Desa Sungai Raya, Kodya Pontianak, Kalimantan Barat, atas nama Perseroan senilai Rp464.850.000 sesuai dengan SHT I No.356/2001, senilai Rp747.850.000 sesuai dengan SHT II No.169/2007 dan senilai Rp3.595.942.000 sesuai dengan SHT III No. 36/2016.

- h. Satu bidang tanah SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 23 November 2026, seluas 1.404 m², terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya Jawa Timur, atas nama Perseroan senilai Rp2.665.700.000 sesuai dengan SHT I No. 2952/2007 dan senilai Rp3.595.940.000 sesuai SHT III No. 00621/2016 tanggal 28 Januari 2016.
- i. Satu bidang tanah SHGB No. 82 tanggal 20 Oktober 1988 sampai dengan 13 April 2028, seluas 2.013 m², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kodya Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perseroan senilai Rp2.027.710.000 sesuai dengan SHT I No. 4772/2001, senilai Rp2.474.390.000 sesuai dengan SHT II No. 2948/2007 dan senilai Rp10.571.030.000 dimana SHT III sedang dalam proses.
- j. Satu bidang tanah SHGB No. 2 tanggal 25 Juni 1997 sampai dengan 7 Oktober 2036, seluas 1.000 m², terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perseroan senilai Rp402.860.000 sesuai dengan SHT I No. 390/2001 dan senilai Rp636.540.000 sesuai dengan SHT II No. 239/2007 senilai Rp3.085.070.000 sesuai dengan SHT III No. 1387/2015.
- k. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 24 Oktober 1997 sampai dengan 7 Oktober 2036, seluas 595 m², terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perseroan senilai Rp49.260.000 sesuai dengan SHT I No. 374/2001 dan senilai Rp39.740.000 sesuai dengan SHT II No. 240/2007.
- l. Satu bidang tanah SHGB No. 13 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.830 m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perseroan senilai Rp457.590.000 sesuai dengan SHT I No.375/2001.
- m. Satu bidang tanah SHGB No. 14 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 April 2023, seluas 4.800 m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perseroan senilai Rp288.000.000 sesuai dengan SHT I No.375/2001 dan senilai Rp602.410.000 sesuai dengan SHT II No. 238/2007 dan senilai Rp7.828.880.000 dimana SHT III sedang dalam proses.
- n. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 11 Juni 1993 sampai dengan 25 Mei 2013, seluas 276 m², terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Kodya Manado, Sulawesi Utara, atas nama Perseroan senilai Rp263.530.000, sesuai dengan SHT I No. 737/2001 dan senilai Rp121.670.000, sesuai dengan SHT II No. 667/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2033.
- o. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2020, seluas 4.040 m², terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas nama Perseroan senilai Rp1.516.520.000, sesuai dengan SHT I No. 2927/2001, senilai Rp994.180.000 sesuai dengan SHT II No. 1613/2007 dan senilai Rp3.182.880.000 sesuai dengan SHT III No. 10710/2015. Tanah yang dijaminan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada.
- p. Satu bidang tanah SHGB No.30 tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan 26 Januari 2027, seluas 1.250 m², terletak di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, atas nama Perseroan senilai Rp3.404.000.000 sesuai dengan SHT I No. 2012/2007 dan senilai Rp18.705.400.000 dimana SHT II sedang dalam proses. Tanah yang dijaminan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, baik yang telah ada maupun yang akan ada.
- q. Satu bidang tanah SHGB No. 01 tanggal 13 Nopember 1987 sampai dengan 13 Oktober 2027, seluas 1.905m², terletak di Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung atas nama Perseroan senilai Rp30.000.000 sesuai dengan S. Hip No. 3181 tanggal 13 September 1989, senilai Rp2.222.100.000 sesuai dengan SHT II No. 01057/2007 dan senilai Rp3.642.670.000 sesuai dengan SHT III No. 02119/2016
- r. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 (satu) unit VW Caravelle 2.0 tahun 2012, yang diikat fidusia sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. W.10.00426020.AH.05.01 tanggal 26 Pebruari 2012 senilai Rp620.000.000.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa proyek Masjid Baiturrahman Banda Aceh, proyek Daerah Irigasi (DI) Batang Sinamar, proyek Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung, proyek Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (Giant Sea Wall), proyek Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar, proyek Pembangunan Bendungan Tapin, proyek Rusun Kemayoran D10-2 dan proyek Pembangunan Jalan Simpang Tanjung – Aruk II (MYC) digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI antara lain melakukan perubahan kegiatan usaha; menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali menjual atau mengalihkan aset kecuali yang bersifat *arm's length*; menjual atau mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe sifat dan kualitasnya; menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dilakukan dengan syarat akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*); melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.

Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 4 (empat) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perseroan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh BNI.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman Perseroan ke BNI adalah sebesar Rp1.807.542.883.839.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja konstruksi transaksional sebesar Rp1.800.000.000.000, fasilitas bank garansi sebesar Rp4.500.000.000.000, dan fasilitas *bill purchase financing* Rp1.200.000.000.000 sesuai surat No. R.II.140-ADK/DKR-2/06/2016 tanggal 15 Juni 2016 fasilitas digunakan sampai tanggal 10 Juni 2017.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan sebidang tanah dengan SHGB No. 655 dengan masa berlaku dari tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2020 yang telah diikat hak tanggungan dengan nilai Rp16.186.000.000.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari BRI antara lain: mengajukan pernyataan kepailitan kepada pengadilan, menyewakan aset yang dijamin kepada bank; melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan *current ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perseroan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh BRI.

Seluruh tagihan proyek (piutang usaha) pada 31 Maret 2017 yang dijamin atas utang bank BRI adalah tagihan termin atas Proyek Gedung Kantor Satker Perangkat Daerah Pemkot Pekanbaru, Pembangunan Rusun Pasar Rumput, Pembangunan Tol Solo – Ngawi Paket 2 dan Proyek Jalan Tol MKTT (Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi) seksi 3 dan seksi 6.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman Perseroan ke BRI adalah sebesar Rp1.225.212.705.295, termasuk kredit sindikasi sebesar Rp186.611.044.125.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Mandiri sebagai berikut:

Jenis-jenis Fasilitas	Batas	Jatuh Tempo
Kredit Modal Kerja Transaksional III	Rp4.200.000.000.000	14 April 2019
Fasilitas Kredit (<i>Non Cash Loan</i>)	Rp3.000.000.000.000	14 November 2018
Fasilitas <i>Supply Chain Financing</i> (SCF)	Rp1.006.000.000.000	14 November 2017
Kredit Modal Kerja Transaksional II	Rp900.000.000.000	14 November 2018
Kredit Modal Kerja Transaksional	Rp765.000.000.000	14 November 2017
LC/SKBDN (Sub limit dari NCL)	Rp500.000.000.000	14 November 2017
<i>Trust Receipt</i> (Sub limit dari NCL)	Rp115.000.000.000	14 November 2017
Kredit Modal Kerja Rekening Koran	Rp35.000.000.000	14 November 2017

Atas pinjaman tersebut Perseroan dikenakan bunga 9,18% - 10,00% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan kantor cabang Pekanbaru, yang telah diserahkan dan telah diikat hak tanggungan (HT) dengan nilai Rp14.075.000.000.
- b. Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek CIBIS Tower, Apartemen Brooklyn Alam Sutera, UNS Solo, Sopo Del Office Tower Lifestyle, Indocement Citeureup, PLTM Lebak Tundun, Tanki Oil Sangatta EPC, Waduk Gondang, Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean – Blok M – Ciledug Paket Adam Malik, Fly Over Pegangsaan, Sabo Dam Merapi (8 buah), pengembangan proyek perbaikan Suai Airport, Proyek Peningkatan Jalan Gunung Seriang – Long Beluah, jalan Tanjung Selor – Tanjung Palas – Sekatak, Pekerjaan Arsitektur dan ME Hotel Meritus Seminyak, Jalan Tol Ngawi Kertosono Paket 1, Pelabuhan Belawan dan proyek Bendungan Raknamo dijamin atas utang bank Mandiri.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri antara lain: memindah tangankan barang jaminan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijamin kepada pihak lain; menjaga rasio keuangan aset tetap yang akan diperoleh/dibeli oleh Perseroan di kemudian hari, maka akan dijadikan agunan kredit di Mandiri, Perseroan akan memprioritaskan kepada Mandiri dan afiliasinya untuk menjadi *arranger*, *underwriter* dan lain-lain dalam hal Perseroan melakukan *corporate action* dalam rangka *fund raising* di dalam negeri.

Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perseroan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Mandiri.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman Perseroan kepada Mandiri adalah sebesar Rp1.125.653.934.885.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Eximbank”)

Perseroan juga memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Export (KMKE) sebesar Rp2.000.000.000.000 sesuai dengan Akta Perjanjian KMKE No. 43 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. tanggal 24 Maret 2017. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 27 Maret 2018.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pembangunan Tol Solo – Ngawi Paket 1 digunakan sebagai jaminan atas utang bank Indonesia Eximbank.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Indonesia Eximbank antara lain; melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada bank; memperoleh pinjaman baru atas proyek yang telah dibiayai oleh bank; memperluas atau mempersempit usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman; penggunaan fasilitas kredit selain daripada untuk tujuan pembiayaan fasilitas kredit; mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan; menjual atau memindahkan aset yang dijadikan jaminan; meminjamkan uang kepada siapapun, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal; bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perseroan dan dievaluasi oleh bank setiap periode.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman Perseroan kepada Indonesia Eximbank adalah sebesar Rp626.010.276.504.

PT Bank Panin Tbk (“Panin”)

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman *money market* sebesar Rp2.500.000.000.000 dan garansi bank (*switchable*) dan fasilitas *foreign exchange* USD5.000.000 sesuai dengan Akta Perubahan dan Perangkuman Kembali Perjanjian Kredit Nomor 02 Tanggal 01 Desember 2016. Fasilitas dapat digunakan sampai dengan tanggal 24 Mei 2017.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin antara lain menerima pinjaman atau kredit baru dari bank lain atau pihak ketiga yang jumlahnya dapat menyebabkan dilanggarnya rasio keuangan pada *financial covenant*; mengikatkan diri sebagai pinjaman terhadap pihak ketiga; membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada; membubarkan atau melikuidasi Perseroan; merubah bidang/jenis usahanya; mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas utang-utangnya (*surseance van betaling*); merubah bentuk hukum atau status hukum Perseroan; merubah anggaran dasar Perseroan; menyewakan Perseroan kepada pihak ketiga; menyewakan / memindahtangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan; memindahtangankan Perseroan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga; mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada; membayar hutangnya kepada para pemegang saham dan atau para perseronyanya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari; melakukan merger atau penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham; memperbolehkan pemegang saham untuk menarik kembali modal yang telah disetor, menjaminkan atau menggadaikan saham Perseroan.

Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *debt to equity ratio* maksimum 3 kali, *debt service coverage ratio* lebih besar dari 2 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perseroan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Panin.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Frontage Surabaya dan Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 3 dijamin atas utang bank Panin.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman Perseroan kepada Panin adalah sebesar Rp1.299.284.146.569.

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“Sumitomo”)

Berdasarkan surat No. SMBCI/NS/0447 tanggal 15 Desember 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia berupa fasilitas *cash loan revolving* sebesar Rp950.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu satu bulan sejak perjanjian kredit ditandatangani, dengan suku bunga 8,50% per tahun.

Perjanjian ini mencakup batasan – batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Sumitomo antara lain, memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya hak jaminan atas aset-asetnya; menjual, mengalihkan atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Perseroan; menjual, mengalihkan atau melepaskan piutangnya dengan hak regres; mengadakan pengaturan apapun dimana uang

atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (*set-off*) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama, dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi dilakukan terutama sebagai suatu cara untuk menambah utang pembiayaan atau membiayai pembelian aset.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan pengguna jasa atas proyek Jalan Hampengan-Mendawai II (Multi Years), Apartemen Yukata Alam Sutera, Irigasi Di Batang Alai dan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung (MYC) digunakan sebagai jaminan atas utang bank Sumitomo.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman Perseroan kepada Sumitomo adalah sebesar Rp949.881.831.616.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (“BTMU”)

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp800.000.000.000 dan fasilitas pinjaman terhadap tagihan sebesar Rp300.000.000.000 sesuai dengan perjanjian kredit No. 16-0484/LN tanggal 17 Desember 2016. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 17 Desember 2017.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BTMU antara lain tidak mengubah bisnis Perseroan, Perseroan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perseroan (jika ada), tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perseroan, menjaga rata-rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode, menyampaikan progress pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai, menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai, menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya, memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan bank.

Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1,5 kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan Perseroan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh BTMU.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Saluran Interkoneksi Di. Osaka, proyek Pembangunan Mustika Golf Apartment, proyek Realty The Reiz Condo Medan, proyek Pembangunan Bendung Di Kamijoro Kab. Bantul (MYC), proyek Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Jombang - Madiun, Saluran Induk Di Air Lakitan, proyek Pembangunan Infrastruktur Motaain, dan Pembangunan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 Paket 3.2 digunakan sebagai jaminan atas utang Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman Perseroan kepada BTMU adalah sebesar Rp699.375.000.000.

PT Bank UOB Indonesia (“UOB”)

Perseroan memperoleh fasilitas KMK sebesar Rp600.000.000.000 sesuai dengan surat No. 16/CPB/0114 tanggal 20 Juni 2016 dan fasilitas non-kas Rp600.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 20 Juni 2017.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB antara lain: tidak mengubah bisnis Perseroan, Perseroan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perseroan (jika ada), tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perseroan, menjaga rata-rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode, menyampaikan progress pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai, menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai, menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya, memberitahukan bank atas setiap perubahan komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan bank.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Maloy (SPAM), Pembangunan Mako Polda Papua Barat, Irigasi di COLO Kab. Wonogiri dan Saluran Sungai Karang Anyar digunakan sebagai jaminan atas utang bank UOB.

Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1,5 kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perseroan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman Perseroan kepada UOB adalah sebesar Rp405.048.823.590.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (“BJB”)

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sub-limit non-kas loan yang dapat digunakan untuk SKBDN, L/C dan bank garansi sebesar Rp750.000.000.000 sesuai addendum perjanjian kredit No. 35 tanggal 28 Nopember 2016 oleh Notaris Indra Meidi, S.H. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 7 Nopember 2017.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BJB antara lain: memindah tangankan agunan/tagihan termin; mengubah bentuk objek agunan kredit; memperoleh fasilitas kredit investasi atau pinjaman lain dari pihak ketiga untuk proyek yang sama kecuali dalam transaksi usaha yang wajar; mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang dibiayai kepada pihak lain; penggabungan dan peleburan dengan pihak ketiga; mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang, meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha debitur; menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Bagian Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru (Kontrak Anak I), proyek peningkatan DI. Dumpil, rekonstruksi jalan batu Mundom – Tabuyung – Natal dan proyek Rusun Kemayoran C2-2, renovasi stadion renang (Aquatic) GBK dan pembangunan bangunan fasilitas kapal selam paket B2 digunakan sebagai jaminan atas utang bank BJB.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman Perseroan kepada BJB adalah sebesar Rp279.810.233.193.

BRI dan PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit sindikasi BRI dan BCA sebesar maksimum Rp4.402.500.000.000 dengan suku bunga *Reference Rate* + Marjin yaitu 9,7% per tahun sesuai surat No. B.101-DIS/SDK/03/2017 tanggal 22 Maret 2017. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun setelah perjanjian kredit ditandatangani.

Tujuan dari fasilitas kredit sindikasi ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja konstruksi pengadaan transmisi 500 kV Sumatera (“Proyek Transmisi Sumatera”) yang terdiri dari pengadaan transmisi dengan rute New Aur Duri – Peranap (Seksi 1) dan rute Peranap – Perawang (Seksi 2).

Setelah berita acara serah terima untuk masing-masing paket pekerjaan diserahkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku *owner* proyek, sumber pelunasan dari fasilitas kredit ini akan beralih secara langsung kepada *owner*. Seluruh tagihan atas pekerjaan dan tagihan atas klaim asuransi terkait proyek yang dibiayai menjadi jaminan atas fasilitas kredit ini.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman Perseroan kepada BCA adalah sebesar Rp141.656.140.968.

ENTITAS ANAK - WSBP

BRI

Berdasarkan surat No. R-II-127-ADK/DKR- 2/5/2016 tanggal 30 Mei 2016, WSBP memperoleh fasilitas kredit dari BRI berupa kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp1.000.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 30 Mei 2016 dan jatuh tempo 29 Mei 2017, berdasarkan perjanjian kredit No. 116 tanggal 30 Mei 2016 dengan suku bunga 10% per tahun.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh WSBP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI antara lain mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan debitur kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini; mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit; menerima pinjaman/pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya; menyewakan asset yang dijaminkan di bank atau lembaga keuangan lainnya; melunasi/membayar utang kepada pemegang saham/utang persero sebelum utang di bank dilunasi terlebih dahulu; dan melakukan tindakan merger, akuisisi, *go public* dan penjualan aset debitur.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Piutang usaha dan omset kontrak proyek, baik yang telah dan/atau akan dimiliki oleh debitur yang dibiayai oleh bank dengan nilai sebesar Rp1.200.000.000.000 akan diikatkan dengan *cessie*
- b. Sepuluh bidang tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Daerah Tingkat II Banyuasin, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang terdiri dari:
 - Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2796/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan Haji Djemain.
 - Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2802/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan Azhar Rumawie.

- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2803/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Nyonya Hajjah Ponlati.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2799/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan Juanedy.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2800/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan A Makawi.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2801/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan M. Thamrin.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2805/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan Ilyas.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2804/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Nyonya Magdalena.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2798/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan Abdullah Beni.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2797/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Nyonya Berta Mai Sundari.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan debitur kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur sendiri.
3. Menyewakan aset yang dijaminkan di bank atau lembaga keuangan lainnya.
4. Melunasi / membayar utang kepada pemegang saham / utang persero sebelum utang di bank dilunasi terlebih dahulu.
5. Melakukan tindakan merger, akuisisi, *go public* dan penjualan aset debitur.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman WSBP kepada BRI adalah sebesar Rp945.632.801.837.

BNI

Berdasarkan surat No. BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, WSBP memperoleh fasilitas kredit dari BNI sebagai berikut:

- Kredit modal kerja *revolving* Rp50.000.000.000, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016. Kredit modal kerja *revolving* tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015.
- Kredit modal transaksional Rp300.000.000.000, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016. Kredit modal transaksional tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2015.
- Kredit modal kerja *supply chain financing* (SCF), bank garansi dan *letter of credit* (L/C) atau SKBDN Rp300.000.000.000, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016. Kredit modal kerja SCF tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 152 tanggal 23 Juni 2015.
- Ketiga fasilitas diatas telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BIN/2.2/154/R tanggal 20 Juni 2016, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan 22 Juni 2017.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m², terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, atas nama WSBP senilai Rp66.038.444.437 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 akan diikat Hak Tanggungan (HT).
- Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No. 38 berlaku sejak tanggal 22 Januari 2015 dan akan berakhir pada tanggal 16 Januari 2045, dengan luas 70.099 m², terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, atas nama WSBP (dahulu atas nama Perseroan) senilai Rp88.340.004.000 sudah diikat HT.
- Satu bidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 02/Kalijaya berlaku sejak tanggal 16 Pebruari 1988 dan akan berakhir pada tanggal 16 Pebruari 2018, dengan luas 16.620 m², terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Perseroan senilai Rp58.218.498.201 sudah diikat HT.
- Peralatan/mesin/alat berat di *Plant* Karawang, Desa Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebesar Rp299.866.478.836 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS. PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang akan diikat secara fidusia.
- Peralatan/mesin/alat berat di *Plant* Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, sebesar Rp175.490.704.294 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang akan diikat secara fidusia.
- Piutang usaha WSBP pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp240.461.410.753 yang akan diikat secara fidusia.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.
2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan / aset dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
 - Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
 - Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
 - Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan asset tersebut tidak mempunyai akibat material.
 - Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan / diusahakan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi), kecuali:
 - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
 - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam grup dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan.
 - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemisahan dimana perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas.
5. Melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.
7. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Berdasarkan surat dari BNI tanggal 7 Juni 2016 No. BIN/2.2/391/R, BNI memberikan persetujuan (*waiver*) atas pembatasan melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material terkait rencana WSBP untuk melakukan proses penawaran umum perdana saham.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman WSBP kepada BNI adalah sebesar Rp293.000.000.000.

PT Bank Rakyat Indonesia Syariah ("BRI Syariah")

Berdasarkan surat akad musyarakah dengan BRI Syariah No. 021/MUSY/KP/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016, WSBP memperoleh fasilitas kredit dari BRI Syariah berupa kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp300.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 17 Oktober 2016 dan jatuh tempo 16 Oktober 2017 dan dengan suku bunga 10% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Tagihan Perseroan dan/atau tagihan selain kepada Perseroan (dengan persetujuan BRI Syariah), sebagai *bouwheer* atas kontrak-kontrak pekerjaan yang menjadi *underlying* pencairan di BRI Syariah.
2. *Inventory* berupa material yang dibeli dengan pembiayaan BRI Syariah melalui skema pra proyek pendanaan.

Nilai fidusia atas jaminan berupa tagihan dan *inventory* adalah minimal 125% dari plafond fasilitas.

Pada tanggal 31 Maret 2017, saldo pinjaman WSBP kepada BRI Syariah adalah sebesar Rp295.005.103.698.

PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 20 Desember 2016, WSBP mendapatkan kredit modal kerja dari ICBC dengan jumlah fasilitas Rp400.000.000.000 yang terbagi atas 2 tranche dimana *tranche A* sebesar Rp200.000.000.000 merupakan *committed line* dan *tranche B* sebesar Rp200.000.000.000 merupakan *uncommitted line*, jangka waktu pinjaman 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian. Adapun suku bunga dari *tranche A* sebesar 10% per tahun (*floating*) dan *tranche B* sebesar 9,75% per tahun (*floating*).

Fasilitas ini diikat dengan agunan berupa:

- Piutang Usaha WSBP yang diikat secara fidusia, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 39 tanggal 20 Desember 2016.
- Sisa nilai atau omset kontrak WSBP - kontraktor harus dengan Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2017, saldo pinjaman WSBP kepada ICBC adalah sebesar Rp700.000.000.000.

b. Utang Lembaga Keuangan Non-Bank

1) Bagian Jangka Pendek

PERSEROAN

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”)

Perseroan memperoleh fasilitas KMK sebesar Rp700.000.000.000 dari SMI sesuai dengan Surat No. S-149/SMI/DPI/04015 tanggal 16 April 2015. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan. Tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang ditarik dan/atau digunakan dan belum dibayar kembali oleh Perseroan per tahun.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memiliki batasan-batasan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMI sejak tanggal perjanjian pembiayaan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang, antara lain:

- a) melakukan perubahan kepemilikan atas saham dan hak konsesi;
- b) menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian harta kekayaan debitur yang telah dijaminkan menyerahkan seluruh atau sebagian dari hak atau kewajiban debitur yang timbul;
- c) berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada pihak lain;
- d) mengadakan perubahan nama, bentuk dan status hukum, serta sifat dan kegiatan usaha debitur seperti yang sedang dilaksanakan saat ini; dan
- e) mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh debitur kepada kreditur.

Seluruh tagihan termin pada 31 Maret 2017 yang dijaminkan atas utang SMI yaitu termin atas proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang Seksi I, proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang Seksi II.

Perseroan juga memperoleh fasilitas pembiayaan dana talangan dari SMI maksimum sebesar Rp3.703.370.000.000 dengan tarif bunga Lembaga Penjaminan (LPS) + 1,00% per tahun sesuai surat No. S-401/SMI/DPI/0616 tanggal 1 Juni 2016 fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembayaran maksimal 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan.

Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk pembiayaan dana talangan pembebasan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Grup, diantaranya KKDM, PPTR, PBTR, CCT, PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol (TJPT), TJT, SNJ, NKJ, JMKT, CSJ, dan CW.

Jumlah penggunaan fasilitas pembiayaan ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp2.644.114.049.873.

PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”)

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman bergulir sebesar Rp800.000.000.000 dari IIF sesuai dengan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir Nomor 01 Tanggal 01 November 2016. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan. Tingkat bunga pinjaman sebesar 8,55% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang ditarik dan/atau digunakan dan belum dibayar kembali oleh Perseroan per tahun.

Jumlah keseluruhan penggunaan fasilitas pembiayaan ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp48.405.233.981.

2) Bagian Jangka Panjang

ENTITAS ANAK (KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG) – WSE, IIF

Pada tanggal 8 Maret 2016, WSE memperoleh fasilitas pinjaman berjangka panjang dari IIF sejumlah Rp175.000.000.000 yang terdiri dari fasilitas Kredit Investasi (KI) dan *Interest During Construction* (IDC) sebesar Rp10.400.000.000.

Pinjaman ini dibayarkan secara cicilan triwulan sampai dengan bulan Maret 2026 dengan masa tenggang 12 bulan. Fasilitas pinjaman berjangka panjang ini diperoleh WSE untuk pembiayaan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga *mini hydro* 2X5 MW dengan tingkat bunga per tahun sebesar 12,25%. WSE menunjuk BNI sebagai agen jaminan.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan piutang usaha, aset keuangan atas proyek konsesi dan aset tetap WSE.

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu yang mengharuskan WSE mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan dan persyaratan lainnya.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, WSE sudah memakai fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp175.000.000.000 yang terdiri dari Fasilitas KI sebesar Rp169.154.733.895 dan Fasilitas IDC sebesar Rp5.845.266.105.

c. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp10.590.860 juta, adapun rincian berdasarkan jenis hutang usaha adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Per 31 Maret 2017
Pemasok	4.405.685
Subkontraktor	3.250.492
Ventura Bersama	1.800.233
Sewa Alat	449.715
Upah Kerja	83.367
Lain-lain	601.368
Jumlah	10.590.860

Rincian utang usaha Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan pihak adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Per 31 Maret 2017
Utang Usaha Pihak Berelasi	
KSO Waskita - PP - Wika	245.349
KSO Waskita - Nindya	118.866
KSO Waskita - Brantas	59.032
Lain - lain	887.106
Jumlah Utang Usaha Pihak Berelasi	1.310.353
Utang Usaha Pihak Ketiga	
KSO <i>Dredging</i> dan <i>Embankment</i>	755.804
PT Citra Baru Steel	303.506
The Master Steel Manufactory	219.992
PT Posco E&C Indonesia	187.979
PT Voksel Electric	178.622
KSO Waskita - Yasa	155.913
PT KMI Wire and Cable Tbk	131.738
KSO Waskita - Penta	98.347
PT Len Industri	91.530
PT Hanil Jaya Steel	85.320
PT Janti Sarana Material Beton	82.007
KSO Waskita - Sinar Intan	81.441
KSO Waskita - Wika – Shanghai	73.377
PT Dutacipta Pakarperkasa	71.277
PT Kreasi Beton Nusapersada	70.055
PT Lancar Jaya Mandiri Abadi	69.979
PT Sumber Mitra Jaya	68.858
PT Inti Sumber Bajasakti	68.395
PT Jembo Cable Company Tbk	65.647
PT Tiga Sekawan Serasi	64.954
PT China Harbour Indonesia	59.478
KSO Waskita - Perdasa - Buluh – Larasati	56.767
Batuhei Upl Lda	53.263
PT Megah Bangun Baja Semesta	52.466
PT Bukaka Teknik Utama	52.048
KSO Waskita - Cahaya	51.027
Lain-lain	6.030.717
Jumlah Utang Usaha Pihak Ketiga	9.280.507
Jumlah	10.590.860

Rincian umur utang usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Per 31 Maret 2017	
Keterangan	
Utang Pemasok	
> 30 – 90 hari	
Belum Jatuh Tempo	1.756.098
Sudah Jatuh Tempo	902.610
> 90 – 180 Hari – Sudah Jatuh Tempo	652.010
> 180 – 360 Hari – Sudah Jatuh Tempo	418.307
> 360 Hari – Sudah Jatuh Tempo	676.660
Jumlah Utang Pemasok	4.405.685
Utang Subkontraktor	
> 30 – 90 hari	
Belum Jatuh Tempo	1.937.694
Sudah Jatuh Tempo	550.385
> 90 – 180 Hari – Sudah Jatuh Tempo	422.000
> 180 – 360 Hari – Sudah Jatuh Tempo	171.146
> 360 Hari – Sudah Jatuh Tempo	169.267
Jumlah Utang Subkontraktor	3.250.492
Utang Sewa Alat	
> 30 – 90 hari	
Belum Jatuh Tempo	121.312
Sudah Jatuh Tempo	156.035
> 90 – 180 Hari – Sudah Jatuh Tempo	84.632
> 180 – 360 Hari – Sudah Jatuh Tempo	68.802
> 360 Hari – Sudah Jatuh Tempo	18.934
Jumlah Utang Sewa Alat	449.715
Utang Upah	
> 30 – 90 hari	
Belum Jatuh Tempo	26.856
Sudah Jatuh Tempo	13.639
> 90 – 180 Hari – Sudah Jatuh Tempo	18.722
> 180 – 360 Hari – Sudah Jatuh Tempo	19.794
> 360 Hari – Sudah Jatuh Tempo	4.356
Jumlah Utang Upah	83.367

d. Utang Bruto Subkontraktor

Utang bruto subkontraktor merupakan utang kerja subkontraktor yang belum diberita acaranya, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

Saldo utang bruto kepada subkontraktor Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp6.965.872 juta, adapun rincian berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Per 31 Maret 2017	
Keterangan	
Perseroan	
Divisi I	2.831.124
Divisi III	797.039
Divisi II	1.126.307
Divisi V	592.038
Divisi VI	509.587
Divisi IV	356.132
Sub Jumlah	6.212.227
Entitas Anak	
WSBP	753.645
Sub Jumlah	753.645
Jumlah	6.965.872

Rincian Utang bruto subkontraktor berdasarkan pihak kreditur adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Per 31 Maret 2017	
Keterangan	
Pihak Berelasi	
PT Adhi Karya (Persero)	13.330
PT Brantas Abipraya (Persero)	11.529
PT PLN (Persero)	4.775
Koperasi Waskita	1
Jumlah Utang Bruto Subkontraktor Pihak Berelasi	29.635
Pihak Ketiga	
PT Len Railway System	989.856
PT Mitra Waskita	318.674

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Maret 2017
PT Adi Banuwa	331.726
PT Lancar Jaya Maju Abadi	273.292
PT Kisi Anak Negeri	245.709
PT Citra Baru Steel	226.085
PT China Harbour	178.434
PT Duta Cipta Pakar Perkasa	152.611
PT Berdikari Pondasi Perdana	148.730
PT China Harbour Indonesia	114.646
PT Wiswani Kharya Mandiri	92.896
PT Total Solusi Konstruksi	91.009
CV Amoghasida Sukses Abadi	82.082
PT Perentjana Djaja	80.810
PT Megah Bangun Baja Semesta	66.760
PT Hanil Jaya Steel	61.586
PT Livitra Dunia Baru	54.553
PT Lancar Jaya Mandiri Abadi	48.286
PT Mitra Tata Abadi Bersama	46.101
PT Bakrie Metal Industries	42.244
PT Geotechnical Engineering	41.720
PT Tajama Konstruksi	38.562
PT The Master Steel Manufactory	38.469
PT Jagat Baja Prima Utama	38.301
PT Andalas Karya Mulia	38.054
PT Brilliant Persada	37.196
PT Cahaya Teknindo Majumandiri	34.991
PT Spektrum Krisindo ElektriKa	34.058
PT Rajawali Sakti Utama	32.724
PT Teno Indonesia	32.480
PT Vadhana International	31.764
PT Geotekindo	31.709
PT Kingdom Indah	30.573
Lain-lain	2.829.544
Jumlah Utang Bruto Subkontraktor Pihak Ketiga	6.936.237
Jumlah	6.965.872

e. Uang Muka Kontrak Jangka Pendek

Uang muka kontrak jangka pendek merupakan uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi jangka pendek; uang muka tersebut akan dikompensasikan dengan progres pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan progres lapangan.

Saldo uang muka kontrak jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp455.104 juta, adapun rincian berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Maret 2017
Perseroan	
Divisi I	111.755
Divisi III	99.146
Divisi II	68.433
Divisi V	25.873
Divisi Precast	16.652
Divisi VI	8.595
Divisi IV	5.147
Sub Jumlah	335.601
Entitas Anak	
WKR	9.594
WSBP	109.908
Sub Jumlah	119.503
Jumlah	455.104

Uang muka kontrak jangka pendek berdasarkan pihak-pihak pemberi kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Maret 2017
Pihak Berelasi	
PT Ngawi Kertosono Jaya	75.610
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	64.229
PMT (Pelindo)	34.896
KSO Waskita – PP – HK	34.252
Lainnya (di bawah Rp 20 Miliar)	104.778
Sub Jumlah	313.764

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Maret 2017
Pihak Ketiga	
KSO CBMI - DDK	23.732
Lain - lain dibawah Rp 20 Milyar	117.608
Sub Jumlah	141.340
Jumlah	455.104

Uang muka pada WSBP merupakan uang muka yang diterima atas pesanan beton precast dari pelanggan.

f. Utang Bunga

Utang bunga merupakan biaya bunga yang sudah ditagihkan namun belum dibayarkan oleh CCT yang berasal dari pinjaman kepada Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun, pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp5.217.787.638.

g. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar Perseroan per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp173.976 juta, adapun rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Maret 2017
Beban Bunga Obligasi	72.322
Beban Umum	42.409
Beban Kantor	45.201
Beban Pegawai	11.280
Beban Operasional Proyek	276
Beban Gedung	2
Lain-lain	2.488
Jumlah	173.976

Biaya yang masih harus dibayar dari operasional proyek adalah utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasional proyek perusahaan, beban gedung, beban kantor, beban pegawai dan beban umum.

Pada tanggal 31 Maret 2017, beban bunga obligasi yang masih harus dibayar merupakan beban bunga atas obligasi Perseroan yang belum dibayar sebagai berikut:

- Periode tanggal 6 Maret sampai dengan 31 Maret 2017 untuk obligasi tahun 2012;
- Periode tanggal 18 Pebruari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 untuk obligasi tahun 2014 Tahap I; dan
- Periode tanggal 16 Januari sampai 31 Maret 2017 untuk obligasi tahun 2014 Tahap II.

Pada tanggal 31 Desember 2016, beban bunga obligasi yang masih harus dibayar merupakan beban bunga atas obligasi Perseroan yang belum dibayar sebagai berikut:

- Periode tanggal 6 September sampai dengan 30 September 2016 untuk obligasi tahun 2012;
- Periode tanggal 18 Pebruari sampai dengan 31 Maret 2016 untuk obligasi tahun 2014 Tahap I; dan
- Periode tanggal 16 Januari sampai dengan 31 Maret 2016 untuk obligasi tahun 2014 Tahap II.

h. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Saldo liabilitas jangka pendek lainnya Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp1.502.517 juta, adapun rinciannya sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Maret 2017
Dividen	640.955
PT Sarana Multi Infrastruktur	515.619
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	179.822
Jasa Produksi dan Tantiem	138.241
PT MNC Tol Investama	10.787
Iuran Dana Pensiun	5.750
PT Persada Tanjung Api-api	3.342
Jamsostek	2.730
Lain-lain	5.271
Jumlah	1.502.517

i. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp190.068 juta, adapun rincian berdasarkan jenis pajak yaitu sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Per 31 Maret 2017
Pasal 21	14.282
Pasal 22	17.520
Pasal 23	16.654
Pasal 4 (2) – Final	38.693
Pajak Pertambahan Nilai	2.519
Pajak Final Konstruksi	66
Pasal 29	100.334
Jumlah	190.068

2. Liabilitas Jangka Panjang

a. Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp5.007.987 juta, adapun perinciannya adalah sebagai berikut

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Per 31 Maret 2017
Pihak Berelasi	
Perseroan	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	396.637
Entitas Anak	
WSBP	
Utang Bank Sindikasi	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.448.924
WTR	
Utang Bank Sindikasi TJT	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Kredit Investasi	2.438.317
Kredit IDC	48.889
Utang Bank Sindikasi PT SMR:	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Kredit Investasi	493.911
Kredit IDC	35.404
Sub Jumlah	4.862.083
Pihak Ketiga	
WTR	
Utang Bank Sindikasi SMR	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
Kredit Investasi	77.488
Kredit IDC	3.508
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
Kredit Investasi	25.961
Kredit IDC	1.323
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	
Kredit Investasi	57.625
Kredit IDC	3.114
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(5.392)
Jumlah Biaya Restrukturisasi Utang yang Belum Direstruktutrisasi	(17.722)
Sub Jumlah	145.904
Jumlah	5.007.987

PERSEROAN

Mandiri

Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional III sebesar Rp4.200.000.000.000 dari Mandiri, sesuai dengan surat Perjanjian Pemberian Kredit tanggal 22 Nopember 2016 yang digunakan sebagai pembiayaan belanja modal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Tol Semarang-Batang, dengan jangka waktu pinjaman 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sejak perjanjian di tandatangani dengan suku bunga 9,25% per tahun.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman jangka panjang Perseroan ke Mandiri adalah sebesar Rp396.636.814.367.

ENTITAS ANAK – WSBP

Utang Bank Sindikasi BNI dan BRI

Berdasarkan surat No. LMC1/2/442/R dari Akta Perjanjian Kredit No. 66 tanggal 30 Oktober 2015 oleh Notaris Aryani L. Rachim, S.H., di Jakarta. WSBP memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan perjanjian sindikasi dari BNI dan BRI untuk proyek Tol Bekasi- Cawang-Kampung Melayu Tahap I sebesar Rp1.705.720.000.000. Jangka waktu pinjaman selama 3 tahun sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 10 Agustus 2018. Fasilitas-fasilitas pinjaman ini terdiri dari:

- a. BNI sebesar Rp852.860.000.000.
- b. BRI sebesar Rp852.860.000.000.

Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Tagihan/ piutang proyek WSBP yang dibiayai diikat fidusia sebesar 100% dari nilai kontrak.
- b. Kepemilikan 60% saham KKDM oleh WTR.
- c. Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (*cessie*), termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk pihak ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (*cessie*).
- d. Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara fidusia sebesar 100% dari nilai pertanggungan.

Pembatasan terhadap tindakan:

- a. Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
- b. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar debitur yang dapat mengurangi kemampuan debitur melunasi fasilitas kredit.
- c. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.
- d. Mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain yang terkait dengan aset tertentu yang dijamin kepada debitur sindikasi.
- e. Melakukan perubahan atas perjanjian jual beli bersyarat dengan hak untuk membeli kembali atas saham KKDM No. 24 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- f. Menyewakan aset yang dijamin di Kreditur Sindikasi kepada pihak lain.
- g. Melakukan penjualan aset tetap per tahun melebihi nilai Rp 500.000.000.000.

Berdasarkan perjanjian ini, WSBP diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh WSBP setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh BNI dan BRI.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman jangka panjang WSBP ke BNI dan BRI adalah sebesar Rp1.448.924.225.893

ENTITAS ANAK – WTR

Utang Bank Sindikasi TJT, BRI

Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 29 Mei 2015 dari Muchlis Patahna, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, TJT dan BRI menandatangani perjanjian kredit dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1.915.000.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp1.754.000.000.000 dan Rp161.000.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Ciawi – Sukabumi seksi 1 (Ciawi - Cigombong) 15,35 Km.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman jangka panjang TJT ke BRI adalah sebesar Rp2.487.206.149.302.

Utang Bank Sindikasi SMR, BNI, BRI, BJB, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk (“BPD Jateng”) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“BPD Jatim”)

Berdasarkan Akta Notaris Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., No. 18 tanggal 31 Januari 2008, SMR telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan BNI, BRI, BJB, BPD Jateng dan BPD Jatim.

Kelima bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1.356.275.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp1.242.143.000.000 dan Rp114.132.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Kanci - Pejagan.

Jangka waktu kredit investasi dan kredit *Interest During Construction* (IDC) adalah 38 triwulan atau 9,5 tahun termasuk masa tenggang 8 triwulan atau 2 tahun sejak tanggal efektif. Suku bunga pinjaman ini adalah rata-rata tertimbang atas dasar suku bunga yang disampaikan masing-masing kreditur kepada agen fasilitas untuk pertama kali adalah sebesar 14,5% per tahun.

Berdasarkan Akta Notaris Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., No. 39 tanggal 16 Agustus 2012, Perseroan telah menandatangani perjanjian perubahan atas perjanjian kredit sindikasi dengan BNI, BRI, BJB, BPD Jateng dan BPD Jatim dimana dilakukan restrukturisasi atas utang WTR dengan merubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi awal, antara lain:

- Memperpanjang jangka waktu pelunasan utang menjadi tanggal 30 Januari 2023 untuk kredit investasi dan kredit IDC dengan tanggal pembayaran awal (*prepayment*) pada 31 Desember 2016;
- Mengubah suku bunga utang menjadi minimal 6% per tahun sampai dengan tanggal *prepayment* dan 12% per tahun setelah tanggal *prepayment* sampai dengan tanggal pelunasan utang dan menetapkan biaya tambahan yaitu *exit fee* sebesar 6% per tahun dan *administration fee* sebesar minimal 3% per tahun sampai dengan tanggal *prepayment*; dan
- Mengijinkan WTR untuk mengubah susunan kepemilikan saham.

Berdasarkan Akta Notaris Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., No. 18 tanggal 31 Mei 2013, WTR telah menandatangani addendum restrukturisasi utang WTR atas Perjanjian Kredit Sindikasi dengan BNI, BRI, BJB, BPD Jateng dan BPD Jatim dengan mengubah beberapa ketentuan antara lain:

- Mengubah suku bunga utang menjadi 11% per tahun setelah tanggal *prepayment* sampai dengan tanggal pelunasan utang dan mengubah biaya *exit fee* sebesar 4% per tahun dan *administration fee* sebesar minimal 1% per tahun sampai dengan tanggal *prepayment*; dan
- Mengubah susunan jaminan WTR.

Jaminan atas pinjaman yang disyaratkan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi telah dipenuhi oleh WTR.

Pada tanggal 31 Maret 2017 saldo pinjaman jangka panjang SMR ke BNI, BRI, BJB, BPD Jateng dan BPD Jatim adalah sebesar Rp 675.219.748.654.

b. Utang Pembelian Aset Tetap Jangka Panjang

WTR menandatangani Perjanjian Utang Pembelian Aset Tetap untuk pembelian kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Per 31 Maret 2017
PT MNC Finance	191
PT Astra Sedaya Finance	285
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(153)
Bagian Jangka Panjang	323

Utang pembelian aset tetap dikenakan bunga sebesar 17% per tahun dan jatuh tempo paling akhir 23 Mei 2018. Utang pembelian aset tetap dijamin dengan aset yang dibeli.

c. Utang Obligasi – Bersih

Saldo utang obligasi Perseroan per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp7.223.339 juta, adapun rinciannya sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Per 31 Maret 2017
Nominal	7.232.000
Biaya Emisi Obligasi	(15.557)
Akumulasi Amortisasi	6.896
Jumlah	7.223.339
Biaya Emisi Obligasi	15.557
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi	(6.896)
Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi	8.661

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan No. 02 tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 sebesar Rp 1.657.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dengan nilai Rp747.000.000.000.
- Seri B dengan dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun dengan nilai Rp910.000.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan No. 55 tanggal 9 September 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016, dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dengan nilai Rp900.000.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan No. 22 tanggal 4 April 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan menerbitkan Obligasi berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I tahun 2016, dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun dengan nilai Rp2.000.000.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan No. 29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II tahun 2015 sebesar Rp1.500.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan dengan tingkat bunga tetap 11,10% per tahun dengan nilai Rp1.150.000.000.000.
- Seri B dengan dengan tingkat bunga tetap 10,40% per tahun dengan nilai Rp350.000.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan No. 11 tanggal 4 April 2012 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Perwalianamanatan No. 98 tanggal 26 April 2012 sehubungan dengan Akta Perubahan II Perjanjian Perwalianamanatan No. 58 tanggal 23 Mei 2012 yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Perseroan telah menerbitkan Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 sebesar Rp750.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun dengan nilai Rp75.000.000.000. Obligasi ini telah dibayar lunas pada tanggal 5 Juni 2015.
- Seri B dengan dengan tingkat bunga tetap 19,75% per tahun dengan nilai Rp675.000.000.000.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tanggal 14 Maret 2017, peringkat obligasi adalah idA- (*positive outlook*).

Beban bunga dan amortisasi biaya transaksi atas utang obligasi di 2017 adalah sebesar Rp152.633.162.458. Sedangkan beban bunga yang belum dibayarkan pada 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp72.321.611.114.

Utang obligasi ini mensyaratkan Perseroan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
- *Debt to Equity* tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu), dan
- *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization* (EBITDA) dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).

Evaluasi pemenuhan atas persyaratan rasio dari penerbitan obligasi dilakukan pada setiap akhir tahun.

d. Utang Lain-lain Jangka Panjang

Saldo utang lain-lain jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp1.245.823 juta, adapun rinciannya sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> Per 31 Maret 2017
Pihak Berelasi	
Lain – lain	23.001
Sub Jumlah	23.001
Pihak Ketiga	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.244.535.951.745
PT Daya Anugrah Manunggal	725.820.000
Lain - lain	561.296.678
Sub Jumlah	1.245.823.068.423
Jumlah	1.245.823.091.424

e. Uang Muka Kontrak Jangka Panjang

Saldo uang muka kontrak jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp932.837 juta, adapun rinciannya sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Maret 2017
Pihak Berelasi	
PT Solo Ngawi Jaya	124.784
Lain - lain (di bawah Rp 20 Milyar)	22.761
Jumlah Uang Muka Kontrak Jangka Panjang Pihak Berelasi	147.545
Pihak Ketiga	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	397.718
Kementerian Perhubungan	144.393
<i>Ministry of Transport and Communication of the Democratic Republic of Timor-Leste</i>	52.527
Pemerintah Daerah	75.601
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste	38.543
Bandar Udara Internasional Jawa Barat	22.901
Lain - lain (di bawah Rp 20 Milyar)	53.608
Jumlah Uang Muka Kontrak Jangka Panjang Pihak Ketiga	785.292
Jumlah	932.837

f. Liabilitas Imbalan Kerja

Rincian kewajiban imbalan pascakerja sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan kewajiban manfaat jangka panjang lainnya berdasarkan entitas yang disajikan dalam laporan keuangan interim konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Maret 2017
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	79.881
PT Cimanggis Cibitung Tollways	482
PT Semesta Marga Raya	2.810
PT Trans Jabar Tol	2.157
PT Sriwijaya Markmore Persada	937
PT Waskita Beton Precast	2.935
Jumlah	89.201

Perseroan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan.

Nilai kewajiban yang termasuk dalam laporan posisi keuangan interim dari manfaat pasca-kerja di bawah UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan kewajiban manfaat jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Maret 2017
Imbalan pascakerja sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003	61.461
Manfaat Jangka Panjang Lainnya	18.420
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja – Akhir	79.881

PERSEROAN

Dana pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan KEP-84/MK/IV/2/1973 tanggal 28 Pebruari 1973. Pada tahun 2006, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama No. WK: L.20/P/WK/2006 dan No. AJS: 079.SJ.U.076 antara Perseroan dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 28 Juli 2006 tentang Pengelolaan Program Asuransi Pesangon Kumpulan dan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. L.20/P/WK/2006; No. 079 Sj. U. 0706 tanggal 25 April 2008.

Imbalan kerja memberikan eksposur Perseroan terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, instrumen utang dan real estat. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan real estat untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan saling hapus oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

1. Program Imbalan Pasca-kerja

Perseroan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Perseroan telah membukukan liabilitas manfaat karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan teknik aktuarial, dalam rangka penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja.

Dana pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan KEP-84/MK/IV/2/1973 tanggal 28 Pebruari 1973.

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Per 31 Maret 2017
Nilai Kini Kewajiban	283.939
Nilai Wajar Aset Program	(222.478)
Liabilitas Bersih yang Timbul dari Kewajiban Imbalan Pasti	61.461

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Per 31 Maret 2017
Saldo awal nilai kini liabilitas	280.479
Biaya jasa kini	5.014
Biaya bunga	5.597
Imbalan yang dibayarkan	(6.434)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:	
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman	(2.733)
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(2.016)
Saldo Akhir Nilai Kini Liabilitas	283.939

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Per 31 Maret 2017
Nilai wajar aset program – awal	221.517
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian):	
Imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam beban bunga neto)	4.430
Kontribusi pemberi kerja	8.619
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(6.019)
Pembayaran manfaat	(6.069)
Saldo Akhir Nilai Kini Liabilitas	222.478

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan menurun sebesar Rp3.976.512.093 (meningkat sebesar Rp3.895.624.330).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan meningkat (menurun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp13.444.276.558 (menurun sebesar Rp13.461.895.466).
- Jika harapan hidup meningkat (menurun) dalam satu tahun untuk pria dan wanita, kewajiban imbalan pasti akan meningkat Rp9.309.768.093 (menurun sebesar Rp9.329.957.672).

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah 17,03 tahun dan 31 Desember 2016 adalah 17,21 tahun.

2. Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Perseroan juga menyediakan manfaat cuti besar untuk karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun dalam bentuk satu kali gaji.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Per 31 Maret 2017
Saldo awal nilai kini kewajiban manfaat jangka panjang lainnya	-
Biaya jasa kini	634
Biaya bunga	364
Biaya jasa lalu	18.202
(Keuntungan) kerugian curtailment	(781)
Saldo Akhir Nilai Kewajiban Manfaat Jangka Panjang Lainnya	18.420

Perhitungan imbalan pasca-kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Praptasentosa Gunajasa. Asumsi aktuarial pada tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut:

Keterangan	Per 31 Maret 2017
Tingkat Diskonto	7,50%
Tingkat Kenaikan Gaji	8,00%
Tingkat Mortalitas	TMI 2011
Tingkat Cacat	0% TMI 2011
Umur Pensiun Normal	56

3. Komitmen dan Kontijensi

Perseroan

Berdasarkan Perjanjian Pemesanan Material Besi Beton Perseroan dengan PT The Master Steel Manufactory dengan perjanjian No. 46/SPPM/WK/D.II/2016 dengan nilai jual beli material dihitung dari volume dan harga satuan senilai Rp30.250.000.000 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pengadaan sampai dengan 30 Juni 2017. Cara pembayaran berupa uang muka sebesar 20% dari nilai jual beli sebesar Rp5.500.000.000 (tidak termasuk PPN), pembayaran selanjutnya sebesar Rp22.000.000.000, dimana akan diterbitkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Untuk pencairan SKBDN dilakukan secara bertahap sesuai dengan progress material diterima dilapangan dan dipotong secara proporsional dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan Material (BAPM) dan Berita Acara Pembayaran (BAP).

Entitas Anak, WKE dan WSE

WKE dan WSE menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) pada tanggal 23 Maret 2015 dengan perusahaan listrik milik negara, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk ("PLN"). Berdasarkan ketentuan PPA, PLN telah berkomitmen untuk membeli kapasitas pembangkit listrik WKE dan WSE dan seluruh hasil listrik selama dua puluh tahun sampai 2036.

WKE dan WSE telah membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pabrik yang berlokasi di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Setelah beroperasi secara komersial dalam Proyek, WKE dan WSE berkewajiban menyediakan kepada PLN keluaran listrik bersih dari fasilitas Proyek, yang akan dibeli oleh PLN pada jumlah yang ditentukan berdasarkan formula yang tercantum dalam PJBL. Jumlah yang harus dibayar oleh PLN adalah jumlah keluaran listrik bersih yang dihasilkan. Jangka waktu PPA dimulai pada tanggal 9 Desember 2016 dan akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2036, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan PJBL, sebagaimana telah diubah.

PLN memiliki opsi untuk membeli hak, kepemilikan, dan kepentingan WKE dan WSE dalam proyek dengan nilai terminasi berdasarkan formula tertentu yang tercantum dalam PPA. Harga beli yang harus dibayar oleh PLN, dalam hal PLN melakukan opsi pembelian, mengalami penurunan seiring menjelang berakhirnya PJBL.

Pada tanggal 1 Juni 2016, WKE dan WSE dan PLN menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Di bawah PJBL, kedua belah pihak sepakat untuk mengubah hal-hal tertentu dari PJBL awal.

Entitas Anak, WKR

Dalam rangka melakukan kegiatan usaha, WKR memiliki perjanjian-perjanjian penting. Perjanjian dan ikatan penting yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 24 Maret 2016, WKR mengadakan perjanjian manajemen dengan PT Dafam Hotel Management (Operator). Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Dafam Hotel Management bertanggungjawab sebagai operator atas Hotel Dafam Teraskita milik WKR.

Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian ini dapat diperpanjang jika disetujui oleh kedua belah pihak paling lambat 90 hari kerja sebelum tanggal berakhirnya.

PT Dafam Hotel Management sebagai Operator berhak menerima:

- a) *Technical Assistant Fee* sebesar Rp600.000.000 yang sudah dibayarkan lunas seluruhnya oleh WKR kepada PT Dafam Hotel Management berdasarkan Nota Kesepahaman No. 02/MOU/ WKR/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang telah ditandatangani sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- b) *Base fee* sebesar 2% pada tahun pertama dan 2,5% di tahun-tahun berikutnya dari Total Pendapatan Operasional.
- c) *Incentive Fee* berdasarkan tinggi rendahnya *Gross Operating Profit (GOP)*:
 - % dari GOP apabila GOP kurang dari 35% dari Pendapatan Hotel Total;
 - 5% dari GOP apabila GOP lebih dari 35% dan kurang dari atau sama dengan 45% dari Pendapatan Hotel Total; dan
 - 7% dari GOP apabila GOP lebih dari 45% dari Pendapatan Hotel Total.
- d) *Sales and Marketing Fee* adalah 1% dari Pendapatan Kotor kamar per bulan.

Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Asiana Senopati

Pada tanggal 25 Juni 2015, Perseroan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 40 dengan PT Asiana Senopati dalam rangka pengembangan tanah seluas 5.453 m² yang terletak di Jalan Senopati Dalam RT 02/RW 03, kelurahan Senayan, kecamatan Kebayoran Baru. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 51% dan PT Asiana Senopati sebesar 49%, dengan modal awal sebesar Rp603.345.343.137.

Perjanjian KSO dengan PT Perintis Trinita Properti

Pada tanggal 26 Mei 2015, Perseroan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 166 dengan PT Perintis Trinita Properti dan PT Perintis Trusmi Properti dalam rangka pengembangan tanah seluas 5.000 m² yang terletak di Jalan Sutera Boulevard, Alam Sutera, Tangerang. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 40,8%, PT Perintis Trinita Properti sebesar 39,2%, dan PT Perintis Trusmi Properti sebesar 20% dengan modal awal sebesar Rp125.000.000.000.

Pada tanggal 30 Oktober 2015, terdapat pembaharuan perjanjian KSO Waskita Trinita II. Disepakati bahwa posisi PT Waskita Trinita Properti digantikan oleh PT Sirius Terang Cemerlang. Seluruh hak dan kewajiban PT Waskita Trinita Properti dialihkan kepada PT Sirius Terang Cemerlang.

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 3 Oktober 2016, terdapat perubahan perjanjian KSO Waskita Trinita II yang berisi komposisi penyertaan saham yang baru, yaitu WKR sebesar 50,8% atau senilai Rp69.646.800.000 dan PT Sirius Terang Cemerlang sebesar 49,2% atau senilai Rp67.453.200.000.

Perjanjian KSO dengan PT Asiana Senopati

Pada tanggal 25 Juni 2015, Perseroan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 40 dengan PT Asiana Senopati dalam rangka pengembangan tanah seluas 5.453 m² yang terletak di Jalan Senopati Dalam RT 02/RW 03, kelurahan Senayan, kecamatan Kebayoran Baru. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 51% dan PT Asiana Senopati sebesar 49%, dengan modal awal sebesar Rp603.345.343.137.

Perjanjian KSO dengan PT Darmo Permai

Pada tanggal 21 Mei 2014, Perseroan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 6 dengan PT Darmo Permai dalam rangka pengembangan tanah seluas 34.089 m² yang terletak di Segi 8 Darmo Jalan Raya Darmo Permai III, Surabaya Barat. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 51%, PT Darmo Permai sebesar 49% dengan modal awal sebesar Rp426.112.500.000.

Perjanjian KSO dengan PT Dalawa Paralia

Pada tanggal 5 Mei 2015, Perseroan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 2 dengan PT Dalawa Paralia Leping dalam rangka pengembangan tanah seluas 29.020 m² yang terletak di Kelurahan Gelgel, Kabupaten Klungkung, Bali. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham di dalam KSO Waskita Dalawa terdiri dari WKR sebesar 51%, PT Dalawa Paralia Leping sebesar 49% dengan modal awal sebesar Rp116.080.000.000.

Perjanjian KSO dengan PT Graha Jasa Ekatama

Pada tanggal 6 Juni 2016, Perseroan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 17 dengan PT Graha Jasa Ekatama dalam rangka pengembangan tanah seluas 11.090 m² di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban. Komposisi penyertaan saham di dalam KSO Waskita Ekatama terdiri dari WKR sebesar 60%, PT Graha Jasa Ekatama sebesar 40% dengan modal awal sebesar Rp331.000.000.000.

Perjanjian KSO dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia

Pada tanggal 10 Oktober 2016, Perseroan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 2079 dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam rangka pengembangan tanah seluas 7.025 m² di Jalan MT. Haryono Kav 12-13, Jakarta Timur. Jangka waktu operasi berlaku selama 48 bulan dan perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan modal di dalam KSO RNI – Waskita terdiri dari PT Rajawali Nusantara Indonesia berupa tanah seluas 7.052 m², dan WKR berupa modal kerja awal sebesar Rp361.912.928.457.

Pada akhir periode perjanjian KSO, PT Rajawali Nusantara Indonesia akan menerima bagi hasil sebesar Rp367.544.705.882.

Perkembangan Material Terkini

Pada tanggal 30 Juni 2017 saldo utang bank Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp23.317.149.069.647 atau meningkat sebesar Rp7.510.656.249.437 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp15.806.492.820.210. Peningkatan utang bank tersebut terutama berasal dari peningkatan utang bank untuk keperluan modal kerja, terutama berasal dari:

- a. BNI sebesar Rp4.278.325.086.979;
- b. Indonesia Eximbank sebesar Rp1.372.275.920.438;
- c. PT Bank Maybank Indonesia sebesar Rp799.810.892.839;
- d. Panin sebesar Rp595.104.315.210;
- e. Mandiri sebesar Rp413.821.313.660;
- f. BJB sebesar Rp283.212.260.549;
- g. DBS sebesar Rp250.000.000.000;
- h. PT Bank Bukopin sebesar Rp226.355.105.107;

- i. PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp222.562.500.000;
- j. PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp199.479.118.131;
- k. BTN sebesar Rp120.000.000.000;
- l. PT Bank UOB Indonesia sebesar Rp113.596.925.977;
- m. Bank of Tokyo Mitsubishi Indonesia UFJ, Ltd sebesar Rp100.625.000.000;
- n. PT BPD Banten sebesar Rp90.000.000.000; dan
- o. BCA sebesar Rp70.037.900.189.

Peningkatan utang bank tersebut juga diimbangi dengan penurunan utang bank kepada BRI sebesar Rp1.675.601.727.684 di PT Trans Jabar Tol (Entitas Anak tidak langsung).

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 MARET 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 23 AGUSTUS 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*Member Firm of RSM International*), auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	9.153.434	10.655.996		5.511.188
Investasi Jangka Pendek	13.448	8.448		10.664
Piutang Usaha - Bersih				
Pihak Berelasi	3.784.963	3.435.212		438.200
Pihak Ketiga	1.150.158	882.248		1.209.920
Piutang Retensi - Bersih				
Pihak Berelasi	407.104	376.206		259.039
Pihak Ketiga	588.402	590.491		472.580
Piutang Lain-lain Lancar - Bersih				
Pihak Berelasi	3.079.821	2.777.924		66.147
Pihak Ketiga	3.957.396	2.839.950		61.623
Piutang Ventura Bersama	2.443.651	745.981		736.250
Persediaan	2.307.348	2.556.732		826.384
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Bagian Lancar				
Pihak Berelasi	6.146.316	5.485.979		2.489.077
Pihak Ketiga	6.282.255	5.485.823		2.090.638
Pajak Dibayar di Muka	1.281.008	1.159.443		679.791
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	1.802.581	2.706.957		854.123
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	-		100.000
Total Aset Lancar	42.397.885	39.707.390		15.805.624
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	2.560.811	2.070.701		1.571.853
Piutang Usaha Tidak Lancar kepada Pihak Berelasi - Bersih	-	180.002		2.269.227
Piutang Lain-lain Tidak Lancar				
Pihak Berelasi	142.689	138.110		134.806
Pihak Ketiga	-	163.752		71.519
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa Bagian Tidak Lancar				
Pihak Berelasi	2.091.472	1.424.498		344.646
Pihak Ketiga	777.785	713.420		180.320
Properti Investasi	53.411	53.411		259.970
Investasi Jangka Panjang Lainnya	421.154	548.404		540.222
Aset Tetap - Bersih	3.484.239	3.275.335		1.923.144
Goodwill	1.710.769	1.710.769		1.390.681
Aset Tak Berwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol	14.198.619	11.153.744		5.580.332
Aset Pajak Tangguhan	153.673	195.138		182.046
Aset Lain-lain	122.969	98.338		54.721
Total Aset Tidak Lancar	25.717.591	21.725.622		14.503.487
Total Aset	68.115.476	61.433.012		30.309.111
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Bank Jangka Pendek				
Pihak Berelasi	6.318.058	6.799.481		2.518.602
Pihak Ketiga	4.475.056	5.263.566		675.304
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Pendek	2.692.519	3.281.288		289.295
Utang Usaha				

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	2015
Pihak Berelasi	1.310.353	3.183.979	273.582	
Pihak Ketiga	9.280.507	4.177.716	5.198.439	
Utang Bruto Subkontraktor				
Pihak Berelasi	29.635	341.533	-	
Pihak Ketiga	6.936.237	6.949.907	3.300.533	
Biaya yang Masih Harus Dibayar	173.976	251.301	116.289	
Utang Pajak	190.068	409.815	439.396	
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	455.104	557.260	739.317	
Utang Bunga	5.218	-	262.553	
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	5.392	5.392	5.000	
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Jangka Pendek	153	224	84	
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	1.502.517	239.294	108.970	
Total Liabilitas Jangka Pendek	33.374.793	31.460.756	13.927.365	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Bank Jangka Panjang				
Pihak Berelasi	4.862.083	4.002.281	1.684.238	
Pihak Ketiga	145.904	145.607	191.636	
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Panjang	175.000	175.000	-	
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang				
Pihak Berelasi	147.545	219.672	368.916	
Pihak Ketiga	785.292	1.058.643	907.187	
Liabilitas Pajak Tangguhan	8.421	8.611	-	
Utang Lain-lain Jangka Panjang				
Pihak Berelasi	0	854	41.407	
Pihak Ketiga	1.245.823	1.953.200	745.445	
Utang Obligasi - Bersih	7.223.339	5.567.525	2.670.635	
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Jangka Panjang	323	305	144	
Liabilitas Imbalan Kerja	89.201	67.340	67.932	
Total Liabilitas Jangka Panjang	14.682.931	13.199.038	6.677.540	
Total Liabilitas	48.057.724	44.659.794	20.604.904	
EKUITAS				
Modal Saham				
Modal Saham – Nilai Nominal Rp100 per Saham pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015				
Modal Dasar – 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 25.999.999 Saham Seri B pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 13.573.709.450 dan 13.573.654.550 dan 13.572.493.310 Saham Seri B pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015	1.357.371	1.357.365	1.357.249	
Tambahan Modal Disetor	5.882.695	5.882.677	5.881.621	
Saldo Laba				
Telah Ditentukan Penggunaannya	1.047.614	578.286	368.738	
Belum Ditentukan Penggunaannya	2.134.148	2.755.876	1.435.902	
Komponen Ekuitas Lainnya	494.871	495.349	503.585	
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	10.916.698	11.069.553	9.547.095	
Kepentingan Non-Pengendali	9.141.054	5.703.665	157.112	
Total Ekuitas	20.057.752	16.773.219	9.704.207	
Total Liabilitas dan Ekuitas	68.115.476	61.433.012	30.309.111	

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Pendapatan Usaha	7.534.796	3.071.542	23.788.322	14.152.753
Beban Pokok Pendapatan	(6.240.393)	(2.551.915)	(19.820.484)	(12.231.515)
Laba Bruto	1.114.403	519.627	3.967.838	1.921.238
Beban Penjualan	(9.291)	(8.353)	(33.153)	(37.411)
Beban Umum dan Administrasi	(157.585)	(92.410)	(755.130)	(480.433)
Beban Pajak Final	(65.446)	(52.757)	(324.304)	(280.914)
Pendapatan Bunga	98.851	37.696	187.483	72.801
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih	(1.015)	(605)	(732)	13.192
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	-	-	-	539
Selisih Penilaian Properti Investasi	-	-	-	92.241
Pendapatan Lain-lain	84.895	13.771	147.475	185.652
Beban Lain-Lain	(87.244)	(4.899)	(43.695)	(39.919)
Laba Sebelum Beban Keuangan, Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	977.568	412.070	3.145.782	1.446.986
Beban Keuangan	(466.096)	(169.679)	(982.836)	(340.008)
Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	10.523	(35.158)	(7.357)	10.112
Laba Sebelum Pajak	521.995	207.233	2.155.589	1.117.090
Beban Pajak Penghasilan	(96.323)	(83.121)	(342.520)	(69.499)
Laba Periode Berjalan	425.672	124.112	1.813.069	1.047.591
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				
Surplus Revaluasi Aset Tetap	2.927	-	(4.510)	510.501

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti-Bersih	(5.462)	-	4.350	7.987
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi	-	-	-	-
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	(3.405)	(6.261)	(3.726)	1.039
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan	(5.940)	(6.261)	(3.885)	519.527
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN	419.732	117.852	1.809.183	1.567.118
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	367.714	127.311	1.713.261	1.047.738
Kepentingan Nonpengendali	57.958	(3.199)	99.808	(147)
LABA PERIODE BERJALAN	425.672	124.112	1.813.069	1.047.591
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	361.774	121.051	1.709.375	1.567.265
Kepentingan Nonpengendali	57.958	(3.199)	99.808	(147)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN	419.732	117.852	1.809.183	1.567.118
Laba per Saham:				
- Dasar	27,09	10,96	147,48	90,19
- Dilusian	-	-	147,47	90,18

*tidak diaudit

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	3.377.962	1.382.812	9.104.677	11.534.114
Pengeluaran Kas kepada Pemasok	(3.010.712)	(3.535.465)	(14.764.976)	(10.364.998)
Pengeluaran Kas kepada Karyawan dan Direksi	(96.473)	(52.142)	(427.464)	(290.632)
Kas Dihasilkan dari Operasi	270.777	(2.204.795)	(6.087.763)	878.484
Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka	99.584	38.140	186.874	66.889
Pembayaran Beban Keuangan	(466.096)	(169.679)	(982.836)	(340.009)
Penerimaan Restitusi Pajak	-	-	438	296.588
Pembayaran Pajak	(495.441)	(309.713)	(879.127)	(243.980)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(591.176)	(2.646.047)	(7.762.414)	657.972
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan dari Ventura Bersama	49.865	12.744	75.191	156.257
Penempatan pada Ventura Bersama	(264.793)	(1.721)	(76.477)	(567.053)
Penempatan Deposito	(1.768.788)	-	(5.302.124)	-
Penerimaan Pencairan Deposito	2.891.839	-	2.005.953	13.612
Perolehan Aset Tetap	(296.683)	(494.775)	(611.420)	(938.317)
Penerimaan Penjualan Aset Tetap	-	-	-	1.072
Penerimaan Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	25.000	100.000	75.000
Perolehan Aset Tak Berwujud	(3.044.875)	(296.296)	(5.573.412)	(5.580.332)
Penempatan Investasi Asosiasi dan Jangka Panjang Lainnya	(305.941)	(10.050)	(170.432)	(87.122)
Penerimaan atas Pelepasan Penyertaan pada Entitas Asosiasi	217.000	-	-	-
Pengurangan Penyertaan pada Entitas Asosiasi	(133.032)	-	-	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.655.408)	(765.098)	(9.552.721)	(6.926.883)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pelunasan Utang Obligasi	-	-	-	(75.000)
Pembayaran Emisi Obligasi	(2.153)	-	(5.834)	(2.215)
Penerimaan Penerbitan Obligasi	1.657.000	-	2.900.000	1.500.000
Biaya Emisi Penawaran Umum Saham	-	-	-	(37.329)
Penerimaan Pinjaman Bank	2.818.317	5.346.676	29.502.305	20.286.224
Pembayaran Pinjaman Bank	(5.400.827)	(2.737.095)	(18.398.829)	(17.147.021)
Penerimaan Setoran Modal Saham	-	-	116	384.499
Penerimaan Tambahan Setoran Modal	-	-	640	5.000.757
Pembayaran Dividen Tunai	-	-	(209.548)	(100.306)
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Pendek	-	-	(700.000)	-
Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Pendek	(750.000)	200.243	3.923.737	289.295
Penerimaan Setoran dari Entitas Non-Pengendali	3.422.417	-	5.446.746	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.744.754	2.809.824	22.459.333	10.098.904
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.501.830)	(601.321)	5.144.198	3.829.993
KEUNTUNGAN SELISIH KURS YANG BELUM DIREALISASI	(733)	(445)	610	5.912
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	10.655.997	5.511.188	5.511.188	1.675.283
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	9.153.434	4.909.422	10.655.996	5.511.188

*tidak diaudit

Rasio Keuangan Konsolidasian Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember
	2017	2016	2015
Rasio Pertumbuhan ⁽¹⁾			
Total Aset (%)	10,88	102,69	141,66
Total Liabilitas (%)	7,61	116,74	110,75
Total Ekuitas (%)	19,58	72,84	250,97
Pendapatan Usaha (%)	139,45	68,08	37,58
Laba Rugi Komprehensif (%)	256,15	15,45	232,10
Rasio Profitabilitas			
Marjin Laba Bruto (%) ⁽²⁾	15,15	16,68	13,58
Marjin <i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i> (EBITDA) (%) ⁽³⁾	14,70	15,61	15,59
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan (%) ⁽⁴⁾	5,71	7,61	11,07
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset (%) (disetahunkan) ⁽⁵⁾	2,63	3,95	4,89
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas (%) (disetahunkan) ⁽⁶⁾	9,25	13,70	16,80
Rasio Likuiditas			
Rasio kas (x) ⁽⁷⁾	0,27	0,34	0,40
Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>) (x) ⁽⁸⁾	1,27	1,26	1,13
EBITDA terhadap beban bunga (x) ⁽⁹⁾	3,08	3,78	6,49
Rasio Solvabilitas			
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x) ⁽¹⁰⁾	2,40	2,66	2,12
Rasio liabilitas terhadap total aset (x) ⁽¹¹⁾	0,71	0,73	0,68
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x) ⁽¹²⁾	1,29	1,50	0,83
Pinjaman berbunga terhadap EBITDA (x) (disetahunkan) ⁽¹³⁾	6,02	6,80	3,64

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.
- (2) Dihitung dengan membagi laba bruto dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi EBITDA dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (4) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang disetahunkan dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- (5) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang disetahunkan dengan rata-rata jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan dengan periode/tahun sebelumnya.
- (6) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang disetahunkan dengan rata-rata jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan dengan periode/tahun sebelumnya.
- (7) Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (8) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (9) Dihitung dengan membagi laba sebelum beban penyusutan dan beban keuangan dengan beban keuangan, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (10) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (11) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (12) Dihitung dengan membagi jumlah pinjaman berbunga dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- (13) Dihitung dengan membagi jumlah pinjaman berbunga dengan EBITDA yang disetahunkan, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

Tingkat Persyaratan Rasio Dalam Perjanjian Utang

Keterangan	Persyaratan Kredit
Indonesia Eximbank	
<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	Maksimal 3x
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
KMK 1	
<i>Current ratio</i>	Minimum 1x
DER	Maksimal 4x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ("DSCR")	Minimum 100%
KMK 2	
<i>Current ratio</i>	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimum 100%
KMK 3	
<i>Current ratio</i>	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimum 100%
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	Tidak ada persyaratan rasio
PT Bank BNI (Persero) Tbk	
<i>Current ratio</i>	Minimum 1x
DER	Maksimal 4x
DSCR	Minimum 100%
PT Bank BRI (Persero) Tbk	
<i>Current ratio</i>	Minimum 1x
DER	Maksimal 5,67x

Keterangan	Persyaratan Kredit
PT Bank Panin Tbk	
<i>Current ratio</i>	Minimum 1x
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas	Maksimal 3x
EBITDA terhadap beban bunga	Minimum 1x
PT Bank UOB Indonesia	
<i>Current ratio</i>	Minimal 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimum 1,5x
PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	
<i>Current ratio</i>	Minimal 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimal 1,5x
PT Bank BNI Syariah	
<i>Current ratio</i>	Minimal 1x
DER	Maksimal 2,3x
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	
<i>Current ratio</i>	Minimal 1x
DER	Maksimal 2,5x
DSCR	Minimal 1x
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	
<i>Current ratio</i>	Minimal 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimal 1,1x

Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN KECUALI UNTUK HAL-HAL YANG TELAH DISEBUTKAN PADA SUB-BAB I MENGENAI UTANG JANGKA PENDEK.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha Perseroan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member Firm of RSM International, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

1. UMUM

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama "Volker Aaneming Maatschappij N.V." yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (PN) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No.06 tanggal 4 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0016611 tanggal 5 Februari 2016 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015956.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016, dimana para pemegang saham menyetujui untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui pelaksanaan Opsi Beli Seri B sehubungan dengan Mesop sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan Komposisi permodalan dan struktur saham Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No.06 tanggal 4 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0016611 tanggal 5 Februari 2016 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015956.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016, dimana para pemegang saham menyetujui untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui pelaksanaan Opsi Beli Seri B sehubungan dengan Mesop sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Preferen Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	100,000000000000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000001
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	8.963.697.886	896.369.788.600	66,0372016877
- Masyarakat*	4.610.011.563	461.001.156.300	33,9627983049
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.573.709.450	1.357.370.945.000	100,0000000000
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	12.426.290.550	1.242.629.055.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.426.290.550	1.242.629.055.000	

*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

2. Pandangan Manajemen

Pandangan manajemen terhadap kondisi perekonomian dan kondisi pasar

Tahun 2016 dan tahun selanjutnya situasi politik dan ekonomi diharapkan tetap stabil, terlebih lagi Indonesia dikategorikan sebagai Negara dengan *Investment Grade* sehingga diharapkan investor asing maupun lokal menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian juga dengan tingkat suku bunga kredit perbankan dan nilai tukar rupiah terhadap dollar, yang cenderung memberi kepastian kepada sektor korporasi untuk melakukan investasi. Pasar industri sektor Pemerintah (Pusat dan daerah) serta sektor swasta (nasional dan asing) diharapkan akan lebih baik dibandingkan kondisi pasar pada tahun sebelumnya.

Perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru, kondisi demografi pasar dan faktor lainnya

Arus globalisasi membawa pengaruh positif bagi masuknya modal asing, teknologi baru dan informasi. Disisi lain aturan-aturan baru dan *leading agency* member kemudahan masuknya konsultan asing dan kontraktor asing, sehingga menambah ketatnya persaingan dipasar industri konstruksi.

Perubahan dalam metode penjualan seperti perjanjian distribusi baru atau perkembangan tim penjualan

Dalam kondisi tertentu perubahan dalam metode penjualan seperti perjanjian distribusi baru, Perseroan tidak mengalami kesulitan yang besar karena kita sudah mengantisipasi kondisi-kondisi yang terjadi pada masa transisi perubahan-perubahan tersebut.

Perubahan yang terjadi pada kompetitor

Adanya peningkatan jumlah perusahaan dari tahun ketahun mendorong peningkatan persaingan usaha. Jumlah kontraktor lokal maupun asing selalu berkembang dan berubah setiap tahunnya. Masuknya pinjaman pemerintah dari Negara tertentu yang mensyaratkan harus bekerja sama kontraktor dari Negara tersebut.

Pada industri konstruksi, kompetitor mulai beralih dari bisnis konstruksi yang konvensional, ke bisnis konstruksi yang tidak murni melaksanakan jasa konstruksi saja, mulai tahun 2010 Perseroan sudah mengembangkan proyek-proyek EPC.

Perubahan dalam harga, persoalan dengan pemasok, atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi penjualan Perseroan

Dalam kondisi tertentu, Perseroan selama ini tidak mengalami kesulitan dalam perubahan harga, persoalan dengan pemasok, karena Perseroan menjamin dengan pembayarannya tepat waktu, sehingga Perseroan tidak berpengaruh pada nilai Penjualan Perseroan. Contohnya dengan melakukan kontrak payung, dan pembayaran dengan fasilitas *Supply Chain Financing* dan *Open Account Financing*.

Pengaruh produk baru atau penarikan produk

Pengaruh produk baru atau penarikan produk dalam industri konstruksi tidak terlalu berpengaruh dengan perubahan produk karena dalam penawaran harga mengacu pada persyaratan teknis yang disepakati dalam kontrak, sehingga apabila ada perubahan produk, dapat menyesuaikan harga berdasarkan kondisi saat perubahan tersebut.

Penggunaan Mata Uang Rupiah

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, mata uang yang digunakan Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan adalah dalam Rupiah dengan pertimbangan untuk menghindari adanya risiko fluktuasi kurs atau suku bunga dalam pembelian bahan baku.

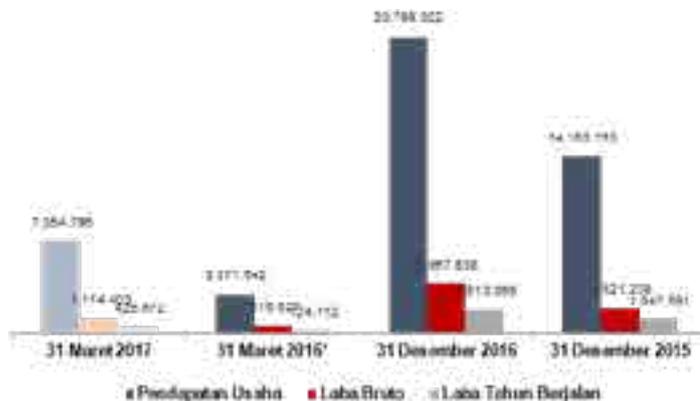
Kebijakan Lindung Nilai

Perseroan dapat melakukan Lindung Nilai (*Hedging*) kepada Bank dan atau Lembaga Non-Bank (*Counterparts*) dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu asset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban perusahaan terhadap risiko harga dimasa yang akan datang.

3. Analisa Keuangan

Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Grafik Pertumbuhan
(dalam jutaan Rupiah)



* tidak diaudit

Tabel berikut menyajikan informasi rinci mengenai hasil operasional historis Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016*	2016	2015
Pendapatan Usaha	7.354.796	3.071.542	23.788.322	14.152.753
Beban Pokok Pendapatan	(6.240.393)	(2.551.915)	(19.820.484)	(12.231.515)
Laba Bruto	1.114.403	519.627	3.967.838	1.921.238
Beban Penjualan	(9.291)	(8.353)	(33.153)	(37.411)
Beban Umum dan Administrasi	(157.585)	(92.410)	(755.130)	(480.433)
Beban Pajak Final	(65.446)	(52.757)	(324.304)	(280.914)
Pendapatan Bunga	98.851	37.696	187.483	72.801
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih	(1.015)	(605)	(732)	13.192
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	-	-	-	539
Selisih Penilaian Properti Investasi	-	-	-	92.241
Pendapatan Lain-lain	84.895	13.771	147.475	185.652
Beban Lain-lain	(87.244)	(4.899)	(43.695)	(39.919)
Laba Sebelum Beban Keuangan, Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	977.568	412.070	3.145.782	1.446.986
Beban Keuangan	(466.096)	(169.679)	(982.836)	(340.008)
Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	10.523	(35.158)	(7.357)	10.112
Laba Sebelum Pajak	521.995	207.233	2.155.589	1.117.090
Beban Pajak Penghasilan	(96.323)	(83.121)	(342.520)	(69.499)
Laba Periode Berjalan	425.672	124.112	1.813.069	1.047.591
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				
Surplus Revaluasi Aset Tetap	2.927	-	(4.510)	510.501
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti-Bersih	(5.462)	-	4.350	7.987
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi				
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	(3.405)	(6.260)	(3.726)	1.039
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan	(5.940)	(6.260)	(3.885)	519.527
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN	419.732	117.852	1.809.183	1.567.118
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	367.714	127.312	1.713.261	1.047.738
Keperentingan Nonpengendali	57.958	(3.199)	99.808	(147)
LABA PERIODE BERJALAN	425.672	124.112	1.813.069	1.047.591
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	361.774	121.051	1.709.375	1.567.265
Keperentingan Nonpengendali	57.958	(3.199)	99.808	(147)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN	419.732	117.852	1.809.183	1.567.118
Laba per saham:				
- Dasar (dalam satuan penuh)	27,09	10,96	147,48	90,19
- Dilusian (dalam satuan penuh)	-	-	147,47	90,18

*tidak diaudit

a. Pendapatan Usaha

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Pendapatan usaha Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp7.354.796 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 139,45% atau setara dengan Rp4.283.254 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp3.071.542 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan pendapatan usaha tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan jasa konstruksi sebesar 151,78% atau setara dengan Rp4.328.049 juta. Proyek-proyek jasa konstruksi yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan jasa konstruksi antara lain proyek LRT Sumatera Selatan, Tol Kayu Agung, Tol Bocimi, Batang – Semarang, Tol Trans Sumatera ruas Terbangi Besar – Kayu Agung dan beberapa proyek lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp23.788.323 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 68,08% atau setara dengan Rp9.635.569 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp14.152.753 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan pendapatan usaha tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan jasa konstruksi sebesar Rp10.331.748 juta. Proyek-proyek jasa konstruksi yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan jasa konstruksi antara lain proyek jalan Tol Pejagan-Pemalang, Tol Cibitung – Cimanggis, Tol Kayu Agung, Tol Bocimi, Batang – Semarang dan beberapa proyek lainnya.

b. Beban Pokok Pendapatan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Beban pokok pendapatan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp6.240.393 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 144,54% atau setara dengan Rp3.688.478 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan sebesar Rp2.551.915 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kegiatan proyek-proyek jasa konstruksi Perseroan, sehingga beban pokok konstruksi mengalami peningkatan sebesar 157,31% atau setara dengan Rp3.755.193 juta terutama kenaikan beban subkontraktor sebesar 799,44% atau setara dengan Rp 2.468.473 juta dan kenaikan beban tidak langsung sebesar 205,12% atau sebesar Rp1.077.736 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp19.820.484 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 62,04% atau setara dengan Rp7.588.969 juta, dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp12.231.515 juta. Kenaikan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kegiatan proyek-proyek jasa konstruksi Perseroan, sehingga beban pokok konstruksi mengalami peningkatan sebesar 79,30% atau setara dengan Rp 8.306.585 juta terutama kenaikan beban subkontraktor sebesar 274,76% atau setara dengan Rp 7.643.327 juta dan kenaikan beban upah sebesar 17,76% atau sebesar Rp 204.045 juta.

c. Laba Bruto

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Laba bruto Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp1.114.403 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 114,46% atau setara dengan Rp594.776 juta dibandingkan dengan laba bruto sebesar Rp519.627 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan laba bruto tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan usaha Perseroan, terutama dari jasa konstruksi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba bruto Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp3.967.838 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 106,53% atau setara dengan Rp2.046.601 juta, dibandingkan dengan laba bruto pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.921.237 juta. Kenaikan laba bruto tersebut disebabkan oleh perubahan model bisnis Perseroan dari kontraktor konvensional menjadi perusahaan investasi jalan tol, infrastruktur dan manufaktur beton precast.

d. Beban Penjualan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Beban penjualan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp9.291 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 11,23% atau setara dengan Rp938 juta dibandingkan dengan beban penjualan sebesar Rp8.353 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan beban penjualan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan beban pemasaran dan iklan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp33.153 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 11,38% atau setara dengan Rp4.258 juta, dibandingkan dengan beban penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp37.411 juta. Penurunan beban penjualan tersebut disebabkan oleh penurunan biaya tender yang diikuti oleh Perseroan.

e. Beban Umum dan Administrasi

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp157.585 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 70,53% atau setara dengan Rp65.175 juta dibandingkan dengan beban umum dan administrasi sebesar Rp92.410 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan beban umum dan administrasi tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan beban pegawai, penyusutan dan pesangon.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp755.130 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 57,18% atau setara dengan Rp274.697 juta, dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp480.433 juta. Kenaikan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan terutama oleh kenaikan beban penyusutan dan kantor.

f. Beban Pajak Penghasilan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Beban pajak final Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp65.446 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 24,05% atau setara dengan Rp12.689 juta dibandingkan dengan beban pajak final sebesar Rp52.757 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan beban pajak final tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan jasa konstruksi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban pajak final Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp324.304 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 15,45% atau setara dengan Rp43,390 juta dibandingkan dengan beban pajak final sebesar Rp280.914 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan beban pajak final tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan jasa konstruksi.

g. Pendapatan Bunga

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Pendapatan bunga Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp98.851 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 162,23% atau setara dengan Rp61.155 juta dibandingkan dengan pendapatan bunga sebesar Rp37.696 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan pendapatan bunga tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan bunga deposito.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan bunga Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp187.483 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 157,53% atau setara dengan Rp114.682 juta, dibandingkan dengan pendapatan bunga pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp72.801 juta. Kenaikan pendapatan bunga tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga deposito. Kenaikan pendapatan bunga deposito tersebut disebabkan meningkatnya jumlah penempatan deposito Perseroan yang berasal dari dana Penawaran Umum Berkelanjutan II tahun 2016 Tahap I dan II.

h. Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs – Bersih

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Kerugian selisih kurs – bersih Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp1.015 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 67,77% atau setara dengan Rp410 juta dibandingkan dengan kerugian selisih kurs – bersih sebesar Rp605 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan kerugian selisih kurs – bersih tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan kurs USD/IDR pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp24 jika dibandingkan dengan 31 Maret 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Kerugian selisih kurs – bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp732 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 105,55% atau setara dengan Rp13.923 juta, dibandingkan dengan keuntungan selisih kurs – bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp13.192 juta. Penurunan keuntungan selisih kurs – bersih tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan kurs USD/IDR pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp359 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2015.

i. Keuntungan Penjualan Aset Tetap

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Keuntungan penjualan aset tetap Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar nihil, di mana terjadi penurunan sebesar 100,00% atau setara dengan Rp539 juta, dibandingkan dengan keuntungan penjualan aset tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 2015 yaitu sebesar Rp539 juta. Penurunan keuntungan penjualan aset tetap tersebut disebabkan tidak adanya penjualan aset Perseroan.

j. Selisih Penilaian Properti Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Selisih penilaian properti investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar nihil, di mana terjadi penurunan sebesar 100,00% atau setara dengan Rp92.241 juta, dibandingkan dengan Selisih penilaian properti investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 2015 yaitu sebesar Rp92.241 juta.

Terdapat pengalihan properti investasi milik Perusahaan yang menjadi penambahan penyertaan pada PT WKR (Entitas Anak) (Inbreng), berdasarkan Akta Notaris Yusdin Fahim, SH. No. 19 tanggal 26 Pebruari 2016 dengan nilai pasar sebesar Rp259.241.255.128.

Berdasarkan surat persetujuan dari Komisaris PT WKR No. 001.1/WKR/DK/2016, terdapat persetujuan pengalihan sebagian dari properti investasi dengan nilai Rp206.559.468.920 untuk dialihkan sebagai asset tetap yang peruntukannya sebagai hotel.

k. Pendapatan Lain-lain

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Pendapatan lain-lain Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp84.895 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 516,48% atau setara dengan Rp71.124 juta dibandingkan dengan pendapatan lain-lain sebesar Rp13.771 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan pendapatan lain-lain tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan klaim asuransi sebesar Rp2.653 juta dan adanya pemulihan piutang sebesar Rp4.594 juta serta peningkatan pendapatan atas bunga pinjaman sebesar Rp64.327 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp147.475 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 20,56% atau setara dengan Rp38.177 juta, dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp185.652 juta. Penurunan pendapatan lain-lain tersebut disebabkan oleh adanya pendapatan lain-lain proyek yaitu sebesar Rp113.226 juta dan pendapatan lain-lain di KSO sebesar Rp51.681 juta dan dikurangi dengan kenaikan lain-lain sebesar Rp 125.511 juta di tahun 2016.

l. Beban Lain-Lain – Bersih

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Beban lain-lain – bersih Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp87.244 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 1.680,83% atau setara dengan Rp82.345 juta dibandingkan dengan beban lain-lain – bersih sebesar Rp4.899 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan beban lain-lain – bersih tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan beban dan denda pajak sebesar Rp28.676 juta dan peningkatan beban lain-lain sebesar Rp45.865 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban lain-lain - bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp43.695 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 9,46% atau setara dengan Rp3.776 juta, dibandingkan dengan beban lain-lain – bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp39.919 juta. Kenaikan beban lain-lain – bersih tersebut disebabkan terutama oleh adanya kenaikan beban lain-lain sebesar Rp5.106 2016 dan beban dan denda pajak sebesar Rp10.766 juta.

m. Beban Keuangan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Beban keuangan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp466.096 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 174,69% atau setara dengan Rp296.417 juta dibandingkan dengan beban keuangan sebesar Rp169.679 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan beban keuangan tersebut disebabkan oleh penambahan saldo utang bank baik jangka pendek dan panjang serta beban bunga obligasi atas penambahan obligasi baru pada tahun 2016 dan 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp982.836 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 189,06% atau setara dengan Rp642.828 juta, dibandingkan dengan beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp340.008 juta. Kenaikan beban keuangan tersebut disebabkan oleh disebabkan penambahan saldo utang bank baik jangka pendek dan panjang serta beban bunga obligasi atas penambahan obligasi baru pada tahun 2016. Di tahun 2016 Perseroan melakukan strategi pengembangan usaha melalui proyek konstruksi dengan sistem turnkey. Dalam

membantu pendanaan Perseroan untuk proyek *turnkey* tersebut, Perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan II di tahun 2016.

n. Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp10.523 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 129,93% atau setara dengan Rp45.681 juta dibandingkan dengan bagian rugi entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp35.158 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama tersebut disebabkan oleh adanya pengakuan bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama yang membukukan keuntungan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Bagian rugi entitas asosiasi dan ventura bersama Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.357 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 172,76% atau setara dengan Rp17.469 juta, dibandingkan dengan bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp10.112 juta. Penurunan bagian laba entitas asosiasi dan ventura bersama tersebut disebabkan oleh pengakuan bagian rugi entitas asosiasi yang berasal dari entitas anak PT WTR yang mengalami kerugian pada tahun 2016.

o. Beban Pajak Penghasilan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Beban pajak penghasilan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp96.323 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 15,88% atau setara dengan Rp13.202 juta dibandingkan dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp83.121 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan beban pajak penghasilan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha dari anak perusahaan diluar jasa konstruksi seperti sewa gedung dan energi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp342.520 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 392,84% atau setara dengan Rp273.021 juta, dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp69.499 juta. Peningkatan beban pajak penghasilan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha dari anak perusahaan diluar jasa konstruksi seperti sewa gedung, properti dan energi.

p. Selisih Kurs Penjabaran Laporan keuangan Dalam Valuta Asing

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

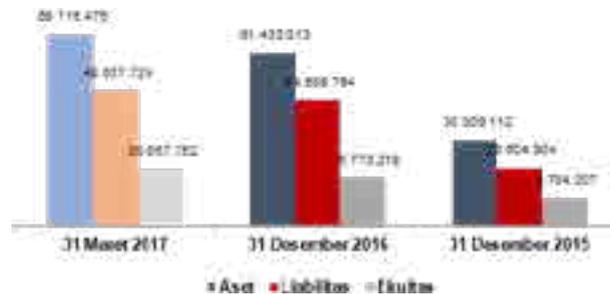
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah kerugian sebesar Rp3.406 juta di mana terjadi penurunan sebesar 45,60% atau setara dengan Rp2.855 juta dibandingkan dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing yaitu kerugian sebesar Rp6.261 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Penurunan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing tersebut disebabkan oleh adanya penurunan nilai tukar mata uang US Dollar terhadap Rupiah untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah kerugian sebesar Rp3.726 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 458,58% atau setara dengan Rp4.765 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu keuntungan sebesar Rp1.039 juta. Penurunan tersebut disebabkan kenaikan nilai tukar mata uang US Dollar terhadap Rupiah tahun 2016.

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam jutaan Rupiah)



Aset

alam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	2015
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	9.153.434	10.655.996	5.511.188	
Investasi Jangka Pendek	13.448	8.448	10.664	
Piutang Usaha - Bersih				
Pihak Berelasi	3.784.963	3.435.212	438.200	
Pihak Ketiga	1.150.158	882.248	1.209.920	
Piutang Retensi - Bersih				
Pihak Berelasi	407.104	376.206	259.039	
Pihak Ketiga	588.402	590.491	472.580	
Piutang Lain-lain Lancar - Bersih				
Pihak Berelasi	3.079.821	2.777.924	66.147	
Pihak Ketiga	3.957.396	2.839.950	61.623	
Piutang Ventura Bersama	2.443.651	745.981	736.250	
Persediaan	2.307.348	2.556.732	826.384	
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Bagian Lancar				
Pihak Berelasi	6.146.316	5.485.979	2.489.077	
Pihak Ketiga	6.282.255	5.485.823	2.090.638	
Pajak Dibayar di Muka	1.281.008	1.159.443	679.791	
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	1.802.581	2.706.957	854.123	
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	-	100.000	
Total Aset Lancar	42.397.885	39.707.390	15.805.624	
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	2.560.811	2.070.701	1.571.853	
Piutang Usaha Tidak Lancar kepada Pihak Berelasi - Bersih	-	180.002	2.269.227	
Piutang Lain-lain Tidak Lancar				
Pihak Berelasi	142.689	138.110	134.806	
Pihak Ketiga	-	163.752	71.519	
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa Bagian Tidak Lancar				
Pihak Berelasi	2.091.472	1.424.498	344.646	
Pihak Ketiga	777.785	713.420	180.320	
Properti Investasi	53.411	53.411	259.970	
Investasi Jangka Panjang Lainnya	421.154	548.404	540.222	
Aset Tetap - Bersih	3.484.239	3.275.335	1.923.144	
Goodwill	1.710.769	1.710.769	1.390.681	
Aset Tak Berwujud - Hak Penguasaan Jalan Tol	14.198.619	11.153.744	5.580.332	
Aset Pajak Tanguhan	153.673	195.138	182.046	
Aset Lain-lain	122.969	98.338	54.721	
Total Aset Tidak Lancar	25.717.591	21.725.622	14.503.487	
Total Aset	68.115.476	61.433.012	30.309.111	

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 total aset Perseroan adalah sebesar Rp68.115.476 juta atau terjadi peningkatan sebesar 10,88% atau setara dengan Rp6.682.464 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp61.433.012 juta. Peningkatan total aset pada tersebut disebabkan oleh kenaikan total aset lancar dan aset tidak lancar. Kenaikan aset lancar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode sebelumnya adalah sebesar 6,78% atau setara dengan Rp2.690.493 juta. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan karena kenaikan piutang ventura bersama, investasi jangka pendek, dan piutang lain-lain jangka pendek. Sedangkan kenaikan aset tidak lancar untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode sebelumnya adalah sebesar 18,37% atau setara dengan Rp3.991.969 juta. Kenaikan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan karena kenaikan tagihan bruto kepada pengguna jasa jangka panjang, kenaikan pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, serta aset tak berwujud berupa hak penguasaan jalan tol.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016 total aset Perseroan adalah sebesar Rp61.433.012 juta atau terjadi peningkatan sebesar 102,69% atau setara dengan Rp31.123.901 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp30.309.111 juta. Peningkatan total aset pada tahun 2016 disebabkan oleh kenaikan total aset lancar dan aset tidak lancar. Kenaikan aset lancar pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar 151,22% atau setara dengan Rp23.901.766 juta. Kenaikan aset lancar terdiri dari kenaikan kas dan setara kas yang berasal dari kenaikan arus kas operasi dan penerimaan dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II tahun 2016 Tahap I dan II, tagihan bruto kepada pelanggan yang berasal dari proyek konstruksi dengan sistem *turnkey* serta kenaikan piutang lain-lain terutama pinjaman yang diberikan kepada Badan Pengatur Jalan Tol dan PT PPTR dari PT WTR (Entitas Anak) yang digunakan sebagai dana kerja. Sedangkan kenaikan aset tidak lancar pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar 49,80% atau setara dengan Rp7.222.135 juta. Kenaikan aset tidak lancar terdiri atas kenaikan aset tak berwujud – Hak Penguasaan Jalan Tol dimana Perseroan sebagai *Project Owner*.

a) Kas dan Setara Kas**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 kas dan setara kas Perseroan adalah sebesar Rp9.153.434 juta atau terjadi penurunan sebesar 14,10% atau setara dengan Rp1.502.562 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp10.655.996 juta. Penurunan kas dan setara kas pada tersebut disebabkan oleh penggunaan untuk aktivitas operasi sebesar Rp591.176 juta dan aktivitas investasi sebesar Rp2.655.407 juta seperti penempatan pada ventura bersama, penempatan deposito dan perolehan aset tak berwujud dikurangi dengan kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.744.754 juta seperti penerbitan obligasi dan penerimaan setoran dari entitas Non-pengendali.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016 kas dan setara kas Perseroan adalah sebesar Rp10.655.996 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 93,35% atau setara dengan Rp5.144.808 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.511.188 juta. Kenaikan kas dan setara kas terutama disebabkan oleh penggunaan untuk aktivitas operasi sebesar Rp7.762.413 juta dan aktivitas investasi sebesar Rp9.552.721 juta seperti penempatan deposito dan perolehan aset tak berwujud dikurangi dengan kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp22.459.333 juta seperti penerimaan utang obligasi, penerimaan pinjaman Bank, penerimaan pinjaman lembaga keuangan non Bank jangka pendek dan penerimaan setoran dari entitas Non-pengendali.

b) Investasi Jangka Pendek**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 investasi jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp13.448 juta atau terjadi kenaikan sebesar 59,19% atau setara dengan Rp5.000 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp8.448 juta. Peningkatan investasi jangka pendek tersebut disebabkan oleh peningkatan investasi jangka pendek SRIMP (Entitas anak WTR) ke Koperasi Syahadah sebesar Rp5.000 juta.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah investasi jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp8.448 juta atau mengalami penurunan sebesar 20,78% atau setara dengan Rp2.216 juta dibandingkan dengan posisi jumlah investasi jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp10.664 juta. Penurunan investasi jangka pendek tersebut disebabkan oleh sertifikat deposito berjangka yang ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp2.216 juta tidak lagi dijadikan jaminan atas pinjaman bank.

c) Piutang Usaha – Bersih**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 piutang usaha – bersih Perseroan adalah sebesar Rp4.935.121 juta atau terjadi kenaikan sebesar 14,31% atau setara dengan Rp617.661 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.317.460 juta. Peningkatan piutang usaha tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, piutang usaha – bersih Perseroan adalah Rp4.317.460 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 161,96% atau setara dengan Rp2.699.340 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.648.120 juta. Peningkatan piutang usaha tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan, yakni terutama disebabkan karena kenaikan piutang usaha dari WSBP yang terdiri dari kenaikan piutang kepada PT Kresna Kusuma Dyandra Marga sebesar Rp2.824.934 juta dan kepada KSO/JV Waskita – Adhi sebesar Rp25.131 juta. Piutang usaha WSBP disajikan dalam akun piutang dagang pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang di kemudian hari.

d) Piutang Retensi – Bersih**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 piutang retensi – bersih Perseroan adalah sebesar Rp995.506 juta atau terjadi kenaikan sebesar 2,98% atau setara dengan Rp28.809 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp966.697 juta. Peningkatan piutang retensi tersebut disebabkan oleh peningkatan penyelesaian pekerjaan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode sebelumnya.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, piutang retensi – bersih Perseroan adalah Rp966.697 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 32,13% atau setara dengan Rp235.078 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp731.619 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penyelesaian pekerjaan di tahun 2016, yakni terutama terkait dengan kenaikan piutang retensi kepada PT Jasamarga Kualanamou Tol sebesar Rp75.070 juta dan kepada PT Solo Ngawi Jawa sebesar Rp45.636 juta, dan sesuai dengan perjanjian 5% dari nilai kontrak ditahan sebagai piutang retensi selama masa pemeliharaan.

e) Piutang Lain-Lain Lancar – Bersih**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 piutang lain-lain lancar – bersih Perseroan adalah sebesar Rp7.037.217 juta atau terjadi kenaikan sebesar 25,26% atau setara dengan Rp1.419.343 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp5.617.874 juta. Peningkatan piutang lain-lain jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Kresna Kusuma Dyandra Marga dan PT Bakrie Toll Indonesia.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, piutang lain-lain lancar – bersih Perseroan adalah Rp5.617.874 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 4.296,86% atau setara dengan Rp5.490.104 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp127.770 juta. Peningkatan ini disebabkan peningkatan piutang kepada PT Jasamarga Semarang Batang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Waskita Bumi Wira, PT Cinere Serpong Jaya, PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, PT Citra Washpputowa, PT Ngawi Kertosono Jaya, PT Solo Ngawi Jaya dan PT Jasamarga Kualanamou Tol.

f) Piutang Ventura Bersama**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 piutang ventura bersama Perseroan adalah sebesar Rp2.443.651 juta atau terjadi penurunan sebesar 227,58% atau setara dengan Rp1.697.670 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp745.981 juta. Kenaikan piutang ventura bersama persediaan tersebut disebabkan oleh pinjaman dan biaya ventura bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, piutang ventura bersama Perseroan adalah Rp745.981 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 1,32% atau setara dengan Rp9.731 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp736.250 juta. Kenaikan piutang ventura bersama persediaan tersebut disebabkan oleh pinjaman dan biaya ventura bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan.

g) Persediaan**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 persediaan Perseroan adalah sebesar Rp2.303.348 juta atau terjadi penurunan sebesar 9,75% atau setara dengan Rp249.384 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.556.732 juta. Penurunan persediaan tersebut disebabkan oleh penurunan persediaan bahan baku konstruksi berupa persediaan material yang terdiri dari persediaan besi, semen, solar, tiang pancang, keramik/mamer, traveler form, geotextile, aspal, dan batu.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, persediaan Perseroan adalah Rp2.556.732 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 209,39% atau setara dengan Rp1.730.348 juta, jika dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp826.384 juta. Peningkatan persediaan disebabkan oleh kenaikan persediaan bahan baku konstruksi, aset, real estate, beton precast, dan suku cadang.

h) Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Bagian Lancar**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 tagihan bruto kepada pengguna jasa bagian lancar Perseroan adalah sebesar Rp12.428.571 juta atau terjadi kenaikan sebesar 13,28% atau setara dengan Rp1.456.769 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp10.971.802 juta. Peningkatan tagihan bruto kepada pengguna jasa jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan tagihan kepada PT Utama Karya (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Ngawi Kertosono Jaya, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, tagihan bruto kepada pengguna jasa bagian lancar Perseroan adalah Rp10.971.802 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 139,57% atau setara dengan Rp6.392.087 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.579.715 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan realisasi progres pekerjaan dari proyek – proyek *turnkey* diantaranya Proyek Transmisi Sumatera 500KVA, Proyek Jalan Tol Solo – Ngawi, proyek-proyek dengan Kementerian Perhubungan, proyek-proyek dengan PT Utama Karya (Persero), proyek-proyek dengan PT Angkasa Pura II (Persero), serta proyek-proyek dengan PT Jasamarga Kualanam Toll.

i) Pajak Dibayar di Muka**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 pajak dibayar di muka Perseroan adalah sebesar Rp1.281.008 juta atau terjadi kenaikan sebesar 10,48% atau setara dengan Rp121.565 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.159.443 juta. Peningkatan pajak dibayar di muka tersebut disebabkan oleh peningkatan pajak dibayar dimuka pasal 19, pajak dibayar dimuka pasal 23 dan pajak pertambahan nilai masukan.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, pajak dibayar di muka Perseroan adalah Rp1.159.443 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 70,56% atau setara dengan Rp479.652 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp679.791 juta. Kenaikan pajak dibayar di muka berasal dari pajak pertambahan nilai masukan dan pajak dibayar dimuka pasal 23, atas peningkatan transaksi pembelian bahan baku dan subkontraktor.

j) Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 uang muka dan biaya dibayar di muka Perseroan adalah sebesar Rp1.802.581 juta atau terjadi penurunan sebesar 33,41% atau setara dengan Rp904.376 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.706.957 juta. Penurunan uang muka dan biaya dibayar di muka tersebut terutama disebabkan oleh penurunan uang muka kontrak yang dibayarkan kepada subkontraktor, pemasok dan mandor borong yang bekerja pada proyek yang dilaksanakan Perseroan.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, uang muka dan biaya dibayar di muka Perseroan adalah Rp2.706.957 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 216,93% atau setara dengan Rp1.852.834 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp854.123 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh uang muka kontrak yang dibayarkan kepada subkontraktor, pemasok dan mandor borong yang bekerja pada proyek yang dilaksanakan Perseroan.

k) Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Perseroan adalah sebesar Rp2.560.811 juta atau terjadi kenaikan sebesar 23,67% atau setara dengan Rp490.110 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.070.701 juta. Peningkatan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama tersebut disebabkan oleh peningkatan setoran modal pada entitas asosiasi dan ventura bersama, seperti PT Ngawi Kertosono Jaya, PT Jasamarga Kualanamou Toll, KSO Waskita - HK - Wika, KSO/JO Waskita - NK dan KSO Waskita - Brantas - Wika.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Perseroan adalah Rp2.070.701 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 31,74% atau setara dengan Rp498.848 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.571.853 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan investasi Perseroan melalui PT WTR atas penyertaan di PT Kresna Kusuma Dyandra Marga dan PT Ngawi Kertosono Jaya.

l) Piutang Lain-lain Tidak Lancar**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 piutang lain-lain tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp142.689 juta atau terjadi penurunan sebesar 52,73% atau setara dengan Rp159.173 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp301.862 juta. Penurunan piutang lain-lain jangka panjang tersebut terutama berasal dari pelunasan yang dilakukan oleh PT Bakrie Toll Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, piutang lain-lain tidak lancar Perseroan adalah Rp301.862 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 46,30% atau setara dengan Rp95.535 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp206.325 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

m) Piutang Usaha Tidak Lancar**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 piutang usaha tidak lancar Perseroan adalah sebesar nil atau terjadi penurunan sebesar 100% atau setara dengan Rp180.002 juta, jika dibandingkan dengan saldo piutang usaha tidak lancar per 31 Desember 2016. Penurunan piutang usaha tidak lancar tersebut disebabkan oleh piutang dari PT Waskita Bumi Wira tidak lagi diakui di laporan keuangan konsolidasi karena perseroan telah meningkatkan kepemilikan atas PT Waskita Bumi Wira sebesar 55% dan mengakui PT Waskita Bumi Wira sebagai anak perusahaan.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, piutang usaha tidak lancar Perseroan adalah Rp180.002 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 92,07% atau setara dengan Rp2.089.225 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.269.227 juta. Penurunan ini disebabkan oleh reklasifikasi piutang dari PT Kresna Kusuma Dyandra Marga menjadi piutang usaha lancar.

n) Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Bagian Tidak Lancar**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 tagihan bruto kepada pengguna jasa bagian tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp2.869.257 juta atau terjadi kenaikan sebesar 34,21% atau setara dengan Rp731.339 juta dibandingkan

dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.137.918 juta. Peningkatan ini sejalan dengan penambahan proyek yang dikerjakan oleh Perseroan.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, tagihan bruto kepada pengguna jasa bagian tidak lancar Perseroan adalah Rp2.137.918 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 307,25% atau setara dengan Rp1.612.952 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp524.966 juta. Peningkatan ini sejalan dengan penambahan proyek yang dikerjakan oleh Perseroan, yakni terutama disebabkan oleh kenaikan tagihan bruto kepada Kementerian Perhubungan sebesar Rp3.144.544 dan kepada PT Ngawi Kertosono Jaya sebesar Rp199.188 juta.

o) Properti Investasi

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 properti investasi Perseroan adalah sebesar Rp53.411 juta atau sama dengan posisi jumlah properti investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, properti investasi Perseroan adalah Rp53.411 juta, di mana terjadi penurunan sebesar 79,45% atau setara dengan Rp206.559 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp259.970. Pada tahun 2016, Perseroan melakukan reklasifikasi dari properti investasi untuk dialihkan sebagai aset tetap yang peruntukannya sebagai hotel.

p) Investasi Jangka Panjang Lainnya

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 investasi jangka panjang lainnya Perseroan adalah sebesar Rp421.154 juta atau terjadi penurunan sebesar 23,20% atau setara dengan Rp127.250 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp548.404 juta. Penurunan investasi jangka panjang lainnya tersebut disebabkan oleh reklasifikasi investasi pada PT Jasa Marga Kualanamu Tol menjadi investasi pada entitas asosiasi.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, investasi jangka panjang lainnya Perseroan adalah Rp548.404 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 1,51% atau setara dengan Rp8.182 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp540.222 juta. Kenaikan nilai investasi jangka panjang disebabkan penambahan nilai investasi pada PT Jasa Marga Kualanamu Tol dan PMT.

q) Aset Tetap

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp3.484.239 juta atau terjadi kenaikan sebesar 6,38% atau setara dengan Rp208.904 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.275.335 juta. Peningkatan aset tetap lainnya tersebut disebabkan oleh penambahan aset berupa gedung dan peralatan proyek.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp3.275.335 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 70,31% atau sebesar Rp1.352.191 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.923.144. Kenaikan ini terutama disebabkan di tahun 2016 Perseroan dan grup menambah peralatan proyek, tanah dan pabrik beton precast.

r) Goodwill

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 *goodwill* Perseroan adalah sebesar Rp1.710.769 juta atau sama dengan posisi *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2016.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, *goodwill* Perseroan adalah Rp1.710.769 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 23,02% atau setara dengan Rp320.088 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.390.681 juta. Kenaikan ini berasal dari akuisisi saham yang dilakukan oleh PT WTR atas PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR) dan PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP).

s) Aset Tak Berwujud – Hak Penguasaan Jalan Tol

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 aset tak berwujud – hak penguasaan jalan tol Perseroan adalah sebesar Rp14.198.619 juta atau terjadi kenaikan sebesar 27,30% atau setara dengan Rp3.044.875 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp11.153.744 juta. Peningkatan aset tak berwujud – hak penguasaan jalan tol tersebut disebabkan oleh perolehan hak konsesi beberapa ruas jalan tol seperti ruas tol Pejagan – Pemalang dan Kayu Agung – Palembang – Betung.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset tak berwujud – hak penguasaan jalan tol Perseroan adalah sebesar Rp11.153.744 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 99,88% atau sebesar Rp5.573.412 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.580.332. Kenaikan ini disebabkan di tahun 2016 Perseroan memperoleh hak konsesi beberapa ruas jalan tol seperti ruas tol Pemalang – Batang dan Kayu Agung - Palembang.

t) Aset Pajak Tangguhan

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 aset pajak tangguhan Perseroan adalah sebesar Rp153.673 juta atau terjadi penurunan sebesar 21,25% atau setara dengan Rp41.465 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp195.138 juta. Penurunan aset pajak tangguhan tersebut disebabkan oleh pembebanan ke laba rugi oleh SMR dan WSBP (entitas anak).

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset pajak tangguhan Perseroan adalah Rp195.138 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 7,19% atau setara dengan Rp13.092 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp182.046 juta. Kenaikan aset pajak tangguhan tersebut disebabkan oleh entitas anak mengakui akumulasi rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi.

u) Aset Lain-lain

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 aset lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp122.969 juta atau terjadi kenaikan sebesar 25,05% atau setara dengan Rp24.631 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp98.338 juta. Peningkatan aset lain-lain tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan kontrak sewa jangka panjang sebesar Rp14.395 juta dan beban kontrak ditangguhkan sebesar Rp13.402 juta.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset lain-lain Perseroan adalah Rp98.338 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 79,71% atau setara dengan Rp43.617 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp54.721 juta. Peningkatan aset lain-lain tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan kontrak sewa jangka panjang sebesar Rp17.173 juta dan beban kontrak ditangguhkan sebesar Rp23.524 juta.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Bank Jangka Pendek				
Pihak Berelasi	6.318.058	6.799.481		2.518.602
Pihak Ketiga	4.475.056	5.263.566		675.304
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Pendek	2.692.519	3.281.288		289.295

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	2015
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	1.310.353	3.183.979		273.582
Pihak Ketiga	9.280.507	4.177.716		5.198.439
Utang Bruto Subkontraktor				
Pihak Berelasi	29.635	341.533		-
Pihak Ketiga	6.936.237	6.949.907		3.300.533
Biaya yang Masih Harus Dibayar	173.976	251.301		116.289
Utang Pajak	190.068	409.815		439.396
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	455.104	557.260		739.317
Utang Bunga	5.218	-		262.553
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	5.392	5.392		5.000
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Jangka Pendek	153	224		84
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	1.502.517	239.294		108.970
Total Liabilitas Jangka Pendek	33.374.793	31.460.756		13.927.365
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Bank Jangka Panjang				
Pihak Berelasi	4.862.083	4.002.281		1.684.238
Pihak Ketiga	145.904	145.607		191.636
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Panjang	175.000	175.000		-
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang				
Pihak Berelasi	147.545	219.672		368.916
Pihak Ketiga	785.292	1.058.643		907.187
Liabilitas Pajak Tangguhan	8.421	8.611		-
Utang Lain-lain Jangka Panjang				
Pihak Berelasi	0	854		41.407
Pihak Ketiga	1.245.823	1.953.200		745.445
Utang Obligasi - Bersih	7.223.339	5.567.525		2.670.635
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Jangka Panjang	323	305		144
Liabilitas Imbalan Kerja	89.201	67.340		67.932
Total Liabilitas Jangka Panjang	14.682.931	13.199.038		6.677.540
Total Liabilitas	48.057.724	44.659.794		20.604.904

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp48.057.724 juta atau terjadi kenaikan sebesar 7,61% atau setara dengan Rp3.397.930 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp44.659.794 juta. Peningkatan total liabilitas tersebut disebabkan oleh kenaikan utang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang, utang obligasi dan utang usaha.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp44.659.794 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 116,74% setara dengan Rp24.054.890 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp20.604.904 juta. Peningkatan liabilitas Perseroan disebabkan oleh kenaikan utang bank dan non bank baik jangka pendek maupun jangka panjang, utang obligasi serta utang usaha dan utang bruto kepada subkontraktor.

a) Utang Bank Jangka Pendek

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 utang bank jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp10.793.114 juta atau terjadi penurunan sebesar 10,53% atau setara dengan Rp1.269.933 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp12.063.047 juta. Penurunan utang bank jangka pendek tersebut antara lain disebabkan oleh pembayaran kepada Eximbank Rp374.099 juta, BNI sebesar Rp300.000 juta, Panin sebesar Rp797.945 juta, BTMU sebesar Rp100.625 juta, BJB sebesar Rp449.780 juta dan Maybank sebesar Rp399.919 juta.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, utang bank jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp12.063.047 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 277,69% setara dengan Rp8.869.141 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.193.906 juta. Kenaikan utang bank jangka pendek antara lain kepada BRI sebesar Rp1.639.170 juta, pinjaman baru dari Eximbank sebesar Rp1.000.000 juta, BJB sebesar Rp729.590 juta dan BTMU sebesar Rp500.924 juta.

b) Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Pendek***31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016***

Pada tanggal 31 Maret 2017 utang lembaga keuangan non bank jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp2.692.519 juta atau terjadi penurunan sebesar 17,94% atau setara dengan Rp588.769 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.281.288 juta. Penurunan utang lembaga keuangan non bank jangka pendek tersebut disebabkan oleh pembayaran atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, utang lembaga keuangan non bank jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp3.281.288 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 1034,23% setara dengan Rp2.991.993 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 289.295 juta. Kenaikan disebabkan oleh pinjaman yang diberikan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur yang digunakan untuk pembiayaan dana talangan pembebasan tanah untuk proyek jalan tol.

c) Utang Usaha***31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016***

Pada tanggal 31 Maret 2017 utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp10.590.860 juta atau terjadi kenaikan sebesar 43,86% atau setara dengan Rp3.229.165 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp7.361.695 juta. Peningkatan utang usaha tersebut disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pemasok seiring dengan penambahan proyek yang didapatkan oleh Perseroan serta peningkatan utang usaha kepada ventura bersama.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp7.361.695 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 34,53% atau setara dengan Rp1.889.674 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.472.021 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada subkontraktor yang sejalan dengan penambahan proyek yang didapatkan oleh Perseroan, yakni terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada KSO/JV Waskita – Wika sebesar Rp123.993 juta dan kepada PT Posco E&C Indonesia sebesar 203,08% atau setara dengan Rp137.666 juta.

d) Utang Bruto Subkontraktor***31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016***

Pada tanggal 31 Maret 2017 utang bruto subkontraktor Perseroan adalah sebesar Rp6.965.872 juta atau terjadi penurunan sebesar 4,47% atau setara dengan Rp325.568 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp7.291.440 juta. Penurunan utang bruto subkontraktor pihak ketiga tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan yang dilakukan oleh PT Utama Karya dan PT KMI Wire and Cable Tbk.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, utang bruto subkontraktor Perseroan adalah sebesar Rp7.291.440 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 120,92% setara dengan Rp3.990.907 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.300.533 juta. Peningkatan ini sejalan dengan penambahan proyek yang didapatkan oleh Perseroan, yakni terutama disebabkan karena kenaikan utang bruto subkontraktor kepada PT Lancar Jaya Mandiri Abadi sebesar Rp130.329 juta dan kepada PT KMI Wire and Cable Tbk sebesar Rp154.393 juta.

e) Biaya yang Masih Harus Dibayar***31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016***

Pada tanggal 31 Maret 2017 biaya yang masih harus dibayar Perseroan adalah sebesar Rp173.976 juta atau terjadi penurunan sebesar 30,77% atau setara dengan Rp77.325 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp251.301 juta. Penurunan beban akrual tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban umum dan beban kantor.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, biaya yang masih harus dibayar Perseroan adalah sebesar Rp251.301 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 116,10% setara dengan Rp135.012 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp116.289 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan lain – lain, beban bunga obligasi dan beban kantor.

f) Uang Muka Kontrak Jangka Pendek**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 uang muka kontrak jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp455.104 juta atau terjadi penurunan sebesar 18,33% atau setara dengan Rp102.156 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp557.260 juta. Penurunan uang muka kontrak jangka pendek tersebut disebabkan oleh progress pengerjaan beberapa proyek yang sudah selesai.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, uang muka kontrak jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp557.260 juta di mana terjadi penurunan sebesar 24,63% atau setara dengan Rp182.057 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp739.317 juta. Penurunan uang muka kontrak jangka pendek disebabkan progress pengerjaan beberapa proyek yang sudah selesai.

g) Liabilitas Jangka Pendek Lainnya**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 liabilitas jangka pendek lainnya Perseroan adalah sebesar Rp1.502.517 juta atau terjadi kenaikan sebesar 527,90% atau setara dengan Rp1.263.223 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp239.294 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek lainnya tersebut disebabkan oleh peningkatan dividen sebesar Rp640.955 juta dan liabilitas kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp515.619 juta.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, liabilitas jangka pendek lainnya Perseroan adalah sebesar Rp239.294 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 119,43% setara dengan Rp130.324 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp108.970 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pengakuan kewajiban atas rencana pembagian jasa produksi dan tantiem tahun 2016.

h) Utang Bank Jangka Panjang**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 utang bank jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp5.007.987 juta atau terjadi kenaikan sebesar 20,74% atau setara dengan Rp860.099 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.147.888 juta. Peningkatan utang bank jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utilisasi dari pinjaman sindikasi BNI dan BRI.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, utang bank jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp4.147.888 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 121,12% setara dengan Rp2.272.014 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.875.874 juta. Kenaikan pinjaman bank jangka panjang antara lain dikarenakan peningkatan utilisasi dari pinjaman sindikasi BNI dan BRI untuk proyek Tol Bekasi - Cawang-Kampung Melayu Tahap I serta pinjaman investasi BNI.

i) Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 utang lembaga keuangan non bank jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp175.000 juta atau sama dengan posisi utang lembaga keuangan non bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, utang lembaga keuangan non bank jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp175.000 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 100% setara dengan Rp175.000 juta dibandingkan dengan Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang Perseroan pada tahun 2015 sebesar nihil. Kenaikan disebabkan oleh pinjaman yang diberikan oleh PT Indonesia Infrastructure Finance yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal untuk membiayai proyek pembangunan 2x5 MW Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro ("PLTMH").

j) Uang Muka Kontrak Jangka Panjang**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 uang muka kontrak jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp932.837 juta atau terjadi penurunan sebesar 27,03% atau setara dengan Rp345.478 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.278.315 juta. Penurunan uang muka kontrak jangka panjang tersebut terutama disebabkan karena progress penyelesaian proyek dengan PT Solo Ngawi Jaya dan PT Jasa Marga Kualanam Tol.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, uang muka kontrak jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp1.278.315 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 0,17% atau setara dengan Rp2.212 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.276.103 juta. Kenaikan uang muka kontrak jangka panjang tersebut terutama disebabkan tambahan uang muka kontrak dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

k) Utang Bunga**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 utang bunga jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp5.218 juta atau terjadi kenaikan sebesar 100,00% atau setara dengan Rp5.218 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar nihil. Utang bunga merupakan biaya bunga yang sudah ditagihkan namun belum dibayarkan oleh CCT (entitas anak) yang berasal dari pinjaman kepada Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, utang bunga jangka panjang Perseroan adalah sebesar nihil, di mana terjadi penurunan sebesar 100,00% atau setara dengan Rp262.553 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp262.553 juta. Exit fee dan beban administrasi merupakan beban bunga yang ditangguhkan yang berasal dari sisa utang yang belum dibayar PT SMR (entitas anak) dan telah dilunasi di 2016.

l) Utang Lain-lain Jangka Panjang**31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016**

Pada tanggal 31 Maret 2017 utang lain-lain jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp1.245.823 juta atau terjadi penurunan sebesar 36,24% atau setara dengan Rp708.231 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.954.054 juta. Penurunan utang lain-lain jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan yang dilakukan kepada Koperasi Waskita dan PT Sarana Multi Infrastruktur.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, utang lain-lain jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp1.954.054 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar 148,34% atau setara dengan Rp1.167.202 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp786.852 juta. Peningkatan ini terutama dikarenakan peningkatan utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

m) Utang Obligasi - Bersih

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 utang obligasi - bersih Perseroan adalah sebesar Rp7.223.339 juta atau terjadi kenaikan sebesar 29,74% atau setara dengan Rp1.655.814 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp5.567.525 juta. Peningkatan utang obligasi - bersih tersebut disebabkan oleh penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III di tahun 2017 sebesar Rp1.657 miliar.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, utang obligasi - bersih Perseroan adalah sebesar Rp5.567.525 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 108,47% atau setara Rp2.896.890 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.670.635 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan Perseroan melakukan aksi korporasi untuk mendanai sebagian kebutuhan dana atas proyek *turnkey* melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan II ditahun 2016 sebesar Rp2.900 miliar.

n) Pinjaman yang Masih Terutang

Jumlah utang bank yang masih terutang pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp16.179.269 juta.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2017	2016	2015
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal Saham – Nilai Nominal Rp100 per Saham pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015			
Modal Dasar – 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 25.999.999 Saham Seri B pada 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 13.573.709.450 dan 13.573.654.550 dan 13.572.493.310 Saham Seri B pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015	1.357.371	1.357.365	1.357.249
Tambahan Modal Disetor	5.882.695	5.882.677	5.881.621
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya	1.047.614	578.286	368.738
Belum Ditentukan Penggunaannya	2.134.147	2.755.876	1.435.902
Komponen Ekuitas Lainnya	494.871	495.349	503.585
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	10.916.698	11.069.553	9.547.095
Kepentingan Non-Pengendali	9.141.054	5.703.665	157.112
Total Ekuitas	20.057.752	16.773.219	9.704.207

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017 total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp20.057.752 juta atau terjadi kenaikan sebesar 19,58% atau setara dengan Rp3.284.533 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp16.773.219 juta. Peningkatan total ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh laba periode berjalan sebesar Rp425.672 juta.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp16.773.219 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 72,84% atau setara Rp7.069.012 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp9.704.207 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan tambahan modal yang berasal dari penambahan setoran kepentingan non pengendali sebesar Rp 5.546.553 juta dan pencatatan laba tahun berjalan sebesar Rp1.813.069 juta.

Analisa Laporan Arus Kas

Tabel berikut memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016 (tidak diaudit)	2016	2015
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas operasi	(591.176)	(2.646.047)	(7.762.414)	657.972
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2.655.408)	(765.098)	(9.554.721)	(6.926.883)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan (Penurunan) Kenaikan bersih kas dan setara kas	1.744.754	2.809.824	22.459.333	10.098.904
Kerugian (keuntungan) selisih kurs yang belum direalisasi	(1.501.830)	(601.321)	5.141.198	3.829.993
Kas dan setara kas awal periode	(733)	(445)	610	5.912
Kas dan setara kas akhir periode	10.655.997	5.511.188	5.511.188	1.675.283
	9.153.434	4.909.422	10.655.996	5.511.188

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp 591.176 juta. Arus kas masuk dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp3.377.962 juta, dan penerimaan rekening giro dan deposito berjangka sebesar Rp99.584 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp3.010.712 juta, pembayaran kepada karyawan dan direksi sebesar Rp96.473 juta, pembayaran beban keuangan sebesar Rp466.096 dan pembayaran pajak sebesar Rp495.441 juta. Arus kas dari aktivitas operasi selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 menunjukkan adanya pembayaran kepada pemasok, karyawan dan direksi, beban keuangan dan pajak.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.762.414 juta. Arus kas masuk dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp9.104.677 juta, penerimaan bunga giro dan deposito sebesar Rp186.873 juta, dan penerimaan restitusi pajak sebesar Rp438 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga sebesar Rp14.764.976 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp427.464 juta, pajak sebesar Rp879.126 juta, dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp982.836 juta. Arus kas dari aktivitas operasi selama tahun 2016 menunjukkan adanya pembayaran kepada pemasok, beban keuangan dan pajak.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp2.655.408 juta. Arus kas masuk dari aktivitas investasi berasal dari penerimaan ventura bersama sebesar Rp49.865 juta, penerimaan pencairan deposito sebesar Rp2.891.839 juta dan penerimaan atas pelepasan penyertaan pada Entitas Asosiasi sebesar Rp217.000 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas investasi digunakan untuk penempatan ventura bersama sebesar Rp264.793 juta, penempatan deposito sebesar Rp1.768.788 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp296.683 juta, perolehan aset tak berwujud sebesar Rp3.044.875 juta, penempatan investasi asosiasi dan jangka panjang lainnya sebesar Rp305.941 juta dan pengurangan penyertaan pada Entitas Asosiasi sebesar Rp133.032 juta. Arus kas untuk aktivitas investasi selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 menunjukkan adanya peningkatan terutama pada penempatan ventura bersama, penempatan deposito, perolehan aset tetap, perolehan aset tak berwujud, penempatan investasi asosiasi dan jangka panjang lainnya dan pengurangan penyertaan pada Entitas Asosiasi.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp9.554.721 juta. Arus kas masuk dari aktivitas investasi berasal dari penerimaan ventura bersama sebesar Rp75.191 juta, penerimaan pencairan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp100.000 juta dan pencairan deposito sebesar Rp2.005.953 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas investasi digunakan untuk penempatan investasi asosiasi dan jangka panjang lainnya sebesar Rp170.432 juta, penempatan pada ventura bersama sebesar Rp76.477 juta, serta perolehan aset tetap sebesar Rp611.420 juta, perolehan aset tak berwujud sebesar Rp5.573.411 juta, dan penempatan deposito Rp5.302.124 juta. Arus kas untuk aktivitas investasi selama tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan pada perolehan aset tetap, perolehan aset tak berwujud dan penempatan deposito.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp1.744.754 juta. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang obligasi sebesar Rp1.657.000 juta, penerimaan pinjaman bank sebesar Rp2.818.317 juta dan penerimaan setoran dari entitas non pengendali sebesar Rp3.422.417 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan digunakan untuk pembayaran biaya emisi obligasi Rp2.153 juta, pembayaran pinjaman bank sebesar Rp5.400.827 juta dan pembayaran pinjaman lembaga keuangan non bank jangka pendek sebesar Rp750.000 juta.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp22.459.333 juta. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang obligasi sebesar Rp2.900.000 juta, penerimaan pinjaman bank sebesar Rp29.502.305 juta, penerimaan setoran modal saham sebesar Rp116 juta, penerimaan pinjaman lembaga keuangan non bank sebesar Rp3.923.737 juta, penerimaan setoran dari Entitas Non Pengendali sebesar Rp5.446.746 juta dan penerimaan tambahan setoran modal sebesar Rp640 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan digunakan untuk pembayaran biaya emisi obligasi Rp5.834 juta, pembayaran pinjaman keuangan lembaga non bank sebesar Rp700.000 juta, pembayaran deviden tunai sebesar Rp209.548 juta, dan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp18.398.829 juta.

Pembelanaan Modal

Jumlah pembelanaan modal Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing sebesar Rp296.683 juta, Rp611.420 juta dan Rp938.317 juta.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal berasal dari sebagian besar adalah dari hasil usaha dan sebagian lagi dari pinjaman bank.

Perseroan terus berusaha untuk menerapkan perencanaan yang matang di dalam menjalankan usahanya. Hal ini diterapkan Perseroan dalam melakukan pembelanaan modal, dimana proses yang melibatkan pembelanaan, terutama dalam jumlah besar, dilakukan secara cermat dan hati-hati, antara lain dengan melakukan proses tender yang terarah dan transparan.

Mengingat pembelian barang modal yang dilakukan Perseroan dalam bentuk investasi alat yang setiap pembeliannya selalu direncanakan dengan baik, maka Perseroan tidak mengalami masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya. Adapun pengaruh pembelian barang modal tersebut dapat meningkatkan kinerja Perseroan.

Perseroan tidak memiliki pengikatan untuk pembelian barang modal yg belum direalisasi.

Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan Terhadap Total Aset

Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan rata-rata jumlah aset tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 (disetahunkan) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah adalah 2,63%, 3,95% dan 4,89%.

Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan Terhadap Total Ekuitas

Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 (disetahunkan) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah 9,25%, 13,70% dan 16,80%. Pergerakan pada imbal hasil ekuitas adalah disebabkan oleh pergerakan pada jumlah ekuitas dan laba bersih Perseroan.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yang dapat dihitung dengan cara, yaitu rasio lancar, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Rasio kas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah 0,27x, 0,34x dan 0,40x. Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing 1,27x, 1,26x dan 1,13x.

Penurunan rasio kas dan rasio lancar Perseroan disebabkan oleh waktu *collection period* yang semakin panjang dikarenakan kontrak *turnkey* serta peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek.

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar liabilitas-liabilitasnya, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, dan (ii) rasio utang bersih terhadap ekuitas (*net debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah utang bersih (hasil penjumlahan dari hutang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang Obligasi Rupiah, dan wesel bayar, setelah dikurangi dengan kas dan setara kas).

Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah 2,40x, 2,66x dan 2,12x. Rasio utang bersih terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah 1,32x, 1,50x dan 0,83x.

4. Manajemen Risiko

Perseroan dalam setiap melaksanakan kegiatannya selalu melakukan kajian risiko, mengevaluasi secara berkala atas rencana dan tindak lanjut analisa risiko yang dibuat oleh Unit Usaha serta melakukan pembahasan dengan manajemen Perseroan untuk mencari alternatif penyelesaian terbaik atas risiko-risiko yang dihadapi unit usaha tersebut. Di bawah ini adalah mitigasi atas risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan Perseroan adalah sebagai berikut :

- 1) **Mitigasi risiko pembayaran**
 - Mensyaratkan adanya jaminan pembayaran untuk proyek *prefinancing* kepada *owner* berupa bank garansi dari bank pemerintah atau bank swasta yang kredibel dan bank garansi tersebut bersifat *irrevocable* dan *unconditional*
 - Menetapkan batasan maksimum piutang usaha yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan
 - Memastikan piutang usaha Perseroan tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu
 - Memonitor umur dan pencairan piutang usaha
- 2) **Mitigasi risiko kenaikan harga dan ketersediaan bahan baku**
 - Membuat kontrak payung untuk material fabrikasi yang berskala besar seperti : besi beton, beton, aspal, semen, dll
 - Mengikat calon mitra untuk proyek-proyek yang sudah didapat dengan kontrak dan mengamankan klausul kontraknya dengan cara *back to back*
 - Memperhitungkan estimasi inflasi dan faktor risiko pada harga penawaran
 - Mencantumkan klausul eskalasi dalam dokumen kontrak dengan pelanggan terutama proyek multiyears
 - Melakukan dan mengajukan *review* desain untuk item pekerjaan yang merugikan
- 3) **Mitigasi risiko kebijakan pemerintah**
 - Mengajukan klaim akibat ditanggungkannya penyelesaian pekerjaan
 - Perintisan proyek lain diluar target yang direncanakan sebagai cadangan atas berkurangnya Pendapatan Usaha dan Laba.
 - Melakukan optimalisasi / *review* desain
- 4) **Mitigasi risiko persaingan usaha**
 - Menjalankan visi dan misi Perseroan yaitu menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang Industri Konstruksi, rekayasa, Investasi Infrastruktur, dan Realty dengan meningkatkan nilai perusahaan yang berkelanjutan, melalui:
 - a. SDM yang kompeten
 - b. Sistem dan Teknologi terintegrasi
 - c. Sinergi dengan mitra usaha
 - d. Inovasi
 - e. Diversifikasi Usaha.
 - Menerapkan nilai budaya Perseroan yaitu *Integrity* (jujur, adil, disiplin), *Professionalism* (ahli dibidangnya, menjalankan hak dan kewajiban), *Teamwork* (terbuka, komunikatif, peduli), dan *Excellence* (kreatif dan inovatif, proaktif dan responsif, tangguh dan militan).
 - Dengan motto usaha : maju dengan karya bermutu yang artinya melangkah ke depan dengan produk dan jasa yang bermutu untuk menjadi *champion*
 - Menjalankan kebijakan Perseroan untuk selalu mengendalikan risiko terhadap keselamatan-kesehatan kerja, lingkungan, mutu dan pengamanan dengan cara menerapkan sistem manajemen waskita untuk memenuhi kepuasan *stakeholders*.
 - Melakukan optimalisasi dan review metode kerja untuk efisiensi dan efektivitas penyelesaian pekerjaan
 - Melakukan pengembangan usaha baru yang didahului dengan kajian *feasibility study* untuk memberikan value dan return yang semaksimal mungkin bagi Perseroan

- Untuk memenangkan Persaingan dengan pesaing, Perseroan juga menetapkan kebijakan untuk mempertahankan kualitas pelayanan, menciptakan inovasi – inovasi baru dibidang rancang bangun dan metode pengerjaan proyek, membuka jaringan dengan melakukan kerjasama dengan investor untuk membantu pelanggan dalam mewujudkan proyeknya dan sinergi dengan entitas asosiasi untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelesaian pekerjaan.
- 5) **Mitigasi risiko perubahan nilai tukar valuta asing**
- Semaksimal mungkin melakukan transaksi *back to back* sesuai mata uang dalam kontrak
 - Melakukan *hedging* untuk mengamankan nilai tukar mata uang rupiah terhadap valuta asing
- 6) **Mitigasi risiko ekonomi**
- Perintisan proyek lain di luar target sebagai cadangan, termasuk yang ada dalam MP3EI (*masterplan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia)
 - Melakukan pengembangan usaha baru yang didahului dengan kajian *feasibility study* untuk memberikan *value* dan *return* yang semaksimal mungkin bagi Perseroan
 - Menambah segmentasi pasar terbesar adalah proyek pemerintah, BUMN/BUMD dan loan
 - Dalam penyusunan target pendapatan usaha dan laba, Perseroan sudah mempertimbangkan kondisi ekonomi makro Indonesia seperti SBI, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, inflasi dan suku bunga SPN 3 bulan
- 7) **Mitigasi risiko sosial & politik**
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelanjutan dan kelancaran pekerjaan
 - Melakukan komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan pembebasan lahan dan mengajukan kompensasi /klaim biaya atas keterlambatan pembebasan lahan
 - Mempekerjakan warga / penduduk lokal (sekitar proyek) sebagai *low skill employee*
 - Melibatkan subkontraktor/supplier lokal untuk melaksanakan pekerjaan penunjang
 - Melakukan sosialisasi pada instansi terkait dan masyarakat di sekitar proyek
 - Melakukan koordinasi dengan aparat desa, kecamatan dan kabupaten serta dengan aparat keamanan setempat
- 8) **Mitigasi risiko berkurangnya proyek dari pelanggan berulan**
- Melakukan penetrasi pasar (pelanggan) baru
 - Bersinergi dengan Pelanggan dengan menawarkan alternatif model proyek EPC, Design & Built kepada Owner

5. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing yang terjadi akan mempengaruhi pendapatan Perseroan karena untuk operasional Perseroan masih mendanai dana kerja dengan pinjaman bank
- b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu. Kebijakan tarif pajak penghasilan akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan
- c. Kebijakan infrastruktur seperti program percepatan pembangunan (MP3EI) akan berdampak pada meningkatnya pangsa pasar yang berpotensi meningkatkan nilai kontrak dan penjualan Perseroan

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan harga BBM yang akan mempengaruhi harga dari supplier yang akan berakibat pada biaya produksi Perseroan.
- b. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan.

6. Analisa Operasi per Segmen Usaha

Berikut adalah rincian pendapatan usaha, profitabilitas atau hasil dari masing-masing segmen operasi Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Maret 2017 (3 bulan)	Segmen Konstruksi	Segmen Sewa Gedung	Segmen Properti & Hotel	Segmen Precast	Segmen Energi	Segmen Tol	Jumlah
Pendapatan Usaha	7.179.606	2.771	27.418	68.534	8.788	67.679	7.354.796
Beban Pokok Pendapatan	6.142.273	-	23.324	49.389	449	24.958	6.240.393
Laba Bruto	1.037.333	2.771	4.094	19.145	8.339	42.721	1.114.403

(dalam jutaan Rupiah)

31 Maret 2017 (3 bulan)	Segmen Konstruksi	Segmen Sewa Gedung	Segmen Properti & Hotel	Segmen Precast	Segmen Energi	Segmen Tol	Jumlah
<u>Tidak dapat dialokasikan</u>							
Beban Usaha	-	-	-	-	-	-	(166.876)
Penghasilan Lain-lain – Bersih	-	-	-	-	-	-	183.746
Beban Lain-lain – Bersih	-	-	-	-	-	-	(153.705)
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	-	-	-	-	-	-	977.568
Beban Keuangan	-	-	-	-	-	-	(466.096)
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	-	-	-	-	-	-	10.523
Laba Sebelum Pajak	-	-	-	-	-	-	521.995
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	(96.323)
Laba Bersih Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	425.672

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2016 (1 tahun)	Segmen Konstruksi	Segmen Sewa Gedung	Segmen Properti & Hotel	Segmen Precast	Segmen Energi	Segmen Tol	Jumlah
Pendapatan Usaha	22.373.177	1.403	45.410	1.148.465	1.818	218.049	23.788.322
Beban Pokok Pendapatan	18.782.049	-	29.078	893.244	93	116.019	19.820.484
Laba Bruto	3.591.128	1.403	16.331	255.221	1.724	102.031	3.967.838
<u>Tidak dapat dialokasikan</u>							
Beban Usaha	-	-	-	-	-	-	(1.112.587)
Penghasilan Lain-lain – Bersih	-	-	-	-	-	-	334.958
Beban Lain-lain – Bersih	-	-	-	-	-	-	(44.427)
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	-	-	-	-	-	-	3.145.782
Beban Keuangan	-	-	-	-	-	-	(982.836)
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(7.357)	-	-	-	-	-	(7.357)
Laba Sebelum Pajak	-	-	-	-	-	-	2.155.589
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	(342.520)
Laba Bersih Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	1.813.069

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2015 (1 tahun)	Segmen Konstruksi	Segmen Sewa Gedung	Segmen Properti & Hotel	Segmen Precast	Segmen Energi	Segmen Tol	Jumlah
Pendapatan Usaha	12.041.430	10.961	-	2.068.570	-	31.792	14.152.753
Beban Pokok Pendapatan	10.475.464	-	-	1.740.620	-	15.431	12.231.515
Laba Bruto	1.565.966	10.961	-	327.949	-	16.361	1.921.238
<u>Tidak dapat dialokasikan</u>							
Beban Usaha	-	-	-	-	-	-	(798.759)
Penghasilan Lain-lain – Bersih	-	-	-	-	-	-	364.425
Beban Lain-lain – Bersih	-	-	-	-	-	-	(39.919)
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	-	-	-	-	-	-	1.446.986
Beban Keuangan	-	-	-	-	-	-	(340.008)
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	10.112	-	-	-	-	-	10.112
Laba Sebelum Pajak	-	-	-	-	-	-	1.117.090
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	(69.499)
Laba Bersih Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	1.047.591

Pendapatan usaha Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp7.354.797 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 139,45% atau setara dengan Rp4.283.254 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp3.071.542 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Kenaikan pendapatan usaha tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan jasa konstruksi sebesar 151,78% atau setara dengan Rp4.328.049 juta. Proyek-proyek jasa konstruksi yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan jasa konstruksi antara lain proyek LRT Sumatera Selatan, Tol Kayu Agung, Tol Bocimi, Batang – Semarang, Tol Trans Sumatera ruas Terbangi Besar – Kayu Agung dan beberapa proyek lainnya.

Pendapatan usaha Perseroan pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp23.788.323 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 68,08% atau setara dengan Rp9.635.570 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp14.152.753 juta pada 31 Desember 2015. Kenaikan pendapatan usaha tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan jasa konstruksi sebesar Rp10.321.403 juta. Proyek-proyek jasa konstruksi yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan jasa konstruksi antara lain proyek jalan Tol Pejagan-Pemalang, Tol Cibitung – Cimanggis, Tol Kayu Agung, Tol Bocimi, Batang – Semarang dan beberapa proyek lainnya.

Jumlah laba (rugi) bruto pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp1.114.403 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 114,46% atau setara dengan Rp594.776 juta, dibandingkan dengan laba (rugi) bruto pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yaitu sebesar Rp519.627 juta. Kenaikan laba (rugi) bruto tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha Perseroan, terutama dari jasa konstruksi.

Jumlah laba (rugi) bruto pada tahun 2016 adalah sebesar Rp3.967.838 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 106,53% atau setara dengan Rp2.046.601 juta, dibandingkan dengan laba (rugi) bruto pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.921.238 juta. Kenaikan laba (rugi) bruto tersebut disebabkan oleh perubahan model bisnis Perseroan dari kontraktor konvensional menjadi perusahaan investasi infrastruktur dan jalan tol, serta manufaktur beton precast.

a. Segmen Usaha Konstruksi

Peningkatan pendapatan usaha yang diperoleh oleh Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 didorong oleh kinerja segmen usaha jasa konstruksi yang berturut-turut menyumbang sebesar 97,62% dan 94,05% dari total pendapatan usaha sebesar Rp7.354.793 juta dan Rp23.788.320 juta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp12.051.774 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kontribusi dari proyek-proyek investasi Perseroan seperti:

Nama Proyek	Nilai Kontrak
LRT	Rp 10.943.791 juta
Tol Cibitung - Cimanggis Seksi II	Rp 3.591.327 juta
Batang - Semarang	Rp 5.838.865 juta

Berikut adalah kinerja segmen usaha Konstruksi:

	31 Maret 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Nilai Kontrak Baru	11.561	69.974	32.084

(dalam miliar Rupiah)

b. Segmen Usaha Precast

Perseroan mendirikan WSBP pada tahun 2014, anak perusahaan Perseroan ini merupakan anak usaha yang bergerak di bidang pemasaran, produksi, desain dan pengembangan serta ekspedisi precast. Pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 volume produksi precast mencapai 466.253 ton, jumlah tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar 322.090 ton dan pada tahun 2016, volume produksi precast mencapai 2.650.000 ton, jumlah tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan 2015 sebesar 1.800.000 ton.

Berikut adalah kinerja segmen usaha Precast:

	31 Maret 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Produksi (M ton):	466.253	2.650.000	1.800.000
Penjualan (Rp Miliar):	1.218.414	4.717.150	2.664.319

c. Segmen Usaha Jalan Tol

Perseroan melalui WTR menjalankan kegiatan usaha di bidang investasi jalan tol sejak tahun 2014. Hingga tahun 2017, WTR telah memiliki 18 konsesi jalan tol di Jawa dan Sumatera. Perusahaan memiliki target untuk menyelesaikan sebagian besar proyek jalan tol tersebut pada tahun 2018-2019.

d. Segmen Usaha Properti

Perseroan menjalankan kegiatan usaha Properti melalui WKR sejak tahun 2014. Dengan program optimalisasi aset Perseroan dan kerja sama dengan perusahaan lain serta pengembangan properti. Hingga tahun 2017, WKR memiliki 9 proyek investasi property, yaitu 8 proyek di Jawa dan 1 proyek di Sumatera.

e. Segmen Usaha Energi

Pada tahun 2016, Perseroan telah mendirikan anak usaha WKE yang ditujukan untuk menjadi holding bagi perusahaan pembangkit listrik milik Perseroan. Pembentukan WKE pada tahun 2016 menunjukkan keseriusan Perseroan untuk terus mengembangkan sektor energy. Terlebih lagi, keseriusan Perseroan ditunjukkan dengan telah digagas proyek PLTA 45 MW dengan menambah pembentukan satu anak perusahaan WKE selain WSE, yaitu PT Waskita Wado Energi.

Berikut adalah kinerja segmen usaha Energi:

	31 Maret 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Penjualan (Rp Miliar):	28.531	-	-

7. Likuiditas

Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari internal yang dibuktikan dengan rasio lancar Perseroan lebih dari 100%. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Se jauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja.

8. Batasan Pengalihan Dana Entitas Anak kepada Perseroan

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

9. Komitmen Investasi Barang Modal

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dimiliki oleh Perseroan.

10. Risiko Fluktuasi Mata Uang dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Salah satu risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko pelemahan mata uang Rupiah terhadap nilai tukar mata uang asing. Risiko ini dapat mengakibatkan adanya kerugian ataupun keuntungan selisih kurs. Pada umumnya risiko ini dihadapi oleh Perseroan karena adanya kegiatan operasional di luar Indonesia, sementara pencatatan laporan keuangan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Selain di Indonesia, Perseroan juga memiliki kegiatan operasional di Dubai, Malaysia dan Timor Leste. Dalam menyiapkan laporan keuangan, Perseroan mencatatkan dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Mata uang fungsional kantor cabang di Dubai, Malaysia dan Timor Leste adalah Arab Emirat Dirham, Saudi Arab Real, Ringgit dan Dolar Amerika Serikat. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas kantor cabang di Dubai dan Timor Leste, pada tanggal laporan keuangan dijabarkan ke mata uang Rupiah, Perseroan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata. Untuk tujuan penggabungan, laporan keuangan kantor cabang luar negeri dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs *Reuters*, sedangkan kantor cabang Malaysia dan Timor Leste menggunakan mata uang Ringgit dan Amerika Dolar (USD) dengan kurs Bank Indonesia (BI). Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Dengan demikian, adanya penguatan ataupun pelemahan mata uang Rupiah terhadap mata uang asing akan memiliki dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Mengingat Perseroan tidak memiliki *exposure* dalam mata uang asing yang signifikan, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai. Di samping itu sesuai dengan bidang usahanya, Perseroan juga tidak melakukan transaksi derivatif yang terkait dengan perubahan nilai mata uang.

Perseroan terekspos risiko tingkat suku bunga yang terutama berasal dari pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga mengambang. Dengan demikian, adanya kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga acuan pinjaman jangka pendek Perseroan akan berdampak terhadap kondisi keuangan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana perusahaan-perusahaan lain tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko utama Perseroan. Secara garis besar, risiko-risiko Utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

I. RISIKO UTAMA

a. Risiko Pembayaran

Risiko pembayaran dapat terjadi akibat tertundanya/tidak terbayarnya tagihan proyek dari pemberi tugas (*Owner*) yang mengakibatkan meningkatnya *cost of fund* dan dapat menimbulkan piutang bermasalah sehingga dapat mengurangi laba Perseroan.

Walaupun Perseroan telah mengatur mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggan, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tepat waktu sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap arus kas dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko pembayaran lebih besar kepada pemberi tugas dari golongan swasta. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterikatan yang Perseroan miliki seperti halnya hubungan Perseroan dengan pemberi tugas milik Pemerintah.

b. Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku

Dalam setiap proyek, Perseroan melakukan estimasi biaya yang mengacu kepada informasi dari pemasoknya serta berdasarkan pengalaman Perseroan sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa estimasi Perseroan maupun informasi yang diperoleh Perseroan adalah tepat. Dengan tenggang waktu pekerjaan berkisar antara satu hingga dua tahun terdapat risiko adanya faktor – faktor diluar kendali Perseroan yang dapat mempengaruhi estimasi biaya seperti kenaikan harga bahan baku konstruksi. Pada umumnya proyek-proyek yang diperoleh dari swasta mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah dan BUMN, hal tersebut disebabkan karena proyek – proyek swasta yang tidak menyediakan ruang bagi penyesuaian nilai kontrak apabila terdapat peningkatan beban kontrak.

Kenaikan harga bahan baku konstruksi dapat mengakibatkan meningkatnya biaya proyek, sehingga dapat mengurangi keuntungan Perseroan.

c. Risiko Berkurangnya Proyek dari Pelanggan Berulang

Penurunan atau tidak adanya usaha yang berulang (repetitif) dari pelanggan utama dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan. Walaupun Perseroan telah mempunyai hubungan baik dengan pelanggannya sehingga mendapat kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan lain oleh pelanggan tersebut, namun tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan menunjuk Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek yang akan dilaksanakan, sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

II. RISIKO UMUM

Terdapat beberapa risiko umum lain yang mana mempengaruhi kinerja usaha maupun kinerja keuangan dari Perseroan, di antaranya adalah:

a. Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko ini dapat timbul untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah ataupun BUMN/BUMD yang akibat perubahan kebijakan Pemerintah ditangguhkan pelaksanaannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Selain itu juga terdapat proyek-proyek yang berasal dari luar negeri dimana terdapat perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang dapat membatasi lalu lintas dana antar negara sehingga mempengaruhi pendapatan dan arus kas masuk Perseroan.

b. Risiko Sosial dan Politik

Gejolak sosial & politik dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gejolak ini dapat mengakibatkan turunnya berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat mengurangi pekerjaan/proyek Perseroan sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan, seperti adanya pergantian pejabat pemerintah, pembebasan tanah, demo yang dilakukan oleh masyarakat disekitar lokasi proyek.

c. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan pada bidang usaha jasa konstruksi akan semakin tajam tidak saja dengan perusahaan nasional tetapi persaingan juga terjadi dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, sehingga hal ini dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

d. Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Perseroan saat ini memiliki proyek-proyek yang berlokasi di luar negeri dan akan terus mengembangkan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi dengan menangani lebih banyak lagi proyek-proyek yang berlokasi di luar negeri. Untuk proyek-proyek tersebut Perseroan melakukan transaksi serta memiliki tagihan dan kewajiban dalam berbagai mata uang asing. Dengan adanya proyek-proyek tersebut Perseroan memiliki risiko nilai tukar apabila terdapat fluktuasi serta perubahan nilai tukar valuta asing terhadap mata uang Rupiah, yang selanjutnya dapat mempengaruhi pendapatan bersih Perseroan.

III. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

<p>MANAJEMEN PERSEROAN YANG MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</p>
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 23 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Henri Arifian atas laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

8.1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama "Volker Aaneming Maatschappij N.V." yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Setelah dinasionalisasi Perseroan kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Waskita Karya berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 15 Maret 1973 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan surat keputusannya No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta dibawah No. No.3062 dan 3063 tanggal 27 Agustus 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973 Tambahan No. 822

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 126 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AH-0007778.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 03 April 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043583.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 03 April 2017 dimana para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya dalam bidang Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan serta Investasi pada anak-anak perusahaan. Investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan modal dilakukan pada sebagaimana diungkapkan pada tabulasi di atas. Perseroan telah melakukan investasi pada anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang energi, perusahaan jalan tol, industri pabrikasi, dan realti.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan hingga sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	100,000000000000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000001
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	8.963.697.886	896.369.788.600	66,037201687708
- Masyarakat*	4.610.011.563	461.001.156.300	33,962798304925
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.573.709.450	1.357.370.945.000	100,000000000000
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	12.426.290.550	1.242.629.055.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.426.290.550	1.242.629.055.000	

* Kepemilikan dibawah 5%

Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jabatan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Arif Baharudin	Komisaris	1.600.079	160.007.900	0,01%
2. Mohammad Choliq	Direktur Utama	26.433.934	2.643.393.400	0,19%
3. Agus Sugiono	Direktur	1.077.500	107.750.000	0,01%
4. Adi Wibowo	Direktur	10.081.600	1.008.160.000	0,07%
5. Nyoman Wirya Adnyana	Direktur	691.313	69.131.300	0,01%
6. Tunggal Rajagukguk	Direktur	1.493.486	149.348.600	0,01%
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		41.377.912	4.137.791.200	0,30%

Berikut adalah beberapa kejadian penting Perseroan sejak awal berdiri sampai dengan tahun 2016.

Tahun	Kejadian Penting
1961	Nasionalisasi "Volker Aannemings Maatschappij N.V" menjadi Perseroan Negara.
1974	Mengubah status menjadi Perseroan Terbatas.
1980	Perseroan mengerjakan proyek skala besar seperti Bandar Udara Soekarno Hatta dan Reaktor Multiguna Siwabessy.
1990	Perseroan menyelesaikan berbagai gedung bertingkat seperti BNI City, Gedung BI, Mandiri Plaza Tower.
2000	Perseroan meraih sertifikasi ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 dan memperbaharui sertifikasi OHSAS 18001:2007
2012	Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada Desember 2012.
2013	Meningkatkan peringkat obligasi menjadi A. Perseroan mendirikan WSE.
2014	Menerbitkan Obligasi pertama pada November 2014 dengan peringkat A. Perseroan mendirikan anak perusahaan WTR, WSBP, WKR, PMT dan PT Jasmarga Kualanam Tol.
2015	Memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,5 triliun serta Dana Publik sebesar Rp18 triliun sehingga total dari Dana Penawaran Umum Terbatas melalui (<i>rights issue</i>) sebesar Rp5,3 triliun. Perseroan menggunakan dana hasil dari Penawaran Umum Terbatas untuk mengembangkan investasi jalan tol dengan kepemilikan mayoritas maupun minoritas pada 12 ruas jalan tol dengan panjang hampir 524 Km baik di Jawa atau Sumatera.
2016	Anak Perusahaan Perseroan, PT Waskita Beton Precast Tbk mencatatkan sahamnya dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham WSBP.
2017	Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat kejadian penting yang mempengaruhi kinerja Perseroan secara signifikan.

Berikut disampaikan informasi mengenai aksi korporasi yang pernah dilakukan oleh Perseroan:

Emisi Saham (IPO dan PUT)

No.	Harga Saham	Jumlah Saham	Tanggal Efektif
1.	Rp380 (IPO)	3.082.315.000	19 Desember 2012
2.	Rp1.450 (PUT)	3.653.498.200	24 Juni 2015

Emisi Obligasi

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif OJK	Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang (Rp juta)
1	PUB I Obligasi Waskita Karya Tahap I Tahun 2014	-	500.000	10,40%	3 (tiga) tahun	idA	10 November 2014	18 November 2017	500.000
2	PUB I Obligasi Waskita Karya Tahap II Tahun 2015	A	350.000	10,40%	3 (tiga) tahun	idA	10 November 2014	16 Oktober 2018	1.500.000
		B	1.150.000	11,1%	5 (lima) tahun			16 Oktober 2020	
3	PUB II Obligasi Waskita Karya Tahap I Tahun 2016	A	2.000.000	9,25%	3 (tiga) tahun	idA-	2 Juni 2016	10 Juni 2019	2.000.000
4	PUB II Obligasi Waskita Karya Tahap II Tahun 2016	A	900.000	8,50%	5 (lima) tahun	idA-	2 Juni 2016	28 September 2021	900.000
5	PUB II Obligasi Waskita Karya Tahap III Tahun 2017	A	747.000	8,50%	3 (tiga) tahun	idA-	3 Februari 2017	21 Februari 2020	747.000
		B	910.000	9,00%	5 (lima) tahun			21 Februari 2022	910.000
Total Obligasi Yang Masih Terhutang									6.557.000

Tidak ada pembatasan terkait penambahan utang Perseroan yang dapat membatasi penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 ini.

8.2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2015

Bahwa pada tahun 2015 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.37 tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0953263 tanggal 30 Juli 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536245.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 30 Juli 2015, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan rincian sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan sejumlah 8.963.697.886 (delapan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan saham seri B atau dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp896.369.788.600 (delapan ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) dan masyarakat sejumlah 4.603.775.673 (empat milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima enam ratus tujuh puluh tiga) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp460.377.567.300 (empat ratus enam puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah). Berdasarkan perubahan tersebut, komposisi dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	100	0,000000003846
Seri Biasa (Seri B)	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	100,000000000000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			
- Pemerintah Republik Indonesia	1	100	0,000000001
Saham Biasa (Seri B)			
- Pemerintah Republik Indonesia	8.963.697.886	896.369.788.600	66,04311884
- Masyarakat*	4.603.775.673	460.377.567.300	33,95688115
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.567.473.560	1.356.747.356.000	100,00000000
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	12.432.526.439	1.243.252.643.900	
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.432.526.439	1.243.252.643.900	

*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Mohamad Hasan	2.423.817	242.381.700	0,01785830
2. Arif Baharudin	1.500.079	150.007.900	0,01105230
3. M. Choliq	22.680.034	2.268.003.400	0,16710290
4. Nyoman Wirya Adnyana	691.313	69.131.300	0,00509350
5. Desi Arryani	13.282.008	1.328.200.800	0,09771240
6. Agus Sugiono	1.850.000	185.000.000	0,01363050
7. Tunggul Rajagukguk	10.876.208	1.087.620.800	0,08013420
8. Adi Wibowo	10.081.600	1.008.160.000	0,07427960
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian	63.385.059	6.338.505.900	0,46686370

Tahun 2016

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No.06 tanggal 4 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0016611 tanggal 5 Februari 2016 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015956.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016, dimana para pemegang saham menyetujui untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui pelaksanaan Opsi Beli Seri B sehubungan dengan Mesop sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan rincian sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan sejumlah 8.963.697.886 (delapan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam) saham seri B atau

dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp896.369.788.700 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah) dan masyarakat sejumlah 4.608.795.423 (empat miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp460.879.542.300 (empat ratus enam puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus Rupiah). Berdasarkan perubahan tersebut, komposisi dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri Preferen (Seri A Dwiwarna)	1	100	0,000000003846
Seri Biasa (Seri B)	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	100,000000000000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			
- Pemerintah Republik Indonesia	1	100	0,000000001
Saham Biasa (Seri B)			
- Pemerintah Republik Indonesia	8.963.697.886	896.369.788.600	66,0372016877
- Masyarakat*	4.608.795.423	461.001.156.300	33,9627983049
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.573.709.450	1.357.370.945.000	100,00000000
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	12.426.290.550	1.242.629.055.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.426.290.550	1.242.629.055.000	

*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Kepegunungan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Arif Baharudin	1.600.079	160.007.900	0,0117881
2. M. Choliq	23.643.934	2.364.393.400	0,1741892
3. Nyoman Wirya A.	691.313	69.131.300	0,0050930
4. Agus Sugiono	1.077.500	107.750.000	0,0079381
5. Tunggul Rajagukguk	7.050.008	705.000.800	0,0519387
6. Adi Wibowo	10.081.600	1.008.160.000	0,0742730
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian	44.144.434	4.414.443.400	0,3252201

Berikut disampaikan informasi terkait MESOP Perseroan:

No.	Harga MESOP	Jumlah Saham Penerbitan MESOP	Jumlah MESOP yang diterbitkan pada tahun 2016
1.	438	554.720	242.967.360
2.	396	770.320	305.046.720

Tahun 2017

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 126 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AH-0007778.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 03 April 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043583.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 03 April 2017, dimana para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan perubahan tersebut, komposisi dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	100,000000000000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000001
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	8.963.697.886	896.369.788.600	66,0372016877
- Masyarakat*	4.610.011.563	461.001.156.300	33,9627983049
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.573.709.450	1.357.370.945.000	100,00000000
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	12.426.290.550	1.242.629.055.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.426.290.550	1.242.629.055.000	

*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jabatan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Arif Baharudin	Komisaris	1.600.079	160.007.900	0,01%
2. Mohammad Choliq	Direktur Utama	26.433.934	2.643.393.400	0,19%
3. Agus Sugiono	Direktur	1.077.500	107.750.000	0,01%
4. Adi Wibowo	Direktur	10.081.600	1.008.160.000	0,07%
5. Nyoman Wiry Adnyana	Direktur	691.313	69.131.300	0,01%
6. Tunggul Rajagukguk	Direktur	1.493.486	149.348.600	0,01%
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		41.377.912	4.137.791.200	0,30%

8.3. IZIN-IZIN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha diatas khususnya dibidang jasa konstruksi, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000, dimana Perseroan telah memiliki izin usaha sebagai berikut:

- Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 1599/C.31/31.75/-1.785.56/2017 tanggal 20 September 2017 atas nama Perseroan untuk daftar klasifikasi bidang Bangunan Gedung, Bangunan Sipil, Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, Jasa Konstruksi dan Terintegrasi, yang ditetapkan atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan 6 November 2017;
- Surat Keputusan Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No: 22/KPTS/LPJK/D/II/2003 tentang penetapan akreditasi kepada Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) sesuai dengan Nomor Registrasi yang tercatat pada Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) No. 2-3172-2-05-1-09-001723 dan memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sebagai berikut:

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Dimulai	Atas nama dan No. Registrasi	Tanggal Berakhir	Ditetapkan	Bidang Usaha	Tahapan Proses Perpanjangan Izin
1	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0212109	20 Februari 2015	atas nama Perseroan dengan No. Registrasi 0-3172-006-1-09-001723	10 Desember 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Bangunan Sipil	
2	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0197925	23 Januari 2015	atas nama Perseroan anggota AKI dengan No. Registrasi 0-3172-06-005-1-09-001723	8 September 2017*	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Bangunan Gedung	Sedang dalam tahap verifikasi dokumen pendukung di AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia)
3	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0197894	14 Januari 2015	atas nama Perseroan anggota AKI dengan No. Registrasi 0-3172-07-005-1-09-001723	8 September 2017*	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Bangunan Sipil	Sedang dalam tahap verifikasi dokumen pendukung di AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia)
4	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0212136	26 Februari 2015	atas nama Perseroan anggota AKI dengan No. Registrasi 0-3172-08-005-1-09-001723	6 November 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	
5	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0212484	2 April 2015	atas nama Perseroan anggota AKLI dengan No. Registrasi 0-3172-09-007-1-09-001723	22 September 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	Sedang dalam tahap verifikasi dokumen pendukung di AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia)

*sedang dalam proses perpanjangan izin

Seluruh izin-izin terkait kegiatan usaha yang dimiliki dan dipenuhi oleh Perseroan tersebut di atas juga diharapkan dapat mendukung kinerja usaha Perseroan.

8.4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING YANG DILAKUKAN PERSEROAN

Dibawah ini adalah ringkasan perjanjian-perjanjian konstruksi dan perjanjian kredit yang dilakukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Manfaat dan Dampak yang diperoleh Perseroan dari adanya perjanjian penting dan/atau perjanjian sejenis lainnya (termasuk didalamnya perpanjangan/pengakhiran perjanjian).

Manfaat:

1. Sebagai dasar hukum dan panduan bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya;
2. Memberikan batasan hak dan kewajiban para pihak;
3. Memberikan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan kejadian yang akan terjadi dikemudian hari sebagai akibat pelaksanaan kontrak;
4. Memberikan solusi terhadap masalah yang akan terjadi;
5. Mengamankan hak-hak Perseroan;
6. Memberikan perlindungan hukum dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usahanya;
7. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak.

Dampak:

1. Perjanjian memberikan perlindungan hukum mengenai tugas dan tanggung jawab para pihak sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat/kesepakatan para pihak;
2. Tercapainya maksud dan tujuan dari kegiatan usaha Perseroan;
3. Memberikan kepastian hukum bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
4. Menjamin iklim kegiatan usaha perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

Perjanjian-perjanjian berikut adalah perjanjian berjenis konstruksi dan perjanjian kredit yang masih berlaku atau masih mengenakan kewajiban bagi Perseroan:

8.4.1. Perjanjian-perjanjian Konstruksi antara Perseroan dengan pihak terafiliasi

Perjanjian-perjanjian dengan pihak afiliasi di bawah ini telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.I.

1. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan No. 85/KONTRAK-DIR/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali dengan Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Ruas Porong-Gempol) Paket-3 B: STA 42+650 – STA. 44+386.5 Addendum VI No. 85/KONTRAK-DIR/2012 tanggal 15 Mei 2015.

Para Pihak	:	Pihak pertama	:	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
		Pihak kedua	:	Perseroan
Tujuan	:	Merubah Kontrak Pembangunan Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Ruas Porong-Gempol) Paket-3 B: STA 42+650 – STA. 44+386.5.		
Nilai Kontrak	:	Harga termasuk PPN: Rp338.349.416.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan millar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu Rupiah).		
Jangka Waktu	:	Perjanjian telah memasuki masa performa/masa pemeliharaan Selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Masa Pemeliharaan No. 44/BA-DIR/2016 tanggal 16 Agustus 2016.		
Pilihan Hukum	:	Mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.		
Pilihan Forum	:	Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.		

2. Kerja Konstruksi Harga Satuan Proyek Pembangunan Jembatan Merah Putih Bentang Tengah HK.02.03/BL.IX/498677.02/APBN/2012/01 tanggal 17 Juli 2012 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum No. 07 Surat Perjanjian No. HK.02.03./BL.IX/498677.02/APBN/2012/01/AD.07 tanggal 12 Juli 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) JMP Jembatan Bentang Tengah
		Pihak Kedua	:	Kemitraan/KSO antara Perseroan, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO No.03B.ADD/KSO/WK/DVII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebagaimana telah diubah

- dengan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. 03C.ADD/KSO/WK/DVII/2012 tanggal 02 Oktober 2013.
- Tujuan Proyek : Pembangunan Jembatan Merah Putih.
- Nilai Kontrak : Harga sudah termasuk PPN : Rp458.131.260.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah). Pembayaran dilakukan secara Sertifikat Bulanan (MC).
- Jangka Waktu : Jangka waktu Penyelesaian adalah selama 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) hari kalender sejak SPK tanggal 30 Juli 2012 ditambah masa pemeliharaan selama 5 (lima) tahun 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender.
- Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Perjanjian Paket Kerja Konstruksi Normalisasi Ciliwung Paket-2 (Kontrak Harga Satuan) Nomor HK.02.03/PPKSP-SVNT PJSACC/XII/337.1 tanggal 03 Desember 2013.
- Para Pihak : Pihak Pertama : Satuan Kerja NVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane
Pihak Kedua : Perseroan – PT Utama Karya (KSO)
- Tujuan Proyek : Pemilihan Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung Paket-2 melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- Nilai Kontrak : Rp298.620.388.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sampai dengan, sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No. KU.05.05.SP-I/03 Tanggal 17 November 2016 atau sampai dengan tanggal 17 November 2017.
- Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Perjanjian Kerja Konstruksi Gabungan *Lump Sump* dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Bulu (Batas Provinsi Jateng) Batas Kota Tuban.
- Nomor : KU.03.01/3172/498631.23/2012
- Tanggal : 20 Juli 2012
- Para Pihak : Pihak Pertama : Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
Pihak Kedua : Perseroan Divisi IV Cabang Jatim.
- Tujuan Proyek : Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Pemeliharaan.
- Nilai Kontrak : Harga termasuk PPN: Rp178.624.341.000,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 880 (delapan ratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan masa pemeliharaan 1.095 hari mulai dari 25 November 2014 sampai dengan 23 November 2017.
- Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

5. Perjanjian Kontrak (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar No : HK.02.03-An/PPK.PB II/Gondang/14 tanggal 3 Mei 2013 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen II No. HK.02.03-An/PPK.PB/II/Gondang/Amd.2/15 tanggal 15 September 2015 atas Amandemen I No. HK.02.03-An/PPK.PB/II/Gondang/Amd.1/15 tanggal 20 April 2015 atas Surat Perjanjian No.02.03-An/PPK.PB/II/Gondang/14 tanggal 26 Mei 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : Pihak Pertama : Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT Pembangunan Bendungan Bengawan Solo.
Pihak Kedua : Perseroan

Tujuan Proyek : Pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar.
Nilai Kontrak : Harga Termasuk PPN: Rp657.500.670.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Jangka Waktu : Jangka waktu pekerjaan adalah 1440 (seribu empat ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor HK.02.03-An/PPK.PB II/SPMK/14 tanggal 30 Mei 2014 yang mana pekerjaan selesai tanggal 9 Mei 2018, ditambah masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender yang mana sampai dengan saat ini kami belum menerima SPMK tersebut.

Pilihan Hukum : Mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia
Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

6. Perjanjian Pemborongan Concrete works & Architectural Works PUSRI-IIB Palembang, Sumatera Selatan No. P2B-00-10-CT-010-R tanggal 4 Juli 2013 yang telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali oleh Perubahan kedua:

Nomor : P2B-00-10-PO-005-R
Tanggal : 9 Mei 2014
Para Pihak : Pihak Pertama : PT Rekayasa Industri.
Pihak Kedua : Perseroan.

Tujuan Proyek : Concrete works & Architectural Works.
Nilai Kontrak : Harga tidak termasuk PPN : Rp.156.500.000,00 (Seratus lima puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).

Jangka Waktu : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah bulan ke-30 (Tiga puluh) dari overall PUSRI-IIB project schedule atau sampai dengan 31 Juli 2015 dan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. Sampai dengan saat ini, berdasarkan keterangan Perseroan perjanjian belum berakhir dan masih proses penyelesaian melalui negosiasi sesuai dengan Surat No. P2B-L-RJ/UM-0331 tanggal 15 Desember 2016.

Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Uji Tuntas Aspek Hukum yang dilakukan dan berdasarkan keterangan dari Perseroan tanggal 01 Februari 2017, sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Ini, berdasarkan keterangan Perseroan perjanjian belum berakhir dan masih proses penyelesaian melalui negosiasi sesuai dengan Surat No. P2B-L-RJ/UM-0331 tanggal 15 Desember 2016.

7. Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan jalan tol Pejagan- Pemalang Seksi I : STA 270+000- STA 284+250 No. 01/KJP/PPTR/2014 tanggal 25 Agustus 2014, sebagaimana telah beberapa kali dengan perubahan terakhir Addendum III No.03/ADD/SPPJK/PPTR/2016 tanggal 23 Maret 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PPTR sebagai Pihak Pertama
2) Perseroan sebagai pihak Kedua.

Objek Perjanjian : kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan jalan tol Pejagan- Pemalang seksi I.

- Nilai Perjanjian : Rp.1.398.508.060.077,29 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus delapan juta enam puluh ribu tujuh puluh tujuh koma dua puluh sembilan Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN.
- Jangka Waktu : terhitung sejak ditandatangani kontrak oleh para pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara serah terima akhir (FHO) hasil pekerjaan selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari. Dan dengan jangka waktu masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak ditandatanganinya Berita Acara serah terima akhir (FHO) sampai dengan ditandatanganinya berita acara serah terima masa pemeliharaan.
- Tujuan Perjanjian : pekerjaan pembangunan jalan tol pejalan- Pemalang seksi I.
- Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:
- 1) Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
 - 2) Berhak meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan pekerjaan.
 - 3) Berkewajiban melakukan serah terima lahan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
 - 4) Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam kontrak ini.
- Pihak Kedua sebagai berikut:
- 1) Pihak kedua berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini.
 - 2) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak beserta lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama.
 - 3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan pekerjaan sebatas yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua.
 - 4) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu.

Penyelesaian Sengketa :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

8. Kontrak Jasa Pemborongan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Bekasi- Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) No. 01/SPP-KKDM/XI/2014 tanggal 28 November 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1) PT Kresna Kusuma Dyandra Marga sebagai Pihak Pertama
2) Perseroan sebagai pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : Kontrak Jasa Pemborongan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Bekasi- Cawang- Kampung Melayu (Becakayu)
- Nilai Perjanjian : Rp.1.284.476.179.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN.
- Jangka Waktu : masa berlaku kontrak ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani kontrak selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari. Dan masa pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- Tujuan Perjanjian : pekerjaan pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:

- 1) Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- 2) Berhak meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan pekerjaan.
- 3) Berkewajiban melakukan serah terima lahan dalam rangka pelaksanaan.
- 4) Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tempat waktu.

Pihak Kedua sebagai berikut:

- 1) Pihak kedua berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pihak Pertama untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak
- 3) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu.
- 4) Melaksanakan seluruh perbaikan terhadap Cacat Mutu dari Pekerjaan serta penyempurnaan Pekerjaan dalam Masa Pemeliharaan.

Penyelesaian Sengketa :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

9. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 5/SPP/WK-PTP/KSO/2014 tanggal 19 November 2014, sebagaimana telah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Addendum IV No. 05/ADD IV/SPP/WK-PTP/KSO/2016 tanggal 09 September 2016 dalam Proyek Pembangunan gedung Brooklyn Suite, Soho, Office, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) KSO Waskita Trinita sebagai Pihak Pertama
2) Perseroan sebagai pihak Kedua.

Objek Perjanjian : paket pekerjaan struktur, Arsitektur, Plumbing, Mekanikal, Elektrikal dan Equipment atas proyek Pembangunan Gedung Brooklyn Suite, Soho, Office Alam Sutera-Tangerang.

Nilai Perjanjian : Rp.592.236.563.851,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah).

Jangka Waktu : Durasi masa Pelaksanaan adalah sampai dengan 31 Desember 2016 yang mana sampai saat ini telah memasuki masa pemeliharaan selama 1 (satu) tahun.

Tujuan Perjanjian : Pembangunan gedung Brooklyn Suite, Soho, Office di Alam Sutera Tangerang.

Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:

- 1) Pihak Pertama menjamin keakuratan semua data dan informasi yang diberikan kepada Pihak Kedua.
- 2) Pihak pertama hanya bertanggung jawab untuk biaya-biaya perijinan baru PLN, Telkom, PDAM, IMB, selain itu perijinan berkaitan dengan pihak kedua merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.

Pihak Kedua sebagai berikut:

- 1) Pihak kedua tidak boleh mengalihkan sebagian dan atau seluruh pekerjaan tanpa persetujuan Pihak Pertama.
- 2) Pihak Kedua harus menjaga keamanan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup paket pekerjaan baik diluar maupun di dalam proyek dengan segala resiko dan biayanya.

Penyelesaian Sengketa :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

10. Surat Perjanjian Civil Works for Construksion of Karian Multipurpose Dam Project No. HK.02.03/SNVT-PBK/BEND/07 tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : Penyedia : KSO Daelim Industrial Co. Ltd., PT Wijaya Karya Karya (Persero) Tbk dan Perseroan.
PPK : Pemerintah Indonesia cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air c.q Balai Besar Wialah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian cq SNVT Pembangunan Bendungan Karian.
- Tujuan Proyek : Melaksanakan pembangunan Bendungan Karian.
Nilai Kontrak : Nilai kontrak yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terdiri dari:
- a. Porsi PHLN EDCF:
Porsi Foreign Currency sebesar:
KRW 26.189.544.720 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Won Korea) ekuivalen dengan USD 23.932.035,79 (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Lima Dolar Amerika dan Tujuh Puluh Sen); dan

Porsi Local Currency sebesar:
Rp.502.739.367.000,00 (lima ratus dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), ekuivalen dengan USD 38.456.312,01 (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas dolar Amerika dan Satu Sen)
 - b. Porsi Pemerintah Republik Indonesia:
Rp255.117.957.600,00 (dua ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah), equivalent to USD 19.514.874,74 (sembilan belas juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat dolar Amerika dan Tujuh Puluh Empat Sen).
- Jangka Waktu : Masa pelaksanaan kontrak adalah 1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditambah Masa Pemeliharaan untuk proyek ini adalah selama 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender sejak tanggal penyerahan pekerjaan.
- Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika tidak dapat tercapai musyawarah mufakat, perselisihan akan diputus melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
11. Surat Perjanjian Paket 1 Pembangunan Jalan tol Solo – Kerosono Seksi 1 Multi Years No. KU.02.03/PPK I-PJBHNSK/0107.01/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang ditandatangani dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : Penyedia : KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Perseroan, dan PT Nindya Karya (Persero) berdasarkan KSO No.001/WIKA-WK-NK.KSO/SOKER/II/2015 tanggal 3 Februari 2015.
PPK : PPK Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono I.
- Tujuan Proyek : Melaksanakan pembangunan Paket 1 Pembangunan Jalan tol Solo – Kerosono Seksi 1 *Multi Years*.
- Nilai Kontrak : Rp.541.994.562.000,- (lima ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lum aratus enam puluh dua ribu Rupiah)
- Jangka Waktu : Masa pelaksanaan kontrak adalah 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender sejak penandatanganan Ketentuan Khusus Kontrak tanggal 24 Juli 2015. Masa Pemeliharaan untuk proyek ini adalah selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penyerahan pekerjaan.

Penyelesaian Sengketa : Tidak diatur proses penyelesaian sengketa, oleh karena itu sengketa akan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

12. Perjanjian KSO terpadu tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama No. 81 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015, tentang pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jakarta Selatan (RSUD Pasar Minggu), dengan ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak : 1) Perseroan sebagai pihak Pertama.
2) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pihak Kedua.

Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara Perseroan dengan PT Wijaya Karya (persero) Tbk dengan Nama KSO Wika Waskita.

nilai Perjanjian : Rp345.187.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta Rupiah).

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani para pihak sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, yang mana berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2017, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak, yang mana pembangunan telah sampai pada masa pemeliharaan.

Tujuan Perjanjian : pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jakarta Selatan (RSUD Pasar Minggu

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaian Sengketa:

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

13. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/KSO/WASHUTAWI-KSO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 dalam Rangka Proyek Pembangunan Kontruksi Runway Bandar Udara Samarinda baru Kalimantan Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) Perseroan sebagai pihak Pertama.
2) PT Wijaya Karya (persero) Tbk. sebagai Pihak Kedua.
3) PT Utama Karya (persero) sebagai Pihak Ketiga.

Objek Perjanjian : pembentukan KSO WASKITA-HUTAMA-WIKA.

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila:
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO.
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. SPMK/004/FIS/BSB-UDR/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, penyelesaian pembangunan sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 ditambah dengan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari .

Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak

Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Proyek Pembangunan Kontruksi Runway Bandar Udara Samarinda baru Kalimantan Timur.

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.

- 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaian Sengketa :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

14. Joint Operation tanggal 15 Juni 2015 dalam proyek Civil Works for Construction of Karian Multipurpose Dam Project, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) Daelim Industrial Co., Ltd. sebagai Daelim.
2) Perseroan sebagai Waskita.
3) PT Wijaya Karya (persero) Tbk sebagai Wika.

Objek Perjanjian : pembentukan KSO untuk pembangunan konstruksi Bendungan Karian

Jangka Waktu : perjanjian berlaku sejak penandatanganan perjanjian yaitu tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 1.459 (seribu empat ratus lima puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditambah Masa Pemeliharaan untuk proyek ini adalah selama 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hari kalender sejak tanggal penyerahan pekerjaan dan berakhir apabila KSO tidak berhasil mendapatkan proyek atau KSO berhasil mendapatkan proyek dan telah terjadi penyelesaian seluruh kewajiban dan pekerja, seluruh penjaminan telah dikembalikan, seluruh peralatan telah dikeluarkan, seluruh permasalahan terkait kegiatan KSO telah diselesaikan, dan seluruh pembayaran kewajiban telah dilunasi.

Nilai Perjanjian : Pembagian persentase berdasarkan total nilai kontrak pembangunan adalah Partner 1 sebesar 51% (lima puluh satu persen), Partner 2 sebesar 27% (dua puluh tujuh persen), Partner 3 sebesar 22% (dua puluh dua persen).

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
1) Para Pihak wajib bertindak bersama-sama.
2) Para Pihak tidak dapat bertindak sendiri atas nama KSO atau untuk mengikat partner lain tanpa persetujuan tertulis dari partner-partner lainnya.

Penyelesaian Sengketa : KSO ini tunduk berdasarkan hukum Singapura. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara damai. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan berdasarkan *Rules of Singapore International Arbitration Center (SIAC)*.

15. Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 10 April 2015 dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 1 Paket 1 (Sta -0+750 s/d 4+850) Tahap 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) Perseroan sebagai Waskita.
2) PT Wijaya Karya (persero) Tbk sebagai Wika.

Objek Perjanjian : pelaksanaan proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi Seksi 1 Paket 1 (Sta -0+750 s/d 4+850) Tahap 1

Jangka Waktu : perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berakhir sejak munculnya kejadian di bawah ini, mana yang lebih dulu;
a. Para Pihak sepakat secara tertulis untuk menghentikan perjanjian;
b. Pelaksanaan proyek dan kontrak telah selesai yaitu 560 (lima ratus enam puluh) hari kalender sejak tandatangan perjanjian ini, dengan jangka waktu pemeliharaan 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender; atau
c. Berlakunya cidera janji

Nilai Perjanjian : pembagian porsi kemitraan adalah Waskita sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan Wika sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para Pihak harus mengikat kontrak dengan PT Trans Jabar Tol dengan nama Waskita-Wika KSO.
 - 2) Para Pihak bertanggung jawab kepada PT Trans Jabar Tol baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan Kontrak.
 - 3) Para Pihak tidak dapat bertindak sendiri atas nama KSO tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
 - 4) Para Pihak akan mematuhi serta mengindahkan segala ketentuan hukum, peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang disepakatai KSO.

Penyelesaian Sengketa:

KSO ini tunduk dan diimplementasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan berdasarkan prosedur Perselisihan BANI di Jakarta. Keputusan BANI bersifat mengikat dan final.

16. Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 10 April 2015 dalam Pelaksanaan pekerjaan Paket 1 Pembangunan Jalan Tol Solo–Kertosono Seksi 1 Multi Years, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1) Perseroan sebagai Waskita.
2) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai Wijaya;
3) PT Nindya Karya (Persero) sebagai Nindya.
- Objek Perjanjian : pelaksanaan proyek Pelaksanaan pekerjaan Paket 1 Pembangunan Jalan Tol Solo – Kertosono Seksi 1 *Multi Years*
- Jangka Waktu : perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berakhir sejak munculnya kejadian di bawah ini:
a) Pelaksanaan pekerjaan telah selesai termasuk masa pemeliharaannya;
b) Telah diselesaikannya kewajiban KSO kepada Pengguna Jasa dan pihak-pihak lain;
c) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak antara para pihak KSO;
d) Pembukuan KSO, Rekening bank dan NPWP telah ditutup;
e) Para Pihak sepakat secara tertulis untuk menghentikan perjanjian; atau
f) Berlakunya cedera janji
- Nilai Perjanjian : pembagian porsi kemitraan adalah Wijaya sebesar 38% (tiga puluh delapan persen), Waskita sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dan Nindya sebesar 31% (tiga puluh satu persen).
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
1) Masing-masing pihak tidak dapat mengerjakan kewajiban atas nama KSO tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lain.
2) Para Pihak sepakat untuk tidak mengundurkan diri dari KSO atau menghentikan KSO, kecuali ada ketentuan dalam perjanjian.
3) Wijaya ditunjuk sebagai pimpinan KSO.
4) Para Pihak akan mematuhi serta mengindahkan segala ketentuan hukum, peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang disepakatai KSO.

Penyelesaian Sengketa:

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan berdasarkan prosedur Perselisihan BANI.

17. Surat Perjanjian Pemesanan Material No. 135/SPPM/WK/DS/2015 tanggal 5 Juni 2015 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan WSBP sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obyek Perjanjian : pengadaan material Prrecast dan ReadyMix untuk proyek Tol Kanci - Pejagan.
- Nilai Perjanjian : Rp19.119.832.393,- (sembilan belas miliar seratus sembilan

- belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen)
- Jangka Waktu : sejak ditanda-tanganinya perjanjian dan sesuai dengan *schedule* proyek.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;
 - mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;
 - Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;
 - Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;
 - Melakukan test sebelum maerial dikirim ke lapangan;
 - Memenuhi spesifikasi material yang dikirim

Penyelesaian Perselisihan :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

18. Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Ciawi Seksi 1 Paket 1(Sta 0+750s/d 4+850) No TJT : No. 005/SPK/TJT/IV/2015/, No. Waskita-Wika KSO No. 23A/BOCIMI/Askita-Wika KSO/IV/2015 tanggal 10 April 2015 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Waskita-Wika KSO sebagai Pihak Kedua, sebagaimana diubah terakhir kali Amandemen II No. 001/ADII/SPK/TJT/2016 tanggal 27 Januari 2016 , dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obyek Perjanjian : pengadaan material Precast dan ReadyMix untuk proyek Tol Pejagan-Pemalang Seksi II.
- Nilai Perjanjian : Rp724.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh empat miliar Rupiah) sudah termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).
- Jangka Waktu : 560 (lima ratus enam puluh) hari kalender sejak tandatangan perjanjian ini, dengan jangka waktu pemeliharaan 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender setelah BAST-SP.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- Berhak melakukan Inspeksi Material bersama Konsultan Pengawas;
 - mengirim Surat Pemesanan Material 5 (lima) hari sebelum jadwal yang ditentukan;
 - Wajib melakukan pembayaran atas pengadaan material.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- Wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan dari spesifikasi material;
 - Harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan material sesuai dengan jadwal;
 - Melakukan test sebelum material dikirim ke lapangan;
 - Memenuhi spesifikasi material yang dikirim

Penyelesaian Perselisihan :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila dalam 14 (empat belas) hari perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

19. Surat Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi Seksi 6 : Teluk Mengkudu–Seii Rampah (STA 70+000 – STA 77+875) No. 018/Kontrak-DIR/2015 tanggal 30 November 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : Pihak Pertama : PT Jasamarga Kualanamu Tol
Pihak Kedua : Perseroan
- Tujuan Proyek : Untuk mengadakan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan

- Jalan Tol Medan- Kualanamu–Tebing Tinggi, Seksi 6 : Teluk Mengkudu–Sei Rampah.
- Nilai Proyek : Rp 554.242.299.700,- (lima ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus Rupiah).
- Jangka Waktu : 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 337/JMKT/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 ditambah Masa Pemeliharaan 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
- Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berkewajiban melakukan serah terima lahan;
 - Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu;
 - Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam perjanjian ini.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- Berhak menerima uang muka;
 - Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak;
 - Tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau memberikan pekerjaan yang telah diterima dari pihak pertama;
 - Bertanggungjawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga;
 - Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu;
 - Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pemimpin Proyek untuk melaksanakan pekerjaan.
- Penyelesaian Sengketa : Perselisihan ini akan diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat di antara para pihak. Apabila tidak terselesaikan juga maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan.
20. Surat Perjanjian melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan No .01/KNT/LRTSS/VI/2016, No. 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016 tanggal 30 Juni 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : Pihak Pertama : Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan (“**PPK**”)
- Pihak Kedua : Perseroan
- Tujuan Proyek : Untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.
- Nilai Proyek : Rp12.593.084.000.000,- (dua belas triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh empat juta Rupiah), termasuk didalamnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen)
- Jangka Waktu : Kontrak ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan tanggal berakhirnya Masa Pemeliharaan tanggal 30 Juni 2019.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
 - Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Pihak Kedua;
 - Membayar pekerjaan kepada Pihak Kedua sesuai harga yang telah tercantum pada kontrak yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Bertanggung jawab penuh terhadap disain dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pihak Pertama;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, sesuai kontrak, penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja , bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat dan hak milik masyarakat akibat kegiatan Pihak Kedua.

21. Kontrak Jasa Pemborongan No. 04/Kontrak-Jembatan.S II/WK/2016 tanggal 30 Mei 2016 oleh dan antara SMP dan Perseroan untuk Pengadaan jasa pemborongan pekerjaan pembangunan jalan tol Kayu Agung – Palembang –Betung Seksi 2 Paket III.2 pekerjaan jembatan Musi Sta 49+446 S/d Sta 51+130 – Jembatan kramasan Sta 42+708 S/D Sta 43+845- Jembatan Ogan Sta 37+135 S/d Sta 38+772, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Obyek Perjanjian : jasa pemborongan pekerjaan pembangunan jalan tol Kayu Agung – Palembang –Betung Seksi 2 Paket III.2 pekerjaan jembatan Musi Sta 49+446 S/d Sta 51+130 – Jembatan kramasan Sta 42+708 S/D Sta 43+845- Jembatan Ogan Sta 37+135 S/d Sta 38+772.
- Nilai Perjanjian : Rp.2.427.700.000.000,- (dua triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen)
- Jangka Waktu : 34 (tiga puluh empat bulan) hari sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja dengan masa pemeliharaan 1095 hari.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- a. Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - b. Berhak meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c. Membebaskan lahan dan melakukan serah terima lahan;
 - d. Wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu;
 - e. Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua;
 - f. Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk memasuki lokasi pekerjaan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak;
- c. Bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua;
- d. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak;
- e. Wajib mememnuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.

- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.
22. Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang Betung Paket II Seksi I : STA.13+400-STA 33+500, Seksi 2 : STA.33+500-STA.52+200, dan STA.96+000-STA.111+690 No. 03/Kontrak SI-SII-SIII.WK/2016 tanggal 30 Mei 2016 oleh dan antara SMP dan Perseroan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Obyek Perjanjian : Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang Betung Paket II Seksi I : STA.13+400-STA 33+500, Seksi 2 : STA.33+500-STA.52+200, dan STA.96+000-STA.111+690.
- Nilai Perjanjian : Rp.5.345.095.157.600,- (lima trilyun tiga ratus empat puluh lima milyar sembilan puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen)
- Jangka Waktu : jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah:
- Seksi 1 selama 23 (dua puluh tiga) bulan
 - Seksi 2 selama 34(tiga pulhu empat) bulan
 - Seksi 3 selama 34 (tiga puluh empat) bulan
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berhak meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan;
 - Membebaskan lahan dan melakukan serah terima lahan;
 - Wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu;
 - Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua;
 - Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk memasuki lokasi pekerjaan.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak;
 - Bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua;
 - Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak;
 - Wajib mememnuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.
23. Perjanjian Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2 STA 27+070 S/D STA 50+373 No. 01/SPPJK/CCT/2016 tanggal 29 Juni 2016 antara PT Cimanggis Cibitung Tollways sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Cimanggis Cibitung Toolways (“Pihak Pertama”)
2) PT Wakita Karya (Persero), Tbk (“Pihak Kedua”)
- Obyek Perjanjian : Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 STA 27+070 S/D STA 50+373.
- Nilai Perjanjian : Rp.3.950.435.895.000,- (tiga triliun sembilan ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan yang mana waktu pelaksanaan pekerjaan selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender sejak tandatangan perjanjian dan berita acara serah terima lahan yang ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penandatanganan kontrak. Masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua;
 - Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
 - Melakukan kordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik;
 - Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan;
 - Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksuaian atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian;
 - Wajib memenuhi perintah atau intruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan;
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.
24. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo STA 0+000 S/D STA 31+300 No. 03/SPPJK/PASPRO/2016 tanggal 30 Juni 2016 antara PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol (“Pihak Pertama”)
2) PT Wakita Karya (Persero), Tbk (“Pihak Kedua”)
- Obyek Perjanjian : Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo STA 0+000 S/D STA 31+300.
- Nilai Perjanjian : Rp.3.217.978.922.000,- (tiga triliun dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan yang mana waktu pelaksanaan pekerjaan selama 900 (sembilan ratus) hari kalender sejak tandatangan perjanjian dan berita acara serah terima lahan yang ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penandatanganan kontrak. Masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua;
 - Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan;

- c. Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
- d. Melakukan kordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik;
- e. Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan;
- f. Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksuaian atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian;
- c. Wajib memenuhi perintah atau intruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan;
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.
25. Kontrak Jasa Pemborongan No. 05 tanggal 20 Desember 2016 oleh dan antara Sriwijaya Markmore Persada dan Perseroan untuk Pengadaan jasa pemborongan pekerjaan pembangunan jalan tol Kayu Agung – Palembang –Betung Seksi 2 STA 52+200 – 67+400 dan Seksi 3 STA 67+400 – 96+000, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Sriwijaya Markmore Persada (“Pihak Pertama”)
2) Perseroan (“Pihak Kedua”)
- Obyek Perjanjian : jasa pemborongan pekerjaan pembangunan jalan tol Kayu Agung – Palembang –Betung Seksi 2 STA 52+200 – 67+400 dan Seksi 3 STA 67+400 – 96+000.
- Nilai Perjanjian : Rp. 3.219.605.501.000.- (tiga triliun dua ratus sembilan belas miliar enam ratus lima juta lima ratus satu ribu Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen)
- Jangka Waktu : 34 (tiga puluh empat bulan) hari sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja dengan masa pemeliharaan 1095 hari.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- a. berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Berhak meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan;
- c. Membebaskan lahan dan melakukan serah terima lahan;
- d. Wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu;
- e. Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua;
- f. Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk memasuki lokasi pekerjaan.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak;
- c. Bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh kesahalahan Pihak Kedua;
- d. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak;
- e. Wajib mememnuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.

- Penyelesaian
Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.
26. Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol pekerjaan Pembangunan Jalan tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 : STA. 13+850 – STA.26 + 500 No: 008/PERJ/TJT/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Trans jabar Tol sebagai Pihak Pertama.
2) Perseroan sebagai Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : Pekerjaan pembangunan jalan tol Ciawi – Sukabumi seksi 2 : STA. 13 + 850-STA. 26 + 500
- Nilai Perjanjian : Rp.1.785.509.200.000 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan juta dua ratus dua ribu Rupiah)
- Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan adalah selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender hari kalender sejak tandatangan perjanjian dan berita acara serah terima lahan yang ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penandatanganan kontrak. Masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berhak meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan;
 - Membebaskan lahan dan melakukan serah terima lahan;
 - Wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu;
 - Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua;
 - Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk memasuki lokasi pekerjaan.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak;
 - Bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua;
 - Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak;
 - Wajib mememnuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.
- Penyelesaian
Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.
27. Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol Ciawi-Sukabumi Seksi 3 : STA. 26+500 – STA.40 + 400 No: 009/PERJ/TJT/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Trans jabar Tol sebagai Pihak Pertama.
2) Perseroan sebagai Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : Pekerjaan pembanguna jalan tol Ciawi – Sukabumi Seksi 3 : STA. 26+500 – STA.40 + 400
- Nilai Perjanjian : Rp.1.818.281.700.000 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah)

- Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan adalah selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender hari kalender sejak tandatangan perjanjian dan berita acara serah terima lahan yang ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penandatanganan kontrak. Masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berhak meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan;
 - Membebaskan lahan dan melakukan serah terima lahan;
 - Wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu;
 - Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua;
 - Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk memasuki lokasi pekerjaan.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak;
 - Bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua;
 - Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak;
 - Wajib mememnuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.
- Penyelesaian
Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.
28. Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol Ciawi-Sukabumi Seksi 4: STA. 40+400 – STA.53 + 600 No: 010/PERJ/TJT/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Trans jabar Tol sebagai Pihak Pertama.
2) Perseroan sebagai Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : Pekerjaan pembanguna jalan tol Ciawi – Sukabumi Seksi 3 : 3 : STA. 40+400 – STA.53 + 600
- Nilai Perjanjian : Rp.1.896.656.700.000 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah)
- Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan adalah selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender hari kalender sejak tandatangan perjanjian dan berita acara serah terima lahan yang ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penandatanganan kontrak. Masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berhak meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan;
 - Membebaskan lahan dan melakukan serah terima lahan;
 - Wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu;
 - Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua;
 - Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk memasuki lokasi pekerjaan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak;
- c. Bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua;
- d. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak;
- e. Wajib mememnuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.

Penyelesaian

Perselisihan :

Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.

29. Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Paket I Pekerjaan Struktur: STA 300+000 – STA 369+196 tanggal 31 Maret 2016 oleh dan antara PBTR sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang Paket I Pekerjaan Struktur: STA 300+000 – STA 369+196.

Nilai : Rp 1.156.475.922.200,- (satu triliun seratus lima puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Rupiah) sudah termasuk PPn.

Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya kontrak sampai Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 720 (tujuh ratus dua puluh) Hari Kalender sejak penandatanganan kontrak, Berita Acara Serah, dan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah 1095 (seribu sembilan puluh lima) Hari Kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.

Hak dan Kewajiban : Hak dan kewajiban Pihak Pertama:

- a. Berhak atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua;
- b. Wajib melakukan serah terima lahan;
- c. Wajib untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu;
- d. Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- e. Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen baik teknis maupun non teknis;
- f. Memeriksa, mengukur, menguji, dan menyelidiki kondisi lapangan.

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan;
- b. Melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak;
- c. Bertanggung jawab atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga;
- d. Wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu;
- e. Wajib mememnuhi perintah atau instruksi tertulis dari pemimpin proyek.

Penyelesaian

Sengketa

: Perselisihan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika musyawarah tidak mencapai penyelesaian, maka akan Para Pihak akan menyelesaikan melalui BANI.

30. Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Paket II AT Grade: STA 330+000 – STA 369+196 tanggal 31 Maret 2016 oleh dan antara PBTR sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obyek Perjanjian : pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang Paket II AT Grade: STA 330+000 – STA 369+19.
- Nilai : Rp 481.996.063.200,- (empat ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) sudah termasuk PPn.
- Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya kontrak sampai Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 720 (tujuh ratus dua puluh) Hari Kalender sejak penandatanganan kontrak, Berita Acara Serah, dan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah 1095 (seribu sembilan puluh lima) Hari Kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
- Berhak atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua;
 - Wajib melakukan serah terima lahan;
 - Wajib untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu;
 - Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen baik teknis maupun non teknis;
 - Memeriksa, mengukur, menguji, dan menyelidiki kondisi lapangan.
- Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
- Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan;
 - Melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak;
 - Bertanggung jawab atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga;
 - Wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu;
 - Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari pemimpin proyek.
- Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika musyawarah tidak mencapai penyelesaian, maka akan Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

31. Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Paket III: STA 336+500 – STA 359+660 tanggal 31 Maret 2016 oleh dan antara PBTR sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obyek Perjanjian : pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang Paket II AT Grade: STA 330+000 – STA 369+19.
- Nilai : Rp 1.578.436.141.000,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah) sudah termasuk PPn.
- Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya kontrak sampai Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 720 (tujuh ratus dua puluh) Hari Kalender sejak penandatanganan kontrak, Berita Acara Serah, dan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah 1095 (seribu sembilan puluh lima) Hari Kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
- Berhak atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua;
 - Wajib melakukan serah terima lahan;
 - Wajib untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu;
 - Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen baik teknis maupun non teknis;

- f. Memeriksa, mengukur, menguji, dan menyelidiki kondisi lapangan.

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan;
- b. Melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak;
- c. Bertanggung jawab atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga;
- d. Wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu;
- e. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari pemimpin proyek.

Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika musyawarah tidak mencapai penyelesaian, maka akan Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

32. Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Paket IV AT Grade: STA 359+660 – STA 369+196 tanggal 31 Maret 2016 oleh dan antara PBTR sebagai Pihak Pertama dan Emiten sebagai Pihak Kedua yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang Paket IV AT Grade: STA 359+660 – STA 369+196.

Nilai : Rp 708.904.630.000,- (tujuh ratus delapan miliar sembilan ratus empat juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) sudah termasuk PPN.

Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya kontrak sampai Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 720 (tujuh ratus dua puluh) Hari Kalender sejak penandatanganan kontrak, Berita Acara Serah, dan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah 1095 (seribu sembilan puluh lima) Hari Kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.

Hak dan Kewajiban : Hak dan kewajiban Pihak Pertama:

- a. Berhak atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua;
- b. Wajib melakukan serah terima lahan;
- c. Wajib untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu;
- d. Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- e. Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen baik teknis maupun non teknis;
- f. Memeriksa, mengukur, menguji, dan menyelidiki kondisi lapangan.

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan;
- b. Melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak;
- c. Bertanggung jawab atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga;
- d. Wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu;
- e. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari pemimpin proyek.

Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika musyawarah tidak mencapai penyelesaian, maka akan Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

33. perjanjian pekerjaan pembangunan jalan tol terbanggi besar-kayu agung STA 28+650-STA. 53+650 No. 11/SPPJK/WBW/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup , dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) WBW sebagai Pihak Pertama
2) Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Objek Perjanjian : Pekerjaan Pembangunan Jalan tol terbanggi-kayu agung Sta. 28+650-Sta 53+650, dengan jenis kontrak design and build

Nilai Perjanjian : Rp.2.393.148.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tiga

		miliar seratus empat puluh delapan juta Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN.
Jangka Waktu	:	pihak kedua harus menyelesaikan seluruh pekerjaan selambat-lambatnya selama 730 hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja dan dengan masa pemeliharaan selama 1095 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya berita acara serah terima 1
Hak dan Kewajiban	:	Pihak Pertama sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Membayar biaya muka uang sebagaimana diatur dalam kontrak ini, b. Memberikan keseluruhan lokasi kerja atau sebagian sesuai jadwal kerja yang disepakati yang diperlukan serta spesifikasi teknis yang dimiliki dan berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, c. Berhak secara langsung melakukan pengawasan pekerjaan. d. Memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dan tenaga kerja dari pihak kedua.
		Pihak Kedua sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodik setiap bulan yang telah disetujui oleh wakil pihak pertama yang ditempatkan di lapangan. b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. c. Menerima sebagian atau keseluruhan lokasi kerja yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan. d. Menerima hal –hal mengenai spesifik teknis yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
Penyelesaian Sengketa	:	Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

8.4.2. Perjanjian-perjanjian Non-Konstruksi antara Perseroan dengan pihak terafiliasi

1. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.26.1/PWK/2016 tanggal 29 Juni 2016, antara Emiten dengan WTR yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak	:	1. PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai Pihak Pertama. 2. PT Waskita Toll Road sebagai Pihak Kedua.
Objek Perjanjian	:	pinjaman sebesar Rp.116.823.884.000,- (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah).
Tujuan Peminjaman	:	untuk memenuhi kebutuhan setoran kedua pada rekening dana talangan beberapa BUJT yaitu JSB, yang akan digunakan untuk pembebasan lahan tahun 2016.
Bunga	:	9,5% (sembilan koma lima persen) pertahun.
Jangka Waktu	:	sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 dan sampai dengan saat ini perjanjian tersebut masih berlaku serta mengikat bagi para pihak.
Cara Pembayaran	:	dilunasi dengan cara satu kali pembayaran.
Penyelesaian Sengketa	:	perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Negara Indonesia di Jakarta.

2. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.28/P/WK/2016 tanggal 12 Juli 2016, antara Emiten dengan WTR yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen VI No.16/ADD/FPPS/WTR/2017 tanggal 17 Juli 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai Pihak Pertama. 2. PT Waskita Toll Road sebagai Pihak Kedua.
Objek Perjanjian	:	pinjaman sebesar Rp.11.316.397.392.177,- (sebelas triliun tiga ratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah).
Tujuan Peminjaman	:	untuk memenuhi kebutuhan setoran pada rekening dana talangan BUJT, yang akan digunakan untuk pembebasan lahan tahun 2017 berdasarkan PPJT dan/atau amandemen PPJT
Bunga	:	- Bunga dari fasilitas yang ditarik adalah 13,5% (tiga belas koma lima persen) pertahun dari jumlah pinjaman yang terhutang dan/atau sesuai dengan perhitungan biaya terlampir yang sewaktu waktu dapat berubah tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua, perhitungan bunga tersebut dilaksanakan terhitung sejak 1 April 2017.
Jangka Waktu	:	Jangka waktu pemberian fasilitas terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu 31 Desember 2017 dan jangka waktu pemberian fasilitas tersebut dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak
Cara Pembayaran	:	dilunasi dengan cara satu kali pembayaran atau secara bertahap dan/atau segera setelah BUJT menerima pembayaran dari Lembaga Manajemen Aset Negara maka Pihak Kedua harus segera melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2017.
Penyelesaian Sengketa	:	perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Negara Indonesia di Jakarta.

3. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.22.1/P/WK/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai Pihak Pertama. 2. PT Waskita Toll Road sebagai Pihak Kedua.
Objek Perjanjian	:	pinjaman sebesar Rp.116.823.884.000,- (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah).
Tujuan Peminjaman	:	untuk memenuhi kebutuhan setoran kedua pada rekening dana talangan beberapa BUJT yaitu PT Jasamarga Semarang Batang yang akan digunakan untuk pembebasan lahan tahun 2016.
Bunga	:	9,5% (sembilan koma lima persen) pertahun.
Jangka Waktu	:	sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 dan sampai dengan saat ini perjanjian tersebut masih berlaku serta mengikat bagi para pihak..
Cara Pembayaran	:	dilunasi dengan cara satu kali pembayaran.
Penyelesaian Sengketa	:	perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Negara Indonesia di Jakarta.

Atas perjanjian tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi untuk memenuhi Peraturan bapepam No. IX.E.1, tentang Transaksi Afialiasi dan benturan Kepentingan Tertentu berdasarkan surat Perseroan No. 697/WK/SP/2016 tanggal 28 November 2016.

4. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.44/PWK/2017 dan No. 01/WSE/KONT/2016 tanggal 22 Desember 2016 oleh dan antara Perseroan sebagai pihak Pertama dan WSE sebagai Kedua yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Menyediakan fasilitas pinjaman sampai dengan jumlah Rp.4.656.300.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas") kepada Pihak Kedua yang dapat ditarik oleh Pihak Kedua secara seketika maupun bertahap menurut kebutuhan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian

Tujuan Peminjaman : Pembayaran Bunga Pinjaman kepada PT. Indonesia Infrastructure

Finance

Bunga : 10 % (sepuluh persen) pertahun

Jangka Waktu : Fasilitas ini diberikan sampai dengan tanggal jatuh tempo 15 September 2018

Cara Pembayaran : dilunasi dengan cara satu kali pembayaran.

Penyelesaian Sengketa : perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Negara Indonesia di Jakarta.

5. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.27/PWK/ tanggal 24 Juli 2017 oleh dan antara Perseroan sebagai pihak Pertama dan WKE sebagai Kedua yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Menyediakan fasilitas pinjaman sampai dengan jumlah Rp. 2.880.000.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas") kepada Pihak Kedua yang dapat ditarik oleh Pihak Kedua secara seketika maupun bertahap menurut kebutuhan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian

Tujuan Peminjaman : Memenuhi kebutuhan operasional

Bunga : 12 % (dua belas persen) pertahun

Jangka Waktu : Fasilitas ini diberikan sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2017

Cara Pembayaran : dilunasi dengan cara satu kali pembayaran.

Penyelesaian Sengketa : perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Negara Indonesia di Jakarta.

6. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.15/PWK/ tanggal 24 Juli 2017 oleh dan antara Perseroan sebagai pihak Pertama dan WKE sebagai Kedua yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Menyediakan fasilitas pinjaman sampai dengan jumlah Rp. 2.880.000.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas") kepada Pihak Kedua yang dapat ditarik oleh Pihak Kedua secara seketika maupun bertahap menurut kebutuhan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian

Tujuan Peminjaman : Memenuhi kebutuhan operasional

Bunga : 12 % (dua belas persen) pertahun

Jangka Waktu : Fasilitas ini diberikan sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2017

Cara Pembayaran : dilunasi dengan cara satu kali pembayaran.

Penyelesaian Sengketa : perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Negara Indonesia di Jakarta.

8.4.3. Perjanjian-perjanjian Konstruksi antara Perseroan dengan pihak tidak terafiliasi

1. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo Tahap I Ruas Semarang-Bawen seksi II : Ungaran-Bawen Paket VI: Lemah Ireng-Bawen (STA. 21+825-22+840) No. TMJ.KJP/XI/2011/021 tanggal 20 november 2011 yang telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali oleh Perubahan kelima No. TMJ.KJP/XI/2011/012 tanggal 8 April 2013 Nomor TMJ.KJP/XI/2011/021 yang diubah dengan No. TMJ.KJP/XI/2011/012 Tanggal 20 November 2011.

Para Pihak : Pihak Pertama : PT Trans Marga Jateng.
Pihak Kedua : Perseroan.

Tujuan : Merubah beberapa klausul dalam Surat Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan jalan Tol Semarang-Solo Tahap I Ruas Semarang-Bawen seksi II : Ungaran-Bawen Paket VI: Lemah Ireng-Bawen (STA. 21+825-22+840).

Nilai Kontrak : Harga termasuk PPN: Rp.302.687.242.000,00 (Tiga ratus dua miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah).

Jangka Waktu : Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan untuk Operasional adalah 671 (Enam ratus tujuh puluh satu) dan Pekerjaan setelah Operasional adalah 732 (Tujuh ratus tiga puluh dua) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Berlaku sampai dengan 31 Oktober 2013. Saat ini telah memasuki Jangka waktu masa pemeliharaan adalah selama 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima pekerjaan Sementara No. TMJU.BA- PHO/II/2014/003 tanggal 11 Februari 2014

Pilihan Hukum : Musyawarah untuk mufakat dengan jangka waktu penyelesaian 60 (enam puluh) hari kalender.

Pilihan Forum : Pengadilan Negeri Semarang.

2. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/KSO/WK-SK/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013, dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan kebayakan- Simpang, Aceh dengan ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak : 1) Perseroan sebagai pihak Pertama.
2) PT Andesmont Sakti Pihak Kedua.

Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara Perseroan dengan PT Andesmont Sakti dengan Nama Waskita-Andesmon JO

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila:
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO.
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 516/WK/DREG.I/2013 tanggal 30 Agustus 2013, waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 900 (sembilan ratus) hari kalender ditambah masa pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Sampai dengan saat ini kami belum menerima dokumen terkait proyek dimaksud.

Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:
1) Pihak pertama sebanyak 60%
2) Pihak Kedua sebanyak 40%

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.

- 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaian Sengketa :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3. Perjanjian Konsorsium tanggal 8 Juni 2012 dalam rangka pelaksanaan proyek Pembangunan prasarana Pertambangan Batubara Tahap 1 di Kalimantan Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perseroan sebagai pihak Pertama. 2) PT Jakarta Prima Cranes Pihak Kedua.
Objek Perjanjian	:	pembentukan konsorsium Waskita JPC
Jangka Waktu	:	perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa Pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir. 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak. 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian. Sampai dengan saat ini, penyelesaian proyek dimaksud sedang dalam proses pengadilan di BANI sesuai dengan Perkara No : 795/II/ARB-BANI/2016 sebagaimana dijelaskan pada Bab IX angka 9 Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini.
Nilai Perjanjian	:	para pihak mengambil porsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak pertama sebanyak 67,75% 2) Pihak Kedua sebanyak 32,25%
Tujuan Perjanjian	:	dalam rangka pelaksanaan proyek Pembangunan Prasarana Pertambangan Batubara Tahap 1 di Kalimantan Tengah
Hak dan Kewajiban	:	Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian dibebankan kepada masing-masing pihak. 2. Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak

Penyelesaian Sengketa:

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

4. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis - Cibitung No. 01/KJP/CCT/2015 tanggal 29 September 2015 yang sebagaimana yang telah diubah dengan adendum I No. 01/ADD-1/KJP/CCT/2016 tanggal 18 April 2016 antara PT. Cimanggis Cibitung Tollways sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) PT Cimanggis Cibitung Toolways ("Pihak Pertama"). 2) Perseroan ("Pihak Kedua").
Obyek Perjanjian	:	Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.
Nilai Perjanjian	:	Rp.722.930.882.000,- (tujuh ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Rupiah).

- Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan kontrak adalah selama 360 hari (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak ditambah masa pemeliharaan selama 1095 (seribu sembilan ratus lima puluh lima hari) sejak berita acara serah terima sementara.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua;
 - Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik;
 - Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan;
 - Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian
 - Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian;
 - Wajib memenuhi perintah atau intruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan;
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.
5. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas Solo-Ngawi Paket 2 : STA, 56+050-STA.90+250 No. 05/SPP/SNJ/IX/2015 tanggal 09 September 2015 antara PT. Solo Ngawi Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Solo Ngawi Jaya ("Pihak Pertama").
2) Perseroan ("Pihak Kedua").
- Obyek Perjanjian : Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas Solo-Ngawi Paket 2 :STA, 56+050-STA.90+250.
- Nilai Perjanjian : Rp.1.815.842.396.000,- (satu triliun delapan ratus lima belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah).
- Jangka Waktu : Masa pekerjaan selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender sejak Syarat-syarat Khusus Kontrak tanggal 24 Juli 2015 ditambah masa pemeliharaan 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua;
 - Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik;

- e. Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan;
- f. Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian;
- c. Wajib memenuhi perintah atau intruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan;

Penyelesaian

Perselisihan :

Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 60 (enam puluh) hari. Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul dan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Domisili Pihak Pertama atau Lokasi Kerjaan.

6. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas Solo-Ngawi Paket 1 : STA, 20+900-STA.56+050 No. 04/SPP/SNJ/IX/2015 tanggal 09 September 2015 antara PT. Solo Ngawi Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) PT Solo Ngawi Jaya ("Pihak Pertama") 2) Perseroan ("Pihak Kedua")
Obyek Perjanjian	:	Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas Solo-Ngawi Paket 1: STA, 20+900-STA.56+050.
Nilai Perjanjian	:	Rp.2.202.927.815.000,- (dua triliun dua ratus dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu Rupiah).
Jangka Waktu	:	Masa pekerjaan selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender sejak Syarat-syarat Khusus Kontrak tanggal 24 Juli 2015 ditambah masa pemeliharaan 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua; b. Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan; c. Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan; d. Melakukan kordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik; e. Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan; f. Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian;

- c. Wajib memenuhi perintah atau intruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan;
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 60 (enam puluh) hari. Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul dan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Domisili Pihak Pertama atau Lokasi Kerjaan.
7. Perjanjian Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi 3: STA, 290+250-STA.300+700 No. 04/SPPJK/PPTR/IX/2015 tanggal 21 Desember 2015 antara PPTR sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Pejagan Pemalang Toll Road ("Pihak Pertama").
2) Perseroan ("Pihak Kedua").
- Obyek Perjanjian : Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi 3: STA, 290+250-STA.300+700.
- Nilai Perjanjian : Rp.996.144.750.000,- (sembilan ratus Sembilan puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 720 (tuju ratus dua puluh) hari sejak ditandatanganinya perjanjian tanggal 21 Desember 2015 dan surat perintah mulai kerja, dan Jangka Pemeliharaan selama 1095 (seribu Sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua;
 - Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - Menyelesaikan seluruh yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
 - Melakukan kordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik;
 - Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan;
 - Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksuaian atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
- Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian;
 - Wajib memenuhi perintah atau intruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan;
- Penyelesaian Perselisihan : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.

8. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 3 Parbarakan-Lubuk Pakam Sta.42+750-Sta.47+600 No. 006/KONTRAK-DIR/2015 tanggal 18 Juni 2015 antara PT. Jasamarga Kualanamu Tol sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	: 1) PT Jasamarga Kualanamu Tol ("Pihak Pertama"). 2) PT Wakita Karya (Persero), Tbk ("Pihak Kedua").
Obyek Perjanjian	: Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 3 Parbarakan-Lubuk Pakam Sta.42+750-Sta.47+600.
Nilai Perjanjian	: Rp.439.754.930.330,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah).
Jangka Waktu	: sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 450 (empat ratus lima puluh) hari kalender terhitung telah di terbitkannya SPMK No. 180/JMKT/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, dan Jangka Pemeliharaan selama 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan. Sampai dengan saat ini kami belum menerima SPMK atas proyek tersebut.
Hak dan Kewajiban	: Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua; b. Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan; c. Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan; d. Melakukan kordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik; e. Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan; f. Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksuaian atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan; b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian; c. Wajib memenuhi perintah atau intruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan.
Penyelesaian Perselisihan	: Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari. Apabila dalam 90 (sembilan puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul dan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan.

9. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 4A Lubuk Pakam-Adolina Sta.47+600-Sta.54+200 No. 013/KONTRAK-DIR/2015 tanggal 21 Oktober 2015 antara PT. Jasamarga Kualanamu Tol sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	: 1) PT Jasamarga Kualanamu Tol (“Pihak Pertama”). 2) Perseroan (“Pihak Kedua”).
Obyek Perjanjian	: Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 4A Lubuk Pakam-Adolina Sta.47+600-Sta.54+200.
Nilai Perjanjian	: Rp.480.407.710.900,- (empat ratus delapan puluh miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus Rupiah).
Jangka Waktu	: sejak ditandatangani perjanjian sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 510 (lima ratus sepuluh) hari kalender terhitung telah di terbitkannya SPMK No. 293/JMKT/XI/201 tanggal 17 November 2015, dan Jangka Pemeliharaan selama 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan. Sampai dengan saat ini kami belum menerima SPMK atas proyek tersebut.
Hak dan Kewajiban	: Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua; b. Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan; c. Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan; d. Melakukan kordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik; e. Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan; f. Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksuaiian atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut. <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan; b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian; c. Wajib memenuhi perintah atau intruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan.
Penyelesaian Perselisihan :	Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 90 (enam puluh) hari. Apabila dalam 90 (sembilan puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul dan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan.
10. Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Bendungan Tapin No. HK0203/SNVT PJSA.KS-SP.I084 tanggal 13 Oktober 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:	
Para Pihak	: Pihak Pertama : Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Pihak Kedua : BAP-Waskita KSO.
Tujuan Proyek	: Untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Bendungan Tapin sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini yang disebut “Pekerjaan Konstruksi” dan melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
Nilai Kontrak	: Rp.896.928.900.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah).

- Jangka Waktu : Jangka waktu pekerjaan adalah 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) hari kalender terhitung yaitu sampai dengan tanggal 23 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. HK0203/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.I/085 tanggal 15 Oktober 2015. Ditambah masa pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban PPK :
- a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - d) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak
- Hak dan Kewajiban Penyedia :
- a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana;
 - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik;
 - d) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
 - e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan;
 - f) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab;
 - g) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan;
 - h) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal;
 - i) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai;
- Penyelesaian Sengketa : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

11. Perjanjian Pembangunan Jasa Konstruksi Sisi Darat Tahap 1A Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajatu Majalengka Paket 3 (Bangunan Penunjang Operasional) No. 45/SPJ-DIR/BIJB/XI/2015 tanggal 25 November 2015 antara PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1) PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat ("Pihak Pertama").
2) Perseroan ("Pihak Kedua").
- Objek Perjanjian : Pembangunan Jasa Konstruksi Sisi Darat Tahap 1A Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajatu Majalengka Paket 3 (Bangunan Penunjang Operasional).
- Nilai Perjanjian : Rp.480.407.710.900,- (empat ratus delapan puluh miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus Rupiah).
- Jangka Waktu : selama 21 bulan, setelah diterbitkannya SPMK tanggal 13 November 2015 s/d 08 Agustus 2017. Jangka waktu pemeliharaan adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender setelah BAST 1 disetujui Pihak Pertama.
- Sanksi : Terlambat dalam penyerahan hasil kerja dan laporan akhir kontrak pengadaan konstruksi dan pembayaran kepada Penerima Kerja dikenakan sanksi sesuai kontrak dan aturan kerja dikenakan sanksi sesuai kontrak dan aturan yang berlaku di lingkungan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat.

12. Surat Perjanjian No. 0533.PJ/DAN 02/02 tanggal 23 Oktober 2015, Paket 2 Pengadaan Transmisi 500 Kv Sumatera, Paranap, Perawang, dengan ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak	: Pihak Pertama : PT PLN (Persero) Tbk. Pihak Kedua : Perseroan.
Tujuan Proyek	: Pekerjaan Transmisi 500 K kv Sumatera, Paranap-Perawang.
Nilai Proyek	: Rp.2.830.851.249.500,- (dua triliun delapan ratus tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).
Jangka Waktu	: 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian 23 Oktober 2015.
Hak dan Kewajiba	: a. Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. b. Berkewajiban melakukan serah terima lainnya. c. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu. d. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Berhak menerima uang muka.
- b. Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- c. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak.
- d. Tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau memberikan pekerjaan yang telah diterima dari pihak pertama.
- e. Bertanggungjawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga.
- f. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu.
- g. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri dalam pelaksanaan pekerjaan.

Penyelesaian Sengketa :

Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.

8.4.4. Perjanjian-perjanjian Pembiayaan antara Perseroan dengan Bank

Bank yang Terafiliasi dengan Perseroan

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa perjanjian dengan pihak Terafiliasi di bawah ini dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*).

A. PT BANK MANDIRI TBK ("Mandiri")

1. Perseroan telah memperoleh Fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Akta perjanjian kredit Modal Kerja No. KP.COD/033/PK-KMK/2002 tertuang dalam Akta No.22 tanggal 15 Agustus 2002 dibuat di hadapan Neneng Mursiyati, S.H., pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat dari Bank Mandiri No. TOP.CRO/CCL/735/ADD/2015 tanggal 10 November 2015 Perihal Addendum XVII (ketujuh belas) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: KP.COD/033/PK-KMK/2002 Akta Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2002 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana telah diubah terakhir dengan SPPK No. CBG.CB2/SPPK.SCD.032/2016 tanggal 9 November 2016.

Ketentuan-ketentuan dan sarat-syarat dalam perjanjian kredit:

Limit kredit	: Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Jenis kredit	: Kredit Modal Kerja
Sifat kredit	: Revolving
Tujuan Penggunaan	: Tambahan modal kerja dalam rangka membiayai proyek-proyek konstruksi
Jangka waktu	: 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2017
Suku bunga	: 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per pertahun.

- Denda : 3% (tiga persen) per tahun diatas tingkat suku bunga fasilitas kredit ini atas setiap keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit.
- Agunan :
- a. Aset Tidak Tetap :
- (i) Seluruh persediaan barang milik Perseroan yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10244 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 18 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 24 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di hadapan Putri Kusumaningrum, S.H., selaku Notaris pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-129.AH.05.02.TH.2011/P tanggal 1 Februari 2011 dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.43.438.383.837,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).
 - (ii) Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri, termasuk proyek yang sedang dikerjakan baik sekarang ada/yang sedang dikerjakan maupun yang ada dikemudian hari yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10425 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 22 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 5 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp1.922.845.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).
 - (iii) Seluruh omzet kontrak proyek yang dan telah diikat dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp.846.888.119.000,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (Cessie) Akta No.13 tanggal 12 April 2006 dan perubahannya sebagaimana ternyata dalam Perubahan Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (Cessie) Akta No.16 tanggal 12 November 2007 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Ny. Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta.
 - (iv) Dana Deposito sebesar Rp.5.226.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AA 499030 dengan No. Rekening 006-0203021641 atas

nama Perseroan , dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No.KP-COD/001/PGD/2003 tertanggal 13 Maret 2003.

- (v) Dana Deposito sebesar Rp.3.222.200.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AB 130803 dengan No. Rekening 006-02-0421717-2 atas nama Perseroan , dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2005 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No. PGD.COD/006/2005 tertanggal 4 April 2005.

b. Aset Tetap

: 3 (tiga) bidang tanah, seluruhnya terletak di Provinsi Riau, Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Limapuluh, Desa/Kelurahan Rintis, dan tercatat atas nama Perseroan , terdiri dari:

- 1) HGB No.302/Rintis, seluas 1.385 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 15/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
- 2) HGB No.303/Rintis, seluas 1.410 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 16/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
- 3) HGB No.304/Rintis, seluas 1.295 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 17/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019.

Demikian berikut segala sesuatu yang telah atau dikemudian hari didirikan diatas tanah-tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas ketiga tanah tersebut telah diikat dengan rincian sebagai berikut:

- Hak Tanggungan peringkat II (ke dua) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.2.314.100.000,00 (dua miliar tiga ratus empat belas juta seratus ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2471/2002 tertanggal 20 Desember 2002;
- Hak Tanggungan peringkat III (ke tiga) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp.2.761.900.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2078/2006 tertanggal 15 Mei 2006;
- Hak Tanggungan Peringkat IV (Ke empat) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar

Rp.1.674.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) sebagaimana ternyata dari sertifikat Hak Tanggungan No. 1144/2010.

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memindahkan tanggungan barang jaminan.
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi kecuali financial covenant berupa DER (a.d interest bearing) tidak melebihi 300% (tiga ratus persen), cukup memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah kejadian.
- c. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjdai hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Anggaran Dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus perusahaan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Bank.
 - b. Perseroan melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan core business/(bisnis utama) yang sejenis dengan Perseroan. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan core business (bisnis utama) yang berbeda dengan Perseroan; atau penyertaan/investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Bank, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
 - c. Perseroan melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan core business yang sejenis dengan Perseroan dan tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant. Dalam hal pengambilalihan atau pendirian anak perusahaan baru tersebut dilakukan pada perusahaan yang core business (bisnis utama) nya berbeda dengan Perseroan; atau menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap di persyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
 - d. Perseroan melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada (bisnis unit) yang tidak mengakibatkan pelanggaran financial covenant.
 - e. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
2. Perseroan telah memperoleh Fasilitas kredit Non Cash Loan dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. No. KP.COD/005/PK-NCL/2002 tanggal 15 Agustus 2002 Nomor 23, yang dibuat di hadapan Neneng Nursiyati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaharui dengan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. KP.CRO/013/PNCL/2007 tanggal 12 November 2007 Akta Nomor 10 yang dibuat dihadapan Ny. Toety Junarto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali pada Perjanjian No. TOP.CRO/CCL.730/ADD/2015 tanggal 10 November 2015 Perihal Addendum XIV (keempat belas) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* Nomor: KP.CRO/013/PNCL/2007 Akta Nomor 10 tanggal 12 November 2007 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana telah diubah terakhir dengan SPPK No. CBG.CB2/SPPK.SCD.090/2016 tanggal 22 November 2016, dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Plafon	:	Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah).
Sifat fasilitas	:	<i>Revolving</i> .
Tujuan Penggunaan	:	Untuk penerbitan Bank Garansi, Letter Of Credit/SKBDN dan TR sublimit LC/SKBDN.
Jangka Waktu	:	20 November 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2017.
Agunan	:	Dikaitkan dengan jaminan seluruh fasilitas pinjaman Perseroan termasuk barang yang dibiayai/dibeli dengan fasilitas <i>Non Cash Loan</i> .

Fasilitas Kredit NCL ini terdiri atas:

Bank Garansi (BG) sublimit dari NCL

Limit	:	Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Jaminan Pembayaran <i>Counter Guarantee</i> , jaminan penanguhan bea masuk (<i>custom Bond</i>) dan Jaminan Sanggah.
Provisi	:	0,50% P.a. minimum.
Jangka waktu	:	20 November 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2017

Letter of Credit (L/C) dan SKBDN sublimit dari NCL

Limit	:	Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	a. Pembukaan LC/SKBDN antara lain secara <i>at sight, usance</i> , UPAS dan SBLC b. tidak diperkenankan digunakan untuk impor barang modal.
Provisi	:	Pembukaan LC/SKBDN 0.50% p.a.
Jangka Waktu	:	20 November 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2017
Agunan	:	<i>Cross default</i> dan <i>Joint collateral</i> dengan fasilitas kredit lainnya, termasuk barang yang dibiayai/dibeli dengan fasilitas <i>Non Cash Loan</i> .

Fasilitas Trust Receipt (T/R) merupakan sublimit dari fasilitas LC/SKBDN

Limit	:	Rp.115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar Rupiah)
Sifat Plafond	:	<i>Uncommitted, Advised</i> dan <i>Revolving</i>
Tujuan Fasilitas	:	menampung kewajiban Impor/SKBDN yang jatuh tempo.
Tenor per Transaksi	:	Maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari termasuk tenor L/C /SKBDN.
Suku Bunga	:	Sesuai ketentuan suku bunga <i>Trust Receipt</i> yang berlaku di Mandiri.
Provisi	:	1,00% p.a. dari nilai <i>Trust Receipt</i> , dan dibayar pada saat <i>Trust Receipt</i> efektif.
Jangka waktu	:	20 November 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2017
Agunan	:	cross default & join collateral dengan fasilitas kredit lain, termasuk barang yang dibiayai/dibeli dengan fasilitas <i>Non Cash Loan</i> .

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memindahkan tanggungan barang jaminan.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi kecuali *financial covenant* berupa DER (a.d *interest bearing*) tidak melebihi 300% (tiga ratus persen), cukup memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian.

- c. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Anggaran Dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus perusahaan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank.
 - b. Perseroan melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (bisnis utama) yang sejenis dengan Perseroan. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Perseroan; atau penyertaan/investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
 - c. Perseroan melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Perseroan dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant*. Dalam hal pengambilalihan atau pendirian anak perusahaan baru tersebut dilakukan pada perusahaan yang *core business* (bisnis utama) nya berbeda dengan Perseroan; atau menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap di persyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
 - d. Perseroan melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada (bisnis unit) yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
 - e. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
3. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. KP.CRO/026/PK-KMK/2007 sebagaimana termuat dalam Akta No.11 tanggal 12 November 2007 dibuat di hadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat dari Mandiri No. TOP.CRO.CCL/731/ADD/2015 tanggal 10 November 2015 perihal Addendum X (Kesepuluh) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No: KP.CRO/026/PK-KMK/2007, Akta Nomor 11 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit sebagaimana telah diubah terakhir dengan SPPK No. CBG.CB2/SPPK.SCD.032/2016 tanggal 9 November 2016, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Limit Kredit	:	Rp.765.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2017
Jenis/Sifat Kredit	:	Kredit Modal Kerja Revolving dengan pola penarikan transaksional atas dasar adanya kontrak proyek.
Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kreja untuk mendukung pelaksanaan proyek Jasa Konstruksi a/d SPK/Kontrak, khusus untuk proyek-proyek di dalam negeri, baik untuk proyek baru (proyek yang belum pernah diajukan pembiayaannya) maupun untuk membiayai proyek yang pernah diajukan/dibiayai sebelumnya oleh KMK Transaksional dan telah dilunasi, sepanjang

masih terdapat sisa kontrak/sisa termijn lebih besar dari 50% dari nilai kontrak.

Proyek-proyek yang dapat dibiayai tersebut termasuk untuk proyek Joint Operation yang menjadi porsi Perseroan .

- Suku bunga : a. 9,175% (sembilan koma seratus tujuh puluh lima persen) per tahun dibayar bulanan, setiap tanggal 23. Tingkat bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.
- b. Suku bunga dapat ditentukan saat dilakukan Penarikan Kredit.
- Denda : 3% (tiga persen) per tahun diatas tingkat suku bunga fasilitas kredit atas setiap keterlambatan pembayaran Baki Debet Pokok dan/atau bunga.
- Agunan : terkait dengan fasilitas KMK revolving dan atas jaminan tersebut berlaku cross default dan join collateral dengan fasilitas kredit lain.

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memindahkan tangganan barang jaminan.
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi kecuali *financial covenant* berupa DER (a.d interest bearing) tidak melebihi 300% (tiga ratus persen), cukup memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah kejadian.
- c. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijamin kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Anggaran Dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus perusahaan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank.
- b. Perseroan melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (bisnis utama) yang sejenis dengan Perseroan. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Perseroan; atau penyertaan/investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
- c. Perseroan melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru denan *core business* yang sejenis dengan Perseroan dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant*. Dalam hal pengambilalihan atau pendirian anak perusahaan baru tersebut dilakukan apda perusahaan yang *core business* (bisnis utama) nya berbeda dengan Perseroan; atau menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap di persyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
- d. Perseroan melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada (bisnis unit) yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
- e. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang

dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank.

4. Perseroan telah memperoleh Fasilitas kredit Jasa Pelayanan Transaksi *Treasury Line* dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Perjanjian *Treasury Line* No. KP.CRO/058/PFL/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang kemudian diubah terakhir kali dengan Surat dari Mandiri No. TOP.CRO.CCL/729/ADD/2015 tanggal 10 November 2015 perihal Addendum V (Kelima) atas Perjanjian *Treasury Line* Nomor: KP-CRO/058/PFL/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Perpanjangan Jangka Waktu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan SPPK No. CBG.CB2/SPPK.SCD.032/2016 tanggal 9 November 2016 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Limit Kredit	:	National amount sebesar USD 2,000,000. (dua juta dollar Amerika Serikat).
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan 14 November 2017.
Jenis/Sifat Kredit	:	Forex Line
Tujuan	:	Untuk transaksi <i>Treasury (Foreign Exchange, Spot, Today, Tom, Forward, Swap dan option)</i> dalam rangka hedging kewajiban/penerimaan valuta asing yang dikaitkan dengan kewajiban/penerimaan Kontrak Valuta Asing dan transaksi LC impor sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Mandiri.
Margin Deposit	:	0% (nol persen).
<i>Underlying Transaction</i>	:	Dokumen transaksi yang dibuka melalui Mandiri.
Tenor Transaksi	:	Maksimal 6 (enam) bulan.
Agunan	:	terkait dengan fasilitas KMK dan atas jaminan tersebut berlaku <i>join collateral</i> dan <i>cross default</i> dengan seluruh fasilitas yang ada.

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memindahkan tangankan barang jaminan.
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi kecuali *financial covenant* berupa DER (a.d *interest bearing*) tidak melebihi 300% (tiga ratus persen), cukup memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah kejadian.
- c. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijaminan kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Anggaran Dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus perusahaan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank.
- b. Perseroan melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (bisnis utama) yang sejenis dengan Perseroan. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Perseroan; atau penyertaan/investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
- c. Perseroan melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Perseroan dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant*. Dalam hal pengambilalihan atau pendirian anak perusahaan baru tersebut dilakukan pada perusahaan yang *core business* (bisnis utama) nya berbeda dengan Perseroan; atau menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap di persyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
- d. Perseroan melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada (bisnis unit) yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.

- e. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
5. Perseroan telah memperoleh Fasilitas kredit dari mandiri sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama No. L.07/P/WK/2010 tanggal 20 oktober 2010 tentang *Supplier Financing* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan kedua Perjanjian Kerjasama No. 1093.1/Wk/DIR/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Mandiri *Supplier Financing* yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup sebagaimana telah diubah terakhir dengan SPPK No. CBG.CB2/SPPK.SCD.032/2016 tanggal 9 November 2016.
- Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit:
- | | | |
|-------------------|---|--|
| Limit kredit | : | Rp.1.006.000.000.000,- (satu triliun enam miliar Rupiah) |
| Jenis kredit | : | Kredit Modal Kerja |
| Sifat kredit | : | Revolving |
| Tujuan Penggunaan | : | Tambahan modal kerja dalam rangka membiayai proyek-proyek konstruksi |
| Jangka waktu | : | 1 (satu) tahun sejak tanggal 14 November 2016 dan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya secara terus menerus apabila tidak ada pemberitahuan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian ini. |
| Tujuan Penggunaan | : | tambahan modal kerja dalam rangka membiayai proyek-proyek konstruksi kredit lain |
| Agunan | : | cross default dan join collateral dengan fasilitas |

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memindahkan tangganan barang jaminan.
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi kecuali *financial covenant* berupa DER (a.d *interest bearing*) tidak melebihi 300% (tiga ratus persen), cukup memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah kejadian.
- c. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijamin kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Anggaran Dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus perusahaan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank.
- b. Perseroan melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (bisnis utama) yang sejenis dengan Perseroan. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Perseroan; atau penyertaan/investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
- c. Perseroan melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru denan *core business* yang sejenis dengan Perseroan dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant*. Dalam hal pengambilalihan atau pendirian anak perusahaan baru tersebut dilakukan apda perusahaan yang *core business* (bisnis utama) nya berbeda dengan Perseroan; atau menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap di persyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
- d. Perseroan melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada (bisnis unit) yang tidak.

6. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional II sebagaimana tertuang dalam SPPK No. CBG.CB2/SPPK.SCD.032/2016 tanggal 9 November 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Limit Kredit	:	Rp.900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	sejak tanggal penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 14 November 2018
Jenis/Sifat Kredit	:	Revolving
Tujuan Penggunaan	:	tambahan modal kerja untuk mendukung pelaksanaan proyek jasa konstruksi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jalan tol medan-kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 4A lubuk pakam-Adolina b. Pembangunan jalan tol pejagan-pemalang seksi 3 c. Pembangunan jalan tol pejagan-pemalang seksi 4
Suku bunga	:	<ul style="list-style-type: none"> a. 9,175% (sembilan koma seratus tujuh puluh lima persen) per tahun dibayar bulanan, setiap tanggal 23. Tingkat bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku pada bank. b. Suku bunga dapat ditentukan saat dilakukan Penarikan Kredit.
Denda	:	3% (tiga persen) per tahun diatas tingkat suku bunga fasilitas kredit atas setiap keterlambatan pembayaran Baki Debet Pokok dan/atau bunga.
Agunan	:	piutang dan persediaan yang akan diikat fidusia dari proyek: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jalan tol medan-kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 4A lubuk pakam-Adolina b. Pembangunan jalan tol pejagan-pemalang seksi 3 c. Pembangunan jalan tol pejagan-pemalang seksi 4

Fasilitas Kredit KMK II ini terdiri atas:

Fasilitas Supplier Financing II

Limit	:	Rp.900.000.000.000,00 (sembilan ratus rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	pembiayaan Supplirt Financing atas dasar akseptasi Invoice khusus untuk proyek: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jalan tol medan-kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 4A lubuk pakam-Adolina b. Pembangunan jalan tol pejagan-pemalang seksi 3 c. Pembangunan jalan tol pejagan-pemalang seksi 4
Jangka waktu	:	sampai dengan tanggal 14 November 2018

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- d. Memindahkan tangankan barang jaminan.
- e. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi kecuali *financial covenant* berupa DER (a.d interest bearing) tidak melebihi 300% (tiga ratus persen), cukup memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah kejadian.
- f. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijaminan kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Anggaran Dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus perusahaan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi

- pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank.
- b. Perseroan melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (bisnis utama) yang sejenis dengan Perseroan. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Perseroan; atau penyertaan/investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
 - c. Perseroan melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Perseroan dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant*. Dalam hal pengambilalihan atau pendirian anak perusahaan baru tersebut dilakukan pada perusahaan yang *core business* (bisnis utama) nya berbeda dengan Perseroan; atau menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Untuk pelepasan dengan pihak ketiga tetap di persyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
 - d. Perseroan melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada (bisnis unit) yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
 - e. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
7. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional III sebagaimana tertuang dalam SPPK No. CBG.CB2/SPPK.SCD.098/2016 tanggal 22 November 2017 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Limit Kredit | : | Rp.4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar Rupiah) |
| Jangka Waktu | : | 2 tahun 4 bulan sejak SPMK dari PT Jasamarga Semarang Batang kepada Perseroan terbit, atau paling lambat 30 bulan sejak tandatangan PK. |
| Jenis/Sifat Kredit | : | <i>Non Revolving</i> |
| Tujuan Penggunaan | : | tambahan modal kerja untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan khusus untuk proyek Tol Semarang-Batang. |
| Suku bunga | : | <ol style="list-style-type: none"> a. 9,175% (sembilan koma seratus tujuh puluh lima persen) per tahun dibayar bulanan, setiap tanggal 23. Tingkat bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku pada bank. b. Suku bunga dapat ditentukan saat dilakukan Penarikan Kredit. |
| Denda | : | 3% (tiga persen) per tahun. |
| Agunan | : | seluruh piutang usaha dan persediaan dari proyek tol batang-semarang yang ada dan akan diikat secara fidusia senilai Rp. 6.422.751.800.000,-
Escrow account yang akan digunakan untuk menampung seluruh pendapatan proyek yang akan diblokir senilai Rp. 4.200.000.000.000,- dan dilengkapi kuasa debit dari Perseroan kepada Bank Mandiri untuk mendebit rekening escrow jika terjadi wanprestasi. |

Fasilitas Kredit KMK III ini terdiri atas:

a. Fasilitas KMK Subkontraktor sublimit dari KMK Transaksional III

Limit	:	Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	pembiayaan atas tagihan subkontraktor kepada Perseroan untuk proyek jalan tol semarang batang yang disalurkan melalui business Banking atau commercial banking Bank Mandiri
Jangka waktu	:	2 tahun 4 bulan sejak SPMK dari PT Jasamarga Semarang Batang kepada Perseroan terbit, atau paling lambat 30 bulan sejak tandatangan PK.

b. Fasilitas Supplier Financing III sublimit dari KMK Transaksional III

Limit	:	Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	pembiayaan Supplier Financing atas dasar akseptasi invoice khusus untuk proyek jalan tol semarang batang
Jangka waktu	:	2 tahun 4 bulan sejak SPMK dari PT Jasamarga Semarang Batang kepada Perseroan terbit, atau paling lambat 30 bulan sejak tandatangan PK

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memindahkan tangganan barang jaminan.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi kecuali *financial covenant* berupa DER (a.d interest bearing) tidak melebihi 300% (tiga ratus persen), cukup memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah kejadian.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus perusahaan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank.
- Perseroan melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (bisnis utama) yang sejenis dengan Perseroan. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Perseroan; atau penyertaan/investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
- Perseroan melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Perseroan dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant*. Dalam hal pengambilalihan atau pendirian anak perusahaan baru tersebut dilakukan pada perusahaan yang *core business* (bisnis utama) nya berbeda dengan Perseroan; atau menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap di persyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
- Perseroan melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada (bisnis unit) yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
- Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang

dipersyaratkan oleh Bank maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank.

f.

Bahwa Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan tertulis atas batasan-batasan yang telah ditentukan oleh kreditur terkait akan melaksanakan proses Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017, yaitu :

- Surat Pemberitahuan No. 520/WK/DIR/2017 tanggal 12 April 2017, perihal pemberitahuan sehubungan pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kredit yang diperoleh dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Surat Pemberitahuan No. 519/WK/DIR/2017 tanggal 12 April 2017, perihal pemberitahuan sehubungan pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kredit yang diperoleh dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

B. PT BANK NEGARA INDONESIA TBK ("BNI")

1. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No.012/KPI/PK/2005 tanggal 29 April 2005 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat BNI No: BIN/2.2/028/R tanggal 21 Februari 2017 yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit 008/BIN/PK/2016 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit	:	Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja
Keperluan	:	Pembiayaan modal kerja
Jangka waktu	:	sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018.
Suku bunga	:	9% (sepuluh persen) p.a. setiap saat sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di BNI.

Jaminan :

- a. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.2001, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juni 2006 dan berakhir haknya pada tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.09/2006 tanggal 30 Mei 2006, yang terletak di Desa Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, terdaftar atas nama Perseroan, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.5.191.600.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.323 tanggal 20 April 2007;
- b. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.724, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 1988 dan berakhir haknya tanggal 02 Desember 2007 (telah diperpanjang s/d 1 Desember 2027), seluas 2.098 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.7602/1982 tanggal 7 Oktober 1982, yang terletak di Desa/Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Perseroan, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hipotik I senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hipotik No.397/T/1988 tanggal 27 September 1988 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.408/2004 tanggal 10 Maret 2004;
- c. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.38, yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2003 dan berakhir haknya tanggal 20 April 2022, seluas 1.332 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.820/AMS/2003 tanggal 27 Maret 2003, yang terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kotamadya Mataram, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Perseroan, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.1.332.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No.687/2007 tanggal 30 April 2007;

- d. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.01/Tanjungbaru, yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 1987 dan berakhir haknya tanggal 13 Oktober 2027, seluas 1.095 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.2019/1987 tanggal 16 September 1987, yang terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukarame, Kabupaten/Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Perseroan, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan peringkat dibebani Hipotik I senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hipotik No.3181 tanggal 13 September 1989 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.2.252.100.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.01057/2007 tanggal 16 April 2007 dengan nilai total jaminan sebesar Rp.2.282.100.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu Rupiah);
- e. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.4, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 1988 dan berakhir haknya tanggal 10 November 2018, seluas 2.511 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.212 tanggal 22 Januari 1980, yang terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan peringkat dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp.651.430.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.3130/2001 tanggal 5 Desember 2001;
- f. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.7, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1993 dan berakhir haknya tanggal 7 Februari 2033, seluas 806 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.102 tanggal 28 April 1992, yang terletak di Kelurahan Belakan-Olo, Kecamatan Padang Barat, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp.1.270.880.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.3129/2001 tanggal 5 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.460.020.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.1151/2007 tanggal 16 April 2007;
- g. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.436, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 1988 dan berakhir haknya tanggal 19 Juni 2036, seluas 1.004 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.7735/1986 tanggal 16 September 1986, yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Raya, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp 464.850.000,- (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.365/2001 tanggal 6 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp 747.850.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.169/2007 tanggal 20 April 2007;
- h. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.1085, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2006 yang berakhir haknya tanggal 23 November 2026, seluas 1.404 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.738/Jemur Wonosari/2006 tanggal 11 September 2006, yang terletak di Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.2.665.700.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.2952/2007 tanggal 30 April 2007;

- i. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.82, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 1988 dan berakhir haknya tanggal 13 April 2028, seluas 2.013 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.2856 tanggal 20 Juni 1988, yang terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terdaftar atas nama Perseroan , berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.2.027.710.000,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.4772/2001 tanggal 6 Desember 2001 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.2.474.390.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.2948/2007 tanggal 30 April 2007;
- j. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No. 2, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 1997 berakhir haknya tanggal 25 Juni 2017, seluas 1.000 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.270/1996 tanggal 3 Februari 1996 berakhir haknya 25 Juni 2017, yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Perseroan , berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.402.860.000,00 (empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.390/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.636.540.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.239/2007 tanggal 30 Mei 2007;
- k. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No. 24, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 1997 dan berakhir haknya 24 Oktober 2017, seluas 595 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.1100/1996 tanggal 7 Mei 1996, yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Perseroan , berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.49.260.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.374/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.39.740.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.240/2007 tanggal 30 Mei 2007;
- l. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.13, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1993 dan berakhir haknya 22 Juli 2023, seluas 4.830 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.813/1987 tanggal 23 Desember 1987, yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Perseroan , berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.457.590.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.375/2001 tanggal 13 Desember 2001;
- m. 1 (satu) bidang tanah HGB No.14, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1993 dan haknya 22 Juli 2023, seluas 4.800 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.806/1987 tanggal 23 Desember 1987 berakhir, yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Perseroan , berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.375/2001 tanggal 13 Desember 2001; Sertifikat HGB No.13 dan 14 tersebut diatas secara bersama-sama dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.602.410.000,00 (enam ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) sesuai sertifikat Hak Tanggungan II No.238/2007 tanggal 30 Mei 2007;

- n. 1 (satu) bidang tanah HGB No.24, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 1993 dan berakhir haknya 25 Mei 2013, seluas 276 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.260/1993 tanggal 6 Maret 1993, yang terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Provinsi Sulawesi Utara, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.263.530.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.737/2001 tanggal 12 Desember 2001 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.121.670.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.667/2007 tanggal 21 Mei 2007;
- o. 1 (satu) bidang tanah HGB No.30, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1988, seluas 1.250 m² sebagaimana berakhir haknya 26 Januari 2027, yang terletak di Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.3.404.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.2012/2007 tanggal 9 Mei 2007 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.18.705.400.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Cf. Surat Keterangan No. 44/ket/XII/2014 yang telah ditandatangani SKMHT No.254 tanggal 24 Desember 2014;
- p. 1 (satu) bidang tanah HGB No.1, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 1992, seluas 4.040 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.10174/1990 tanggal 19 Oktober 1990 berakhir haknya 28 Desember 2020, yang terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.1.516.520.000,00 (satu miliar lima ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.2927/2001 tanggal 3 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.994.180.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.1613/2007 tanggal 17 April 2007;
- q. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 2 (dua) unit Toyota New Camry tahun 2010 diikat FEO (Fidusia) Notaril sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. (3) 18 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani, Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta dan didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-001717 HT.04.06.TH.2004/STD tanggal 10 Maret 2004, yang telah dilakukan perubahan dengan Addendum Perjanjian Fidusia No. (3) 18 tertanggal 6 Februari 2012;
- r. Persediaan SJF No. C2-4831.HT.04-06.TH.2001/NTSD diikat FEO (Fidusia) Notaril sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas persediaan SJF di Jakarta dan didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. No. C2-4831.HT.04-06.TH.2001/NTSD tanggal 10 Maret 2004, yang telah ditetapkan dalam akta No. 5 tanggal 13 Agustus 1998.

Pembatasan (*Negative Covenant*) :

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit.
- b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
- Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

- Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
- Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
- Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
- c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoran maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
 - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
 - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
 - i. Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
 - ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
 - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
- e. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
- f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.

2. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dari BNI sebagaimana dimaksud dalam Surat BNI No. BIN/2.2/095/R tanggal 10 Juni 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit Saudara yang telah dituangkan kedalam Perjanjian Kredit No. 15/BIN/PK/2015 tanggal 9 Juli 2015 dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah dengan Surat No. BIN/2.2/173/R tanggal 30 September 2015 Perihal Tambahan Fasilitas Kredit Saudara dan berdasarkan tambahan Perjanjian Kredit No.002/BIN/PK/2016 tanggal 9 Februari 2016 dan tambahan perjanjian kredit No. 003/BIN/PK/2016 tanggal 9 Februari 2016 perihal tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja transaksional sebagaimana diubah terakhir dengan Surat BNI No. BIN/2.2/087/R tanggal 5 Februari 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Surat BNI No. BIN/2.2/028/R tanggal 21 Februari 2017 tentang Perpanjangan Fasilitas Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum	:	Rp.3.450.000.000.000,- (tiga triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas berjalan Rp.1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) b. Fasilitas tambahan Rp.1.650.000.000.000,- (satu triliun enam ratus lima puluh miliar Rupiah)
Keperluan	:	tambahan modal kerja jasa konstruksi atas proyek-proyek atau angsuran sesuai termijn yang masuk
Bentuk/Sifat	:	Plafond bersifat <i>Revolving</i>
Jangka Waktu	:	27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018
Bunga	:	9,00% (sembilan koma nol nol persen).
Jaminan	:	<i>Cross collateral</i> dengan perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Kredit No.012/KPI/PK/2005 tanggal 29 April 2005 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat BNI No: BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015; b. Ditambah dengan Piutang atas 7 Proyek yang dibiayai perjanjian ini yang diikat dengan Perjanjian Cessie No. 2015/Cessie/10 tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.

Pembatasan (*Negative Covenant*) :

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit.
 - b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
 - i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
 - ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
 - iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
 - iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
 - c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/dusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
 - i. Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
 - ii. Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
 - (1) Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
 - (2) Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
 - iii. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iv. Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
 - e. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
 - f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
3. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Tidak Langsung yang merupakan penggabungan dari:
- a. fasilitas Garansi Bank sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.004/KPS/PPGB/2010 tanggal 18 Juni 2010 dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir dengan Surat No. BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit yang dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. (6) 004/KPS/PPGB/2010 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup;
 - b. Fasilitas LC/SKBDN dari BNI sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pembukaan Letter of Credit No.116 tanggal 24 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Surat No. BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit yang dituangkan ke dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter Of Credit No. (3) 002/BIN/PPLC/2012 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup;
 - c. Fasilitas KMK *Open Account Facility* (OAF) dari BNI sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.005/BIN/PK/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir kali melalui Surat No. BIN/2.2/048/R tanggal 23 Maret 2015 yang dituangkan pada Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 005/BIN/PK/2012 tanggal 24 Maret 2015 yang dan Perjanjian Pemberian Fasilitas OAF No. 05/BIN/PK/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup yang kemudian dilakukan pembaharuan berdasarkan Pembaharuan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Supply Chain Financing Dengan Skim Open Account Financing No. BIN/004/PKS/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

Atas penggabungan fasilitas-fasilitas kredit tersebut telah diubah berdasarkan Surat BNI No. BIN/2.2/028/R tanggal 21 Februari 2017 telah dituangkan kedalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. (2) 13/BIN/PK 2015 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Maksimum Kredit : Rp.4.120.000.000.000,- (empat triliun seratus dua puluh miliar Rupiah)
- Keperluan : peruntukan kredit adalah sebagai berikut:
- a. Garansi Bank/SBLC untuk keperluan penjaminan tender/uang muka/pelaksanaan/ pemeliharaan/ pembayaran proyek-proyek swasta/ pemerintah.
 - b. LC/SKBDN untuk pembelian barang kebutuhan proyek luar negeri maupun dalam negeri;
 - c. Trust Receipt untuk menampung pembayaran kewajiban yang timbul atas LC/SKBDN yang dibuka secara sight atau usance;
 - d. SCF untuk pembiayaan invoice/ tagihan supplier/ subkontraktor yang telah diakseptasi.
- Bentuk/Sifat : bentuk atau sifat dibagi sebagai berikut:
- a. Untuk L/C Import/SKBDN bersifat sight atau usance LC atau UPAS atau UPAU;
 - b. Untuk GB/SBLC bersifat clean up (lunas pada saat jatuh tempo)
 - c. Untuk TR/KMK Post Financing bersifat clean up (lunas saat jatuh tempo).
- Jangka Waktu : 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018
- Jaminan : *Cross collateral* dengan perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut:
- a. Perjanjian Kredit No.012/KPI/PK/2005 tanggal 29 April 2005 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat BNI No: BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015 yang dituangkan ke dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (13) 012/KPI/PK/2005 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
 - b. Perpanjangan Fasilitas Kredit Saudara yang telah dituangkan kedalam Perjanjian Kredit No. 15/BIN/PK/2015 tanggal 9 Juli 2015 dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup

Pembatasan (*Negative Covenant*) :

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit.
- b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
 - i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
 - ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
 - iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
 - iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.

- c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoran maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
 - i. Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
 - ii. Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
 - (1) Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
 - (2) Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
 - iii. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iv. Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
- e. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
- f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.

C. PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK (“BRI”)

1. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi dari BRI sebagaimana tertuang dalam Akta perjanjian kredit Modal Kerja Konstruksi No. 36 tanggal 11 Juni 2010 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi No. 47 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta, dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas	:	sebesar Rp. 1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah)
Jenis Kredit	:	KMK Konstruksi Plafond.
Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja untuk membiayai proyek yang dikerjakan oleh Perseroan sehubungan dengan adanya proyek/ pekerjaan pembangunan, baik untuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan proyek-proyek di luar pemerintah dan BUMN atas persetujuan BRI dalam hal ini Divisi Bisnis BUMN BRI. Tidak dapat digunakan untuk Proyek Jalan Tol Becakayu. Besarnya maksimum kredit untuk masing-masing proyek dihitung sesuai rumus pada KMK transaksional.
Sifat/bentuk kredit	:	<i>Pseudo R/K Maks Co</i> tetap. (Hasil pembayaran dari proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit BRI harus digunakan untuk menurunkan baki debit kredit dan dapat ditarik kembali untuk keperluan pembiayaan proyek lain dengan persetujuan BRI dalam hal ini Divisi Bisnis BUMN BRI).
Jangka Waktu	:	berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan 10 Juni 2017. Berdasarkan Surat dari BRI No. B.20KOT/KTD/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017, perjanjian ini masih berlaku dan dapat digunakan kegiatan operasional Perusahaan, yang mana perpanjangan fasilitas kredit tersebut masih dalam proses Putusan Komite Kredit BRI.
Suku bunga	:	9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun.
Agunan	:	
1. Agunan Pokok	:	
a.	:	Proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan sesuai dengan proyek yang dibiayai BRI minimal mengcover 120% (seratus dua puluh persen);
b.	:	Proyek-proyek dimaksud diserahkan kepada BRI secara cessione dengan nilai sebesar Rp.1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) yang telah dituangkan dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cessione) sebagai Jaminan tanggal 3 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah,

S.H., Notaris di Jakarta yang diubah terakhir kali dengan akta Perubahan Pemberian Jaminan No. 20 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., Notaris di Jakarta.

2. Agunan Tambahan

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 655/Braga, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25 April 2003, Nomor 168/Braga/2003, seluas 1.535 m² (seribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Baraga, atas nama Perseroan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 16.186.000.000,- (enam belas miliar seratus delapan puluh enam juta Rupiah) sesuai dengan SHT Peringkat I No. 8952/2010 tanggal 30 September 2010 dan Peringkat II (dua) sebesar Rp.8.814.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus empat belas juta Rupiah);

Pembatasan (*Negative Covenant*) :

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Perseroan sendiri.
- b. Menyewakan asset yang dijaminakan di BRI kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha.
- c. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

2. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Bank Garansi *interchangeable* dengan KMKI/PJI dari BRI sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. 5 tanggal 3 Desember 2010 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah Addendum V Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. 18 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diperpanjang dengan Surat No. R.II.307-ADK/DKR-2/11/2015 tanggal 2 November 2015 Perihal Penawaran Putusan Kredit, dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas : sebesar Rp.4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus Rupiah).

Plafond BG dan KMKI/PJI bersifat interchangeable, sehingga total *outstanding* penggunaan KMKI/ PJI ditambah BG tidak boleh melampaui maksimum plafond sebesar Rp.4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar Rupiah). Untuk fasilitas BG ditetapkan maksimal penggunaan sampai dengan Rp. 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar Rupiah). Untuk fasilitas KMKI/PJI ditetapkan maksimal penggunaan sampai dengan Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar dengan maksimal fasilitas PJI sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)..

Jenis Kredit : BG/KMKI/PJI

Agunan : Terkait dengan fasilitas KMK Konstruksi.

a. Ketentuan Bank Garansi (BG):

Plafond BG : sebesar Rp.4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus Rupiah)

Keperluan Bank Garansi : BG digunakan untuk penerbitan jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan, diluarjaminan tender, BG yang diterbitkan hanya digunakan untukmenjamin proyek-proyek yang dibiayai BRI atau pembayarannya disalurkan melalui BRI.

BG dapat diterbitkan untuk kepentingan Joint Operation dengan syarat porsi Perseroan dalam JO minimal 51% (lima puluh satu persen) (apabila kurang dapat dipertimbangkan dengan persetujuan Divisi Bisnis BUMN) dan sisa porsi dalam JO tersebut di kontra garansi dengan *fully cash collateral* atau *counter guarantee* dari prime bank apabila tidak memiliki fasilitas di BRI.

- Jangka Waktu : sejak penandatanganan akad kredit sampai dengan tanggal 10 Juni 2017.
- Tenor : sepanjang availability period belum jatuh tempo, setiap penerbitan Bank Garansi dapat dilayani dengan tenor lebih dari 1 tahun sepanjang didukung oleh kontrak kerja yang mensyaratkan hal tersebut dan telah mendapat persetujuan BRI.
- Provisi : - Tender dan Advanced Payment Bond: 0,50% dari nilai BG yang diterbitkan.
- Performance dan Maintenance Bond: 0,50% dari nilai BG yang diterbitkan.
- Bank Garansi lainnya : 0,50% dari nilai BG yang diterbitkan.
- Besarnya provisi minimal untuk BG Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
- b. Ketentuan KMKI:
- Plafond KMKI : Maksimum Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah)
- Jenis Pinjaman : Kredit Modal Kerja Impor
- Keperluan KMKI : untuk memback up fasilitas PJI dan menampung LC/SKBDN yang telah jatuh tempo atau tidak terbayar.
- Jangka Waktu : sejak 10 Juni 2016 sampai dengan 10 Juni 2017.
- Tenor : sepanjang availability period belum jatuh tempo, setiap penerbitan KMKI dapat dilayani dengan tenor lebih maksimal 180 hari.
- Provisi : 0, 5% (nol koma lima persen) dari plafond kredit, dibayarkan secara proporsional.
- c. Ketentuan Pengangguhan Jaminan Impor(PJI)
- Plafond PJI : Maksimum Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
- Jenis Pinjaman : PJI
- Keperluan KMKI : PJI digunakan untuk pembelian barang dalam rangka proyek yang dikerjakan Perseroan baik dari luar negeri (dengan menggunakan L/C) maupun dalam negeri (menggunakan SKBDN).
- Jangka Waktu : sejak 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017.
- Tenor : - *Sight*, sejak pembukaan L/C / SKBDN sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak barang atau dokumen tiba.
- *usance*, sejak pembukaan L/C / SKBDN sampai dengan jatuh tempo wesel impor dengan maksimal 180 hari sejak *B/L date*.
Sepanjang availability period belum jatuh tempo, setiap penerbitan KMKI dapat dilayani dengan tenor lebih maksimal 180 hari.
- Provisi : 1,8% (satu koma delapanpersen) minimal USD.50.00 (lima puluh Dollar Amerika Serikat).

Pembatasan (Negative Covenant) :

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Perseroan sendiri.
- b. Menyewakan asset yang dijaminan di BRI kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha.
- c. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

3. Perseroan telah memperoleh Fasilitas *Bill Purchase financing* dari BRI sebagaimana tertuang Perjanjian Kredit Fasilitas Bill Purchase Financing No. 19 tanggal 30 April 2015 sebagaimana telah diperpanjang dengan Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Forfaiting (semula *bill purchase Financing*) No. 49 tanggal 24 Juni 2016 yang seluruhnya dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M. Kn., Notaris di Jakarta, dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas	:	Rp.1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah)
Jenis Kredit	:	<i>Commercial Line</i>
Tujuan Penggunaan	:	Batas Penggunaan Pengambilalihan Hak Tagih (<i>Bill Purchase Financing</i>) sub-kontraktor, supplier, dan mandor kepada Perseroan.
Sifat/bentuk kredit	:	<i>Committed Line</i> .
Jangka Waktu	:	berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2017.
Suku bunga	:	8,45% (delapan koma empat lima persen) per tahun, <i>reviewable</i> setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang berlaku di BRI. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.
Provisi	:	0,50% (nol koma lima nol persen) dari plafond kredit.
Penalty Rate	:	2% p.a. (dua persen annum) diatas suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga.
Agunan	:	
1. Agunan Pokok	:	
a.	:	Proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan sesuai dengan proyek yang dibiayai BRI minimal mengcover 120% (seratus dua puluh persen);
b.	:	Proyek-proyek dimaksud diserahkan kepada BRI secara <i>cessie</i> dengan nilai sebesar Rp.1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) yang telah dituangkan dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan (<i>Cessie</i>) sebagai Jaminan tanggal 3 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang diubah terakhir kali dengan akta Perubahan Pemberian Jaminan No. 20 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Agunan Tambahan	:	
	:	Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 655/Braga, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25 April 2003, Nomor 168/Braga/2003, seluas 1.535 m ² (seribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Baraga, atas nama Perseroan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 16.186.000.000,- (enam belas miliar seratus delapan puluh enam juta Rupiah) sesuai dengan SHT Peringkat I No. 8952/2010 tanggal 30 September 2010 dan Peringkat II (dua) sebesar Rp.8.814.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus empat belas juta Rupiah);

D. SINDIKASI BNI - BRI

Perseroan memperoleh fasilitas kredit sindikasi BNI - BRI sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 60 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

Plafond	:	max. Rp.735.654.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah) yang terdiri dari BNI sebesar Rp 367.827.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) dan BRI sebesar Rp 367.827.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	transaksional/ <i>clean up system</i>
Tujuan Penggunaan	:	pembiayaan 70% (tujuh puluh persen) dari biaya pengadaan amterial untuk proyek pembangunan Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu Seksi 1 di luar Pajak pertambahan Nilai (PPn).
Jangka Waktu	:	jatuh tempo pembayaran pada tanggal 10 Oktober 2018
Agunan	:	
1)	:	Kepemilikan 60 % (enam puluh persen) saham KKDM oleh WTR diikat secara gadai
2)	:	Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol diikat secara notariil berupa akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol (<i>Cessie</i>) atas nama KKDM, termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak ketiga dan/atau

- menunjuk Pihak ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (Cessie)
- 3) Tagihan/piutang Debitur dari Proyek yang dibiayai diikat secara fidusia minimum sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak.
 - 4) Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara fidusia sebesar 100% dari nilai pertanggungan

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Selama hutang belum dinyatakan lunas oleh Para Kreditur, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Kreditur, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain
- b. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Debitur yang dapat mengurangi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada Para Kreditur berdasarkan Dokumen Transaksi termasuk namun tidak terbatas pada melunasi Kredit.
- c. Mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan kepada instansi yang berwenang.
- d. Melakukan perubahan akta perjanjian jual beli bersyarat dengan hak untuk membeli kembali atas saham- saham PT KKDM tertanggal 17 Oktober 2014 No. 24 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., notaris di Jakarta.
- e. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain yang terkait dengan asset tertentu yang dijaminkan kepada Para Kreditur.
- f. Menyewakan asset yang dijaminkan di Agen Jaminan kepada pihak lain.
- g. Melakukan penjualan Aktiva tetap per tahun melebihi nilai Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Bank yang Tidak Terafiliasi dengan Perseroan

A. PT BANK PANIN TBK (“PANIN”)

Emiten telah mendapat fasilitas kredit dari Panin sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 002/FIT-MM/LEG/06 tanggal 23 Mei 2006 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang kemudian diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 003/IBD-MM/LEG/17 tanggal 23 Mei 2017 , yang dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, SH, Notaris di Jakarta Perihal Fasilitas Pinjaman Money Market (Sublimit Fasilitas Penerbitan Bank Garansi).

Fasilitas-fasilitas yang didapat dari Panin adalah:

1. Pinjaman Money Market

Plafond	:	Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah)
Tujuan	:	Modal kerja umum
Sifat Fasilitas	:	<i>Revolving</i>
Jatuh Tempo	:	24 Mei 2018
Jangka Waktu Pinjaman	:	1 bulan, atau 3 bulan untuk setiap penarikan pinjaman. Jangka waktu masing-masing pinjaman tidak boleh melebihi jatuh tempo fasilitas.
Suku Bunga	:	- Jangka waktu pinjaman 1 bulan : JIBOR 1 bln + 2,25% per tahun. - Jangka waktu pinjaman 3 bulan : JIBOR 1 bln + 2,50% per tahun
		LPS Rate yang digunakan adalah tingkat bunga penjamin simpanan dalam Rupiah untuk Bank Umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan berlaku pada tanggal penarikan pinjaman.
Denda	:	5% pertahun di atas tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku.
2. Fasilitas Bank Garansi

Plafond	:	Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan sub limit dari Fasilitas Pinjaman Money Market dan secara agregat outstanding Fasilitas Pinjaman Money Market dan Bank Garansi maksimum sebesar Rp Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).
---------	---	--

Tujuan	:	Jaminan pembayaran uang muka proyek, jaminan keikutsertaan tender proyek, jaminan retensi proyek dan jaminan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.
Sifat Fasilitas	:	<i>Revolving</i>
Jatuh Tempo	:	24 Mei 2018
Jangka Waktu BG	:	Maksimum 6 bulan
3. Fasilitas Transaksi Valuta Asing		
Plafond	:	USD.5.000.000,00 (lima juta dollar Amerika Serikat)
Tujuan	:	Menunjang kebutuhan operasional Perseroan akan valuta asing yang timbul sehubungan adanya beberapa proyek di luar negeri yang sedang dan akan dikerjakan dalam denominasi USD.
Jenis Transaksi Valas	:	<i>Valuta Today, Tomorrow and Spot</i>
Jatuh Tempo	:	24 Mei 2017

Bahwa atas Fasilitas Transaksi Valuta Asing tersebut masih berlaku dan masih mengikat para pihak, yang mana pada saat ini atas perjanjian tersebut masih dalam proses pengurusan perpanjangan berdasarkan Surat Perseroan tertanggal 23 Agustus 2017 dan Draf Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 001/IBD-FX/LEG/17 yang dikirimkan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk, kepada Perseroan yang mana telah ditandatangani oleh Perseroan.

Denda Keterlambatan	:	- 2% per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran kewajiban kewajiban dalam mata uang USD. - 4% per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran kewajiban dalam mata uang Rupiah.
---------------------	---	---

Jaminan :
Fidusia atas piutang dan/atau tagihan yang timbul dari kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari pokok pinjaman.

Pembatasan (*Negative covenants*) :
Sebelum semua pokok pinjaman serta bunga dan biaya-biaya lain yang terhutang dilunasi, maka Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dibawah ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Panin:

- a. Menerima pinjaman atau kredit baru dari bank lain atau pihak ketiga yang jumlahnya dapat menyebabkan dilanggarnya rasio keuangan pada financial covenant. Bila tidak melanggar, Perseroan cukup memberi pemberitahuan tertulis kepada Panin selambatnya 14 hari setelah diterimanya pinjaman atau kredit baru tersebut;
- b. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*Borg*) terhadap pihak ketiga;
- c. Membubarkan atau melikuidasi perusahaan;
- d. Merubah bidang/jenis usahanya;
- e. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya (*surseance van betaling*);
- f. Merubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan;
- g. Merubah anggaran dasar perusahaan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Perubahan anggaran dasar selain Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha cukup dilakukan pemberitahuan tertulis kepada Panin selambatnya 14 hari setelah dilaksanakan perubahan anggaran dasar dimaksud;
- h. Menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga;
- i. Menyewakan/memindah tangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- j. Memindahtangankan perusahaan dalam bentuk apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga;
- k. Membayar hutangnya kepada pemegang saham dan atau para peseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari;
- l. Melakukan merger atau penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham;
- m. Memperbolehkan pemegang saham untuk:

- (1) menarik kembali modalnya yang telah disetor;
- (2) menjaminkan atau menggadaikan saham perusahaan.

Khusus untuk hal-hal dibawah ini cukup dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Panin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan:

- a. merubah susunan pengurus;
- b. membagikan deviden perusahaan;
- c. membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada;
- d. mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada.

Bahwa Perseroan telah melakukan permohonan persetujuan dalam perjanjian pembiayaan tersebut diatas kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk berdasarkan surat No. 514/WK/DIR/2017 tanggal 12 April 2017 serta terkait atas pembagian dividen berdasarkan surat No. 511/WK/DIR/2017 tanggal 12 April 2017.

B. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK (“BJB”)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit Modal Kerja sub *limit non cash loan* dari BJB yang dapat digunakan untuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN), LC, dan Bank Garansi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 94 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Dr. Hj. Yenni Yunithwati Rukmana, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dihadapan Indra Meidi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diperpanjang dengan Surat No. 27/KOM-KKI/2015 tanggal 5 November 2015 Perihal penawaran Pemberian Kredit dan diubah dengan Surat No. 29/KOM-KKI/2015 tanggal 25 November 2015 Perihal Penawaran Pemberian Kredit, sebagaimana diubah terakhir dengan SPPK No. 35/KOM-KKI/2016 tanggal 21 November 2016, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Plafond Kredit	:	Rp 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)
Jenis Kredit	:	KMKK stand by Loan (<i>Unsecured Loan</i>) Sub Limit Non Cash Loan (berlaku substitutif)
Sifat Kredit	:	Revolving dengan Proyek yang berbeda
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja Usaha Jasa Konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN/BUMD.
Jangka Waktu	:	sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan 7 November 2017.
Suku Bunga Kredit	:	9% (sembilan persen) p.a. efektif <i>Floating Rate subject to review Bank</i> .
Agunan	:	Fidusia atas tagihan temijn proyek APBN/APBD/BUMN/BUMD senilai Rp.312.500.000.000,00 (tiga ratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang akan diikat Fidusia senilai Rp.312.500.000.000,00 (tiga ratus dua belia miliar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 74 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat dihadapan DR. Hajjah Yenni Yunithawati Rumana, S.H., Notaris di Bandung.

Pembatasan (*Negative Covenant*) :

Tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:

- a. Memindah tanggakan Jaminan kredit.
- b. Memperoleh fasilitas kredit investasi atau pinjaman lain dari pihak ketiga untuk proyek yang sama/sejenis, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
- c. Menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang dibiayai oleh bank BJB kepada pihak lain.
- d. Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
- e. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban Perseroan atas fasilitas kredit kepada pihak lain

C. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (“EXIM BANK”)

1. Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Exim Bank sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 22 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., *Master of Public Administration*, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Ketiga Perjanjian Kredit Modal Kerja

Ekspor No. 43 tanggal 24 Maret 2017, termasuk sublimit Perjanjian Pemberian Fasilitas Penjaminan Indonesia Exim Bank No. 23 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., *Master of Public Administration*, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Penjaminan Indonesia Exim Bank No. 44 tanggal 24 Maret 2017 dihadapan Ashoya Ratam ,S.H., M.kn, Notaris Di Jakarta dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

Plafond	:	max. Rp.2.000.000.000.000,-(dua triliun Rupiah) dan penambahan Fasilitas Penjaminan Exim Bank dengan limit maksimal sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja Ekspor
Sifat Fasilitas	:	Revolving Transaksional
Tujuan Penggunaan	:	Pembiayaan modal kerja dan/atau Jaminan Indonesia Eximbank untuk proyek luar negeri atau pun proyek dalam negeri yang terkait atau menunjang perdagangan internasional (ekspor).
Jangka Waktu	:	1 (satu) terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017 s.d 27 Maret 2018
Suku Bunga	:	8,90% (delapan koma sembilan puluh persen) per tahun.

Agunan :

- a. Fidusia piutang milik Debitur atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh Kreditur sebesar Rp.1.620.000.000.000,- (satu triliun enam ratus dua puluh miliar rupiah);
- b. Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) sebesar Rp.7.370.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang melekat pada atau berdiri di atas bidang tanah tersebut dan segala sesuatu yang dikemudian hari akan ada atau melekat pada atau berdiri di atas bidang tanah tersebut yaitu:
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00592/Ciputat atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Mei 2006 Nomor: 7/Ciputat/2006 seluas 3.155 m² (tiga ribu seratus lima puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.14.01.00554 yang obyek Hak Tanggungannya meliputi seluruh bangunan yang ada diatas tanah tersebut dan segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut, baik sekarang atau dikemudian hari ada yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak.

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada Exim Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Exim Bank, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/ atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, sepanjang menurut pertimbangan Exim Bank bahwa nilai jaminan yang diserahkan oleh Perseroan kepada Exim Bank belum mencukupi, kecuali kewajiban timbul untuk fasilitas kredit yang diberikan Exim Bank.
- b. Melakukan akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut Kebijakan Pemerintah.
- c. Menggunakan Fasilitas Kredit selain daripada yang telah ditentukan dalam tujuan penggunaan fasilitas pada perjanjian kredit ini.
- d. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang.
- e. Menjual atau memindahkan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan yang sudah diserahkan sebagai jaminan kepada Exim Bank.
- f. Meminjamkan uang kepada siapa pun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Perseroan .
- g. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

Kewajiban Perseroan:

Perseroan menyampaikan secara tertulis kepada Eximbank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang acaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan usaha (merger), konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham kepada perusahaan lain, sejauh tidak merubah bisnis inti perusahaan.
- b. Mengubah Anggaran Dasar atau mengubah status perseroan.
- c. Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan dalam jumlah berapa pun juga kepada pemegang sahamnya kecuali dalam rangka meningkatkan struktur permodalan perusahaan.
- d. Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah.
- e. Mengubah komposisi pemegang saham Perseroan dan pengurusnya (anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris).

Bahwa Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan tertulis atas batasan-batasan yang telah ditentukan oleh kreditur, berdasarkan surat No. 380.2./WK/DIR/2017 tanggal 12 April 2017 terkait atas pembagian dividen.

D. PT BANK UOB INDONESIA (“UOB”)

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit UOB sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 10 April 2013 yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan VII terhadap perjanjian kredit No. 25 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.kn Notaris di Jakarta dengan rincian fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

Plafond	:	max. Rp.1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus Rupiah)
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas PC, LC, SKBDN, dan BG yang masing-masing tidak melebihi Rp.1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus Rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	Fasilitas PC untuk pembiayaan kontrak dan Fasilitas LC, SKBDN, dan BG untuk keperluan Modal Kerja.
Jangka Waktu	:	jatuh tempo pembayaran pada tanggal 18 April 2018
Agunan	:	
1)	:	Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar), yang telah dituangkan dalam perubahan ketiga terhadap akta jaminan Fidusia Atas Tagihan Piutang No. 26 tanggal 18 April 2017, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.h., M.kn Notaris di Jakarta;

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada UOB, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang;
- b. Melakukan penggabungan usaha, akuisisi, peleburan atau pemisahan usaha kecuali konsolidasi atau merger antara Debitur dengan subsidarinya;
- c. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
- d. Menggadaikan saham perusahaan Debitur;
- e. Melakukan penerbitan obligasi atau surat hutang di dalam maupun di luar Pasar Modal yang melanggar ketentuan Rasio Keuangan, namun apabila tidak melanggar ketentuan Rasio Keuangan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit dari UOB cukup dilakukan pemberitahuan kepada UOB;
- f. Mengalihkan Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak manapun;
- g. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penganggung kepada pihak lain;
- h. Menerima pinjaman yang mengakibatkan dilanggarnya Ratio Keuangan;
- i. Melakukan perubahan anggaran dasar yang meliputi perubahan kepemilikan;
- j. Mengalihkan, menjaminkan dan menyewakan harta kekayaan debitur.

Sehubungan dengan pembatasan dari UOB berdasarkan fasilitas-fasilitas kredit sebagaimana diungkapkan diatas, Perseroan telah memberitahukan kepada UOB Perseroan berdasarkan Surat No. 852.3/WK/DIR/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

E. PT BANK CIMB TBK (“CIMB”)

Perseroan Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap 1 tahun 2014 No. 20 tanggal 19 September 2014 yang telah dirubah terakhir dengan akta Perubahan 1 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I tahun 2014 No. 26 tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) Perseroan.
2) PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pihak Wali Amanat.
Objek Perjanjian : Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I tahun 2014
Nilai Perjanjian : Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Emisi sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1) Perseroan

Perseroan memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau kekayaan Perseroan yang ada pada saat maupun dimasa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan perjanjian perwalianamanatan.
- b. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% dari total ekuitas Perseroan kecuali :
 - i. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada Supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha
 - ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajarTotal Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Perseroan dikurangi dengan Aktiva tidak berwujud.
- c. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan
- d. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
- e. Mengadakan Penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi obligasi dalam perjanjian perwalianamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan memadai untuk menjamin pembayaran obligasi;
- f. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagaian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali :
 - i. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan , yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam perjanjian perwalianamanatan ini adalah :
 1. Kontruksi;
 2. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 3. Jasa Konsultasi;
 4. Fabrikasi;

5. Perdagangan Umum;
 6. Property dan realty.
- g. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau Privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - h. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 - i. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi;
 - j. Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan .
 - k. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada pengadilan niaga.

Perseroan berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - c. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, PERSEROAN lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menuru ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara -proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - d. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;
- 2) Wali Amanat
Hak Wali Amanat sebagai berikut :
- a. meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan

- pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- a. memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
 - b. menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Perseroan ;
 - c. menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Perseroan , apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
 - d. menerima fotokopi bukti penyetoran dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

- a. memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;
- b. mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- c. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Perseroan yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;
memantau pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi

F. The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD (“BTMU”)

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit No. 15-0612LN tanggal 17 Desember 2015, dari The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan atas perjanjian No. 16-0484LN tanggal 17 Desember 2016, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Plafond	: sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	: Kredit Modal Kerja
Keperluan	: untuk modal kerja
Jangka Waktu	: berlaku sampai dengan 15 Desember 2017.
Suku Bunga	: Jibor untuk Jangka Waktu Bunga yang bersangkutan ditambah dengan Marjin yang Berlaku untuk Pinjaman dalam Rupiah.
Jaminan	: jaminan piutang sebesar 125% dari plafond kredit

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Debitur berjanji akan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian ini, debitur akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- a. Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan. Kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset debitor.
- b. Memperoleh setiap aset dengan cara membeli atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari yang sesuai dengan anggaran dasar debitor.
- c. Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

G. Sindikasi BRI-BCA

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan surat Penawaran Indikatif Proyek pengadaan Transmisi listrik 500KV Sumatera dari Bank BRI-BCA No. B.711-MNS/NSD/05/2016 dan No. 375/GCF/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Plafond	:	maksimum sebesar Rp.4.402.500.000.000,00 (empat triliun empat ratus dua miliar lima ratus juta Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja
Keperluan	:	untuk membiayai kebutuhan modal kerja konstruksi pengadaan transmisi 500 KV Sumatera
Jangka Waktu	:	4 (empat tahun) yang berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.
Suku Bunga	:	8,95% (delapan koma sembilan puluh lima persen) pertahun
Jaminan	:	tagihan atas paket pekerjaan paket 1 dan pekerjaan paket 2; dan tagihan atas klaim bank garansi dan asuransi terkait proyek transmisi sumatera yang dibiayai.

Pembatasan (*Negative Covenant*) : tidak terdapat pembatasan

H. PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. SMBCI/NS/0447 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup sebesar Rp. 950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan sublimit fasilitas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Nama Fasilitas Loan on Note-I

Limit	:	Rp.950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah)
TujuanPergunaan	:	untuk kegiatan korporasi secara umum
Periode Ketersediaan	:	15 Desember 2016 samapi dengan 29 Desember 2017.
Tanggal Jatuh Tempo	:	3 (tiga) bulan setelah tanggal penggunaan terakhir fasilitas.
Jenis Fasilitas	:	Revolving.

b. Nama Fasilitas Commercial letter of credit

Limit	:	Rp.950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah)
TujuanPergunaan	:	memfasilitasi impor bahan baku atau pembelian lokal bahan baku atau peralatan untuk kegiatan bisnis peminjam melalui penerbitan letter of credit usance, sight, L/C usance payable at sight ("L/C UPAS"), L/C usance payable at usance ("L/C UPAU") dan L/C lokal.
Periode Ketersediaan	:	15 Desember 2016 samapi dengan 29 Desember 2017.
Tanggal Jatuh Tempo	:	12 (dua belas) bulan setelah tanggal penggunaan terakhir fasilitas.
Jenis Fasilitas	:	Revolving

c. Nama Fasilitas acceptance

Limit	:	Rp.950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah)
TujuanPenggunaan	:	untuk menyediakan akseptasi letter of credit usance, sight, L/C usance payable at sight ("L/C UPAS"), L/C usance payable at usance ("L/C UPAU") dan L/C lokal.
Periode Ketersediaan	:	15 Desember 2016 sampai dengan 29 Desember 2017.
Tanggal Jatuh Tempo	:	6 (enam) bulan setelah tanggal penggunaan terakhir fasilitas.
Jenis Fasilitas	:	Revolving

d. Nama Fasilitas loan on note trust Receipt

Limit	:	Rp.950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah)
TujuanPenggunaan	:	untuk membiayai pembayaran letter of credit usance, sight, L/C usance payable at sight ("L/S UPAS"), L/C usance payable at usance ("L/C UPAU") dan L/C lokal.
Periode Ketersediaan	:	15 Desember 2016 samapi dengan 29 Desember 2017.
Tanggal Jatuh Tempo	:	6 (enam) bulan setelah tanggal penggunaan terakhir fasilitas.
Jenis Fasilitas	:	Revolving

e. Nama Fasilitas Guarantee

Limit	:	Rp.950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah)
TujuanPenggunaan	:	penerbitan bank garansi dalam bentuk payment bond, big bond, performance bond, dan maintenance bond. Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan bisnis peminjam.
Periode Ketersediaan	:	15 Desember 2016 samapi dengan 29 Desember 2017.
Tanggal Jatuh Tempo	:	24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal penggunaan terakhir fasilitas.
Jenis Fasilitas	:	Revolving

f. Nama Fasilitas *loan on note account payable financing*

Limit	:	Rp.950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah)
TujuanPenggunaan	:	pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada supplier-supplier peminjam.
Periode Ketersediaan	:	15 Desember 2016 samapi dengan 29 Desember 2017.
Tanggal Jatuh Tempo	:	6 (enam) bulan setelah tanggal penggunaan terakhir fasilitas.
Jenis Fasilitas	:	Revolving.
Jaminan	:	semua tagihan/piutang Usaha emiten dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan Jaminan Fidusia No. 44 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta.
Pembatasan (<i>Negative Covenant</i>):	:	Perseroan harus memberitahukan kepada bank segera setelah mengetahui adanya perubahan kendali.

I. PT Bank DBS Indonesia, TBK

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. 042/PFP-DBSI/III/1-2/2017 tanggal 16 Februari 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup antara PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Plafond : Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).
 Jenis Fasilitas : uncommitted Omnibus
 Jangka Waktu : 1 (satu) tahun terhitung sejak 16 Febuari 2017 dan berakhir 15 Februari 2018.
 Bunga : JIBOR + 1.5% per bulan
 Angunan : Jaminan berupa kebendaan fidusia atas tagihan/piutang milik Nasabah dengan nilai penjaminan hingga sejumlah Rp. 500.000.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), fidusia mana telah dituangkan kedalam Akta Jaminan Fidusia No. 47 tanggal 16 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, SH, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Pusat

Fasilitas Omnibus ini terdiri atas :

Letter of Credit (L/C)

Limit : Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
 Tujuan Penggunaan : pembiayaan impor.
 Jangka Waktu : 1 (satu) tahun terhitung sejak 16 Febuari 2017 dan berakhir 15 Februari 2018.
 Bunga : 1% per tiga bulan untuk mata uang IDR dan 2% per bulan untuk mata uang USD

Fasilitas SKBDN

Limit : Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
 Tujuan Penggunaan : Jaminan Perbankan.
 Jangka Waktu : 1 (satu) tahun terhitung sejak 16 Febuari 2017 dan berakhir 15 Februari 2018.
 Bunga : 1% per tiga bulan untuk mata uang IDR dan 2% per bulan untuk mata uang USD

Fasilitas Trust Receipt (T/R)

Limit : Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
 Tujuan Fasilitas : pembiayaan impor.
 Suku Bunga : 1.5% perbulan.
 Jangka waktu : 1 (satu) tahun terhitung sejak 16 Febuari 2017 dan berakhir 15 Februari 2018.

Fasilitas Account Payables Financing (APF)

Limit : Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
 Tujuan Fasilitas : uncommitted account payables financing.
 Suku Bunga : 1,5 % untuk 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan dan sampai dengan tenoar fasilitas perbankan.
 Jangka waktu : 1 (satu) tahun terhitung sejak 16 Febuari 2017 dan berakhir 15 Februari 2018.

Fasilitas Revolving Credit Facility (RCF)

Limit : Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)
 Tujuan Fasilitas : uncommitted revolving credit facility
 Suku Bunga : 1,5 % untuk 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan dan sampai dengan tenoar fasilitas perbankan.
 Jangka waktu : 1 (satu) tahun terhitung sejak 16 Febuari 2017 dan berakhir 15 Februari 2018.

Pembatasan (*Negative Covenant*) :
Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannya hal-hal di bawah ini:

- a. Terjadi suatu cidera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban pajak Nasabah atau proses perkara di pengadilan manapun yang dapat mempengaruhi usaha Nasabah;
- b. Perubahan terhadap anggaran Dasar termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah dan/atau manajemen Nasabah dan/atau yang mengakibatkan Pemerintah Republik Indonesia tidak menjadi pemegang saham pengendali Nasabah atau yang tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan finansial yang disyaratkan oleh Bank dan/atau pengurus Nasabah;
- c. Perubahan secara material yang dapat mempengaruhi usaha Nasabah dan/atau kondisi keuangan Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank;
- d. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya;
- e. Melakukan bisnis ekspansi dan/atau investasi baru atau mendirikan bisnis baru yang berbeda dengan segmen Nasabah atau bisnis unit yang tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan finansial yang diisyaratkan oleh Bank;
- f. Mengubah susunan pengurus Nasabah.

J. PT Bank Mega TBK

1. Perseroan memperoleh fasilitas penerbitan obligasi melalui Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Waskita Karya Tahun 2016 No. 22 tanggal 4 April 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH,M.kn, yang diubah terkahir kali dengan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Waskita Karya Tahun 2016 No. 65 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Nilai Obligasi	:	seluruh nilai pokok Obligasi adalah sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah.)
Tujuan Penggunaan	:	a. Sekitar 70% (tujuh puluh persen), akan digunakan modal kerja Perseroan dalam pekerjaan bangunan sipil, EPC, diantaranya biaya peralatan, biaya subkontraktor serta upah kerja; b. Sekitar 30% (tiga puluh persen), akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan;
Jangka Waktu	:	3 (tiga) tahun
Jaminan	:	tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun di jamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Pembatasan (*Negative Covenant*) :
Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada), belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji akan mengikatkan diri sebagai berikut:

Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhannya dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Ekuitas Perseroan, kecuali;
 - a. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar
Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Perseroan dikurangi dengan aktiva tidak berwujud.
2. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama, kecuali atasan keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
3. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
4. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan,

kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua sayarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.

5. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali :
 - 5.1. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan . Yang dimaksud kegiatan utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah:
 - a. Konstruksi;
 - b. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jasa konsultasi;
 - d. Fabrikasi;
 - e. Perdagangan Umum;
 - f. Propertu dan realty.
 - 5.2. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - 5.3. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 6. Melakukan transaksi afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan /atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya tidaknya seam dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari Pihak Ketiga yang bukan afiliasi.
 7. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan .
 8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak yang lain kepada Pengadilan Niaga.
2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap 2 tahun 2016 No. 15 tanggal 09 September 2016 yang dibuat Dina Chozie, S.H., Candidat Notaris berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notari Jakarta Selatan No. 04/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2012 tanggal; 29 Februari 2012, pengganti dari Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) Perseroan. 2) PT Bank Mega Tbk. Sebagai Pihak Wali Amanat.
Objek Perjanjian	:	Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II tahun 2016
Nilai Perjanjian	:	Rp.900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Emisi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
Hak dan Kewajiban	:	Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> A. Perseroan <p>Perseroan memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhannya dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Ekuitas Perseroan , kecuali ; <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan ; 1.2. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Perseroan dikurangi dengan aktiva tidak berwujud.

2. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan .
3. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan .
4. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan , kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwalianan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
5. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali :
 - 5.1. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan . Yang dimaksud kegiatan utama dalam Perjanjian Perwalianan ini adalah:
 - a. Konstruksi;
 - b. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jasa konsultasi;
 - d. Fabrikasi;
 - e. Perdagangan Umum;
 - f. Properti dan realty.
 - 5.2. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - 5.3. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
6. Melakukan transaksi afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan /atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya seimbang dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari Pihak Ketiga yang bukan afiliasi.
7. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan .
8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak yang lain kepada Pengadilan Niaga.

Perseroan berkewajiban untuk :

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke

rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama;

3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menuru ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara -proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;

B. Wali Amanat

Hak Wali Amanat sebagai berikut :

1. Meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
3. Menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Perseroan ;
4. Menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Perseroan , apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
5. Menerima fotokopi bukti penyetoran dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;
2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Perseroan yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;

4. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi

3. Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap 3 tahun 2017 No. 02 tanggal 02 Februari 2017 di yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1) Perseroan.
2) PT Bank Mega Tbk. Sebagai Pihak Wali Amanat.
- Objek Perjanjian : Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III tahun 2017.
- Nilai Perjanjian : Rp.1.657.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp. 747.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah), dengan suku buka 8.50% (delapan koma lima puluh persen) pertahun
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp. 910.000.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah), dengan suku bunga 9.00% (sembilan koma nol nol persen) pertahun.
- Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Emisi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
A. Perseroan
Perseroan memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhannya dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Ekuitas Perseroan , kecuali ;
 - 1.1. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan ;
 - 1.2. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Perseroan dikurangi dengan aktiva tidak berwujud.
 2. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan .
 3. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan .
 4. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan , kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwalianamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
 5. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali :
 - 5.1. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan . Yang dimaksud kegiatan utama dalam Perjanjian Perwalianamanatan ini adalah:
 - a. Konstruksi;
 - b. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jasa konsultasi;

- d. Fabrikasi;
- e. Perdagangan Umum;
- f. Propertu dan realty.
- 5.2. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 5.3. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
- 6. Melakukan transaksi afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan /atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya seimbang dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari Pihak Ketiga yang bukan afiliasi.
- 7. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan .
- 8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak yang lain kepada Pengadilan Niaga.

Perseroan berkewajiban untuk :

- 1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
 - 2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - 3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara -proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - 4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;
- B. Wali Amanat
- Hak Wali Amanat sebagai berikut :
- 1. Meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan

- pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
 3. Menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Perseroan ;
 4. Menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Perseroan , apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
 5. Menerima fotokopi bukti penyetoran dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;
2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Perseroan yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;
4. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi

K. BNI Syariah

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Akad Plafond Qardh (Utang Piutang) No. 4 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir kalinya berdasarkan Addendum II Akad Kafalah Bil Ujroh No. 026/ADD-ADMP/2017 tanggal 31 Maret 2017, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Plafond	:	maksimum sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas Keperluan	:	<i>Revolving</i> <i>Supply Chain Financing dengan menggunakan skim kafalah bil ujroh yang telah dituangkan kedalam Addendum II Akad Kafalah Bil Ujroh No. 026/ADD-ADMP/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad ini.</i>
Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan sejak tanggal akad, yang mana jangka waktu penarikan plafond berlangsung selama 12 (dua belas) bulan sejak akad ini dan jangka waktu pembiayaan maksimal selama 6 (enam) bulan terhitung sejak pencairan pembiayaan.

- Jaminan : Perseroan menyerahkan jaminan berupa:
1. Pemberian jaminan secara kepercayaan (*fiduciaire eigendoms Overdracht*) atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan atau piutang dagang serta klaim yang telah ada dan/atau yang nantinya akan ada atau dimiliki atau diperoleh serta dapat dijalankan oleh Perseroan kepada Pihak Keetiga yaitu terkait Proyek Pelebaran Jalan Rantepao-Palopo dan Proyek Jalan Tol Balikpapan Samarinda.
 2. Daftar Piutang Proyek Perseroan yang dijaminan tanggal 7 Oktober 2016 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2016 senilai Rp94.351.850.329,- (sembilan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan Rupiah) dan nantinya akan mencapai jumlah maksimal sebesar Rp415.267.179.000,- (empat ratus lima belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) yang diikat jaminan dengan nilai Rp320.915.328.671,- (tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah) yang mana telah diikat pada Akta Jaminan Fidusia No.5 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengadakan *merger* dengan perusahaan lain
- b. Memindahkan dan/atau menyewakan Perseroan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;
- c. Membayar utang kepada pemegang saham;
- d. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya
- e. Melakukan investasi atau penyertaan;
- f. Menerima pinjaman dan/atau pembiayaan dari pihak lain, kecuali pinjaman dan/atau pembiayaan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya;
- g. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing*;
- h. Membuka kantor cabang atau perwakilan baru atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- i. Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain;
- j. Membubarkan Perseroan atau minta dinyatakan pailit;
- k. Mengubah susunan pengurus direksi dan komisaris;
- l. Mengalihkan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi atau pun akuisisi dengan pihak lain.

Bahwa Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk melakukan permohonan persetujuan terkait atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 dan penyertaan saham kepada WTR sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) kepada PT Bank BNI Syariah sesuai dengan Surat No. 518/WK/DIR/2017 tanggal 12 April 2017.

L. PT BANK MAYBANK INDONESIA

Perseroan memperoleh fasilitas kredit berdasarkan akta akad line fasilitas pembiayaan musyarakah IB No. 13 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Bambang Sularso, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

- | | |
|-----------------|--|
| Plafond | : Rp950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah). |
| Jenis Fasilitas | : pembiayaan musyarakah |
| Keperluan | : membiayai modal kerja |
| Jangka Waktu | : 1 tahun terhitung sejak 20 Oktober 2016 dan berakhir 20 Oktober 2017. |
| Jaminan | : Perseroan menyerahkan jaminan berupa pemberian jaminan fidusia kepada bank atas piutang usaha dengan nilai penjaminan fidusia Rp. 950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 14 tanggal 20 Oktober 2016 Bambang Sularso, S.H., notaris di Jakarta. |

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- a. Menjual, menyewakan, mentransfer, Memindahkan dan/atau kepentingan, menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan nasabah dan atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik nasabah dan atau penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal);
- b. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang,
- c. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham nasabah dan atau penjamin atas pembiayaan/kewajiban yang telah dan/ penjamin kepada nasabah dan atau penjamin, baik jumlah pokok, bunga/bagi hasil/margin, provisi atau biaya lainnya.
- d. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS (kecuali pemegang saham pemerintah Republik Indonesia)
- e. Mengubah struktur pemegang saham pengendali dari nasabah dan atau penjamin.

Nasabah dan atau penjamin wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank :

- a. Setiap tuntutan perkara perdata terhadap nasabah dan atau penjamin yang nilainya minimal 1/3 dari penyertaan dana/modal dari bank
- b. Sesuatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara nasabah dan atau penjamin dengan suatu badan/instansi pemerintah.
- c. Suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau keduanya akan menjadi kejadian kelalaian ke pihak lain.
- d. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham dan atau penjamin,
- e. Melakukan penggabungan usaha dengan badan usaha lain, peleburan usaha, bersama badan usaha lain dan pengambilalihan saham dalam badan usaha lain.
- f. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang dikeluarkan nasabah.
- g. Mengubah struktur permodalan nasabah dan atau penjamin termasuk untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.
- h. Menerima sesuatu pembiayaan/pinjaman uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin hutang orang/pihak lain (kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari).

Bahwa Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan tertulis atas batasan-batasan yang telah ditentukan oleh kreditur, berdasarkan surat No. 516/WK/DIR/2017 tanggal 12 April 2017 terkait akan melaksanakan proses Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017.

M. PT Bank CIMB NIAGA, TBK

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. 021/CB/JKT/2017 tanggal 03 Maret 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	pinjaman transaksi khusus on revolving-fasilitas kredit langsung-uncommitted
Keperluan	:	membiayai modal kerja
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun terhitung sejak 03 Maret 2017 dan berakhir 03 Maret 2018.
Bunga	:	8.50% (delapan koma lima nol persen).
Fasilitas Transaksi Khusus terdiri atas	:	
Bank Garansi (BG)	:	
Limit	:	Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	Penerbitan bid bond, performance bond, advance payment bond, payment bond, maintenance bond,

		custom bond, retention bond dan counter guarantee.
Provisi	:	0,50% P.a. minimum
Jangka waktu	:	1 (satu) tahun terhitung sejak 03 Maret 2017 dan berakhir 03 Maret 2018.

Letter of Credit (L/C)/SKBDN

Limit	:	Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	pembiayaan modal kerja.
Provisi	:	0.125% flat.
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun terhitung sejak 03 Maret 2017 dan berakhir 03 Maret 2018.

Fasilitas Trust Receipt (T/R)

Limit	:	Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
Tujuan Fasilitas	:	untuk pelunasan L/C atau SKBDN.
Suku Bunga	:	Sesuai ketentuan suku bunga <i>Trust Receipt</i> yang berlaku di CIMB NIAGA.
Jangka waktu	:	1 (satu) tahun terhitung sejak 03 Maret 2017 dan berakhir 03 Maret 2018.

Fasilitas Trade Kewajiban Lokal (PTK Trade)

Limit	:	Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tujuan Fasilitas	:	pembelian bahan baku serta kegiatan operasional
Suku Bunga	:	Sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di CIMB NIAGA.
Jangka waktu	:	1 (satu) tahun terhitung sejak 03 Maret 2017 dan berakhir 03 Maret 2018.

Fasilitas Pinjaman Tetap (PT)

Limit	:	Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
Tujuan Fasilitas	:	modal kerja Debitur
Suku Bunga	:	8.50% pertahun
Jangka waktu	:	1 (satu) tahun terhitung sejak 03 Maret 2017 dan berakhir 03 Maret 2018.

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannya hal-hal di bawah ini:

1.
 - a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
 - c. Mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada Pihak Lain;
 - d. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur membayar kepada Pihak lain;
 - e. Memberikan pinjaman kepada Pihak Lain;
2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur seperti namun tidak terbatas pada :
 - a. Mengadakan perubahan atau maksud, tujuan dan kegiatan usaha Debitur;
 - b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
 - d. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

N. PT Bank HSBC Indonesia

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. JAK/000022/U/170324 tanggal 08 Juni 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup antara PT Bank HSBC Indonesia sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Limit Gabungan

Sub limit	:	Rp.650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas limit gabungan
Jangka Waktu	:	28 Februari 2018

2. Fasilitas Impor

Sub limit	:	Rp.650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Impor
Keperluan	:	pembelian barang atau produk impor yang terkait dengan kegiatan usaha inti dari Debitur.
Jangka Waktu	:	28 Februari 2018

Fasilitas Transaksi terdiri atas :

Fasilitas Kredit Berdokumen

Limit	:	Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
TujuanPenggunaan	:	Penerbitan Surat Kredit Berdokumentasi Dalam Negeri (SKBDN)
Komisi	:	0,5% Pertahun
Jangka waktu	:	pada saat dokumen ditunjukkan

Fasilitas Kredit dengan Pembayaran Tertunda

Limit	:	Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
TujuanPenggunaan	:	Penerbitan Surat Kredit Berdokumentasi dengan pembayaran tertunda Dalam Negeri (SKBDN)
Komisi	:	0,5% Pertahun
Jangka waktu	:	28 Februari 2018
Suku Bunga	:	dalam Rupiah : 14% (empat belas koma persen) pertahun Dalam Dollar Amerika Serikat : 12% (dua belas persen)

Fasilitas Kredit Berdokumen Berjangka (UPAS)

Limit	:	Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
TujuanPenggunaan	:	Penerbitan Surat Kredit Berdokumentasi dengan pembayaran tertunda Dalam Negeri (SKBDN)
Komisi	:	0,5% Pertahun
Jangka waktu	:	28 Februari 2018
Suku Bunga	:	dalam Rupiah : 14% (empat belas koma persen) pertahun Dalam Dollar Amerika Serikat : 12% (dua belas persen)

Fasilitas Pinjaman Impor

Limit	:	Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tujuan Fasilitas	:	membayai pembelian luar negeri dan/atau lokal pada fasilitas Kredit Berdokumen/Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda
Komisi	:	0,5% Pertahun
Jangka waktu	:	28 Februari 2018

Suku Bunga : dalam Rupiah : 14% (empat belas koma persen) pertahun
 Dalam Dollar Amerika Serikat : 12% (dua belas persen)

Fasilitas BAIF (Pembiayaan Tagihan Pembeli yang telah disetujui)

Limit : Rp.650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)
 Tujuan Fasilitas : pengadaan barang lokal/pembelian bahan mentah impor diluar fasilitas Kredit Berdokumen
 Komisi : 0,5% Pertahun
 Jangka waktu : 28 Februari 2018
 Suku Bunga : 16% (enam belas persen) pertahun.

Fasilitas Pembiayaan Impor I

Limit : Rp.650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)
 Tujuan Fasilitas : melunasi fasilitas BAIF
 Komisi : 0,5% Pertahun
 Jangka waktu : 28 Februari 2018
 Suku Bunga : dalam Rupiah : 14% (empat belas koma persen) pertahun
 Dalam Dollar Amerika Serikat : 12% (dua belas persen)

Fasilitas Bank Garansi

Limit : Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
 Tujuan Fasilitas : memfasilitasi kebutuhan Debitur atas diterbitkannya Bank Garansi
 Komisi : Lokal : 0,5% (nol koma lima persen) pertahun
 Luar Negeri : 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) pertahun, dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 (satu) Tahun.
 Luar Negeri : 1% (satu) persen pertahun, dengan jangka waktu fasilitas diatas 1 (satu) tahun.
 Jangka Waktu : 28 Februari 2018

Fasilitas Transaksi terdiri atas :

- a. Jaminan Penawaran
 Limit : Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
- b. Jaminan Pembayaran di Depan
 Limit : Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
- c. Jaminan Pelaksanaan
 Limit : Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)
- d. Jaminan Penahanan
 Limit : Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)

Atas fasilitas-fasilitas yan telah diterima oleh Perseroan tersebut diatas sudah diikat dengan hak Jaminan Fidusia atas Piutang senilai Rp. 780.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah).

Pembatasan (*Negative Covenant*):

- a. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannya hal-hal di bawah ini:
 - a. Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti , aktiva atau pendapatan dari Debitur , baik saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari;
 - b. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (i) hutang yang timbul karena berdasarkan pada Perjanjian ini, dan (b) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari;
 - c. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapaun juga kecuali ntuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari.

- b. Debitur diharuskan untuk mempertahankan kepemilikan saham mayoritas Pemerintah Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Debitur.
- c. Debitur harus menatausahakan Rekening operasionalnya pada Bank.

O. PT Bank BNP Paribas Indonesia (BPPI)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Dana Bergulir dari BPPI yang dapat digunakan untuk Modal Kerja sesuai dengan Surat Referensi LC/RM-189/LA/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Plafond Kredit	:	Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Jenis Kredit	:	Pinjaman Bergulir
Sifat Kredit	:	Revolving dengan Proyek yang berbeda
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	31 Januari 2018.
Suku Bunga Kredit	:	1,20% (satu koma dua puluh persen) pertahun diatas cost of fund
Agunan	:	Cover Note atas Akta Fidusia yang dibuat oleh Linda Herawati, SH, Notaris Kota Jakarta Pusat tanggal 05 Juni 2017 atas tagihan dengan jumlah seluruhnya 100% (seratus persen) dari jumlah fasilitas. Yang mana sampai dengan saat ini akta fidusia masih dalam pengurusan.
Pembatasan (<i>Negative Covenant</i>)	:	tidak terdapat pembatasan

8.4.5. Perjanjian-perjanjian Pembiayaan antara Perseroan dengan Lembaga Keuangan Non Bank

1. Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir No. 1 tanggal 1 November 2016 yang dibuat dihadapan Muhammad Kholid Artha S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Plafond	:	Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas pinjaman bergulir
Keperluan	:	untuk pelaksanaan proyek Perseroan
Jangka Waktu	:	1 tahun berlaku sampai dengan tanggal 1 November 2017.
Suku Bunga	:	8,55% (delapan koma lima lima persen)
Agunan	:	fidusia atas tagihan piutang yang dikategorikan lancar dan belum jatuh tempo dan umurnya tidak boleh melebihi 12 bulan sehubungan dengan proyek proyek debitur yang dibiayai oleh kreditur, dengan nilai penjaminan minimal 110% dari total fasilitas.

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada IIF, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IIF, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan merger, akuisisi, restrukturisasi dan reorganisasi
- b. Perubahan kegiatan usaha
- c. Transaksi dengan pihak terkait, setiap transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan prinsip arms length dan senantiasa menjaga margin untuk transaksi tersebut pada tingkat yang serupa dengan pihak pihak lain dalam industri bersangkutan dan memastikan bahwa margin tersebut ditentukan berdasarkan praktek bisnis pada umumnya.
- d. Subordinasi atas pinjaman dari pemegang saham dan pihak terkait.

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada IIF, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan penerimaan fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya (baik untuk investasi atau modal kerja) atau fasilitas leasing berupa apapun juga dari pihak lain yang dapat mempengaruhi/melanggar batas rasio keuangan.

Bahwa Perseroan telah melakukan pemberitahuan tertulis atas batasan-batasan dalam perjanjian pembiayaan yang telah diterima dari PT Indonesia Infrastructure Finance terkait penerimaan fasilitas pinjaman berupa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Waskita Karya III Tahap I Tahun 2017, berdasarkan surat No. 517/WK/DIR/2017 tanggal 12 April 2017.

2. Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (“SMI”) berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan No. 18 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Plafond	: Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
Jenis Fasilitas	: Fasilitas Pembiayaan.
Keperluan	: untuk pelaksanaan pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Tol yang dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Debitur atau Anak Usaha Debitur berdasarkan PPJT dan/atau addendum PPJT.
Jangka Waktu	: 1 tahun berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2018.
Agunan	: fidusia dengan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 19 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani,S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang mana nilai objek atas fidusia tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.008.512.646.377 (dua triliun delapan milyar lima ratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah).

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada SMI, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMI, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan merger, akuisisi, penyertaan, atau pembelian saham perusahaan yang dapat menghambat kewajiban pembayaran Fasilitas Pembiayaan Kreditur.
- Mengadakan Perjanjian Kredit/pembiayaan atau perjanjian apapun yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur kepada pihak ketiga untuk membiayai porsi dana talangan tanah yang dibiayai oleh Kreditur.
- Melakukan penjualan atau pemindahtangan atau melepaskan hak atas sebagian atau seluruh hak atas harta kekayaan Debitur selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut kebijakan Pemerintah.
- Melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum kewajiban kepada kreditur lunas.
- Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Debitur dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayar hutang.
- Menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan Debitur yang sudah diserahkan sebagai Jaminan kepada Pihak Lain.
- Menjual dan memindatangkan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh kekayaan Debitur yang sudah diserahkan sebagai Jaminan kepada pihak lain.
- Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur atas Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Lain.
- Melakukan pengikatan dengan pihak ketiga yang akan berdampak terhadap terhambatnya pemenuhan kewajiban Debitur kepada Kreditur.
- Mengadakan perubahan nama, bentuk dan status hukum, serta sifat dan kegiatan usaha Debitur seperti yang sedang dilaksanakan saat ini.

8.5. ASET-ASET YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI PERSEROAN

Tanah

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki beberapa bidang tanah dengan sah, sebagai berikut:

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M2)	Berakhinya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi	Pemanfaatan atas Aset
1.	SHGB No. 724, tanggal 29 Maret 1988	2.098	1 Desember 2027	Perseroan	Jl. Jend. MT Haryono No. 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7602/1982 tanggal 7 Oktober 1982	Kantor Pusat

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M2)	Berakhinya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi	Pemanfaatan atas Aset
2.	SHGB No.592 tanggal 30 Mei 2009	3.155	11 Mei 2026	Perseroan	Ciputat, Kab. Tangerang Banten sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7/Ciputat/2006 tanggal 12 Mei 2006	Gudang
3.	SHGB No. 2001 tanggal 1 Juni 2006	5.798	1 Juni 2036	Perseroan	Desa Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kabupaten Banda Aceh sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 09/2006 tanggal 30 Mei 2006	Kantor Cabang
4.	SHGB No. 655, tanggal 27 Mei 2003	1.535	8 Mei 2033	Perseroan	Desa Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 168/Braga/2003 Tgl. 24 April 2003.	Kantor Cabang
5.	SHGB No. 1, Tanggal 7 Januari 1992	4.040	28 Desember 2020	Perseroan	Desa Cilenyi Weta, Kec. Ujungberung, Kab. Bandung, Jawa Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 10170/1990 tanggal 19 Oktober 1990	Kantor Cabang
6.	SHGB No. 82, Tanggal 20 Oktober 1988	2.013	13 April 2028	Perseroan	Desa Kalirungkut, Kec. Rundut, Kota Surabaya Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2856 tanggal 20 Juni 1988	Gudang
7.	SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006	1.404	23 November 2026	Perseroan	Desa Jemur Wonosari, Kec. Wonosobo, Kota Surabaya Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 738/Jemur Wonosari/2006 tanggal 11 September 2006	Kantor Cabang
8.	SHGB No. 9, Tanggal 27 Maret 2002	10.909	26 Maret 2022	Perseroan	Desa kwala Tanjung, Kec. Sei Suke Kab. Asahan, Sumatera Utara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 05/Kwala Tanjung/2001 tanggal 23 Oktober 2001	Tanah Kosong
9.	SHGB No. 7, tanggal 18 Februari 1993	806	7 Februari 2033	Perseroan	Desa Belakan Olo, Kec. Padang Barat, Kotamadya Padang, Sumatera Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.102 tanggal 28 April 1992	Kantor Cabang
10.	SHGB No. 4, Tanggal 10 November 1988	2.511	10 November 2018	Perseroan	Desa Batung Tebal, Kec. Lubuk Begalung, Kab.Padang Pariaman, Sumatera Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 212 tanggal 22 Januari 1980	Gudang
11.	SHGB No. 302, tanggal 6 Februari 1999	1.385	6 Februari 2019	Perseroan	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 15/Rintis/1998 tanggal 3 Desember 1998	Kantor Cabang
12.	SHGB No. 303, Tanggal 6 Februari 1999	1.410	6 Februari 2019	Perseroan	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No . 16/Rintis/1998 tanggal 3 Desember 1998	Kantor Cabang
13.	SHGB No. 304, Tanggal 6 Februari 1999	1.295	6 Februari 2019	Perseroan	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 17/Rintis/1998 tanggal 3 Desember 1998	Kantor Cabang
14.	SHGB No.162, Tanggal 7 Oktober 1999	6.980	7 Oktober 2019	Perseroan	Desa Sungai Selincah, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 79/s.selincah/1999 tanggal 20 September 1999	Tanah Kosong

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M2)	Berakhinya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi	Pemanfaatan atas Aset
15.	SHGB No. 01, tanggal 13 November 1987	1.095	13 Oktober 2027	Perseroan	Desa tanjung Baru, kec. Sukarame, Kab. Bandar Lampung, Lampung sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2019/1987 tanggal 16 September 1987	Kantor Cabang
16.	SHGB No. 02, tanggal 16 Desember 2004	77.109	15 Desember 2034	Perseroan	Desa Sungai Lais, Kec. Kalidoni, Kota Palembang Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 01/sungai lais/2004 tanggal 16 Desember 2004	Bangunan
17.	SHGB No. 436, tanggal 1 Maret 1988	1.004	19 Juni 2032	Perseroan	Desa Sei raya, Kec. Sei Raya, Kab. Pontianak, Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7735/1986 tanggal 16 September 1986	Kantor Cabang
18.	SHGB No. 60, tanggal 14 Juni 1995	390	17 Mei 2015	Perseroan	Desa Kuripan, Kec. Banjar Timur, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.1249/1994 tanggal 8 Agustus 1994	Kantor Cabang
19.	SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007	1.250	26 Januari 2027	Perseroan	Desa Sumertra, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00224/Sumertra/2006 tanggal 7 Desember 2006	Kantor Cabang
20.	SHGB No. 2, tanggal 24 Mei 1997	600	24 Mei 2027	Perseroan	Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung Bali, sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2341/1997 tanggal 12 Mei 1997	Tanah
21.	SHGB No. 3, Tanggal 13 Desember 1989	1.200	13 Desember 2019	Perseroan	Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung Bali, sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 10327/1989 tanggal 30 Nopember 1989	Bangunan
22.	SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003	1.332	20 April 2022	Perseroan	Desa Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 820/AMS/2003	Kantor Cabang
23.	SHGB No. 69, 20 Februari 1998	1.495	24 September 2027	Perseroan	Desa Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 387/1976 tanggal 18 Oktober 1976	Kantor Cabang
24.	SHGB No. 2, tanggal 25 Juni 1997	1.000	07 Oktober 2036	Perseroan	Desa Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 270/1996 tanggal 3 Februari 1996	Kantor Cabang
25.	SHGB No. 24, Tanggal 24 Oktober 1997	595	07 Oktober 2036	Perseroan	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 1100/1996 tanggal 7 Mei 1996	Tanah
26.	SHGB No. 13, Tanggal 22 Juli 1993	4.830	22 Juli 2023	Perseroan	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 813/1987 tanggal 23 Desember 1987	Gudang
27.	SHGB No. 14, Tanggal 22 Juli 1993	4.800	22 Juli 2023	Perseroan	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 806/1987 tanggal 2 Desember 1987	Bangunan

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M2)	Berakhinya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi	Pemanfaatan atas Aset
28.	SHGB No. 482, tanggal 17 Maret 1998	3.053	17 Maret 2028	Perseroan	Desa Negeri Lama, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Maluku sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.119/1997 tanggal 5 Februari 1997	Kantor Cabang
29.	SHGB No. 541, Tanggal 27 Agustus 1992	2.000	27 Agustus 2017*	Perseroan	Desa Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2727 tanggal 13 Oktober 1980	Kantor Cabang
30.	SHGB No. 24, tanggal 11 Juni 1993	276	25 Mei 2033	Perseroan	Desa Tikala Ares, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 260/1993 tanggal 6 Maret 1993	Kantor Cabang
31.	SHGB No. 337, tanggal 15 April 1998	2.508	15 April 2028	Perseroan	Desa Lepo-Lepo, Kec. Mandenga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.806/1994 tanggal 7 Juli 1994	Kantor Cabang
32.	SHGB No.548, tanggal 17 Januari 2007	1.881	17 Januari 2027	Perseroan	Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.01/Lalang/ 2007	Kantor Cabang
33.	SHGB No. 21150, tanggal 31 Januari 1990	165	31 Januari 2020	Perseroan	Desa Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kot Ujung Pandang, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2728 tanggal 13 Oktober 1989	Kantor Cabang
34.	SHGB No. 2047, tanggal 31 Juli 2015	1.661	9 juli 2035	Perseroan	Desa Rappocini, Kec. Tamalate, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 0058/2001 tanggal 29 September 2014	Tanah
35.	SHGB No. 20403, Tanggal 11 Desember 2014	168	2 Desember 2034	Perseroan	Desa Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur No. 01557/2012 tanggal 11 September 2012	Kantor Cabang

Keterangan:

*) Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas tanah SHGB No.541, Tanggal 27 Agustus 1992 atas tanah yang terletak di Desa Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan yang telah berakhir sejak tanggal 27 Agustus 2017, berdasarkan Surat Pernyataan Emiten tanggal 20 September 2017 sedang dilakukan proses perpanjangan.

Perseroan menguasai secara sah atas tanah-tanah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

No.	Bukti Penguasaan	Luas (m ²)	Lokasi	Status Tanah
1.	Akta Jual Beli Tanah No. 263/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	2.137	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.2960/Ex.Kel.Pegadungan
2.	Akta Jual Beli Tanah No. 264/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	3.306	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.964/Ex.Kel.Pegadungan
3.	Akta Jual Beli Tanah No. 265/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	3.303	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.964/Ex.Kel.Pegadungan
4.	Akta Jual Beli Tanah No. 266/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	2.946	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.964/Ex.Kel.Pegadungan

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, berdasarkan Surat Keterangan No. 2/NOT/ZAV/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Zainal Abidin, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat atas tanah-tanah yang terletak di Kalideres, Jakarta Barat yang dikuasai Perseroan tersebut di atas sedang dilakukan pengurusan sertifikatnya dan diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu 6 bulan.

Tanah yang dimiliki WSE adalah sebagai berikut:

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M2)	Berakhinya Hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi
1.	SHGB No. 23, tanggal 31 Maret 2016	14.610	30 Desember 2045	WSE	Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan surat ukur No.00660/LGT/2015 tanggal 3 Agustus 2015
2.	SHGB No. 24, tanggal 06 April 2016	81.300	06 Juli 2045	WSE	Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terdapat dalam surat ukur No.00661/LGT/2015 tanggal 3 Agustus 2015
3.	SHGB No. 25, tanggal 06 April 2016	129.300	06 Juli 2045	Perseroan	Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terdapat dalam surat ukur No.00662/LGT/2015 tanggal 19 Agustus 2015

Tanah yang dikuasai WSE adalah sebagai berikut:

No.	Akta Pengalihan	Nama Pemilik Sebelumnya	Luas Tanah (m ²)	Lokasi Tanah
1.	Pengikatan Silih Rugi No. 73 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Atasril	1.780	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
2.	Pengikatan Silih Rugi No. 5 tanggal 5 November 2014 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Mad Dalip	8.976,8	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
3.	Pengikatan Silih Rugi No. 6 tanggal 5 November 2014 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Amrah Udin	598	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
4.	Pengikatan Silih Rugi No. 28 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	M. Dasrullah	19.099	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
5.	Pengikatan Silih Rugi No. 29 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Same Widodo	2.174	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
6.	Pengikatan Silih Rugi No. 39 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Erdi Putra	5.067,754	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
7.	Pengikatan Silih Rugi No. 40 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Samsuarnis	2.360	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
8.	Pengikatan Silih Rugi No. 69 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Roki Eka Saputra	572	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
9.	Pengikatan Silih Rugi No. 67 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Roslan	1.400	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
10.	Pengikatan Silih Rugi No. 30 tanggal 16 April 2015 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Salman	1.100	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.

No.	Akta Pengalihan	Nama Pemilik Sebelumnya	Luas Tanah (m ²)	Lokasi Tanah
11.	Pengikatan Silih Rugi No. 77 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Atasril	750	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
12.	Pengikatan Silih Rugi No. 77 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Mad Dalip	916	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
13.	Pengikatan Silih Rugi No. 13 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Jamar	2.000	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
14.	Pengikatan Silih Rugi No. 14 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Amrah Udin	431	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
15.	Pengikatan Silih Rugi No. 45 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Kaswiruddin	721	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
16.	Pengikatan Silih Rugi No. 46 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Candrawadi	2.099	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.
17.	Pengikatan Silih Rugi No. 36 tanggal 16 November 2015 yang dibuat di hadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan.	Candrawadi	1.373	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Timur, Jorong Letter W.

Bahwa sampai dengan tanggal Tambahan Informasi in, berdasarkan Surat Keterangan/*Covernote* No. 16/Not/Bn/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat oleh Betrisnawati B, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan, yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses pengurusan pembuatan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama WSE, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan.

Bangunan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki beberapa bangunan, sebagai berikut:

No.	Bangunan	Lokasi	Luas Bangunan (m ²)
1.	Bangunan Gedung Kantor (Kantor Pusat)	Jalan Biru Laut No. 10 RT 009/03 Kelurahan Cipinang Cipedak Jakarta Timur	12.289
2.	Bangunan Gedung Kantor	Jalan Biru Laut No. 10A RT 009/03 Kelurahan Cipinang Cipedak Jakarta Timur	1.170
3.	Bangunan Kantor	Jalan Asia Afrika No. 55 Bandung, Jawa Barat	824
4.	Bangunan Kantor	di Jalan Patriot, Kel. Lalang Kec. Kedan Sunggal, Medan, Sumatera Utara	544
5.	Bangunan Kantor	di Jalan Dr. Sutomo No. 96 Pekanbaru, Riau	319
6.	Bangunan Mess Pegawai	Jalan Dr. Sutomo No. 96 Pekanbaru, Riau	216
7.	Bangunan Kantor	Jl. A. Yani No. 19, Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat	538,54
8.	Bangunan Kantor	Jalan Pangeran Antasari Tanjung Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, Lampung	256
9.	Bangunan	Jalan Imam Bonjol Desa Suka Jaya Kecamatan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat	340
10.	Bangunan Kantor	di Jalan A.P Petta Rani Makassar, Sulawesi Selatan	180
11.	Bangunan Workshop	Jalan Takdir (Jalan Jurusan Transmigrasi), Bulurokeng, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan;	458
12.	Bangunan Kantor	Jalan Mayjend S.Parmen No. 28 Kendari, Sulawesi Tenggara	912
13.	Bangunan Rumah	Jl. Balaikota No. 5 Kecamatan Wenang Manado, Sulawesi Utara	76.214
14.	Bangunan Kantor	Jalan Banteng No. 2, Denpasar, Bali	216
15.	Bangunan Kantor	Jalan Adi Sucipto Sui Raya No. 1 Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat	320
16.	Bangunan Gudang	Jalan Langko No. 50 Mataram, Nusa Tenggara Barat	225
17.	Bangunan	Jalan Leo Watimena Kecamatan T. Amb. Baguala, Ambon, Maluku	351

No.	Bangunan	Lokasi	Luas Bangunan (m ²)
18.	Bangunan Workshop	Jalan Eltari II RT 0036/RW 011 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	280
19.	Bangunan Kantor	Jalan Jemursari Selatan II/2-2A, Surabaya, Jawa Timur	1.398
20.	Bangunan Kantor	di Jalan Kuripan No. 5, Banjarmasin, Kalimantan Selatan	390
21.	Bangunan Rumah Tinggal	Jl. Timor-Timur No.116, Kupang, Nusa Tenggara Barat	208

Kendaraan Bermotor, Kendaraan Berat, dan Alat-Alat Berat

Kendaraan Bermotor

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh 34 (tiga puluh empat) unit kendaraan bermotor beroda empat.

Kendaraan Berat

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 48 unit kendaraan berat, berupa *dumptruck*.

Alat-alat Berat dan Peralatan-peralatan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 497 unit alat-alat berat dan Peralatan-Peralatan, sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah
1.	Aggregate Plant	1
2.	Alat Ukur	1
3.	Asphalt	31
4.	Bar Bender & Bar Cutter	4
5.	Batching Plant	9
6.	Besi Siku	2
7.	Crane Tadano	1
8.	Compressor	5
9.	Channel Dan Pipa Kotak	10
10.	Cross Brace	7
11.	Bulldozer	13
12.	Excavator	13
13.	Gantry	3
14.	Generator Set	31
15.	Hollow	21
16.	Jack Base	3
17.	Tower Crane	21
18.	Mobil Crane	6
19.	Motor Grader	6
20.	Mesin Spun Pile	1
21.	Non Cetakan	39
22.	Pipa Stell Support	2
23.	Roller	2
24.	Sheefoot Roller	6
25.	Stell	8
26.	Stone Crusher	13
27.	Cone Crusher	3
28.	Jaw Crusher	2
29.	Roller	18
30.	Wheel Loader	21
31.	Bar Bender	4
32.	Batching Plant	7
33.	Boiler	4
34.	Cetakan	49
35.	Concrete	4
36.	Converter	2
37.	Grantry Crane	5
38.	Mobil Concrete Pump	1
39.	Scaffolding	50
40.	Slipform	2
41.	Stressing	4
42.	Theodolt	1
43.	Total Station	1
44.	Truck Mixer	16
45.	Adjustabel Forkhea For Beam B, Cantilever & Vertikal Standar	1
46.	Alat Stressing Dan Cetakan	5
47.	Swr	1

No.	Jenis	Jumlah
48.	Truck Crane	1
49.	Truck Trailer	1
50.	Vertikal Standar	1
51.	Vibratory	4
52.	Agregad Blanding	1
53.	Air Compressor	2
54.	Amp Azp 800	1
55.	Besi Cnp	3
56.	Channel	2
57.	Diafragma	1
58.	Hoisting Winch	1
59.	Jembatan Timbang	2
60.	Joint Pile	1
61.	Kanal	5
62.	Mesin Uji Tekan Beton	1
63.	Trolley	3
64.	Passanger Hoist	1
65.	Pneumatic Compactor	1
66.	Peralatan Proyek Gol I	1
67.	Square Pile	1
68.	Timbangan	2
69.	Water Tangker	1
Total		497

8.6. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan miliknya berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dengan jumlah yang memadai.

No.	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Berlaku Hingga	Jumlah Pertanggungan (Rp ribuan)	Penanggung No Polis
1.	Kebakaran	Bangunan yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 96, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Pekan Baru, Riau	1 Agustus 2018	Rp2.452.470	Asuransi Jasindo/ 412.201.200.17.00011/00 0/000
2.	Gempa Bumi	Bangunan yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 96, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Pekan Baru, Riau	1 Agustus 2018	Rp2.452.470	Asuransi Jasindo/ 412.203.200.17.00002/00 0/000
3.	<i>All-Risk</i>	Beberapa bangunan yang terletak pada beberapa lokasi, dengan perincian sebagai berikut: (1) Gedung Waskita Karya Lt. 7Jl. M.T.Haryono Kav. No.10, Kel.Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur; (2) Jl. Tengku Cik Kuta Karang No. 19, Kel. Kula Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh; (3) Jl.Panyawungan, Blok Pasirtukul Kulon, Kel.CileunyiWetan, Bandung, Jawa Barat; (4) Jl. Jemursari Selatan II/22A, Kel. Jemur Wonosari, Surabaya, Jawa Timur; (5) Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya, Jawa Timur; (6) Jl. Timor- Raya No.116, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kalapa, Kotamadya Kupang, Nusa Tenggara Tmur; (7) Jl. Bumi II, Kel. Oesapa, Kec. Kupang Tengah, Kota Madya Kupang, Nusa Tenggara Timur; (8) Jl. Hayam Wuruk No. 191, Denpasar Timur, Denpasar, Bali; (9) Jl. Langko No. 50, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat; (10) Jl.Balaikota No.22, kel.Tikala Ares, Kec.Wanang, Manado, Sulawesi Utara; (11) Jl. Adi Sucipto RT. 006/03, Kel. Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat; (12) Jl.Pangeran Antasari No.114, Kel.Tanjung Baru, Kec.Sukarane, Kota Bandar	1 Agustus 2018	Rp67.429.710	Asuransi Tri Pakarta / 107010417000074

No.	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Berlaku Hingga	Jumlah Pertanggungan (Rp ribuan)	Penanggung No Polis
		Lampung, Lampung; (13) Jl. Jend. A. Yani No. 19, kampung Jao- Belakang Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang; (14) Jl.Padang By Pass, Kel.Betung Tebal, Kec.Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat			
4.	Gempa Bumi	Gedung Waskita Karya Lt. 7Jl. M.T.Haryono Kav. No.10, Kel.Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur; (2) Jl. Tengku Cik Kuta Karang No. 19, Kel. Kula Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh; (3) Jl.Panyawungan, Blok Pasirtukul Kulon, Kel.CileunyiWetan, Bandung, Jawa Barat; (4) Jl. Jemursari Selatan II/22A, Kel. Jemur Wonosari, Surabaya, Jawa Timur; (5) Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya, Jawa Timur; (6) Jl. Timor- Raya No.116, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kalapa, Kotamadya Kupang, Nusa Tenggara Tmur; (7) Jl. Bumi II, Kel. Oesapa, Kec. Kupang Tengah, Kota Madya Kupang, Nusa Tenggara Timur; (8) Jl. Hayam Wuruk No. 191, Denpasar Timur, Denpasar, Bali; (9) Jl. Langko No. 50, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat; (10) Jl.Balaikota No.22, kel.Tikala Ares, Kec.Wanang, Manado, Sulawesi Utara; (11) Jl. Adi Sucipto RT. 006/03, Kel. Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat; (12) Jl.Pangeran Antasari No.114, Kel.Tanjung Baru, Kec.Sukarane, Kota Bandar Lampung, Lampung; (13) Jl. Jend. A. Yani No. 19, kampung Jao- Belakang Olo, Kec. Padang Barat, Kota Padang; (14) Jl.Padang By Pass, Kel.Betung Tebal, Kec.Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat	1 Agustus 2018	Rp67.429.710	Asuransi Tri Pakarta / 10701021700039

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan – perusahaan asuransi tersebut diatas dan manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang bersangkutan.

8.5. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”)

Dalam setiap pelaksanaan proyek, Perseroan senantiasa memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Perseroan juga melaksanakan audit terhadap setiap proyek yang dikerjakan guna memastikan pelaksanaan setiap proyek telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit dilakukan secara rutin baik oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal. Wujud komitmen pelaksanaan proyek jasa konstruksi yang ramah terhadap lingkungan diselenggarakan antara lain:

1. Perseroan telah memenuhi kewajiban pembuatan dokumen lingkungan (AMDAL, Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)) sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Perseroan telah membuat Laporan Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan pemantauan Lingkungan (RPL) yang dilaporkan secara perodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup (BLH). Komponen yang dikelola dan dipantau sebagai berikut;
 - Kualitas udara dan kebisingan;
 - Kualitas air bersih dan air permukaan;
 - Limbah padat/sampah;

- Pengelolaan kesehatan masyarakat
 - Pengelolaan sosial ekonomi
3. Perseroan memiliki izin untuk menyimpan secara sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan melalui keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62/2010 Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3).
 4. Aktivitas penghijauan dan penanaman pohon.

Pemulihan dan Perlindungan Lingkungan

Perseroan dalam melaksanakan proyek-proyeknya selalu mengacu pada Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004, sehingga polusi yang dihasilkan proyek selalu masih berada dalam batas aman atau dibawah NAB (Nilai Ambang Batas) yang diijinkan. Kepatuhan terhadap pelaksanaan manajemen lingkungan ini juga dipakai dalam penilaian karya pegawai yang tertuang dalam salah satu item KPI (*Key Performance Indicator*).

Sejak tahun 2012, Perseroan juga telah menjadi anggota dari GBCI (*Green Building Council Indonesia*), sehingga diharapkan pelaksanaan proyek yang berwawasan hijau terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaksanaan proyek berwawasan hijau ini (*Go Green Construction*), disamping mengacu pada Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 juga memperhatikan AMDAL yang dibuat oleh pemberi kerja sebelum proyek dilaksanakan. Segala hal yang dituangkan dalam AMDAL untuk melestarikan lingkungan hidup dilaksanakan sepenuhnya oleh semua proyek dan diawasi oleh pengawas pekerjaan dan pemberi kerja (*Owner*).

Perseroan melakukan konservasi lingkungan hidup terhadap lahan tandus sejalan dengan semangat Pemerintah untuk mendukung Gerakan Penanaman Pohon. Pelaksanaan kegiatan penanaman pohon dapat meningkatkan kualitas lingkungan, menambah daerah resapan air, serta membuka ruang hijau baru.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Perseroan sudah memiliki sistem yang mengatur mengenai penanganan dan penyelesaian terhadap masalah, tidak terkecuali masalah yang terkait dengan lingkungan. Setiap pengaduan masalah lingkungan yang masuk akan dicatat dalam form register komunikasi, konsultasi, dan partisipasi untuk kemudian dipelajari dan dianalisis untuk mengetahui akar penyebabnya serta memutuskan tindak lanjut (program aksi) untuk tindak lanjutnya.

Pelaksanaan dari tindak lanjut dapat dilakukan di tingkat Proyek sendiri, Proyek dengan bantuan Unit Bisnis, atau Proyek dengan bantuan Unit Bisnis dan Kantor Pusat. Begitu juga dengan pemantauan hasil pelaksanaan tindak lanjut dan evaluasinya, dapat dilakukan mulai dari tingkat proyek sampai dengan tingkat Kantor Pusat.

8.6. PENGURUS DAN PENGAWAS

Susunan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No. 127 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0123583 tanggal 03 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043588.AH.01.Tahun 2017 tanggal 03 April 2017, susunan manajemen Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Badrodin Haiti
Komisaris Independen	: Muhammad Aqil Irham
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris	: Arif Baharudin
Komisaris	: Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris	: Raden Agus Sartono

Direksi

Direktur Utama	: M. Choliq
Direktur Independen	: Tunggul Rajagukguk
Direktur	: Agus Sugiono
Direktur	: Adi Wibowo
Direktur	: Nyoman Wirya Adnyana
Direktur	: Bambang Rianto

Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN. Sesuai Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan, Perseroan memiliki direksi tidak terafiliasi yang diangkat sesuai dengan Akta No.57 tanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dibawah No.AHU-54929.AH.01.02.Tahun 2012. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Penunjukkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/ 2014. Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah masing-masing 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Badrodin Haiti
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 58 Tahun, Lahir di Jember, 24 Juli 1958.

Menyelesaikan Pendidikan Lemhanas Republik Indonesia Tahun 2003, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM) tahun 1998, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1989, dan Akademi Kepolisian tahun 1982.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada tahun 2021. Sebelumnya menjabat sebagai Kapolri RI (2015 - 2016), Wakapolri (2014 – 2015), Kabaharkam Polri (2013 – 2014), Asisten Operasi Kapolri (2011 – 2013), Koorsahli Kapolri (2011), Kapolda Jatim (2010 – 2011), Kadivkum Polri (2010), Kapolda Sumatera Utara (2009 – 2010), Direktur I / Kamtranas Bareskrim Polri (2007 – 2008), Kapolda Sulawesi Tengah (2006 – 2008), Seslemdiklat Polri (2005 – 2006), Kapolda Bante (2004 – 2005), Kapolwiltabes Semarang (2003 – 2004), Dir Reskrim Polda Jatim (2003), Kapoltabes Medan (2000 – 2003), Kapolres Probolinggo (2000), Kapolresta Surabaya Timur (1998 – 2000), Wakapolres Metro Jaktim Polda Metrojaya (1995 – 1996), Kasat Reskrim Polres Metro Jakbar – Polda Metrojaya (1994 – 1995), Kapolsek Metro Sawah Besar – Polres Metro Jakpus (1993 – 1994), Kasat Reskrim Polres Bekasi – Polda Metrojaya (1990 – 1992), dan Kapolsek Pancoran Mas Depok – Polda Metrojaya (1983 – 1984).



Arif Baharudin
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun, Lahir di Pogalan/Trenggalek, 21 Maret 1967.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1991. Master of Business Administration dibidang keuangan dari Daniels College of Business, University of Denver, Colorado, USA pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada tahun 2021. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) (2013-sekarang), Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia *Infrastructure Fund*, Jakarta (2010–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Anggota *Board of Directors International Rubber Consortium Limited* (IRCo) Bangkok (2010-2012), Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2011 – 2013), Komisaris PT Kaltim Industrial Estate (2009-2012), Direktur Barang Milik Negara II, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (2009-2011), Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan (2008-2009); Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan (2006-2008).



Muhammad Aqil Irham

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 47 Tahun, Lahir di Kotabumi, 11 Desember 1969.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Aqidah dan Filsafat dari Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung pada tahun 1992, Magister bidang Sosiologi dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada tahun 2010 dan Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada tahun 2020. Saat ini menjabat sebagai Dosen Mata Kuliah Sosiologi Politik Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2007-sekarang), Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan & Manajemen Pengembangan Komunitas di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2001-sekarang), Lektor Kepala (IV/b) Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2014), Komisaris PT. Hotel Indonesia Natour (2013-2015), Lektor Kepala Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2009), Dosen Mata Kuliah Agama & Politik di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2008-2009), Pembantu Dekan III Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2003-2007), Lektor Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2003), Sekretaris Jurusan Sosiologi dan Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2001-2013), Lektor Muda Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2001), Asisten Ahli Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1999), Dosen Mata Kuliah Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1997-1998), Asisten Ahli Madya Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1997), Staf Sub Bagian Umum Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1996), Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung (1995-2000), Staf Balai Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung (1994), Sekretaris Pribadi Pembantu Rektor I, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung (1994).



Danis Hidayat Sumadilaga

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 Tahun, Lahir di Jakarta, 28 Oktober 1960.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1985, Magister bidang *Transportation and Highway Engineering* dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada tahun 2020. Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan (2014-sekarang), Kepala Pusat Komunikasi Publik (2013-2014), Kepala Pusat Pengolahan Data (2010-2013), Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga (2007-2010), Kepala Subdit Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Kota Metropolitan Ditjen Bina Marga (2005-2007), Kepala Subdit Penganggaran dan KLN Ditjen Bina Teknik Ditjen Prasarana Wilayah (2001-2005), Analis Kebijakan Pada Asisten Deputi Urusan Jalan (1999-2001), Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan Layang dan Jembatan Pasteur Cikapayang – Surapati (1998-1999), Pemimpin Bagian Proyek Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Perkotaan Ditjen Bina Marga (1993-1998), Pengawas Teknik Bagian Proyek Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Kota (1992-1993), Project Officer Project Management Unit-RCUTP (1991-1992), Kasubsi Pengolahan Data Subdit Wilayah Timur (1991-1991), Pengawas Lapangan Proyek Ps.Minggu-Depok (1987-1988), Asisten Project Officer Project Management Unit-RCUTP (1985-1987), Staf Direktorat Pembinaan Jalan Kota (1985).



Viktor S. Sirait
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 42 Tahun, Lahir di Porsea-Toba Samosir, 17 Oktober 1974.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada tahun 2020. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mitra Taruli Perkasa (2012-sekarang), Direktur Utama PT Hexindo Multi Utama (2011-sekarang), Project Manager PT Pharma Kasih Sentosa (2008-2010), Project Manager PT Maevi Citra Mandiri (2004-2008), Koordinator Project PT Prakarsa Enviro Indonesia (2002-2004), Staff Eksekutif Nasional WALHI (2000-2002).



Raden Agus Sartono
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 55 Tahun, Lahir di Purworejo, 30 Oktober 1961.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1987. Magister bidang *Master of Business Administration* dari North Carolina, Amerika Serikat pada tahun 1993. Doktor bidang *Social Science and Economic* dari Innsbruck University, Austria pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada tahun 2020. Saat ini menjabat sebagai Deputi Menko Bidang Pendidikan, Agama, Pendidikan Tinggi dan Ristek, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014-sekarang), Komisaris Utama PT Barata Indonesia (Persero) (2013-sekarang), Anggota Komite Audit, Universitas Gadjah Mada (2013-sekarang), Profesor Keuangan: Capital Asset Pricing, Dividend Policy, & Financing Decision & Derivatives, Fakultas Bisnis & Pemerintah, University of Canberra, Australia (2008-sekarang), Deputi Menko Bidang Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2010-2014), Ketua Forum Education for All (EFA), Republik Indonesia (2010-2014), Dosen International Financial Management Program Master of Business Administration, Universitas Gadjah Mada (2010-2012), Dosen Financial Management Program Sarjanan dan Master of Business Administration, Universitas Gadjah Mada (2010-2012), Member of the South East Asia Minister of Education Organisation (SEAMEO) (2010-2010), Co-chair of Steering Committee of International Tas Force on Teachers for EFA, UNESCO (2009-2011), Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2010), Pejabat Senior & Focal Point South East Asia Minister of Education Organisation (SEAMEO), Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2008-2010), Profesor Keuangan, Fakultas Bisnis & Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (2008-2010), Kepala Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2008-2009), Pendidikan & Kebudayaan Atase di Kedutaan Republik Indonesia, Canberra, Australia (2007-2008), Ketua Asosiasi Alumni Universitas Gadjah Mada, Cabang Canberra, Australia (2007-2008), Koordinator Proyek Pelatihan Analisis Kredit, Kerjasama antara Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada & PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (2006), Anggota Komite Investasi Reksa Dana Gadjah Mada, Kerjasama antara Manajemen Aset Niaga PT. Bank Niaga, Tbk & Universitas Gadjah Mada (2005-2006), Sekretaris Eksekutif dan Asisten Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi dan Keuangan, Universitas Gadjah Mada (2004-2006), Dosen Advance Financial Management di Program Master Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2004-2006), Dosen Financial Management & International Finance di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (2004-2006), Dosen International Finance di Institusi Keuangan Leopold-Franzens University of Innsbruck, Austria (2003-2004), Direktur Eksekutif Small & Medium Enterprises Development Centre (SMEDC), Universitas Gadjah Mada (2000-2001), Sekretaris Proyek Quality for Undergraduate Education (QUE), Program Studi di Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Disponsori oleh The World Bank (1997-2001), Dosen Advance Financial Management di Program Master Manajemen Universitas Gadjah Mada (1995-2001), Dosen Investment & Portfolio Theory di Program Internasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (1999-2000), Dosen Investment & Portfolio Theory, Derivatives Instrument di Program Master Science Universitas Gadjah Mada (1998-2001), Dosen International Financial Management di Program

Master Manajemen & Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1995-2000), Sekretaris Inter University Centre (IUC) Studi Ekonomi di Program Master Manajemen Universitas Gadjah Mada (1998-1999).

Direksi



M. Choliq
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 64 Tahun, lahir di Gresik, 12 Desember 1952.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya pada tahun 1979. Magister Manajemen jurusan Manajemen Internasional dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, Jakarta pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2008 dengan masa jabatan yang akan berakhir pada 2018. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2001-2006), Ketua Tim Pelaksana Privatisasi PT Adhi Karya (Persero) (2003-2004), Kepala Divisi Keuangan Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1999-2001), Manajer Treasuri Divisi PTI&T Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1998-1999), Staf Penerbitan Obligasi II Merangkap Analisis Keuangan Divisi (1998-1999), Spesialis Bidang Investasi Pada Divisi POPU & Divisi P2U PT Adhi Karya (Persero) (1997-1998), Manajer Pengembangan Sistem Pada Divisi PTI&T PT Adhi Karya (Persero) (1997-1998), Kepala Divisi PTI&T Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1997-1998), Manajer Pengembangan Sistem Informasi Divisi SIM & T.K.Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1996-1997), Kepala Divisi Sistem Informasi Manajemen & Treasuri PT Adhi Karya (Persero) (1996-1997), Kepala Biro Sistem Informasi Manajemen Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1995-1996), Kepala Bagian Jasa Konstruksi Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1994-1995), Kepala Bagian Manajemen Informasi Sistem Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1993-1995), Kepala Bagian Pengendalian Jasa Konstruksi PT Adhi Karya (Persero) (1991-1995), Kepala Biro Pengendalian PT Adhi Karya (Persero) (1991-1995), Wakil Kepala Biro RPP PT Adhi Karya (Persero) (1989-1991), Staff Biro Engineering PT Adhi Karya (Persero) (1987-1989), Bagian Teknik Unit usaha VIII Kalimantan Barat PT Adhi Karya (Persero) (1982-1986), Re Proyek Jalan AWCAS D.I. Ketapang PT Adhi Karya (Persero) (1981-1982), Kepala Proyek Jembatan Penghubung Stasiun PT Adhi Karya (Persero) (1980-1981), Re Proyek Jembatan Sungai Landak PT Adhi Karya (Persero) (1980-1981), Kepala Proyek PTPT Air Putih PT Adhi Karya (Persero) (1979-1980), Re Proyek Instalasi Pipa P.A.B PT Adhi Karya (Persero) (1979-1980), Re Proyek Jembatan JAM SU KIAU PT Adhi Karya (Persero) (1979-1980).



Tunggul Rajagukguk
Direktur Keuangan (Independen)

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun, lahir di Pematang Siantar, 28 Agustus 1962.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada tahun 1988. Magister Manajemen jurusan Keuangan dan Perbankan dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 2011 dengan masa jabatan yang akan berakhir pada tahun 2021. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2009-2011), Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama; menangani Manajemen Risiko dan *Trade Finance* (2008-2009), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan jabatan terakhir *Senior Vice President*, Kepala Bagian Manajemen Kredit dan Properti, Sistem Prosedur dan Kepatuhan (2004-2007), BPPN dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President*, Kepala Divisi Verifikasi Data dan Konsolidasi, Sistem Prosedur dan Kepatuhan, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2004), Bank Pesona Kriadana (BBKU) dengan jabatan terakhir sebagai Kuasa Tim Pengelola Sementara, Kantor Pusat Operasional (1998-1999), Bank Utama dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*, Kepala Sub Divisi Pengembangan Kredit, Divisi Pengembangan Usaha (1989-1998).



Agus Sugiono
Direktur Pengembangan & SDM

Warga Negara Indonesia, 56 Tahun, lahir di Cirebon, 15 Oktober 1960.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1986. Magister bidang Manajemen dari Prasetya Mulia *Business School*, Jakarta pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Direktur Pengembangan & Sumber Daya Manusia Perseroan sejak tahun 2013 dengan masa jabatan yang akan berakhir pada tahun 2018. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi III Perseroan (2013-2014), Kepala Departemen Produksi Kantor Pusat (2010-2013), Kepala Departemen Pemasaran Kantor Pusat (2004-2009), Deputy of General Manager Region II Jakarta dan Kalimantan (2002-2004), Kepala Cabang Sumatera Barat-Jambi Regional II (1998-2001), Kepala Bagian Pemasaran di Kantor Cabang I Medan (1995-1998), Quality Assurance Manager di Kantor Cabang I Medan (1995-1998), Kepala Proyek Sub Station and 150 KVA Transmission PLN Percut KIM di Kantor Cabang I Medan (1994-1995), Kepala Proyek Krueng Aceh Irigasi Paket 2 di Unit Aceh Cabang I (1993-1995), Kepala Proyek di Krueng Aceh Paket E-2 Flood Control Unit Aceh Cabang I (1992-1993), Kepala Proyek Irigasi Arakudo ICB-3 Medan (1990-1992), Kepala Proyek Irigasi Namu Simura-mura Medan (1988-1990), Staf Teknik di Proyek Irigasi Simalungun Kantor Cabang Medan (1987-1988). Staf Teknik Bah Bolon Flood Control di Cabang Medan (1987), Staf Teknik di Kantor Cabang Medan (1987).



Adi Wibowo
Direktur Operasi I

Warga Negara Indonesia, 57 Tahun, lahir di Yogyakarta, 4 April 1959.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Direktur Operasi I Perseroan sejak tahun 2012 dengan masa jabatan yang akan berakhir pada tahun 2022. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi I Perseroan (2012 – 2016), Kepala Divisi I Kantor Divisi I (2008-2012), Wakil Kepala Divisi I Kantor Divisi Gedung (2007-2008), Kepala Bagian Pengendalian III Kantor Divisi I (2004-2007), Kepala Bagian Perintisan II Kantor Pusat Biro PPH (2002-2004), Kepala Bagian Perintisan III Kantor Pusat Biro PPH (2002), Kepala Bagian Pemasaran Kantor Wilayah V (2001-2002), Kepala Bagian Pemasaran Kantor Wilayah III (1998-2001), Kepala Proyek - Proyek Menara Proteksi (1997-1998), Kepala Proyek - Proyek Puri Ratna Sahid Jakarta (1996-1997), Kepala Proyek - Proyek Bored Pile, Diaphragm Wall & Steel Manara (1995-1996), Kepala Proyek - Proyek BDN Center Jakarta (1995), Kepala Proyek - Proyek Westwood Tower & Apartemen Kedoya Jakarta (1995), Pelaksana Utama Proyek Gedung A, B dan Podium pada RIKOPERBI tahap I Jakarta (1992-1995), Kepala Seksi Teknik Adkon Proyek Shangri-La Hotel (1991-1992), Kepala Seksi Teknik Adkon Proyek Pelabuhan Tanjung Priok (1990-1991), Pelaksana Muda Proyek Gedung Instalasi Radio Metalurgi (RMI) (1989-1990), Pelaksana Muda Proyek JIA Tahap II (Tipe A) (1988-1989), Staf Teknik Proyek JIA Tahap II (Tipe A) (1988).

8.7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE – GCG)

Perseroan merupakan badan usaha milik negara yang menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam bidang industri konstruksi. Dalam kegiatan sehari-hari, kebijakan itu dijalankan sesuai dengan budaya Perseroan yang disingkat IPTEEx (*Integrity, Professionalism, Teamwork, Excellence*) dan Prinsip *Good Corporate Governance* yang disingkat TARIF (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness*).

Proses bisnis Perseroan ditentukan oleh pegawai berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi, serta sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri. Di dalam proses bisnis ini para pegawai bekerja secara profesional dan telah digariskan oleh organ perusahaan, yaitu RUPS, komisaris, Komite, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

Tata kelola perusahaan atau GCG diterapkan Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Dan Permen 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Permen PER-01/MBU/2011. Prosedur di bidang tata kelola perusahaan dan prosedur di bidang etika dan perilaku (*code of*

conduct) telah diterbitkan Perseroan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh Komisaris, Direksi dan pegawai Perseroan memiliki persepsi yang sama dalam menerapkan GCG di seluruh aspek operasional Perseroan. Selain itu dibuat berbagai kebijakan dan standar etika untuk Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing. Komitmen untuk mengikuti dan mematuhi kebijakan dan standar etika yang tercantum dalam kedua prosedur tersebut dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh seluruh pegawai. Dewan Komisaris mendorong terciptanya etika perilaku di Perseroan, memperjuangkan kepentingan Perseroan, mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi perihal kebijakan dan pengurusan perusahaan, memantau efektifitas penerapan dan menetapkan ukuran untuk penilaian tersebut.

Hasil Asesmen GCG Dewan Komisaris dan Direksi

Pada 2016, Perseroan melakukan *asesmen* atas implementasi GCG untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang dilaksanakan sesuai kerangka acuan pelaksanaan *asesmen* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian Negara BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Selama 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
- Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perseroan patungan.
- Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
- Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Selama 1 (satu) tahun terakhir Direksi telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.
- Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perseroan.
- Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perseroan dan Para Pemegang Saham.
- Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.
- Direksi memastikan Perseroan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.
- Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
- Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.
- Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS 2016, *asesmen* terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada 2016 telah berjalan baik dan memuaskan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada 2016 dilakukan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat diimpahkan kepada Dewan Komisaris. Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp16.397.824.141 dan Rp9.983.000.000 sementara kepada Direksi per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp.39.863.300.859 dan Rp24.264.500.000.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada 2016, Perseroan mengadakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 17 kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris				
Badrodin Haiti*	Komisaris Utama	2	2	100%
Arif Baharudin	Komisaris	17	14	82.35%
R. Agus Sartono	Komisaris	17	11	64.70%
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris	17	13	76.47%
Viktor S. Sirait	Komisaris Independen	17	16	99.33%
M. Aqil Irham	Komisaris Independen	17	16	99.33%
Direksi				
M. Choliq	Direktur Utama	17	9	52.94%
Tunggul Rajagukguk	Direktur	17	11	64.70%
Adi Wibowo	Direktur	17	7	41.17%
Nyoman Wiryadnyana	Direktur	17	9	52.94%
Agus Sugiono	Direktur	17	15	88.23%
Bambang Rianto**	Direktur	0	0	- %

* menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 25 November 2016

** menjabat sebagai direktur sejak 31 Maret 2017

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2015 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 26/SK/WK/PEN/2017 tertanggal 21 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Unit di Lingkungan Perseroan, Perseroan telah mengangkat Shastia Hadiarti sebagai Sekretaris Perusahaan.

Shastia Hadiarti

Warga Negara Indonesia 29 Tahun, lahir di Boston pada 15 Juni 1987.

Menjabat sejak 21 April 2017. Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Airlangga. Karirnya dimulai sebagai Staf Keuangan, Staf Hubungan Investor, Kepala Bagian Hubungan investor, Kepala Bagian Pengembangan Usaha, dan Sekretaris Perusahaan.

Fungsi jabatan Sekretaris Perusahaan adalah membantu Direktur Utama dalam Menyelenggarakan kegiatan dibidang Tata Usaha Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Pengelolaan Gedung Kantor Pusat, dan Perlengkapan Perusahaan.

Bidang tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun alamat Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

Shastia Hadiarti
Gedung Waskita
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia
Telp. (021) 8508510
Faks. (021) 8508506
Email: waskita@waskita.co.id

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan perluasan pengetahuan, Sekretaris Perusahaan mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut:

No.	Topik	Penyelenggara	Jam Pelatihan	Biaya
1	Developing Positive Minda	Nurchahyo	5	Rp1.231.000
2	Certificate Of Strategic Financial Management	Prasetya Mulya	48	Rp27.000.000
3	Bedah OFI KPKU Tahun 2016	Perseroan	18	Rp1.446.114

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN ("Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015"), berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.11/SK/WK/DK/2015 tanggal 30 September 2015, perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit. Komisaris Perseroan membentuk Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Viktor S Sirait
Anggota : R Agus Sartono
Anggota : Hengki Z.P Tampubolon
Anggota : Tjahjo Winarto

Masa tugas Anggota Komite Audit adalah 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

Hengki Z.P Tampubolon

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun, lahir di bangka, 25 September 1970.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1995. Magister bidang Ilmu Administrasi Bisnis dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2004.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan (2015–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Dosen Luar Biasa untuk mata kuliah Pengantar Perpajakan, Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, Laboratorium Perpajakan dan Advance 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (2010-sekarang), Associated Partner di KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (2013-sekarang), Associated Partner di KAP Doli, Bambang, Sudarmaj, Dadang & Ali (2010-2013), Associated Partner di KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja (2009-2010), Associated Partner di KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (2008-2009), Associated Partner di KAP Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono (2007-2008), Associated Partner di KAP Tanubrata, Yogi, Sibarani & Hananta (2005-2007), Associated Partner di KAP Victor Albert (2004), Associated Partner di KAP Victor & Hardy (2003), Manager Audit di KAP Victor, Hardy, HG & Rekan (2001-2002), Senior Auditor dan Business Advisory Division di KAP Prasetio, Utomo & Co (1997-2001) dan Junior Auditor & Business Advisory di KAP Prasetio, Utomo & Co (1995-1997)

Tjahjo Winarto

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun, lahir di Banyuwangi, 19 Mei 1970.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang pada tahun 1998. Magister bidang *Business Administration* jurusan *Finance* dari International University of Japan, Jepang pada tahun 2002.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan (2015–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Dosen untuk mata kuliah *Financial Auditing*, *Risk Management*, *Financial Accounting* dan *Corporate Finance* di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1992-2015), Senior Konsultan di PT Angkasa Pura II (Persero), PT Kawasan Industri Medan dan PT KBN (2011-2014), *Project Executive Director* untuk *State audit reform-State Development Program* di Kementerian Keuangan (2006-2007), Trainer di Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan STAN (2003-2016),

Trainer di PT MC Indonesia (2012-2013), Trainer di KKDK (2009-2013), Direktur di LPMK-STAN (2010-2012), *Training Director* di Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (2003-2007), Manajer Implementasi Sistem Akuntansi di Pemerintah Daerah Cirebon dan Situbondo (2003), Auditor di KAP ISSR, Salam rauf, Heliantono dan HMR (1998-2003) dan Konsultan Keuangan di Goldhill International (2000).

Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan No. 03/SK/WK/DK/2007 tanggal 22 Mei 2007, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit sejak 2007 adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
4. Memastikan bahwa sudah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
5. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau terhadap hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris.
6. Mengidentifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perseroan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Manajemen, dan informasi lainnya.
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal.
 - d. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
 - e. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit oleh auditor internal dan auditor eksternal.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan komisaris.
 - g. Melaksanakan tugas serta kewajiban sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) Perseroan.
 - h. Melaporkan kepada Komisaris sebagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pada 2016, Perseroan mengadakan rapat Komite Audit sebanyak 13 kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran
Viktor S. Sirait	Ketua	13	13	100,00%
R. Agus Sartono	Anggota	13	10	76,92%
Tjahjo Winarto	Anggota	13	13	100,00%
Hengki Z P Tampubolon	Anggota	13	12	92,30%

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit mempublikasikan hasil kerja berupa temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut atas temuan, yaitu:

1. Komite Audit memandang perlu meningkatkan kinerja Pengawasan Satuan Pengawasan Internal. Selain itu Satuan Pengawasan Internal harus melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem pengendalian internal Perseroan.
2. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan kegiatan Audit Eksternal.
3. Komite Audit memandang implementasi sistem ERP yang menyeluruh harus dijalankan lebih efektif lagi, khususnya dalam bidang produksi, pemasaran dan SDM.
4. Komite Audit memandang perlu untuk mengubah RKAP 2017 dengan memperhatikan perubahan investasi yang dilakukan oleh Perseroan yang terjadi pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017

Komite Risiko dan Asuransi

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.12/SK/WK/DK/2015 tanggal 30 September 2015 mengenai Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Risiko dan Asuransi, susunan Komite Risiko dan Asuransi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Aqil Irham
 Anggota : Danis Hidayat Sumadilaga
 Anggota : Ahmad Syarif Munawi
 Anggota : Zulfan Zahar

Masa jabatan dari Komite Risiko dan Asuransi adalah 2 (dua) tahun sejak pengangkatan.
 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Risiko dan Asuransi adalah sebagai berikut:

- Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah risiko yang mungkin terjadi.
- Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang perlu ditutup oleh Perseroan.
- Mengikuti tahapan-tahapan proses Manajemen Risiko Perseroan yaitu Identifikasi, pengukuran, penanganan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pengungkapan risiko dan asuransi.
- Melaporkan hasil kegiatannya kepada Komisaris secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Ahmad Syarif Munawi

Warga Negara Indonesia, 42 Tahun, lahir di Garut, 6 Mei 1974.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1997. Magister bidang *Finance* jurusan *Investment. Faculty of Management and Organization* dari The University of Groningen (Rijksuniversiteit Groningen), Groningen, Belanda pada tahun 2005.

Menjabat sebagai anggota Komite Risiko dan Asuransi Perseroan (2015–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai *Head of Investment* di PT Indoasia Asset Manajemen, Jakarta (2014–sekarang), Direktur di PT. Narada Kapital Indonesia, Jakarta (2012-2013), *Head of Investment* di PT Investindo Nusantara Sekuritas (2011-2012), *Fund Manager* di Nikko Sekuritas Indonesia (2005-2011) dan *Investment Analyst* di Nikko Sekuritas Indonesia (2001-2003).

Zulfan Zahar

Warga Negara Indonesia, 30 Tahun, lahir di Jakarta, 5 Mei 1986.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 2008. Saat ini sedang menempuh pendidikan Paska Sarjana di Prasetiya Business School dengan jurusan *Strategis Business and Management*.

Menjabat sebagai anggota Komite Risiko dan Asuransi Perseroan (2015–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai *President Commissioner* di beberapa Perusahaan Holding di Sektor Energi, Jakarta (sekarang), *Senior Advisor* dibidang konstruksi dan manajemen di Paramount Land Enterprise (sekarang), *Asistant Director General* di Kementerian Pekerjaan Umum (2011-sekarang), *Engineering Procurement and Construction Officer* di Perusahaan Gas dan Minyak Bumi (2009-2010) dan *Project Control and Management officer* di Chevron (2009-2010).

Pada 2016, Perseroan mengadakan rapat Komite Risiko dan Asuransi sebanyak 13 kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran
M Aqil Irham	Ketua	15	15	100,00%
Danis Hidayat Sumadilaga	Anggota	15	10	66,66%
Ahmad Syarif Munawi	Anggota	15	14	93,33%
Zulfan Zahar	Anggota	15	15	100,00%

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Komite Risiko dan Asuransi melakukan beberapa pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- Membuat rencana kerja tahunan dan meminta persetujuan Dewan Komisaris.
- Melakukan evaluasi atas piagam manajemen risiko dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbaikan.
- Melakukan evaluasi atas peraturan manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan yang berupa buku panduan manajemen risiko terutama kemungkinan penerapan manajemen risiko terintegrasi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan.

- Mengevaluasi tentang identifikasi risiko yang menghasilkan daftar risiko yang akan dikelola oleh Perusahaan serta alternatif mitigasi risiko baik dengan menggunakan asuransi maupun cara lain.
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan unit manajemen risiko perusahaan berdasarkan panduan yang telah dibuat dengan melakukan rapat-rapat dengan manajer risiko dan unit pemilik risiko. Pelaksanaan ini mulai identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, mitigasi dan monitoringnya.
- Melakukan evaluasi sistem informasi berbasis IT yang dibangun oleh perusahaan untuk menilai kemungkinan berhasil atau gagalnya serta membuat rekomendasi perbaikan agar pengembangan sistem informasi dapat berhasil dengan baik.
- Melakukan kajian terhadap risiko investasi atas proyek-proyek yang merupakan hasil pengembangan Perusahaan di bidang infrastruktur seperti tol, properti, precast dan transmisi listrik.
- Melakukan evaluasi risiko hukum yang dihadapi oleh Perusahaan dengan cara mendiskusikan dengan kepala Biro Hukum terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang risiko hukum yang penting bagi Perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan tidak membentuk komite khusus sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK No. 34/2015 oleh karena tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang diatur dalam POJK tersebut telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Satuan Pengawas Intern (SPI)

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka berdasarkan surat keputusan direksi No.13/SK/WK/PEN/2011 tanggal 21 Juli 2011, Surat Keputusan Direksi No.28/SK/WK/PEN/2012 tanggal 26 September 2012, Surat Keputusan Direksi No.29/SK/WK/PEN/2012 tanggal 28 September 2012, surat Keputusan Direksi No.06/SK/WK/PEN/2014 tanggal 01 April 2014 serta Surat Keputusan Direksi No.13/SK/WK/PEN/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Penetapan Pejabat Struktural di Lingkungan Perseroan, Direksi Perseroan membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawas Intern.

Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Jonni Hutahaean, sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern
Anggota : Ir. Sunu Hartanto, sebagai Auditor Teknik I, Satuan Pengawasan Intern
Ir. Zulhan Zain, sebagai Auditor Teknik II, Satuan Pengawasan Intern
Dedi Suhatri Amir, S.E., sebagai Auditor Keuangan I, Satuan Pengawasan Intern
Tata Taufik, S.E., sebagai Auditor Keuangan II, Satuan Pengawasan Intern
Ir. Yuniar Rahmiana sebagai Auditor Sistem Satuan Pengawasan Intern
Ir. Suroso sebagai Auditor Teknik Satuan Pengawasan Intern
Ir. Dhyka Dwi Saputra Auditor Teknik Satuan Pengawasan Intern
Ir. Dharma Yuliandri Auditor Sistem Satuan Pengawasan Intern
Evy Purwanty, S.E Staf Auditor Keuangan Satuan Pengawasan Intern

Sampai dengan saat ini, susunan Komite Audit Emiten sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 11/SK/WK/DK/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan.

Sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 20/SK/WK/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Tanggung Jawab Tugas, dan Wewenang Unit Audit Internal sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal sejak 2011 adalah:

1. Menyusun program kerja audit tahunan (PKAT) dan schedule pelaksanaan audit.
2. Melakukan audit atas kegiatan usaha secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan di unit bisnis/unit kerja atau atas perintah Direksi.
3. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
4. Membuat konsep Petunjuk Tindak Lanjut (PTL) yang ditandatangani Direktur Utama untuk dikirim ke Auditee terkait.
5. Secara berkala/triwulan membuat Laporan Rangkuman berupa Register Tindak Lanjut Hasil Audit (RTLHA) dari Auditee untuk dilaporkan Direktur Utama.
6. Sebagai counterpart kegiatan audit eksternal dan mengkoordinir hasil tindak lanjut dari auditee.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
10. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
11. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
12. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua level manajemen.

13. Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas, dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja Perseroan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, SPI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Objek yang diaudit dalam proses audit internal sebanyak 40 objek. Realisasi Laporan Hasil Audit (LHA) pada tahun 2016 berada di bawah rencana yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terdapat tugas lain yang berkaitan dengan pemeriksaan eksternal yaitu sebagai “*counterpart*” audit eksternal seperti audit BPK RI, audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, audit Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan serta Mutu oleh SGS, audit Sistem Manajemen K3 oleh Sucofindo, serta GCG dan audit investigasi.
- b. SPI melaksanakan monitoring secara berkelanjutan dan menindaklanjuti temuan auditor untuk menilai rekomendasi dari temuan auditor secara objektif serta memeriksa kebenaran data tertulis di lapangan yang disampaikan oleh Unit Kerja/Kantor Cabang yang bersangkutan.
- c. Kegiatan monitoring dan tindak lanjut atas temuan audit yang dilakukan SPI pada tahun 2016 mencapai 91,58% dari 40 (empat puluh) objek audit. Seluruh temuan ditindaklanjuti dan telah dilaporkan kepada manajemen sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Risiko Penyimpangan Internal

Potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan baik dalam skala apapun selalu memiliki kemungkinan yang cukup besar. Penyimpangan internal dapat berasal dari individu-individu Perseroan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dengan demikian, penerapan sistem pengawasan dan bekerjanya organ-organ pengawasan khususnya SPI menjadi sangat mutlak manfaatnya bagi Perseroan.

SPI dalam memonitor setiap proses kerja Perseroan senantiasa mengedepankan aspek-aspek keterbukaan dan akuntabilitas sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menimbulkan konflik kepentingan. SPI melalui mandatnya, melakukan pemantauan secara menyeluruh serta menjalankannya dengan mengedepankan nilai-nilai integritas yang ada. SPI secara berkala dan melalui pelatihan-pelatihan yang dijalankan juga melakukan pemantapan terhadap sistem yang digunakan.

8.8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai BUMN, Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka menjalin kemitraan dan membina lingkungan. Kementerian BUMN telah memberikan arahan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang pada intinya bertujuan untuk memandu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN. Perseroan telah mengembangkan PKBL menjadi Program Kemitraan dengan bantuan Pinjaman Dana Kemitraan, Pembinaan dan Pelatihan Mitra Binaan serta Program Bina Lingkungan.

a. Pinjaman Dana Kemitraan

Program kemitraan memungkinkan Perseroan untuk memberikan dana pinjaman kepada mitra binaan yang bersifat non-komersial. Pinjaman tersebut menjadi modal bagi mitra binaan untuk meningkatkan usahanya maupun dalam investasi alat-alat yang mendukung usaha mereka (*financial capital*). Besaran dana program kemitraan yang telah disalurkan untuk kegiatan program kemitraan selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Dana Tersedia (Rp)	Dana Tersalurkan (Rp)	Persentase	Jumlah Mitra Binaan
2015	6.380.060.575	6.096.230.617	95,55%	150
2016	7.008.789.718	6.793.425.000	96,93%	120

b. Pembinaan dan Pelatihan Mitra Binaan

Pembinaan dan pelatihan mitra binaan dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga lain yang mengembangkan ilmu kewirausahaan dan motivasi berwirausaha. Program ini diberikan kepada mitra binaan dalam rangka hibah pendampingan (*knowledge capital*) dengan tujuan untuk mengoptimalkan dana yang telah disalurkan sebelumnya.

Dalam setiap tahunnya, kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pameran yang diselenggarakan Perseroan senantiasa dievaluasi dan disempurnakan. Perseroan berupaya untuk menciptakan kondisi yang saling menguntungkan bagi Perseroan dan mitra binaan, memperbaiki tingkat pengembalian pinjaman, dan meningkatkan skala usaha mitra binaan secara terprogram dan terukur. Perseroan optimis, program kemitraan dapat mengantarkan mitra binaan menjadi tangguh dan mandiri.

c. Program Kegiatan Sosial Masyarakat dan Bina Lingkungan

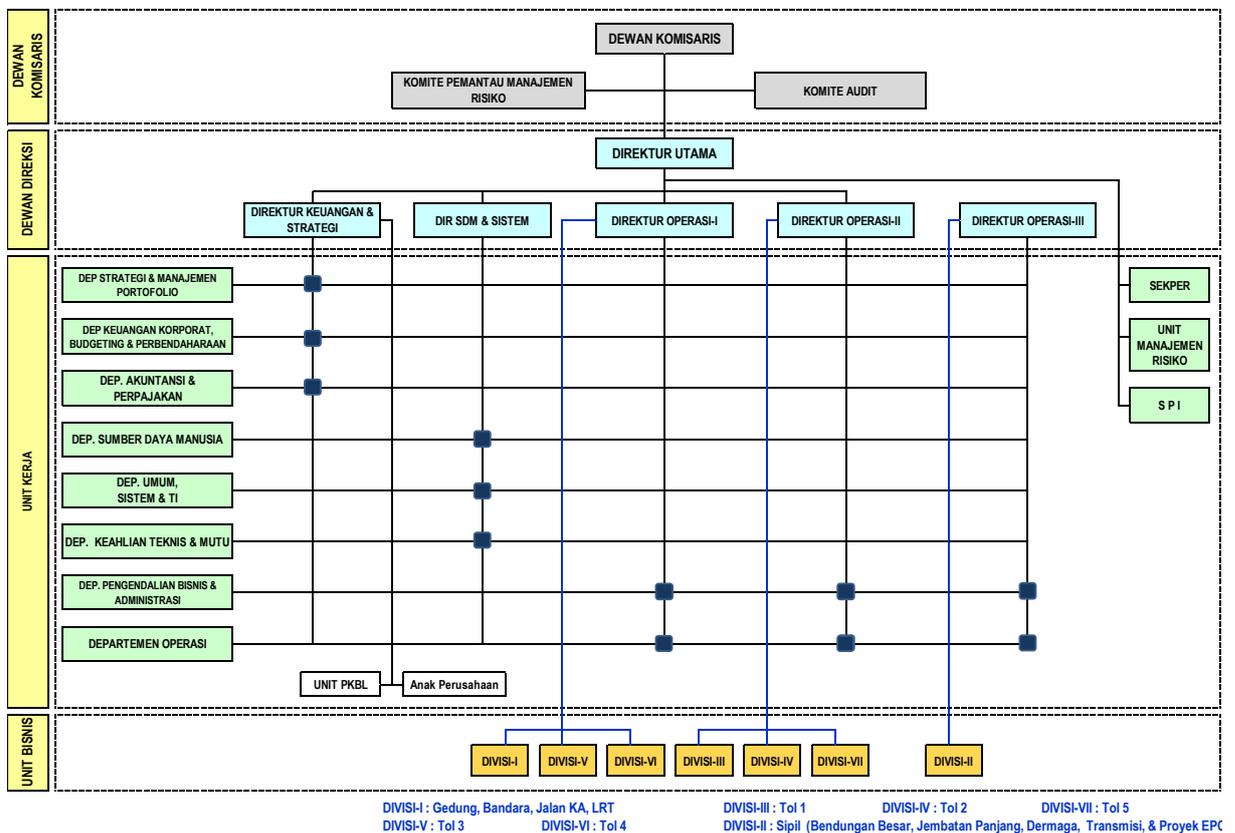
Perseroan memiliki tugas moral untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian dalam negeri secara berkelanjutan dengan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Substansi pelaksanaan program CSR dalam bidang sosial dan masyarakat serta bina lingkungan diarahkan pada upaya untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Penyelenggaraan program sosial dan masyarakat serta bina lingkungan oleh Perseroan memiliki tujuan untuk memberi dampak positif yang terhubung dengan Perseroan dengan pelaksanaan program tepat guna dan berdampak jangka panjang secara bertahap, kemudian mengembangkan program-program tersebut secara berkesinambungan.

Dalam mewujudkan kepedulian Perseroan terhadap lingkungan hidup yang sehat, Perseroan menjalankan program sosial dan masyarakat serta bina lingkungan. Dana yang disalurkan pada 2016 sebesar Rp10.624.079.996,-

Program Kegiatan	Rencana 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Persentase
Korban Bencana Alam	500.000.000	212.500.000	42,50%
Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.500.000.000	3.320.371.250	94,87%
Peningkatan Kesehatan	500.000.000	0	0,00%
Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum	500.000.000	1.248.901.429	249,78%
Sarana Ibadah	3.500.000.000	3.031.319.600	86,61%
Pelestarian Alam	200.000.000	0	0,00%
Sosial Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan	500.000.000	2.275.747.717	550,55%
Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan, Pemasaran dan Promosi	250.000.000	58.240.000	23,30%

8.9. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Sistem Pelimpahan Wewenang Perusahaan

Direksi :

Pada prinsipnya semua pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi merupakan tanggung jawab kolegal semua anggota Direksi, sehingga pembagian tugas dan wewenang merupakan alat untuk mencapai pengelolaan dan pengurusan Perseroan yang efektif sesuai maksud dan tujuan Perseroan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan 16/SK/WK/2016 tanggal 6 Mei 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perseroan, maka tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

- a. *Direktur Utama* mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Direksi dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan, membawahi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Sekretariat Perusahaan (Sekper).
- b. *Direktur Keuangan* mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Melaksanakan pengelolaan di bidang, keuangan, risiko dan akuntansi, perusahaan modal, perencanaan, pengendalian serta pengembangan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
 2. Melakukan pembinaan dan menilai kinerja Departemen yang ada dibawahnya.
 3. Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis terkait fungsinya.
 4. Melakukan pengawasan anak perusahaan
 5. Melakukan pengelolaan unit PKBL.
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- c. *Direktur Pengembangan & SDM* mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Melakukan kajian pengembangan bisnis dengan membuat analisis portfolio pengembangan usaha Perseroan, mulai rencana investasi (proyek) dari masing-masing Direktorat, membuat usulan skala prioritas, hingga mempresentasikan dan mendiskusikannya dengan BOD.
 2. Membuat usulan kepada Komisaris dan atau Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan terkait investasi usaha.
 3. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Sistem, dan TI.
 4. Melakukan pengawasan Anak Perusahaan
 5. Melakukan pembinaan dan menilai kinerja Departemen yang ada dibawahnya.
 6. Melakukan pengelolaan P2K3LMP
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- d. *Direktur Operasi I* mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi, serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya.
 2. Melakukan kajian pengembangan bisnis dan investasi dibidang Jalan Tol, Beton Precast dan Energi.
 3. Melakukan pengawasan Anak Perusahaan
 4. Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis/Unit Kerja terkait fungsinya.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- e. *Direktur Operasi II* mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi, serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya.
 2. Melakukan kajian pengembangan bisnis dan investasi dibidang Realty.
 3. Melakukan pengawasan anak perusahaan
 4. Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis/Unit Kerja terkait fungsinya.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- f. *Direktur Operasi III* mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi, serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya.
 2. Melakukan pengawasan anak perusahaan
 3. Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis/Unit Kerja terkait fungsinya.
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

8.10. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan

Menurut Jenjang Pendidikan

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	2015
Strata1& 2	1.222	1.222		931
Diploma (D3)	269	269		134
SLTA dan sederajat	150	150		246
Jumlah	1.641	1.641		1.311

Menurut Jenjang Manajemen

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	2015
Kepala Departemen	27	27		15
Wakil Kepala Divisi	15	15		5
Kepala Bagian Unit Kerja dan Unit Bisnis	104	104		84
Kepala Cabang	9	9		9
Ahli Muda/Madya/Utama	24	24		21

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	
Kepala proyek tipe A / B / C	133	133	148	
Kepala Seksi Proyek	228	228	213	
Kepala Lapangan Proyek	102	102	44	
Pelaksana Proyek	175	175	59	
Staf	730	730	601	
Masa Persiapan Pensiun	15	15	13	
On the Job Training di Kantor Pusat	79	79	0	
Jumlah	1.641	1.641	1.311	

Menurut Jenjang Usia

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	
> 55th	21	21	0	
46 - 55 tahun	412	412	423	
36 - 45 tahun	310	310	296	
26 - 35 tahun	520	520	303	
19 - 25 tahun	378	378	289	
Jumlah	1.641	1.641	1.311	

Menurut Status Kompetensi

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	
Teknik	1.223	1.223	962	
Non Teknik	418	418	349	
Jumlah	1.641	1.641	1.311	

Catatan:

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

Menurut Status Kontrak

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	
Pegawai Tetap	826	826	564	
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	511	511	438	
Pegawai Tidak Tetap	304	304	309	
Jumlah	1.641	1.641	1.311	

Catatan:

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.

WTR

Menurut Jenjang Pendidikan

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	
Strata1& 2	48	16	14	
Diploma (D3)	-	-	-	
SMU dan sederajat	-	-	-	
SLTP dan SD	-	-	-	
Jumlah	48	16	14	

Menurut Jenjang Manajemen

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	12	8		4
Pelaksana Proyek	17	4		3
Staf	19	4		7
Jumlah	48	16		14

Menurut Jenjang Usia

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
> 55 tahun	4	1		-
46 - 55 tahun	12	4		4
36 - 45 tahun	8	-		3
26 - 35 tahun	9	6		7
18 - 25 tahun	15	5		0
Jumlah	48	16		14

Menurut Status Kompetensi

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Teknik	30	10		7
Non Teknik	18	6		7
Jumlah	48	16		14

Catatan:

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

Menurut Status Kontrak

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pegawai Tetap	36	14		9
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	-	-		-
Pegawai Tidak Tetap	12	2		5
Jumlah	48	16		14

Catatan:

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.

WSBP

Menurut Jenjang Pendidikan

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Strata1& 2	440	344		47
Diploma (D3)	96	83		2
SMU dan sederajat	728	485		-
SLTP dan SD	-	-		-
Jumlah	1.264	912		49

Menurut Jenjang Manajemen

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	70	64		24
Pelaksana Proyek	20	35		5
Staf	1174	813		20
Jumlah	1.264	912		49

Menurut Jenjang Usia

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
> 55 tahun	14	11		-
46 - 55 tahun	78	61		24
36 - 45 tahun	122	99		5
26 - 35 tahun	378	243		10
18 - 25 tahun	672	498		10
Jumlah	1.264	912		49

Menurut Status Kompetensi

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Teknik	918	652		35
Non Teknik	346	260		14
Jumlah	1.264	912		49

Catatan:

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

Menurut Status Kontrak

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pegawai Tetap	82	82		37
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	211	104		1
Pegawai Tidak Tetap	971	726		11
Jumlah	1.264	912		49

Catatan:

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.

WKR

Menurut Jenjang Pendidikan

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Strata1& 2	26	26		27
Diploma (D3)	1	1		1
SMU dan sederajat	0	0		-
SLTP dan SD	0	0		-
Jumlah	27	27		28

Menurut Jenjang Manajemen

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	5	5	5	
Pelaksana Proyek	2	2	2	
Staf	20	20	21	
Jumlah	27	27	28	

Menurut Jenjang Usia

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	
> 55 tahun	2	2	-	
46 - 55 tahun	6	6	5	
36 - 45 tahun	3	3	2	
26 - 35 tahun	6	6	11	
18 - 25 tahun	10	10	10	
Jumlah	27	27	28	

Menurut Status Kompetensi

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	
Teknik	13	13	14	
Non Teknik	14	14	14	
Jumlah	27	27	28	

Catatan:

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

Menurut Status Kontrak

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	
Pegawai Tetap	26	26	12	
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	1	1	3	
Pegawai Tidak Tetap	0	0	13	
Jumlah	27	27	28	

Catatan:

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.
- iii. Bahwa pegawai seluruh WKR merupakan pegawai milik Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 19/SK/WK/PEN/2013 tentang Penempatan Pegawai Unit Kerja/Bisnis & MT 2013-1 tanggal 30 April 2013, Keputusan Direksi Perseroan No. 20/SK/WK/PEN/2014 tentang Penempatan Temporer Management Trainee 2014 tanggal 27 Juni 2014, dan Keputusan Direksi Perseroan No. 26/SK/WK/PEN/2012 tentang Mutasi Penempatan Pegawai Unit Kerja/Bisnis tanggal 30 Agustus 2012, serta pegawai outsourcing dari PT. Daya Mitra Sarana berdasarkan Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 02/P/WKR-DMS/2015 tanggal 2 Januari 2015.

WKE
Menurut Jenjang Pendidikan
(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Strata1& 2	-	-	-	-
Diploma (D3)	-	-	-	-
SMU dan sederajat	-	-	-	-
SLTP dan SD	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Menurut Jenjang Manajemen
(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	-	-	-	-
Pelaksana Proyek	-	-	-	-
Staf	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Menurut Jenjang Usia
(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
> 55 tahun	-	-	-	-
46 - 55 tahun	-	-	-	-
36 - 45 tahun	-	-	-	-
26 - 35 tahun	-	-	-	-
18 - 25 tahun	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Menurut Status Kompetensi
(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Teknik	-	-	-	-
Non Teknik	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Catatan:

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

Menurut Status Kontrak
(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pegawai Tetap	-	-	-	-
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	-	-	-	-
Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Berikut disampaikan rincian pegawai berdasarkan aktivitas utama dan lokasi Perseroan:

Menurut Aktivitas Utama

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	2015
Industri Konstruksi	1.689	1.657		1.325
Industri Pabrikasi	1.264	912		49
Properti dan Realty	27	27		28
Jasa Penyewaan	-	-		-
Investasi	-	-		-
Perdagangan	-	-		-
Pengelolaan Kawasan	-	-		-
Layanan Jasa	-	-		-
Peningkatan Kemampuan di Bidang Jasa Konstruksi				
Jumlah	2.980	2.596		1.402

Menurut Lokasi Perseroan

(jumlah orang)

Keterangan	31 Maret	
	2017	
Divisi I (Jakarta)		331
Divisi II (Jakarta)		321
Divisi III (Jakarta)		281
Divisi IV (Surabaya)		214
Divisi V (Jakarta)		93
Divisi VI (Palembang)		141
Jumlah		1.381

Perseroan sampai dengan saat ini tidak memiliki karyawan yang mempunyai keahlian ataupun sertifikat khusus yang dimana jika pegawai tersebut tidak ada akan mengganggu jalannya kegiatan operasional Perseroan.

Pendidikan

Merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan bergelar (S1, S2 dan S3) didalam negeri maupun luar negeri dengan beasiswa dari Perseroan maupun biaya sendiri. Selama tahun 2016 Perseroan telah mengirimkan 1 orang pegawai untuk menyelesaikan program pendidikan bergelar (S2) di luar negeri dan 25 orang pegawai untuk program pendidikan S1, S2, dan S3 di dalam negeri.

1. Sertifikasi

Merupakan proses standarisasi kompetensi secara profesional untuk para pegawai dibidangnya masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Perseroan (sertifikasi internal) dan Organisasi Profesi Non Pemerintah (sertifikasi external). Sertifikasi internal yang dilakukan Perseroan untuk tahun 2016 dilakukan untuk bidang-bidang keuangan, proyek dan pelaksana. Sedangkan sertifikasi external juga diperlukan dalam tender proyek. Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Keterampilan yang diikuti oleh pegawai dikeluarkan oleh LPJK bekerja sama dengan: HAMKI, HAKI, HATTI, HATHI, KNIBB, K3 KONSTRUKSI, ISI, BNSP, AKLI, HPJI dan lain-lain.

2. Pelatihan Non Sertifikasi

Merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Pelatihan-pelatihan tersebut terdiri dari: orientasi pegawai, *Project Management Body of Knowledge*, manajemen Konstruksi, *Micro Soft Project, Value Engineering, Construction Drawing, Scaffolding, Power Plant, Power Plant Construction, Pipeline construction*, Prosedur-prosedur Perseroan, *Human Capital Management*, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan, PSAK 50 & 55, Pajak, FIDIC, *Construction Contract Management*, Financial Management, *Contractor Risk Management*, Lead Auditor, ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa, *Effective Supervisory Management, Coaching and Counselling, Treasury Management, Good Corporate Governance*, Pasar Modal, *Negotiation Skill, Marketing Plan for Sustainable Competitive, Comprehensive Enterprise Risk Management, Company Strategic Planning, Business Strategic, Customer Relationship Management, Effective Presentation*.

Pada tahun 2016 telah diselenggarakan 21 jenis pelatihan bidang teknik, 99 jenis pelatihan bidang non teknik untuk berbagai jenjang jabatan dengan total jumlah peserta sebanyak 3623 orang.

3. Pengembangan

Merupakan rangkaian program pembelajaran bagi pertumbuhan individu untuk membantu pegawai tumbuh dan berkembang sehingga organisasi selalu siap dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan wawasan, teknologi dan pandangan-pandangan yang baru dalam mempersiapkan pegawai pada jabatan yang akan diproyeksikan kepadanya. Program pengembangan yang dilakukan Perseroan meliputi *Leadership Development Program for Superintendent, Project manager, Junior manager, Middle Manager and Directorship program*. Materi didalam pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan kepada para peserta mengenai praktek-praktek kepemimpinan. Dengan pelatihan ini diharapkan para peserta mampu menunjukkan sikap dan perilaku sebagai seorang pemimpin yang efektif. Pada tahun 2016, jumlah pegawai yang mengikuti program ini sebanyak 485 orang.

Program *Management Trainee*

Kemajuan organisasi Perseroan semakin hari semakin meningkat, hal ini tentu saja perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dalam jumlah yang memadai. Sejak tahun 2003, Perseroan telah memulai program *Management Trainee* (MT) yang diselenggarakan secara terpusat dan dikoordinasikan oleh Departemen dan Sistem. Sasaran program MT yaitu tersedianya pegawai berkualitas dalam memenuhi kebutuhan perkembangan organisasi serta untuk melanjutkan regenerasi dalam organisasi.

Peserta program MT yang telah diterima akan diberikan pembekalan untuk langsung ditempatkan dalam proyek. Mereka diberikan program orientasi dan *on the job training* untuk mengenal sistem, prosedur dan budaya yang ada di Perseroan. Program orientasi dilakukan secara in class maupun melalui outward bound dan pengenalan disiplin secara militer. Selanjutnya mereka akan ditempatkan secara temporer di Unit Kerja/Bisnis selama +/- 5 bulan untuk melihat dan belajar sistem dan prosedur yang telah dipelajari dalam masa orientasi. Perseroan juga melakukan pemantauan dan mentoring, serta evaluasi terhadap pegawai baru dalam *on the job training*. Selama masa orientasi dan *on the job training*, para pegawai baru tersebut diberikan penilaian kinerja untuk penetapan diangkat atau tidaknya sebagai pegawai Perseroan.

Berikut rincian jumlah peserta program MT dari tahun sebelumnya:

Angkatan	Jumlah Peserta
2003	13 orang
2004	8 orang
2005	13 orang
2007	24 orang
2008	31 orang
2009	41 orang
2010	64 orang
2011	106 orang
2012	-
2013	93 orang
2014	48 orang
2015	207 orang
2016	218 orang

Keterangan Tenaga Kerja Asing

Perseroan mempekerjakan 2 (dua) orang tenaga kerja asing yaitu:

1. Roberto D. Sto Tomas, kewarganegaraan Philipina, Pemilik Paspor EC3123264 yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2015 dan berlaku sampai dengan 9 Februari 2020, pemilik KITAS No. 2C21JC0766-Q yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bahwa Perseroan telah memiliki izin terkait penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI.2.GR.01.06.03.4044LP.312 tanggal 15 Desember 2015;
2. Paningbatan Alan Austria, Kewarganegaraan Philipina, Pemilik Paspor P0098071A yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2016 dan berlaku sampai dengan 29 Agustus 2021, pemilik KITAS No. 2C11JC0588-Q yang berlaku sampai dengan 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bahwa Perseroan telah memiliki izin terkait penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.66983/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 1 September 2015 yang berlaku sampai dengan 10 November 2017;

Nama TKA	Warga negara	Jabatan	Paspor		IMTA		KITAS	
			No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga
Roberto D. Sto Tomas	Philipina	Kepala Jaminan Mutu	EC31 2326 4	9 Februari 2020	2352/11. 5IMTA/O DS/31/- 1.837/20 17	31 Des 2017	2C21J C0766- Q	31 Des 2017
Paningbatan Allan Austria	Philipina	Quality Control Manager	P009 8071 A	29 Agustus 2021	KEP.669 83/MEN/ B/IMTA/2 016	10 Nov 2017	2C11J C0588- Q	12 Des 2017

Sarana Kesejahteraan

Pemberian tunjangan, insentif dan manfaat bagi segenap pegawai Perseroan bertujuan sebagai wujud timbal balik Perseroan atas dedikasi maupun prestasi yang diberikan selama bekerja, serta pemenuhan akan hak-hak ketenagakerjaan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Perseroan menyediakan beberapa komponen tunjangan atau manfaat diantaranya Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), bonus, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pertanggung jawaban medis serta manfaat lainnya yang mekanisme dan variabelnya telah diatur dalam kebijakan Perusahaan. Perseroan berpendapat bahwa pemberian manfaat tidak hanya dapat dirasakan bagi pegawai yang bersangkutan, namun juga anggota keluarganya yang telah terdaftar. Bentuk kesejahteraan pegawai lain di Perseroan meliputi:

- Keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Kecelakaan Kerja, Hari Tua, jaminan Pensiun);
- Medical Check Up;
- Family Gathering;
- Jasa Produksi;
- Cuti (Cuti besar dan tahunan);
- Perawatan Kesehatan;
- Uang Makan

a. Dana Pensiun

Program pensiun yang diberikan Perseroan terdiri dari program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya dan program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife (DPLK Manulife).

b. Opsi Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan Manajemen

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. S-576/MBU/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengenai Persetujuan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*), menyetujui penawaran umum perdana saham paling banyak 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, termasuk program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (MESOP) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Perseroan menyediakan program opsi saham untuk anggota manajemen (MESOP). Program ini terdiri dari program opsi saham bahwa setelah diselesaikan melalui penerbitan saham (pengaturan pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas) dicatat sebagai transaksi ekuitas. Pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas kepada anggota manajemen dan layanan sejenis lainnya diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian opsi.

Berikut disampaikan informasi terkait MESOP Perseroan:

No.	Harga MESOP	Jumlah Saham Penerbitan MESOP	Jumlah MESOP yang diterbitkan pada tahun 2016
1.	438	554.720	242.967.360
2.	396	770.320	305.046.720

c. Sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Perjanjian Kerja Bersama

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dirumuskan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Perseroan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, sebagai berikut:

- Perseroan menyediakan alat-alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- Pegawai berhak memperoleh fasilitas kerja dan alat-alat K3LMP sesuai dengan sifat tugas dan lokasi kerja.
- Pegawai wajib memakai dan memelihara alat-alat K3LMP yang disediakan oleh Perseroan, yang merupakan pinjaman, dan tidak dibenarkan untuk dimiliki, disalahgunakan, atau dipindahtangankan kepada pihak yang tidak berhak.
- Perseroan dapat membebaskan ganti rugi sebagian atau seluruhnya kepada pegawai, yang karena kelalaian atau kesengajaannya mengakibatkan hilang atau rusaknya alat-alat K3LMP yang dipakainya.

Serikat Pekerja

Perseroan memberikan keleluasaan bagi segenap pegawai Perseroan untuk mendirikan serikat pekerja yang berfungsi sebagai sarana check and balance tata hubungan ketenagakerjaan secara timbal-balik antara pegawai dengan Perseroan ataupun pihak terkait lainnya. Sejak 1998, telah berdiri Ikatan Serikat Pekerja (ISP) yang merupakan satu-satunya Serikat Pekerja Perseroan. ISP tingkat pusat berkedudukan di Kantor Pusat Perseroan di Jl. MT Haryono, Kav. 10, Cawang, Jakarta 13340. Serikat Pekerja tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur sesuai No. Bukti Pencatatan: 506/IV/PV/2005 tanggal 18 Mei 2005.

8.11. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dan/atau tercatat dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, arbitrase, tata usaha negara maupun perburuhan, kecuali atas perkara-perkara sebagai berikut :

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materii/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1	No Perkara 01/Pdt.KPPU/2013/PN.J kt.Tim tanggal 21 Mei 2015 antar KPPU sebagai Termohon dan Emiten (Pemohon I), PT Adhi Karya Persero (Pemohon II), KPPU (Termohon Keberatan) terkait Dugaan Persekongkolan Horizontal diantara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan adanya Persaingan Semu. Kesamaan Dokumen. pengaturan Harga Penawaran, Kesamaan Prosedur serta Surat Dukungan.	Pemohon I	Rp.3.168.820.000,- (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk Terlapor II Rp.4.475.525.000,- (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk Terlapor III	Dengan Dikeluarkan Putusan Batal demi Hukum terhadap Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 Tanggal 26 April 2012 dengan segala akibat hukumnya, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, KPPU sebagai Termohon keberatan mengajukan Kasasi Pada tanggal 28 September 2015 terhadap putusan PN Jaktim. Tanggal 3 Desember 2015, pihak Termohon I (PT. Waskita Karya) mengajukan Kontra Memori Kasasi, dan sampai dengan saat ini masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
2	Perkara No. 16/PDT.G/2014/PN.LBB antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Agam ("Tergugat").	Penggugat	Rp.2.150.080.000,- (Dua miliar seratus lima puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) Uang paksa (Dwangsom) kepada peggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu	Tanggal 12 Agustus 2010 BANI mengeluarkan Pendapat yang mengikat (Binding Opinion) mengenai masalah aspek kontraktual tentang Pemblokiran Termin Kontraktor atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Badan Pengawasan Keuangan

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materii/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
			<p>juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;</p>	<p>Republik Indonesia) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat pada Pekerjaan Pembangunan Sport Centre Bukik Bunian Lubuk Basung Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2007 yang diajukan oleh Emiten dengan kesimpulan Bahwa Dana sebesar Rp 2,150,080,-0 (dua miliar seratus lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang selama ini ditahan merupakan hak Emiten. Pada tanggal 23 Oktober 2013, Emiten melakukan Somasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam, karena tidak ada jawaban, Emiten mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. putusan PN Lubuk Basung Nomor 16/PDT.G/2014/PN.LBB pada tanggal 13 Mei 2015 yang isinya Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Termin sebesar Rp. 2.150.080.000 kepada Penggugat. Pihak Tergugat mengajukan Banding pada tanggal 26 Mei 2015. Tanggal 30 November 2015 Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Tanggal 02 Februari 2016 Tergugat melakukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. dan sampai saat ini masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.</p>
3	<p>Perkara No. 7/PDT.G/2015/PN.Tpg antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau cq Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran ("Tergugat").</p>	Penggugat	<p>Rp. 12.445.532.527,52 (Dua belas miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua puluh tujuh koma lima puluh dua Rupiah) Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan.</p> <p>Kerugian immateril sebesar Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar Rupiah) yang merupakan Penyesuaian Harga (Eskalasi)</p>	<p>Telah dikeluarkan Putusan PN Tanjung Pinang tanggal 18 Juni 2015. Isi putusan Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 8.085.242.999,68 (Delapan miliar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) tanpa PPN. Tergugat (Pembanding) Banding pada tanggal 30 Juli 2015 Penggugat (Terbanding) mengajukan kontra memori banding. Tanggal 29 Juni 2016 telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 127/PDT/2015/PT.PDG yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pada Tanggal 2 Februari 2016 Tergugat mengajukan Kasasi</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
				dan sampai saat ini masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.
4	Perkara Perdata dengan nomor perkara 903/Pdt.G/2015/PN DPS tanggal 01 Desember 2015 terkait Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua –Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4, dimana PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Penggugat) dan PT Jasamarga Bali Tol (Tergugat)	Penggugat	Penggugat mengajukan tuntutan agar Para Tergugat membayar kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebesar Rp.64.576.067.774 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam) dan Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)	Permasalahan bermula saat Tergugat melakukan keterlambatan atas pembayaran pekerjaan tambah tiang pancang paket 2 dan paket 4 serta bunga akibat keterlambatan pembayaran kelebihan tiang pancang paket 2 dan paket 4. Setelah dilakukan mediasi terkait penyelesaian permasalahan tersebut tidak dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka pihak Emiten memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar terkait permasalahan tersebut. Tanggal 20 Juni 2016 Pengadilan Negeri Denpasar telah mengeluarkan putusan yang isinya menyatakan tergugat telah wanprestasi dan Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 64.576.067.774 (enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya. Tergugat mengajukan banding tanggal 18 Juli 2016. Tanggal 15 Agustus 2016 Jasa Marga Bali Tol sebagai Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Desember 2016 menyatakan menolak gugatan Emiten sebagai Penggugat/Terbanding. Emiten mengajukan memori kasasi tanggal 20 Desember 2016. Sampai saat ini masih dalam proses Kasasi dari Mahkamah Agung.
5	Permohonan Arbitrase dengan nomor register 843/IV/ARB-BANI/2016 tanggal 29 April 2016 dengan Kajima Corporation dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO) KAJIMA – WASKITA sebagai (Pemohon) dengan	Pemohon	Pemohon mengajukan tuntutan agar Termohon membayar kerugian sebesar Rp. 227.582.255.938,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga	Bahwa termohon yaitu PT DCA Pracetak Indonesia telah melakukan Cidera Janji/Wansprestasi atas produksi dan pemasok beton ready-mixed kepada Pemohon, dimana beton yang diproduksi dan dipasok oleh Termohon tidak sesuai dengan kualitas standar yang telah dituangkan dalam perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	Termohon PT DCA Pracetak Indonesia		puluh delapan Rupiah) dan JPN ¥ 865.279.268,- (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan Yen)	pihak. Saat ini masih proses persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
6	Permohonan Arbitrase dengan nomor register 718/VI/ARB-BANI/2015 antara PPK 04 kegiatan pembangunan jalan jalan dalam kota Pontianak – Tayan sebagai Termohon melawan Emiten Divisi Regional Timur sebagai Pemohon.	Pemohon	Pemohon mengajukan tuntutan agar membayar Biaya Iddle Alat, Perbaikan Cross Fall, Overhead, Biaya Perubahan Design dan biaya pekerjaan tambah sebesar Rp.72.813.123.228,46	Putusan BANI No. 718/IV/ARB-BANI/2015 tanggal 11 April 2016, yang amar putusannya menyatakan Mewajibkan Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar Rp. 50.719.444.000,- termasuk PPN 10% dan mengembalikan biaya BANI Rp. 499.450.000 Tanggal 27 mei 2016 oleh Termohon mengajukan permohonan Pembatalan Putusan BANI . Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.56/Pdt.G-ARB/PN.PTK tanggal 22 Agustus 2016 yang isinya menolak permohonan pemohon seluruhnya. Tanggal 03 Oktober 2016 Termohon mengajukan Kasasi dan pada tanggal 14 Oktober 2016, Pemohon mengajukan kontra memori kasasi dan sampai dengan saat ini masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
7	Permohonan Arbitrase dengan nomor register: 795/II/ARB-BANI/2016 tanggal 2 Februari 2016 dengan PT. Waskita Karya (Persero) dan PT. Jakarta Prima Cranes yang tergabung dalam Konsorsium Waskita-JPC sebagai pemohon dan Termohon : PT Suprabari Mapanindo Mineral	Pemohon	Pemohon mengajukan tuntutan Pembayaran atas pekerjaan Emergency Spillway dan Toe Drain sebesar USD 31.086.851,46	Perbuatan Wanprestasi Termohon kepada Pemohon berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran progress pekerjaan dalam proyek pengembangan prasarana pertambangan batubara. Termohon secara sepihak telah memutuskan kontrak dengan Pemohon, yang mana proyek yang dikerjakan Pemohon sudah sampai 94,72%. Dengan diputusnya kontrak secara sepihak oleh Termohon dan tidak dibayarnya tagihan bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, yang mana menyebabkan Pemohon mengalami kerugian. Sampai dengan saat ini masih dalam proses persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
8	Perkara Perdata dengan nomor perkara 468/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 17 November	Turut Tergugat II	Penggugat mengajukan tuntutan sebesar Rp. 32.100.000.000 (tiga	Bahwa dengan adanya pembangunan TOL BECAKAYU diatas tanah Penggugat selaku ahli waris. Penggugat

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materii/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	<p>2016 terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Ahli Waris Muhammad Ba"at (penggugat) kepada para Tergugat, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Tol Becakayu (Tergugat I) 2. Pemprov DKI Jakarta cq Pemkot Administrasi Jakarta Timur cq Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (Tergugat II) 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian PUPERA Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq Perum Jasa Tirta II (Tergugat III) 4. Pemerintah RI cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kepala Agraria/BPN Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat I) 5. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Turut Tergugat II) 		<p>puluh dua miliar seratus juta Rupiah).</p>	<p>mengajukan permohonan gugatan perbuatan melawan hukum lewat kuasa hukumnya. yang mana sampai saat ini sedang dalam proses penyerahan replik dari Penggugat pada tanggal 05 April 2017.</p>
9	<p>Registrasi Nomor Perkara 357/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Desember 2016 atas Perkara Perselisihan Hubungan Industril yang diajukan oleh Purna Karyawan Perseroan, dengan Manuasa Butar – Butar Cs sebagai Para Penggugat dan PT Waskita Karya (Persero), Tbk sebagai Tergugat.</p>	Tergugat	<p>Bahwa Para Penggugat meminta ganti kerugian Materii sebesar Rp.1.578.409.415, (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh Rupiah) serta ganti kerugian Immaterii Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah)</p>	<p>Bahwa atas perkara yang terjadi antara Para Penggugat dengan Pihak Tergugat terkait Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut atas Upah, Uang Jasa, Ganti Kerugian, Ongkos Pulang, Jamsostek, dan Penggantian fasilitas pengobatan, perawatan dan perumahan tidak memberikan hak-hak, yang mana menurut Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri No. Per-04/MEN/1986 dan Peraturan Menteri No. Per-03/MEN/1996 serta Peraturan Perusahaan Tergugat yang mana menurut Penggugat I-IV periode tahun 1993 sampai dengan 1995 serta Peraturan Perusahaan periode Tahun 1995-1997. Sampai saat ini Penggugat I-IV dan Tergugat sedang akan menjalankan</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
				Sidang pertama di Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 19 Januari 2017. Dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi penggugat dan tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial.
10	<p>Perkara Perdata dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ti m tanggal 30 Januari 2017 terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Ahli Waris Berlin Saragih Manihuruk (Penggugat) kepada Para Tergugat, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Marzuki (Tergugat I) 2. Kementerian Pupera Cq Dirjen SDA (Tergugat II) 3. Pemrov DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur Cq Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum /P2T (Tergugat III) 4. Perum Jasa Tirta II (Tergugat IV) 5. BPN cq Kantor Pertanahan Jakarta Timur (Tergugat V) 6. Pemprov DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur cq Kecamatan Makassar (Tergugat VI) 7. Pemprov DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur cq Kelurahan Cipinang Melayu (Tergugat VII) 8. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Tergugat VIII) 	Tergugat VIII	Penggugat menuntut objek perkara adalah milik sah dari Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Berlin Saragih	Perkara ini bermula dari pembangunan Ruas Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), yang mana Penggugat mengklaim bahwa tanah miliknya seluas 650 m2 (enam ratus lima puluh meter persegi) , yang mana pecahan dari Girik No. 015219 No. C. 906 Jabar No. 496, yang terletak di pangkalan jati RT 01/RW 13 , Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makassar, Jakarta Timur merupakan kepemilikan ahli waris yang sah Alm. Berlin Saragih Manihuruk. Dengan dampak pekerjaan tol Becakayu, yang mana sampai dengan saat ini belum diberikan ganti rugi atas pembebasan lahan serta dampak akibat pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat VIII selaku Pihak Kontraktor dalam proyek ini, mengakibatkan kerugian berupa bangunan fisik yang berdiri diatas tanah aquo menjadi rusak. Maka dengan tidak di temukan solusi antara para pihak, dengan itu Penggugat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Timur. Proses hingga tanggal 04 April 2017, masih dengan sidang pembacaan gugatan.
11	<p>Perkara Perdata dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2017/PN.GSK. Tim tanggal 22 Mei 2017 terkait gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT. Platinum Ceramics Industri (Penggugat) kepada Para Tergugat, diantaranya :</p>	Turut Tergugat	Penggugat berasumsi bahwa pengadaan tanah untuk proyek tol Krian Legundi Bunder tidak sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku karena besaran nilai pengganti dianggap tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga pasar.	Sidang Pertama diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2017, yang mana sampai saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1.	Pemerintah Republik Indonesia qq Menteri Pekerjaan Umum qq Direktur Jenderal Bina Marga qq Ketua Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder (Tergugat I)			
2.	Pemerintah Republik Indonesia qq Menteri Dalam Negeri qq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia qq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur qq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Ruas Krian-Legundi-Bunder (Tergugat II)			
3.	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk melalui Direktur Utama selaku Pelaksana Pembangunan Jalan Tol Ruas Krian-Legundi-Bunder (Turut Tergugat)			

Perseroan menyatakan bahwa Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dan/atau tercatat dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, arbitrase, tata usaha negara maupun perburuhan, kecuali atas perkara-perkara yang diungkapkan dalam Prospektus, atas perkara-perkara yang melibatkan Perseroan menjadi pihak didalamnya, apabila diasumsikan perkara-perkara tersebut saat ini telah diputus dengan putusan yang mengalahkan Perseroan dan kemudian hanya melihat kemampuan finansial berdasarkan laporan keuangan Perseroan saat ini, perkara tersebut tidak berdampak secara material dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa saat ini perkara-perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap dan masih dalam proses persidangan bahkan hingga saat ini juga belum terdapat suatu putusan apapun dari Pengadilan yang bersangkutan, sehingga menurut Perseroan belum terdapat fakta-fakta yang relevan yang dapat mendukung apakah Perseroan akan dikalahkan dalam perkara tersebut.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERKARA-PERKARA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS TIDAK BERDAMPAK SECARA MATERIAL DAN TIDAK DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA PENAWARAN UMUM INI.

Nama	Perseroan	WKE	WTR	WSBP	WKR
Agus Wantoro	-	-	-	D	-
Didit Oemar Prihadi	-	-	-	D	-
Luki Theta Handayani	-	-	-	-	D
Bambang Budiono	-	-	-	-	D
Deddy Jevri Sitorus	-	-	-	KI	-
Suhedro Bakri	-	-	-	KI	-
Tukijo	-	-	-	-	DU
Sukmawati Sukarno	-	-	-	-	K
Allan May Nasution	-	D	-	-	-
Tri Hartanto	-	-	-	-	D

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	K	: Komisaris
KI	: Komisaris Independen	DU	: Direktur Utama
D	: Direktur	DI	: Direktur Independen

8.13. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN ENTITAS ASOSIASI

1. PT Waskita Beton Precast (“WSBP”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

WSBP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 07 Oktober 2014 (“Akta Pendirian WSBP No. 10/2014”) , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 55 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110448 tanggal 21 Desember 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0152963.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, dimana para pemegang saham menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sehubungan dengan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana WSBP sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar (“Akta No. 55/2016”) dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055642 tanggal 9 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU- 0070780.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 jo. Akta No. 117 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062537 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU- 0080937.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.04.1.46.40288 tanggal 5 Agustus 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Berita Acara Rapat No. 20 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., dimana para pemegang saham menyetujui perubahan Direksi berdasarkan surat keterangan No. 20/ket/Not//2017 tanggal 31 Januari 2017 Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang mana belum diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan belum diterimanya pemberitahuan perubahan data perseroan maka sesuai dengan pasal 23 ayat 3 UUPT perubahan Data perseroan tersebut belum berlaku efektif (“Akta No. 20/2017”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Kandidat Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0017067.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0102648.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017.

WSBP melakukan usaha di bidang industri pabrikan, industri konstruksi, jasa, pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Construction : EPC), perdagangan, agro industry, jasa penyewaan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WSBP telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 01294-05/PB/P/1.824.271 tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dineas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta yang wajib didaftar ulang pada tanggal 29 Oktober 2019.

WSBP beralamat di:

Gedung Teraskita Lt. 3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav.10A, Cawang, Jakarta 13340.
Telepon: 021-29838020
Faksmili: 021-29838025

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 61 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0162623 tanggal 15 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100787.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017 susunan anggota Direksi dan Komisaris WSBP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Jarot Subana
Direktur : A Yulianto Tyas Nugroho
Direktur : Agus Wantoro
Direktur Independen : MC Budi Setyono
Direktur : Didit Oemar Pribadi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tunggal Rajagukguk
Komisaris : Agus Sugiono
Komisaris Independen : Abdul Ghofarozin
Komisaris Independen : Suhendro Bakri

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 55 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110448 tanggal 21 Desember 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0152963.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, struktur permodalan WSBP dan susunan pemegang saham WSBP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	63.266.778.136	6.326.677.813.600	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- Perseroan	15.816.680.599	1.581.668.059.900	59,99
- Koperasi Waskita	13.935	1.393.500	0,01
- Masyarakat	10.544.463.000	1.054.446.300.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	26.361.157.534	2.636.115.753.400	100,00
Saham Dalam Portepel	36.905.620.602	3.690.562.060.200	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting WSBP yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan WSBP untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan WSBP untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan WSBP untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 02 Februari 2017.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Jumlah Aset	13.808.135		13.734.267	4.332.409
Jumlah Liabilitas	6.523.324		6.328.766.	3.001.583
Jumlah Ekuitas	7.284.811		7.405.501	1.330.826

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016 (Tidak diaudit)	2016	2015
Pendapatan Operasional	1.281.415	705.867	4.717.150	2.644.320
Beban Operasional	(877.809)	(481.726)	(3.667.088)	(2.224.890)
Laba (Rugi) Operasional	340.606	224.141	1.050.062	419.430

2. PT Waskita Toll Road (“WTR”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

WTR didirikan berdasarkan Akta No. 62 tanggal 19 Juni 2014 di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah menerima pengesahan badan hukum dari Kemenkumham No.AHU-14734.40.10.2014 tahun 2014 tanggal 25 Juni 2014. Perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta No. 18 tanggal 14 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-004.2139.AH.01.01 tanggal 30 Maret 2017 dan perubahan terakhir Anggaran Dasar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 04 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Dastie Kanya Dasril, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135931 tanggal 15 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061727.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017, dimana para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dan modal di tempatkan perseroan.

WTR melakukan usaha dibidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

WTR memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 1428/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015 tertanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur, yang wajib untuk melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 2 Maret 2020.

WTR beralamat di:

Gedung Dafam Teraskita Lantai 3A.
 JL. MT. Haryono Kav.10 RT 011/ RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
 No. Telp: 021-851556
 Faksimili:021-850854

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler pengganti RUPSLB No. 26 tanggal 22 September 2016 yang dibuat di hadapan Catur Virgo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0082865 tanggal 23 September 2016, serta telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111610.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 23 September 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris WTR pada tanggal prospectus adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto
 Direktur : Feri Purwandi Seno
 Direktur : Mokh. Sadali
 Direktur : Purma Yose Rizal
 Direktur : Joko W. Widodo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendriato Notosoegono
 Komisaris : Tunggul Rajagukguk

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 04 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Dastie Kanya Dasril, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135931 tanggal 15 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061727.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017, struktur permodalan WTR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- Perseroan	6.567.246	6.567.246.000.000	72,63%
- PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	14,61%
- PT Sarana Multi Infrastruktur	1.153.511	1.153.511.000.000	12,76%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	9.042.148	9.042.148.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	22.776.676	22.776.676.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting WTR yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan WTR untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan WTR untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan WTR untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Jumlah Aset	27.552.910	22.591.872	22.591.872	9.515.305
Jumlah Liabilitas	18.064.492	16.425.398	16.425.398	4.417.441
Jumlah Ekuitas	9.488.418	6.166.474	6.166.474	5.097.864

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan Operasional	2.705.923	645.215	5.265.608	577.761
Beban Operasional	(2.663.202)	(636.767)	(5.163.577)	(564.826)
Laba (Rugi) Operasional	42.721	8.448	102.031	(12.935)

3. PT Waskita Karya Realty ("WKR")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Waskita Karya Realty ("WKR"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 27 tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar mana telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-34282.40.10.2014 tanggal 13 November 2014 dan telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 9 tanggal 13 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Maria Gunarti S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, dalam rangka persetujuan dan pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Akta Perubahan ini

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-014.6750 tanggal 16 Juni 2017.

WKR bergerak di bidang usaha properti/realiti.

SIUP Nomor 26416/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur. TDP Nomor 09.04.1.68.40566 tertanggal 30 September 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur.

WKR beralamat di:

Gedung Waskita Lt.2, Jl. MT. Haryono Kav.10 RT 011/ RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
Telepon: 021-8505049
Faksmili: 021-8198070

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Komisaris WKR adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ir. Tukijo, M.M
Direktur : Ir. Luki Theta Handayani
Direktur : Bambang Budiono, Ak., M.M

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Adi Wibowo
Komisaris : Ir. Tunggul Rajagukguk, M.M
Komisaris : Sukmawati Soekarnoputri

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 08 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat di hadapan yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0956835 tanggal 13 Agustus 2015. struktur permodalan WKR dan susunan pemegang saham WKR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- Perseroan	2.057.361	2.057.361.000.000	99,99
- Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.057.362	2.057.362.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	942.638	942.638.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting WKR yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan WKR untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan WKR untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan WKR untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 3 Februari 2017.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Jumlah Aset	2.477.196		2.294.171	1.196.507
Jumlah Liabilitas	341.581		167.835	29.723
Jumlah Ekuitas	2.135.615		2.126.336	1.166.784

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan Operasional	29.653	-	45.366	-
Beban Operasional	(23.397)	-	(29.025)	-
Laba (Rugi) Operasional	6.256	-	16.341	-

4. PT Waskita Karya Energi ("WKE")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Waskita Karya Energi ("WKE"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian No. 05 tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-0019486.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan tertanggal 15 April 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047853.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 15 April 2016. Sampai dengan saat ini Anggaran Dasar WKE tidak mengalami perubahan, kecuali : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 24 tanggal 29 Desember 2016, yang di buat dihadapan Kokoh Henry, SH, M.kn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0000418.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001942.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017, yang mana para pemegang saham menyetujui meningkatkan modal dasar WKE serta peningkatan modal disetor dan ditempatkan melalui inbreng, sehingga merubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar WKE.

WKE bergerak di bidang Industri, jasa dan perdagangan.

WKE sedang melakukan pengurusan atas izin-izin dan/atau pendaftaran yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta No. 12/KET/NOT/III/2016 perihal SIUP dan TDP pada tanggal 15 Maret 2016.

WKE beralamat di:

Jalan MT. Haryono Kav. No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.
No. Telp: 021 8515550
Faksimili: 021 8515510

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 19 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Kokoh Henry, SH, M,kn Notaris di Jakarta Timur dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0095816 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 November 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131089.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 03 November 2016, susunan anggota Direksi dan Komisaris WKR adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Agus Gunawan
Direktur : Hokkop Tua Immanuel Situngkir

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Agus Sugiono
Komisaris : Widiarto

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 24 tanggal 29 Desember 2016, yang di buat dihadapan Kokoh Henry, SH, M.kn, Notaris di kota Administrasi Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0000418.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001942.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017, struktur permodalan WKE dan susunan pemegang saham WKE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	258.004	258.004.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- Perseroan	64.500	64.500.000.000	99,99
- Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	64.501	64.501.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	193.503	193.503.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting WKE yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan WKE untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan WKE untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Ery & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan WKE untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, auditor independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi untuk semua hal yang material, dalam laporannya tertanggal 3 Februari 2017.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Jumlah Aset	355.137	336.651	-	-
Jumlah Liabilitas	256.417	242.619	-	-
Jumlah Ekuitas	98.720	94.032	-	-

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016 (Tidak diaudit)	2016	2015
Pendapatan Operasional	28.531	13.265	-	-
Beban Operasional	(14/549)	(13.265)	-	-
Laba (Rugi) Operasional	13.982	-	-	-

KONTRIBUSI PENDAPATAN, LABA RUGI, TOTAL ASET, DAN TOTAL LIABILITAS ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI TERHADAP PERSEROAN

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	% Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan	Kontribusi terhadap Laba Bersih Perseroan	Kontribusi terhadap Total Aset Perseroan	Kontribusi terhadap Total Liabilitas Perseroan
Entitas Anak Langsung										
1.	PT Waskita Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	72,63%	2014	sudah beroperasi	-	0,92%	-23,45%	40,45%	37,59%
2.	PT Waskita Beton Precast Tbk	Industri pabrikan	59,99%	2014	sudah beroperasi	-	0,93%	42,67%	20,27%	13,60%
3.	PT Waskita Karya Realty	Properti	99,99%	2015	sudah beroperasi	-	0,37%	2,18%	3,65%	0,73%
4.	PT Waskita Karya Energi	Energi	99,99%	2016	dalam tahap pengembangan	-	0,12%	-0,92%	0,48%	0,54%
Entitas Anak Tidak Langsung										
1.	PT Waskita Sangir Energi	Energi	85,00%	2016	sudah beroperasi	WKE	0,12%	n/a	n/a	n/a
2.	PT Pejagan Pemalang Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%**	2016	sudah beroperasi	PT Waskita Transjawa Toll Road	8,78%	n/a	n/a	n/a
3.	PT Waskita Bumi Wira	Pengusahaan Jalan Tol	55,00%*	2014	belum beroperasi	WTR	3,66%	n/a	n/a	n/a
4.	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Pengusahaan Jalan Tol	90,00%*	2015	belum beroperasi	WTR	0,81%	n/a	n/a	n/a
5.	PT Waskita Transjawa Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%*	2015	sudah beroperasi	WTR	9,02%	n/a	n/a	n/a
6.	PT Trans Jabar Tol	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%*	2015	belum beroperasi	WTR	1,54%	n/a	n/a	n/a
7.	PT Semesta Marga Raya	Pengusahaan Jalan Tol	77,69%**	2010	sudah beroperasi	PT Waskita Transjawa Toll Road	0,58%	n/a	n/a	n/a
8.	PT Waskita Bali Mandara	Industri Pabrikan	75,00%*	2015	belum beroperasi	WTR	0,00%	n/a	n/a	n/a
9.	PT Pemalang Batang Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%*	2016	belum beroperasi	WTR	0,24%	n/a	n/a	n/a
10.	PT Sriwijaya Markmore Persada	Pengusahaan Jalan Tol	98,00%*	2016	belum beroperasi	WTR	4,36%	n/a	n/a	n/a
11.	PT Tol Teluk Balikpapan	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%*	2016	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
12.	PT Waskita Wado Energi	Energi	99,95%	2016	belum beroperasi	WKE	0,00%	n/a	n/a	n/a
13.	PT Transjawa Paspro	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%**	2017	belum beroperasi	WTR	3,08%	n/a	n/a	n/a
14.	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Pengusahaan Jalan Tol	55,00%*	2017	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
Entitas Asosiasi										
1.	PT Solo Ngawi Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	40,00%*	2015	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	PT Cinere Serpong Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	35,00%*	2015	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	PT Ngawi Kertosono Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	40,00%*	2015	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Pengusahaan Jalan Tol	98,97%*	2014	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	PT Jasamarga Semarang Batang	Pengusahaan Jalan Tol	40,00%*	2016	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
6.	PT Hutama Marga Waskita	Pengusahaan Jalan Tol	30,00%*	2017	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
7.	PT Citra Waspputowa	Pengusahaan Jalan Tol	25,00%*	2016	belum beroperasi	WTR, Perseroan	n/a	n/a	n/a	n/a
8.	PT Citra Karya Jabar Tol	Pengusahaan Jalan Tol	15,00%*	2016	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a
9.	PT Prima Multi Terminal	Perdagangan dan Jasa	20,00%***	2014	belum beroperasi	Perseroan	n/a	n/a	n/a	n/a
10.	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Pengusahaan Jalan Tol	30,00%*	2014	belum beroperasi	WTR	n/a	n/a	n/a	n/a

Ket: *) Persentase kepemilikan Perseroan melalui WTR

**) Presentase Kepemilikan Perseroan melalui PT Waskita Transjawa Toll Road.

***) Presentase Kepemilikan Perseroan

Pemahaman mengenai definisi “belum beroperasi” adalah “dalam masa proses pembangunan konstruksi”. Pendapatan usaha yang diperoleh dari Entitas yang belum beroperasi adalah pendapatan konstruksi yang diakui di badan usaha jalan tol, baik Entitas Anak Tidak Langsung maupun Entitas Asosiasi, sesuai ISAK 16.

Persentase kontribusi laba bersih, total aset dan total liabilitas Entitas Anak Tidak Langsung sudah terkonsolidasi pada laporan keuangan Entitas Anak Langsung Perseroan sementara keterangan mengenai tidak tersedianya persentase kontribusi laba bersih, total aset dan total liabilitas Entitas Asosiasi terhadap Perseroan dikarenakan oleh kepemilikan minoritas tidak terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perseroan.

8.14. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

8.14.1. Kegiatan Usaha Utama dan Proses Bisnisnya

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah Jasa Konstruksi. Dalam menjalankan usahanya dan melalui keahlian tenaga kerjanya dan kemampuan multi-disiplinnya. Perseroan menyediakan berbagai jasa dan memberikan solusi kepada kliennya untuk setiap tahapan kegiatan proyek yang dimiliki oleh klien.

Adapun kontribusi penjualan masing-masing unit usaha Perseroan terhadap total pendapatan usaha Perseroan tahun 2015, 2016 dan Triwulan I 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pendapatan Usaha	Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017**		2016		2015	
	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%
Jasa Konstruksi	6.964,57	97,51	22.373,18	94,05	12.041,43	85,08
Penjualan <i>Precast</i> *	68,53	0,95	1.148,47	4,83	2.068,57	14,62
Pendapatan Jalan Tol	67,68	0,94	218,05	0,92	31,79	0,22
Properti dan Hotel*	29,56	0,41	45,41	0,19	10,34	0,07
Energi	8,79	0,12	1,82	0,01	0,00	0,00
Sewa Gedung	2,67	0,03	1,40	0,01	0,62	0,00
Jumlah Bersih	7.141,80	100,00	23.788,32	100,00	14.152,75	100,00

*sudah menjadi entitas anak WSBP dan WKR pada tahun 2015

** Laporan Keuangan Triwulan I (Unaudited)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, divisi precast dan divisi properti telah menjadi Entitas Anak.

Jasa Konstruksi

Perseroan menjalankan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan konstruksi sesuai perjanjian. Segmen usaha jasa konstruksi yang diperoleh berasal dari berbagai kegiatan usaha yaitu prasarana transportasi, konstruksi gedung, bangunan sumber daya air dan ketenagaan, serta rancang bangun.

Proses Pengendalian Mutu

Perseroan menjalankan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan jasa konstruksi yang memadai dan telah melewati proses pengendalian mutu dan memperoleh pengakuan dari beberapa lembaga atau institusi atas produk jasa konstruksi yang dihasilkan dengan keterangan sebagai berikut

No.	Sertifikasi dan Hak Paten	Lembaga	Tahun
1	ISO 9001 : 2000	Societe Generale de Surveillance	2000
2	ISO 14001 : 2004	Societe Generale de Surveillance	2004
3	Surat Pendaftaran Ciptaan No. 024536	Dirjen Hak Kekayaan Intelektual	2004
4	Sertifikat Merek "Waskita" No. IDM000029288	Dirjen Hak Kekayaan Intelektual	2005
5	Sertifikat Proyek Konstruksi Jalan Tol Terbaik	PT Jasa Marga (Persero)	2006
6	Sertifikat OHSAS 18001:2007 No. ID05/0629	Societe Generale de Surveillance	2007
7	Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3L	Sucofindo	2007/ 2011
8	Sertifikat Paten No. ID P 0023301 atas investasi "Sistem dan Peralatan Payung Elektrik"	Dirjen Hak Kekayaan Intelektual	2009
9	Sertifikat Paten No. P00200700454 atas investasi "Sistem dan Peralatan Bekisting Gelincir Terowongan"	Dirjen Hak Kekayaan Intelektual	2012
10	Sertifikat GOLD Green Building	Green Building Council Indonesia	2015

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mencatatkan kinerja segmen usaha jasa konstruksi sebesar Rp6.964 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 144,26% atau Rp4.113 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp2.851 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kontribusi dari proyek-proyek investasi Perseroan. Beberapa proyek jasa konstruksi yang sedang berjalan selama 2 (dua) tahun terakhir dan berkontribusi terhadap pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut

No.	Nama Proyek	Nilai Kontrak
1	Tol Pejagan - Pemalang Seksi 4 / Pejagan - Pemalang Toll Road Section 4	1.824.842
2	Tol Pemalang Batang Paket 1 (STA 330+00-STA 369+196)	1.051.341
3	Tol Pemalang Batang Paket 2 (STA 330+00-STA 336+500)	438.178
4	Tol Pemalang Batang Paket 4 (STA 359+660-STA 369+196)	644.458
5	Tol Kayu Agung	2.207.000
6	Batang - Semarang	2.440.167
7	Tol Cibitung - Cimanggis Seksi II	3.591.327

No.	Nama Proyek	Nilai Kontrak
8	Tol Bocimi Seksi 2	1.623.190
9	Tol Bocimi Seksi 3	1.652.983
10	Tol Bocimi Seksi 4	1.724.233
11	Batang - Semarang	3.398.698
12	Jembatan Musi	402.772
13	Fas.R.Tunggu, Term.Domst Ngurah Rai	59.276
14	Integrasi Blok D-10-2 Rusun W.Atllet	624.444
15	Integrasi Blok C2-2 Rusun W.Atllet	371.062
16	Tol Kayu Agung	4.859.177
17	LRT	11.047.885
18	Rusun Pasar Rumput	837.745
19	Aquatic, Kemenpupera	249.705
20	Gardu Listrik AP II	202.623
21	Tol Kapal Betung paket 4	2.909.091
22	Turap Siak Pasar Lama - Tahap III	35.335
23	Jalan Tol Terbanggi - Kayu Agung	2.288.717
24	Jln KA Lintas Sltm Jawa Jombang - Madiun	83.666
25	Pemb. Fasilitas Kapal Selam PAL Paket B-2	201.364
26	Pemb. Gedung Pusat Jantung Terpadu RS. Sardjito	53.724
27	Pemb. Gedung Utility RS. Jantung Harapan Kita	53.959
28	Belawan Port Project Phase I	621.698
29	Pembangunan Jalan Kali Kenyam Atas	58.195
30	Pasuruan - Probolinggo	2.925.435
31	Tol Semarang - Solo - Katosuro	2.453.704
32	Tol Legundi - Bunder	3.279.113
33	Air Limbah Kota Denpasar Tahap III (Prajaraksaka)	71.272
34	Pemb. Pengendali Sedimen Gn. Gamalama Tahap 4	44.137
35	Pemb. Irigasi Akelamo Tahap 3	43.628
36	RS Ansari Saleh Tahap V	88.850
37	Gedung II DPR Papua Tahap I	65.869
38	SPAM Malay Kaltim	159.199
39	Mako Polda Papua Barat	88.039

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki keperluan investasi yang material pada produk-produk yang dihasilkan oleh sektor Jasa Konstruksi.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki rencana pengembangan produk-produk baru dari sektor Jasa Konstruksi yang akan ditawarkan oleh Perseroan.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan memiliki HAKI atas beberapa produk Perseroan dalam sektor Jasa Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Aset/Produk	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Pemilik Sertifikat
1	Sistem Peralatan Payung Elektrik	Hak Paten	ID P 0023301	21 April 2009	Perseroan
2	Sistem Peralatan Bekisting Gelincir Terowongan	Hak Paten	ID P 0031392	26 Juli 2012	Perseroan
3	Sistem dan Peralatan Payung Elektrik	Hak Cipta	No. 024536	31 Maret 2004	Perseroan
4	Sistem dan Peralatan Payung Elektrik	Hak Merek	IDM 000029288	8 Februari 2008	Perseroan

Kepemilikan HAKI dalam aset/produk Perseroan memiliki peran penting untuk menunjukkan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan jika dibandingkan dengan pesaing.

Penjualan Precast

Perseroan telah memiliki lini usaha produksi Beton Precast dan Readymix yang berawal dari Unit Usaha Precast yang didirikan pada tahun 2013. Unit usaha ini dianggap sebagai awal bisnis Beton Perseroan ke depan. Melihat besarnya kebutuhan Perseroan akan Beton Precast dan Readymix serta meningkatnya kebutuhan pasar, Unit Usaha ini berkembang menjadi anak perusahaan yang berdiri sendiri pada bulan Oktober tahun 2014 dengan nama PT Waskita Beton Precast Tbk.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, divisi precast telah menjadi Entitas Anak WSBP yang penjelasannya dapat dilihat pada bab keterangan tentang Perseroan, sub bab keterangan singkat mengenai entitas anak.

Setelah 2 tahun berdiri, pada bulan September 2016 WSBP melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) dengan melepas saham kepada publik sebesar 40%.

WSBP berkedudukan di Jakarta melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang Pemasaran, Produksi, Desain dan Pengembangan Beton Precast dan Readymix. Hingga saat ini WSBP memproduksi Box Girder, PCT Girder, PCI Girder, PCU Girder, Square Pile, Spun Pile, RC Plate, Barrier, Full slab, Half slab, Voided Slab, U ditch, CCSP, L Gutter, U Gutter, FCSP, dan *diafragma wall*.

WSBP telah mendukung pengerjaan pada berbagai macam proyek antara lain tol Nusa Dua-Bali, Jembatan Kapuk Naga Indah-Jakarta, Jembatan Gempol-Pasuruan, Jalan Tol Porong-Gempol-Pasuruan, Normalisasi Kali Pesanggrahan-Jakarta, Drainase Banyu Urip-Surabaya; dan beberapa proyek yang berjalan hingga tahun 2017 adalah proyek Tol Becakayu, LRT Palembang, Tol Krian-Legundi-Bunder, Tol Solo Kertosono, Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi), Fly over Adam Malik, Tol Pasuruan Probolinggo (Paspro), proyek elevated Jakarta Cikampek (Japek) II, serta beberapa proyek besar lainnya yang ditangani oleh Perseroan.

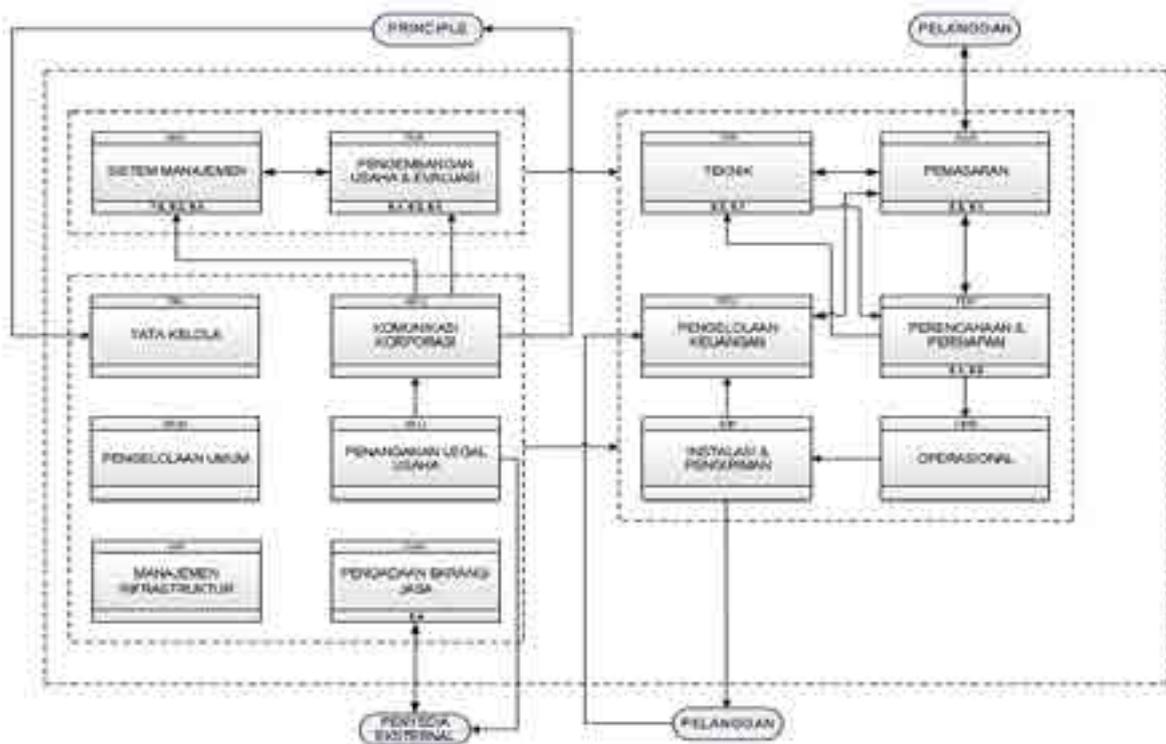
Perseroan juga memperoleh pengakuan dari beberapa lembaga atau institusi atas produk precast yang dihasilkan seperti:

- OHSAS 18001:2007 diberikan oleh SUCOFINDO
- SMK3 diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI
- ISO 9001 :2008 Diberikan oleh Lloyds Quality Assurance
- *Best Mid cap Equity Deal of the year 2016*
- *Certificate of Listing in Bursa Efek Indonesia* diberikan oleh Bursa efek indonesia
- *Corporate image award in Precast Concrete Product Manufacture Category*, diberikan tempo media group

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, volume produksi precast mencapai rata-rata 1.361.194 ton/tahun. Penjualan precast mencatat pertumbuhan, dari Rp2,17 Triliun di tahun 2015 menjadi Rp3,01 triliun di tahun 2016 atau naik sebesar 39%. Penjualan readymix juga mencatat pertumbuhan 472,42 milyar pada tahun 2015 menjadi Rp1,71 Triliun pada tahun 2016.

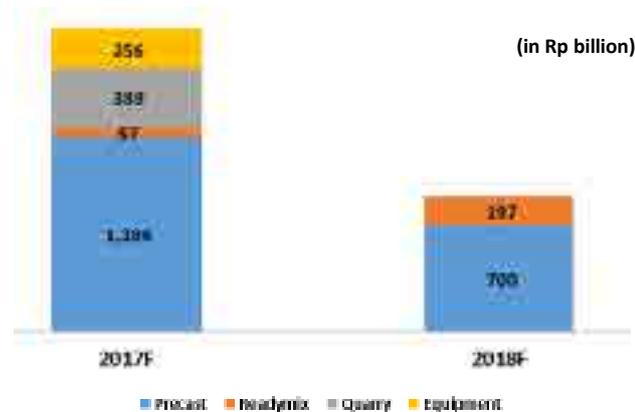
Proses Bisnis dan Pengendalian Mutu

WSBP memiliki proses bisnis yang saling terintegrasi di dalam mengoperasikan dan membangun bisnis demi memberikan nilai tambah bagi para stakeholders termasuk pelanggan. WSBP menerapkan proses bisnis sebagai berikut:



Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki keperluan investasi yang material sebagaimana dijabarkan berikut:

WSBP Plan in Capital Expenditure



(Rp miliar)	2017F	2018F
Precast	1.286	700
Readymix	67	197
Quarry	389	-
Equipment	256	-
Total	1.998	897

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa rencana pengembangan produk-produk baru dari bisnis penjualan precast yang akan ditawarkan oleh Perseroan, di antaranya adalah:

1. Bantalan Jalan Rel Kereta Api: produk beton berbentuk balok pendek yang digunakan untuk bantalan rel kereta api
2. Façade: dinding precast, sebagai sisi luar dari suatu bangunan
3. SprigWP: (Sistem Perkerasan Rigid Waskita Precast), Suatu inovasi baru perkerasan kaku beton bertulang menerus (continuously Reinforced Concrete Pavement/CRCP) dengan Pratekan Unbonded (Prestress Concrete Pavement/PCP) yang dibuat dalam bentuk modul panel-panel pracetak. Panel-panel pracetak yang disusun menjadi perkerasan kaku menerus ini menggunakan suatu sistem sambungan khusus hasil inovasi terbaru yang disebut dengan dowel aktifator
4. Tiang Listrik Beton: dibuat secara khusus hingga melalui uji teknis dari PLN selaku pemilik pekerjaan jaringan listrik pada umumnya

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan masih dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi HAKI atas produk precast SprigWP. Kepemilikan HAKI dalam aset/produk Perseroan memiliki peran penting untuk mengamankan kekayaan Perseroan, baik dari sisi ekonomi maupun teknologi. Selain itu, produk-produk yang diproduksi oleh Perseroan merupakan produk umum yang jamak digunakan dan telah lolos uji.

Operator Jalan Tol

Sektor jalan tol merupakan salah satu sektor prioritas di industri infrastruktur. Pembangunan di sektor ini krusial untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya. Melihat potensi tersebut pada awal tahun 2014 Perseroan melakukan investasi sebesar 12,50% di CW dan 15,00% di JMKT yang merupakan pemegang konsesi jalan tol Depok – Antasari dan Medan – Kualanamu – Bukit Tinggi. Setelah itu pada tanggal 19 Juni 2014 Perseroan mendirikan WTR yang secara khusus membidangi investasi jalan tol di Indonesia.

WTR merupakan perusahaan jalan tol yang memiliki pertumbuhan yang cepat saat ini di Indonesia. Sejak didirikan di tahun 2014, WTR terus berkembang di dalam pengusahaan jalan tol. Saat ini, WTR memiliki 12 ruas yang sedang dibangun dengan total 515,4 km. Strategi WTR dalam pengembangan usaha antara lain dengan melakukan akuisisi atas ruas-ruas jalan tol, terutama di daerah yang memiliki potensi pertumbuhan volume lalu

lintas (seperti ruas jalan tol yang merupakan bagian dari Trans Jawa dan yang terletak di Jabodetabek), berpartisipasi dalam ruas jalan tol baru yang sedang ditenderkan oleh Pemerintah dan melakukan inisiasi dan mengusulkan proyek-proyek jalan tol baru kepada Pemerintah (Proyek prakarsa). Pertumbuhan WTR dipengusahaan jalan tol akan didukung oleh Perseroan yang memiliki pengalaman di pembangunan jalan tol.

Proses Pengendalian Mutu

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengendalian mutu yang secara spesifik mengatur perihal bisnis operator jalan tol. Pengendalian mutu pada konstruksi gedung maupun jalan tol ditempatkan pada standar yang sama pada pengendalian mutu konstruksi yang dimiliki Perseroan secara umum dikarenakan pembangunan jalan tol termasuk dalam satu *core* kompetensi Perseroan yaitu konstruksi/pembangunan.

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, volume pendapatan Perseroan dari bisnis operator jalan tol mencapai rata-rata 22 miliar Rupiah per bulan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 237% atau Rp13 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp9 miliar rupiah.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki keperluan investasi yang material pada kebutuhan investasi bisnis operator jalan tol.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki rencana pengembangan produk-produk baru dari bisnis operator jalan tol.

Penjelasan mengenai WTR dapat dilihat pada bab keterangan tentang Perseroan, sub bab keterangan singkat mengenai entitas anak.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui anak usahanya yaitu WTR telah memiliki 18 konsesi jalan tol di Jawa dan Sumatera

Properti/Realty

Merupakan salah satu kegiatan Perseroan dalam melakukan kegiatan penjualan tanah kavling dan rumah siap huni di Perumahan Bukit Dipgoro, Semarang, Griya Taman Asri, Jogjakarta. Selanjutnya, sejak Agustus 2012 usaha Properti Perseroan dilaksanakan oleh Divisi Realty. Divisi tersebut menangani pengembangan tanah meliputi pengadaan tanah, perijinan, perencanaan, pemasaran, pembangunan sampai dengan operasional gedung. Tahap awal Divisi Realty akan mengoptimalkan aset Perseroan, melakukan kerjasama optimalisasi aset Perseroan lain serta mengembangkan properti di lahan yang strategis diantaranya:

- Optimalisasi aset Jl. M.T Haryono Kav. No. 10 A – Cawang, Jakarta Timur
Luas tanah adalah sebesar 3.650 m², dimiliki oleh Perseroan. Perseroan berencana untuk mengembangkan tanah tersebut sebagai Perkantoran, Apartemen atau Kondotel.
- Pengembangan tanah di Sutera Boulevard, Alam Sutera – Serpong, Tangerang
Luas tanah adalah sebesar 10.000 m², belum dimiliki oleh Perseroan tetapi sedang dalam proses pengadaan sehingga akan berstatus milik Perseroan. Perseroan berencana untuk mengembangkan tanah tersebut sebagai Ruko, Perkantoran, Apartemen atau Kondotel.
- Pengembangan tanah di Darmo Permai, Surabaya.
Luas tanah sebesar 34109 m² belum dimiliki oleh Perseroan tetapi sedang dalam proses pengadaan sehingga akan berstatus milik Perseroan. Perseroan berencana untuk mengembangkan tanah tersebut sebagai perkantoran, ruko, apartemen atau condotel, dan F&B.

Perseroan memiliki kompetensi dalam pembangunan khusus untuk pemasaran. Perseroan akan melakukan kerjasama dengan pihak profesional untuk operasional gedung.

Proses Pengendalian Mutu

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengendalian mutu yang secara spesifik mengatur perihal bisnis *property/realty*. Pengendalian mutu pada bisnis *property/realty* ditempatkan pada standar yang sama pada pengendalian mutu konstruksi yang dimiliki Perseroan secara umum dikarenakan pembangunan *property/realty* termasuk dalam satu *core* kompetensi Perseroan yaitu konstruksi/pembangunan.

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, volume pendapatan Perseroan dari pekerjaan pengembangan properti mencapai rata-rata Rp9 miliar per bulan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki keperluan investasi yang material pada kebutuhan investasi pekerjaan pengembangan properti.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki rencana pengembangan produk-produk baru dari pekerjaan pengembangan properti.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, divisi realty telah menjadi Entitas Anak WKR yang penjelasannya dapat dilihat pada bab keterangan tentang Perseroan, sub bab keterangan singkat mengenai entitas anak.

Energi

Merupakan salah satu usaha Perseroan yang bergerak dalam bidang energi dalam bentuk IPP (*Independent Power Producer*). Dimana dalam kegiatannya Perseroan lebih memfokuskan pada penggunaan Energi baru terbarukan meliputi Tenaga Air, Panas Bumi, Surya.

Dengan pangsa pasar sebesar 35 000 MW hingga tahun 2025, Perseroan telah mempunyai kepemilikan saham sebesar 85% di anak perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga mini hidro 2 x 5 MW yaitu WSE. Dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan Perseroan dan menangkap peluang jangka panjang Perseroan telah mendirikan Anak Perusahaan Energi yaitu WKE yang merupakan Perusahaan Induk untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang IPP yang dimiliki oleh Perseroan termasuk WSE.

Pengendalian Mutu

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengendalian mutu yang secara spesifik mengatur perihal energi. Pengendalian mutu pada konstruksi energi, gedung maupun jalan tol ditempatkan pada standar yang sama pada pengendalian mutu konstruksi yang dimiliki Perseroan secara umum dikarenakan pembangunan fasilitas energi termasuk dalam satu *core* kompetensi Perseroan yaitu konstruksi/pembangunan.

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, volume pendapatan Perseroan dari pekerjaan pengembangan IPP mencapai rata-rata Rp2 miliar per bulan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki keperluan investasi yang material pada kebutuhan investasi pekerjaan pengembangan IPP.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki rencana pengembangan produk-produk baru dari pekerjaan pengembangan IPP.

Sewa Gedung

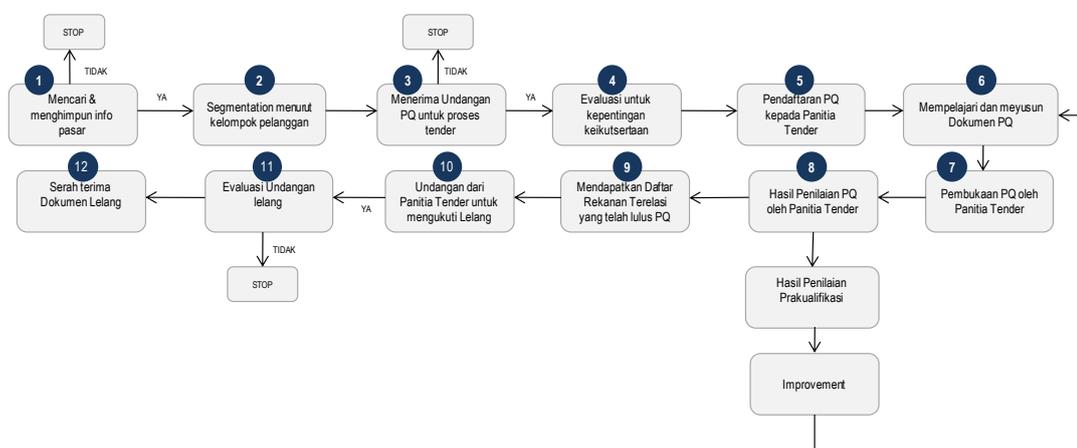
Perseroan memiliki usaha Sewa Gedung atas gedung perkantoran yang dimilikinya, yaitu Gedung Waskita dan Gedung Teraskita yang berlokasi di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia. Sewa gedung dilakukan kepada pihak-pihak baik Internal maupun Eksternal Perseroan. Penyewaan internal dilakukan kepada masing-masing kantor divisi. Sedangkan penyewaan eksternal dilakukan kepada pihak di luar Perseroan.

Proses Bisnis Perseroan

Proses Bisnis pada Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Perseroan dibagi menjadi 3 Proses Kunci, yaitu Proses Pemasaran Prakuualifikasi (PQ), Proses Pemasaran Lelang, Proses Produksi. Proses tersebut dapat dijabarkan dengan skema sebagai berikut:

1) Jasa Konstruksi

i. Proses Pemasaran Prakuualifikasi (PQ)

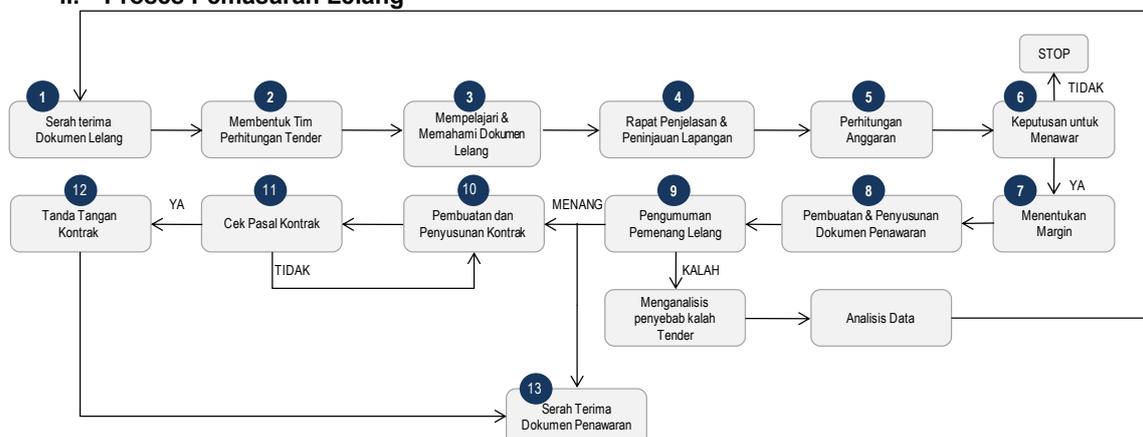


Sumber: Perseroan

Keterangan:

1. Mencari & mendata semua informasi pasar industri konstruksi melalui sumber eksternal atau internal seperti:
 - a. Sumber eksternal, yaitu dari Project info provider(contoh: BCI), Media cetak, Master Plan Kawasan, Blue Book prospektif pelanggan, Internet, Networking, Konsultan, dan media lainnya,
 - b. Sumber Internal, yaitu dari Market survey, Pelanggan saat ini.
2. Segmentasi
Mengelompokkan informasi pasar kemudian menetapkan sesuai pasar/kelompok pelanggan & pelanggan industri
3. Menerima Undangan PQ
Undangan PQ adalah undangan untuk mengikuti prakualifikasi dalam proses tender
4. Evaluasi
Undangan PQ dievaluasi untuk keikutsertaannya dengan mengevaluasi kemampuan Perseroan, keuangan, kelayakan proyek dan pelanggan/owner yang akan dilelang
5. Pendaftaran PQ
Pendaftaran Perseroan untuk mengikuti PQ
6. Mempelajari & menyusun dokumen PQ
 - Mempelajari isi dokumen PQ yang terdiri dari aplikasi-aplikasi yang menunjukkan kemampuan Perseroan, keuangan, personil dan peralatan.
 - Menyusun aplikasi tersebut, dokumen buku berikut bukti-bukti yang ada seperti pengalaman/referensi proyek, kontrak, SKA& SKT, laporan keuangan dan kepemilikan alat.
7. Pembukaan PQ
 - Dokumen PQ yang sudah disusun disampaikan pada owner dan batas waktu yang sudah ditentukan
 - Dibuka oleh panitia lelang/pengadaan barang/Jasa
8. Hasil penilaian PQ
 - Setelah dievaluasi oleh Panitia dengan kriteria yang sudah ditentukan akan dinilai, isian prakualifikasi Perseroan untuk menentukan lulus tidaknya Perseroan menjadi Rekanan terseleksi.
9. Daftar Rekanan Terseleksi
Yaitu rekanan yang sudah mengikuti PQ dan dinyatakan lulus/memenuhi kualifikasi yang disyaratkan
10. Undangan Lelang
Undangan lelang dari panitia pengadaan barang/jasa untuk mengikuti proses lelang
11. Evaluasi Undangan lelang
Melakukan evaluasi atas pelelangan yang akan diikuti. Bila sudah sesuai, akan dilakukan pengambilan dokumen lelang
12. Serah terima Dokumen Lelang
Dokumen lelang terdiri dari Instruksi kepada peserta lelang, syarat umum dan khusus, syarat teknis/spesifikasi, Bill of Quantity, Gambar, Addendum (bila ada)

ii. Proses Pemasaran Lelang



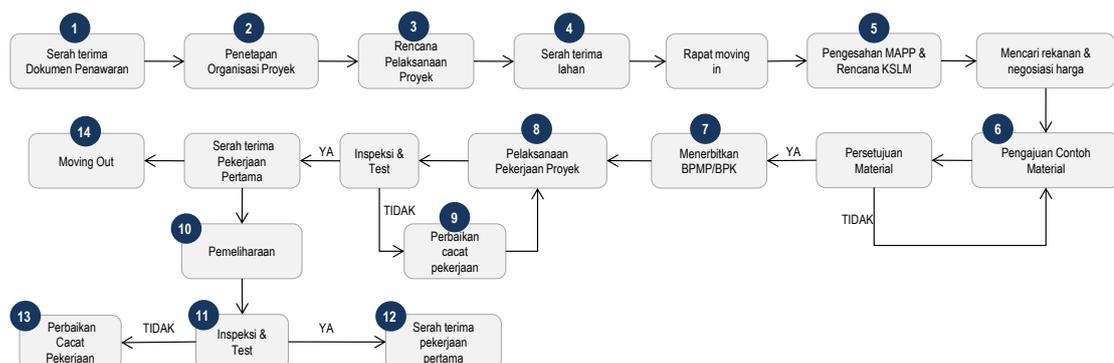
Sumber: Perseroan

Keterangan:

1. Serah terima Dokumen Lelang
Dokumen lelang terdiri dari:
 - Instruksi kepada peserta lelang
 - Syarat umum dan khusus
 - Syarat teknis/spesifikasi
2. Membentuk Tim Tender untuk menangani proses lelang, Perseroan menunjuk tim tender yang akan mempersiapkan, menyusun dokumen teknis, Dokumen administrasi dan dokumen penawaran
3. Mempelajari & memahami dokumen Lelang, dengan cara:
 - Instruksi kepada peserta lelang
 - Syarat umum dan khusus
 - Syarat teknis/spesifikasi
 - Bill of Quantity

- Gambar
- Addendum (bila ada)
- Membuat pertanyaan jika kurang jelas
- 4. **Rapat penjelasan & peninjauan Lapangan**
Rapat penjelasan yang dilakukan oleh Panitia Lelang kepada peserta lelang berkaitan dengan dokumen lelang & gambar dilakukan juga peninjauan lokasi dengan penjelasan oleh panitia, juga dilakukan tanya jawab baik tertulis maupun lisan
- 5. **Perhitungan Anggaran**
Menghitung harga penawaran proyek yang mengacu kepada dokumen lelang serta kondisional lapangan dengan menyusun price cost (bahan, upah, subkontraktor, Material, alat dan metode konstruksi), serta indirect cost (persiapan/penyelesaian, biaya Umum & Administrasi, biaya bank)
- 6. **Keputusan untuk menawar**
Yaitu keputusan yang dilakukan apabila dalam terhitung Direct Cost & Indirect Cost harga sudah tinggi sehingga tidak dapat memenuhi harga dari Owner/Pagu
- 7. **Menentukan margin**
Apabila diputuskan tetap menawar maka disusunlah harga DC & IDC ditambah margin (keuntungan perusahaan)
- 8. **Pembuatan dan penyusunan Dokumen Penawaran**
Menyusun dokumen penawaran/lelang yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen penawaran harga
- 9. **Pengumuman Pemenang lelang**
 - Setelah pemasukan penawaran, Panitia Lelang membuka dokumen penawaran masing-masing peserta lelang kemudian dilakukan evaluasi teknis dan harga penawaran harga
 - Panitia akan mengumumkan pemenang penawaran lelang sesudah dievaluasi
- 10. **Pembuatan dan penyusunan kontrak**
 - Setelah memenangkan tender/lelang maka akan disiapkan dan disusun kontrak dengan Owner yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - Jika kalah maka akan dievaluasi mengapa terjadi kalah untuk improvement kedepan.
- 11. **Cek Pasal-pasal kontrak**
Bagian administrasi kontrak akan melakukan/meneliti pasal-pasal dalam kontrak untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak
- 12. **Tanda tangan Kontrak**
Penandatanganan kontrak pekerjaan yang berisikan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan proyek/pekerjaan
- 13. **Serah terima Dokumen Kontrak**
Dokumen Kontrak diserahkan dari Kepala Bagian Anggaran kepada Tim Proyek diketahui oleh Kepala Bagian Pengendalian

iii. Proses Produksi



Sumber: Perseroan

Keterangan:

1. **Serah terima Dokumen Kontrak**
Dokumen Kontrak diserahkan dari Kepala Bagian Anggaran kepada Tim Proyek diketahui oleh Kepala Bagian Pengendalian
2. **Penetapan Tim Proyek**
Tim Proyek yang terdiri dari Kepala Proyek dan personilnya, ditentukan berdasarkan surat keputusan dengan rincian sbb:
 - Proyek Type A & Type B ditetapkan oleh Direksi atas usulan Unit Bisnis
 - Proyek Type C ditetapkan oleh unit Bisnis.
3. **Rencana Pelaksanaan Proyek**
 - Dibuat Oleh Kepala Proyek / calon Kepala Proyek bersama Kepala Bagian Pengendalian
 - Waktu setelah = Penawaran terendah /Negosiasi + yg dipastikan proyek didapat/SPK / SPP
 - Setelah Serah terima Dokumen penawaran & dokumen kontrak (dari proses pemasaran/lelang)

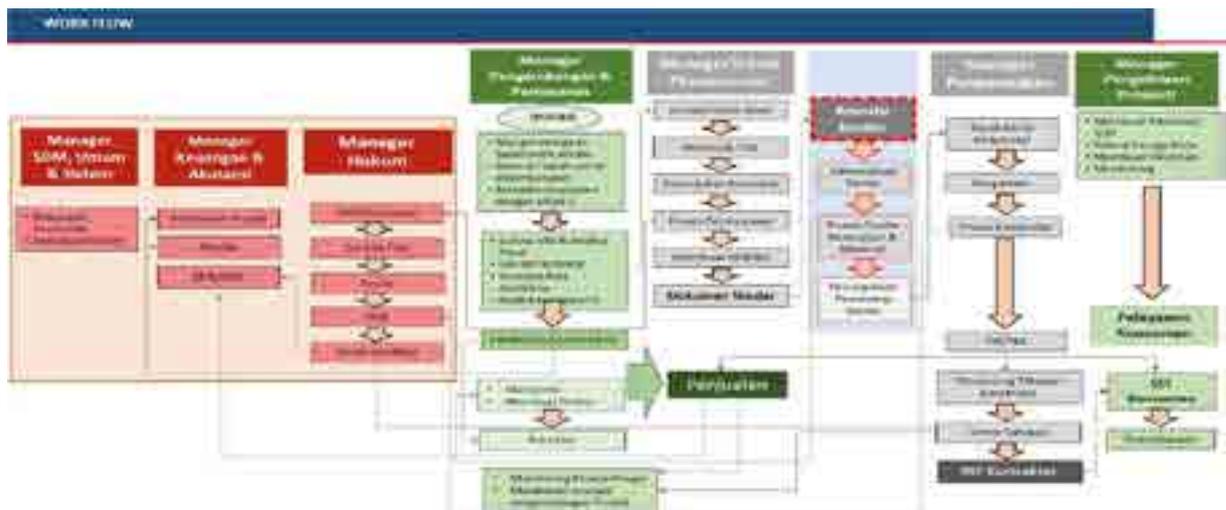
- Mempelajari dan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan : Dokumen Kontrak, Spesifikasi, Gambar & dokumenlainnya yang menjadi referensi.
 - Survey ulang lokasi wajib dilaksanakan lebih detail kondisi lapangan + ketersediaan sumber daya.
 - Menghitung ulang volume seluruh pekerjaan berdasarkan gambar for construction dan dokumen kontrak (spesifikasi).Perhitungan tersebut dibandingkan BOQ
 - PROYEK - EPC= Engineering Procurement Construction
 - Design and Build menunjuk Perencana Konstruksi (DRW)
 - NOMER - AB = Unit Bisnis mengajukan permintaan No.AB Dep. Produksi dengan melampirkan Copy Kontrak
 - Apabila sifat pekerjaan sangat penting untuk dilaksanakan sebelum kontrak UB meminta ijin kerja ke Direktur Produksi lampiran.Copy SPK)
 - APP dibuat oleh Kepala Proyek, diperiksa Kepala Bagian Pengendalian /disetujui Kepala Unit Bisnis
 - Melakukan Penilaian Risiko dengan melakukan survey awal di area kerja, mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungannya serta memastikan hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan kerja memenuhi persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
4. Serah Terima Lahan dari Owner
Mulai waktu pelaksanaan > 1 minggu / setelah serah terimalahan /IMB, MK jaminan pelaksanaan, Rapat Moving In
- Membahas kondisi kontrak dan menetapkan sasaran proyek serta program-program pencapaiannya.
 - Membahas Rencana Penataan lapangan, urutan/tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan metode konstruksinya (Mapping Process).
 - Menyamakan persepsi tentang kondisi yang disepakati pada saat penawaran/tender, material atau produk yang digunakan, peralatan dan tenaga kerja serta cara pengadaannya.
 - Membahas Rencana Anggaran Proyek sebagai alih informasi dari Anggaran Penawaran/ Lelang.
 - Untuk mendapatkan keputusan-keputusan tentang wewenang dan tanggung jawab pengadaan material/ produk maupun Sub Kontraktor.
 - Menetapkan KPI.
5. Mengesahkan MAPP & Rencana K3LMP
Pengesahan MAPP (Master Anggaran Pelaksanaan Proyek) harus mendapat persetujuan sbb:
- Untuk Proyek Gedung dan Sipil Tipe (A,B & C1) disetujui oleh Direksi, untuk tipe (C2 dan C3) disetujui oleh Unit Bisnis
 - Pada proyek EPC (tanpa batas) disetujui oleh Direksi.
6. Pengajuan Contoh Material
- Pengajuan contoh Material (yang sudah diseleksi) dilakukan dengan menunjukkan material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi kepada Manajemen Konstruksi untuk mendapat persetujuan
 - Jika contoh material ditolak maka perlu mengajukan kembali contoh material yang lain yang setara dengan spesifikasi.
7. Menerbitkan SPMP/SPK
Jika dalam mengajukan contoh/sample material penawaran disetujui maka langkah selanjutnya dengan menerbitkan surat pemesanan Material/surat perintah kerja.
8. Pelaksanaan Pekerjaan Proyek (Proses Produksi)
- Fasilitas Lapangan Sementara (Temporary Site Facilities).
 - FasilitasLapangan Sementara terdiri dari (antara lain) :
 - Kantor Lapangan
 - Gudang
 - Kantor Pemberi Tugas/Konsultan/Pengawas
 - Pagar Proyek
 - Pos Jaga
 - Jalan Kerja
 - Lokasi Muster Point
 - Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
 - Penempatan Rambu-Rambu K3LMP
 - Pengadaan alat konstruksi mengacu pada Prosedur Perseroan di bidang Procurement

Program Pelaksanaan Proyek terdiri dari :

- a. Program Pelaksanaan Bulanan,
Program ini penyusunannya diturunkan dari Rencana Pelaksanaan Proyek (Project Construction Plan)
- b. Program Pelaksanaan Mingguan, Program ini dibuat secara rinci sebagai penjabaran dari Program Pelaksanaan Bulanan
- c. Implementasi Pelaksanaan Proyek
- d. RAPAT KOORDINASI UNIT BISNIS
Rapat Koordinasi terdiri dari :
 - Rapat Koordinasi tingkat Proyek
 - Rapat koordinasi tingkat Unit Bisnis
- e. Rapat koordinasi antara Unit Bisnis - Pusat
Peserta Rapat koordinasi antara Unit Bisnis dengan Direktur
 - a. Direktur Operasi
 - b. Kepala Departemen

- c. Kepala/Wakil Unit Bisnis
 - d. Pejabat lain yang diperlukan
 - f. *Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan*
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan meliputi :
 - a. *Pengendalian Progres/Pendapatan Usaha (PU)*
 - b. *Pengendalian Beban Kontrak (BK)*
 - c. *Pengendalian Waktu Pelaksanaan*
 - d. *Pengendalian Cash Flow / EVA (Analisa Trend Laporan Keuangan)*
 - e. *Pengendalian K3L*
 - g. *Pengendalian Progres Pelaksanaan Pekerjaan*
 - h. *Pengendalian Progres Pelaksanaan mengacu pada beberapa tolok ukur antara lain sebagai berikut :*
 - *Jadwal pelaksanaan pekerjaan*
 - *Metode konstruksi/Engineering*
 - *Kegiatan pendukung*
 - *Pengawasan (supervisi)*
 - i. *Pengendalian Beban Kontrak*
 - j. *Pengendalian Proses Produksi sesuai K3LMP*
 - k. *Pengendalian Kontrak Konstruksi*
 - l. *Pengendalian Likuiditas*
 - m. *Penanganan Proyek Bermasalah*
 - n. *Hubungan Kerja Dengan Mitra Usaha*
 - o. *Upaya Pengamanan Terhadap Klausul Kegagalan Bangunan*
 - p. *Upaya Pengamanan Terhadap Klausul Peran Masyarakat*
 - q. *Pekerjaan Crash Program*
 - r. *Peninjauan Ke Proyek*
 - s. *Pelaporan*
 - t. *Kajian Metode Konstruksi Dan Kasus Di Proyek*
 - u. *Penyerahan Pekerjaan Kepada Pengguna Jasa*
9. *Perbaikan Cacat Pekerjaan*
Jika ada cacat dalam pekerjaan maka segera dibuat berita acara untuk dilakukan perbaikan
10. *Pemeliharaan*
Setelah serah terima Pertama PHO maka dilakukan masa pemeliharaan sesuai dengan waktu pada dokumen Lelang/Kontrak
11. *Inspeksi & Test*
Inspeksi & Test dilakukan setelah serah terima pertama untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang di dan tidak ada yg cacat/rusak
12. *Serah terima Pekerjaan ke dua*
Setelah serah terima kedua FHO maka dilakukan masa pemeliharaan sesuai dengan waktu pada dokumen Lelang/Kontrak
13. *Perbaikan Cacat Pekerjaan*
Jika ada pekerjaan yang cacat maka sesuai dengan ketentuan pada kontrak harus dilakukan perbaikan sesuai spesifikasi.
14. *Moving Out*
Jika semua kegiatan pekerjaan telah selesai maka segera dilakukan Moving out yang mencakup sbb:
 - *Memberikan gambaran proses pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir (Mapping Process).*
 - *Menyampaikan hal-hal penting, antara lain:*
 - *Masalah yang terjadi, penyebab dan cara penyelesaian maupun dampak yang ditimbulkan*
 - *Upaya-upaya yang dilakukan serta nilainya, dalam memanfaatkan peluang bagi keuntungan Perseroan*
 - *Data dan informasi biaya pelaksanaan, harga satuan pekerjaan tertentu (misalnya, harga final per m² untuk pekerjaan gedung) dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi kegiatan pemasaran maupun pelaksanaan yang akan datang.*
 - *Referensi pekerjaan untuk Perseroan dan referensi pengalaman kerja untuk Tim Proyek.*
 - *Memberikan suatu kesimpulan dan masukan tentang karakteristik proyek, pemberi kerja/pengguna jasa, perencana konstruksi, pengawas pekerjaan, quantity surveyor, maupun mitra usaha sebagai pengalaman operasional yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Pemasaran dan Operasional.*
 - *Berita Acara Serah Terima Dokumen Keuangan Proyek Selesai.*
 - *Evaluasi KPI.*

2) Realty



Sumber: Perseroan

3) Jasa Sewa Gedung

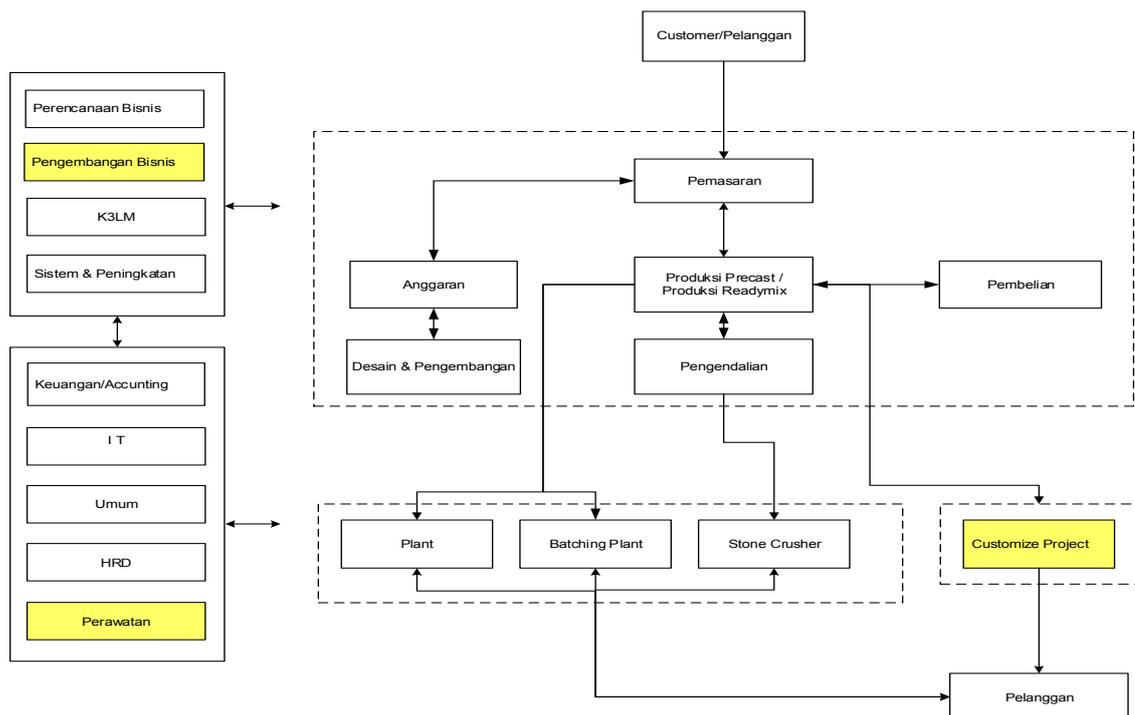


Sumber: Perseroan

Keterangan:

1. Surat Pengajuan/ Perpanjangan Kontrak Sewa Ruangan dari Pihak Ekstern & Intern ditujukan ke Sekretaris Perusahaan (Sekper)
2. Disposisi dari Sekper
3. Apabila ok lanjut dan apa bila tidak di buat surat tidak diperpanjang
4. Apabila diperpanjang, lanjut ke proses negosiasi jangka waktu dan harga
5. Apabila semua setuju dibuat Kontrak/ Adendum
6. Penerimaan pembayaran sesuai kontrak
7. Selesai

4) Precast



Sumber: Perseroan

Bisnis Proses WSBP

Bisnis Proses WSBP terbagi menjadi 2 Proses Utama, yaitu Proses Pemasaran dan Proses Produksi.

1. Proses Pemasaran

- Mendapatkan potensi prospek order secara proaktif
- Menerima informasi adanya kebutuhan permintaan dari pelanggan melalui surat permintaan barang seperti *quotation*, telp dan email dari calon pelanggan atau mendapatkan potensi prospek order secara pro aktif dengan menghubungi calon pelanggan baik melalui surat dan kunjungan ke calon pelanggan.
- Melakukan tinjauan terhadap kebutuhan permintaan dari pelanggan seperti jenis barang, jenis pelanggan, *schedule*, produk, volume, lokasi pengiriman, *delivery date* & sistem pembayaran.
- Memastikan kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis produk yang diminta. Proses pemastian permintaan dilihat dari :
 - Gambar (*Precast*)
 - *Schedule*
 - Spesifikasi Gambar
 - Volume
 - Lokasi Pengiriman
 - *Delivery Date*
 - Sistem Pembayaran
 - Surat permintaan barang dari calon pelanggan
 - Dokumen Tender (apabila menggunakan proses lelang)
 - Jika Kelengkapan permintaan tidak lengkap maka dilakukan konfirmasi ulang ke pelanggan baik eksternal maupun internal.
 - Kesiapan Moulding (Cetakan) – Design (D&P) / Fisik

Apabila hasil tinjauan order **tidak memenuhi**, selanjutnya diinformasikan ke pelanggan. (Yang memutuskan berdasarkan Kriteria diatas adalah Manajer Pemasaran, Direktur Teknik & Operasi dan Direktur Utama)

Apabila hasil tinjauan order **memenuhi**, maka selanjutnya memutuskan sifat order apakah kontrak atau retail kemudian dilakukan proses perhitungan HPP (Harga Pokok Produksi) oleh Bagian Anggaran sebagai dasar untuk pengajuan harga ke pelanggan.

- Perhitungan HPP (Harga Pokok Produksi)
Perhitungan HPP Produk akan disesuaikan dengan karakteristik dari order, dengan kategori :
 - Spesifikasi sudah jelas (**Mengacu ke Prosedur Penanganan & Perancangan**)
 - Desain belum ditetapkan oleh pelanggan (**Mengacu ke Pengembangan Produk Baru**)
 - Mempertimbangkan *value engineering* (**Mengacu ke Prosedur Review Desain Produk**)
 - Pembuatan Job Mix berdasarkan mutu beton yang disyaratkan (**Mengacu ke Prosedur Job Mix Manajemen**)
 - Penetapan margin
- Berdasarkan penawaran harga kepada pelanggan, selanjutnya dilakukan klarifikasi & negosiasi dengan pelanggan. Proses klarifikasi & negosiasi dapat dilakukan lebih dari satu kali. Apabila hasil klarifikasi & negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan evaluasi terhadap HPP, Merevisi HPP & melakukan negosiasi ulang.
- *Purchase Order* & Perjanjian Kontrak
Hasil kesepakatan negosiasi diproses dan dituangkan dalam *purchase order (Untuk Kriteria Pembelian Bersifat Retail)* dan Kontrak (**Untuk Kriteria Pembelian Bersifat Kontrak**) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian Kontrak

Kriteria kontrak, terdiri dari :

- Perencanaan Pembuatan Mock-Up khusus untuk produksi non standar
 - Pemesanan untuk produk *readymix* minimal senilai 5M
 - Pemesanan untuk produk *precast* minimal senilai 2,5M
 - Mengakomodasi bentuk produk yang *customize* maupun yang standart
- Serah terima dokumen Kontrak ke Pelanggan dan Bagian Produksi

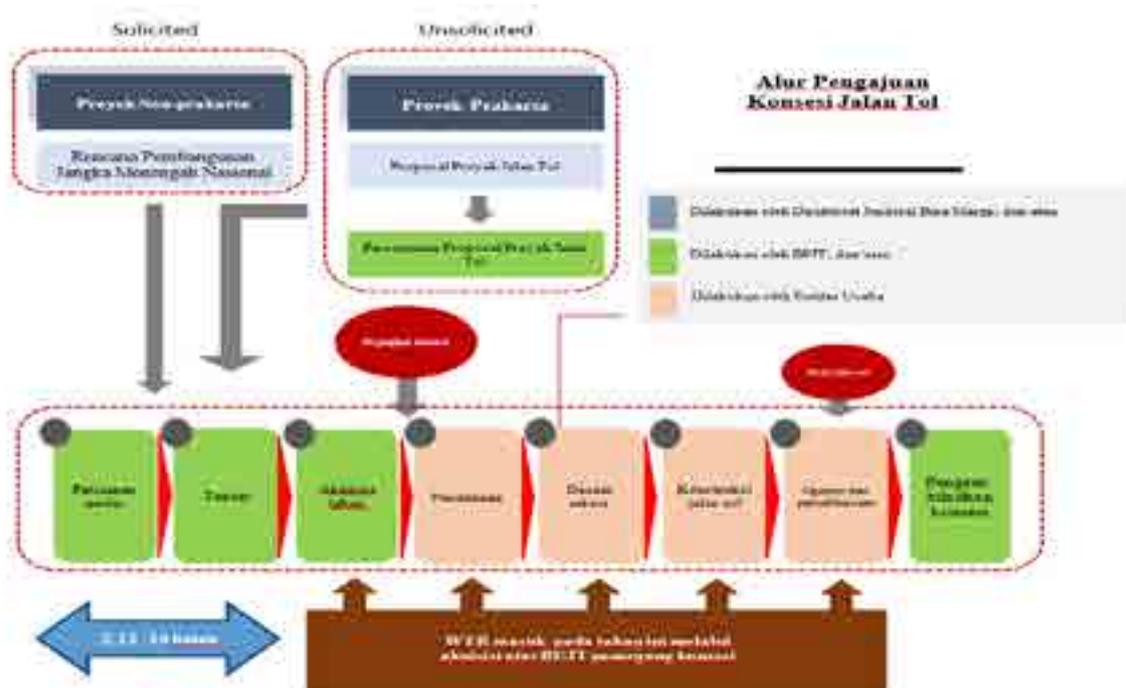
2. Bagian Produksi

- Serah terima dokumen Kontrak.
Purchase order & perjanjian kontrak selanjutnya diserahkan ke bagian produksi *precast/readymix* dalam bentuk *bastd* (berita acara serah terima dokumen) dari bagian pemasaran sebagai dasar penerbitan *pmo* (perintah mengerjakan order) ke *plant/batching plant* yang akan memproduksi order tersebut. *Bastd* tersebut terdiri dari :
 - PO (*Purchase Order*) / SPM (Surat Pesanan Material) / Kontrak
 - Gambar
 - Metode Kerja (*jika ada*)
 - Spesifikasi
 - Schedule
 - HPPJika dokumen atau Kriteria diatas tidak lengkap, bagian Produksi akan menunda proses penerbitan PMO (Perintah Mengerjakan Order) atau mengembalikan dokumen tersebut ke bagian Pemasaran untuk dilengkapi.
- Perencanaan Produksi
Bagian Produksi membuat perencanaan produksi berdasarkan masukan dari data harian & mingguan dari *Plant/Batching Plant*.
- Melakukan peninjauan dan verifikasi terhadap jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah material yang tersedia, jumlah waktu kerja yang tersedia, jumlah hasil (*quantity*) produksi yang sedang berjalan, kesiapan alat, tipe produk dan jumlah ketidaksesuaian produk yang diinformasikan dari *Plant/Batching Plant*.

Apabila dari hasil verifikasi kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan permintaan order baru dan *progress* produksi yang berjalan maka harus dilakukan peninjauan perencanaan produksi kembali.
- Menetapkan perencanaan produksi dan *Plant/Batching Plant* yang akan memproduksi oleh Manager Produksi dengan membuat Perintah Mengerjakan Order (PMO)
- Mendistribusikan perencanaan produksi yang telah disahkan dan PMO ke *Plant/Batching Plant* yang akan memproduksi.

5) Jalan Tol

Berikut merupakan Alur Pengajuan Koneksi Jalan Tol:



Sumber: Perseroan

8.14.2. Kegiatan Usaha Berdasarkan Tipe Kerjasama

Berdasarkan tipe kerjasama, terdapat 4 jenis usaha yang dilakukan oleh Perseroan, diantaranya:

a. Kontrak Biasa

Jasa yang ditawarkan oleh Perseroan umumnya berupa Kontrak Biasa. Dalam hal ini, Perseroan melakukan pekerjaannya berdasarkan 3 (tiga) jenis kontrak sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- (1) *Lump Sum*, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati (gambar, spesifikasi, *schedule*) dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Pengguna jasa membayar harga atas penyelesaian pekerjaan berdasarkan cara pembayaran yang telah ditetapkan.
- (2) *Unit Price*, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap *unsure*/satuan pekerjaan dengan spesifikasi tertentu. Volume pekerjaan hanya bersifat sementara, sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran/ perhitungan bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia jasa.
- (3) *Design & Build*, yaitu suatu kontrak proyek dimana pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan diborongkan kepada satu penyedia jasa (perencana ditunjuk oleh kontraktor, bukan oleh pengguna jasa) atau kepada suatu badan kerjasama antara perencana dan kontraktor.

b. Kerja Sama Operasi (KSO)

Perseroan juga melakukan kerjasama operasi dengan pihak lain sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan sebuah proyek. Kerjasama operasi adalah suatu bentuk kerja sama dengan partner / mitra KSO, yang tujuannya untuk mendapatkan sinergi yang optimal terkait dengan kompetensi teknis maupun non teknis dalam rangka mendapatkan proyek dan pelaksanaannya, sehingga Perseroan memperoleh nilai tambah berupa laba, transfer teknologi serta pengalaman.

Adapun pertimbangan untuk melakukan kerjasama operasi adalah karena faktor teknologi yang relatif baru dan belum dikuasai, serta faktor sumber daya (manusia, alat dan keuangan) yang dimiliki Perseroan untuk penyelesaian proyek tersebut.

Rincian proyek yang melibatkan kerjasama operasi dengan nilai proyek diatas Rp50 miliar sejak tahun 2015 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah sebagai berikut:

Nama dan Lokasi Proyek	Nilai proyek (Rp juta)	Porsi Perseroan (Rp juta)	Partner Kerjasama	Tahun Dimulai	Tahun Penyelesaian
Aksesibilitas Ducting Utility	517.311	253.482	Wika	2015	2016
Dredging & Embankmen	206.142	123.685	Basuki Rahmana Putra	2015	2016
Sal Induk Siderejo	96.767	49.351	HK	2015	2018
Jl Tol Cisumdawu Phase 2	3.169.091	237.682	metallurgical - Wika - NK	2015	2018
Sal Primer Jabung II	262.262	183.583	Abdi Mulia Berkah	2015	2018
Bandara Husein	139.920	138.521	Yodya Karya	2014	2016
Gd. Terminal 3	4.275.000	1.923.750	Wika - PP - Jaya	2013	2016
Lansekap Bandara Soetta	157.015	153.875	Penta	2015	2017
Jl. Galing Aruk	296.127	296.127	Yasa	2013	2016
Bandara Samarinda	621.070	263.955	HK - Wika	2014	2016
Irigasi D.I. Batang Alay	227.222	159.056	Bawakaraeng	2015	2018
Bendung Baliase	178.031	97.917	Cempaka	2015	2018
Jalan Batu Aji Kuaro	407.374	244.424	NK	2015	2019
Bendung Gerak Sembayat	164.058	54.139	Brantas - Wika	2011	2016
Jl. Tol Depok-Antasari (Desari)	1.222.661	415.705	PP - HK	2014	2016
Jalan Tol Ciawi Sukabumi seksi 1	659.017	336.099	Wika	2015	2017
Soker MYC	492.722	152.744	Wika - Nindya	2015	2017
Pemb. Jalan Tol Cisumdawu Phase I	1.367.687	135.410	Shanghai Construction - Wika	2012	2017
Bendungan Karian	-	214.144	-	2015	2019
Bendungan Tapin	815.390	399.541	Brantas Abipraya	2015	2019
Pengaman Pantai DKI Jakarta tahap 2 Paket 1	344.942	206.965	ASHI	2015	2018
Jalan Bebas Hambatan Manado-Bitung (Simpang Susun Airmadidi)	469.404	211.232	Hutama karya	2015	2018
Jaringan Irigasi Dl. Air Lakitan (2.590 Ha)	251.556	176.089	Citra Mandiri	2016	2019
Jalan Pendekatan Mahakam IV Sisi	205.312	123.187	Surya Bakti	2016	2018
Samarinda Kota (MYC)	241.236	168.865	Taruna Putra Pertiwi	2016	2019
Jaringan Irigasi D.I Colo (MYC)	197.700	100.827	PP	2016	2018
Bendung D.I Kamijoro Bantul (MYC)					
TOTAL	15.850.604	7.264.483			

c. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Perseroan melakukan investasi di bidang infrastruktur kepada 6 (enam) perusahaan di bawah ini:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Tahun Penyertaan
PT Waskita Bumi Wira	Pengusahaan Jalan Tol	48,00%*	2014	belum beroperasi
PT Prima Multi Terminal	Perdagangan dan Jasa	20,00%	2014	belum beroperasi
PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Pengusahaan Jalan Tol	15,00%	2014	belum beroperasi
PT Solo Ngawi Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	40,00%*	2015	belum beroperasi
PT Cinere Serpong Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	35,00%*	2015	belum beroperasi

*) Penyertaan tidak langsung yang diperoleh dari WTR

***) Presentase Kepemilikan Perseroan melalui PT Waskita MNC Transjawa Toll.

d. Proyek Turnkey

Proyek *turnkey* merupakan proyek yang dikerjakan oleh Perseroan dimana seluruh biaya konstruksi ditanggung terlebih dahulu oleh Perseroan sesuai kontrak perjanjian dan akan dibayar kembali oleh pihak *owner* sejumlah nilai yang telah disepakati didalam kontrak perjanjian.

Nama dan Lokasi Proyek	Nilai proyek (Rp juta)	Tahun Dimulai	Tahun Penyelesaian
Proyek jalan tol Pejagan Pemalang Seksi 1 & 2	1.944.657	2014	2017
Proyek jalan tol Pejagan Pemalang Seksi 3 & 4	2.730.428	2016	2018
Proyek jalan tol Becakayu	1.167.706	2014	2017
Proyek Transmisi Paket 1 & 2	4.243.331	2016	2018
Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Seksi 2 Untuk Pekerjaan Jembatan Musi-Kramasan-Organ	2.427.700	2016	2017
Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2	3.591.436	2016	2018
Pembangunan Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi Seksi 2	1.623.109	2016	2018
Pembangunan Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi Seksi 3	1.625.983	2016	2018
Pembangunan Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi Seksi 4	1.724.233	2016	2018
Jasa Pemborongan Design and Build Paket 1 Pembangunan Jalan Tol Semarang – Batang	6.422.752	2016	2018

8.14.3. Kegiatan Usaha Berdasarkan Divisi

Perseroan menyelesaikan proyek-proyek dalam kontraknya melalui divisi-divisi. Pada Tahun 2016, berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 016/SK/WK/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan, Perseroan membagi 6 (enam) Unit Bisnis, yaitu sebagai berikut:

1) Divisi I

Divisi I berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan perusahaan dalam bidang Bidang Pemasaran dan Produksi Proyek Gedung, Bandara, Jalan Kereta Api, dan LRT.

Adapun proyek yang telah dan saat ini sedang diselesaikan Divisi I dengan nilai kontrak diatas Rp100 miliar, antara lain:

i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi I dengan nilai diatas Rp100 miliar (2011-2016)

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Diklat BNPB	100.777	Bogor	BNPB	2013	2013
2	Apartemen Gunawangsa	105.262	Surabaya	PT. Gunawangsa Investindo	2011	2012
3	RSUD Tangerang	111.725	Jakarta	Pemkot Banten	2013	2013
4	Rusun TNI Polri Maluku	114.031	maluku	Pemerintah	2015	2015
5	IPDN Sulsel 2011	114.260	Makasar	Depdagri	2011	2011
6	Mustika Golf Apartemen	116.500	Cikarang	PT. Menara Pelangi	2015	2017
7	Bandara Sepinggan Balikpapan	117.887	Kaltim	AP1	2011	2012
8	Basko Grand Mall	118.182	Pekanbaru	PT. Basko Green	2011	2012
9	Apartemen Sentul City	119.444	Bogor	Sentul City	2013	2014
10	Gedung LKPP	121.808	Jakarta	LKPP	2013	2014
11	Tj. Priok (Power House Pelindo)	123.677	Jakarta	Pelindo	2013	2014
12	RSUD Ps. Minggu Jaksel (JO-Wika)	125.523	Jakarta	Pemprov DKI	2014	2015
13	Hotel Grand Inna Putri Bali (lanjutan)	126.602	Bali	Swasta	2014	2015
14	RSCM (Gd. Puskes Ibu & Anak)	127.471	Jakarta	Depkes	2013	2013
15	Hotel di Bandara Ngurah Rai Tahap II (ARS, SIP & ME)	132.105	Bali	PT. Angkasa Pura Hotel	2014	2015
16	One Bell Park	143.723	Jakarta	PT. Harmas Jallasveva	2013	2015
17	Manhattan Square	148.409	Jakarta	PT. Sumber Mesin Raya	2012	2013

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
18	Perbaikan Exterior & Interior Gd. Pelindo	149.246	Jakarta	Pelindo	2013	2014
19	Menara Suara Merdeka	149.912	Semarang	PT. Merdeka Sandy Surya	2011	2012
20	Gedung Indarung VI Paket CC-1	157.571	Sumbar	PT. Semen Padang	2014	2016
21	Bandara Husein	160.925	Bandung	AP II	2015	2016
22	Menara Proteksi (RS Hermina)	168.300	Jakarta	Swasta	2014	2015
23	Gd. Infomedia Bandung	168.713	Bandung	Telkom Property	2014	2015
24	UNS (IDB)	178.255	Solo	Kemendikbud	2014	2016
25	Cilandak Estate	189.457	Jakarta	PT. Bhumyamca Sekawan	2014	2016
26	Bandara Udara Samarinda Baru	189.892	Samarinda	PEMDA KALTIM	2012	2013
27	Hotel Tangram & Sadira Pekanbaru	190.883	Riau	PT. Halla Mohana	2014	2015
28	Gedung PU Pekanbaru	191.267	Pekanbaru	Dinas PU	2011	2013
29	Ancol Double Decker	193.000	Jakarta	Pemkot DKI	2014	2015
30	Paket 1.09 Saudi Arabia	201.716	Riyadh	Bin Ladin	2012	2013
31	Rusun DKI (lanjutan)	214.572	Jakarta	Pemerintah	2015	2015
32	Gedung Utama MA	214.660	Jakarta	MA	2013	2015
33	Menara Dang Merdu	242.166	Pekan Baru	Bank Riau	2010	2012
34	Hotel Sahid Kuta	255.713	Bali	PT. Indonesian Paradise	2010	2012
35	Interior Bandara Ngurah Rai	282.337	Bali	AP1	2013	2014
36	World Class UI Package 3	292.000	Jakarta	UI	2011	2012
37	Bandara Juanda Tahap II	312.281	Jakarta	AP1	2013	2014
38	Urbana Cinere	359.954	Jakarta	PT. Mega Pesanggrahan Indah	2012	2015
39	INA Putri Bali	361.000	Bali	PT. Hotel Indonesia Natour	2012	2014
40	King Abdullah Financial Distric Riyadh	361.153	Riyadh	Bin Ladin	2010	2011
41	Woodland Residence	375.708	Jakarta	PT. Pardika Wisthi Sarana	2012	2016
42	Lanj. Stadion Balikpapan	385.095	Balikpapan	PEMDA KALTIM	2012	2013
43	Perpustakaan Nasional	419.080	Jakarta	Kemendikbud	2014	2016
44	Bandara Juanda Surabaya	419.686	Surabaya	AP1	2011	2013
45	Stadion Balikpapan	560.250	Balikpapan	Dinas PU Kota Balikpapan	2014	2016
TOTAL		9.412.178				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi I dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp9.412.178 juta.

ii. Proyek yang sedang berjalan Divisi I dengan nilai diatas Rp100 miliar

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1.	RS King Faisal Jeddah	108.322	Jeddah	PT. Ministry Of health	2015	2016
2.	Sentul City (Ars)	121.000	Jakarta	PT. Sentul City Tbk	2014	2016
3.	Belitung Highland Resort	121.625	Babel	Swasta	2015	2016
4.	Rajawali Apartemen	140.909	Palembang	Swasta	2014	2017
5.	Lansekap APII T3 Soeta	153.875	Jakarta	AP II	2015	2017
6.	Batam Fantasy Island Resort	154.241	Batam	Swasta	2015	2016
7.	Taxiway Sisi Utara	177.715	Jakarta	AP II	2017	2018
8.	Gedung Kantor SKPD Pemkot Pekanbaru (Multiyears)	180.829	Riau	Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru	2015	2017
9.	Angkasa Pura II Gardu Induk	202.613	Jakarta	AP II	2016	2018
10.	Realty Zalakka Hotel Bali	224.860	Bali	Swasta	2015	2016
11.	Stadion Renang (Aquatic) GBK	249.705	Jakarta	PUPERA	2016	2017
12.	Runway Bandara Samarinda Baru	263.955	Samarinda	Ap1	2014	2017

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
13.	Apartemen Yukata Alam Sutera	297.000	Tangerang	Waskita Trinitis 2	2015	2018
14	LRT Sumsel (Zona 1)	305.246	Palembang	Perhubungan RI	2016	2017
15	Paragon II Hotel dan Apartm	331.859	Jakarta	PT. Broadbiz Asia	2012	2016
16	Royal Olive	370.626	Jakarta	PT. Ade Pede Realty	2013	2016
17	Bandara Kertajati (Terminal)	378.182	Majalengka (Jabar)	PT. BIJB	2015	2017
18	Gianneti	415.307	Jakarta	PT. Bangun Investa Graha	2013	2017
19	Mesjid Aceh	447.381	Aceh	Dinas Cipta Karya Aceh	2015	2017
20	Realty The Reiz Condo Medan	489.912	Medan	WKR	2015	2017
21	Alam Sutera	519.890	Tangerang	KSO Waskita-Trinitis	2014	2016
22	Sopo Del	532.134	Jakarta	PT. Toba Pengembang Sejahtera	2014	2017
23	Jalur KA Bandara Soekarno Hatta	560.000	Banten	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	2015	2016
24	Apt. Darmo	628.888	Surabaya	WKR	2014	2016
25	LRT Sumsel (Zone 4)	706.699	Palembang	Perhubungan RI	2016	2017
26	LRT Sumsel (Zone 5)	737.450	Palembang	Perhubungan RI	2016	2017
27	Rusun Tingkat Tinggi Ps. Rumput	837.745	Jakarta	PUPERA	2016	2018
28	Rusun Kemayoran Blok C2-2 & D10-2	995.506	Jakarta	PUPERA	2016	2017
29	LRT Sumsel (Zone 2)	1.094.105	Palembang	Perhubungan RI	2016	2017
30	LRT Sumsel (Zone 3)	1.198.587	Palembang	Perhubungan RI	2016	2017
31	Frontage Surabaya	1.485.220	Surabaya	PT. Trikarya Graha Utama	2014	2017
32	APII Terminal 3 Pier 2	1.993.822	Jakarta	AP2	2013	2015
33	LRT Sumsel (General)	7.005.798	Palembang	Perhubungan RI	2016	2017
TOTAL		23.431.006				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi I dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp23.431.006 juta.

2) Divisi II

Divisi II berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang Pemasaran dan Produksi, untuk proyek gedung, proyek-proyek Sipil dan EPC

Adapun proyek yang telah dan saat ini sedang diselesaikan Divisi II dengan nilai kontrak diatas Rp100 miliar, antara lain:

i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi II dengan nilai diatas Rp100 miliar (2011-Desember 2016)

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Lebak Tundun	114.774	Banten	PT. Banyu Daya perkasa	2015	2015
2	Irigasi Sei Ulak Deras (PIRIM) - AMS 11	115.323	Jambi	PPK Irigasi SNVT PJPA Sumatra VI Propinsi Jambi	2009	2015
3	Reklamasi Pantai DKB Batam	121.509	Kepri	PT. DKB	2010	2012
4	Indarung VI Paket CC-8	128.073			2015	2017
5	NORMALISASI KALI GARANG-SEMARANG	132.115	Jateng	Kementrian PU	2019	2012
6	PLTU Malinau 2x3 MW	137.799	KALTIM	PT. PLN (Perseo)	2010	2014
7	JI Arteri Bandara SOETA - Ciledug Seksi I	140.446	Banten	KONSORSIUM STA 11	2014	2015
8	Bendung & Jaringan Irigasi D.I Belutu	141.110	Sumut	PU	2014	2016
9	WADUK JATIBARANG-SEMARANG	162.066	Jateng	Kementrian PU	2009	2014
10	BENDUNG GERAK SEMBAYAT-GRESIK	162.739	JATIM	KEMENTRIAN PU	2011	2016
11	TOL SEMARANG-BAWEN PAKET III	162.895		TRANS MARGA JATENG	2011	2012
12	Pengemb. Pusri II-B - (Civil, Arch & ME Works)	169.200	Palembang	PT. Pupuk Sriwijaya Indonesia	2013	2015

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
13	REHAB. TAMBAK GARAM KAB. INDRAMAYU	178.669	JABAR	Kementrian PU	2012	2014
14	Jalan Akses Kalibaru	213.520	DKI	PT. PELINDO II	2014	2016
15	Civil Works Package A & C - Indocement P.14	232.398	Citeureup	PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk	2013	2015
16	Fly Over dan Ground Road Terminal 3 Soetta	242.604	Banten	PT. Angkasa Pura II (Perseo)	2014	2015
17	Normalisasi Kali Pesanggrahan I	264.360	DKI	DPU Pengairan	2011	2014
18	TOL SEMARANG-BAWEN PAKET VI	289.178		TRANS MARGA JATENG	2011	2013
19	JALAN TOL GEMPOL-PORONG PAKET 3B	307.225	JATIM	JASA MARGA	2013	2014
20	Pengemb. Prasarana Batubara - Muara Teweh	506.633	KALTENG	PT. Subrapari Mapanindo Mineral	2012	2013
21	Genyem - PLTA (Jo -> Non.JO)	559.270	PAPUA	PT. PLN (Persero) Kantor Pusat	2008	2015
22	JALAN TOL SEMARANG-BAWEN PAKET 2	581.387		TRANS MARGA JATENG	2009	2012
TOTAL		5.063.293				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi II adalah sekitar Rp5.063.293 juta.

ii. **Proyek yang sedang berjalan Divisi II dengan nilai diatas Rp100 miliar**

No	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Bendung D.I. Kamijoro Bantul (MYC)	100.827	DIY	PU	2016	2018
2	Normalisasi Kali Ciliwung - Cisadane (51%)	138.328	DKI	PU	2013	2016
3	Irigasi Batang Sinamar (3.200 Ha) (60%)	147.198	Sumbar	PU	2014	2018
4	Sistem Penyediaan (SPAM) Maloy	159.199		Pemda	2016	2018
5	Jaringan Irigasi D.I Colo (MYC) (70%)	168.865	Jateng	PU	2016	2019
6	Jaringan Irigasi DI. Air Lakitan (2.590 Ha)	176.089	Sumsel	PU	2016	2019
7	Saluran Primer & Sekunder D.I. Jabung	183.583	Lampung	Kemen PUPERA Dirjen SDA PPK Kegiatan Irigasi dan Rawa II	2015	2018
8	FO Pegangsaan	189.747	DKI	PT. Citra Abadi Mandiri	2014	2016
9	Bangunan Fasilitas Kapal Selam PT. PAL Paket B2	201.364	Jatim	PT. PAL	2016	2017
10	PENGAMAN PANTAI DKI JAKARTA TAHAP 2 PAKET 1	206.965	JAKARTA	KEMENTRIAN PU	2015	2018
11	PLBN Motaain Kab. Belu Tahap 2	208.098		Non PU	2016	2019
12	BENDUNGAN KARIAN	220.526	BANTEN	KEMENTRIAN PU	2015	2019
13	Infrastruktur Pemukiman Motaain	222.154	NTT	Dirjend.Cipta Karya	2015	2017
14	Jalan Layang Adam Malik	230.277	DKI	Pemprop. DKI	2014	2017
15	Jalan Tj. Selor - Tj. Palas - Sekatak (Section 1)	240.378	Kaltara	Dirjend.Binamarga	2014	2017
16	PLTM 2x50 MW Sangir	241.661	-	WSE	2013	2016
17	Pelabuhan Sisi Darat Penajam	264.486	Kaltim	Dinas Perhubungan Kaltim	2014	2017
18	Jalan Sp. Rukis - Tanjung Kemuning (Package :13)	266.091	Bengkulu	PU	2014	2017
19	Jalan Batu Mundom - Tabuyung - Natal (MYC APBNP)	296.233	Sumut	PU	2015	2018
20	Bangunan Fasilitas Kapal Selam (Submarine Building Facilities) PT. PAL Indonesia (Persero)	307.262	Jatim	PT PAL	2015	2016
21	DERMAGA NOAHU LAMPUNG	311.298	LAMPUNG	PT. DAYA RADAR UTAMA	2013	2016
22	Jalan Simpang Tanjung - Aruk II (MYC)	320.605	Kalbar	Dirjend Binamarga	2015	2018
23	Pkt. 2 Trans. 500 KV : Peranap - Perawang (Tanah)	344.451	SUMUT	PT. PLN Persero	2016	2018
24	BENDUNGAN TAPIN	399.541	KALTENG	KEMENTRIAN PU	2015	2019

No	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
25	BENDUNGAN LEUWI KERIS	408.757	JABAR	KEMENTRIAN PU, SDA	2016	2021
26	Pkt. 2 Trans. 500 KV : Peranap - Perawang (Pondasi)	452.146	SUMUT	PT. PLN Persero	2016	2018
27	Pkt. 1 Trans. 500 KV : New Aur Duri-Peranap (Tanah)	476.627	SUMUT	PT. PLN Persero	2016	2018
28	Pkt. 1 Trans. 500 KV : New Aur Duri-Peranap (Pondasi)	589.361		PT. PLN Persero	2016	2018
29	PEMBANGUNAN WADUK GONDANG	597.721	JATENG	KEMENTRIAN PU	2014	2018
30	Pelabuhan Belawan Paket 1 (Tahap 1)	621.699	Sumut	Perhubungan	2016	2018
31	ON SHORE WORK KUALA TANJUNG MULTI PURPOSE	734.506	SUMUT	PMT	2015	2017
32	PAKET 2 TRANSMISI 500 KV, PERANAP-PERAWANG	1.776.904	SUMUT	PT. PLN Persero	2016	2018
33	Paket 1 Transmisi 500 KV, New Aur Duri-Peranap	2.466.427	SUMUT	PT. PLN Persero	2016	2018
TOTAL		11.202.947				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi II adalah sekitar Rp11.202.947 juta.

3) Divisi III

Divisi III berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang Pemasaran sampai dengan Produksi untuk pekerjaan proyek-proyek Jalan Tol di Pulau Jawa

i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi III dengan nilai diatas Rp100 miliar (2011- Desember 2017)

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	PEMB. JALAN TOL CISUMDAWU PHASE I	135.401	JABAR	KEMENTRIAN PU	2012	2017
2	JEMBATAN MERAH PUTIH BENTANG TENGAH	286.962	AMBON	KEMENTRIAN PU	2012	2015
3	JALAN TOL BENOA 2	314.424	BALI	TRANS MARGA BALI TOL	2012	2013
4	JALAN AKSES TANJUNG PRIOK E2	332.231	JATENG	KEMENTRIAN PU	2012	2015
5	JEMBATAN AJI TULUR - JEJANGKAT	340.928	KALTIM	KEMENTRIAN PU	2012	2016
6	BANDARA KUALANAMU	345.742	JATENG	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	2011	2012
7	JALAN TOL BENOA 4	438.872	BALI	TRANS MARGA BALI TOL	2012	2013
8	JALAN TOL PEJAGAN-PEMALANG SEKSI II	673.286	JATENG	PT. PPTR	2014	2016
9	JALAN TOL PEJAGAN-PEMALANG SEKSI I	1.271.371	JATENG	PT. PPTR	2014	2016
TOTAL		4.139.217				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi III dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp4.139.217 juta.

ii. Proyek yang sedang berjalan Divisi III dengan nilai diatas Rp100 miliar

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	JALAN TOL SOLO-KERTOSONO SEKSI I MYC	152.744	JATENG	KEMENTRIAN PU	2015	2017
2	TOL DEPOK-ANTASARI (PAKET 2)	217.886	JABAR	PT. CITRA WASPPHUTO WA	2015	2016
3	PEMB. JALAN TOL CISUMDAWU PHASE II	237.682	JABAR	KEMENTRIAN PU	2015	2018
4	TOL CIAWI-SUKABUMI SEKSI 1 PKT 2.1 (EX POSCO)	285.937	JABAR	PT. TJT	2016	2017

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
5	JALAN TOL BECAKAYU SEKSI 1 A	350.032	DKI	PT. KKDM	2014	2017
6	JALAN TOL CIAWI-SUKABUMI SEKSI I	375.782	JABAR	PT. TRANS JABAR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2015	2017
7	JEMBATAN LRT	402.772	PALEMBANG	PT. TJT	2016	2017
8	TOL CIAWI-SUKABUMI SEKSI I PKT 3.2 (EX POSCO)	411.717	JABAR	PT. CITRA WASPPHUTO WA	2014	2016
9	TOL DEPOK-ANTASARI (PAKET 1)	415.704	JABAR	PT. PBTR	2016	2018
10	TOL PEMALANG-BATANG SEKSI 2	438.178	JATENG	PT. PBTR	2016	2018
11	TOL PEMALANG-BATANG SEKSI 4	644.459	JATENG	KEMENTERIAN PU	2014	2019
12	BENDUNGAN RAKNAMO, NTT	646.010	NTT	PT. CIMANGGIS CIBITUNG TOLWAYS	2015	2017
13	TOL CIMANGGIS CIBITUNG SEKSI I	657.209	DKI JAKARTA	PT. SOLO NGAWI JAYA	2015	2017
14	TOL SOLO-NGAWI (SNJ) - SN 2B	731.052	JATENG	PT. SOLO NGAWI JAYA	2015	2017
15	JALAN TOL BECAKAYU SEKSI 1 BC	817.674	DKI	PT. KKDM	2014	2017
16	TOL PEJAGAN-PEMALANG PAKET 3	905.586	JATENG	PT. PPTR	2015	2017
17	TOL SOLO-NGAWI (SNJ) - SN 1A	1.023.442	JATENG	PT. SOLO NGAWI JAYA	2015	2017
18	TOL SOLO-NGAWI (SNJ) - SN 2A	1.023.546	JATENG	PT. SOLO NGAWI JAYA	2015	2017
19	TOL SOLO-NGAWI (SNJ) - SN 1B	1.037.593	JATENG	PT. SOLO NGAWI JAYA	2015	2017
20	TOL PEMALANG-BATANG SEKSI 1	1.051.342	JATENG	PT. PBTR	2016	2018
21	TOL BATANG-SEMARANG PAKET II (SEKSI 3)	1.115.434	JATENG	PT. JSB	2016	2018
22	TOL NGAWI - KERTOSONO (NKJ)	1.476.767	JATENG	PT. NGAWI KERTOSONO JAYA	2015	2017
23	TOL CIAWI-SUKABUMI SEKSI 2	1.623.190	JABAR	PT. TRANS JABAR TOL	2016	2018
24	TOL CIAWI-SUKABUMI SEKSI 3	1.652.983	JABAR	PT. TRANS JABAR TOL	2016	2018
25	TOL CIAWI-SUKABUMI SEKSI 4	1.724.233	JABAR	PT. TRANS JABAR TOL	2016	2018
26	TOL PEJAGAN-PEMALANG SEKSI 4	1.824.842	JATENG	PT. PPTR	2016	2018
27	TOL BATANG-SEMARANG PAKET III (SEKSI 4 DAN 5)	2.198.598	JATENG	PT. JSB	2016	2018
28	JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK II ELEVATED	2.245.771			2017	2019
29	TOL BATANG-SEMARANG PAKET I (SEKSI 1 DAN 2)	2.524.833	JATENG	PT. JSB	2016	2018
30	TOL CIMANGGIS-CIBITUNG SEKSI 2	3.591.327	DKI	PT. CCTW	2016	2018
31	JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK II ELEVATED	4.027.594			2017	2019
TOTAL		35.831.917				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Regional Barat dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp35.831.917 juta.

4) Divisi IV

Divisi IV berkedudukan di Surabaya dan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang Pemasaran sd Produksi untuk Pekerjaan Proyek-proyek Jalan Tol di Pulau Jawa.

i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi IV dengan nilai diatas Rp100 miliar (2015-2016)

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Gedung Baru Kantor Gubernur NTT	149.865	NTT	Dinas PU	2015	2016
TOTAL		149.865				

Total nilai kontrak proyek yang telah dikerjakan oleh Divisi IV dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp149.865 juta.

ii. Proyek yang sedang berjalan Divisi IV dengan nilai diatas Rp100 miliar

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Jalan Hampengan - Mendawai II (Multi Years)	120.516	Kalteng	Dinas PU Kab.Kantingan	2015	2018
2	Jalan Rantepao - Palopo (MYC)	128.730	Sulsel	Dirjend. Bina Marga	2015	2017
3	Jalan Tol Ruas Salatiga - Kertasura (Seksi 4.4)	195.006	Jateng	SNJ	2016	2018
4	Pemb. Saluran Sungai Kr. Anyar-Kr. Anyar Pantai	198.988	Kaltara	Dinas PU Kota Tarakan	2015	2018
5	Jalan Batu Aji - Kuaro (MYC)	222.204	Kaltim	Dirjen Bina Marga	2015	2018
6	Jalan Tol Ruas Salatiga - Kertasura (Seksi 5)	239.237	Jateng	SNJ	2016	2018
7	Runway Bandara Samarinda Baru	263.955	Kaltim	PT.Angkasa Pura	2014	2017
8	Jalan Tol Ruas Salatiga - Kertasura (Seksi Jembatan)	273.251	Jateng	SNJ	2016	2018
9	TOL GEMPOL-PASURUAN	310.126	Jatim	JASA MARGA	2013	2016
10	Jalan Tol Gempor Paket 2 Porong-Kejapanan	463.896	Jatim	JASA MARGA	2017	2018
11	Jalan & Jembatan Oecusse Paket I (Design & Build)	501.871	TL	Republica Democratica de Timor Leste	2014	2016
12	Jalan Tol Ruas Salatiga - Kertasura (Seksi 4.1, 4.2, 4.3)	636.682	Jateng	SNJ	2016	2018
13	Upgrading of Existing Suai Airport	643.066	TL	Republica Democratica de Timor Leste	2014	2017
14	Jalan Tol Ruas Salatiga - Kertasura (General)	1.109.528	Jateng	SNJ	2016	2018
15	Jalan Tol KLBM Seksi 2	1.415.812	Jatim	WBW	2016	2018
16	Jalan Tol KLBM Seksi 1	1.863.300	Jatim	WBW	2016	2018
17	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	2.925.435	Jatim	TPJT	2016	2018
TOTAL		11.511.602				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi IV dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp11.511.602 juta.

5) Divisi V

Divisi V berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang Pemasaran sd Produksi untuk Pekerjaan Proyek-proyek Jalan Tol di daerah selain Pulau Jawa

i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi V dengan nilai diatas Rp100 miliar (2015-2016)

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Jalan Kerkap - Pasar Pedati (Paket 06)	107.677	Bengkulu	PU	2015	2016
TOTAL		107.677				

Total nilai kontrak proyek yang telah dikerjakan oleh Divisi V dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp107.677 juta.

ii. Proyek yang sedang berjalan Divisi V dengan nilai diatas Rp100 miliar

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Jln Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Zona 3)	527.318	Lampung	PT. Jasa Marga Semarang Batang	2016	2018
2	Jln Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Zona 2)	528.198	Lampung	PT. Jasa Marga Semarang Batang	2016	2018
4	Jln. Bebas Hambatan & Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (Seksi 2)	587.865	Lampung	PT. Jasa Marga Semarang Batang	2016	2017
5	Jln Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Zona KLB-2)	783.212	Lampung	WBW	2016	2018
6	Jln Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Zona 1)	1.233.202	Lampung	PT. Jasa Marga Semarang Batang	2016	2018
7	Jln Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Zona KLB-1)	1.392.378	Lampung	WBW	2016	2018
8	Jln. Bebas Hambatan & Tol Bakauheni - Terbanggi Besar	1.857.991	Lampung	PT. Hutama Karya	2016	2017
TOTAL		6.910.163				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi V dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp6.910.163 juta.

6) Divisi VI

Divisi VI berkedudukan di Palembang dan melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang Pemasaran sd Produksi untuk Pekerjaan Proyek-proyek Jalan Tol di daerah selain Pulau Jawa

i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi VI dengan nilai diatas Rp100 miliar (2015-2016)

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Infrastruktur Bank Mandiri Wijaya Kusuma	130.476	DKI	Bank Mandiri	2014	2016
TOTAL		130.476				

Total nilai kontrak proyek yang telah dikerjakan oleh Divisi VI dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp130.476 juta.

ii. Proyek yang sedang berjalan Divisi V dengan nilai diatas Rp100 miliar

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Gedung Kantor SKPD Pemkot Pekanbaru (multiyears)	180.829	Pekanbaru	PU	2015	2017
2	Hotel Tangram & Sadira Pekanbaru	190.883	Pekanbaru	PT. Halla Mohana	2014	2015
3	Jalan Bebas Hambatan Manado-Bitung (Simpang Susun)	211.232	Sulut	PU	2015	2018
4	Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Segmen 5)	248.786	Kaltim	PU	2015	2018
5	Tol MKTT Seksi 4 A (Lubuk Pakam-Adolina)	436.734	Sumut	JMTT	2015	2017
6	Tol MKTT Seksi 3 (Parbrakan-Lubuk Pakam)	468.431	Sumut	JMTT	2015	2016
7	Jalan Bebas Hambatan Manado-Bitung (PA1)	490.228	Sulut	PU	2016	2018
8	Tol MKTT Seksi 6 (Teluk Mengkudu - Sei Rempah)	503.858	Sumut	JMTT	2015	2018
9	Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung II (Seksi 2) - STA52+200 s/d 67+400	1.015.733	Sumsel	Sriwijaya M P	2016	2019

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
10	Jalan Tol Kayu Agung- Palembang-Betung II (Seksi 3) - STA 96+000 s/d 111+690	1.048.477	Sumsel	Sriwijaya M P	2016	2019
11	Jalan Tol Kayu Agung- Palembang-Betung II (Seksi 2) - STA 33+500 s/d 52+200	1.599.537	Sumsel	Sriwijaya M P	2016	2019
12	Jalan Tol Kayu Agung- Palembang-Betung II (Seksi 3) - STA 67+400 s/d 96+000	1.911.181	Sumsel	Sriwijaya M P	2016	2019
13	Jalan Tol Kayu Agung- Palembang-Betung II (Seksi 1 / Induk)	2.211.163	Sumsel	Sriwijaya M P	2016	2019
TOTAL		10.517.073				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi VI dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp10.517.073 juta.

8.15. BAHAN BAKU

Bahan baku yang digunakan oleh Perseroan sebagian besar berasal dari material Lokal (berkisar antara 75%-85%), sedang sisanya Impor (khususnya Peralatan Mekanikal & Elektrikal). Biaya bahan baku yang berasal dari pemasok, dalam struktur Beban Kontrak (*cost structure*) Perseroan adalah sebesar 30%-40%, yang pengadaannya dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Pengadaan Material (SPM) untuk jangka waktu tertentu. Banyaknya pemasok yang tersedia, menguntungkan Perseroan untuk mendapatkan bahan baku sehingga Perseroan selama ini tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

8.16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

Perseroan telah memiliki/menguasai Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri oleh Perseroan berupa:

- Sertifikat Paten No. IDP0031392 yang dikeluarkan oleh Direktur Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 26 Juli 2012, dengan tanggal pendaftaran adalah 29 Agustus 2007 dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pendaftaran, atas invensi dengan judul “Sistem Peralatan Bekisting Gelincir Terowongan” dengan Nama Pemegang Paten adalah Perseroan;
- Sertifikat Paten No. IDP0023301 yang dikeluarkan oleh Direktur Paten pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tanggal 21 April 2009, dengan tanggal pendaftaran adalah 1 Desember 2006 dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pendaftaran, atas invensi dengan judul “Sistem dan Peralatan Payung Elektrik” dengan Nama Pemegang Paten adalah PT Mega Cipta Sentra Persada, Perseroan, dan PT Cipta Intra Sarana Inti Tama secara bersama-sama;
- Sertifikat Merek No. IDM000029288 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 8 Februari 2005 yang berlaku selama 10 (sepuluh tahun) sejak tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 29 Agustus 2003, atas Merek “Waskita” dengan nama pemegang merek terdaftar adalah Perseroan;
Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan pembaharuan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut diatas berdasarkan permohonan pendaftaran merek tanggal 15 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh direktur merek dan sedang dalam tahap Pemeriksaan Substantif 1 dengan surat Nomor 01/LO/SMA-EXT/iv/2016 tanggal 25 April 2016 Perihal Laporan Pendaftaran Merek Waskita
- Surat Pendaftaran Ciptaan No.024536 yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2004, dan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal pengumuman yaitu pada tanggal 22 Desember 2000, dengan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas nama Perseroan.

Perseroan tidak memiliki/menguasai Hak atas Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari pihak lain.

8.17. PERSAINGAN

Batasan proyek yang dapat diambil oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Divisi I

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Seluruh Indonesia dan Timor Leste	Nilai Kontrak \geq 300 miliar

Divisi II

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Seluruh Indonesia dan Timor Leste	Nilai kontrak > Rp 300 miliar

Divisi III

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Pulau Jawa	Tidak ada batasan Nilai Kontrak

Divisi IV

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Pulau Jawa	Tidak ada batasan Nilai Kontrak

Divisi V

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Selain Pulau Jawa	Tidak ada batasan Nilai Kontrak

Divisi VI

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Selain Pulau Jawa	Tidak ada batasan Nilai Kontrak

Untuk klasifikasi usaha bersifat general terdiri dari 2 (dua) klasifikasi yaitu :

- Berdasarkan Perlem No. 2 tahun 2013 klasifikasi B1 (peralihan), dapat melaksanakan pekerjaan < 250 M
- Berdasarkan Perlem No. 10 tahun 2013 untuk klasifikasi B2 dapat melaksanakan pekerjaan > 250 M, dengan tabel sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Nilai Proyek
1	Kelas B (Besar)	\geq Rp10 Miliar
2	Kelas M (Menengah)	Rp1 Miliar s/d Rp10 Miliar
3	Kelas K (Kecil)	<Rp1 Miliar

Saat ini Perseroan berada pada klasifikasi B. Persaingan dalam Industri Jasa konstruksi cukup tajam karena jumlah pesaing sekitar 125 perusahaan klasifikasi B di seluruh Indonesia. Persaingan tersebut menjadi semakin ramai dengan masuknya kontraktor-kontraktor asing untuk mengikuti tender-tender ICB (*International Competitive Biding*) pada proyek-proyek yang didanai dengan pinjaman luar negeri. Walau demikian, tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk masuk dalam usaha jasa konstruksi klasifikasi B karena dibatasi oleh penguasaan teknologi, padat modal dan pengusahaan serta penguasaan pasar tingkat tinggi. Jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri yang sama dengan Perseroan, maka Perseroan berada di papan (Sumber: Biro Pusat Statistik, 2011).

Perseroan memahami bahwa persaingan dalam penjualan di industri konstruksi di Indonesia sangatlah ketat. Namun dengan keahlian dan pengalaman yang telah dimilikinya, Perseroan yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan. Hal ini terutama didukung dengan keunggulan bersaing Perseroan diantaranya *cost structure* yang sangat kompetitif, tenaga kerja yang ahli serta pengalaman khusus yang dimiliki Perseroan dalam beberapa jenis proyek seperti pembangunan bandara.

Berikut ini adalah beberapa perusahaan konstruksi besar yang antara lain menjadi pesaing Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Pesaing dalam hal
1.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Penjualan
2.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Penjualan
3.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Penjualan
4.	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa Konstruksi	Penjualan

Dengan adanya persaingan di industri konstruksi, sesuai dengan data olahan internal Perseroan dengan sumber dari BPS, Perseroan meyakini bahwa pangsa pasar Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar 7,54% yaitu diperbandingkan antara pasar yang diperoleh Perseroan dengan pasar potensial konstruksi yang informasinya tersedia untuk umum, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2016	2015
Potensial Pasar Konstruksi*)	927.426	881.534
Realisasi Perolehan Perseroan	69.974	32.058
(%)	7,54%	3,64%

Catatan: *) Data merupakan hasil olahan internal Perseroan dengan sumber dari BPS

8.18. PEMASARAN

Perseroan melakukan pemasaran secara desentralisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Divisi dan Unit usaha. Di bidang usaha jasa konstruksi, kegiatan pemasaran baru dapat terlaksana apabila pengguna jasa telah menaruh "kepercayaan" kepada pelaksana. Hal tersebut berkaitan dengan sifat jasa konstruksi menawarkan sesuatu yang belum berwujud dengan suatu harga, kualitas dan waktu penyerahan yang telah ditentukan. Proses produksi dalam bentuk pengerjaan proyek dilaksanakan di tempat pengguna jasa berdasarkan kontrak yang disepakati bersarna antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Guna mengintensifkan usaha-usaha pemasaran, Perseroan menerapkan program *Offensive Marketing* dan *Defensive Marketing*. *Offensive Marketing* adalah usaha-usaha untuk mendapatkan proyek dari pelanggan baru. Tugas ini pada umumnya dilaksanakan oleh Unit usaha dan Divisi, dengan tingkat margin yang relatif kecil. *Defensive Marketing* adalah usaha-usaha pemasaran untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar tetap menggunakan jasa yang ditawarkan Perseroan.

Hasil dari usaha ini biasanya berupa pekerjaan tambah, *repeat order*, baik melalui pemilihan langsung maupun penunjukan langsung tanpa melalui proses tender. Tugas ini pada umumnya dilaksanakan oleh Divisi dan menghasilkan margin relatif lebih besar.

Dalam kaitannya untuk memperoleh suatu proyek. Perseroan mengumpulkan informasi mengenai proyek-proyek yang Potensial melalui informasi yang didapatkan dari konsultan, lembaga keuangan, BUMN, Pemerintah Daerah, BPKM pusat maupun daerah, juga pengumuman dari media massa.

Kegiatan Pemasaran

Kegiatan pemasaran meliputi seluruh Indonesia yang dibagi dalam Divisi I, Divisi II, Divisi III, Divisi IV, Divisi V dan Divisi VI yang mencakup Area Divisi:

Nama Divisi	Area Pemasaran	Keterangan
Divisi I	Seluruh Indonesia	≥ 300 miliar
Divisi II	Seluruh Indonesia & Timor Leste	≥ 300 miliar
Divisi III	Pulau Jawa	tidak ada batasan
Divisi IV	Pulau Jawa	tidak ada batasan
Divisi V	Selain Pulau Jawa	tidak ada batasan
Divisi VI	Selain Pulau Jawa	tidak ada batasan

Sistem Penjualan dan Saluran Distribusi

Kegiatan pemasaran dan distribusi Perseroan:

- Melakukan perintisan kepada calon pemberi kerja secara kontinyu dan periodik untuk mendapatkan informasi pasar yang akurat
- Meningkatkan *networking* kepada seluruh *Stake Holder* maupun Konsultan untuk mendapatkan informasi pasar Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri
- Melakukan kegiatan dengan mengikuti *event* regional atau nasional dalam bentuk pameran atau seminar
- Mencari info pasar dari pemberitaan atau publikasi mengenai prospek proyek dari media cetak dan elektronik untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil Perseroan khususnya dalam proses mengikuti tender
- Mengikuti proses prakualifikasi, lelang, sampai dengan penanda tangan kontrak

8.19. PROSPEK USAHA

Data *Concrete Show South East Asia* (SEA) 2016 menyebutkan bahwa pasar konstruksi Indonesia diperkirakan akan menyumbang angka 60%-70% dari total nilai pasar konstruksi ASEAN. Indonesia dapat dipastikan akan menjadi magnet bagi investasi konstruksi, baik di ranah regional ASEAN maupun global.

Kebutuhan akan infrastruktur terutama pada negara berkembang di daerah Asia tiap tahunnya bertambah. Kebutuhan infrastruktur yang tinggi inilah merupakan pendorong utama pertumbuhan sektor konstruksi. Di

Indonesia potensi pertumbuhan infrastruktur untuk tahun-tahun kedepan diprediksikan akan masih terus bertambah terutama pada bidang energi dan transportasi seperti Listrik dan Jalan.

Alokasi pendanaan untuk sarana transportasi seperti jalan, jembatan, dan tol memperoleh nilai alokasi tertinggi dengan total Rp9,8 triliun sampai dengan 2016. Pendanaan kedua terbesar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pada sektor Sumber Daya Air (SDA) dengan total alokasi pendanaan sebesar Rp184 triliun.

Secara keseluruhan, prospek usaha Perseroan dalam bidang konstruksi semakin cemerlang. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berlangsung dari tahun 2015-2019, yang salah satunya adalah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur mengalokasikan investasi yang cukup besar untuk program proyek infrastruktur yang nantinya akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan menjadi lokomotif pembangunan nasional dan daerah.

Tingginya peluang industri infrastruktur baik sektor pemerintah maupun swasta merupakan peluang utama para pemain di sektor industri konstruksi. Kebutuhan akan infrastruktur terutama pada *developing countries* di wilayah Asia bertambah tiap tahunnya. Kebutuhan infrastruktur yang tinggi ini menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor konstruksi. Potensi pertumbuhan infrastruktur untuk tahun-tahun kedepan diprediksikan akan masih terus bertambah terutama pada bidang energi dan transportasi seperti Listrik dan Jalan (Tol).

8.20. PELANGGAN DAN DAYA SAING

Segmen Pasar

Segmen pasar dibagi dalam beberapa segmen yaitu, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Pemerintahan Daerah, Swasta dalam Negeri dan Luar Negeri.

Komposisi Segmen Kontrak Baru

(dalam miliar Rupiah)

	31 Maret				31 Desember							
	2017		2016		2016		2015		2014		2013	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pemerintah	-	-	1.830	46.72	4.348	6.21	9.859	30,73	4.566	34.29	6.853	55.89
BUMN/D	7.569	64.97	59	1.51	1.258	1.79	3.927	12.24	3.623	27.21	2.727	22.3
Swasta	430	3.69	159	4.07	1.677	2.56	4.135	12,89	5.127	38.50	2.672	21.7
PengembanganBisnis	3.651	31.34	1.868	47.70	62.691	89.59	14.162	44.14	-	-	-	-
Total	11.651	100.00	3.917	100.00	69.974	100,00	32.084	100,00	13.317	100,00	12.263	100,00

Pelanggan Berulang

Perseroan juga telah menjalin kerjasama yang baik dengan klien-kliennya. Hal ini terbukti dengan banyaknya order pengerjaan proyek yang diberikan oleh pihak yang sama. Sejak tahun 2015 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyelesaikan antara lain :

No	Jumlah Proyek	Pemberi Proyek
1	418	Pekerjaan Umum
2	327	Pemda
3	113	Pemerintah Non-PU
4	32	Krakatau Steel-Posko
5	33	Angkasa Pura
6	27	PT PLN
7	20	PT Jasa Marga
8	12	Pelindo
9	10	Kementerian Perhubungan
10	12	Kemenpera
11	10	Kemendikbud
12	7	PT Semen Padang
13	8	PT Bank Mandiri
14	4	PT Pertamina
15	3	PT Brantas
16	5	Transmarga
17	3	Pupuk Sriwijaya
18	3	Gunadarma
19	2	Kajima
20	2	Bin Laden

Pendapatan dari Pelanggan Berulang

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Kementerian Pekerjaan Umum	616.417	206.544	1.656.069	2.297.144
Pemerintah Daerah	91.447	167.974	1.078.515	1.775.455
Total Pelanggan Berulang	707.864	374.518	2.734.584	4.072.599
Total Pendapatan Usaha	7.141.795	3.071.542	23.000.000	14.152.753
% Pelanggan Berulang terhadap Pendapatan Usaha	63,37	45,14	11,89	28,78

Daya Saing

Proyek-proyek yang didapat Perseroan adalah berasal dari lelang dan penunjukan. Berikut tabel mengenai perkembangan kontrak yang diperoleh oleh Perseroan dari tahun 2015 hingga periode 3 (tiga) bulan tahun 2017:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Tender Diikuti	25.669	25.380	123.933	84.085
Tender Dimenangkan	11.007	3.753	52.431	32.463
Daya Saing (%)	42,88	14,79	42,31	36,23

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan dan/atau pemerintah.

8.21. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

a. Memiliki posisi yang menguntungkan dalam penggarapan potensi dari proyek infrastruktur Pemerintah

Sebagai BUMN di bidang konstruksi, Perseroan memiliki posisi yang solid dalam mendapatkan proyek-proyek infrastruktur besar yang direncanakan oleh Pemerintah seperti MP3EI, jalan tol, infrastruktur pelabuhan dan Bandar udara, pembangkit listrik dan proyek-proyek lainnya. Sejak tahun 1980an, Perseroan selalu mendapatkan proyek-proyek unggulan dari Pemerintah, seperti Proyek Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarna-Hatta dan Bandar Udara Juanda (2001), Jembatan Pasupati dan Suramadu (2005), serta Bendungan Jatigede (2009), Burj View Dubai, ADFC Tower Dubai, Legend Plaza Dubai, King Abdullah Financial District Riyadh (2010), Dredging & Embankment Krakatau Steel (2011), Diversion Tunnel Jatigede (2012), serta Jembatan Kelok 9 dan Jalan Tol Bali Mandara (2013).

b. Pemain besar nasional dengan reputasi dan *customer base* yang luas

Perseroan merupakan perusahaan konstruksi dengan pendapatan usaha dari sektor konstruksi yang terbesar di Indonesia (Sumber : Data laporan keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi yang tercatat di BEI, Desember 2013). Perseroan juga telah mendapatkan berbagai macam penghargaan dalam usahanya dari lembaga-lembaga yang ada di dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki keahlian dan reputasi yang baik di bidangnya.

Tingginya pendapatan usaha tersebut juga didukung oleh *customer base* Perseroan yang luas; terdiri dari instansi pemerintah, BUMN dan pihak swasta (dalam negeri dan luar negeri). Perseroan senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan klien sehingga banyak dari klien tersebut yang menjadi *repeat customers* dalam 6 tahun terakhir.

c. Memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas

Perseroan memiliki beberapa produk unggulan yang membantu dalam pelaksanaan proyek-proyeknya, diantaranya Pembangunan Bandara, Dermaga, Bendungan, Tunnel, Jalan Tol, Fly-over dan Jembatan Bentang Panjang. Konsumen menuntut penyelesaian pekerjaan dengan waktu delivery lebih cepat dan mutu pelaksanaan yang lebih baik. Dalam hal itu, Perseroan dapat mengungguli pesaing-pesaing lainnya dengan pengalaman yang dimilikinya dalam pembangunan proyek-proyek tersebut.

Untuk menunjang kinerja Perseroan dalam menciptakan produk dengan kualitas yang bermutu, Perseroan menerapkan proses standar dengan sistem ISO 14001 : 2004 (*Environmental Management System*), ISO 9001: 2000 (quality management system), dan OHSAS 18001 : 2007 (*Health and Safety Management System*), serta Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan (Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa).

d. Melakukan diversifikasi usaha yang bersinergi erat dengan kompetensi inti sebagai kontraktor

Beberapa proyek yang sedang dirintis untuk program investasi antara lain :

1. Proyek Jalan Tol Pemalang – Pejagan di Jawa Tengah
2. Proyek Jalan Tol Krian – Legun di Bunder di Jawa Timur
3. Proyek Jalan Tol Kualanamu di Medan, Sumut
4. Proyek Terminal Curah Cair Kuala Tanjung di Sumatera Utara
5. Proyek PLTM Sangir di Sumatera Barat

e. Pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat

Pendapatan Perseroan terus menunjukkan angka yang bertumbuh dan stabil. Segmen usaha konstruksi mengalami kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun sebagai dampak positif atas penerapan strategi peningkatan marjin pendapatan melalui *cost reduction program*, kegiatan EPC, serta peningkatan sistem kerja internal secara menyeluruh.

Perseroan juga secara konsisten berupaya untuk meningkatkan daya saingnya, hal ini terbukti dari persentase tender yang dimenangkan dari tahun ke tahun. Perseroan terus mendapatkan proyek-proyek besar setiap tahunnya untuk mencapai target RKAP tahunan yang telah ditentukan.

f. Desentralisasi organisasi dan jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas di seluruh Indonesia

Perseroan telah melakukan reorganisasi dalam rangka melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan struktur organisasi yang ada sebelumnya. Dengan adanya struktur organisasi baru ini, Perseroan dapat mewujudkan sistem desentralisasi dan pemberdayaan Divisi yang dibagi berdasarkan pekerjaan dan wilayah geografis yang lebih spesifik. Beberapa manfaat reorganisasi yang dilakukan Perseroan antara lain:

- Memiliki unit usaha di setiap provinsi di Indonesia dan di Luar Negeri (Jeddah), dengan minimum personil.
- Pendelegasian proses pengambilan keputusan kepada Divisi.
- Masing-masing Divisi menangani proyek di daerahnya serta Divisi khusus (Gedung dan Sipil yang menangani proyek-proyek di atas Rp250 miliar).
- Lebih selektif mendapatkan proyek-proyek *prefinancing* (didukung dengan Jaminan Pembayaran).

Selain itu, Perseroan memiliki wilayah produksi dan jaringan informasi yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, serta Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Dengan cabang di 33 lokasi di dunia, Perseroan mendapatkan cakupan pasar yang lebih luas.

g. Memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan handa

Manajemen Perseroan adalah orang-orang yang handal dan memiliki kapabilitas yang tinggi dalam bidang konstruksi. Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kapabilitas yang tinggi, fit, proper, profesional dan memiliki *global mindset*.

Sumber daya manusia adalah aspek yang sangat penting bagi Perseroan. Untuk itu, Perseroan senantiasa mengembangkan keahlian tenaga kerjanya dengan pengembangan dan, pelatihan dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA). Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif diwujudkan dengan penerapan beberapa program, seperti rekrutmen *Management Trainee* (MT), Beasiswa bagi pegawai untuk mengikuti program S2 dalam dan luar negeri, *Merit System Program*, dan menjalankan *sharing knowledge* maupun program pengembangan kepemimpinan.

h. Memiliki kemampuan untuk menciptakan proyek sendiri melalui lini usaha investasi

Diversifikasi usaha yang dilakukan Perseroan melalui anak perusahaan dan entitas asosiasi menciptakan dampak langsung ke Perseroan. Investasi yang dilakukan anak perusahaan berupa investasi infrastruktur jalan tol, *property* dan *realty* bersinergi dengan kegiatan usaha Perseroan. Dengan hal ini Perseroan memiliki kemampuan untuk menciptakan proyek sendiri.

8.22. STRATEGI USAHA

Dalam mewujudkan tercapainya tujuan Perseroan dalam hal pertumbuhan bisnis, penghematan biaya, serta pembuatan dan pembaharuan sistem, Perseroan melaksanakan strategi sebagai berikut:

a. Pengembangan (2014)

Tema strategi ini memfokuskan kepada Perseroan untuk bisa mengembangkan produk-produk baru misalnya konstruksi yang berbasis kepada K3LM (“*Green Construction*”), semakin banyaknya proyek-proyek *Engineering Procurement Construction* (EPC), Energi, Investasi di infrastruktur dan *property/realty* serta proyek-proyek unggulan lainnya. Hal ini didukung oleh sistem dan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang memadai.

b. Realisasi (2015 - 2016)

Perseroan memiliki arus kas operasi yang positif didukung dengan pertumbuhan penjualan dan laba bersih yang baik dengan laba bersih yang melebihi dari industri sejenis.

c. Berkelanjutan (2017 – 2019)

Mengelola dan melaksanakan konsep bisnis dengan baik dan terintegrasi, serta siap mengantisipasi segala perubahan yang terjadi berkaitan dengan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, sehingga dapat memenangkan persaingan secara berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*).

8.23. RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan yang dapat mempengaruhi produksi, penjualan, pendapatan, dan laba Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DILUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, PENGENDALI, ATAU PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN, ATAU AFILIASI DARI ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, PENGENDALI, ATAU PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN YANG MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN LAIN YANG MENJALANKAN BISNIS YANG SAMA ATAU MENGHASILKAN PRODUK YANG SAMA DENGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PERSEROAN, KECUALI PENGENDALI ATAU PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG DIMAKSUD ADALAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

IX. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

1. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
2. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
3. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
4. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan
- b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPh"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No.52 tanggal 21 Juli 2017 juncto Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No.47 tanggal 23 Agustus 2017 juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No.63 tanggal 20 September 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Total Penjaminan (Rp)	(%)
1.	PT Bahana Sekuritas	500.000.000.000	16,67%
2.	PT BNI Sekuritas	500.000.000.000	16,67%
3.	PT Danareksa Sekuritas	500.000.000.000	16,67%
4.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	500.000.000.000	16,67%
5.	PT Indo Premier Sekuritas	500.000.000.000	16,67%
6.	PT Mandiri Sekuritas	500.000.000.000	16,67%
JUMLAH		3.000.000.000.000	100,00%

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 adalah Mandiri Sekuritas.

PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang Terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik** : **KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)**
The Plaza Office Tower 32nd Floor Jakarta 12190
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350, Indonesia
Telp: (021) 2992 3100
Faks: (021) 2992 8200 / 8300

Nomor STTD : 136/BL/STTD-AP/2011

Tanggal STTD : 25 Februari 2011

Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0561 atas nama Henri Arifian

Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukkan : No.022/07/17/SA/HA tanggal 17 Juli 2017

Tugas Pokok: : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- 2. Konsultan Hukum** : **Wecolaw Office**
Jl. Blora No. 31, Menteng
Jakarta 10310
Telp : (021) 3917444
Fax : (021) 3917440

Nomor STTD : 361/PM/STTD-KH/2001 atas nama Teddy Ardhika Wardana, S.H., LL.M.

Tanggal STTD : 6 April 2001

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.200125

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Surat Penunjukkan : No. 229/WK/SP/2017 tanggal 27 Maret 2017

Tugas Pokok: : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- 3. Notaris:** : **Fathiah Helmi, S.H.**
Gedung Graha Irama Lt. 6C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2
Jakarta Selatan
Tlp. : (021) 52907304, (021) 52907305-6
Fax. : (021) 5261136
- Nomor STTD : 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.
- Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris
- Surat Penunjukkan : No. 228/WK/SP/2017 tanggal 27 Maret 2017
- Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pengakuan Hutang, akta jaminan serta akta-akta pengubahannya.
- 4. Wali Amanat** : **PT Bank Mega Tbk**
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000
Fax : (021) 79187100
- Nomor STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
- Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan AWAI No. AWAI/06/12/2008 tertanggal 17 Desember 2008
- Pedoman Kerja : Standar prosedur operasional Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.
- Surat Penunjukkan : No. 434/WK/DIR/2017 tanggal 30 Maret 2017
- Tugas Pokok: : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan No.VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini:

- tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok Obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017;
- tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No.51 tanggal 21 Juli 2017, juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No. 45 tanggal 23 Agustus 2017, juncto Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No. 61 tanggal 20 September 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas dengan Surat No. 1021/CAMS-WA/17 tanggal 14 Juli 2017, Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No. 1022/CAMS-WA/17 tanggal 14 Juli 2017, Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan, selain itu Wali Amanat juga tidak akan merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat No. 1023/CAMS-WA/17 tanggal 14 Juli 2017.

A. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH. Notaris di

Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.

B. PERMODALAN

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk. per 28 Februari 2017 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk. berdasarkan Surat No. DE/II/2017-0590 tanggal 1 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	27.000.000.000	500	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
A. PT. Mega Corpora	4.026.599.755	500	2.013.299.877.500	57,82
B. Publik (masing masing di bawah 5%)	2.937.175.451	500	1.468.587.725.500	42,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	500	3.481.887.603.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.036.224.794	500	10.018.112.397.000	

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 01 tanggal 3 April 2017 dan No. 8 tanggal 15 April 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yungky Setiawan
 Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra
 Komisaris : Darmadi Sutanto
 Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
 Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
 Direktur : Indivara Erni
 Direktur : YB Hariantono
 Direktur : Martin Mulwanto
 Direktur : Wiweko Probojakti*
 Direktur : Lay Diza Larentie
 Direktur Independen : Yuni Lastianto

*Wiweko Probojakti telah mengundurkan diri, efektif pada tanggal 30 Juni 2017 sebagaimana keterbukaan informasi yang dilakukan Perseroan tertanggal 3 Juli 2017

D. KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Sekuritas, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call,

Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandanginya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir 30 September 2015 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 345 Cabang.

E. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL

A. Wali Amanat (Trustee) :

- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006
- Obligasi BCA Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi I BNI Sekuritas Tahun 2007
- Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007
- Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007
- Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007
- Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
- Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007
- Obligasi IV Adhi Tahun 2007
- Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007
- Obligasi Japfa I Tahun 2007
- Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
- Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007
- Obligasi II Danareksa Tahun 2007
- Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008
- Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008
- Obligasi Bhakti Sekuritas I Tahun 2008
- Obligasi III Danareksa Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008
- Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009
- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009
- Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009
- Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009
- Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009
- Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009
- Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009
- Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009
- Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
- Obligasi SMS Finance I Tahun 2009
- Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009
- Obligasi BCA Finance III Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006

- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007
- Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010
- Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010
- Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
- Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10
- Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
- Obligasi V Danareksa Tahun 2010
- Obligasi VII Bank BJB Tahun 2011
- Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011
- Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011
- Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011
- Obligasi MNC Sekuritas II Tahun 2011
- Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011
- Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011
- Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012
- Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012
- Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012
- Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012
- Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012
- Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012
- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013

- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017
- Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017

B. Agen Jaminan (Security Agent) :

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

F. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No.51 tanggal 21 Juli 2017, *juncto* Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No. 45 tanggal 23 Agustus 2017, *juncto* Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No. 61 tanggal 20 September 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

G. PENGGANTI WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No.51 tanggal 21 Juli 2017, *juncto* Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No. 45 tanggal 23 Agustus 2017, *juncto* Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No. 61 tanggal 20 September 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut sesuai Peraturan No.VI.C.4:

- a. Ijin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan ;
- j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

H. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Bank Mega dan entitas anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mega dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (firma Ernst & Young Global Limited), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 28 Februari 2017.

PT. BANK MEGA Tbk
NERACA
Per 31 Desember 2016 dan 2015

POS - POS	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2016	2015
ASET		
Kas	1.001.235	1.093.626
Giro pada Bank Indonesia	4.337.316	4.546.084
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	1.810	11.125
Pihak ketiga	114.288	268.401
Penempatan pada		
Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	500.000	570.000
Pihak ketiga	5.482.913	8.102.779
Efek-efek		
Pihak berelasi	301.050	319.540
Pihak ketiga	19.154.012	10.224.566
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	0	360.313
Pihak ketiga	4.265.089	3.420.822
Tagihan derivatif	20.754	43.660
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	352.641	294.109
Pihak ketiga	27.947.489	32.164.192
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	-23.387	-60.185
Total	28.276.743	32.398.116
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-499.282	-649.644
Kredit yang diberikan - neto	27.777.461	31.748.472
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	865	

POS - POS	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2016	2015
Pihak ketiga	593.199	489.215
Aset pajak tangguhan	34.171	26.306
Aset tetap	6.886.009	6.828.671
Dikurangi :		
Akumulasi penyusutan	-1.234.939	-1.059.798
Aset tetap - neto	5.651.070	5.768.873
Aset lain-lain - neto		
Pihak berelasi	7.545	6.010
Pihak ketiga	1.288.904	1.225.378
TOTAL ASET	70.531.682	68.225.170
Liabilitas segera	549.204	558.656
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	1.993.200	1.178.083
Pihak ketiga	3.575.510	3.933.535
Tabungan		
Pihak berelasi	48.366	382.138
Pihak ketiga	10.639.680	9.611.370
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	1.443.016	1.827.404
Pihak ketiga	33.373.455	32.807.142
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	3.925	6.974
Pihak ketiga	911.844	1.697.754
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.017.253	2.380.347
Liabilitas derivatif	19.374	23.734
Utang pajak penghasilan	93.956	62.734
Utang akseptasi	594.064	489.215
Pinjaman yang diterima	538.900	1.208.945
Liabilitas imbalan pasca kerja	262.599	255.207
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	3.347	3.401
Pihak ketiga	198.308	281.336
TOTAL LIABILITAS	58.266.001	56.707.975
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal		
31 Desember 2015 dan 2014		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham		
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.353	1.281
Saldo laba	2.845.341	2.017.621
Penghasilan komprehensif lain	3.888.338	3.967.644
TOTAL EKUITAS	12.265.681	11.517.195
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	70.531.682	68.225.170

PT BANK MEGA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
 Per 31 Desember 2016 dan 2015

POS - POS	31 Desember	
	2016	2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	6.151.919	6.458.281
Beban bunga	-2.664.285	-3.155.463
PENDAPATAN BUNGA - NETO	3.487.634	3.302.818
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.433.475	1.530.291
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	277.976	350.280
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	8.259	32.746
Lain-lain	14.091	21.514
Total pendapatan operasional lainnya	1.733.801	1.934.831
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Kerugian penjualan efek-efek - neto	-	-
Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	189.940	-87.986
Provisi dan komisi	-9.647	-23.877
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	-892.457	-978.308
Beban umum dan administrasi	-1.900.924	-1.859.154
Beban gaji dan tunjangan lainnya	-1.137.784	-1.109.425
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	1.470.563	1.178.899
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	74.860	59.870
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.545.423	1.238.769
BEBAN PAJAK - NETO	-387.423	-185.998
LABA TAHUN BERJALAN	1.158.000	1.052.771
Penghasilan komprehensif lain :		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto	-3860	-766
Surplus revaluasi aset tetap - neto		3.922.827
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	120.696	-327.164
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.274.836	4.647.668
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	166	151

Alamat Bank Mega adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk
 Menara Bank Mega, Lantai 16
 Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A
 Jakarta 12790
 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
 website: www.bankmega.com
 e-mail: waliamanat@bankmega.co.id
 Up. : *Capital Market Services*

XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XV mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 2 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal emisi.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XV mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Penjamin Emisi Obligasi hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas akan menunjuk Akuntan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan pemesanan dan penjatahan Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus;
- Dalam hal jumlah pemesanan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan akan dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penjatahan Efek, penyerahan Efek, pengembalian uang pemesanan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan; dan
- Dalam hal jumlah pemesanan kurang dari atau sama dengan jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan akan dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penyerahan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 2017 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT Bahana Sekuritas
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Graha CIMB Niaga
No. rek. : 800028973500
a.n. PT Bahana Securities

PT BNI Sekuritas
PT Bank Negara Indonesia Tbk
Cabang Dukuh Bawah
No. rek.: 140034143
a.n. PT BNI Sekuritas

PT Danareksa Sekuritas
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Sabang
No. rek.: 103-0006607739
a.n. PT Danareksa Sekuritas

**PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia**
PT Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. rek. : 3320034016
a.n. PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas
PT Bank Permata Tbk
Cabang Sudirman Jakarta
No. rek. : 0701528328
a.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Sudirman
No. rek. : 102-0005566028
a.n. PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan

- a. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi mulai berlaku pada tanggal Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ditandatangani oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Seluruh Obligasi telah habis terjual kepada Masyarakat, seluruh dana penjualan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah diterima oleh Perseroan dan seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah terpenuhi;
- b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri setiap waktu sampai dengan diterbitkannya Prospektus dan/atau perbaikan atas Prospektus dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
- c. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau pembatalan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan Nyaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian;
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetap pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya. Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- d. Apabila pada suatu waktu sebelum diterbitkan Prospektus dan/atau perbaikan atas Prospektus terjadi peristiwa *Force Majeure* sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan berhak untuk menunda Penawaran Umum atau mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain mengenai diakhirinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.
- e. Jika Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir menurut ayat 1 huruf (a) serta ayat 2 subbab ini, maka Perseroan tidak wajib membayar imbalan-imbalan yang harus dibayarkan menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Perseroan bagaimanapun juga bertanggung jawab untuk pembayaran biaya-biaya yang wajar yang harus mereka bayar atau bayar kembali kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menurut ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan yang telah terhutang sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- f. Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga sesuai dengan subbab ini, berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- g. Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai subbab ini dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1 % (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin

Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

- h. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi ini, sebagaimana tersebut dalam subbab ini, maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

12. Tata Cara Pengembalian Uang Pesanan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena ketentuan pasal 16.1.huruf f) Perjanjian Emisi Efek, dan:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut dan jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No.53 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299 1099
Faksimili : (021) 5299 1199

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Obligasi di Indonesia berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)

Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. (021) 2505081
Faks.(021) 5225869
Website : www.bahana.co.id
Email: bs_ibcm@bahana.co.id

PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower
Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 - 78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6942
Website: www.bnisekuritas.co.id
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id

PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)

Gedung Danareksa Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14,
Jakarta 10110, Indonesia
Tel. (021) 29 555 777
Fax. (021) 350 1724/25
Website : www.danareksa.com
Email: IB-Group1@danareksa.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1,
Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (62 21) 3003 4900
Faksimili: (62 21) 3003 4944
www.dbsvickers.com/id

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F
Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10219
Telepon : (62 21) 5193 1168
Faksimili : (62 21) 5793 1167
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507
Website : www.mandirisek.co.id
Email: corsec@mandirisek.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Wecolaw Office.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No. : 312/WECO/TAW-ISK-FF-APS-APA-RAD/IX/2017

Jakarta, 22 September 2017

Kepada Yth,
PT Waskita Karya (Persero), Tbk
Gedung Waskita
Jl. MT Haryono Kav. 10, Cawang
Jakarta 13340, Indonesia

U.p.: **Direktur Utama**

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2017 OLEH PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, **Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M.** dan **Imran S. Kristanto, S.H., LL.M.**, para rekan (*partner*) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) **Wecolaw Office**, berkantor di Jl. Bora No. 31, Menteng, Jakarta 10310, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah pendaftaran No. 361/PM/STTD-KH/2001 dan No. 363/PM/STTD-KH/2001, keduanya tertanggal 6 April 2001 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. 200126 dan 200125, telah ditunjuk oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Emiten**") sesuai dengan surat penunjukan No. 29/WK/SP/2017 tanggal 7 Maret 2017 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Emiten, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum") dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Hukum") sehubungan dengan rencana Emiten untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum penerbitan obligasi berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, yang akan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dengan target dana yang akan dihimpun seluruhnya berjumlah sebesar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) dan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari beberapa tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Untuk Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017, dengan jumlah pokok sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang ditawarkan kepada masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) seri yaitu Obligasi Seri A dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017**");
- B. Untuk Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) Emiten akan menerbitkan obligasi dalam jumlah sebesar selisih antara obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita karya Tahap I Tahun 2017, yang kepastian jumlah setiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam perjanjian perwaliamanatan tahap II dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan masing-masing tahap.

Sehubungan dengan rencana Emiten melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017, Emiten dan PT Bank Mega Tbk ("**Wali Amanat**") telah membuat perjanjian perwaliamanatan yang mengatur secara rinci segala hak dan kewajiban Emiten, Pemegang Obligasi dan Wali Amanat sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No. 51 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**") sebagaimana telah mengalami perubahan pada Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan No. 61 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan**"). Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk untuk melakukan tugas selaku Wali Amanat.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017, Emiten dan PT Bahana Securities, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas (selanjutnya disebut "**Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi**") telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No. 52 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi**") sebagaimana telah mengalami perubahan pada Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi No. 63 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi sekaligus sebagai Penjamin Emisi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi, berjanji dan mengikatkan diri untuk menjamin emisi efek obligasi dengan ketentuan kesanggupan penuh ("**full commitment**") dengan tidak mengurangi haknya membentuk sindikasi Penjamin Emisi Efek Obligasi, dengan ketentuan telah tercapai kesepakatan dengan Emiten. Pembentukan Sindikasi Penjamin Emisi Efek Obligasi dilakukan dengan kesanggupan penuh ("**full commitment**") sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek Obligasi dan masing-masing Perjamin Emisi Efek Obligasi wajib membeli sendiri obligasi yang tidak habis terjual kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing penjamin emisi efek pada tanggal penutupan masa penawaran

obligasi yang tidak dibeli/dibayar oleh masyarakat dengan rincian yang akan tercantum dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek dapat menjadi efektif, Emiten sudah harus menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek (selanjutnya disebut sebagai "**Pernyataan Pendaftaran**") dengan jangka waktu atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran tanpa adanya keberatan apapun dari OJK. Sehubungan dengan hal tersebut, Emiten telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada tanggal 24 Juli 2017.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pada bulan Februari 2017, Emiten telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 kepada masyarakat dan sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan hukum sebagaimana dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum sesuai surat Ref. No. 044/WECO/TAW-FF-APS-RBP-APA-EG-DAN/II/2017 dan Ref. No. 045/WECO/TAW-FF-APS-RBP-APA-EG-DAN/II/2017 keduanya tanggal 2 Februari 2017 yang telah disampaikan kepada Emiten dan ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017**") dan "**Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017**").
3. Pendapat Hukum ini terhitung sejak periode setelah Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Emiten sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan dan penawaran umum melalui Bursa Efek serta pasar modal di Indonesia;
 - b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Emiten dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk *fotocopy* adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum.

5. Dalam memberikan Pendapat Hukum atas Emiten kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya, kepemilikan, perubahan kepemilikan saham dan permodalan, perijinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Emiten, dan pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Emiten untuk periode sejak Pendapat Hukum Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Emiten sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Selain itu, kami juga telah melakukan uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen-dokumen hukum atas penyertaan/kepemilikan Emiten terhadap anak-anak perusahaan untuk periode sejak Pendapat Hukum Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Emiten sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini (selanjutnya disebut sebagai "**Anak Perusahaan**"), dimana laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Emiten dan/atau kepemilikan Emiten sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih.

6. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas beberapa fasilitas-fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Emiten secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
7. Pendapat Hukum dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP. 04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

ASUMSI, PEMBATAAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi, pembatasan dan kualifikasi, sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 ini dan Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 ini adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017

- adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 ini.
3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan judikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Emiten adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
 4. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
 5. Bahwa sehubungan dengan perjanjian-perjanjian konstruksi yang dibuat Emiten dalam rangka menjalankan usahanya, dalam memberikan Pendapat Hukum atas Emiten kami hanya mendasarkan pemeriksaan acak atas perjanjian konstruksi standar baku Emiten dan telah diberikan Emiten kepada kami, dimana pemeriksaan tersebut diambil dengan kriteria nilai kontrak/perjanjian sekurang-kurangnya sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) sampai dengan nilai tertinggi kontrak yang diperoleh Emiten.
 6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Emiten yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
 7. Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi Aspek Hukum Emiten terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Terbatas II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
 8. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Emiten adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Jakarta, dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas dan Industri Konstruksi.
2. Anggaran Dasar Emiten telah beberapa kali diubah, terakhir kali diubah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 126 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Emiten No. AH-0007778.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 03 April 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043583.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 03 April 2017 dimana para pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan setiap perubahan anggaran dasar Emiten telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Anggaran Dasar Emiten dan perubahannya telah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.I tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Emiten, maksud dan tujuan Emiten adalah bergerak dalam bidang konstruksi, untuk dapat mencapai maksud dan tujuan tersebut, Emiten dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Maksud dan tujuan Emiten adalah berusaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Emiten dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - (A). Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi;
 - (1). Pekerjaan Sipil dan Gedung (seluruh sektor Pembangunan):
 - a. Drainase dan Jaringan Pengairan;
 - b. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
 - c. Jalan dan Jembatan Kereta Api;
 - d. Gedung, Pabrik dan Bangunan Industri;
 - e. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Limbah;
 - f. Reklamasi dan Pengerukan;
 - g. Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah (*Break Water* dan *Talud*);
 - h. Perumahan dan Pemukiman;
 - i. Percetakan Sawah dan Pembukaan Lahan;
 - j. Pembukaan Areal/Transmigrasi;
 - k. Bendung, Bendungan dan Terowongan;
 - l. Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah;
 - m. Interior;
 - n. Pengeboran;
 - o. Pengupasan termasuk *land clearing*;
 - p. Penggalian/Penambangan;
 - q. Pekerjaan Pancang;
 - r. Tambang dan Pembangkit;
 - s. Pertamanan;
 - t. Pekerjaan Sipil dan Gedung Lainnya.
 - (2). Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk jaringan dan instalasi:
 - a. Kelistrikan dan pembangkit;
 - b. Tata udara/AC dan Pelindung Kebakaran;
 - c. Transmisi dan Distribusi Kelistrikan;
 - d. Pemasangan Alat Angkut;
 - e. Pemasangan Fasilitas Produksi;
 - f. Konstruksi Alat Angkat dan Fasilitas Lepas Pantai;
 - g. Lift dan Escalator;
 - h. Industri dan Pembangkit;
 - i. Termal/Bertekanan;
 - j. Minyak/Gas/Geotermal/Energi/Air;
 - k. Kontrol dan Instrumentasi;
 - l. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal lainnya.
 - (3). Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk Jaringan dan Instalasi:
 - a. Sinyal dan telekomunikasi Kereta api;
 - b. Sentral telekomunikasi;
 - c. Telekomunikasi;
 - d. Pemasangan Telekomunikasi;
 - e. Pemancara Radio Sarana Bantu Navigasi Udara dan Laut.
 - (4). Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan.

- (B). Jasa Pertambangan;
 - (C). Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*) dalam bidang:
 - (1). Perminyakan;
 - (2). Agro industri;
 - (3). Kelistrikan;
 - (4). Telekomunikasi.
 - (D). Petrokimia; Rancang Bangun (*Design and Build*);
 - (E). Building Manajemen;
 - (F). Pabrikasi bahan dan komponen bangunan;
 - (G). Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi;
 - (H). Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik;
 - (I). Penyewaan peralatan konstruksi;
 - (J). Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi;
 - (K). Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang:
 - (1). Prasarana dan sarana dasar (*infrastruktur*);
 - (2). Industri.
 - (L). Ekspor Impor;
 - (M). Perdagangan umum;
 - (N). *System Development*;
 - (O). Pengelolaan Kawasan;
 - (P). Pengembangan:
 - (1). Properti;
 - (2). Realty.
2. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha untuk:
- (A). Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen;
 - (B). Melakukan usaha dibidang agro industri;
 - (C). Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.

Pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan telah menjalankan dan telah melingkupi kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten.

4. Emiten berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di bidang Konstruksi, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan izin-izin operasional yang dimilikinya untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin operasional dan/atau perizinan pendukung lainnya yang hingga tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya serta telah memenuhi ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Khusus dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya di bidang konstruksi Emiten telah memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)

No. 1599/C.31/31.75/-1.785.56/2017 tanggal 20 September 2017 atas nama Emiten untuk daftar klasifikasi bidang Bangunan Gedung, Bangunan Sipil, Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, Jasa Konstruksi dan Terintegrasi, yang ditetapkan atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan terpadu Satu Pintu Propinsi DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan 6 November 2017.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya terkait perizinan dan pendaftaran yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Divisi VI yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dilakukan pengurusan. Bahwa dengan belum dimilikinya Wajib Laporkan Ketenagakerjaan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan ("UU WLK"), Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan ketenagakerjaan secara tertulis diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya terkait perizinan lingkungan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham seri A Dwi Warna dan 25.999.999.999 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B dengan nilai nominal masing-masing atas saham seri A Dwiwarna dan saham Seri B sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah);

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor Penuh : Rp.1.357.370.945.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) yang terbagi atas 13.573.709.450 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah); dan 13.573.709.449 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan) saham seri B dengan jumlah nilai nominal Rp.1.357.370.944.900,- (satu triliun

tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah).

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2017 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham Seri A (Dwi Warna)	Saham Seri B	Nilai Nominal	Persentase
	@Rp.100,-	@Rp.100,-	(Rp.,00)	(%)
Pemerintah	1	-	100	0,000
Republik Indonesia	-	8.963.697.886	896.369.788.600	66,037
Masyarakat	-	4.610.011.563	461.001.156.300	33,963
Jumlah	1	13.573.709.450	1.357.370.945.000	100,000

Bahwa atas struktur permodalan Emiten yang terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh dan pengalihan-pengalihan saham sejak pendirian adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar dan telah berlaku efektif seluruhnya. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Emiten.

Bahwa pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% adalah hanya Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten pada Pasal 5 dijelaskan bahwa saham seri A Dwiwarna memiliki hak yang sama dengan saham seri B, kecuali atas hak-hak istimewa yang hanya dimiliki oleh saham Seri A Dwiwarna yaitu sebagai berikut:

- a. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Menyetujui perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal;
- c. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran; dan
- d. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang pasar modal.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kewajiban untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah tersedia.

9. Setiap pemilik saham Emiten yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Emiten, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Emiten sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Emiten yang dimilikinya.
10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Emiten adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Badrodin Haiti
Komisaris	:	Arif Baharudin
Komisaris	:	R.Agus Sartono
Komisaris	:	Danish H.Sumadilaga
Komisaris Independen	:	Viktor S.Sirait
Komisaris Independen	:	M. Aqil Irham

DIREKSI

Direktur Utama	:	Mohammad Choliq
Direktur	:	Agus Sugiono
Direktur	:	Adi Wibowo
Direktur	:	Nyoman Wirya Adnyana
Direktur Independen	:	Tunggul Rajagukguk
Direktur	:	Bambang Rianto

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masa jabatan masing-masing Direksi dan Komisaris belum berakhir. Bahwa masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 14 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Keputusan Direksi BEJ No. KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek dan Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran I.III.1.5.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten telah menunjuk Shastia Hadiarti selaku Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 26/SK/WK/PEN/2017 tertanggal 21 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Unit Kerja di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

PIAGAM KOMITE AUDIT DAN KOMITE AUDIT

Bahwa Emiten telah memiliki Piagam Komite Audit dan Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.11/SK/WK/DK/2015 tanggal 30 September 2015, perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit.

Bahwa Emiten telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN ("Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006") dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan serta Keputusan Dewan Komisaris Emiten No. 11/SK/WK/DK/2015, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Viktor S. Sirait
Anggota : R. Agus Sartono
Anggota : Hengki Z. P. Tampubolon
Anggota : Tjahjo Winarto

PIAGAM AUDIT DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Bahwa Emiten telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Emiten tanggal 26 Juli 2013 dengan persetujuan Dewan Komisaris Emiten.

Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi No. 13/SK/WK/PEN/2011 tanggal 21 Juli 2011, Surat Keputusan Direksi No.28/SK/WK/PEN/2012 tanggal 26 September 2012 dan Surat Keputusan Direksi No.29/SK/WK/PEN/2012 tanggal 28 September 2012, dan surat Keputusan Direksi No.06/SK/WK/PEN/2014 tanggal 01 April 2014 serta Keputusan Direksi No. 46/SK/WK/PEN/2014 tanggal 23 Desember 2014, Direksi Emiten membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawas Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Kepala Satuan Pengawas Intern : Jonni Huatahaean
Auditor Teknik I : Sunu Hartanto
Auditor Teknik II : Budi Sulistyو
Auditor Sistem Satuan
Pengawasan Intern : Tyas Tricahyani
Auditor Keuangan I : Dedi Suhartri Amir
Auditor Keuangan II : Tata Taufik

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Bahwa Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten tidak membentuk secara khusus Komite Nominasi dan Komite Remunerasi, akan tetapi Dewan Komisaris Emiten telah menjalankan

fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten memiliki penyertaan yang telah dilakukan secara sah, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Emiten, pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. **PT Waskita Toll Road (“WTR”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pekerjaan pelaksanaan konstruksi, pekerjaan mekanikal elektrikal, sejumlah 6.567.246 (enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.567.246.000.000,- (enam triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta Rupiah) atau merupakan 72,63% (tujuh puluh dua koma enam tiga persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WTR.

WTR mempunyai penyertaan saham yang sah secara langsung pada perusahaan sebagai berikut:

- 1) **PT Waskita Bumi Wira (“WBW”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol sejumlah 8.594 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.8.594.000.000,- (delapan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) atau merupakan 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WBW;
- 2) **PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (“KKDM”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol sejumlah 737.664.432 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.737.664.432.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) atau merupakan 98,97% (sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh KKDM;
- 3) **PT Cimanggis Cibitung Tollways (“CCT”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan Jalan Tol Ruas Cimanggis Cibitung dengan sarana penunjangnya serta melaksanakan perdagangan dan jasa pada umumnya yang mana WTR memiliki sejumlah 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah) atau merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CCT;
- 4) **PT Waskita Bali Mandara (“WBM”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan dan jasa, industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, pekerjaan terintegrasi (*engineering, procurement, and construction (EPC)*), perdagangan, pengelolaan kawasan,

- layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, serta kepariwisataan, dan pengembang berbentuk perseroan terbatas, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menetapkan prinsip perseroan terbatas yang mana WTR memiliki sejumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau merupakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WBM;
- 5) **PT Sriwijaya Markmore Persada (“SMP”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang mana WTR memiliki sejumlah 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.490.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar Rupiah) atau merupakan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SMP;
 - 6) **PT Tol Teluk Balikpapan (“TTB”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan dan jasa, industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, procurement and construction: EPC*), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan dibidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atas jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas yang mana WTR memiliki sejumlah 12.000 (dua belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah) atau merupakan 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh TTB;
 - 7) **PT Solo Ngawi Jaya (“SNJ”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang mana WTR memiliki sejumlah 19.708.118 (sembilan belas juta tujuh ratus delapan ribu seratus delapan belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.433.578.596.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) atau merupakan 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SNJ;
 - 8) **PT Ngawi Kertosono Jaya (“NKJ”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang mana WTR memiliki sejumlah 17.728.420 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.390.025.240.000,- (tiga ratus sembilan puluh miliar dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) atau merupakan 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh NKJ;

- 9) **PT Cinere Serpong Jaya (“CSJ”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang mana WTR memiliki sejumlah 876.018 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.15.943.527.600,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) atau merupakan 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CSJ;
- 10) **PT Trans Jabar Tol (“TJT”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang mana WTR memiliki sejumlah 1.278.557 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.639.278.500.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh TJ;
- 11) **PT Jasa Marga Kualanamu Tol (“JMKT”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol sejumlah 228.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.228.000.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) atau merupakan 30% (tiga puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JMKT;
- 12) **PT Pemalang Batang Toll Road (“PBTR”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang mana WTR memiliki sejumlah 5.337.144 (lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.523.573.826.400,- (lima ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus Rupiah) atau merupakan 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PBTR;
- 13) **PT Jasamarga Semarang Batang (“JSB”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan jalan tol yang mana WTR memiliki sejumlah 9.275.800 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.9.275.800.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah) atau merupakan 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JSB.
- 14) **PT Citra Waspputowa (“CW”)**, yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol, sejumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CW;

- 15) **PT Cipta Karya Jabar Tol (“CKJT”)**, yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol, sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) atau merupakan 15% (lima belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CKJT.
- 16) **PT Utama Marga Waskita (“HAMAWAS”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa yang berupa perusahaan jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi-Parapat, yang mana WTR memiliki sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 30% (tiga puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh HAMAWAS.
- 17) **PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (“CTPPT”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa yang berupa pembangunan dan perusahaan jalan tol, yang mana WTR memiliki sejumlah 159.158 (seratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.144.833.780.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau merupakan 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CTPPT.

Bahwa sehubungan dengan peningkatan modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Julius Purnawan, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No.117”), berdasarkan laporan keuangan PT MTD CTP Expressway (sekarang CTPPT) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, terdapat konversi saham MTD Capital BHD yang didalamnya termasuk bunga senilai Rp 14.305.547.329,- (empat belas miliar tiga ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan Rupiah). Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 35 ayat 2 UUPT, bunga tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. Akan tetapi berdasarkan Pasal 23 ayat 2 UUPT, Akta No. 117 telah berlaku sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Surat Menteri Hukum dan HAM No. No. AHU-AH.01.03-0959781 tertanggal 26 Agustus 2015. Oleh karenanya, Akta No. 117 telah berlaku bagi CTPPT dan para pemegang saham namun terdapat risiko bahwa Akta No. 117 dapat dibatalkan oleh pihak ketiga yang dirugikan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat teguran/keberatan/somasi dari pihak manapun terkait Akta No. 117.

Bahwa apabila Akta No. 117 dibatalkan, maka pemegang saham yang mengkonversi bunga tersebut, yaitu MTD Capital BHD, wajib menyetor ke CTPPT senilai bunga yang dikonversi sebesar Rp 14.305.547.329,- (empat belas miliar tiga ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan Rupiah). Sedangkan bunga yang di konversi kembali menjadi terhutang yang wajib dibayar CTPPT kepada MTD Capital BHD. Oleh karena itu, WTR dapat mengajukan tuntutan terhadap MTD Capital BHD untuk memenuhi kekurangan setoran kepada CTPPT akibat bunga yang dikonversikan tersebut.

- 18) **PT Waskita Transjawa Toll Road ("WTTR")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang mana WTR memiliki sejumlah 2.110.585 (dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.110.585.000.000,00 (dua triliun seratus sepuluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WTTR.

WTTR mempunyai penyertaan saham yang sah secara langsung pada perusahaan sebagai berikut:

- a) **PT Pejagan Pemalang Toll Road ("PPTR")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol ruas Pejagan Pemalang, sejumlah 1.935.554 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.949.389.237.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) atau merupakan 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PPTR;
 - b) **PT Semesta Marga Raya ("SMR")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol ruas Pejagan Pemalang, sejumlah 116.712.020 (seratus enam belas juta tujuh ratus dua belas ribu dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.191.046.164.100,00 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu seratus Rupiah) atau merupakan 77,69% (tujuh puluh tujuh koma enam sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SMR;
 - c) **PT TRANS-JAWA PASPRO JALAN TOL ("TJPJT")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol sejumlah 499.999 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.249.999.500.000,- (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh TJPJT.
- b. **PT Waskita Beton Precast Tbk ("WBP")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perdagangan umum dan jasa, yang mana Perseroan memiliki sejumlah 15.816.680.599 (lima belas miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.581.668.059.900 (satu trilliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) atau merupakan 59,99% (lima puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)

dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WBP.

- c. **PT Waskita Karya Realty (“WKR”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perdagangan, jasa dan *property/realty*, yang mana Perseroan memiliki sejumlah 2.057.361 (dua juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.2.057.361.000,- (dua triliun lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WKR.
- d. **PT Waskita Karya Energi (“WKE”)**, perseroan terbatas yang bergerak di dibidang dalam bidang Industri, jasa dan perdagangan dan berkedudukan di Jakarta Timur, yang mana Perseroan memiliki sejumlah 64.500 (enam puluh empat ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.64.500.000.000,- (enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WKE.

WKE mempunyai penyertaan saham yang telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1) **PT Waskita Sangir Energy (“WSE”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang bidang pembangkitan tenaga listrik, sejumlah 35.500 (tiga puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.35.500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WSE.
 - 2) **PT Waskita Wado Energy (“WWE”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri penciptaan energi, industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, argo industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement dan Contractions; EPC*), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang, sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) atau merupakan 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WWE.
- e. **PT Prima Multi Terminal (“PMT”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, sejumlah 98.072 (sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.98.072.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh dua juta Rupiah) atau merupakan 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PMT.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Saham-saham yang dimiliki Emiten maupun Anak Perusahaan tidak sedang dalam penjaminan kepada pihak ketiga serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam suatu perkara apapun, kecuali atas

saham KKDM milik WTR yang sedang dijaminakan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi No. 72 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta. Bahwa penjaminan saham tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar WTR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Anak Perusahaan, adalah suatu badan hukum yang telah sah berdiri dan dapat melakukan kegiatan usahanya, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, masing-masing Anak Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya menurut anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal perubahan anggaran dasar, struktur permodalan dan peralihan sahamnya, serta pengurus dan sehubungan pemenuhan kewajiban perizinan dan/atau pendaftaran, ketenagakerjaan, perizinan lingkungan hidup serta kepemilikan harta kekayaan dari masing-masing Anak Perusahaan, terkecuali belum dipenuhinya kewajiban perizinan dan/atau pendaftaran yang mana sampai dengan saat ini masih dalam proses pengurusan pada instansi yang berwenang sebagai berikut:

a. WTR

- 1) Kewajiban WTR atas pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan atas perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 26 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta, yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Bahwa dengan belum dipenuhinya kewajiban pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, pengurus Perseroan dapat diancam Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

b. WBP

- 1) Kewajiban WBP atas kepemilikan Izin Usaha Industri untuk Plant Perseroan di Plant Subang, Plant Sidoarjo, Plant Kalijati, Plant Klaten, Plant Gasing, Plant Karawang dan Plant Bojonegara yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Dengan belum dimilikinya Izin Usaha Industri oleh Perseroan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan penutupan sementara.
- 2) Kewajiban WBP atas kepemilikan Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) untuk Plant Palembang, Plant Klaten, dan Plant Bojonegara yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Bahwa dengan belum diperolehnya perizinan-perizinan lingkungan hidup maka berdasarkan Pasal 109 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika Perseroan melakukan usaha yang dapat memberikan dampak serius terhadap lingkungan, maka Pengurus Perseroan terancam dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

- 3) Kewajiban WBP atas Laporan berkala terhadap Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) untuk Plant Sidoarjo, yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Bahwa dengan belum dilakukannya pelaporan berkala, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan pihak wajib lapor tersebut dapat dikenakan sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.
- 4) Kewajiban WBP atas kepemilikan Tanda Daftar Perusahaan untuk perubahan pada Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 55 tanggal 21 Desember 2016, Plant Klaten, dan Plant Gasing yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Bahwa dengan belum dipenuhinya kewajiban pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, pengurus Perseroan dapat diancam Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- 5) Kewajiban WBP atas kepemilikan Surat Keterangan Domisili untuk Plant Gasing yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Bahwa dengan belum diperolehnya Surat Keterangan Domisili, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 34 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, disebutkan barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- 6) Kewajiban WBP untuk memenuhi Peraturan Perusahaan. Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan Pasal 188 UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, WBP dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.0000,- (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

c. TJT

Kewajiban TJT untuk memenuhi Peraturan Perusahaan. Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan Pasal 188 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, TJT dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.0000,- (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

d. SMR

- 1) Kewajiban SMR untuk melaporkan secara berkala tiap 6 (enam) bulan atas izin lingkungan hidup. Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan pasal 71 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pengusaha atau pengurus yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan RKL dan RPL akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan.
- 2) Kewajiban SMR untuk memenuhi Peraturan Perusahaan. Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan Pasal 188 UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, SMR dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

e. WTTR

Kewajiban WTTR untuk memperbarui Tanda Daftar Perusahaan atas perubahan pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Transjawa Toll Road No. 18 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Catur Virgo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP") WTTR dapat diancam dengan ketentuan yang ada pada Pasal 32 ayat (1) UU WDP, WTTR dapat dipidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

f. WBM

- 1) Kewajiban WBM untuk memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Dengan belum dimilikinya Surat Keterangan Domisili tersebut, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 34 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Bahwa sampai dengan tanggal pendapat hukum ini, atas belum terpenuhinya kewajiban dan/atau pendaftaran pada beberapa Anak Perusahaan Perseroan tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Anak Perusahaan Perseroan kecuali atas:

- a. Kewajiban WSE, WBP terkait Plant Sidoarjo dan Plant Kalijati, dan SMR atas pemenuhan pelaporan berkala atas izin lingkungan yang mana atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan pasal 71 ayat (1) PP No. 27 Tahun

2012 tentang Izin Lingkungan, pengusaha atau pengurus yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan RKL dan RPL atau UKL dan UPL akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan.

- b. Kewajiban SMP atas pemenuhan atas penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang mana berdasarkan Pasal 28 Peraturan Kepala BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kegagalan menyampaikan Laporan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau peringatan secara daring, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pembatalan/pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan surat pernyataan masing-masing Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari Anak Perusahaan dan masing-masing Anak Perusahaan tidak terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan masing-masing Anak Perusahaan dan/atau anggota Komisaris dan Direksi masing-masing Anak Perusahaan, kecuali Perkara perdata yang melibatkan WBP sesuai dengan Perkara Perdata Nomor : 439 /Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, Gugatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara antara PT Dovlen Seventy, (Penggugat I), CV Padu Karya (Penggugat II), PT Volgatra Resindo Utama, (Penggugat III), dll, melawan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov. DKI Jakarta (Tergugat I), PT Waskita Beton Precast, Tbk (Tergugat XII), dll, dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas Kerugian Material sebesar Rp.1.171.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta Rupiah). Kerugian Immaterial sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah), yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, proses persidangan masih dalam tahap mediasi.

Bahwa atas perkara yang melibatkan WBP menjadi pihak didalamnya, apabila diasumsikan perkara tersebut saat ini telah diputus dengan putusan yang mengalahkan WBP dan kemudian hanya melihat kemampuan finansial berdasarkan laporan keuangan WBP saat ini, perkara tersebut dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha WBP, namun tidak memiliki dampak yang material bagi keberlangsungan kegiatan usaha WBP.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, pemilikan dan/atau penguasaan Emiten dan Anak Perusahaan atas harta kekayaannya, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan serta harta kekayaan lainnya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah, kecuali tanah atas SHGB No. 541 tanggal 27 Agustus 1992 yang berakhir pada tanggal 27 Agustus 2017 yang terletak di Desa Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, yang telah dimintakan pengurusan permohonan haknya sesuai dengan Surat Emiten tanggal 23 Agustus 2017 dan Surat Penunjukan Notaris No: 34/WK/D.II/Sulses/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang penunjukan Notaris Muhammad Asyik Noor, SH, M.kn di Makassar. Emiten telah menunjuk Notaris untuk melakukan pengurusan dan akan memenuhi kewajiban beban proses pengurusan perpanjangan atas SHGB tersebut.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten dan Anak Perusahaan atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, alat dan kendaraan berat serta hak kekayaan intelektual tidak sedang dalam sengketa, selain itu tidak berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten dan Anak Perusahaan atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, alat dan kendaraan berat serta hak kekayaan intelektual tidak dalam penjaminan kecuali:
 - a. atas beberapa bidang tanah dan bangunan, alat-alat berat serta kendaraan bermotor milik Emiten saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero) Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur yang telah diikat dengan perjanjian penjaminan tersendiri;
 - b. atas beberapa bidang tanah dan bangunan serta alat berat milik WBP saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bahwa atas penjaminan yang dilakukan oleh Emiten dan Anak Perusahaan tersebut tidak melanggar anggaran dasar Emiten dan setiap Anak Perusahaan yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Emiten telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten dan Anak Perusahaan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan Anak Perusahaan menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan, keberlakuan, dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Emiten dan Anak Perusahaan adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya dan tidak melanggar anggaran dasar Emiten dan/atau Anak Perusahaan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Emiten dan/atau Anak Perusahaan serta tidak saling bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain dimana Emiten dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak didalamnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan Anak Perusahaan menjadi pihak didalamnya tersebut. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, selain itu perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan/atau Anak Perusahaan yang menjadi pihak didalamnya tersebut tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi Penawaran Umum Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 beserta rencana penggunaan dananya.

- a. Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dalam perjanjian-perjanjian antara masing-masing dari KKDM, SMR, dan PPTR dengan pihak ketiga terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) mengenai pembagian dividen yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari kreditur apabila akan membagikan dividen sebagaimana diatur dalam: (1) fasilitas kredit yang diperoleh SMR berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 18 tanggal 13 Januari 2008 yang diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Ketiga No. 18 tanggal 31 Mei 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Muchlis Pathana, S.H., Notaris di Jakarta; (2) fasilitas kredit yang diterima KKDM berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 72 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta; dan (3) fasilitas kredit yang diterima PPTR berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 38 tanggal 30 November 2011 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Sesuai dengan hasil uji tuntas kami dan surat pernyataan bersama tanggal 3 Juli 2017, sampai dengan saat ini KKDM, SMR, dan PPTR belum dapat membagikan dividen oleh karena belum mempunyai saldo laba yang positif, serta dapat dikatakan belum memberikan kontribusi secara material kepada Emiten. Berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal Pendapat Hukum kami, perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak didalamnya tidak memiliki pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik.
- b. Berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dalam perjanjian-perjanjian antara PBTR dengan pihak ketiga terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) mengenai pembagian dividen yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari kreditur apabila akan membagikan dividen sebagaimana diatur dalam fasilitas kredit yang diterima PBTR berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 37 dan Akad Pembiayaan No. 38 yang keduanya tanggal 24 Mei 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Sesuai dengan hasil uji tuntas kami dan surat pernyataan bersama tanggal 19 September 2017, sampai dengan saat ini PBTR belum dapat membagikan dividen oleh karena belum mempunyai saldo laba yang positif, serta dapat dikatakan belum memberikan kontribusi secara material kepada Emiten. Berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal Pendapat Hukum kami, perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak didalamnya tidak memiliki pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik.
18. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Emiten telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 Tahun 2014 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
19. Bahwa untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 yang akan diterbitkan oleh Emiten, Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dari PT Fitch Rating Indonesia ("Fitch") sesuai dengan surat No. 140/DIR/RAT/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*), dimana Fitch menetapkan:
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk *debt class* "*Senior Unsecured*" di "A-(idn)".

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya sejumlah maksimum Rp.10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) di “A-(idn)”.
 - Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di “A-(idn)”.
20. Bahwa seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk:
- a. Sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil, Gedung dan EPC. Diantaranya pembelian bahan konstruksi, biaya peralatan, biaya subkontraktor serta upah tenaga kerja; dan
 - b. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan. Investasi tersebut akan dilakukan pada Entitas Anak dalam bentuk setoran modal. Entitas Anak yang akan menerima setoran modal diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Penyertaan modal kepada WTR untuk investasi dan pembiayaan proyek jalan tol sekitar 80% (delapan puluh persen).
 - b) Penyertaan modal kepada WKR untuk investasi dan pembiayaan proyek properti dan realti 20% (dua puluh persen).

Seluruh Investasi yang dilakukan Perseroan kepada Entitas Anak adalah dalam rangka ekspansi usaha yang akan memberikan kontribusi bagi keberlangsungan bisnis Emiten.

Emiten akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

21. Bahwa Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penawaran umum obligasi berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 sebagai berikut:
- a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No. 50 tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III

Waskita Karya No. 44 tanggal 23 Agustus 2017 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta.

- b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No. 51 tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I No. 61 tanggal 20 September 2017 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No. 52 tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No.63 tanggal 20 September 2017 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I tahun 2017 No. 53 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- e. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No 46 tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 No.62 tanggal 20 September 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- f. Perjanjian Peringkat dari PT Waskita Karya (Persero), Tbk (“Produk Fitch”) sesuai dengan surat No. 061/DIR/MKT/III/2017 tanggal 10 Maret 2017, sehubungan dengan maksud Emiten untuk memperoleh Pemeringkatan atas Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017.
- g. Perjanjian Pendaftaran Obligasi sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0054/PO/KSEI/0717 tanggal 21 Juli 2017, dimana Emiten setuju untuk mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 di KSEI dan KSEI setuju untuk mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Emiten di KSEI.
- h. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek IDX Nomor : SP-00013/BEI.PP3/07-2017 tanggal 21 Juli 2017 sehubungan dengan maksud Emiten mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia.

Perjanjian yang dibuat oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 tersebut diatas adalah berlaku secara sah dan mengikat Emiten dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, tidak saling bertentangan satu sama lain, serta memuat persyaratan dan ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar

modal. Termasuk Perjanjian Perwalianamanatan telah memenuhi ketentuan Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang.

Sesuai hasil uji Tuntas Aspek Hukum, Emiten dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak ada hutang kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. VI.C 4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan Peraturan No. VI.C.3 tentang hubungan Kredit dan Penjaminan antara Walia Amanat dan Emiten.

22. Bahwa untuk penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 ini, Emiten telah memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna selaku pemegang saham Emiten sesuai dengan Surat No. S-447/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2107 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan selanjutnya telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Emiten sesuai dengan Surat No. 67/WK/DK/2017 tanggal 14 Agustus 2017. Emiten telah memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Emiten Pasal 12 ayat 7 huruf k untuk penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017.
23. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan pemeriksaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Emiten dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Emiten, kecuali atas perkara-perkara sebagai berikut:

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1	No Perkara 01/Pdt.KPPU/2013/P.N.Jkt.Tim tanggal 21 Mei 2015 antar KPPU sebagai Termohon dan Emiten (Pemohon I), PT Adhi Karya Persero (Pemohon II), KPPU (Termohon Keberatan) terkait Dugaan Persekongkolan Horizontal diantara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi	Pemohon I	Rp.3.168.820.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk Terlapor II. Rp.4.475.525.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk Terlapor III.	Dengan Dikeluarkan Putusan Batal demi Hukum terhadap Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 Tanggal 26 April 2012 dengan segala akibat hukumnya, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, KPPU sebagai Termohon keberatan mengajukan Kasasi Pada tanggal 28 September 2015 terhadap putusan PN Jaktim. Tanggal 3 Desember 2015, pihak Termohon I (PT Waskita

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	<p>Il dengan adanya Persaingan Semu. Kesamaan Dokumen. pengaturan Harga Penawaran, Kesamaan Prosedur serta Surat Dukungan.</p>			<p>Karya) mengajukan Kontra Memori Kasasi, dan sampai dengan saat ini masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.</p>
2	<p>Perkara No. 16/PDT.G/2014/PN.L BB antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk (“Penggugat”) melawan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Agam (“Tergugat”).</p>	Penggugat	<p>Rp.2.150.080.000,- (Dua miliar seratus lima puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) Uang paksa (Dwangsom) kepada peggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;</p>	<p>Tanggal 12 Agustus 2010 BANI mengeluarkan Pendapat yang mengikat (Binding Opinion) mengenai masalah aspek kontraktual tentang Pemblokiran Termin Kontraktor atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat pada Pekerjaan Pembangunan Sport Centre Bukik Bunian Lubuk Basung Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2007 yang diajukan oleh Emiten dengan kesimpulan Bahwa Dana sebesar Rp 2,150,080,000 (dua miliar seratus lima puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) yang selama ini ditahan merupakan hak Emiten. Pada tanggal 23 Oktober 2013, Emiten melakukan Somasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
				<p>Umum Kabupaten Agam, karena tidak ada jawaban, Emiten mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. putusan PN Lubuk Basung Nomor 16/PDT.G/2014/PN.LBB pada tanggal 13 Mei 2015 yang isinya Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Termin sebesar Rp. 2.150.080.000,- kepada Penggugat. Pihak Tergugat mengajukan Banding pada tanggal 26 Mei 2015. Tanggal 30 November 2015 Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Tanggal 02 Februari 2016 Tergugat melakukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan sampai saat ini masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.</p>
3	<p>Perkara No. 7/PDT.G/2015/PN.Tp g antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk (“Penggugat”) melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq</p>	Penggugat	<p>Rp. 12.445.532.527,52 (Dua belas miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh koma</p>	<p>Telah dikeluarkan Putusan PN Tanjung Pinang tanggal 18 Juni 2015. Isi putusan Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 8.085.242.999,68 (Delapan miliar delapan</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	<p>Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran (“Tergugat”).</p>		<p>lima puluh dua Rupiah). Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan. Kerugian immateril sebesar Rp.25.000.000.000 ,- (Dua puluh lima miliar Rupiah) yang merupakan Penyesuaian Harga (Eskalasi)</p>	<p>puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) tanpa PPN. Tergugat (Pembanding) Banding pada tanggal 30 Juli 2015 Penggugat (Terbanding) mengajukan kontra memori banding. Tanggal 29 Juni 2016 telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 127/PDT/2015/PT.PDG yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pada Tanggal 2 Februari 2016 Tergugat mengajukan Kasasi dan sampai saat ini masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.</p>
4	<p>Perkara Perdata dengan nomor perkara 903/Pdt.G/2015/PN DPS tanggal 01 Desember 2015 terkait Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai –Benoa Paket 2 dan Paket 4, dimana PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Penggugat) dan</p>	<p>Penggugat</p>	<p>Penggugat mengajukan tuntutan agar Para Tergugat membayar kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebesar Rp.64.576.067.774 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam</p>	<p>Permasalahan bermula saat Tergugat melakukan keterlambatan atas pembayaran pekerjaan tambah tiang pancang paket 2 dan paket 4 serta bunga akibat keterlambatan pembayaran kelebihan tiang pancang paket 2 dan paket 4. Setelah dilakukan mediasi terkait penyelesaian permasalahan tersebut</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	PT Jasamarga Bali Tol (Tergugat)		puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)	<p>tidak dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka pihak Emiten memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar terkait permasalahan tersebut. Tanggal 20 Juni 2016 Pengadilan Negeri Denpasar telah mengeluarkan putusan yang isinya menyatakan tergugat telah wanprestasi dan Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 64.576.067.774 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah), Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya. Tergugat mengajukan banding tanggal 18 Juli 2016. Tanggal 15 Agustus 2016 Jasa Marga Bali Tol sebagai Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding.</p> <p>Amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Desember 2016 menyatakan menolak gugatan Emiten sebagai</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
				<p>Penggugat/Terbanding.</p> <p>Emiten mengajukan memori kasasi tanggal 20 Desember 2016.</p> <p>Sampai saat ini masih dalam proses Kasasi dari Mahkamah Agung.</p>
5	<p>Permohonan Arbitrase dengan nomor register 843/IV/ARB-BANI/2016 tanggal 29 April 2016 dengan Kajima Corporation dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO) KAJIMA – WASKITA sebagai (Pemohon) dengan Termohon PT DCA Pracetak Indonesia</p>	Pemohon	<p>Pemohon mengajukan tuntutan agar Termohon membayar kerugian sebesar Rp. 227.582.255.938,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan JPN ¥ 865.279.268,- (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan Yen).</p>	<p>Bahwa termohon yaitu PT DCA Pracetak Indonesia telah melakukan Cidera Janji/Wansprestasi atas produksi dan pemasok beton ready-mixed kepada Pemohon, dimana beton yang diproduksi dan dipasok oleh Termohon tidak sesuai dengan kualitas standar yang telah dituangkan dalam perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Saat ini masih proses persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).</p>
6	<p>Permohonan Arbitrase dengan nomor register 718/VI/ARB-BANI/2015 antara PPK 04 kegiatan</p>	Pemohon	<p>Pemohon mengajukan tuntutan agar membayar Biaya Iddle Alat, Perbaikan Cross</p>	<p>Putusan BANI No. 718/IV/ARB-BANI/2015 tanggal 11 April 2016, yang amar putusannya menyatakan Mewajibkan Termohon untuk</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	<p>pembangunan jalan dalam kota Pontianak – Tayan sebagai Termohon melawan Emiten Divisi Regional Timur sebagai Pemohon.</p>		<p>Fall, Overhead, Biaya Perubahan Design dan biaya pekerjaan tambah sebesar Rp.72.813.123.228,46.</p>	<p>membayar kepada Pemohon sebesar Rp. 50.719.444.000,- termasuk PPN 10% dan mengembalikan biaya BANI Rp. 499.450.000,-</p> <p>Tanggal 27 Mei 2016 oleh Termohon mengajukan permohonan Pembatalan Putusan BANI.</p> <p>Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.56/Pdt.G-ARB/PN.PTK tanggal 22 Agustus 2016 yang isinya menolak permohonan pemohon seluruhnya.</p> <p>Tanggal 03 Oktober 2016 Termohon mengajukan Kasasi dan pada tanggal 14 Oktober 2016, Pemohon mengajukan kontra memori kasasi dan sampai dengan saat ini masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.</p>
7	<p>Permohonan Arbitrase dengan nomor register: 795/II/ARB-BANI/2016 tanggal 2 Februari 2016 dengan PT. Waskita Karya (Persero) dan PT. Jakarta Prima Cranes yang tergabung dalam Konsorsium</p>	<p>Pemohon</p>	<p>Pemohon mengajukan tuntutan Pembayaran atas pekerjaan Emergency Spillway dan Toe Drain sebesar USD 31.086.851,46</p>	<p>Perbuatan Wanprestasi Termohon kepada Pemohon berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran progress pekerjaan dalam proyek pengembangan prasarana pertambangan batubara. Termohon secara sepihak telah memutuskan kontrak dengan Pemohon,</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	<p>Waskita-JPC sebagai pemohon dan Termohon : PT Suprabari Mapanindo Mineral</p>			<p>yang mana proyek yang dikerjakan Pemohon sudah sampai 94,72%. Dengan diputusnya kontrak secara sepihak oleh Termohon dan tidak dibayarnya tagihan bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, yang mana menyebabkan Pemohon mengalami kerugian.</p> <p>Sampai dengan saat ini masih dalam proses persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.</p>
8	<p>Perkara Perdata dengan nomor perkara 468/Pdt.G/2016/PN.J kt. Tim tanggal 17 November 2016 terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Ahli Waris Muhammad Ba'at (penggugat) kepada para Tergugat, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pembuat Komitemen Proyek Tol Becakayu (Tergugat I); 2. Pemprov DKI Jakarta cq Pemkot Administrasi 	Turut Tergugat II	<p>Penggugat mengajukan tuntutan sebesar Rp. 32.100.000.000,- (tiga puluh dua miliar seratus juta Rupiah).</p>	<p>Bahwa dengan adanya pembangunan TOL BECAKAYU diatas tanah Penggugat selaku ahli waris. Penggugat mengajukan permohonan gugatan perbuatan melawan hukum lewat kuasa hukumnya. yang mana sampai saat ini sedang dalam proses penyerahan replik dari Penggugat pada tanggal 05 April 2017.</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	<p>Jakarta Timur cq Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (Tergugat II);</p> <p>3. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pupera Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq Perum Jasa Tirta II (Tergugat III);</p> <p>4. Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kepala Agraria/BPN Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat I);</p> <p>5. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Turut Tergugat II).</p>			
9	<p>Registrasi Nomor Perkara 357/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Desember 2016 atas Perkara Perselisihan Hubungan Industril yang diajukan oleh Purna Karyawan</p>	Tergugat	<p>Bahwa Para Penggugat meminta ganti kerugian Materiil sebesar Rp.1.578.409.415, (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta</p>	<p>Bahwa atas perkara yang terjadi antara Para Penggugat dengan Pihak Tergugat terkait Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut atas Upah, Uang Jasa, Ganti</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	Perseroan, dengan Manuasa Butar – Butar Cs sebagai Para Penggugat dan PT Waskita Karya (Persero), Tbk sebagai Tergugat.		empat ratus sembilan ribu empat ratus lima belas Rupiah) serta ganti kerugian Immateriil Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah)	Kerugian, Ongkos Pulang, Jamsostek, dan Penggantian fasilitas pengobatan, perawatan dan perumahan tidak memberikan hak-hak, yang mana menurut Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri No. Per-04/MEN/1986 dan Peraturan Menteri No. Per-03/MEN/1996 serta Peraturan Perusahaan Tergugat yang mana menurut Penggugat I-IV periode tahun 1993 sampai dengan 1995 serta Peraturan Perusahaan periode Tahun 1995-1997. Sampai saat ini Penggugat I-IV dan Tergugat sedang akan menjalankan Sidang pertama di Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 19 Januari 2017. Dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi penggugat dan tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial.
10	Perkara Perdata dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2017/PN.Jk t.Tim tanggal 30	Tergugat VIII	Penggugat menuntut objek perkara adalah milik sah dari Para Penggugat selaku	Perkara ini bermula dari pembangunan Ruas Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), yang mana

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	<p>Januari 2017 terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Ahli Waris Berlin Saragih Manihuruk (Penggugat) kepada Para Tergugat, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Marzuki (Tergugat I) 2. Kementerian Pupera Cq Dirjen SDA (Tergugat II) 3. Pemrov DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur Cq Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum /P2T (Tergugat III) 4. Perum Jasa Tirta II (Tergugat IV) 5. BPN cq Kantor Pertanahan Jakarta Timur (Tergugat V) 6. Pemprov DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur cq Kecamatan 		ahli waris Alm. Berlin Saragih	<p>Penggugat mengklaim bahwa tanah miliknya seluas 650 m2 (enam ratus lima puluh meter persegi) , yang mana pecahan dari Girik No. 015219 No. C. 906 Jabar No. 496, yang terletak di pangkalan jati RT 01/RW 13 , Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makassar, Jakarta Timur merupakan kepemilikan ahli waris yang sah Alm. Berlin Saragih Manihuruk. Dengan dampak pekerjaan tol Becakayu, yang mana sampai dengan saat ini belum diberikan ganti rugi atas pembebasan lahan serta dampak akibat pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat VIII selaku Pihak Kontraktor dalam proyek ini, mengakibatkan kerugian berupa bangunan fisik yang berdiri diatas tanah aquo menjadi rusak. Maka dengan tidak di temukan solusi antara para pihak, dengan itu Penggugat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Timur. Proses hingga tanggal 04 April 2017, masih dengan sidang pembacaan gugatan.</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	<p>Makassar (Tergugat VI)</p> <p>1. Pemprov DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur cq Kelurahan Cipinang Melayu (Tergugat VII)</p> <p>2. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Tergugat VIII)</p>			
11	<p>Perkara Perdata dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2017/PN.G SK.Tim tanggal 22 Mei 2017 terkait gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT. Platinum Ceramics Industri (Penggugat) kepada Para Tergugat, diantaranya :</p> <p>1. Pemerintah Republik Indonesia qq Menteri Pekerjaan Umum qq Direktur Jenderal Bina Marga qq Ketua Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder (Tergugat</p>	Turut Tergugat	Penggugat berasumsi bahwa pengadaan tanah untuk proyek tol Krian Legundi Bunder tidak sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku karena besaran nilai pengganti dianggap tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga pasar.	Sidang Pertama diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2017, yang mana sampai saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	<p>l)</p> <p>2. Pemerintah Republik Indonesia qq Menteri Dalam Negeri qq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia qq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur qq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Ruas Krian-Legundi-Bunder (Tergugat II)</p> <p>3. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk melalui Direktur Utama selaku Pelaksana Pembangunan Jalan Tol Ruas Krian-Legundi-Bunder (Turut Tergugat)</p>			

Bahwa atas perkara-perkara yang melibatkan Perseroan menjadi pihak didalamnya, sesuai dengan uji tuntas terhadap keterangan dan dokumen yang diberikan, perkara-perkara tersebut dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha Emiten, namun tidak memiliki dampak yang material bagi keberlangsungan kegiatan usaha Emiten.

24. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran yang melibatkan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga Jakarta. Sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara permohonan pembubaran Emiten dan tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref. No.: 225/WECO/TAW-ISK-FF-APS-APA-RAD/VII/2017 Tanggal 21 Juli 2017 dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WECOLAW Office



Teddy A. Wardhana, SH, LL.M.
No. 361/PM/STTD-KH/2001



Imran S. Kristanto, SH, LL.M.
No. 363/PM/STTD-KH/2001

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2017 (DIAUDIT) DAN 2016 (2016 – TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (DIAUDIT)
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan ENTITAS ANAK/
BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
MARCH 31, 2017 (AUDITED) AND 2016 (2016 – UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015 (AUDITED)
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk and SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ We, the undersigned:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama/Name | : | Ir. M. Choliq, MM |
| Alamat kantor/Office Address | : | Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340 |
| Alamat domisili sesuai KTP/
Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Batu Merah II Kav. 6, RT 007/002, Pejaten Timur,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon/Phone Number | : | 021- 7996642 |
| Jabatan/Position | : | Direktur Utama/President Director |
| 2. Nama/ Name | : | Ir. Tunggul Rajagukguk, MM |
| Alamat kantor/Office Address | : | Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340 |
| Alamat domisili sesuai KTP/
Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Pendidikan II E/62-63 RT 003/014, Duren Sawit
Jakarta Timur |
| Nomor Telepon/ Phone Number | : | 021- 8508510 |
| Jabatan/Position | : | Direktur Keuangan/Finance Director |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

state that :

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;
2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The consolidated financial statements do not contain any misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and
4. We are responsible for internal control system within the Company and its subsidiaries.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 23 Agustus 2017/August 23, 2017

Direktur Utama /
President Director

303

Direktur Keuangan /
Finance Director


M. Choliq




Tunggul Rajagukguk

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor Independen

No. GAR117 0911 WK HA

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Pendahuluan

Kami telah mengaudit laporan keuangan interim konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim konsolidasian tanggal 31 Maret 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim konsolidasian, laporan perubahan ekuitas interim konsolidasian, dan laporan arus kas interim konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan interim konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan interim konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan interim konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan interim konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan interim konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report

No. GAR117 0911 WK HA

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Introduction

We have audited the accompanying consolidated interim financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated interim statement of financial position as of March 31, 2017, and the consolidated interim statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated interim statement of changes in equity and consolidated interim statement of cash flows for the three-months period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Interim Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated interim financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated interim financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated interim financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated interim financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated interim financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated interim financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated interim financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated interim financial statements.

Satrio Bing Eny & Rekan

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan interim konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Maret 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. GA117 0839 WK HA tanggal 22 Juni 2017 dan No. GAR117 0894 WK HA tanggal 2 Agustus 2017 untuk laporan keuangan interim konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Maret 2017. Laporan auditor independen dengan opini tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan rencana PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk menerbitkan Perawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah menerbitkan kembali laporan keuangan interim konsolidasian tanggal 31 Maret 2017 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam laporan keuangan konsolidasian ini dengan laporan yang terdahulu kami terbitkan.

Laporan keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebelum reklasifikasi, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut masing-masing pada tanggal 14 Februari 2017 dan 5 Februari 2016.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim konsolidasian, laporan perubahan ekuitas interim konsolidasian, dan laporan arus kas interim konsolidasian terlampir untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2016 tidak diaudit atau direvisi oleh kami dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated interim financial statements present fairly, in all material respects, the interim financial position of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries as of March 31, 2017, and their interim financial performance and cash flows for the three-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

We have previously issued our independent auditor's reports No. GA117 0839 WK HA dated June 22, 2017 and No. GAR117 0894 WK HA dated August 2, 2017 for the consolidated interim financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries as of March 31, 2017. The auditor's independent report with unmodified opinion.

In connection with PT Waskita Karya (Persero) Tbk's plan to issue a Shelf Registration Bonds Public Offering III Waskita Karya Phase I Year 2017 in Indonesia Stock Exchange, PT Waskita Karya (Persero) Tbk has reissued its consolidated interim financial statements as of March 31, 2017 and for the three months period then ended to conform with prevailing capital markets regulations. There are no significant difference in these consolidated financial statements from those accompanying our previously issued report.

The consolidated financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2016 and 2015, before reclassification, were audited by other independent auditors who expressed unmodified opinions on such consolidated financial statements on February 14, 2017 and February 5, 2016, respectively.

The accompanying consolidated interim statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated interim statement of changes in equity and consolidated interim statement of cash flows for the three months period ended March 31, 2016 were not audited or reviewed by us, and accordingly, we do not express an opinion or any form assurance on those statements.

Satrio Bing Eny & Rekan

Laporan ini diterbitkan untuk dimasukkan ke dalam prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap 1 Tahun 2017, dan tidak dimaksudkan dan digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with Shelf Registration Bonds Public Offering III Waskita Karya Phase 1 Year 2017, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

SATRIO BING ENY & REKAN



Henri Arifian

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0561

23 Agustus 2017/ August 23, 2017

Halaman ini sengaja dikosongkan

	Catatan/ Notes	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
		Rp	Rp	Rp	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3, 48, 53	9.153.434.260.147	10.655.996.501.931	5.511.188.078.778	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	4	13.448.200.000	8.448.200.000	10.663.933.745	Short-Term Investments
Piutang Usaha - Bersih					Accounts Receivable - Net
Pihak Berelasi	5, 53	3.784.962.902.824	3.435.212.127.766	438.199.859.939	Related Parties
Pihak Ketiga	5	1.150.158.088.001	882.248.225.510	1.209.920.204.557	Third Parties
Piutang Retensi - Bersih					Retention Receivables - Net
Pihak Berelasi	7, 53	407.103.614.855	376.206.099.216	259.039.506.370	Related Parties
Pihak Ketiga	7	588.401.843.550	590.491.229.164	472.579.536.373	Third Parties
Piutang Lain-lain Lancar - Bersih					Other Current Receivable - Net
Pihak Berelasi	8, 53	3.079.821.405.863	2.777.923.712.427	66.146.998.456	Related Parties
Pihak Ketiga	8	3.957.395.580.523	2.839.950.478.332	61.622.632.188	Third Parties
Piutang Ventura Bersama	6	2.443.651.389.632	745.980.988.779	736.249.944.321	Joint Ventures Receivables
Persediaan	9	2.307.347.839.817	2.556.731.823.542	826.384.135.639	Inventories
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa					Gross Amount Due From Customers
Bagian Lancar					Current Portion
Pihak Berelasi	10, 53	6.146.316.009.189	5.485.979.232.464	2.489.076.603.668	Related Parties
Pihak Ketiga	10	6.282.254.538.668	5.485.823.365.384	2.090.638.381.950	Third Parties
Pajak Dibayar Dimuka	11	1.281.008.308.876	1.159.442.786.800	679.791.479.899	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	12	1.802.580.821.871	2.706.956.927.690	854.122.804.233	Advances and Prepayments
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		--	--	100.000.000.000	Held-to-Maturity Financial Assets
TOTAL ASET LANCAR		42.397.884.803.616	39.707.391.699.005	15.805.624.100.116	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	13	2.560.810.511.687	2.070.700.688.368	1.571.852.765.211	Investment in Associates and Joint Ventures
Piutang Usaha Tidak Lancar kepada Pihak Berelasi - Bersih	5	--	180.002.340.000	2.269.226.842.631	Non-Current Accounts Receivable Related Party - Net
Piutang Lain-lain Tidak Lancar					Other Non-Current Receivable
Pihak Berelasi	8, 53	142.688.816.819	138.109.649.163	134.806.056.785	Related Parties
Pihak Ketiga	8	--	163.751.585.254	71.519.462.085	Third Parties
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Bagian Tidak Lancar					Gross Amount Due From Customers Non-Current Portion
Pihak Berelasi	10, 53	2.091.472.352.410	1.424.497.716.017	344.646.059.310	Related Parties
Pihak Ketiga	10	777.785.272.779	713.419.726.684	180.320.281.930	Third Parties
Properti Investasi	14	53.410.531.080	53.410.531.080	259.970.000.000	Investment Properties
Investasi Jangka Panjang Lainnya	15	421.154.046.393	548.404.046.393	540.222.000.000	Other Long-Term Investments
Aset Tetap - Bersih	16	3.484.238.542.805	3.275.335.187.968	1.923.143.995.454	Fixed Assets - Net
Goodwill	17	1.710.769.397.469	1.710.769.397.469	1.390.680.768.376	Goodwill
Aset Tak Berwujud					Intangible Assets
Hak Pengusahaan Jalan Tol	19	14.198.618.911.048	11.153.743.927.058	5.580.331.981.281	Toll Road Concession Rights
Aset Pajak Tangguhan	11	153.673.452.158	195.138.147.024	182.046.127.094	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	18	122.969.319.388	98.337.532.964	54.720.737.195	Other Assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		25.717.591.154.036	21.725.620.475.442	14.503.487.077.352	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		68.115.475.957.652	61.433.012.174.447	30.309.111.177.468	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated interim financial statements which are an integral part of the consolidated interim financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
		Rp	Rp	Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Pendek					Short-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	20, 53	6.318.057.706.058	6.799.481.486.230	2.518.601.553.926	Related Parties
Pihak Ketiga	20	4.475.056.175.936	5.263.565.665.599	675.303.787.903	Third Parties
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank					Loan to Financial Institution Non-Bank
Bagian Jangka Pendek	21	2.692.519.283.854	3.281.288.365.177	289.295.363.429	Short-Term Portion
Utang Usaha					Accounts Payable
Pihak Berelasi	22, 53	1.310.352.803.641	3.183.978.598.849	273.582.133.368	Related Parties
Pihak Ketiga	22	9.280.507.209.632	4.177.716.473.050	5.198.439.332.096	Third Parties
Utang Bruto Subkontraktor					Gross Amount Due to Subcontractors
Pihak Berelasi	23,53	29.634.724.735	341.532.562.819	--	Related Parties
Pihak Ketiga	23	6.936.237.231.367	6.949.906.503.409	3.300.532.692.707	Third Parties
Biaya yang Masih Harus Dibayar	25	173.976.487.645	251.300.717.225	116.289.393.949	Accrued Expenses
Utang Pajak	11	190.067.935.645	409.814.781.584	439.395.881.176	Taxes Payables
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	24	455.104.054.822	557.259.974.420	739.316.732.456	Advances on Short-Term Contract
Utang Bunga	28	5.217.787.638	--	262.552.936.305	Interest Payable
Utang Bank Jangka Panjang					Current Maturities of
yang Jatuh Tempo dalam Setahun	27	5.392.000.000	5.392.000.000	5.000.000.000	Long-Term Bank Loan
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Jangka Pendek	29	152.858.503	224.284.004	84.270.000	Debt Purchases of Fixed Assets - Current Portion
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	26	1.502.516.936.417	239.293.798.492	108.970.468.263	Other Short-Term Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		33.374.793.195.893	31.460.755.210.858	13.927.364.545.578	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Panjang					Long-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	27, 53	4.862.082.714.954	4.002.281.339.698	1.684.237.750.617	Related Parties
Pihak Ketiga	27	145.904.223.262	145.607.418.903	191.636.337.983	Third Parties
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank					Loan to Financial Institution Non Bank
Jangka Panjang	21	175.000.000.000	175.000.000.000	--	Long-Term
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang					Advances on Long-Term Contract
Pihak Berelasi	32, 53	147.544.775.193	219.672.160.581	368.916.361.382	Related Parties
Pihak Ketiga	32	785.292.440.902	1.058.642.634.766	907.187.037.951	Third Parties
Liabilitas Pajak Tangguhan	11	8.421.178.521	8.610.963.161	--	Deferred Tax Liabilities
Utang Lain-lain Jangka Panjang	31				Other Long-Term Payables
Pihak Berelasi		23.001	853.981.129	41.406.913.603	Related Parties
Pihak Ketiga		1.245.823.068.423	1.953.199.902.151	745.445.185.584	Third Parties
Utang Obligasi - Bersih	30	7.223.339.112.856	5.567.525.204.668	2.670.634.541.106	Bonds Payable - Net
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Jangka Panjang	29	322.649.851	305.251.684	143.649.189	Debt Purchases of Fixed Assets - Long-Term Portion
Liabilitas Imbalan Kerja	33	89.200.852.368	67.339.549.900	67.931.986.811	Employee Benefit Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		14.682.931.039.331	13.199.038.406.641	6.677.539.764.226	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		48.057.724.235.224	44.659.793.617.499	20.604.904.309.804	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham					Share Capital
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 per Saham					Share Capital - Rp 100 par Value per Share for
masing-masing pada 31 Maret 2017					March 31, 2017 and December 31, 2016
dan 31 Desember 2016 dan 2015					and 2015, respectively
Modal Dasar - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan					Authorized Capital - 1 share of Dwi Warna Serie A and
25.999.999.999 Saham Seri B pada					25,999,999,999 Shares of Serie B in
31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015					March 31, 2017 and December 31, 2016, respectively
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -					Subscribed and Fully Paid Capital
1 Saham Seri A Dwi Warna dan					1 share of Dwi Warna Serie A and
13.573.709.450, 13.573.654.550 dan					13,573,709,450, 13,573,654,550 and 13,572,493,310
13.572.493.310 Saham Seri B pada 31 Maret 2017,					Shares of Serie B in March 31, 2017,
31 Desember 2016 dan 2015	34	1.357.370.945.000	1.357.365.455.000	1.357.249.331.000	December 31, 2016 and 2015, respectively
Tambahan Modal Disetor	35	5.882.694.570.784	5.882.676.892.384	5.881.621.412.790	Additional Paid-in Capital
Saldo Laba	37				Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya		1.047.613.976.281	578.285.992.592	368.738.372.808	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		2.134.147.536.565	2.755.875.621.660	1.435.901.518.452	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya		494.870.839.803	495.349.287.477	503.584.506.849	Other Component of Equity
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan					Total Equity Attributable to
Kepada Pemilik Entitas Induk		10.916.697.868.433	11.069.553.249.113	9.547.095.141.899	Owners of Parent
Kepentingan Non-Pengendali	45	9.141.053.853.995	5.703.665.307.835	157.111.725.765	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		20.057.751.722.428	16.773.218.556.948	9.704.206.867.664	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		68.115.475.957.652	61.433.012.174.447	30.309.111.177.468	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated interim financial statements which are an integral part of the consolidated interim financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Maret 2017/ March 31, 2017 Rp	31 Maret 2016/ March 31, 2016 (Tidak diaudit/ Unaudited) Rp	31 Desember 2016/ December 31, 2016 Rp	31 Desember 2015/ December 31, 2015 Rp	
Pendapatan Usaha	38,53	7.354.796.528.000	3.071.542.345.687	23.788.322.626.347	14.152.752.847.612	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	39	(6.240.393.322.258)	(2.551.915.406.079)	(19.820.484.367.904)	(12.231.514.814.135)	Cost of Revenues
LABA BRUTO		1.114.403.205.742	519.626.939.608	3.967.838.258.443	1.921.238.033.477	GROSS PROFIT
Beban Penjualan	40	(9.291.169.821)	(8.352.997.433)	(33.152.971.997)	(37.410.897.783)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	40	(157.585.494.153)	(92.409.908.841)	(755.129.622.061)	(480.433.300.070)	General and Administrative Expenses
Beban Pajak Final	11	(65.445.907.100)	(52.756.609.604)	(324.304.470.013)	(280.914.489.064)	Final Tax Expense
Pendapatan Bunga		98.851.362.295	37.695.529.042	187.483.177.298	72.801.139.476	Interest Income
Kerugian Selisih Kurs - Bersih		(1.014.695.925)	(605.278.194)	(732.320.344)	13.191.493.550	Loss on Foreign Exchange Rates - Net
Selisih Penilaian Properti Investasi		--	--	--	92.241.255.128	Difference on Revaluation of Investment Property
Keuntungan Penjualan Aset Tetap		--	--	--	539.455.112	Gain on Sale of Fixed Assets
Pendapatan Lain-lain	41	84.894.650.546	13.771.441.073	147.474.747.992	185.652.343.033	Other Income
Beban Lain-lain	42	(87.244.433.720)	(4.899.090.595)	(43.695.297.650)	(39.918.754.375)	Other Expenses
LABA SEBELUM BEBAN KEUANGAN, BAGIAN LABA (RUGI) BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA		977.567.517.864	412.070.025.056	3.145.781.501.668	1.446.986.278.484	PROFIT BEFORE FINANCIAL CHARGES, EQUITY IN NET INCOME (LOSS) OF ASSOCIATES AND JOINT VENTURES
Beban Keuangan	43	(466.095.845.137)	(169.678.527.625)	(982.835.623.286)	(340.008.402.044)	Financial Charges
Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	44	10.523.055.611	(35.158.248.339)	(7.356.804.963)	10.111.758.300	Equity in Net Income (Loss) of Associates and Joint Ventures
LABA SEBELUM PAJAK		521.994.728.338	207.233.249.092	2.155.589.073.419	1.117.089.634.740	PROFIT BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	11	(96.323.121.887)	(83.120.851.234)	(342.520.456.635)	(69.498.961.966)	Income Tax Expenses
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		425.671.606.451	124.112.397.858	1.813.068.616.784	1.047.590.672.774	PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi						Items that Will Not Be Reclassified Subsequently to Profit and Loss
Surplus Revaluasi Aset Tetap		2.927.318.313	--	(4.509.463.998)	510.501.181.407	Revaluation Surplus on Fixed Assets
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Bersih		(5.461.602.419)	--	4.350.078.844	7.986.715.316	Remeasurement of Defined Benefit Plans - Net
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi						Items that Will Be Reclassified Subsequently to Profit and Loss
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Kegiatan Operasi Luar Negeri		(3.405.765.987)	(6.260.516.055)	(3.725.755.374)	1.039.036.294	Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Operation
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan		(5.940.050.093)	(6.260.516.055)	(3.885.140.528)	519.526.933.017	Total Other Comprehensive Income for the Period
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN		419.731.556.358	117.851.881.803	1.809.183.476.256	1.567.117.605.791	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		367.713.169.702	127.311.585.135	1.713.260.616.725	1.047.738.098.920	Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	45	57.958.436.749	(3.199.187.277)	99.808.000.059	(147.426.146)	Non-Controlling Interest
LABA PERIODE BERJALAN		425.671.606.451	124.112.397.858	1.813.068.616.784	1.047.590.672.774	PROFIT FOR THE YEAR
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		361.773.119.609	121.051.069.080	1.709.375.476.197	1.567.265.031.937	Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	45	57.958.436.749	(3.199.187.277)	99.808.000.059	(147.426.146)	Non-Controlling Interest
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN		419.731.556.358	117.851.881.803	1.809.183.476.256	1.567.117.605.791	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
Laba per saham	46					Earnings per share
Dasar		27,09	10,96	147,48	90,19	Basic
Dilusian		--	--	147,47	90,18	Diluted

Lihat catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated interim financial statements which are an integral part of the consolidated interim financial statements.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk DAN ITS SUBSIDIARIES
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
 31 MARET 2017 DAN 2016 (2016 - TIDAK DIAUDIT)
 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk DAN ITS SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016 (2016 - UNAUDITED)
 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015

Catatan/ Notes	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Component of Equity										Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp
	Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Individu/ Attributable to the Owners of the Parent										
	Modal Saham/ Shares Capital Rp	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-Up Capital Rp	Ditentukan Penggunaan/ Appropriated Rp	Saldo laba/ Retained earnings Berdiri Dientukan/ Unappropriated Rp	Jumlah/ Total Rp	Saldo laba/ Retained earnings Berdiri Dientukan/ Unappropriated Rp					
	972.750.420.800	924.152.099.733	268.432.270.328	601.740.070.881	870.172.341.209	(7.955.710.852)	2.759.119.160.890	8.859.528.461	2.764.978.867.051		
37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	General Reserves	
	--	--	100.306.102.480	(100.306.102.480)	--	--	--	--	--	Stock Option	
36	19.148.090.500	(43.287.750.657)	--	--	--	--	(43.287.750.657)	--	(43.287.750.657)	Exercised Stock Option	
	385.349.820.000	4.932.222.570.000	--	--	--	--	87.883.574.214	--	87.883.574.214	Subscribed Share Capital	
45	--	--	--	--	--	--	5.297.572.390.000	--	5.297.572.390.000	Cash Dividend	
	--	--	--	--	--	--	(100.306.102.480)	--	(100.306.102.480)	Non Controlling Interest	
	--	--	--	--	--	--	--	151.252.199.304	151.252.199.304	Revaluation Surplus on Fixed Assets and Intangible Assets	
	--	--	--	--	--	--	510.501.181.407	--	510.501.181.407	Profit For The Year	
	--	--	--	--	--	--	1.047.738.098.920	--	1.047.738.098.920	Partnership Program and Community Development Programs	
	--	--	--	--	--	--	(20.951.161.705)	--	(20.951.161.705)	Reserve for Defined Benefit Plans - Net	
	--	--	--	--	--	--	7.986.715.316	--	7.986.715.316	Exchange Rates Difference on Translation of Financial Statements	
	--	--	--	--	--	--	1.039.036.294	--	1.039.036.294		
	1.357.249.331.000	5.881.621.412.790	368.738.372.808	1.435.901.518.462	1.804.639.891.260	(6.916.674.658)	9.547.095.141.899	157.111.725.765	9.704.206.867.664	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2015	
37	--	--	209.547.619.784	(209.547.619.784)	--	--	--	--	--	General Reserves	
	--	--	--	(209.547.624.362)	--	--	(209.547.624.362)	--	(209.547.624.362)	Cash Dividend	
	--	--	--	127.311.585.135	--	--	127.311.585.135	--	127.311.585.135	Profit for the Year	
	--	--	--	20.951.161.705	--	--	20.951.161.705	--	20.951.161.705	Adjustment for Partnership Program and Community Development Programs	
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Exchange Rates Difference on Translation of Financial Statements	
	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	1.357.249.331.000	5.881.621.412.790	578.295.992.592	1.165.069.021.146	1.743.355.013.738	(13.177.190.613)	9.479.549.748.322	153.912.538.488	9.633.462.286.810	BALANCE AS OF MARCH 31, 2016	
										(Unaudited)	
	1.357.249.331.000	5.881.621.412.790	368.738.372.808	1.435.901.518.462	1.804.639.891.260	(6.916.674.658)	9.547.095.141.899	157.111.725.765	9.704.206.867.664	BALANCE AS OF JANUARY 1, 2016	
37	--	--	209.547.619.784	(209.547.619.784)	--	--	--	--	--	General Reserves	
36	116.124.000	693.095.314	--	--	--	--	693.095.314	--	693.095.314	Shares Option	
	--	362.384.280	--	--	--	--	478.508.280	--	478.508.280	Exercise of Share Options	
45	--	--	--	--	--	--	(209.547.624.362)	--	(209.547.624.362)	Cash Dividend	
	--	--	--	--	--	--	5.546.553.582.070	--	5.546.553.582.070	Non-Controlling Interest	
	--	--	--	--	--	--	(4.509.463.998)	--	(4.509.463.998)	Revaluation Surplus on Fixed Assets	
	--	--	--	--	--	--	1.713.260.616.725	--	1.713.260.616.725	Profit for the year	
	--	--	--	--	--	--	20.951.161.705	--	20.951.161.705	Adjustment for Partnership Program and Community Development Programs	
	--	--	--	--	--	--	4.857.568.924	--	4.857.568.924	Reassessment of Defined Benefits Plans - Net	
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Exchange Rates Difference on Translation of Financial Statements	
	--	--	--	--	--	--	(3.725.755.374)	--	(3.725.755.374)		
	1.357.365.455.000	5.882.676.892.394	578.295.992.592	2.755.875.621.660	3.334.181.814.252	(10.642.429.932)	11.069.855.249.143	5.703.665.307.835	16.773.215.556.948	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2016	
37	--	--	469.327.983.689	(469.327.983.689)	--	--	--	--	--	General Reserves	
36	5.490.000	(11.834.124)	--	--	--	--	(6.444.124)	--	(6.444.124)	Shares Option	
	--	29.612.524	--	--	--	--	29.612.524	--	29.612.524	Exercise of Share Options	
45	--	--	--	--	--	--	(513.999.610.755)	--	(513.999.610.755)	Cash Dividend	
	--	--	--	--	--	--	3.506.385.611.708	--	3.506.385.611.708	Non-Controlling Interest	
	--	--	--	--	--	--	2.927.318.313	--	2.927.318.313	Revaluation Surplus on Fixed Assets	
	--	--	--	--	--	--	367.713.169.702	--	367.713.169.702	Profit for the Period	
	--	--	--	--	--	--	(652.057.934)	--	(652.057.934)	Adjustment for Changes Ownership in Subsidiaries	
	--	--	--	--	--	--	(5.461.602.419)	--	(5.461.602.419)	Reassessment of Defined Benefits Plans - Net	
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Exchange Rates Difference on Translation of Financial Statements	
	--	--	--	--	--	--	(3.405.765.987)	--	(3.405.765.987)		
	1.357.370.945.000	5.882.694.970.704	1.047.613.976.261	2.154.147.556.865	3.181.761.812.846	(14.048.195.919)	10.916.897.868.433	9.141.053.833.995	20.057.751.722.428	BALANCE AS OF MARCH 31, 2017	

Lihat catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian.
 See accompanying notes to consolidated interim financial statements which are an integral part of the consolidated interim financial statements.

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	3.377.962.321.807	1.382.812.453.430	9.104.677.090.845	11.534.113.565.371	Cash Receipts from Customers
Pengeluaran Kas kepada Pemasok	(3.010.711.719.894)	(3.535.465.066.019)	(14.764.975.579.132)	(10.364.998.136.892)	Cash Paid to Suppliers
Pengeluaran Kas kepada Karyawan dan Direksi	(96.473.625.534)	(52.142.566.826)	(427.464.463.401)	(290.631.919.988)	Cash Paid to Employees and Directors
Kas Dihasilkan dari Operasi	270.776.976.379	(2.204.795.179.415)	(6.087.762.951.688)	878.483.508.491	Cash Generated from Operations
Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka	99.583.919.192	38.140.228.447	186.873.566.238	66.889.149.073	Interest Income from Current Account and Time Deposit
Pembayaran Beban Keuangan	(466.095.845.137)	(169.678.527.625)	(982.835.623.286)	(340.008.402.044)	Payment for Financial Charges
Penerimaan Restitusi Pajak	--	--	437.847.439	296.588.055.931	Receipt from Tax Restitutions
Pembayaran Pajak	(495.440.729.223)	(309.713.331.108)	(879.126.613.906)	(243.980.244.934)	Payment for Taxes
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(591.175.678.789)	(2.646.046.809.701)	(7.762.413.775.203)	657.972.066.517	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari Ventura Bersama	49.864.701.249	12.743.978.922	75.190.986.111	156.256.685.561	Receipt from Joint Ventures
Penempatan pada Ventura Bersama	(264.792.604.320)	(1.720.923.205)	(76.477.131.755)	(567.052.896.343)	Placement of Joint Ventures
Penempatan Deposito	(1.768.787.924.892)	--	(5.302.123.722.000)	--	Placement of Time Deposits
Penerimaan Pencairan Deposito	2.891.839.455.745	--	2.005.952.785.321	13.612.200.000	Receipt from Time Deposits
Perolehan Aset Tetap	(296.683.517.478)	(494.775.049.296)	(611.419.778.706)	(938.317.109.390)	Acquisition of Fixed Assets
Penerimaan Penjualan Aset Tetap	--	--	--	1.071.602.183	Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	--	25.000.000.000	100.000.000.000	75.000.000.000	Receipt from Held to Maturity Financial Assets
Perolehan Aset Tak Berwujud	(3.044.874.983.990)	(296.296.242.864)	(5.573.411.945.777)	(5.580.331.981.280)	Acquisition of Intangible Assets
Penempatan Investasi Asosiasi dan Jangka Panjang Lainnya	(305.940.911.031)	(10.050.000.000)	(170.432.046.393)	(87.122.000.000)	Placement of Investment In Associates and Long-Term Investments
Penerimaan atas Pelepasan Penyertaan Pada Entitas Asosiasi	217.000.000.000	--	--	--	Receipt from Investment In Associates
Pengurangan Penyertaan Pada Entitas Asosiasi	(133.032.046.393)	--	--	--	Reduction of Investment in Associates
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.655.407.831.110)	(765.098.236.443)	(9.552.720.853.199)	(6.926.883.499.269)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pelunasan Utang Obligasi	--	--	--	(75.000.000.000)	Payment of Bonds Payable
Pembayaran Emisi Obligasi	(2.153.386.364)	--	(5.833.824.947)	(2.215.000.000)	Bonds Issuance Costs
Penerimaan Penerbitan Obligasi	1.657.000.000.000	--	2.900.000.000.000	1.500.000.000.000	Receipt from Bonds Issuance
Biaya Emisi Penawaran Umum Saham	--	--	--	(37.328.848.508)	Issuance Cost of Limited Public Offering
Penerimaan Pinjaman Bank	2.818.316.660.972	5.346.676.672.282	29.502.304.802.747	20.286.224.156.356	Receipt from Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank	(5.400.827.107.699)	(2.737.095.492.291)	(18.398.828.576.844)	(17.147.021.283.915)	Payment of Bank Loans
Penerimaan Setoran Modal Saham	--	--	116.124.000	384.498.910.500	Receipt from Share Capital Issuance
Penerimaan Tambahan Setoran Modal	--	--	640.354.345	5.000.757.053.714	Receipt from Paid in Capital
Pembayaran Dividen Tunai	--	--	(209.547.624.362)	(100.306.102.480)	Payment of Cash Dividend
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Pendek	--	--	(700.000.000.000)	--	Receipt from Financial Institution Non Bank-Short Term Portion
Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Pendek	(750.000.000.000)	200.243.051.315	3.923.736.603.545	289.295.363.429	Payment to Financial Institution Non Bank-Short Term Portion
Penerimaan Setoran dari Entitas Non-Pengendali	3.422.417.658.103	--	5.446.745.582.011	--	Receipt from Non-Controlling Interest
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.744.753.825.012	2.809.824.231.306	22.459.333.440.495	10.098.904.249.096	Net Cash Provided by Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.501.829.684.887)	(601.320.814.838)	5.144.198.812.093	3.829.992.816.344	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KEUNTUNGAN SELISIH KURS YANG BELUM DIREALISASI	(732.556.897)	(444.699.405)	609.611.060	5.911.990.403	UNREALIZED GAIN ON FOREIGN EXCHANGE RATE
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	10.655.996.501.931	5.511.188.078.778	5.511.188.078.778	1.675.283.272.031	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	9.153.434.260.147	4.909.422.564.535	10.655.996.501.931	5.511.188.078.778	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF PERIOD

Lihat catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated interim financial statements which are an integral part of the consolidated interim financial statements.

1. UMUM

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Negara Waskita Karya ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1961, dari perusahaan asing bernama "Volker Aanemings Maatschappij NV" yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1970 status Perusahaan berubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan (Persero). Selanjutnya, Perusahaan dinamakan PT Waskita Karya (Persero) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 80 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Perseroan Terbatas tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1973 dengan Surat Keputusan No. 4.a.5/310/3 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 13 Nopember 1973, Tambahan Berita Negara No. 91.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 126 tanggal 31 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, antara lain berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0043583.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

1.b. Entitas Anak

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung lebih dari 50% saham pada entitas anak dan/ atau mempunyai kendali atas manajemen entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

a. Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination 31 Maret/ March 31, 2017	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Total Profit (Loss) for the Period
					Rp	Rp
PT Waskita Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	2014	99,99	27.351.634.297.958	(105.328.716.536)
PT Waskita Beton Precast Tbk	Jakarta	Industri Pabrikasi/ Fabrication	2014	60,00	13.808.135.007.640	193.951.260.748
PT Waskita Karya Realty	Jakarta	Properti/ Property	2015	99,99	2.468.629.886.008	9.044.969.354
PT Waskita Karya Energi	Jakarta	Energi/ Energy	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	39.178.714.706	(2.166.975.220)

1. GENERAL

1.a. Establishment and General Information

The State Owned Company Waskita Karya ("the Company") was established on January 1, 1961 based on Government Regulation No. 62 year 1961, from a foreign company named "Volker Aanemings Maatschappij NV" which was nationalized by the Government of the Republic of Indonesia.

According to Government Regulation No. 40 year 1970, the Company's status was changed from Perusahaan Negara (PN) into Perseroan (Persero). Furthermore, the Company was named as PT Waskita Karya (Persero) in accordance with the Deed of Limited Liability Corporation No. 80 dated March 15, 1973 of Kartini Mulyadi, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on August 20, 1973 in his Decree No. 4.a.5/310/3 and stated on State Gazette of Republic of Indonesia No. 82 on November 13, 1973, Supplement No. 91.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the Notarial Deed No. 126 on March 31, 2017 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, concerning among other increase in the Company's subscribed and paid up capital. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-0043583.AH.01.11 Year 2017 dated April 3, 2017.

The Company is domiciled in Jakarta, with head office located at Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

1.b. Subsidiaries

The Company has 50% direct and indirect ownership interest in subsidiaries and/ or has control over consolidated subsidiaries management as follows:

b. Kepemilikan Tidak Langsung/ *Indirect Ownership*

Entitas Anak/ <i>Subsidiaries</i>	Domisili/ <i>Domiciled</i>	Jenis Usaha/ <i>Nature of Business</i>	Tahun Operasi Komersial/ <i>Start of Commercial Operations</i>	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Sebelum Eliminasi/ <i>Before Elimination</i>	
					31 Maret/ <i>March 31, 2017</i>	
					Jumlah Aset/ <i>Total Assets</i>	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan/ <i>Total Profit (Loss) for the Year</i>
					Rp	Rp
PT Waskita Sangir Energi	Jakarta	Energi/ <i>Energy</i>	2016	85,00	287.278.584.895	(1.584.162.627)
PT Waskita Transjawa Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ <i>Toll Road</i>	Dalam Tahap Pengembangan/ <i>Development Stage</i>	99,99	10.456.413.708.442	(48.144.934.656)
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ <i>Toll Road</i>	Dalam Tahap Pengembangan/ <i>Development Stage</i>	90,00	1.345.034.564.685	(2.542.095.842)
PT Trans Jabar Tol	Jakarta	Jalan Tol/ <i>Toll Road</i>	Dalam Tahap Pengembangan/ <i>Development Stage</i>	99,99	1.977.289.728.911	(30.075.144)
PT Pemalang Batang Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ <i>Toll Road</i>	Dalam Tahap Pengembangan/ <i>Development Stage</i>	60,00	2.519.773.176.339	152.030.249
PT Srijaya Markmore Persada	Jakarta	Jalan Tol/ <i>Toll Road</i>	Dalam Tahap Pengembangan/ <i>Development Stage</i>	60,00	2.045.283.620.171	276.954.948
PT Waskita Bumi Wira	Gresik	Jalan Tol/ <i>Toll Road</i>	Dalam Tahap Pengembangan/ <i>Development Stage</i>	55,00	1.519.512.860.647	37.472.683
PT Semesta Marga Raya	Jakarta	Jalan Tol/ <i>Toll Road</i>	2010	77,69	3.623.318.585.110	(22.905.796.095)
PT Pejagan Pemalang Tol Road	Jakarta	Jalan Tol/ <i>Toll Road</i>	2016	99,99	4.576.412.427.385	(25.905.995.060)
PT Transjawa Paspro Jalan Tol	Jakarta	Jalan Tol/ <i>Toll Road</i>	Dalam Tahap Pengembangan/ <i>Development Stage</i>	80,00	2.145.676.329.314	(8.198.342.317)

PT Waskita Toll Road (WTR)

Pendirian WTR, (entitas anak) sesuai dengan akta notaris No. 62 tanggal 19 Juni 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-14734.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014.

PT Waskita Toll Road (WTR)

The establishment of WTR, (subsidiary) was based on notarial deed No. 62 dated June 19, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. AHU-14734.40.10.2014 dated June 25, 2014.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP)

Pendirian WBP, (entitas anak) sesuai dengan akta notaris No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP)

The establishment of WBP, (subsidiary) was based on notarial deed No. 10 dated October 7, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. AHU-29347.40.10.2014 dated October 14, 2014.

PT Waskita Karya Realty (WKR)

Pendirian WKR, (entitas anak) sesuai dengan akta notaris No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-54929.AH.01.02. tanggal 23 Oktober 2014.

PT Waskita Karya Realty (WKR)

The establishment of WKR, (subsidiary) was based on notarial deed No. 27 dated October 16, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. AHU-54929.AH.01.02 dated October 23, 2014.

PT Waskita Karya Energi (WKE)

Pendirian WKE, (entitas anak) sesuai dengan akta notaris No. 05 tanggal 4 Maret 2016 dari notaris Fathiah Helmi S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-0019486. AH.01.01 tahun 2016.

PT Waskita Karya Energi (WKE)

The establishment of WKE, (subsidiary) was based on notarial deed No. 05 dated March 4, 2016 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. AHU-0019486. AH.01.01 year 2016.

PT Waskita Sangir Energi (WSE)

Pendirian WSE, (entitas anak WKE) sesuai dengan akta notaris No. 22 tanggal 11 Juli 2013 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-40852.AH.01.01.tahun 2013.

Selanjutnya pengalihan kepemilikan (*inbreg*) WSE ke dalam WKE dilakukan berdasarkan dengan akta notaris No. 21 tanggal 23 Desember 2016 dari notaris Kokoh Henry, S.H., M.Kn.

PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR)

Pendirian PT Waskita MNC Transjawa Toll Road, (entitas anak WTR) sesuai dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 25 tanggal 28 September 2015. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-2458481.AH.01.01.TH.2015 tanggal 29 September 2015.

Berdasarkan akta notaris Catur Virgo, S.H., M.H., No. 32 tanggal 27 Mei 2016 telah disetujui perubahan nama dari "PT Waskita MNC Transjawa Toll Road" menjadi "PT Waskita Transjawa Toll Road". Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-005.3.001 tanggal 31 Mei 2016.

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)

Pendirian CCT, (entitas anak WTR) sesuai dengan akta notaris No. 52 tanggal 22 Pebruari 2008 dari notaris Agus Madjid, S.H. M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-09738.AH.01.01. TH.2008 tanggal 27 Pebruari 2008.

Selanjutnya peralihan pemegang saham CCT kepada WTR dilakukan berdasarkan dengan akta notaris No. 30 tanggal 13 Juli 2015 dari notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn.

PT Trans Jabar Tol (TJT)

Pendirian TJT, (entitas anak WTR) sesuai dengan akta notaris Humberg Lie, S.H., M.Kn No. 79 tanggal 19 Juli 2007. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. W29-01398-HT.01.01-TH.2007.

PT Waskita Sangir Energi (WSE)

The establishment of WSE, (subsidiary of WKE) was based on the notarial deed No. 22 dated July 11, 2013 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. AHU-40852.AH.01.01.year 2013.

Then transfer of ownership of WSE to WKE was based on the notarial deed No. 21 dated December 23, 2016 of Kokoh Henry, S.H., M.Kn.

PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR)

The establishment of PT Waskita MNC Transjawa Toll Road, (subsidiary of WTR) was based on notarial deed No. 25 dated September 28, 2015 of notary Fathiah Helmi, S.H. This notarial deed has been approved by The Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. AHU-2458481.AH.01.01.TH.2015 dated September 29, 2015.

Based on notarial deed Catur Virgo, S.H., M.H., No. 32 dated May 27, 2016 which approved to change the name of "PT Waskita MNC Transjawa Toll Road" into "PT Waskita Transjawa Toll Road". The deed was approved by Minister of Law and Human Rights in Decree No. AHU-AH.01.03-005.3.001 dated May 31, 2016.

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)

The establishment of CCT, (subsidiary of WTR) was based on notarial deed No. 52 dated February 22, 2008 of notary Agus Madjid, S.H. M.Kn. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-09738.AH.01.01.TH.2008 dated February 27, 2008.

Then change in ownership of CCT to WTR was based on notarial deed No. 30 dated July 13, 2015 of notary Jose Dima Satria, S.H. M.Kn.

PT Trans Jabar Tol (TJT)

The establishment of TJT (subsidiary of WTR) was based on notarial deed No. 79 dated July 19, 2007 of notary Humberg Lie, S.H., M.Kn. This notarial deed has been approved by The Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. W29-01398-HT.01.01-TH.2007.

Akuisisi TJT oleh WTR sesuai dengan akta notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 44 tanggal 22 Desember 2015. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0990894.

Acquisition of TJT by WTR is in accordance with the deed of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 44 dated December 22, 2015. This deed was approved by Minister of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0990894.

PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR)

PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR)

Pendirian PBTR, (entitas anak WTR) sesuai dengan akta notaris No. 10 tanggal 15 Juni 2006 dari notaris Bonardo Nasution S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C-20478 HT.01.01. TH 2006 tanggal 13 Juli 2006.

The establishment of PBTR, (subsidiary of WTR) was based on notarial deed No. 10 dated June 15, 2006 of notary Bonardo Nasution, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. C-20478 HT.01.01. TH 2006 dated July 13, 2006.

Selanjutnya peralihan pemegang saham PBTR ke dalam WTR berdasarkan akta notaris No. 57 tanggal 15 Februari 2016 dari notaris Jose Dima Satria. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-AH. 01.03-0982070.

Then change in ownership of PBTR to WTR was based on notarial deed No. 57 dated February 15, 2016 of notary Jose Dima Satria. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. AHU-AH.01.03-0982070.

PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP)

PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP)

Pendirian SRIMP, (entitas anak WTR) sesuai dengan akta notaris No. 51 tanggal 1 Maret 2016 dari notaris Bonardo Nasution, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-0019486.AH.01.01.2011 tanggal 21 Nopember 2011.

The establishment of SRIMP, (subsidiary of WTR) was based on notarial deed No. 51 dated March 1, 2016 of notary Bonardo Nasution, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. AHU-0019486.AH.01.01.2011 dated November 21, 2011.

Selanjutnya peralihan pemegang saham SRIMP ke dalam WTR sesuai dengan akta notaris No. 21 tanggal 14 Maret 2016 dari notaris Yusdim Fahim. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU- 0005664.AH.01.02.

Then change in ownership of SRIMP to WTR was based on notarial deed No. 21 dated March 14, 2016 of notary Yusdim Fahim. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights through its letter No. AHU-0005664.AH.01.02.

PT Waskita Bumi Wira (WBW)

PT Waskita Bumi Wira (WBW)

Berdasarkan akta notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 43 tanggal 28 Oktober 2014, WTR, (entitas anak WTR) memiliki penyertaan sebesar 48% atas modal disetor ke WBW sebesar Rp 7.500.000.000.

Based on the notarial deed No. 43 dated October 28, 2014 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, WTR, (subsidiary of WTR) has a participation of 48% on the paid in capital of WBW amounted to Rp 7,500,000,000.

Berdasarkan akta No. 5 tanggal 4 April 2016, PT Energi Bumi Mining memiliki opsi saham untuk membeli kembali transfer kepemilikan 7% dari WBW sampai dengan 31 Desember 2016. Setelah periode tersebut opsi saham tersebut akan hangus dan WBW akan dikonsolidasi.

Based on Deed No. 5 dated April 4, 2016, PT Energi Bumi Mining has the shares option to buy back the 7% transfer of ownership from WBW until December 31, 2016. After that period the shares option will be expired and WBW will be consolidated.

Pada tanggal 9 Mei 2016, WTR membeli saham WBW milik PT Energi Bumi Mining sebesar Rp 1.094.000.000, sehingga meningkat menjadi 55% berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 3 Mei 2016.

On May 9, 2016, WTR bought WBW's owned by PT Energi Bumi Mining amounted to Rp 1,094,000,000, which increased to 55% based on Decree of The Circular of General Meeting of Shareholders (GMS) dated May 3, 2016.

PT Semesta Marga Raya (SMR)

PT Semesta Marga Raya (SMR)

Pendirian SMR, (entitas anak WTTR) sesuai dengan akta notaris No. 127 tanggal 28 September 2015 dari notaris Humberg Lie, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-10.AH.02.02/TH2010.

The establishment of SMR, (subsidiary of WTTR) was based on notarial deed No. 127 dated September 28, 2015 of notary Humberg Lie, S.H., M.Kn. This notarial deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. AHU-10.AH.02.02/TH2010.

Selanjutnya pengalihan kepemilikan (*inbreg*) SMR ke dalam WTTR dilakukan berdasarkan akta notaris No. 134 tanggal 28 September 2015 dari notaris Humberg Lie, S.H, S.E, M.Kn.

Then transfer of ownership of SMR to WTTR was based on notarial deed No. 134 dated September 28, 2015 of notary Humberg Lie, S.H, S.E, M.Kn.

PT Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR)

PT Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR)

Pendirian PPTR, (entitas anak WTTR) sesuai dengan akta notaris No. 09 tanggal 15 Juni 2006 dari notaris Bonardo Nasution, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. C-20455.HT.01.01.TH.2006.

The establishment of PPTR, (subsidiary of WTTR) was based on notarial deed No. 09 dated June 15, 2016 of notary Bonardo Nasution, S.H. M.Kn. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. C-20455.HT.01.01.TH.2006.

Selanjutnya *inbreg* PPTR oleh WTTR dilakukan berdasarkan dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H. No. 40 tanggal 30 Oktober 2015.

Then transfer of ownership of PPTR to WTTR was based on notarial deed No. 40 of notary Fathiah Helmi, S.H, dated October 30, 2015.

PT Transjawa Paspro Jalan Tol (TPJT)

PT Transjawa Paspro Jalan Tol (TPJT)

Pendirian TPJT, (entitas anak WTTR) sesuai dengan akta notaris No. 22 tanggal 21 Mei 2007 dari notaris Humberg Lie, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. W29-01201HT.01.01-TH.2007.

The establishment of TPJT, (subsidiary of WTTR) was based on notarial deed No. 22 dated May 21, 2007 of notary Humberg Lie, S.H., M.Kn. This notarial deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights through its decision letter No. W29-01201HT.01.01-TH.2007.

Akuisisi dari TPJT oleh WTTR sesuai dengan akta notaris No. 135 tanggal 28 September 2015 dari notaris Humberg Lie, S.H., M.Kn. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui No. AHU-AH.01.03-0969717.

Acquisition of TPJT by WTTR is in accordance with the deed No. 135 of September 28, 2015 of notary Humberg Lie, S.H., M.Kn. This deed was approved by Minister of Law and Human Rights through its letter No. AHU - AH.01.03-0969717.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

The Company and subsidiaries herein after will be referred as "the Group".

1.c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

1.c. The Public Offering of the Company's Securities

Saham

Shares

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berdasarkan surat keputusan No. S-14012/BL/2012.

On December 10, 2012, the Company obtained the notice of effectivity notification from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through its decree No. S-14012/BL/2012.

Pada tanggal 17 Desember 2012 berdasarkan surat No. S-08414/BEI.PPJ/12-2012 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyetujui penawaran efek Perusahaan di BEI kepada masyarakat atas 3.082.315.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 380 per saham.

On December 17, 2012, according to the letter No. S-08414/BEI.PPJ/12-2012, Indonesian Stock Exchange (IDX) agreed to the public offering of the Company on IDX for 3,082,315,000 of common stock with the par value Rp 100 per share and the offering price Rp 380 per share.

Dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kepada masyarakat sebesar 6,25% atau sebanyak 192.644.000 saham biasa atas nama baru dijatahkan kepada karyawan perusahaan melalui program penjatahan saham untuk pegawai Perusahaan (*Employee Stock Allocation/ ESA*).

From the number of shares offered in the public offering of 6.25% or 192,644,000 of new ordinary shares is allocated to the employees through the allocation shares program of the Company (*Employee Stock Allocation/ ESA*).

Pada tanggal 19 Desember 2012, seluruh saham Perusahaan sebanyak 9.632.236.000 saham telah tercatat pada BEI. Pada tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) berdasarkan surat keputusan No. S-238/D.04/2015.

On December 19, 2012, a total of 9,632,236,000 shares of the Company were listed on the IDX. On the date June 10, 2015, The Company obtained effective notification from The Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) of the Registration Statement in the Limited Public Offering I (LPO I) through its decree No. S-238/D.04/2015.

Pada tanggal 7 Juli 2015, seluruh saham Perusahaan melalui PUT I sebanyak 3.653.498.200 saham telah tercatat pada BEI, sehingga jumlah keseluruhan saham Perusahaan setelah PUT I menjadi sebesar 13.567.473.560 saham.

On July 7, 2015, all the Company's shares through the LPO I totaling 3,653,498,200 shares have been listed in the IDX, bringing the number of shares of the Company after the LPO I totaling 13,567,473,560 shares.

Obligasi

Bonds

Perusahaan telah menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

The Company has issued bonds with the following details are as follows:

No	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jatuh Tempo/ Due Date	Status
1	Seri B/ Tranche B	675.000.000.000	5	5 Juni/ June 5, 2012	5 Juni/ June 5, 2017	Belum Lunas/ Outstanding
2	Berkelanjutan I/ Shelf I	500.000.000.000	3	10 Nopember/ November 10, 2014	10 Nopember/ November 10, 2017	Belum Lunas/ Outstanding
3	Berkelanjutan I Tahap II Seri A/ Shelf I Phase II Tranche A	350.000.000.000	3	16 Oktober/ October 16, 2015	16 Oktober/ October 16, 2018	Belum Lunas/ Outstanding
4	Berkelanjutan I Tahap II Seri B/ Shelf II Phase II Tranche B	1.150.000.000.000	5	16 Oktober/ October 16, 2015	16 Oktober/ October 16, 2020	Belum Lunas/ Outstanding
5	Berkelanjutan II Tahap I/ Shelf II Phase I	2.000.000.000.000	3	10 Juni/ June 10, 2016	10 Juni/ June 10, 2019	Belum Lunas/ Outstanding
6	Berkelanjutan II Tahap II/ Shelf II Phase II	900.000.000.000	5	28 September/ September 28, 2016	28 September/ September 28, 2021	Belum Lunas/ Outstanding
7	Berkelanjutan II Tahap III Seri A/ Shelf II Phase III Tranche A	747.000.000.000	3	21 Februari/ February 21, 2017	21 Februari/ February 21, 2020	Belum Lunas/ Outstanding
8	Berkelanjutan II Tahap III Seri B/ Shelf II Phase III Tranche B	910.000.000.000	4	21 Februari/ February 21, 2017	21 Februari/ February 21, 2022	Belum Lunas/ Outstanding

1.d. Bidang Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu Pekerjaan pelaksanaan konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan terintegrasi *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*, perancangan dan pembangunan (*design and build*), layanan jasa konsultasi manajemen, gedung manajemen, pabrikan bahan dan komponen bangunan, pabrikan komponen dan peralatan konstruksi, pabrikan barang logam, kayu, karet dan plastik, penyewaan peralatan konstruksi, layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar serta industri, melakukan usaha di bidang agro industri, ekspor-impor, perdagangan umum, pengelolaan kawasan, pengembangan sistem, layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan dan pengembangan *realty*.

Kegiatan usaha Perusahaan yang saat ini telah dijalankan Perusahaan adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi EPC.

1.e. Organisasi

Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan tanggal 17 Maret 2017, menetapkan 6 (enam) anggota direksi Perusahaan yaitu seorang direktur utama dan 5 (lima) direktur.

1.d. The Scope of Business

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the objectives of the Company are to execute and support the government policy and programs in economic area and national development in general, specifically in construction industry, fabrication, rental services, agent services, investment, agro industry, trading, area management, increase ability in the field of construction services, information technology, and tourism and developer with implementation in good corporate governance.

In order to achieve the objectives, the Company engaged in following activities Construction execution work, mining services, integrated Engineering, Procurement, and Construction (EPC), design and build, management consultant service, building management, building components and raw material fabrication, component and construction tools fabrication, fabrication of metals, woods, rubber, and plastic fabrication, leasing on construction equipments, agent for raw materials, building components and construction equipment, investment and/or business management in area of basic facility and infrastructure and industry, performing activities in agro industry field, export-import, general trading, area management, system development, service in information technology and tourism and realty development.

The Company's current business activities, is construction activities and integrated EPC.

1.e. Organization

Organization Structure

According to the Decree of State Ministry of State Owned Enterprise (SOE) in General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company dated March 17, 2017, appointed 6 (six) directors of the Company consists of a president director and 5 (five) directors.

Wilayah kerja sesuai surat keputusan direksi No. 17/SK/WK/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang perubahan struktur organisasi Perusahaan, Struktur organisasi Perusahaan berbasis unit bisnis. Unit bisnis mempunyai fungsi pemasaran sampai dengan fungsi produksi. Unit bisnis memiliki 6 (enam) divisi, sebagai berikut:

Work areas according to the decision letter of director No. 17/SK/WK/2016 dated December 20, 2016 regarding to the changes of the Company's organizational structure, the organizational structure is based on business unit. The business unit has its function of marketing function up to production function. The business unit have 6 (six) divisions, as follows:

Unit Bisnis/ <i>Business Unit</i>	Wilayah Operasi/ <i>Work Areas</i>	Kedudukan/ <i>Location</i>
Divisi I/ <i>Division I</i>	<p>Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia dan luar negeri (kecuali Timor Leste) berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan Proyek-Proyek Gedung, Bandara, Jalan Kereta Api dan LRT, serta Proyek Investasi dengan nilai kontrak > Rp 300 Miliar.</p> <p><i>Operational area covers the whole area of Indonesia and abroad (except Timor Leste), domiciled in Jakarta to perform its activities in the marketing's area to production for the entire building project for the works of Building, Airport, Railway and LRT Projects, as well as Investment Projects with contract value > Rp 300 Billion.</i></p>	Jakarta
Divisi II/ <i>Division II</i>	<p>Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia dan Timor Leste berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk sipil dan proyek EPC seperti <i>Dams, Landscape bridges, Docks, Transmissions</i> dan proyek EPC seperti proyek investasi dengan nilai kontrak > Rp 300 Miliar.</p> <p><i>Operational area covers the whole area of Indonesia and Timor Leste, domiciled in Jakarta to perform its activities in the marketing up to production for Civil and EPC projects such as Dams, Landscape bridges, Docks, Transmissions and EPC Projects as well as investment projects with contract value > Rp 300 Billion.</i></p>	Jakarta
Divisi III/ <i>Division III</i>	<p>Daerah operasional meliputi pulau Jawa berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek jalan tol dan proyek-proyek pengembangan dengan tidak ada batasan nilai kontrak.</p> <p><i>Operational area covers java island, domiciled in Jakarta to perform its activities in the marketing up to production for toll road projects and devolepment projects with no contract value restriction.</i></p>	Jakarta
Divisi IV/ <i>Division IV</i>	<p>Berkedudukan di Surabaya melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek jalan tol dan proyek-proyek pengembangan meliputi pulau Jawa dengan tidak ada batasan nilai kontrak.</p> <p><i>Domiciled in Surabaya to perform its activities in the marketing up to production for toll road projects and devolepment projects covers java island with no contract restriction.</i></p>	Surabaya

Unit Bisnis/ Business Unit	Wilayah Operasi/ Work Areas	Kedudukan/ Location
Divisi VI/ Division V	Daerah operasional seluruh Indonesia selain pulau Jawa; berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek jalan tol dan proyek-proyek pengembangan dengan tidak ada batasan nilai kontrak. <i>Operational area covers the whole area of Indonesia except Java island, domiciled in Jakarta to perform its activities in the marketing up to production for toll road projects and development projects covers Java island with no contract restriction.</i>	Jakarta
Divisi VII/ Division VI	Berkedudukan di Palembang melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek jalan tol dan proyek-proyek pengembangan meliputi Seluruh Indonesia selain Pulau Jawa dengan tidak ada batasan nilai kontrak. <i>Domiciled in Palembang its activities in the marketing up to production for toll road projects and development projects covers the whole area of Indonesia except Java Island with no contract restriction.</i>	Palembang

1.f. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan akta keputusan RUPS No. 56 tanggal 17 Maret 2017 dari notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, dan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 52 tanggal 25 Nopember 2016 dari notaris Fathiah Helmi, S.H.

Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2017 dan/ and 31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
Komisaris Utama	Badrodin Haiti	Mohamad Hasan	President Commissioner
Komisaris Independen	M. Aqil Irham Viktor S. Sirait	M. Aqil Irham Viktor S. Sirait	Independent Commissioners
Komisaris	Danis H. Sumadilaga Arif Baharudin R Agus Sartono	Danis H. Sumadilaga Arif Baharudin R Agus Sartono	Commissioners
Direktur Utama	M. Choliq	M. Choliq	President Director
Direktur Independen	Tunggul Rajagukguk	Tunggul Rajagukguk	Independent Director
Direktur	Adi Wibowo Nyoman Wirya Adnyana Agus Sugiono Bambang Rianto*)	Adi Wibowo Nyoman Wirya Adnyana Agus Sugiono Desi Arryani **)	Directors

*) Terhitung sejak 31 Maret 2017, Bambang Rianto diangkat sebagai anggota direksi.

**) Terhitung sejak 29 Agustus 2016, Desi Arryani mengundurkan diri sebagai anggota direksi.

Komite Audit diangkat melalui surat keputusan

1.f. The Composition of Board of Commissioners, Directors and Employees

The composition of Commissioners and Directors were approved by the decisions deed of GMS No. 56 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, dated March 17, 2017 and decisions deed of Extraordinary General Meeting Shareholder (EGMS) No. 52 of notary Fathiah Helmi, S.H., dated November 25, 2016.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of March 31, 2017, December 31, 2016, and December 31, 2015 are as follows:

*) Since March 31, 2017, Bambang Rianto appointed as a director.

**) Since August 29, 2016, Desi Arryani resigned as a director.

Audit Committee was appointed by the decision

komisaris No. 11/SK/WK/DK/2015 tanggal
 30 September 2015.

*letter of commissioner No. 11/SK/WK/DK/2015
 dated September 30, 2015.*

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal
 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015
 adalah sebagai berikut:

*The composition of the Company's Audit
 Committee as of March 31, 2017, December 31,
 2016 and 2015 are as follows:*

	31 Maret/ March 31, 2017 dan/ and 31 Desember/ December 31, 2016 31 Desember/ December 31, 2015	
Ketua	Viktor S. Sirait	<i>Head</i>
Anggota	R. Agus Sartono Tjahjo Winarto Hengki Z. P. Tampubolon	<i>Members</i>

Komite Risiko dan Asuransi diangkat melalui surat
 keputusan komisaris No. 12/SK/WK/DK/2015
 tanggal 30 September 2015 mengenai penggantian
 anggota Komite Risiko dan Asuransi.

*Risk and Insurance Committee was appointed
 by the decision letter of commissioner
 No. 12/SK/WK/DK/2015 of September 30, 2015
 regarding the replacement of Risk and
 Insurance's Committee members.*

Susunan Komite Risiko dan Asuransi Perusahaan
 pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016,
 dan 2015 adalah sebagai berikut:

*The composition of the Company's Risk and
 Insurance Committee as of March 31, 2017,
 December 31, 2016 and 2015 are as follows:*

	31 Maret/ March 31, 2017 dan/ and 31 Desember/ December 31, 2016 31 Desember/ December 31, 2015	
Ketua	M. Aqil Irham	<i>Head</i>
Anggota	Danis H. Sumadilaga Ahmad Syarif Munawi Zulfan Zahar	<i>Members</i>

Kepala Satuan Pengendalian Internal dan
 Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2017,
 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai
 berikut:

*The Company's Head of Internal Control and
 Corporate Secretary as of March 31, 2017,
 December 31, 2016 and 2015
 are as follows:*

	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016 dan/and 2015	
Satuan Pengendalian Internal	Jonni Hutahaen	Jonni Hutahaen	<i>Internal Control Section</i>
Sekretaris Perusahaan	Y. Ariandi Siregar *)	Hadi Susilo	<i>Corporate Secretary</i>

*) Terhitung sejak 1 Maret 2017, Y. Ariandi Siregar diangkat
 sebagai sekretaris Perusahaan.

**) On March 1, 2017, Y. Ariandi Siregar appointed as
 a corporate secretary.*

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan
 Komisaris pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016,
 31 Maret 2016, dan 31 Desember 2015 masing-
 masing sebesar Rp 1.313.550.000, Rp
 16.397.824.141, Rp 1.067.850.000 dan Rp
 9.983.000.000.

*The total remuneration have been received by
 Board of Commissioners for March 31, 2017,
 December 31, 2016, March 31, 2016, and
 December 31, 2015 were amounted to Rp
 1,313,550,000, Rp 16,397,824,141, Rp
 1,067,850,000 and Rp 9,983,000,000
 respectively.*

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada
 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 31 Maret 2016,
 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar
 Rp 2.483.300.000, Rp 39.863.300.859,
 Rp 2.359.500.000 dan Rp 24.264.500.000

*The total remuneration have been received by
 Directors for March 31, 2017, December 31,
 2016, March 31, 2016, and December 31, 2015
 amounted to Rp 2,483,300,000,
 Rp 39,863,300,859, Rp 2,359,500,000 and
 Rp 24,264,500,000 respectively.*

Perusahaan memiliki karyawan tetap (tidak diaudit)
 masing-masing sebesar 1.641, 1.426, 1.330, dan
 323

*The Company has average number (unaudited)
 of 1,641, 1,426, 1,330, and 1,148 employees as*

1.148 orang per 31 Maret 2017, 31 Desember 2016,
31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015.

of March 31, 2017, December 31, 2016,
March 31, 2016 and December 31, 2015,
respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun aset tetap yang telah dinilai kembali (revaluasi) di tahun 2000, investasi dalam efek tertentu yang dicatat sebesar nilai wajarnya atau dicatat menggunakan metode ekuitas, persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/ Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The basis of measurement in the preparation of these consolidated financial statements is historical cost method, except for the revaluation of fixed assets in year 2000, investments in shares of stock which are carried at its fair value or accounted for under the equity method, and inventories which are carried at the lower of cost and net realizable value. The consolidated financial statements are prepared using the accrual method, except for the consolidated statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.b.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e. the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

<p>Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:</p> <p>(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;</p> <p>(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);</p> <p>(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;</p> <p>(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;</p> <p>(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan</p> <p>(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.</p> <p>d. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Intrepretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)</p> <p>i. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan</p> <p>Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar baru, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2017.</p> <p>Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut yang efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan; dan • ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi. 	<p><i>If the Group loses control, the Group:</i></p> <p><i>(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;</i></p> <p><i>(b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);</i></p> <p><i>(c) Recognizes the fair value of the consideration received, (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;</i></p> <p><i>(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;</i></p> <p><i>(e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and</i></p> <p><i>(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.</i></p> <p><i>d. Adoption of New and Revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of PSAK (ISAK)</i></p> <p><i>i. Standards and amendments effective in the current year</i></p> <p><i>In the current year, the Group has applied a new standard, a number of amendments, and an interpretation to PSAK issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on January 1, 2017.</i></p> <p><i>The application of the following amendments, and intepretation to standards amendments and interpretation effective for periods beginning on or after January 1, 2017, with early application is permitted have not resulted to material impact to disclosures or on the amounts recognized in the current and prior year consolidated financial statements:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PSAK 1: Presentation of Financial Statements about Disclosure Initiative; and</i> • <i>ISAK 31: Scope Interpretation of PSAK 13: Investment Property.</i>
--	--

ii. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap; dan
- PSAK 69: Agrikultur.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan interim konsolidasian, dampak dari standar amandemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan interim konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah (Rp).

Mata uang fungsional Kantor cabang di Dubai, Malaysia dan Timor Leste, adalah Arab Emirat Dirham (AED), Saudi Arab Real (SAR), Ringgit (MYR) dan Dolar Amerika Serikat (USD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas Kantor cabang di Dubai dan Timor Leste, pada tanggal laporan dijabarkan ke Rupiah (Rp) menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata. Untuk tujuan penggabungan, laporan keuangan kantor cabang luar negeri dijabarkan dalam Rp dengan kurs *Reuters*, sedangkan kantor cabang Malaysia dan Timor Leste menggunakan mata uang Ringgit dan Amerika Dolar (USD) dengan kurs Bank Indonesia (BI). Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

ii. Standards and interpretations issued not yet adopted

Standard and amendment to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with early application permitted are:

- *Amendments to PSAK 16: Property, Plant and Equipment; and*
- *PSAK 69: Agriculture.*

As of the issuance date of the consolidated interim financial statements, the effect of adoption of these standards, amendments and interpretations on the consolidated interim financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

e. Foreign Currency Transactions and Translation of Financial Statements

In preparing financial statements, the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Group is Rupiah (Rp).

*The functional currency of branch office in Dubai, Malaysia and Timor Leste are Arab Emirat Dirham (AED), Saudi Arab Real (SAR), Ringgit (MYR) and United States Dollar (USD). For presentation purposes of consolidated financial statements, assets and liabilities of branches in Dubai and Timor Leste at reporting date are translated to Rupiah (Rp) at the closing rate at statement of financial position date, while revenues and expenses are translated using average rate for the period. For combining purpose, the financial statements of the branch office are translated into Rp based on *Reuters* Rate, while Malaysia and Timor Leste Branch maintained in Ringgit and United Stated Dollar (USD) using Bank Indonesia (BI) rate. All resulting exchange differences shall be recognized in other comprehensive income.*

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rp dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rp menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah BI pada 22 Juni 2017, 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Transactions during the current year in foreign currencies are recorded in Rp by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rp and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e middle rate of BI at June 22, 2017, March 31, 2017, December 31, 2016 and 2015 as follows:

	22 Juni/ June 22, 2017	31 Maret/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Dolar Amerika Serikat	13.319	13.321	13.436	13.795	U.S. Dollar
Dolar Singapura	9.591	9.532	9.299	9.751	Singapore Dollar
Euro Eropa	14.875	14.228	14.162	15.070	European Euro
Ringgit Malaysia	3.110	3.009	2.996	3.210	Malaysian Ringgit
Riyal Arab Saudi	3.552	3.552	3.582	3.676	Saudi Arabian Riyal
Yen Jepang	120	119	115	115	Japanese Yen

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

f. Related Party Transactions and Balances

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others;*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Grup telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Catatan 53).

g. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or

viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

The Group has disclosed all the nature and transactions unit related parties (Note 53).

g. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognize a financial assets or a financial liabilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measure all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman; atau
- (c) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015. Grup mempunyai piutang usaha, piutang

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss.

Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- (ii) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) Those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
- (b) Those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration; or
- (c) Those that upon initial recognition designated as available for sale.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the Group has accounts

retensi, piutang lain-lain, dan tagihan bruto kepada pengguna jasa yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

receivable, retention receivables, other receivables, and gross amount due from customers which were classified as loans and receivables.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

(iii) *Held-to-Maturity (HTM) Investments*

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity.

Setelah pengakuan awal, HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

(iv) *Available-for-Sale (AFS) Financial Assets*

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 Grup tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai investasi saham diukur dengan metode biaya.

On March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the Group has no financial assets classified as stock investments are measured using the cost method.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, obligasi, bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

- (ii) Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities, which include trade and other payables, bonds, bank and other borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognize a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continue to recognize the financial asset.

The Group remove a financial liability from its statement of financial position when, and only

berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka

when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) *Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) *A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) *It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- (d) *Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired,

kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Netting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to net off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1).
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2).
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

h. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

i. Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijaminan, atau telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan setelah tanggal penempatan disajikan sebagai investasi jangka pendek. Deposito berjangka disajikan berdasarkan nilai nominal.

i. Short-Term Investment

Time deposits with maturity less than three months on the date of placement and pledged as collateral, or restricted and time deposits with maturity of more than three months on the date of placement are presented as short-term investment. The time deposits are presented using par value.

j. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

j. Retention Receivables

Retention receivable represents the Group's receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

k. Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

k. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statement of financial position date.

I. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

I. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are costs that have been paid but will be incurred future periods, such as prepaid insurance premiums, prepaid interest and rent paid in advance. Prepaid expenses are amortized over the periods benefit using the straight-line method.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan terdiri dari seluruh biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

m. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using first-in first-out method (FIFO). Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Persediaan tanah kavling untuk usaha sarana perumahan dinilai dengan menggunakan harga beli ditambah dengan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai dengan tanah tersebut siap dijual (bersertifikat).

Inventory of lots of land for housing are recorded at costs using the acquisition cost plus other expenditures incurred to make the land are ready for sale (with certificate).

Persediaan material dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih dan persediaan *precast* pun menggunakan metode yang sama.

Material inventories are stated at the lower of the cost or net realizable value and precast inventories using the same method.

Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan penelaahan fisik persediaan pada akhir periode.

Allowance for decrease in value of inventory is provided based on the physical check of inventory at the end of the period.

n. Aset Tetap

Aset tetap tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan.

n. Fixed Assets

Land and buildings are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the amount determined using fair value at the reporting date.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such land and buildings is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and buildings is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any.

Surplus revaluasi tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus in respect of land and buildings is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

Jika aset revaluasi tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan, aset tersebut direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

If there is no significant changes in fair value of assets revaluation, those assets will be revaluated every 3 years.

Aset tetap tanah tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap gedung disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut, sebagai berikut:

Land are not depreciated. While building assets are depreciated using the straight-line method based on their estimated useful lives, as follows:

	<u>Masa Manfaat/ Useful Lives</u>	
Gedung dan Pabrik	20 Tahun/ Year	<i>Buildings and Plants</i>

Aset tetap kecuali tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dan akumulasi penurunan nilai jika ada, dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Fixed assets except for land and buildings are accounted for using cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any, and depreciated using the double - declining method based on the estimated useful life of the fixed assets as follows:

	<u>Masa Manfaat/ Useful Lives</u>	
Kendaraan	8 Tahun/ Year	<i>Vehicles</i>
Perlengkapan Kantor	2 - 8 Tahun/ Year	<i>Office Supplies</i>
Peralatan Proyek	4 - 16 Tahun/ Year	<i>Project Equipment</i>

Grup melakukan perubahan kebijakan akuntansi aset tetap untuk kelompok tanah dan bangunan pada tahun 2015, semula dicatat berdasarkan metode harga perolehan, menjadi metode revaluasi, yang dihitung oleh penilai independen (KJPP). Perubahan kebijakan akuntansi ini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan dapat menggambarkan investasi Grup dalam aset tetap kelompok tanah dan bangunan dan perubahan dalam investasi tersebut sesuai dengan nilai pasar pada periode laporan keuangan (Catatan 16).

The Group changed its accounting policy on fixed assets classified as land and buildings in 2015, which previously accounted for using the cost method, to revaluation model, which appraised by an independent appraiser (KJPP). The changes in the accounting policies was made for the purpose to represent Group's investment on land and buildings in the financial statements in accordance with their market value at the financial reporting date (Note 16).

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya biaya - biaya tersebut, sedangkan pengeluaran dalam jumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Semua pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap akan ditambah (kapitalisasi) pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.

Cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred, while the significant expenditures for renewals and improvements are capitalized. All expenditures subsequent to the purchasing of fixed assets would be added (capitalized) on the carrying amount of the assets.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode/ tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any profit or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss for the period/ year when the assets are derecognized.

Apabila suatu aset tetap tidak dipergunakan lagi atau dilepas, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan dalam laba rugi tahun berjalan.

When assets are not used or otherwise disposed of, the carrying costs and its' related accumulated depreciation are removed from the fixed assets account and any resulting gain or loss is recorded or charged to profit or loss for the year.

Pada akhir periode/ tahun buku pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan spesifikasi teknis.

At the end of reporting period/ year end, the Group periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan, dan akan dipindahkan ke aset tetap pada saat sudah selesai pembangunannya dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost, and will be reclassified to the respective fixed assets when completed and ready to use.

o. Properti Investasi

o. Investment Properties

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

After initial recognition, the Group choose to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

p. Aset Lain-lain

p. Other Assets

Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi, maupun aset tidak berwujud disajikan dalam aset lain-lain.

Accounts that cannot be classified into current assets, investment, or intangible assets are presented as other assets.

Beban tanggungan berupa hak atas tanah dicatat sebesar biaya perolehan hak atau biaya pembaharuan hak. Semua beban tanggungan terkait hak diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis aset tanah, yang mana yang lebih pendek.

Deferred expense such as land right is recorded at cost of acquisition or cost of renewal right. Deferred expense of right is amortized over useful life or economic life of land, whichever is shorter.

q. Perjanjian Konsesi Jasa

q. Service Concession Arrangement

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa Pengungkapan" (ISAK 22).

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of rights and liabilities related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are toll road concession rights which will be amortized over the remaining concession period from the date of operation of the toll road. During the construction period, the accumulated toll road construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tanpa syarat.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) for no consideration.

Aset konsesi yang diberikan kepada Grup dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/ BPJT. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/ BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Concession asset granted to the Group are transferrable with approval from the Government/ BPJT. These concession right assets will be transferred to the Government/ BPJT at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

Selama periode hak perusahaan jalan tol, aset hak perusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah/ BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non-tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

During the toll road concession rights period, the concession rights assets may be derecognized from the consolidated statement of financial position of the Group if the toll road is transferred to another party or the Government/BPJT has changed the status of the toll road to non-toll road or if there is no economic benefit expected from usage of the toll road. Gain or loss from discontinuance or disposal of concession assets is recognized in the statement of profit or loss and other consolidated comprehensive income.

Selain itu, Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance

(Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan asset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan asset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset tak berwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya. Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan asset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Construction contract comprises all the amounts of toll road construction costs or toll road capacity improvement consisting of land acquisition cost, feasibility study cost and other costs that are directly attributable to the toll road construction, including construction costs for access roads, alternative roads and required public road facilities, interest and other borrowing costs, either directly or indirectly used for financing the development of assets. These costs are capitalized until the construction is completed and the concession assets are ready to be operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract. Construction cost is the value of acquisition the construction contract.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Provision for Toll Road Overlay

In operating toll roads, the Group is obliged to maintain quality in accordance with the SPM (Minimum Service Standards) established by the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, i.e., by performing toll road overlay regularly. The cost of this overlay is periodically provided based on estimated utilization of toll road by customers. The estimated net provision for toll road overlay is discounted to its present value that reflects management estimates against cost incurred to settle current provision.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset. Semua biasa pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.

Aset jalan tol terdiri dari jalan dan jembatan, gerbang dan bangunan pelengkap jalan tol dan sarana pelengkap jalan tol dicatat sebagai aset hak perusahaan jalan tol yang dinyatakan sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Amortisasi aset jalan dan jembatan dilakukan dengan menggunakan metode unit produksi (jumlah lalu lintas kendaraan kendaraan) selama masa hak perusahaan jalan tol (masa konsesi). Sedangkan aset hak perusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan diamortisasi selama periode yang lebih pendek antara masa hak perusahaan jalan tol (masa konsesi) dan umur manfaat aset.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaannya atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Pada tanggal 25 Januari 2010 dan tanggal 20 Juni 2016, Ruas Kanci –Pejagan, Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Ruas Pejagan-Pemalang, telah beroperasi secara komersial. Amortisasi Hak Perusahaan Jalan Tol dihitung sampai berakhirnya hak konsesi jalan tol hingga 28 Mei 2041.

r. Penurunan Aset Non-Keuangan

Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are substantially completed.

Toll road assets consisting of roads and bridges, gates and complementary building toll roads and toll supplementary facilities are recorded as toll road concession rights which are stated at Fair Value at the date assets or revaluation less accumulated depreciation and accumulated impairment losses that occur after the date of revaluation.

Amortization of assets roads and bridges were calculated using the unit of production (the amount of vehicle traffic vehicles) during the period of the concession (concession period). While the toll road concession rights assets other than roads and bridges are amortized over the shorter period between the period of concession (concession period) and the useful life of the asset.

Intangible assets are derecognized when removed or when there are no further future economic benefits are expected from its use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset is determined as the difference between the net disposal proceeds (if any) and the carrying amount of assets. Gains or losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized. Gains are recognized as other income.

On January 25, 2010 and June 20, 2016, segment Kanci - Pejagan, West Java and Central Java Segment Pejagan-Pemalang, has been in commercial operation. Amortization of Toll Road Concession Rights are calculated until the end of the toll road concession rights up to May 28, 2041.

r. Impairment of Non-Financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup akan melakukan penilaian apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus ditentukan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba atau rugi.

Pemulihan rugi penurunan nilai aset yang telah diakui periode sebelumnya dicatat jika terdapat indikasi penurunan nilai aset tersebut sudah tidak ada lagi atau menurun. Pemulihan rugi penurunan nilai aset diakui dalam laba atau rugi. Namun demikian, kenaikan nilai tercatat aset karena pemulihan rugi penurunan nilai hanya diakui sepanjang tidak melebihi nilai tercatat yang ditentukan (setelah dikurangi penyusutan dan amortisasi) jika rugi penurunan nilai aset tidak diakui pada tahun sebelumnya.

s. Utang Bruto kepada Subkontraktor

Utang bruto kepada subkontraktor diakui atas dasar akrual yang merupakan utang prestasi kerja subkontraktor yang belum diberitaacitakan, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Utang bruto kepada subkontraktor disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi kerugian yang diakui.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian), yang diukur berdasarkan kemajuan fisik pada tanggal akhir periode pelaporan yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan eksternal.

Jika kemungkinan besar terjadi total beban kontrak akan melebihi pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

At the end of the reporting period, the Group will assess whether there is an indication of assets impairment. If such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the higher amount between the fair value less costs to sell and value in use. If the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of an asset should be determined by the recoverable amount. Impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Recovery of impairment losses of assets which has been recognized in prior periods are recorded when there is indication of impairment of the asset no longer exists or decreases. Recovery of impairment losses of assets recognized in the profit or loss. However, the increase in the carrying value of assets due to the recovery of an impairment loss is recognized only if it is not exceed the carrying amount that would have been determined (after deducting depreciation and amortization) if no impairment losses of assets recognized in prior years.

s. Gross Amount Due to Subcontractors

Gross amount due to subcontractors is recognised on accrual basis which represents uncertified subcontractor's working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress as it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract. Gross amount due to subcontractor is presented as the differences between costs occurred added by income or deducted by realized loss.

t. Revenue and Expense Recognition

Contract revenue and contract cost associated with the construction contract are recognized as revenue and expense respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method), which is measured based on the physical progress at the end of reporting period, which is stated on the minutes of external progress of completion works.

If it is most likely to occur the total contract expenses will exceed contract revenue, the estimated loss is recognized immediately as an expense.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Contract cost comprises costs that related directly to the specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract and such other costs specifically can be billed to the customer under the terms of the contract.

Pendapatan dari usaha sarana papan (properti) diakui dengan metode *full accrual*, yang dinyatakan dalam PSAK 44 (Revisi 2010) "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat", jika seluruh syarat dipenuhi:

Revenue from sales of housing is recognized by the full accrual method, as stated in PSAK 44 (Revised 2010) "Accounting for Real Estate Development Activities", if all the following criterias are met:

- (i) Pengikatan jual beli telah berlaku;
- (ii) Harga jual akan tertagih, dimana jumlah pembayaran yang diterima sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati;
- (iii) Tagihan penjual terhadap pembeli pada masa yang akan datang bebas dari subordinasi terhadap utang lain dari pembeli; dan
- (iv) Penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli sebagai berikut:
 - Untuk penjualan bangunan rumah beserta tanah jika telah terjadi pengalihan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan yang umum terdapat pada suatu transaksi penjualan, dan penjual selanjutnya tidak mempunyai liabilitas atau terlibat lagi secara signifikan dengan aset (properti) tersebut. Dalam hal ini bangunan tersebut telah siap ditempati/digunakan.
 - Untuk penjualan tanah yang pendirian bangunannya akan dilaksanakan oleh pembeli jika selesainya pengembangan lingkungan dimana tanah tersebut berada, yaitu penjual tidak mempunyai liabilitas yang signifikan lagi untuk menyelesaikan lingkungan seperti pematangan tanah yang dijual, pembangunan fasilitas yang dijanjikan ataupun yang menjadi liabilitas dan beban penjual, sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli yang bersangkutan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Apabila semua persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan dipenuhi. Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

- (i) *Binding sale and purchase has been accepted;*
- (ii) *The sales price will be collectible, where in the amount of payments already collected at least 20% of the agreed sale price;*
- (iii) *The seller's receivable from buyers will not be subordinated in the future against another loan of the buyer; and*
- (iv) *The seller has transferred the risks and of ownership benefits to the buyer as follow:*
 - *For the sale of houses with land, if the seller has transferred to the buyer the risks and rewards of ownership in a transaction that is in substance a sale and seller does not have a substantial continuing involvement with the property. In this case the building is ready for use at least.*
 - *For sale of land where the building will be developed by the buyer when the development of the land is completed whereas the seller is not obligated to complete improvements of land sold or to construct other facilities applicable to the land sold, development agreed facilities or liability and expenses of the seller in accordance with the agreement between seller and buyer or related regulation.*
 - *If all the above conditions are not met, all payment received from buyers are recognized as unearned revenue using the deposit method, until all conditions are met. Expenses are recognized when incurred, with accrual method basis.*

Pendapatan Tol

Pendapatan Grup dari hasil pengoperasian jalan tol diakui pada saat penjualan karcis tol. Pendapatan tol dari hasil kerjasama pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut. Pembayaran kepada investor tanpa kuasa penyelenggaraan dicatat sebagai angsuran liabilitas kerjasama operasi. Selisih antara jumlah pembayaran ini dengan angsuran liabilitas kerjasama operasi dicatat sebagai beban atau penghasilan kerjasama operasi.

u. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Konstruksi yang termasuk dalam perolehan aset tertentu adalah proyek-proyek *pre-financing* yang pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

v. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar seluruh aset yang dialihkan oleh Grup pada tanggal akuisisi, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada

Toll Revenues

The Group's revenues from toll road operations are recognized upon the sale of toll tickets. Revenue from profit sharing arrangement between the Group and investor with operating rights are recognized when toll tickets are sold, net of investor's share. Payments to investors without operating rights are recorded as a mandatory installment under joint operation. The differences of total payments over mandatory installment under joint operation is recorded as joint operation expense or revenue.

u. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

Construction included in acquisition of certain assets is the pre-financing projects whose constructions time is required more than one year.

v. Business Combinations

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is computed as the sum of the fair value of the assets transferred by the Group at acquisition date, liabilities recognized by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the period in which the costs are incurred and the services are rendered. At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are

nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan SAK yang relevan.

recognized at the fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant FASs.

Komponen kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Components of non-controlling interests of the acquiree are measured either at fair value or according to proportional share of the equity instruments in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured at its fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. If in prior periods, changes in fair value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized with the same basis as would be required had the Group disposed of the previously held equity interest directly.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara tersebut, dan mengakui tambahan aset atau liabilitas, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi, yang jika diketahui, akan menyebabkan pengakuan aset dan liabilitas yang dimaksud pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. During the measurement period, the Group shall retrospectively adjust those provisional amounts and recognize additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

Pada tanggal akuisisi, Grup mengakui goodwill yang diukur sebagai selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali, dan, jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki Grup atas pihak yang diakuisisi; dan (b) selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto pihak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

At acquisition date, the Group recognizes goodwill which is measured as the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest, and, in a business combination achieved in stages, the acquisition-date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree; and (b) the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the acquiree, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan non-pengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Subsequent to initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, is allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the business combination, regardless of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill was allocated to a Cash Generating Unit and certain operations on the Cash Generating Unit is disposed, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the disposed operation and the portion of the Cash Generating Units retained.

Goodwill is initially measured at historical cost, the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interests, and any previous interest held, over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If the fair value of net assets acquired is in excess of the aggregate consideration transferred, the Group reassess whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed, and reviews the procedures used to measure the amounts to be recognized at the acquisition date. If the reassessment still results in an excess of the fair value of net assets acquired over the aggregate consideration transferred, then the gain is recognized in profit or loss.

When the determination of consideration from a business combination includes contingent consideration, it is measured at its fair value on acquisition date. Contingent consideration is classified either as equity or a financial liability. Amounts classified as a financial liability are subsequently remeasured to fair value with changes in fair value recognized in profit or loss when adjustments are recorded outside the measurement period. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement-period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments made against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period, which cannot exceed one year from the acquisition date, about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of-interest*). Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK No. 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

w. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak

In a business combination achieved in stages, the acquirer remeasures its previously held equity interest in the acquiree at its acquisition-date fair value and recognizes gain or loss resulted, if any, in profit or loss.

Based on PSAK No. 38 (Revised 2012), "Common Control Business Combination", the transfer of assets, liabilities, shares and other ownership instruments among the companies under common control would not result in any gain or loss for the Company or individual entity under same group. Since the restructuring transaction between entities under common control does not result in any changes of the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other instruments of ownership, which are exchanged, assets or liabilities transferred are recorded at book value using the pooling-of-interest method. In applying the pooling-of-interest method, the components of the financial statements for the period during which the restructuring occurred must be presented in such a manner as if the restructuring has occurred since the beginning of the earliest period presented. The differences of consideration paid or received over the carrying value of interest acquired, net of income tax effect, is directly recognized to equity and presented as "Additional Paid-in Capital" under the equity section of the consolidated statement of financial position.

At the initial application of PSAK No. 38 (Revised 2012), all balances of the Difference In Value of Restructuring Transactions of Entities under Common Control was reclassified to "Additional Paid in Capital" in the consolidated statement of financial position.

w. Income Taxes

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

The amount of unpaid current tax for current and prior periods to be recognised as a liabilities. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax

tanggungan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to all taxable temporary differences arises from:

- a) The initial recognition of goodwill; or*
- b) The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, does not affect neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction does not affect neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax assets and liabilities shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) The Group has a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities; and*

b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:

- i. entitas kena pajak yang sama; atau
- ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika:

- a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

x. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU No. 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

b) *The deferred tax assets and liabilities related to income taxes levied by the same taxation authority on either:*

- i. the same taxable entity; or*
- ii. different taxable entities which intend to recover current tax assets and liabilities with a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.*

The Group offset the current tax assets and current tax liabilities if, and only if:

- a) Has legally enforceable right to offset the recognized amounts; and*
- b) Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

x. Employee Benefits Liabilities

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-Employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law No. 13/2003").

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group not only record for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbalan hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liabilities (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets and any change in effect of the asset are recognized in other comprehensive income.

Pesangon

Termination Benefits

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

The Group recognizes liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

(a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan

(a) When the Group no longer can withdraw the offer of those benefits; and

(b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

(b) When the Group recognizes costs for a restructuring within the scope of SFAS No. 57 and involves payment of termination benefits.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Grup mengikuti program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sesuai dengan UU No. 13/2003, Grup berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup menutupi kewajiban.

The Group has pension insurance program which organized by PT Asuransi Jiwasraya (Persero). In accordance with the Law No. 13/2003, the Group is obliged to cover the shortage of pension payments when the pension plans is currently not sufficient to cover liabilities.

Pada tanggal 31 Maret 2016, Grup memilih mempertahankan kebijakan yang ada untuk mengakui keuntungan atau aktuarial, yang mana menggunakan pendekatan koridor.

As of March 31, 2016, the Group choose to maintain the existing policy to recognize actuarial gains or, which uses the corridor approach.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Other Long-Term Employee Benefits

Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang dan dihitung dengan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Other long-term benefits such as long service leave and calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

y. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama

y. Investments in Associates and Joint Arrangement

Entitas Asosiasi

Associates

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Associates are entities in which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or jointly control over those policies (significant influence).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* akan mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Investment in associates is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted by the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee will reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) Jika investasi menjadi entitas anak, dan
- (b) Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

- (a) *If the investment becomes a subsidiary, and*
- (b) *If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value.*

Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

When the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

Pengaturan Bersama

Joint Arrangement

Pengaturan bersama adalah pengaturan atas dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

The Group classifies joint arrangement as:

1) Operasi Bersama

1) Joint Operation

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

<p>Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:</p> <p>(a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;</p> <p>(b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;</p> <p>(c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;</p> <p>(d) Bagian atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan</p> <p>(e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.</p> <p>2) Ventura Bersama</p> <p>Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.</p> <p>Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas. Konsolidasi proporsional tidak diizinkan.</p> <p>Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain-lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.</p> <p>Kerugian yang melebihi nilai tercatat investasi tidak diakui, kecuali bila Grup mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan atau menjamin kewajiban entitas asosiasi.</p>	<p><i>A joint operator recognize in relation to its interest in a joint operation:</i></p> <p><i>(a) Its assets, including its share of any assets held jointly;</i></p> <p><i>(b) Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;</i></p> <p><i>(c) Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;</i></p> <p><i>(d) Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and</i></p> <p><i>(e) Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.</i></p> <p>2) <i>Joint Venture</i></p> <p><i>The Group classifies joint arrangement as a joint venture whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.</i></p> <p><i>A joint venturer recognize its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method. Proportional consolidation of joint arrangements is no longer permitted.</i></p> <p><i>The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognized in the profit or loss and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognized as a reduction in the carrying amount of the investment. When the Group's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associates.</i></p> <p><i>Loss exceeding the carrying value of the investment is not recognized, unless the Group has committed to provide financial support or guarantee the associates' obligation.</i></p>
---	--

Laba dan rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of the unrelated investor's interests in the associates.

Dalam akuntansi metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komperhensif lain pasca perolehan. Ketika bagian grup atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam ventura bersama), Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Under the equity method of accounting, interests in joint ventures are initially recognized at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of profits or losses and other comprehensive income post acquisition. When the group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint ventures (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the joint ventures), the Group does not recognize further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the joint ventures.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Unrealized gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated to the extent of the group's interest in the joint ventures. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

z. Investasi Jangka Panjang Lainnya

Merupakan investasi saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi dipasar aktif.

Selanjutnya investasi saham yang tidak memiliki kuotasi harga dipasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, diukur dengan biaya perolehan.

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai, penurunan tersebut dibebankan dalam laporan laba rugi komperhensif di tahun berjalan.

aa. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam satu periode.

z. Other Long-Term Investment

Represent a shares investment with an ownership less than 20% are recognized initially at fair value plus transaction costs. The best evidence of fair value is the current market price quotations.

Furthermore, share investments that do not have an active market price quotations and their fair values can not be reliably measured, are measured at cost.

At each reporting date, the Company evaluates whether there is objective evidence that an investment is impaired.

If there is an objective evidence that an investment is impaired, the decline is charged to the statement of comprehensive income in the current year.

aa. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to owner of the common shareholders parent entity by weighted average number of shares outstanding during the period.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Jika jumlah saham biasa atau instrumen keuangan berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan harus disesuaikan secara retrospektif.

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk perhitungan laba per saham dasar adalah sebesar 13.573.709.450, 11.616.999.722, dan 11.616.466.357 lembar untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015.

bb. Biaya Emisi Obligasi dan Saham

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

Biaya emisi saham disajikan sebagai bagian tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

cc. Segmen Informasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmen didasarkan pada aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- yang informasi keuangan yang terpisah miliknya tersedia.

To compute diluted earnings per share, the Group adjusting the profit or loss attributable to common shareholders of parent entity and weighted average number of shares outstanding, as the effects of all dilutive potential ordinary shares.

If the number of ordinary shares or financial instruments potential to be ordinary shares outstanding increases as a result of a capitalisation, bonus issue or share split, or decreases as a result of a reverse share split, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented shall be adjusted retrospectively.

The number of weighted average shares outstanding for the calculation of basic earnings per share amounted to 13,573,709,450, 11,616,999,722, and 11,616,466,357 shares for the years ended March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 respectively.

bb. Bond and Shares Issuance Costs

Bond issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds in order to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

Share issuance costs are deducted from additional paid in capital and not amortized. Share issuance costs are presented as a deduction of additional paid-in capital and not amortized.

cc. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each the operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and
- for which separate financial information is available.

dd. Program Opsi Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (MESOP)

Perusahaan menyediakan program opsi saham untuk karyawan yang berhak dan anggota manajemen (MESOP). Program ini terdiri dari program opsi saham bahwa setelah diselesaikan melalui penerbitan saham (pengaturan pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas) dicatat sebagai transaksi ekuitas. Pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas kepada anggota manajemen dan layanan sejenis lainnya diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian opsi.

Nilai wajar yang ditentukan pada tanggal pemberian opsi pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas dicatat sebagai beban dengan metode garis lurus sepanjang periode *vesting*, berdasarkan estimasi instrumen ekuitas Perusahaan yang akhirnya akan diberikan, dengan peningkatan yang sesuai pada ekuitas.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengubah estimasi dari jumlah instrumen ekuitas yang diharapkan akan diberikan. Dampak dari perubahan atas estimasi awal, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai biaya kumulatif yang mencerminkan perubahan estimasi, dengan penyesuaian berdasarkan cadangan imbalan kerja yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.

ee. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Penting

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan interim terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Estimasi Umur Manfaat

Grup melakukan penelaahan atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi atas perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor tersebut (Catatan 14 dan 16).

Estimasi Volume Lalu Lintas

Dalam menentukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual.

dd. Management and Employee Stock Option Program (MESOP)

The Company provides stock option program to their eligible employees and members of management (MESOP). This program consists of stock option plan that upon exercise is settled through issuance of shares (equity – settled share based payment arrangement) which is accounted as equity transaction. Equity-settled share-based payments to member of management and others providing similar services are measured at the fair value of the equity instruments at the grant date.

The fair value determined at the grant date of the equity-settled share-based payments is expensed on a straight-line basis over the vesting period, based on the Company's estimate of equity instruments that will eventually vest, with a corresponding increase in equity.

At the end of each reporting period, the Company revises its estimate of the number of equity instruments expected to vest. The impact of the revision of the original estimates, if any, is recognised in statements of comprehensive income such that the cumulative expense reflects the revised estimate, with a corresponding adjustment to the equity-settled employee benefits reserve.

ee. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. Estimations and considerations used in the preparation of interim financial statements continue to be evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of reasonable future events. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Assumptions and considerations have a significant effect on the carrying amount of assets and liabilities disclosed in below.

Estimated of Useful Lives

The Group reviews on useful lives of fixed assets and investment property based on several factors i.e. technical conditions and technology development in the future. Operating results in the future will be affected by the estimated changes of those factors (Notes 14 and 16).

Estimated of Traffic Volume

In determining amortization of toll road concession rights, the management has to project traffic volume after current year for the remaining years of the concession agreement. Traffic volume is projected based on the number of vehicles and adjusted by comparison to actual vehicle volume.

Namun volume lalu lintas aktual dimasa mendatang dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

However, the actual vehicle volume in the future could differ from the estimate, depending upon changes in external factors that may affect toll rates and vehicle volume.

Manajemen melakukan penilaian secara periodik terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Grup akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

The Management performed periodic assessment on the total projected traffic volume. The Group will appoint an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies and make an appropriate adjustment if there is a material difference between projected and actual traffic volume.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Allowance for Impairment of Receivables

Nilai wajar piutang ditentukan dengan memperhitungkan penurunan nilai yang bersifat permanen dan nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penyisihan penurunan nilai piutang didasarkan penilaian secara individual atas piutang masing-masing debitur (pemberi kerja).

The fair value of accounts receivable is determined by calculating permanent impairment and the carrying value is reduced to recognize the decline. The assumptions used to determine the allowance for impairment of receivables based on an individual assessment of each receivable debtor (employer).

Imbalan Pascakerja

Post Employment Benefits

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

The present value of post employment benefit liabilities depends on several factors which are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine pensions cost (benefits) covered discount rate. The changes of assumptions might affect carrying value of post-employment benefits.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir pelaporan, dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasi dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

The Group determines the appropriate discount rate at the final reporting, by considering the discount rate of government's bond which denominated in benefit's currency that will be paid and have a similar terms with the terms of the related liabilities.

Pajak Penghasilan Final

Final Income Tax

Pajak penghasilan dari aktivitas jasa konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 2009 mengenai perubahan atas PP No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2008, dimana perlakuan pengenaan pajak final dikenakan atas kontrak sebesar 3% yang diperoleh mulai tanggal 1 Agustus 2008.

Income tax from construction is computed based on the Government Regulation No. 40 year 2009 concerning amendments of Government Regulation No. 51 year 2008 concerning income tax from the construction business which effective starting 1 August 2008, where the final tax at 3% is applied for contract signed starting August 1, 2008.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Final income tax is presented outside income tax expenses in profit or loss.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

The difference between the final income tax carrying amounts of existing assets and liabilities, and their respective final tax bases are not recognised as deferred tax assets or liabilities.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

3. KAS DAN SETARA KAS

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Kas/ Cash on Hand	4.113.394.035	3.882.482.103	2.268.412.500
Bank/ Cash in Banks			
Pihak Berelasi/ Related Parties			
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.980.983.021.104	2.258.688.843.046	1.198.747.644.447
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.196.547.953.668	772.988.264.192	911.714.030.651
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	252.933.471.418	674.785.340.056	335.762.478.701
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	217.745.245.631	282.129.080.730	1.385.918.663
PT Bank BRI Syariah	17.742.574.485	--	--
PT Bank Syariah Mandiri	2.727.381.769	4.439.690.131	1.593.843.572
Indonesia Eximbank	1.874.468.964	2.277.000.586	57.116.799.279
PT Bank BNI Syariah	14.476.697	14.664.168	--
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	33.617.681.645	90.002.602.128	43.010.911.590
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.170.439.061	18.204.361.160	8.480.778.914
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	828.592.980	835.535.535	932.899.434
Yen Jepang/ Japanese Yen			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.414.131.620	1.373.081.942	1.362.611.299
Dolar Singapura/ Singapore Dollar			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	303.592.466	296.444.409	296.204.240
Euro			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.033.507	8.012.326	8.602.981
Sub Jumlah/ Sub Total	3.712.911.065.015	4.106.042.920.409	2.560.412.723.771
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah			
Industrial and Commercial Bank of China	300.113.189.061	11.432.728.883	--
PT Bank UOB Indonesia	59.044.287.459	285.897.862.160	54.221.460.205
PT Bank Central Asia Tbk	10.018.640.554	9.857.357.564	3.068.778
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	8.931.092.060	11.928.971.048	1.914.730.868
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	6.882.493.529	4.625.866.886	--
PT Bank Panin Tbk	3.116.073.744	42.205.766.369	2.582.701.696
PT Bank Bukopin Tbk	2.964.477.569	3.355.612.639	9.024.519.471
PT Bank Mega Tbk	2.101.751.058	1.609.125.176	883.607.524
PT Bank Maybank Indonesia	1.318.624.237	1.456.051.363	--
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	1.292.205.779	--	--
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	509.009.857	509.009.857	506.581.894
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	94.074.256	94.134.272	266.655.381
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	57.974.586	55.088.828	539.808.947
PT CIMB Niaga Tbk	49.920.018	--	10.061.843
PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim	7.887.987	53.646.907	6.970.780
PT Bank Danamon Tbk	1.054.643	1.177.424	1.735.263
PT Bank MNC Internasional Tbk	764.312	1.076.312	557.692.833
BPD Nusa Tenggara Timur	--	12.760.837	12.862.991
Riyal Arab Saudi/ Saudi Arabian Riyal			
The National Commercial Bank - Jeddah	865.712.939	810.503.705	6.148.224.624
Ringgit Malaysia/ Malaysian Ringgit			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	470.464.608	542.725.487	807.029.876
Sub Jumlah/ Sub Total	397.839.698.256	374.449.465.717	77.487.712.974
Deposito Berjangka/ Time Deposit			
Pihak Berelasi/ Related Parties			
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.306.478.602.841	2.335.923.142.395	1.678.666.896.094
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.076.050.000.000	1.649.050.000.000	729.949.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.000.000.000	1.096.648.491.307	337.000.000.000
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.041.500.000	--	--
Sub Jumlah/ Sub Total	4.417.570.102.841	5.081.621.633.702	2.745.615.896.094
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	431.000.000.000	500.000.000.000	--
PT Bank Bukopin Tbk	150.000.000.000	300.000.000.000	--
PT Bank Mega Tbk	40.000.000.000	65.000.000.000	20.000.000.000
PT Bank Panin Tbk	--	120.000.000.000	--
PT Bank UOB Indonesia	--	--	90.000.000.000
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	--	--	15.403.333.439
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	--	100.000.000.000	--
Koperasi Simpan Pinjam Syahadah	--	5.000.000.000	--
Sub Jumlah/ Sub Total	621.000.000.000	1.090.000.000.000	125.403.333.439
Jumlah/ Total	9.153.434.260.147	10.655.996.501.931	5.511.188.078.778

Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka per Tahun (%)
 Interest Rate of Time Deposits per Annum (%)
 Jangka Waktu/ Time Period

5,00% - 8,75%
 1 - 3 Bulan/ Months

2,00% - 10,50%
 1 - 3 Bulan/ Months

6,70% - 10,50%
 1 - 3 Bulan/ Months

4. INVESTASI JANGKA PENDEK

4. SHORT-TERM INVESTMENTS

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya				Restricted of Time Deposits
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.448.200.000	8.448.200.000	10.663.933.745	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Investasi Jangka Pendek SRIMP				Short-Term Investment of SRIMP
Entitas Anak WTR ke Koperasi Syahadah	5.000.000.000	--	--	a Subsidiary of WTR to Koperasi Syahadah
Jumlah	13.448.200.000	8.448.200.000	10.663.933.745	Total

Deposito berjangka yang jatuh tempo tiga bulan sampai dengan setahun dan sertifikat deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas pinjaman bank yaitu sebagai deposito yang dibatasi penggunaannya (Catatan 20).

Time deposits with maturity three months until one year and certificates of time deposits which pledged as collateral for bank loans as restricted of time deposits (Note 20).

5. PIUTANG USAHA – BERSIH

5. ACCOUNTS RECEIVABLE - NET

a. Lancar

a. Current

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Pihak Berelasi				Related Parties
Piutang Usaha Jasa Konstruksi	529.660.475.193	508.850.171.885	402.275.806.035	Construction Service Receivables
Piutang Dagang	3.359.967.594.161	3.031.027.122.411	91.672.309.578	Trade Receivables
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(104.665.166.530)	(104.665.166.530)	(55.748.255.674)	Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah	3.784.962.902.824	3.435.212.127.766	438.199.859.939	Sub Total
Pihak Ketiga				Third Parties
Piutang Usaha Jasa Konstruksi	817.234.677.795	772.353.305.740	985.724.002.777	Construction Service Receivables
Piutang Dagang	358.302.325.826	142.278.835.289	253.106.239.252	Trade Receivables
Piutang Sewa	551.280.058	264.196.029	78.240.606	Rent Receivables
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(25.930.195.678)	(32.648.111.548)	(28.988.278.078)	Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah	1.150.158.088.001	882.248.225.510	1.209.920.204.557	Sub Total
Jumlah	4.935.120.990.825	4.317.460.353.276	1.648.120.064.496	Total

Rincian saldo piutang usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

The details of construction service receivables are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Solo Ngawi Jaya	142.137.697.577	74.309.342.421	125.405.921.041
PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)	95.311.589.314	--	--
PT Kertas Lece (Persero)	86.707.725.121	86.707.725.121	86.707.725.121
PT Jasamarga Kualanamu Tol	53.642.447.727	92.801.439.040	28.001.412.484
PT PAL Indonesia (Persero)	41.093.376.666	70.322.041.339	--
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	26.260.305.600	26.260.305.600	26.260.305.600
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	--	25.622.710.368	--
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	--	47.142.783.410
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	84.507.333.188	132.826.607.996	88.757.658.379
Sub Jumlah/ Sub Total	529.660.475.193	508.850.171.885	402.275.806.035

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
(2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016
(2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Continued)

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Pemerintah Daerah/ District Governments	84.571.878.288	41.619.552.591	110.960.778.537
PT Trikarya Graha Utama	95.888.437.643	91.271.906.135	72.174.069.852
PT Bangun Investa Graha	84.918.388.643	84.918.388.643	29.512.501.484
PT Broadbiz Asia	62.684.091.475	62.684.091.475	62.684.091.475
PT Ade Pede Realty	59.168.110.597	57.474.583.737	84.053.162.358
Bin Ladin Contractor Group LLC	52.238.264.776	51.822.243.284	42.874.395.794
Kementerian Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratis Timor Leste/ <i>The Ministry of Transport and Communication of the Democratic Republic of Timor Leste</i>	48.842.137.531	--	--
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan/ <i>The Ministry of Public Works and Housing</i>	48.103.347.111	50.644.395.019	24.605.609.054
PT Toba Pengembang Sejahtera	30.804.060.102	--	--
PT Harmas Jalesveva	24.082.127.536	--	--
PT Tapin Coal Terminal	23.038.043.480	28.963.043.481	52.013.038.485
PT Daya Radar Utama	--	--	153.172.744.457
PT Pardika Wisthi Sarana	--	--	25.108.283.210
PT Sentul City Tbk	--	--	23.255.432.761
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	202.895.790.613	302.955.101.375	305.309.895.310
Sub Jumlah/ Sub Total	817.234.677.795	772.353.305.740	985.724.002.777
Jumlah/ Total	1.346.895.152.988	1.281.203.477.625	1.387.999.808.812

Rincian saldo piutang dagang sebagai berikut:

The details of trade receivables are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	2.856.199.739.514	2.824.934.206.247	--
KSO/JV Waskita - Adhi	133.276.114.800	25.131.557.400	--
KSO/JV Waskita - Gorip Nanda Guna	110.902.668.521	--	--
KSO/JV Waskita - Hutama Karya	63.369.039.527	11.321.021.605	11.094.777.409
KSO/JV Waskita - Wika	60.531.226.550	17.179.935.000	13.004.489.010
KSO/JV Waskita - PP - HK	45.788.164.300	48.518.259.600	35.834.212.250
KSO/JV PT WBP - Jaya Konstruksi	--	32.843.433.724	--
Perum Perumnas	--	17.580.076.348	--
KSO/JV Waskita - Basuki	--	10.970.657.248	18.005.983.392
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 10 Miliar/ Billion)	89.900.640.949	42.547.975.239	13.732.847.517
Sub Jumlah/ Sub Total	3.359.967.594.161	3.031.027.122.411	91.672.309.578
Pihak Ketiga/ Third Parties			
PT Takaneka Indonesia	79.495.544.727	--	--
PT Kreasi Bersama Maju	50.598.355.890	--	--
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	248.025.338.765	151.657.406.539	253.106.239.252
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(19.816.913.556)	(9.378.571.250)	--
Sub Jumlah/ Sub Total	358.302.325.826	142.278.835.289	253.106.239.252
Jumlah/ Total	3.718.269.919.987	3.173.305.957.700	344.778.548.830

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of receivable are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal	(137.313.278.078)	(84.736.533.752)	(28.466.422.700)	Beginning Balance
Penambahan	--	(52.576.744.326)	(56.470.111.052)	Addition
Pemulihan	6.717.915.870	--	200.000.000	Recovery
Saldo Akhir	(130.595.362.208)	(137.313.278.078)	(84.736.533.752)	Ending Balance

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Manajemen telah membentuk cadangan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individual atas masing-masing pelanggan.

The management provided allowance for impairment losses on receivable, based on individual assessment of each customers.

b. Tidak Lancar

Rincian saldo piutang usaha kepada pihak berelasi tidak lancar sebagai berikut:

b. Non-Current

The details of non-current accounts receivable to related parties are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Party			
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	--	--	2.269.226.842.631
PT Waskita Bumi Wira	--	180.002.340.000	--
Jumlah/ Total	--	180.002.340.000	2.269.226.842.631

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

Aging of accounts receivable are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Sampai dengan 12 Bulan				Up to 12 Months
Belum Jatuh Tempo	3.672.447.328.537	3.706.699.153.805	3.100.396.710.618	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo	495.368.369.727	254.189.826.049	514.618.206.095	Past Due
> 13 - 24 Bulan - Sudah Jatuh Tempo	512.224.823.149	224.551.467.902	98.604.489.344	>13 - 24 Months - Past Due
> 25 - 36 Bulan - Sudah Jatuh Tempo	68.457.001.206	140.159.416.060	44.101.746.674	>25 - 36 Months - Past Due
> 36 Bulan - Sudah Jatuh Tempo	186.623.468.206	171.862.829.460	159.625.754.396	>36 Months - Past Due
Jumlah	4.935.120.990.825	4.497.462.693.276	3.917.346.907.127	Total

Piutang usaha dijamin pada bank-bank pemberi pinjaman (Catatan 20), dengan rincian sebagai berikut:

Certain accounts receivable are used as collateral on bank lenders (Note 20), as follows:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, piutang usaha yang dijamin terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Pembangunan CIBIS Tower 9 Building Jakarta sebesar Rp 51.789.000.000, Proyek Pembangunan Apartemen Brooklyn Alam Sutera sebesar Rp 167.922.000.000, Proyek Universitas Negeri Sebelas Maret Solo sebesar Rp 1.433.000.000, Proyek Pembangunan Sopo Del Office Tower Lifestyle Package T-02 sebesar Rp 245.086.000.000, Proyek Indocement Citeureup sebesar Rp 17.607.000.000, Proyek Pembangunan PLTM Lebak Tundun sebesar Rp 42.204.000.000, Proyek Pembangunan Tanki Oli Sangatta EPC sebesar Rp 47.244.000.000, Proyek Pembangunan Waduk Gondang sebesar Rp 420.690.000.000, Proyek Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean – Blok M – Ciledug Paket Adam Malik sebesar Rp 89.090.000.000, Proyek Pembangunan Fly Over Pegangsaan sebesar Rp 23.668.000.000, Proyek Pembangunan Sabo Dam Merapi Kabupaten Sleman (8 unit) sebesar Rp 4.086.000.000, Proyek pengembangan bandara Suai sebesar Rp 433.632.000.000, Proyek Peningkatan Jalan Gunung Seriang – Long Beluah sebesar Rp 39.031.000.000, Proyek Pembangunan Jalan Tanjung Selor – Tanjung Palas – Sekatak (Seksi 1) sebesar Rp 78.543.000.000, Proyek Pekerjaan Arsitektur dan Mechanical Electrical Hotel Meritus Seminyak sebesar Rp 25.500.000.000, Proyek Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Kertosono Paket 1 sebesar Rp 1.348.260.000.000, Proyek Pelabuhan Belawan
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from CIBIS Tower 9 Building Jakarta Project amounted to Rp 51,789,000,000, Brooklyn Alam Sutera Apartment project amounted to Rp 167,922,000,000, Universitas Negeri Sebelas Maret Solo project amounted to Rp 1,433,000,000, Sopo Del Office Tower Lifestyle Package T-02 project amounted to Rp 245,086,000,000, Indocement Citeureup project amounted to Rp 17,607,000,000, PLTM Lebak Tundun project amounted to Rp 42,204,000,000, Sangatta Oil Tank EPC project amounted to Rp 47,244,000,000, Waduk Gondang project amounted to Rp 420,690,000,000, Fly Over Kapt. Tendean – Blok M – Ciledug Adam Malik Package project amounted to Rp 89,090,000,000, Fly Over Pegangsaan project amounted to Rp 23,668,000,000, Sabo Dam Merapi Sleman District (8 units) project amounted to Rp 4,086,000,000, Upgrading of Existing Suai Airport project amounted to Rp 433,632,000,000, Gunung Seriang – Long Beluah Road project (Section 1) amounted to Rp 39,031,000,000, Tanjung Selor – Tanjung Palas – Sekatak Road project amounted to Rp 78,543,000,000, Architecture and Mechanical Electrical Works of Meritus Hotel Seminyak project amounted to Rp 25,500,000,000, Ngawi – Kertosono Toll Road Package 1 project amounted to Rp 1,348,260,000,000, Belawan Port project amounted to Rp 621,699,000,000, and

- sebesar Rp 621.699.000.000, dgn Proyek Pembangunan Bendungan Raknamo sebesar Rp 512.416.000.000.
- Raknamo Dam project amounted to Rp 512,416,000,000.*
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Pembangunan Jembatan Aji Tulus Kutai Barat sebesar Rp 96.048.257.608, Gedung Kantor Satker Perangkat Daerah Pemkot Pekanbaru sebesar Rp 45.810.093.188, Pembangunan Fasilitas Kapal Selam sebesar Rp 168.949.229.682, Grande Valore Condominium sebesar Rp 57.630.815.549, Pembangunan Relokasi RSUD dr. Muhammad Zein Painan sebesar Rp 29.066.933.228, Pembangunan Hotel BW Luxury Jambi sebesar Rp 21.426.616.529, Pekerjaan Paket 13 Simpang Rukis – Tanjung Kemuning sebesar Rp 73.565.555.974, Jalan Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 3 sebesar Rp 395.795.210.393, dan proyek Jalan Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 6 sebesar Rp 199.845.164.204, Tol Solo Ngawi Paket 2 sebesar Rp 360.128.929.487.
 - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from Aji Tulus Bridge West Kutai amounted to Rp 96,048,257,608, Office Building of District Government of Pekanbaru project amounted to Rp 45,810,093,188, the Development of Submarine Facilities amounted to Rp 168,949,229,682, Grande Valore Condominium project amounted to Rp 57,630,815,549, the Development of Relocation dr. Muhammad Zein Painan District General Hospital amounted to Rp 29,066,933,228, the Development of BW Luxury Hotels Jambi amounted to Rp 21,426,616,529, No. 13 Simpang Rukis – Tanjung Kemuning Street Package project amounted to Rp 73,565,555,974, Section 3 of Medan Kualanamu Tebing Tinggi Tollways project amounted to Rp 395,795,210,393, and Section 6 of Medan Kualanamu Tebing Tinggi Tollways project amounted to Rp 199,845,164,204, Tol Solo Ngawi Package 2 amounted to Rp 360,128,929,487.
 - PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk, piutang yang dijaminan terhadap Proyek yaitu tagihan termin atas proyek SOR Balikpapan sebesar Rp 10.206.804.240, Lanjutan Pelabuhan Sisi Darat Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 140.007.472.187, Jembatan Lamnyong sebesar Rp 1.615.330.880, Peningkatan DI Dumpil sebesar Rp 31.905.710.433, Rekonstruksi Jalan Batu Mundom – Tabuyung – Natal sebesar Rp 180.706.079.439, dan Rusun Kemayoran C2-2 sebesar Rp 246.153.762.700, Pembangunan Bagian Jalan Tol Ruas Bakauheni sebesar Rp 188.472.390.795, Renovasi Stadion Renang (Aquatic) GBK sebesar Rp 238.343.727.940, Pembangunan Bangunan Fasilitas Kapal Selam Paket B2 sebesar Rp 182.435.905.540.
 - PT Bank Pembangunan Daerah Jabar and Banten Tbk, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from Balikpapan Sport Center project amounted to Rp 10,206,804,240, Advanced land side port District North Penajam Paser amounted to Rp 140,007,472,187, Lamnyong Bridge project amounted to Rp 1,615,330,880, DI Dumpil escalation project amounted to Rp 31,905,710,433, Batu Mundom – Tabuyung – Natal Road Reconstruction project amounted to Rp 180,706,079,439, and Kemayoran Flat C2-2 amounted to Rp 246,153,762,700, construction Toll Bakauheni sebesar Rp 188,472,390,795, Renovation of Stadium Swimming Pool (Aquatic) GBK amounted to Rp 238,343,727,940, the Development of Submarine Facilities B2 amounted to Rp 182,435,905,540.
 - Indonesia Eximbank, piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Jasa Konstruksi Sisi Darat Tahap 1A Bandar Udara Internasional Jawa Barat sebesar Rp 324.313.000.000, Proyek Pembangunan Terminal *Multipurpose* di Pelabuhan Kuala Tanjung sebesar Rp 426.338.000.000, Pembangunan Tol Solo – Ngawi Paket 1 sebesar Rp 1.229.010.000.000.
 - Indonesia Eximbank, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from Construction Services of West Java International Airport Land side Phase 1A Project amounted to Rp 324,313,000,000, The Development of Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung Port project amounted to Rp 426,338,000,000, Solo – Ngawi Toll Road project Package 1 amounted to Rp 1,229,010,000,000.
 - PT Bank Panin Tbk (Catatan 20), piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek *Frontage* Surabaya sebesar Rp 1.345.641.000.000 dan Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 2 sebesar Rp 1.785.509.200.000.
 - PT Bank Panin Tbk (Note 20), accounts receivable which is used as collateral are terms of bill from the *Frontage* Surabaya project amounted to Rp 1,345,641,000,000 and The Development of Ciawi – Sukabumi Toll Road Section 2 amounted to Rp 1,785,509,200,000.
 - PT Bank UOB Indonesia, piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Proyek RSUD Ansari Saleh Banjarmasin Tahap V sebesar Rp 11.601.154.708, Pembangunan Sistem
 - PT Bank UOB Indonesia, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from RSUD Ansari Saleh Banjarmasin Stage V project amounted to Rp 11,601,154,708, Build a System of

- Penyediaan (SPAM) Maloy, Kabupaten Kutai Timur (MYC) sebesar Rp 143.719.999.160, Pembangunan Mako Polda Papua Barat sebesar Rp 1.079.071.087, Irigasi DI COLO Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 179.733.671.775, dan Saluran Sunga, Karang Anyar sebesar Rp 205.216.475.680.
- Provision (SPAM) Maloy, East Kutai District (MYC) amounted to Rp 143,719,999,160, Development of Mako Polda West Papua amounted to Rp 1,079,071,087, Irrigation of DI COLO Wonogiri amounted Rp 179,733,671,775, and River Channel of Karang Anyar amounted Rp 205,216,475,680.*
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Masjid Baiturrahman Banda Aceh sebesar Rp 111.200.569.594, *Design, Build*, dan Lansekap Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 19.262.020.894, DI Batang Sinamar sebesar Rp 119.810.058.762, Rajawali Royal Apartment sebesar Rp 135.401.800.000, Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung sebesar Rp 469.183.154.117, Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (*Giant Sea Wall*) sebesar Rp 282.902.248.370, Pembangunan Bendungan Tapin sebesar Rp 263.425.080.410, Pelebaran Jalan Simpang Tanjung – Aruk II (MYC) sebesar Rp 263.544.498.788, dan Rusun Kemayoran D10-2 sebesar Rp 411.648.416.638.
 - *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from Baiturrahman Mosque of Banda Aceh project amounted to Rp 111,200,569,594, Soekarno Hatta Airport Design, Build, and Landscape project amounted to Rp 19,262,020,894, DI Batang Sinamar project amounted to Rp 119,810,058,762, Rajawali Royal Apartment project amounted to Rp 135,401,800,000, Manado – Bitung Freeway project amounted to Rp 469,183,154,117, Giant Sea Wall project Phase 2 Packet 1 amounted to Rp 282,902,248,370, Tapin Dam Project amounted to Rp 263,425,080,410, Simpang Tanjung – Aruk Road Enlargement project (MYC) amounted to Rp 263,544,498,788, and Rusun Kemayoran D10-2 amounted to Rp 411,648,416,638.*
 - Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Saluran Interkoneksi DI. Osaka sebesar Rp 78.254.291.091, proyek Terminal Domestik Sekupang sebesar Rp 28.136.284.488, Proyek Mustika Golf Apartemen sebesar Rp 59.070.312.279, Proyek Rumah Sakit Royal Dental sebesar Rp 46.218.490.918, Reiz Condo Medan sebesar Rp 383.060.700.000, Proyek Bangunan Rumah Sakit Harapan Kita sebesar Rp 32.151.790.909, dan Gedung Pusat Jantung Terpadu Tahap III sebesar Rp 41.530.045.704, Proyek Pembangunan Bendung DI Kamijoro Kab. Bantul (MYC) sebesar Rp 101.476.780.058, Proyek Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Jombang-Madiun sebesar Rp 92.033.300.000, Proyek Pembangunan Turap Pasar Lama Tahap III sebesar Rp 34.325.654.938, Proyek Pembangunan Infrastruktur Motaain sebesar Rp 193.331.731.327, dan Proyek Pelebaran jalan Batu Aji-Kuaro sebesar Rp 187.777.759.734.
 - *Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from Interconnection channel DI. Osaka project amounted to Rp 78,254,291,091, Domestic Sekupang Terminal project amounted Rp 28,136,284,488, Mustika Golf Apartemen project amounted Rp 59,070,312,279, Royal Dental Hospital project amounted to Rp 46,218,490,918, Reiz Condo Medan project amounted to Rp 383,060,700,000, Harapan Kita Hospital Building Project amounted to Rp 32,151,790,909, and Heart Integrated Center Building Phase III project amounted to Rp 41,530,045,704, Pembangunan Bendung DI Kamijoro Kab. Bantul (MYC) Project amounted to Rp 101,476,780,058, Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Jombang-Madiun Project amounted to Rp 92,033,300,000, Pembangunan Turap Pasar Lama Phase III Project amounted to Rp 34,325,654,938, Pembangunan Infrastruktur Motaain Project amounted to Rp 193,331,731,327, and Batu Aji-Kuaro Road Enlargement Project amounted to Rp 187,777,759,734.*
 - PT Bank Negara Indonesia Syariah, piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek *Construction of Karian Multipurpose Dam Project* sebesar Rp 79.542.335.664, Pelebaran Jalan Rantepao – Palopo (MYC) sebesar Rp 116.811.810.134, Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (Segmen 5) sebesar Rp 198.400.638.591, dan Pembangunan Bendung D.I Baliase sebesar Rp 79.542.335.664.
 - *PT Bank Negara Indonesia Syariah, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from Construction of Karian Multipurpose Dam Project amounted Rp 79,542,335,664, Rantepao – Palopo (MYC) Road Enlargement project amounted Rp 116,811,810,134, Balikpapan – Samarinda Toll Road (segment 5) amounted Rp 198,400,638,591, and Bendung D.I Baliase project amounted Rp 79,542,335,664.*
 - PT Bank Maybank Indonesia, piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Tol Cimanggis – Cibitung Seksi I sebesar Rp 657.209.000.000 dan Pembangunan
 - *PT Maybank Indonesia, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from Cimanggis – Cibitung Toll Road Section I amounted Rp 657,209,000,000 and Dam Way Sekampung*

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
(2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016
(2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Continued)

Bendungan Way Sekampung (Paket 2) sebesar
Rp 160.202.238.304.

(Section 2) amounted
Rp 160,202,238,304.

- PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, piutang yang dijaminkan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Jalan Hampengan-Mendawai II (Multi Years) sebesar Rp 120.636.140.170, Apartemen Yukata Alam Sutera Rp 297.000.000.000, Irigasi DI Batang Alai sebesar Rp 125.653.893.190, dan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung (MYC) sebesar Rp 496.691.133.760.

- PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from Hampengan – Mendawai II Road (Multi Years) amounted Rp 120,636,140,170, Yukata Alam Sutera Apartment amounted Rp 297,000,000,000, Irrigation of DI Batang Alai amounted Rp125,653,893,190 and Manado – Bitung Freeway (MYC) amounted Rp 496,691,133,760.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutupi yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

Management believes that allowance for impairment losses of accounts receivable to third parties are sufficient to cover the possible losses on uncollectible receivables. Management also believes that there is no significant risk concentrated in accounts receivable.

6. PIUTANG VENTURA BERSAMA

6. JOINT VENTURES RECEIVABLES

Kemitraan/ Venturer	Nama Proyek/ Project Name	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
		Rp	Rp	Rp
KSO/JV Waskita - PP - Wika	Jembatan Merah Putih	230.776.080.026	135.217.668.092	117.190.393.835
KSO/JV Waskita - Yasa	Jl Galing Aruk	194.683.501.933	--	--
KSO/JV Waskita - Andesmont	Simpang Kraft	142.107.967.194	--	--
KSO/JV Waskita - Daya Mulia Turangga	Ipuh Bantal Roads	132.304.822.819	40.654.214.163	23.550.080.591
KSO/JV Waskita - Nindya	Pelebaran Jl. Batu Aji - Kuaro	126.397.111.928	--	--
KSO/JV Waskita - PAL	PLTU Malinau	112.129.443.227	97.759.306.245	110.070.997.167
KSO/JV Waskita - Basuki Rahmana Putra	Dredging & Embankment of Grogro	100.763.355.730	37.281.836.018	--
KSO/JV Waskita - Yasa	Kualanamo	97.451.399.818	--	--
KSO/JV Waskita - Penta	Lansekap Soetta	95.484.707.864	67.839.190.266	24.680.447.839
KSO/JV Waskita - Yodya Karya	Bandara Husein	91.880.614.884	84.982.690.770	--
KSO/JV Waskita - Sinar Intan	PDAM Tanah Grogot	86.671.131.341	--	--
KSO/JV Waskita - Brantas	Bendung Jabung	85.234.227.651	--	--
KSO/JV Waskita - Wika - Shanghai	Jl Tol Cisumdawu	75.952.935.562	--	--
KSO/JV Waskita - JPC	SMM Muara Teweh Div.2	75.517.187.637	75.312.751.054	71.554.356.633
KSO/JV Waskita - Perdasa - Buluh - Larasati	Jl Talisayan - Batu Lepok	75.452.723.327	--	--
KSO/JV Waskita - Brantas - Wika	Bendung Gerak Sembayat	73.310.554.101	--	--
KSO/JV Waskita - Cahaya	Spam Samarinda Utara	53.853.724.001	--	--
KSO/JV Waskita - Brantas	Rehabilitasi Sabo & Merapi	52.137.728.350	--	--
KSO/JV Waskita - Brantas	Bendungan Panghelak Pandanduri	44.058.346.501	--	--
KSO/JV Waskita - BAP	Sabo Dam Merapi 7 BH	39.619.468.733	--	--
KSO/JV Waskita - PP	Irigasi Batang Sinamar	37.581.215.543	--	--
KSO/JV Waskita - Abdi Mulia Berkah	Sal Primer Jabung II	37.127.459.002	--	--
KSO/JV Waskita - Wika	Jalan Tol Bocimi	29.790.663.354	--	--
KSO/JV Waskita - Bawakaraeng	Irigasi D.I. Batang Alay	28.608.213.067	--	--
KSO/JV Waskita - Larasati	Pengendalian Banjir Karang Asam	22.471.818.152	--	--
KSO/JV Waskita - ZUG	PLTU Rote	22.271.582.708	22.271.582.708	22.274.685.341
KSO/JV Waskita - HK	Saluran Induk Sidorejo	21.251.163.217	--	--
KSO/JV Waskita - PP - Wika	Bandara Kualanamu	--	97.383.218.000	109.707.935.060
KSO/JV Waskita - Yasa	Jl Galing Aruk	--	49.256.415.308	--
KSO/JV Waskita - Brantas	Pandan Duri Thp II	--	23.962.740.952	38.533.629.591
KSO/JV Waskita - Andesmont	Jl. Kebayan - Simpang Kraft	--	--	35.865.891.290
Lain-lain/ Others				
(di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)		258.762.241.962	14.059.375.203	182.821.526.974
Jumlah/Total		2.443.651.389.632	745.980.988.779	736.249.944.321

Piutang ventura bersama merupakan pinjaman dan biaya ventura bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup.

Joint venture receivables represent loan and advance payment of joint venture's expenses paid by the Group.

Piutang ventura bersama tidak dikenakan bunga. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan akan dilunasi pada saat diminta.

Joint venture receivables were not subject to interest. These accounts have no collateral and are repayable on demand.

Manajemen berpendapat bahwa piutang ventura bersama dapat ditagihkan.

Management believes that balances of joint venture receivables are collectible.

7. PIUTANG RETENSI – BERSIH

7. RETENTION RECEIVABLES – NET

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Pihak Berelasi	408.772.720.042	377.875.204.603	259.673.375.052	Related Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(1.669.105.387)	(1.669.105.387)	(633.868.682)	Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah	407.103.614.655	376.206.099.216	259.039.506.370	Sub Total
Pihak Ketiga	628.226.653.984	630.316.039.598	499.179.837.090	Third Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(39.824.810.434)	(39.824.810.434)	(26.600.300.717)	Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah	588.401.843.550	590.491.229.164	472.579.536.373	Sub Total
Jumlah	995.505.458.205	966.697.328.380	731.619.042.743	Total

Rincian saldo piutang retensi adalah sebagai berikut:

The details of retention receivables are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Pihak Berelasi/ Related Parties				
PT Jasamarga Kualanamu Tol	93.906.216.868	78.070.634.180	--	
PT Solo Ngawi Jaya	74.108.731.881	45.636.017.274	--	
KSO/JV Waskita Karya - Trinit	25.868.436.582	25.723.209.355	--	
PT PAL Indonesia (Persero)	21.876.329.294	--	--	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	--	32.008.317.558	31.585.045.657	
PT Trans Marga Jateng	--	30.863.448.792	80.616.665.193	
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	193.013.005.417	165.573.577.444	147.471.664.202	
Sub Jumlah/ Sub Total	408.772.720.042	377.875.204.603	259.673.375.052	
Pihak Ketiga/ Third Parties				
Pemerintah Daerah/ District Governments	109.652.998.012	101.631.500.965	77.459.245.077	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Ministry of Public Works and Housing	91.449.183.698	93.391.549.344	72.424.863.958	
Kementerian Transportasi dan Komunikasi Republik Demokrasi Timor Leste/ Ministry of Transport and Communication of the Democratic Republic of Timor Leste	56.357.045.788	49.513.566.703	--	
Bin Laden Contractor Group LLC	29.934.520.841	29.705.615.846	27.963.287.163	
PT Pardika Wisthi Sarana	23.431.420.350	23.431.420.350	22.719.220.394	
PT Toba Pengembang Sejahtera	21.544.169.072	--	--	
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	295.857.316.223	332.642.386.390	298.613.220.498	
Sub Jumlah/ Sub Total	628.226.653.984	630.316.039.598	499.179.837.090	
Jumlah/ Total	1.036.999.374.026	1.008.191.244.201	758.853.212.142	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of retention receivables are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal	(41.493.915.821)	(27.234.169.399)	(25.486.940.848)	Beginning Balance
Penambahan	--	(14.259.746.422)	(2.269.874.186)	Addition
Pemulihan	--	--	522.645.635	Recovery
Saldo Akhir	(41.493.915.821)	(41.493.915.821)	(27.234.169.399)	Ending Balance

Manajemen telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang, berdasarkan penilaian secara individual atas masing-masing pemberi kerja.

Management has provided an allowance for impairment losses of receivables, based on individual assessment of each owner of the project.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang retensi di kemudian hari. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang retensi.

Management believes that allowance for impairment losses of receivables is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible retention receivables in the future. Management also believes that there is no significant risk concentrated in retention receivables.

8. PIUTANG LAIN-LAIN – BERSIH

a. Piutang Lain-lain Lancar – Bersih

Pihak Berelasi/ Related Parties	
PT Jasamarga Semarang Batang	
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	
PT Cinere Serpong Jaya	
PT Citra Washpphutowa	
PT Ngawi Kertosono Jaya	
PT Solo Ngawi Jaya	
PT Jasamarga Kualanamou Tol	
PT Waskita Bumi Wira	
KSO/JV Waskita Trinit	
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	
Sub Jumlah/ Sub Total	
Pihak Ketiga/ Third Parties	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Ministry of Public Works and Housing	
PT Bakrie Toll Indonesia	
Badan Pengatur Jalan Tol/ Toll Road Management Agency	
PT MNC Tol Investama	
CAR Alianz	
Lain-lain/ Others	
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	
Sub Jumlah/ Sub Total	
Jumlah/ Total	

Piutang lain-lain terutama merupakan biaya yang dibayar terlebih dahulu oleh Grup untuk keperluan penerbitan bank garansi atas kredit modal kerja (KMK) untuk subkontraktor. Piutang ini akan dilunasi pada saat diminta.

Piutang lain-lain kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) merupakan piutang dana dukungan Pemerintah atas Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo berdasarkan Amandemen Pertama Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo sesuai Akta Notaris No. 30 tanggal 25 April 2016 dibuat di hadapan Notaris Rina Utami Djauhari dan piutang atas Dana Dukungan Pemerintah atas Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ciawi – Sukabumi berdasarkan Addendum akhir Perjanjian Pemberian Dukungan Pemerintah (PPDP) No. 10/KU.08.01/PPDP/ DDPPTJT/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014 dan Akta Notaris No. 23 tanggal 29 Desember 2014 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari. WTR, entitas anak, membiayai terlebih dahulu kenaikan harga tanah yang menjadi tanggungan Pemerintah dan mengajukan permohonan penggantian dana (reimbursement) kepada Pemerintah.

8. OTHER RECEIVABLES – NET

a. Other Current Receivable – Net

31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
Rp	Rp	Rp
1.658.061.255.224	1.210.688.081.800	--
616.107.080.077	338.327.190.775	--
524.023.665.993	383.099.605.774	--
93.450.120.155	90.845.672.208	--
89.119.310.334	78.080.177.199	--
52.147.041.067	50.353.840.771	--
46.306.735.891	32.906.183.028	--
--	512.959.866.216	--
--	80.650.742.181	63.003.000.000
--	--	1.500.000.000
606.197.122	12.352.475	1.643.998.456
3.079.821.405.863	2.777.923.712.427	66.146.998.456
3.743.663.632.280	1.064.842.057.235	20.313.904.605
69.697.329.695	--	--
--	1.518.447.438.265	--
--	495.209.837	--
--	--	21.383.890.113
156.556.603.888	256.165.772.995	19.924.837.470
(12.521.985.340)	--	--
3.957.395.580.523	2.839.950.478.332	61.622.632.188
7.037.216.986.386	5.617.874.190.759	127.769.630.644

Other receivables mainly consist of bank guarantee fee which has been paid in advance by the Group for the Working Capital Loan (WCL) to the subcontractors. These accounts are repayable on demand.

Other receivables to Ministry of Public Work and Public Housing and Toll Road Management Agency (BPJT) represent receivable on Government supported fund of Pasuruan – Probolinggo Toll Road Concession by First Amendment of Pasuruan - Probolinggo Toll Road Concession Agreement Toll Roads according to Deed No. 30, dated April 25, 2016 based on Notary Rina Utami Djauhari and receivable on Government supported fund of Ciawi – Sukabumi Toll Road Concession by Last Addendum Support Agreement (PPDP) No. 10/KU.08.01/PPDP/DDPPTJT/XI/2014 dated November 17, 2014 and Notary Deed No. 23, dated December 29, 2014 based on Notary Rina Utami Djauhari. WTR, a subsidiary, financed any increase in the price of land in advance prior to apply for reimbursement to the Government.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

b. Piutang Lain-lain Tidak Lancar

b. Other Non-Current Receivable

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	142.688.816.819	137.960.304.749	120.623.748.616
PT Istaka Karya (Persero)	74.914.307.748	74.914.307.748	75.144.307.748
PT Waskita Bumi Wira	--	149.344.414	127.894.414
PT Kertas Lece (Persero)	--	--	9.092.268.560
PT Ngawi Kertosono Jaya	--	--	1.891.884.913
PT Cinere Serpong Jaya	--	--	977.816.119
PT Pembangunan Perumahan	--	--	199.559.250
Koperasi Waskita	--	--	1.000.000
PT Solo Ngawi Kertosono Jaya	--	--	1.891.884.913
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(74.914.307.748)	(74.914.307.748)	(75.144.307.748)
Sub Jumlah/ Sub Total	142.688.816.819	138.109.649.163	134.806.056.785
Pihak Ketiga/ Third Parties			
PT Bakrie Toll Indonesia	--	69.697.329.695	71.519.462.085
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/The Ministry of Public Works and Housing	--	84.961.986.999	--
PT Bakrie Toll Road	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
Lain-lain/ Others	--	9.092.268.560	--
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(1.050.000.000)	(1.050.000.000)	(1.050.000.000)
Sub Jumlah/ Sub Total	--	163.751.585.254	71.519.462.085
Jumlah/ Total	142.688.816.819	301.861.234.417	206.325.518.870

Piutang lain-lain PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 64.169.976.914 merupakan piutang Perusahaan yang diberikan berdasarkan keputusan para Pemegang Saham Perusahaan diluar RUPS No. KEP-83/MBU/2011 dan No. KEP-PS04/PPA/0411 tanggal 1 April 2011. Pada tanggal 21 Mei 2011, Perusahaan menerima Surat Pengakuan Utang No. L.05B/P/WK/2011 dan No. DU-SP/2011.01B dari PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 64.169.976.914.

Other receivables PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 64,169,976,914 were receivable given in accordance with the Shareholders of the Company decision outside the Annual General Meeting of shareholders No. KEP-83/MBU/2011 and No. Kep-PS04/PPA/0411 dated April 1, 2011. On May 21, 2011, the Company received a Letter of Acknowledgment Debt No. L.05B/P/WK/2011 and No. DU-SP/2011.01B of PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 64,169,976,914.

Pada tanggal 12 April 2011, PT Istaka Karya (Persero) memohon kepada Perusahaan sesuai surat No. DK/2011-323 untuk menerbitkan garansi bank proyek Bandar Lampung By Pass sebesar Rp 10.661.885.000 dan biaya provisi untuk penerbitan garansi bank sebesar Rp 312.445.834. Pada tanggal 30 Maret 2012, bank garansi No. 2011/JPU/GB/068/6148/Monday telah dicairkan oleh pemilik proyek, sehingga piutang Perusahaan kepada PT Istaka Karya (Persero) menjadi sebesar Rp 75.144.307.748. Ketidakmampuan PT Istaka Karya (Persero) dalam memenuhi pembayaran utangnya menyebabkan penyelesaian utang dilakukan dengan cara Debt to Equity Swap, yaitu para kreditur mendapatkan posisi sebagai pemegang ekuitas PT Istaka Karya (Persero) sebagai pengganti pembayaran atas utang PT Istaka Karya (Persero) kepada para kreditur.

On April 12, 2011, PT Istaka Karya (Persero) requested to the Company through letter No. DK/2011-323 to issue bank guarantee for Bandar Lampung By Pass project amounted to Rp 10,661,885,000 and the cost of provision for issued bank guarantee issuance amounted to Rp 312,445,834. On March 30, 2012 the bank guarantee No. 2011/JPU/GB/068/6148/Monday has been executed by the owner of the project, so that the receivables of the Company to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 75,144,307,748. Inability of PT Istaka Karya (Persero) in fulfilling its debt payments, caused the settlement of debt using Debt to Equity Swap for solving its debt, means the creditors get a position as an equity holder of PT Istaka Karya (Persero) in line of of payment for a debt PT Istaka Karya (Persero) to the creditors.

Pembayaran piutang akan dilakukan secara bertahap ditahun ke 9 sampai maksimal 5 tahun.

The payment of receivables will be settled partially at the 9th year for a maximum of 5 years.

Berdasarkan surat dari Perusahaan No. 483/WK/Dir/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 23/PKPU/ 2012/PN.Niga.JKT.PST. Perusahaan meminta PT Istaka Karya (Persero) untuk menyelesaikan utangnya dengan skema penyelesaian sebagai berikut:

1. Pembayaran awal senilai 3% atau sebesar Rp 2.549.586.465.
2. Pemenuhan sisa pembayaran senilai 97% dari jumlah utang dalam bentuk penyertaan saham sementara (*Debt to Equity Swap*) sebesar Rp 82.436.629.045.

Berdasarkan surat di atas diterima jawaban PT Istaka Karya (Persero) dengan surat No. DU/2013-131 tanggal 15 Mei 2013 yang berisi:

1. Pembayaran awal 3% bersumber dari pencairan piutang atas eskalasi proyek SKSD.
2. Sisa pembayaran sebesar 97% dalam bentuk penyertaan saham, sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Keuangan dan instansi terkait.

Pada 31 Desember 2016 dan 2015, terdapat pemulihan piutang kepada PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 230.000.000 sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh PT Istaka Karya (Persero). Sampai dengan tanggal pelaporan, PT Istaka Karya (Persero) belum memenuhi sisa pembayaran senilai 97% dari jumlah utang dalam bentuk penyertaan saham sementara (*Debt to Equity Swap*) sehingga Perusahaan membukukan cadangan kerugian penurunan piutang kepada PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 74.914.307.748 atau sebesar 100% dari nilai piutang. Tidak ada perubahan piutang pada 31 Maret 2017.

Terdapat penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada 31 Desember 2015 oleh PT Cimanggis Cibitung Tollways, entitas anak, sebesar Rp 1.050.000.000 kepada PT Bakrie Toll Road.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal	(75.964.307.748)	(76.194.307.748)	(75.144.307.748)	Beginning Balance
Penambahan	(12.521.985.340)	--	(1.050.000.000)	Addition
Pemulihan	--	230.000.000	--	Recovery
Saldo Akhir	(88.486.293.088)	(75.964.307.748)	(76.194.307.748)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain di kemudian hari.

According to the Company's letters No. 483/WK/Dir/2013 dated May 7, 2013 that concerns to The Execution of Decision to Ratification of Peace (Homologation) No. 23/PKPU/2012/PN.Niga.JKT.PST. The Company asked PT Istaka Karya (Persero) to resolve the debt with this settlement scheme:

1. The initial payment valued at 3% or in amount Rp 2,549,586,465.
2. The fulfillment of the remaining payment valued at 97% from the total debt in the form of temporary investments in share of stocks (*Debt to Equity Swap*) for Rp 82,436,629,045.

Based on the letters above, the company has received the answer from PT Istaka Karya (Persero) with the letters No. DU/2013-131 dated May 15, 2013 that contains:

1. The initial payment of 3% from the disbursement of receivables of the escalation SKSD project.
2. The remaining payment of 97% in the form of investments in share of stocks, is being reviewed by the Ministry of Finance and related institutions.

As of December 31, 2016 and 2015, there is recovery of the allowance for impairment losses of receivable to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 230,000,000. Until reporting date, PT Istaka Karya (Persero) has not fulfilled the remaining payment valued at 97% from the total debt in the form of temporary investments in share of stock (*Debt to Equity Swap*) thus the Company provided allowance for impairment loss on receivable to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 74,914,307,748 or 100% from receivable. There is no changes in receivable as of March 31, 2017.

There is an addition of allowance for impairment losses on othe receivable of PT Cimanggis Cibitung Tollways, a subsidiary, as of December 31, 2015 amounted to Rp 1,050,000,000 to PT Bakrie Toll Road.

The movements of allowance for impairment losses of other receivables are as follows:

Management believes that allowance for impairment losses on accounts receivable is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible other receivables in the future.

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Bahan Baku				Raw Material
Bahan Baku Konstruksi	1.189.984.734.005	1.586.613.309.252	387.572.360.932	Construction Raw Material
Beton Precast	370.020.548.229	228.122.183.589	54.551.293.293	Precast Concrete
Suku Cadang	3.831.357.879	3.824.977.879	--	Spareparts
Sub Jumlah	1.563.836.640.113	1.818.560.470.720	442.123.654.225	Sub Total
Persediaan dalam Pengembangan				Work in Progress
Aset Real Estat	742.117.114.632	736.777.267.750	382.866.396.342	Real Estate Assets
Tanah yang Belum Dikembangkan	795.739.844	795.739.844	795.739.844	Undeveloped Land
Sub Jumlah	742.912.854.476	737.573.007.594	383.662.136.186	Sub Total
Persediaan untuk Dijual				Inventory Ready for Sale
Tanah Kavling Siap Dijual	598.345.228	598.345.228	598.345.228	Lots of Land Ready for Sale
Sub Jumlah	598.345.228	598.345.228	598.345.228	Sub Total
Jumlah	2.307.347.839.817	2.556.731.823.542	826.384.135.639	Total

Bahan baku konstruksi merupakan persediaan material dan perlengkapan proyek yang masih tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh Grup. Persediaan material terdiri dari persediaan besi, semen, solar, tiang pancang, keramik/ marmer, *traveler form*, *geotextile*, aspal, dan batu.

Construction raw material represents construction materials and equipment supply projects which still available at the warehouse of existing project owned by the Group. The raw material consists of iron, cement, diesel, pile, ceramic/ marble, traveler form, geotextile, asphalt, and stone.

Beton precast merupakan persediaan produk beton unit usaha precast yang terdiri dari persediaan barang jadi produk beton, persediaan bahan baku, dan bahan penolong serta persediaan bahan dalam proses.

The precast concentrate represents inventory of concrete products of precast business unit consisting of concrete finished good, raw materials and supporting materials, and materials in the process.

Persediaan aset real estat merupakan bangunan apartemen yang siap dijual, tanah yang sedang dikembangkan dan bangunan yang sedang dikonstruksi.

Inventory of real estate assets represents apartments units ready for sale, land under development and building under constructions.

Persediaan tanah kavling merupakan persediaan tanah Perusahaan di Perumahan Bukit Diponegoro (Semarang) yang memiliki luas tanah sebesar 2.469m² dengan status kepemilikan tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2030. Seluruh kepemilikan atas tanah tersebut atas nama Perusahaan.

Inventory of lots of land represent land owned by the Company in Bukit Diponegoro Housing (Semarang), which has a land area of 2,469sqm with a certificate of land ownership status Right to Use (HGB), valid until year 2030. The entire ownership of land on behalf of the Company.

Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai persediaan, sebab Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan dapat digunakan dan dijual.

Management did not provide allowance for impairment losses of inventory as management believes that all inventories are fully usable and able to sale.

10. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA

10. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS

a. Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa – Lancar

a. Gross Amount Due From Customers - Current Portion

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Pihak Berelasi	6.146.316.009.189	5.485.979.232.464	2.489.076.603.668	Related Parties
Pihak Ketiga	6.282.254.538.668	5.485.823.365.384	2.090.638.381.950	Third Parties
Jumlah	12.428.570.547.857	10.971.802.597.848	4.579.714.985.618	Total

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
(2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016
(2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Continued)

Rincian saldo tagihan bruto kepada pengguna jasa – bagian lancar adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due from customers – current portion are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi - Jangka Pendek/ Related Parties - Current Portion			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)	2.179.903.812.463	1.990.249.354.253	559.532.255.105
PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)	1.132.076.241.074	1.368.003.049.470	520.099.632.839
PT Utama Karya (Persero) (HK)	1.025.879.341.560	577.061.676.188	313.567.000.000
PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)	452.098.884.809	272.822.967.275	73.634.543.207
PT Angkasa Pura II (Persero) (AP II)	328.367.612.887	280.681.288.988	--
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI)	284.775.380.845	167.574.850.275	86.589.979.938
PT Jasamarga Kualanamu Toll (JKMT)	275.944.479.507	251.263.685.084	--
PT Prima Multi Terminal (PMT)	143.119.692.926	138.997.958.616	227.884.970.365
PT PAL Indonesia (Persero) (PAL)	58.473.497.652	167.395.162.724	77.070.375.353
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Pelindo II)	56.471.790.628	54.070.595.971	63.374.410.331
PT Semen Padang (Persero)	--	--	74.042.954.743
PT Bank Mandiri (Persero)	--	--	51.316.700.744
KSO Waskita - Trinit	--	--	160.011.960.000
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Miliar/ Billion)	209.205.274.838	217.858.643.620	281.951.821.043
Sub Jumlah/ Sub Total	6.146.316.009.189	5.485.979.232.464	2.489.076.603.668
Pihak Ketiga - Jangka Pendek/ Third Parties - Current Portion			
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	3.642.345.535.146	3.388.424.048.519	243.879.342.369
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	1.124.919.313.433	954.200.345.485	267.213.021.330
PT Metro Wisata Raya	478.822.921.601	--	--
Pemerintah Daerah/ District Governments	430.704.620.718	520.594.671.189	461.244.715.154
PT Puriampora Intipratama	146.201.687.273	141.380.584.759	--
Telkom Property (PT Graha Sarana Duta)	51.807.004.419	51.807.004.419	--
Samsung C&T Corporation	--	60.928.901.578	--
The Ministry of Transport and Communication of the Republica Democratica de Timor Leste	--	--	289.348.739.292
The Ministry of Public Work of the Republica Democratica de Timor Leste	--	--	156.640.226.380
PT Toba Pengembang Sejahtera	--	--	93.332.718.156
Universitas Sebelas Maret	--	--	53.593.963.400
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Miliar/ Billion)	407.453.456.078	368.487.809.435	525.385.655.869
Sub Jumlah/ Sub Total	6.282.254.538.668	5.485.823.365.384	2.090.638.381.950
Jumlah/ Total	12.428.570.547.857	10.971.802.597.848	4.579.714.985.618

Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan tagihan bruto kepada pengguna jasa sampai dengan 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Other important informations regarding to gross amount due from customers as of March 31, 2017 are as follows:

**1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) –
Proyek Transmisi Sumatera 500 KVA**

**1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
(PLN) Sumatera Transmission 500 KVA
Project**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk Pembangunan Transmisi Sumatera 500 KVA seksi 1 Proyek No. 0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015 dan seksi 2 Proyek No. 0533.PJ/DAN.02.02/DIR/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp 3.532.414.000.000 dan Rp 2.573.501.000.000.

The Company entered into a construction contract on Sumatera Transmission 500 KVA section 1 Project No. 0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015 and section 2 Project No. 0533.PJ/DAN.02.02/DIR/2015 dated October 23, 2015 with contract value of Rp 3,532,414,000,000 and Rp 2,573,501,000,000, respectively.

2. PT Hutama Karya (Persero) – Proyek Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung No. 1016/WK/DIR/2016 pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.443.150.000.000.

3. PT Solo Ngawi Jaya – Proyek Jalan Tol Solo – Ngawi

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Solo - Ngawi No. 682/WK/DIR/2015, pada tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp 960.376.000.000 untuk Paket SN.1A, Rp 1.042.286.000.000 untuk Paket SN.1B, Rp 1.050.689.000.000 untuk Paket SN.2A dan Rp 600.076.000.000 untuk Paket SN.2B.

4. PT Ngawi Kertosono Jaya – Proyek Jalan Tol Solo – Kertosono

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Solo – Kertosono No. 682/WK/DIR/2015, pada tanggal 24 Juni 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.348.187.000.000.

5. PT Angkasa Pura II (Persero) – Proyek Pembangunan Gardu Induk Bandara Soekarno Hatta

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk Pembangunan Gardu Induk Bandara Soekarno Hatta No. 1235/WK/DIR/2016 pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 202.612.727.272.

6. PT Jasamarga Kualanamu Tol – Proyek Jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebing tinggi

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi No. 006/Kontrak-Dir/2015 pada tanggal 18 Juni 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 399.777.000.000.

7. PT Prima Multi Terminal – Proyek Terminal Serbaguna dan Fasilitas Pendukung di Pelabuhan Kuala Tanjung

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Terminal Serbaguna dan Fasilitas Pendukung di Pelabuhan Kuala Tanjung No. UM.58/1/19/PMT-15 pada tanggal 17 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 734.506.000.000.

2. PT Hutama Karya (Persero) – The Development of Terbanggi Besar – Kayu Agung Toll Road Project

The Company entered into a construction contract for the development of Terbanggi Besar – Kayu Agung Toll Road Project No. 1016/WK/DIR/2016 dated October 12, 2016 with contract value of Rp 2,443,150,000,000.

3. PT Solo Ngawi Jaya – Solo - Ngawi Toll Road Project

The Company entered into a construction contract on Solo – Ngawi Toll Road Project No. 682/WK/DIR/2015 dated June 24, 2015 with contract value of Rp 960,376,000,000 for SN.1A, Rp 1,042,286,000,000 for SN.1B, Rp 1,050,689,000,000 for SN.2A and Rp 600,076,000,000 for SN.2B.

4. PT Ngawi Kertosono Jaya – Solo - Kertosono Toll Road Project

The Company entered into a construction contract on Solo – Kertosono Toll Road Project No. 682/WK/DIR/2015 dated June 24, 2015 with contract value of Rp 1,348,187,000,000.

5. PT Angkasa Pura II (Persero) – The Development of Soekarno Hatta Airport Substation

The Company entered into a construction contract for the development of Soekarno Hatta Airport Substation No. 1235/WK/DIR/2016 dated November 30, 2016 with contract value of Rp 202,612,727,272.

6. PT Jasamarga Kualanamu Tol – Medan - Kualanamu – Tebing Tinggi Toll Road Project

The Company entered into a construction contract on Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Toll Road Project No. 006/Kontrak-Dir/2015 dated June 18, 2015 with contract value of Rp 399,777,000,000.

7. PT Prima Multi Terminal - Multipurpose Terminal Project and Support Facility in Kuala Pelabuhan Tanjung

The Company entered into a construction contract to Multipurpose Terminal Project and Support Facility in Kuala Tanjung Port No. UM.58/1/19/PMT-15 dated April 17, 2015 with contract value of Rp 734,506,000,000.

8. PT PAL Indonesia (Persero) – Proyek Pembangunan Bangunan Fasilitas Kapal Selam

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk Pembangunan Bangunan Fasilitas Kapal Selam No. 002/P/WK/DRB/2016 pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 201.364.090.000.

9. Kementerian Perhubungan – Proyek LRT Sumatera Selatan

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan proyek LRT Sumatera Selatan No. III/WK/DIR/2015 pada tanggal 13 Nopember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.402.350.103.055.

10. Kementerian Perhubungan – Proyek Pembangunan Pelabuhan Belawan

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Pelabuhan Belawan No. 02/CD/CW/PPK-BLW/IV/2016 pada tanggal 25 April 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 621.699.000.729.

11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok C2-2 dan D10-2

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok C2-2 dan D10-2 No. 276/WK/DIR/2016 pada tanggal 17 Maret 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 995.506.181.818.

12. Pemerintah Demokrasi Timor Leste – Proyek Pengembangan Existing Bandara Suai

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan dengan No. 1045.2/WK/Dir/2013 pada proyek pengembangan bandara Suai di Timor Leste pada tanggal 11 Maret 2014 dengan nilai kontrak sebesar USD 67.671.189,95.

8. PT PAL Indonesia (Persero) – The Development of Submarine Building Facility

The Company entered into a construction contract on the development of Submarine Building Facility No. 002/P/WK/DRB/2016 dated August 29, 2016 with contract value of Rp 201,364,090,000.

9. Ministry of Transportation – The Development of South Sumatera LRT Project

The Company entered into a construction contract on the development of South Sumatera LRT No. III/WK/DIR/2015 dated November 13, 2015 with contract value of Rp 8,402,350,103,055.

10. Ministry of Transportation – The Development of Belawan Port Project

The Company entered into a construction contract on the development of Belawan Port Project No. 02/CD/CW/PPK-BLW/ IV/2016 dated April 25, 2016 with contract value of Rp 621,699,000,729.

11. Ministry of Public Works and Housing – The Development of Wisma Atlet Kemayoran Block C2-2 and D10-2 Project

The Company entered into a construction contract on the development of Wisma Atlet Kemayoran Blok C2-2 and D10-2 No. 276/WK/DIR/2016 dated March 17, 2016 with contract value of Rp 995,506,181,818.

12. The Government of The Democratic of Timor Leste - Upgrading Existing Suai Airport Project

The Company entered into a construction contract No. 1045.2/WK/Dir/2013 on Development of Upgrading of Existing Suai Airport Project in Timor Leste dated March 11, 2014 with contract value of USD 67,671,189.95.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

b. Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa - Bagian Tidak Lancar

b. Gross Amount Due From Customers – Non-Current Portion

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Pihak Berelasi	2.113.136.013.278	1.446.161.376.885	350.849.397.338	Related Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(21.663.660.868)	(21.663.660.868)	(6.203.338.028)	Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah	2.091.472.352.410	1.424.497.716.017	344.646.059.310	Sub Total
Pihak Ketiga	911.494.345.315	847.128.799.220	263.254.700.594	Third Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(133.709.072.536)	(133.709.072.536)	(82.934.418.664)	Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah	777.785.272.779	713.419.726.684	180.320.281.930	Sub Total
Jumlah	2.869.257.625.189	2.137.917.442.701	524.966.341.240	Total

Rincian saldo tagihan bruto kepada pengguna jasa – bagian tidak lancar adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due from customers – non-current portion are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)	1.193.791.894.484	596.234.715.491	--
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)	881.024.092.059	793.389.143.691	275.345.073.314
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Miliar/ Billion)	38.320.026.735	56.537.517.703	75.504.324.024
Sub Jumlah/ Sub Total	2.113.136.013.278	1.446.161.376.885	350.849.397.338
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Kementerian Transportasi dan Komunikasi Republik Demokrasi Timor Leste/ The Ministry of Transport and Communication of the Republic Democratic of Timor Leste	261.008.840.789	292.958.623.407	--
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Work of the Republic Democratic of Timor Leste	228.844.256.257	226.467.399.658	--
Kementerian Perhubungan/ Ministry of Transportation Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Ministry of Public Works and Housing	163.921.456.256	60.498.909.867	--
Pemerintah Daerah/ District Governments	87.180.165.637	78.882.561.982	74.888.666.487
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Miliar/ Billion)	170.539.626.376	188.321.304.306	112.513.723.569
Sub Jumlah/ Sub Total	911.494.345.315	847.128.799.220	263.254.700.594
Jumlah/ Total	3.024.630.358.593	2.293.290.176.105	614.104.097.932
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(155.372.733.404)	(155.372.733.404)	(89.137.756.692)
Jumlah/ Total	2.869.257.625.189	2.137.917.442.701	524.966.341.240

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto – bagian tidak lancar adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of gross amount due from customers – non-current position are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal/ Beginning Balance	(155.372.733.404)	(89.137.756.692)	(77.382.732.199)
Penambahan/ Addition	--	(66.234.976.712)	(12.170.509.484)
Pemulihan	--	--	415.484.991
Saldo Akhir/ Ending Balance	(155.372.733.404)	(155.372.733.404)	(89.137.756.692)

Manajemen berpendapat bahwa tagihan bruto dapat ditagihkan. Manajemen juga berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto di kemudian hari.

Management believes all gross amount due from customers are collectible. Management also believes that allowance for impairment losses of gross amount due from customers is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible gross amount due from customers in the future.

11. PERPAJAKAN

11. TAXES

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Pasal 19	3.903.091.085	--	--	Article 19
Pasal 22				Article 22
2017	327.022.245	--	--	2017
2016	16.150.829	16.150.829	--	2016
2015	--	--	1.780.138.903	2015
2014	170.154.919	170.154.919	170.154.919	2014
Pasal 23				Article 23
2017	356.193.317	--	--	2017
2016	2.829.513.314	2.829.513.314	--	2016
2015	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2015
2014	2.733.644.449	2.733.644.449	2.733.644.449	2014
Pasal 25				Article 25
2015	--	--	384.000.000	2015
Pajak Pertambahan Nilai				Value Added Tax
2017	247.622.506.986	--	--	2017
2016	478.969.781.661	478.969.781.661	476.781.734.429	2016
2015 dan 2014	544.076.250.071	674.719.541.628	197.937.807.199	2015 and 2014
Jumlah	1.281.008.308.876	1.159.442.786.800	679.791.479.899	Total

Pada tanggal 13 Maret 2017, Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun fiskal 2014 mengkonfirmasi kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp 182.866.972.382 dan menerima Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 722.653.679 terkait denda pajak atas PPN tahun 2014.

On March 13, 2017, the Company has received Overpayment Tax Assessment Letter from Tax Service Office (TSO) of Value Added Taxes (VAT) for fiscal year 2014 to confirm overpayment of total Rp 182,866,972,382 and has received Tax Collection Letter amounting to Rp 722,653,679 related to administrative sanction of VAT year 2014.

b. Utang Pajak

b. Taxes Payables

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Pasal 21	14.281.503.395	15.941.344.748	8.031.194.011	Article 21
Pasal 22	17.520.344.955	12.394.937.222	13.141.931.627	Article 22
Pasal 23	16.654.376.318	7.127.479.204	3.992.084.545	Article 23
Pasal 4 (2) - Final	38.693.134.211	39.979.278.242	312.152.219.030	Article 4 (2) - Final
Pajak Pertambahan Nilai	2.518.996.444	153.698.517.834	39.738.869.259	Value Added Tax
Pajak Final Konstruksi	65.762.843	65.762.843	21.351.059.486	Construction Final Tax
Pasal 29	100.333.817.479	180.607.461.491	40.988.523.218	Article 29
Jumlah	190.067.935.645	409.814.781.584	439.395.881.176	Total

c. Pajak Kini

c. Current Tax

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pajak atas Pendapatan Non Final					Non Final Income Tax
Perusahaan	--	--	11.264.268.030	35.992.983.582	The Company
Entitas Anak	54.805.426.886	83.120.851.234	337.127.496.438	48.840.323.514	Subsidiaries
Beban Pajak Tangguhan	41.517.695.001	--	(5.871.307.833)	(15.334.345.130)	Deferred Tax Expenses
Jumlah	96.323.121.887	83.120.851.234	342.520.456.635	69.498.961.966	Total

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before income tax based on consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income are as follows:

	31 Maret 2017/ 31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Non Final	--	--	604.544.997.157	446.843.354.618	Non Final Income
Perbedaan Tetap					Permanent Difference
Beban Non Final	817.243.726	3.293.794.056	559.487.925.034	302.871.420.291	Non Final Expenses
Jumlah Laba (Rugi) kena Pajak	(817.243.726)	(3.293.794.056)	45.057.072.123	143.971.934.327	Total Taxable Income (Loss)
Laba (Rugi) Kena Pajak	(817.243.726)	(3.293.794.056)	45.057.072.123	143.971.934.327	Total Taxable Income (Loss)
Beban Pajak Non Final	--	--	11.264.268.030	35.992.983.582	Non Final Tax Expenses

d. Pajak Final

d. Final Tax

	31 Maret 2017/ 31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Perusahaan					The Company's Revenues
Pendapatan Jasa Konstruksi	5.938.657.113.149	2.851.557.476.177	19.742.652.261.588	12.095.620.234.005	Construction Revenues
Dikurangi					Deduction
Pendapatan Usaha yang					Revenues that Funded by
Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri	(40.358.486.273)	(34.030.425.475)	(205.138.965.721)	(215.481.746.392)	Foreign Loan
Pendapatan Usaha Luar Negeri					Non Taxable Foreign
Tidak Kena Pajak dan KSO	(91.116.068.960)	(72.002.992.479)	(813.026.311.539)	(452.669.290.628)	Revenues and JV
Pendapatan Beda Waktu					Time Differences
Pengenaan Pajak - Bersih	(3.627.403.411.823)	(987.113.804.756)	(8.706.661.926.737)	(2.065.708.259.418)	Taxable Revenue - Net
Pendapatan Jasa Konstruksi					Taxable Income from
Kena Pajak	2.179.779.146.093	1.758.410.253.467	10.017.825.057.591	9.361.760.937.567	Construction Revenues
Pendapatan Gedung yang Disewakan	525.327.172	43.020.000	1.447.182.855	616.609.372	Building Rental Revenues
Jumlah Pendapatan Kena Pajak	2.180.304.473.265	1.758.453.273.467	10.019.272.240.446	9.362.377.546.939	Total Taxable Income
Beban Pajak Final					Final Tax Expenses
3% atas Pendapatan Jasa Konstruksi	65.393.374.383	52.752.307.604	300.534.751.728	280.852.828.127	3% of Construction Revenues
10% atas Pendapatan Gedung yang Disewakan	52.532.717	4.302.000	144.718.285	61.660.937	10% of Building Rental Revenues
5% atas Inbreng Aset	--	--	23.625.000.000	--	5% of Assets Transferred
Jumlah Beban Pajak Final	65.445.907.100	52.756.609.604	324.304.470.013	280.914.489.064	Total Current Tax Expenses

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan interim konsolidasian ini, Perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2017.

Up to the issuance date of these consolidated interim financial statements, the Company has not submitted its annual corporate tax return (SPT) for the 2017 fiscal year.

Estimasi penghasilan kena pajak tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPH Badan 2016 dan 2015.

The estimated taxable incomes were used as the basis in preparation of the 2016 and 2015 annual corporate tax return.

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	Penyesuaian/ Adjustment	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/(Charged) Credited to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Maret 2017/ March 31, 2017
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets					
PT SMR	191.016.676.805	--	(40.438.278.516)	--	150.578.398.289
PT TJT	916.051.510	--	--	--	916.051.510
PT CCT	128.544.466	--	--	--	128.544.466
PT SRIMP	234.246.498	--	--	--	234.246.498
PT PPTR	--	--	--	--	--
PT PPTR	--	--	--	--	--
PT WBP	2.842.627.745	--	(1.079.416.485)	53.000.134	1.816.211.394
Jumlah Aset Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Assets	195.138.147.024	--	(41.517.695.001)	53.000.134	153.673.452.158
Liabilitas Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Liabilities					
PT PPTR	7.830.452.417	(425.233.093)	--	--	7.405.219.324
PT WKR	780.510.744	235.448.453	--	--	1.015.959.197
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Liabilities	8.610.963.161	(189.784.640)	--	--	8.421.178.521

	31 Desember 2015/ December 31, 2015	Penyesuaian/ Adjustment	Laba Rugi/ (Charged) Credited to Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember 2016/ December 31, 2016
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets					
PT SMR	181.627.223.711	--	9.401.602.410	(12.149.316)	191.016.676.805
PT TJT	367.818.642	--	1.041.532.422	(493.299.554)	916.051.510
PT CCT	51.084.741	--	84.058.152	(6.598.427)	128.544.466
PT SRIMP	--	1.232.557.000	181.435.552	(1.179.746.054)	234.246.498
PT WBP	--	--	2.993.131.714	(150.503.969)	2.842.627.745
Jumlah Aset Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Assets	182.046.127.094	1.232.557.000	13.701.760.250	(1.842.297.320)	195.138.147.024
Liabilitas Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Liabilities					
PT PPTR	--	--	7.830.452.417	--	7.830.452.417
PT WKR	--	--	780.510.744	--	780.510.744
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Liabilities	--	--	8.610.963.161	--	8.610.963.161

12. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

12. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Uang Muka Kontrak	588.875.624.867	1.386.405.316.102	--	Advanced Contracts
PPN Keluaran Yang Belum Diterima	424.427.633.169	365.629.668.981	181.320.036.854	VAT Out Not Yet Received
Uang Muka Pihak Ketiga	369.222.341.692	203.730.788.655	336.157.942.527	Advance from Third Parties
Biaya Dibayar di Muka	314.669.886.801	663.205.854.749	103.164.604.057	Prepaid Expenses
Uang Muka Beban Umum dan Administrasi	59.382.248.416	53.060.399.563	209.540.183.035	Advanced for General and Administration
Sewa	10.732.592.215	10.787.782.045	16.421.866.918	Prepaid Rent
Lain-lain	35.270.494.711	24.137.117.595	7.518.170.842	Others
Jumlah	1.802.580.821.871	2.706.956.927.690	854.122.804.233	Total

Uang muka pihak ketiga diberikan kepada subkontraktor, pemasok dan mandor borong yang bekerja pada proyek yang dilaksanakan oleh Grup. Penyelesaian uang muka akan diperhitungkan dengan termin yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga yang bersangkutan.

Advances to third parties are given to subcontractors, suppliers and the entire stock who worked on the Group's projects. The settlement of advance will be offset by the invoice that will be paid related to third parties concerned.

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proyek-proyek belum berjalan, biaya provisi *Letter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Penyelesaian biaya dibayar dimuka diperhitungkan pada saat proyek sudah berjalan, untuk biaya provisi di akui setiap bulan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran belum diterima merupakan pengakuan PPN keluaran atas termin yang telah ditagihkan, namun belum dibayar oleh pemberi kerja.

Prepayments represent the cost incurred for project not yet started, provision of Letter of Credit (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Completion prepayments calculated when the projects start, for a fee provision is recognized each month. Value Added Tax (VAT) out which not yet received represent recognition of VAT out on receivable, but the owner has not paid yet.

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

13. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The details of investments in associates and joint ventures are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Investasi pada Entitas Asosiasi/ <i>Investments in Associates</i>	1.207.937.294.894	937.769.650.068	421.812.733.291
Investasi Ventura Bersama/ <i>Investments in Joint Ventures</i>	1.352.873.216.793	1.132.931.038.300	1.150.040.031.920
Jumlah/ Total	2.560.810.511.687	2.070.700.688.368	1.571.852.765.211

Investasi pada Entitas Asosiasi

Investment in Associates Entities

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Details of investments in associates entities are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	Aktivitas utama/ Principal activity
	Rp	Rp	Rp	
PT Solo Ngawi Jawa	369.604.129.021	368.039.975.631	264.437.387.264	Operator Jalan Toll/ <i>Toll operator</i>
PT Ngawi Kertosono Jaya	285.101.807.367	172.316.617.220	63.893.149.868	Operator Jalan Toll/ <i>Toll operator</i>
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	240.820.747.108	239.057.021.052	-	Operator Jalan Toll/ <i>Toll operator</i>
PT Jasamarga Kualanamu Toll	162.003.316.911	-	-	Operator Jalan Toll/ <i>Toll operator</i>
PT Cinere Serpong Jaya	86.705.081.750	86.896.870.200	87.808.794.016	Operator Jalan Toll/ <i>Toll operator</i>
PT Jasamarga Semarang Batang	55.452.212.737	54.979.442.602	-	Operator Jalan Toll/ <i>Toll operator</i>
PT Hutama Marga Waskita	4.500.000.000	-	-	Operator Jalan Toll/ <i>Toll operator</i>
PT Waskita Bali Mandara	3.750.000.000	12.729.723.363	-	Operator Jalan Toll/ <i>Toll operator</i>
PT Waskita Bumi Wira	-	3.750.000.000	5.673.402.143	Operator Jalan Toll/ <i>Toll operator</i>
Jumlah/ Total	1.207.937.294.894	937.769.650.068	421.812.733.291	

Seluruh entitas asosiasi diatas dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

All of the above associates entities are accounted using the equity method in these consolidated financial statements.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
(2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016
(2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Continued)

Rincian dan mutasi investasi pada entitas asosiasi pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, and 2015 adalah sebagai berikut:

Details ownership interest and movements of investment in associates entities as of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 are as follows:

31 Maret 2017/March 31, 2017						
%	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Equity in net income (loss) associates	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
PT Solo Ngawi Jaya	40	368.039.975.631	--	1.564.153.390	--	369.604.129.021
PT Ngawi Kertosono Jaya	40	172.316.617.220	111.138.588.000	1.646.602.147	--	285.101.807.367
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	60	239.057.021.052	--	1.763.726.056	--	240.820.747.108
PT Jasamarga Kualanamu Tol *)	30	--	161.750.000.000	253.316.911	--	162.003.316.911
PT Cinere Serpong Jaya	35	86.896.870.200	--	(191.788.450)	--	86.705.081.750
PT Jasamarga Semarang Batang	40	54.979.442.602	--	472.770.135	--	55.452.212.737
PT Utama Marga Waskita	30	--	4.500.000.000	--	--	4.500.000.000
PT Waskita Bali Mandara	60	3.750.000.000	--	--	--	3.750.000.000
PT Waskita Bumi Wira **)	55	12.729.723.363	--	--	(12.729.723.363)	--
Jumlah/ Total		937.769.650.068	277.388.588.000	5.508.780.189	(12.729.723.363)	1.207.937.294.894

*) Reklasifikasi dari investasi jangka panjang lainnya
**) Reklasifikasi ke investasi kepada entitas anak

*) Reclassification from other long-term investments
**) Reclassification to investment in subsidiary

31 Desember 2016/December 31, 2016						
%	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Equity in net income (loss) associates	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
PT Solo Ngawi Jaya	40	264.437.387.264	97.086.532.017	6.516.056.350	--	368.039.975.631
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	60	--	240.000.000.000	(942.978.948)	--	239.057.021.052
PT Ngawi Kertosono Jaya	40	63.893.149.868	103.644.650.457	4.778.816.895	--	172.316.617.220
PT Cinere Serpong Jaya	35	87.808.794.016	--	(911.923.816)	--	86.896.870.200
PT Jasamarga Semarang Batang	40	--	53.458.400.002	1.521.042.600	--	54.979.442.602
PT Waskita Bumi Wira	55	5.673.402.143	6.979.000.000	77.321.220	--	12.729.723.363
PT Waskita Bali Mandara	60	--	3.750.000.000	--	--	3.750.000.000
Jumlah/ Total		421.812.733.291	504.918.582.476	11.038.334.301	--	937.769.650.068

31 Desember 2015/December 31, 2015						
%	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Equity in net income (loss) associates	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
PT Solo Ngawi Jaya	40	--	263.224.000.000	1.213.387.264	--	264.437.387.264
PT Ngawi Kertosono Jaya	40	--	64.215.600.000	(322.450.132)	--	63.893.149.868
PT Cinere Serpong Jaya	35	--	88.545.686.036	(736.892.020)	--	87.808.794.016
PT Waskita Bumi Wira	55	7.314.904.399	--	(1.641.502.256)	--	5.673.402.143
Jumlah/ Total		7.314.904.399	415.985.286.036	(1.487.457.144)	--	421.812.733.291

PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)

PT Waskita Toll Road (WTR), entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 40% pada SNJ atau setara Rp 166.820.000.000, berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 34, Notaris Fathiah Helmi, S.H, pada tanggal 10 Juni 2015.

WTR menambah penyertaan pada SNJ sebesar Rp 96.404.000.000, berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 9 Juli 2015.

PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)

PT Waskita Toll Road (WTR), a subsidiary, has investment of 40% in SNJ or equivalent to Rp 166,820,000,000, based on the Deed of Acquisition Share No. 34 of Notary Fathiah Helmi, S.H., dated June 10, 2015.

WTR increased its investment in SNJ amounted to Rp 96,404,000,000, based on decree of the Circular of General Meeting of Shareholders (GMS) dated July 9, 2015.

WTR menambah penyertaan melalui utang pada SNJ sebesar Rp 1.075.839.217, berdasarkan Berita Acara Utang-Piutang antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR dan SNJ tanggal 30 Juni 2015.

WTR increased more investment through a debt in SNJ amounted to Rp 1,075,839,217, based on The Minutes of Debt between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR and SNJ dated June 30, 2015.

WTR menambah penyertaan pada SNJ sebesar Rp 48.717.196.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 11 Pebruari 2016.

WTR increased more investment in SNJ amounted to Rp 48,717,196,000, based on decree of the Circular of GMS dated February 11, 2016.

PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)

PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 40% pada NKJ atau setara Rp 8.780.000.000, berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 35, Notaris Fathiah Helmi, S.H.

WTR, a subsidiary, has investment of 40% in NKJ or equal to Rp 8,780,000,000, based on the Deed of Acquisition Share No. 35 of Notary Fathiah Helmi, S.H.

WTR menambah penyertaan melalui utang pada NKJ sebesar Rp 2.898.818.457, berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Juni 2015.

WTR increased its investment through a debt in NKJ amounted to Rp 2,898,818,457, based on decree of the Circular of General Meeting (GMS) of Shareholders dated June 17, 2015.

WTR menambah penyertaan pada NKJ sebesar Rp 55.435.600.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 7 Juli 2015.

WTR increased its investment in NKJ amounted to Rp 55,435,600,000, based on decree of the Circular of GMS dated July 7, 2015.

WTR menambah penyertaan pada NKJ sebesar Rp 19.325.680.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 11 Pebruari 2016.

WTR increased its investment in NKJ amounted to Rp 19,325,680,000, based on decree of the Circular GMS dated February 11, 2016.

WTR menambah penyertaan pada NKJ sebesar Rp 33.248.952.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 15 Juni 2016.

WTR increased its investment in NKJ amounted to Rp 33,248,952,000, based on decree of the Circular of GMS dated June 15, 2016.

WTR menambah penyertaan pada NKJ sebesar Rp 48.171.200.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 18 Agustus 2016.

WTR increased its investment in NKJ amounted to Rp 48,171,200,000, based on decree of the Circular GMS dated August 18, 2016.

WTR menambah penyertaan pada NKJ sebesar Rp 111.138.588.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 20 Maret 2017. Akta pengesahaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masih dalam proses.

WTR increased its investment in NKJ amounted to Rp 111,138,588,000, based on decree of the Circular of GMS dated March 20, 2017. The approval from the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia is still in process.

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 60% di KKDM. KKDM didirikan sesuai Akta Pendirian dari Notaris Mudofir Hadi S.H., No. 94 tanggal 20 Desember 1996. Grup tidak melakukan konsolidasi atas laporan keuangan KKDM, meskipun memiliki kepemilikan mayoritas.

WTR, a subsidiary, has an investment of 60% in KKDM. KKDM was established under the Deed of Establishment of Notary Mudofir Hadi S.H., No. 94 dated December 20, 1996. The Group has not consolidated the financial statements of KKDM, although it has a majority ownership.

Hal ini berdasarkan Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 9 Desember 2014 dari Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, atas Perjanjian Jual Beli Bersyarat Dengan Hak untuk Membeli Kembali Atas Saham-saham. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pengendalian atas KKDM tetap berada pada PT Tirtobumi Prakarsatama (Tirto), meliputi aspek keuangan, operasional dan sumber daya manusia KKDM, menunjuk atau mengganti organisasi KKDM dan tindakan lainnya harus meminta persetujuan tertulis sebelumnya dari Direksi dan anggota Komisaris dari Tirto.

It is based on the Addition of Agreement (Addendum) dated December 9, 2014 from Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, on the Conditional Sale and Purchase Agreement with the Right to Buy Back on Shares. In the agreement it was agreed that control over KKDM remains with PT Tirtobumi Prakarsatama (Tirto), including the aspects of financial, operational and human resources of KKDM, appoint or change the organization of KKDM and other decision shall obtain written approval from the Board of Directors and members of Commissioners of Tirto.

PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 30% di JMKT atau sebesar Rp 31.250.000.000. JMKT didirikan sesuai Akta Pendirian dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., No. 56 tanggal 25 Nopember 2014, bergerak di bidang pengusahaan jalan.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 10.050.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 23 Januari 2016.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 18.450.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 16 Mei 2016.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 18.000.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 22 Juli 2016.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 19.500.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS pada Januari 2017.

Pada tanggal 24 Maret 2017, WTR membeli saham JMKT yang dimiliki oleh Perusahaan sebesar Rp 85.000.000.000, sehingga kepemilikan menjadi 30%, sesuai dengan Akta dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn No. 22. Akta pengesahaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masih dalam proses.

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 35% pada CSJ atau setara Rp 70.000.000.000, berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 35 oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

WTR menambah penyertaan pada CSJ sebesar Rp 7.031.843.000, berdasarkan Surat Permintaan Setoran Modal Perseroan tanggal 6 Juli 2015.

WTR menambah penyertaan melalui utang pada CSJ sebesar Rp 11.513.843.037, berdasarkan Berita Acara Utang-Piutang Antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR, PT Jakarta Propertindo dan CSJ tanggal 31 Juli 2015.

PT Jasamarga Semarang Batang (JMSB)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 40% pada JMSB atau setara Rp 44.182.400.000. Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian No. 128 tanggal 21 April 2016 dari Notaris Haji Rizul Sudarmadi, S.H., bergerak di bidang jalan tol.

PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)

WTR, a subsidiary, has investments of 30% in JMKT Rp 31,250,000,000. JMKT was established based on the Notarial Deed of Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., No. 56 dated November 25, 2014 engaged in toll road.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 10,050,000,000, based on decree of the Circular of GMS dated January 23, 2016.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 18,450,000,000, based on decree of the Circular of GMS dated May 16, 2016.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 18,000,000,000, based on decree of the Circular of GMS dated July 22, 2016.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 19,500,000,000, based on decree of the Circular of GMS in January 2017.

On March 24, 2017, WTR bought the shares of JMKT owned by the Company amounted to Rp 85,000,000,000. This increased the Company's participation to 30%, based on the Notarial Deed of Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn No. 22. The deed of approval by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia is still in process.

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)

WTR a subsidiary, has investment of 35% in CSJ or equal to Rp 70,000,000,000, based on the Deed of Acquisition Share No. 35 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

WTR increased investment in CSJ amounted to Rp 7,031,843,000, based on the Letter for request of Capital Subscription dated July 6, 2015.

WTR increased its investment through a debt in PT Cinere Serpong Jaya amounted to Rp 11,513,843,037, based on the Minutes of Debt between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR, PT Jakarta Propertindo and CSJ dated July 31, 2015.

PT Jasamarga Semarang Batang (JMSB)

WTR, a subsidiary, has investment of 40% in JMSB or equivalent to Rp 44,182,400,000. The Company was established under the Notarial Deed of Establishment No. 128, dated April 21, 2016 of Notary Haji Rizul Sudarmadi, S.H., engaged in toll road.

PT Utama Marga Waskita (HMW)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 30% dari modal HMW atau sebesar Rp 4.500.000.000. HMW didirikan sesuai Akta Pendirian No. 24 tanggal 20 Februari 2017 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn, bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.

PT Waskita Bali Mandara (WBM)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 60% pada WBM. WBM didirikan sesuai Akta Pendirian No. 6 tanggal 13 Nopember 2015 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. WTR tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan WBM, meskipun memiliki kepemilikan mayoritas.

PT Waskita Bumi Wira (WBW)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 48% pada WBW setara Rp 7.500.000.000, berdasarkan Akta Notaris No. 43 tanggal 28 Oktober 2014 dari Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn.

Pada tanggal 9 Mei 2016, WTR membeli saham WBW yang dimiliki oleh PT Energi Bumi Mining sebesar Rp 1.094.000.000, sehingga kepemilikan menjadi 55% berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 3 Mei 2016.

WTR menambah penyertaan pada WBW sebesar Rp 1.375.000.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 22 Juni 2016.

WTR tidak melakukan konsolidasi atas laporan keuangan WBW, meskipun memiliki kepemilikan mayoritas. Hal ini berdasarkan Akta No. 5 tanggal 4 April 2016 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, atas Perjanjian Tambahan Mengenai Jual Beli Kembali, dimana PT Energi Bumi Mining memiliki opsi saham untuk membeli kembali transfer kepemilikan 7% dari WBW sampai dengan 31 Desember 2016. Setelah periode tersebut opsi saham tersebut akan hangus dan WBW akan dikonsolidasi (Catatan 1).

Manajemen berpendapat tidak terdapat harga kuotasi dipasar aktif atas nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan teknik penilaian tidak dapat digunakan, sehingga nilai wajar investasi diukur dengan biaya perolehan.

Ringkasan informasi keuangan masing-masing entitas asosiasi ditetapkan dibawah ini. Ringkasan informasi keuangan dibawah ini merupakan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan entitas asosiasi yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

PT Utama Marga Waskita (HMW)

WTR, a subsidiary, owns investment of 30% in HMW or amounted to Rp 4,500,000,000. HMW was established based on the Notarial Deed No. 24 dated February 20, 2017 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn and engaged in toll road concession.

PT Waskita Bali Mandara (WBM)

WTR, a subsidiary, has investment of 60% in WBM. WBM was established under the Deed of Establishment No. 6 dated November 13, 2015 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. WTR has no control or joint control over WBM's policies, although it has a majority ownership.

PT Waskita Bumi Wira (WBW)

WTR, a subsidiary, has investment of 48% in WBW or equivalent to Rp 7,500,000,000, based on the Notarial Deed No. 43 dated October 28, 2014 of Notary Jose Dima Satria, SH., M.Kn.

On May 9, 2016, WTR acquired shares of WBW owned by PT Energi Bumi Mining amounted to Rp 1,094,000,000, thus the Company has ownership of 55% based on Decree of The Circular of GMS dated May 3, 2016.

WTR increased its investment in WBW amounted to Rp 1,375,000,000, based on Decree of the Circular of GMS dated June 22, 2016.

WTR has not consolidated the financial statements of WBW, although it has a majority ownership. It is based on the Deed No. 5 dated April 4, 2016 from Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, on the Addition of Buy Back Agreement which PT Energi Bumi Mining has the shares option to buy back the 7% transfer of ownership from WBW until December 31, 2016. After that period the shares option will be expired and WBW will be consolidated (Note 1).

Management believes there is no active market price quotations in the fair value of investment in associates and valuation techniques can not be used, so fair value of the investment is measured at acquisition cost.

Summarized financial information in respect of each of the associates are set out below. The summarized financial information below represents amounts shown in the associates' financial statements prepared in accordance to Indonesian Financial Accounting Standards.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

	Jumlah Aset/ Total Asset			Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities		
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Solo Ngawi Jaya	3.848.832.782.302	3.710.284.120.871	1.666.513.804.404	2.933.593.900.117	2.799.118.332.719	1.011.366.844.724
PT Ngawi Kertosono Jaya	2.945.722.527.377	2.268.067.886.504	544.336.725.670	2.184.746.869.497	1.788.889.631.024	328.974.174.200
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	4.988.945.456.702	4.596.193.884.271	3.139.257.683.853	4.517.367.392.106	4.124.801.268.588	2.668.887.470.114
PT Jasamarga Kualanamu Toll	2.405.792.220.461	1.901.781.682.131	3.001.965.263.694	1.861.695.361.771	1.449.428.472.388	181.087.940.913
PT Cinere Serpong Jaya	1.457.110.856.156	1.158.962.514.003	64.724.578.195	1.395.753.170.824	1.097.056.863.803	213.429.247
PT Jasamarga Semarang Batang	5.326.769.542.292	3.659.579.542.343	--	9.312.586.472.466	6.539.415.523.348	--
PT Utama Marga Waskita	15.003.574.927	--	--	23.000.000	--	--
PT Waskita Bumi Wira	1.519.512.860.647	711.678.257.420	11.941.652.212	1.501.011.466.130	693.214.335.586	128.314.414

	Pendapatan Usaha/ Sales			Profit (Loss) of the Year/ Laba (Rugi) Tahun Berjalan		
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Solo Ngawi Jaya	308.933.875.406	214.106.050.035	648.228.823.011	4.073.094.033	2.061.774.876	890.468.325
PT Ngawi Kertosono Jaya	483.676.075.439	128.419.507.719	114.001.985.597	3.950.932.400	389.836.141	(908.288.857)
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	153.221.269.813	14.289.977.925	2.244.984.969.274	185.448.913	(639.987.287)	124.953.796.858
PT Jasamarga Kualanamu Toll	494.847.115.021	258.871.574.849	99.338.958.607	743.648.947	351.458.214	601.533.001
PT Cinere Serpong Jaya	--	--	--	(547.964.868)	(961.708.348)	(2.070.741.780)
PT Jasamarga Semarang Batang	569.905.148.717	--	--	1.366.299.606	--	--
PT Utama Marga Waskita	--	--	--	(19.425.073)	--	--
PT Waskita Bumi Wira	722.413.574.897	--	--	37.472.683	(1.515.538.136)	(3.246.046.366)

Investasi pada Ventura Bersama
 Rincian saldo investasi ventura bersama dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Investment in Joint Ventures
 Details of investment in joint ventures with related parties are as follows:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Proyek/ Project	31 Maret 2017/ March 31, 2017					
		Persentase/ Percentage	Saldo Awal/ Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal)/ Correction	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir/ Ending Balance	
		%	Rp	Rp	Rp	Rp	
Waskita - HK - Wika	Bandara Samarinda	43%	78.634.531.475	14.606.619.743	318.511.231	93.559.662.449	
Waskita - NK	Jalan Batu Aji Kuaro	60%	--	18.479.976.304	4.685.517.937	23.165.494.241	
Waskita - Wika	Aksesibilitas Ducting Utility	49%	20.465.666.379	--	1.511.670.180	21.977.336.559	
Waskita - Wika	Sabo Dam Paket 1	57%	19.969.525.243	--	--	19.969.525.243	
Waskita - Brantas	Sabo Dam Merapi 14 buah	49%	19.645.779.654	--	--	19.645.779.654	
Waskita - Brantas - Wika	Bendung Gerak Sembayat	33%	--	14.623.269.416	(178.795.451)	14.444.473.965	
Waskita - Penta	Lansekap Bandara Soetta	98%	10.960.754.135	847.667.211	514.556.189	12.322.977.535	
Waskita - Wika - Nindya	Soker MYC	31%	10.798.405.749	1.360.307.591	--	12.158.713.340	
Waskita - Yodya Karya	Bandara Husein	99%	11.746.111.998	(148.311.197)	(161.509.452)	11.436.291.349	
Waskita - Adhi	Pengaman Pantai Jakarta Tahap 2 Paket 1	45%	8.057.939.067	--	3.369.951.059	11.427.890.126	
Waskita - Wika	Jalan Tol Ciauwi Sukabumi seksi 1	51%	3.107.279.797	2.500.536.820	4.029.563.923	9.637.380.540	
Waskita - Brantas	Rekons. Sabo Dam Merapi	51%	8.827.943.454	--	--	8.827.943.454	
Waskita - PP	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	56%	8.351.731.177	--	--	8.351.731.177	
Waskita - PP - Utama	Jembt. Siak IV	35%	8.074.177.465	--	--	8.074.177.465	
Waskita - Wika - PP - HK	Jatigede Sumedang	25%	7.448.173.986	--	--	7.448.173.986	
Waskita - Brantas	Rekons. Sabo Dam Merapi	51%	6.322.123.452	--	--	6.322.123.452	
Waskita - HK	Normalisasi Kali Ciluwung	51%	6.540.288.975	(2.040.000.000)	560.465.542	5.060.754.517	
Waskita - Wika	Run Way SSK II	51%	3.900.355.756	(44)	--	3.900.355.712	
Waskita - Utama	Manado - Bitung (Air Madidi)	45%	3.519.216.387	--	(142.853.391)	3.376.362.996	
Waskita - Taruna Putra Pertiwi	DI Colo	70%	--	1.298.415.717	1.667.666.633	2.966.082.350	
Waskita - PP	Bendung Batang Sinamar	40%	--	2.549.560.429	310.426.654	2.859.987.083	
Waskita - Adhi	Kali Lamong	55%	1.794.983.751	--	--	1.794.983.751	
Waskita - Wika	RSUD Pasar Minggu	40%	2.360.527.445	(984.911.647)	--	1.375.615.798	
Waskita - Brantas	Bendung Gerak Tempe	50%	1.226.486.420	--	--	1.226.486.420	
Waskita - Brantas	Jalan Bantaeng - Bulukumba	65%	--	955.705.671	--	955.705.671	
Waskita - PP	Pkt 3 - Solo Kertosono	43%	191.424.924	(860.307.591)	1.360.307.591	691.424.924	
Waskita - Citra Mandiri	Lakitan	70%	(104)	(104.213.503)	546.720.077	442.506.470	
Waskita - Adhi	Bendungan Leuwi Keris Paket 2	70%	--	--	204.839.897	204.839.897	
Waskita - Adhi	Bendungan Way Sekampung (Paket 2)	63%	--	--	70.350.053	70.350.053	
Waskita - Adhi - PP	Jl. SS Karawang	33%	1.920.444.883	(1.920.444.883)	--	--	
Waskita - PP	Jembatan Sungai Brantas	43%	1.909.534.795	(1.909.534.795)	--	--	
Waskita - Adhi - HK - Wika	Suramadu C/C	25%	(2.598.000.000)	2.598.000.000	--	--	
Waskita - PP	Kamijoro	51%	355.716.590	--	(528.613.217)	(172.896.627)	
Waskita - Adhi	Irigasi Sampean (Pirimp) Situbondo	45%	(87.906.454)	(381.758.153)	--	(469.664.607)	
Waskita - PP	Jembatan Sungai Brantas	43%	2.245.752.872	(2.984.883.307)	--	(739.130.435)	
Waskita - BAP	Bendungan Tapin	49%	(4.232.496.189)	--	1.234.323.529	(2.998.172.660)	
Waskita - Indah Karya	Ciadem Pamanukan	97%	(5.971.005.537)	--	--	(5.971.005.537)	
Waskita - Brantas	Pandan Duri II	51%	(16.591.018.687)	--	--	(16.591.018.687)	
Waskita - Indah Karya	Ciadem Pamanukan	97%	(16.966.915.735)	--	--	(16.966.915.735)	
Waskita - PP - HK	Jl. Tol Depok-Antasari (Desari)	34%	(23.568.653.672)	(331.487.250)	--	(23.900.140.922)	
Waskita - PP - Wika	Jembatan Merah Putih	34%	(114.659.665.704)	36	--	(114.659.665.668)	
Jumlah/ Total			63.699.213.747	48.154.206.568	19.373.098.984	131.226.519.299	

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

31 Desember 2016/ December 31, 2016					
Proyek/ Project	Persentase/ Percentage %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal/ Correction Rp	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties					
Waskita - HK - Wika	43%	33.872.776.385	297.500.000	44.664.255.090	78.634.531.475
Waskita - Wika	49%	5.148.884.438	--	15.316.781.941	20.465.666.379
Waskita - Wika	57%	19.969.525.243	--	--	19.969.525.243
Waskita - Brantas	49%	19.645.779.654	--	--	19.645.779.654
Waskita - Yodya Karya	99%	10.283.872.935	215.004.435	1.247.234.628	11.746.111.998
Waskita - Penta	98%	5.795.417.435	--	5.165.336.700	10.960.754.135
Waskita - Wika - Nindya	31%	1.047.994.371	--	9.750.411.378	10.798.405.749
Waskita - Brantas	51%	9.344.177.133	--	(516.233.679)	8.827.943.454
Waskita - PP	56%	8.331.615.337	--	20.115.840	8.351.731.177
Waskita - PP - Hutama	35%	8.074.177.465	--	--	8.074.177.465
Waskita - Adhi	45%	--	--	8.057.939.067	8.057.939.067
Waskita - Wika - PP - HK	25%	7.448.173.986	--	--	7.448.173.986
Waskita - HK	51%	4.956.995.209	(4.071.014.058)	5.654.307.824	6.540.288.975
Waskita - Brantas	51%	6.322.123.452	--	--	6.322.123.452
Waskita - Wika	51%	4.030.884.669	--	(130.528.913)	3.900.355.756
Waskita - Hutama	45%	--	--	3.519.216.387	3.519.216.387
Waskita - Wika	51%	2.903.056.992	--	204.222.805	3.107.279.797
Waskita - Wika	40%	6.132.044.399	(3.771.516.954)	--	2.360.527.445
Waskita - PP	43%	2.245.752.872	--	--	2.245.752.872
Waskita - Adhi - PP	33%	2.933.562.102	(1.013.117.219)	--	1.920.444.883
Waskita - PP	43%	2.409.534.789	(499.999.994)	--	1.909.534.795
Waskita - Adhi	55%	1.794.983.751	--	--	1.794.983.751
Waskita - Brantas	50%	1.226.486.420	--	--	1.226.486.420
Waskita - PP	51%	--	--	355.716.590	355.716.590
Waskita - PP	43%	1.560.990.141	(1.369.565.217)	--	191.424.924
Waskita - NK	60%	(1.256.143.999)	1.256.143.999	--	--
Waskita - Brantas - Wika	33%	9.442.507.232	(9.442.507.232)	--	--
Waskita - Brantas	51%	11.913.403.344	(11.913.403.344)	--	--
Waskita - PP	40%	2.249.913.079	(2.249.913.079)	--	--
Waskita - Wika	49%	(3.080.000.000)	3.080.000.000	--	--
Waskita - Brantas	65%	--	--	(718.659)	--
Waskita - Citra Mandiri	70%	--	--	(100)	--
Waskita - Adhi	45%	(87.906.454)	--	--	(87.906.454)
Waskita - Adhi - HK - Wika	25%	88.166.171	15.434.083.461	(18.120.249.632)	(2.598.000.000)
Waskita - BAP	49%	--	--	(4.232.496.189)	(4.232.496.189)
Waskita - Indah Karya	97%	(5.971.005.537)	--	--	(5.971.005.537)
Waskita - Brantas	51%	(2.883.018.687)	--	(13.708.000.000)	(16.591.018.687)
Waskita - Indah Karya	97%	(16.966.915.735)	--	--	(16.966.915.735)
Waskita - PP - HK	34%	4.846.457.146	--	(28.415.110.811)	(23.568.653.672)
Waskita - PP - Wika	34%	(84.511.421.543)	--	(30.148.244.161)	(114.659.665.704)
Jumlah/ Total		79.262.844.195	(14.047.586.547)	(1.516.043.901)	63.699.213.747

31 Desember 2015/ December 31, 2015					
Proyek/ Project	Persentase/ Percentage %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal/ Correction Rp	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties					
Waskita - HK - Wika	43%	--	--	33.872.776.385	33.872.776.385
Waskita - Wika	57%	19.969.525.243	--	--	19.969.525.243
Waskita - Brantas	49%	19.645.779.654	--	--	19.645.779.654
Waskita - Brantas	51%	7.882.170.962	--	4.031.232.382	11.913.403.344
Waskita - Yodya Karya	99%	27.519.525.400	--	(17.235.652.465)	10.283.872.935
Waskita - Brantas - Wika	33%	9.390.336.363	--	52.170.869	9.442.507.232
Waskita - Brantas	51%	--	--	9.344.177.133	9.344.177.133
Waskita - PP	56%	8.212.048.456	--	119.566.881	8.331.615.337
Waskita - PP - Hutama	35%	8.074.177.465	--	--	8.074.177.465
Waskita - Wika - PP - HK	25%	7.448.173.986	--	--	7.448.173.986
Waskita - Brantas	51%	6.322.123.452	--	--	6.322.123.452
Waskita - Wika	40%	12.055.958.270	(7.827.841.739)	1.903.927.868	6.132.044.399
Waskita - Penta	98%	--	(978.490.955)	6.773.908.390	5.795.417.435
Waskita - Wika	49%	--	(17.500.000.000)	22.648.884.438	5.148.884.438
Waskita - HK	51%	--	1.629.095.209	3.327.900.000	4.956.995.209
Waskita - PP - HK	34%	1.478.536.558	331.487.250	3.036.433.338	4.846.457.146
Waskita - Wika	51%	4.782.875.756	--	(751.991.087)	4.030.884.669
Waskita - Adhi - PP	33%	2.933.562.102	--	--	2.933.562.102
Waskita - Wika	51%	--	468.500.000	2.434.556.992	2.903.056.992
Waskita - PP	43%	--	2.409.534.789	--	2.409.534.789
Waskita - PP	40%	--	--	2.249.913.079	2.249.913.079
Waskita - PP	43%	4.848.665.260	(2.602.912.388)	--	2.245.752.872
Waskita - Adhi	55%	3.644.332.790	(1.849.349.039)	--	1.794.983.751
Waskita - PP	43%	--	(2.585.925.523)	4.146.915.664	1.560.990.141
Waskita - Brantas	50%	1.226.486.420	--	--	1.226.486.420
Waskita - Wika - Nindya	31%	--	--	1.047.994.371	1.047.994.371
Waskita - Adhi - HK - Wika	25%	88.166.171	--	--	88.166.171
Waskita - HK	51%	3.093.752.897	(3.093.752.897)	--	--
Waskita - Brantas	49%	2.972.342.312	(2.972.342.312)	--	--
Waskita - Adhi	45%	(87.906.454)	--	--	(87.906.454)
Waskita - NK	60%	--	1	(1.256.144.000)	(1.256.143.999)
Waskita - Brantas	51%	(2.883.018.687)	--	--	(2.883.018.687)
Waskita - Wika	49%	--	(3.080.000.000)	--	(3.080.000.000)
Waskita - Indah Karya	97%	--	--	(5.971.005.537)	(5.971.005.537)
Waskita - Indah Karya	97%	(6.951.069.869)	(10.015.845.866)	--	(16.966.915.735)
Waskita - PP - Wika	34%	(11.940.768.716)	--	(72.570.652.827)	(84.511.421.543)
Jumlah/ Total		129.725.775.791	(47.667.843.470)	(2.795.088.126)	79.262.844.195

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Rincian saldo investasi ventura bersama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Details of investment in joint ventures with third parties are as follows:

31 Maret 2017/ March 31, 2017					
Projek/ Project	Persentase/ Percentage	Saldo Awal/ Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal)/ Correction	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties					
WKR - Asiana	51%	338.711.013.572	378.405.659	451.728	339.089.870.959
WKR - Darmo Permai	51%	260.261.272.475	8.187.836.252	2.145.929.810	270.595.038.537
WKR - Ekutama	60%	–	129.858.068.999	3.054.292	129.861.123.291
Waskita - Wika - PP - Jaya	45%	95.108.488.231	775.369.262	11.102.109	95.894.959.602
Waskita - Trinita	40,8%	92.691.467.305	–	10.904.833	92.702.372.138
WKR - Sirius	51%	74.953.088.246	10.507.031	2.646.329.046	77.609.924.323
WKR - Dalawa	41%	75.737.010.225	(10.577.696.455)	–	65.159.313.770
Waskita - JPC	68%	61.687.353.440	3.330.691.800	–	65.018.045.240
Waskita - Brantas	80%	36.538.276.678	–	–	36.538.276.678
Waskita - Arkonin	70%	32.028.251.260	37.880	(37.879)	32.028.251.261
Waskita - Yasa	100%	20.748.285.170	–	2.156.342.276	22.904.627.446
Waskita - Basuki Rahmana Putra	60%	–	21.328.737.599	–	21.328.737.599
WBP - Jakon	60%	17.819.135.117	–	(2.345.983.741)	15.473.151.376
Waskita - Abdi Mulia Berkah	70%	–	14.623.385.123	664.957.655	15.288.342.778
Waskita - Bawakaraeng	70%	7.140.621.695	(1)	1.393.258.551	8.533.880.245
Waskita - Wika - Shanghai	10%	7.312.086.132	–	–	7.312.086.132
Waskita - Cempaka	55%	4.856.834.059	–	1.558.544.011	6.415.378.070
Waskita - Wika - IPA	33%	6.101.466.165	–	–	6.101.466.165
Waskita - IHC	99%	6.057.872.365	–	–	6.057.872.365
Waskita - Baswara - Mahir Jaya	100%	5.805.911.452	–	–	5.805.911.452
Waskita - Sinar Intan	75%	5.658.241.837	–	–	5.658.241.837
Waskita - HK	51%	3.398.250.480	–	1.982.887.198	5.381.137.678
Waskita - Daelim - Wika	65%	5.031.789.611	–	–	5.031.789.611
Waskita - Surya Bakti	60%	(145.149.760)	1.909.534.789	3.197.566.571	4.961.951.600
Waskita - Luhribu	55%	4.529.077.329	–	–	4.529.077.329
Waskita - Usaha Batanghari	63%	3.543.677.424	–	–	3.543.677.424
Waskita - Witada Bangun Gemilang	55%	3.509.212.953	–	–	3.509.212.953
Waskita - PP - Deltamarga	45%	2.784.798.707	308.429.626	–	3.093.228.333
Waskita - Siwa Prestasi	55%	2.991.566.035	–	–	2.991.566.035
Waskita - Panca Duta	51%	2.829.354.310	–	–	2.829.354.310
Waskita - Adi Jaya Lima Pradana	55%	2.790.349.272	–	–	2.790.349.272
Waskita - Lombok I.P	51%	2.722.234.086	–	–	2.722.234.086
WKR - RNI	96%	–	1.418.921.967	(912.957)	1.418.009.010
Waskita - Nindya - Sacna	40%	1.296.132.700	–	–	1.296.132.700
Waskita - Tokyo	40%	(982.365.052)	1.670.224.251	–	687.859.199
Waskita - Tepat Guna	51%	651.113.247	–	–	651.113.247
Waskita - IHC	99%	327.351.926	–	–	327.351.926
Waskita - Eka Praya	51%	200.000.000	–	–	200.000.000
Waskita - Lombok I.P	51%	62.219.661	–	–	62.219.661
Waskita - Ricky Kencana	70%	1.134.927	–	–	1.134.927
Waskita - Yasa	55%	2.500.536.820	(2.500.536.820)	–	–
Waskita - metallungical - Wika - NK	8%	1.965.713.886	(1.965.713.886)	–	–
Waskita - Rindang	55%	1.052.050.539	(1.052.050.539)	–	–
Waskita - Wika - IPA	33%	(4.747.226.520)	4.747.226.520	–	–
Waskita - Tirta	67%	(44.888)	–	–	(44.888)
Waskita - CPA	65%	(433.926)	–	–	(433.926)
Waskita - Pangkho	75%	(21.191.162)	–	–	(21.191.162)
Waskita - Jaya - Nusantara	80%	(32.628.891)	–	–	(32.628.891)
Waskita - Lombok I.P	51%	(62.219.661)	–	–	(62.219.661)
Waskita - Kega	70%	(168.986.561)	–	–	(168.986.561)
Waskita - Indopenta	60%	(282.000.000)	(18.000.000)	–	(300.000.000)
Waskita - Larasati	55%	(1.604.585.800)	–	–	(1.604.585.800)
Waskita - JPC	68%	1.658.179.841	(3.552.249.721)	–	(1.894.069.880)
Waskita - Feberco	60%	–	(1.982.834.853)	–	(1.982.834.853)
Waskita - Rimba - Marinda	51%	(2.130.903.250)	–	–	(2.130.903.250)
Waskita - Gorip Nanda Guna	60%	–	–	(2.781.129.868)	(2.781.129.868)
Waskita - CPA	65%	(3.939.456.385)	–	–	(3.939.456.385)
Waskita - Perdasa - Buluh - Larasati	30%	(4.330.834.275)	–	–	(4.330.834.275)
Waskita - Modern	60%	157.345.739	(4.747.226.520)	–	(4.589.880.781)
Waskita - Daya Mulia Turangga	60%	(6.862.170.380)	–	–	(6.862.170.380)
Waskita - Yasa	70%	(9.244.526.918)	931.314.741	–	(8.313.212.177)
Waskita - ZUG	40%	(9.092.558.766)	549.116.143	–	(8.543.442.623)
Waskita - Andesmont	70%	–	(11.802.540.050)	–	(11.802.540.050)
Waskita - PAL	75%	(44.397.017.721)	(34)	–	(44.397.017.755)
Waskita - Kajima	40%	(35.942.640.448)	14.944.737.740	(25.002.087.197)	(45.999.989.905)
Jumlah/ Total		1.069.231.824.553	166.773.696.503	(14.358.823.562)	1.221.646.697.494

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

31 Desember 2016/ December 31, 2016					
Proyek/ Project	Persentase/ Percentage	Saldo Awal/ Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement/ (Withdrawal)/ Correction	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties					
WKR - Asiana	Virro Senopati	51%	338.704.373.647	172.886	338.711.013.572
WKR - Darmo Permai	Segi 88 Avenue	51%	261.741.648.939	(8.114.261.166)	260.261.272.475
Waskita - Wika - PP - Jaya	Gd. Terminal 3	45%	94.656.010.965	144.298.740	95.108.488.231
Waskita - Trinita	Alam Sutra	51%	74.165.792.905	--	92.691.467.305
WKR - Dalawa	Zallaka - Batu Tumpeng	41%	64.550.908.795	11.220.104.324	75.737.010.225
WKR - Sirius	Yukata Suites	51%	49.613.872.123	16.686.418.516	74.953.088.246
Waskita - JPC	SMM Muara Teweh Div.Sipil	68%	65.018.099.305	--	61.687.353.440
Waskita - Brantas	Terminal Selatan Bandara Djuanda (Thp 2)	80%	36.537.949.783	--	36.538.276.678
Waskita - Arkonin	Renov. Bandara Ngurah Rai	70%	32.143.025.714	--	32.028.251.260
Waskita - Basuki Rahmana Putra	Dredging & Embankmen	60%	5.685.204.172	(5.685.204.172)	--
Waskita - Yasa	Jl. Galing Aruk	100%	6.265.419.181	--	20.748.285.170
WBP - Jakon	Normalisasi Turap Pasar Lama	60%	--	1.103.514.000	17.819.135.117
Waskita - Wika - Shanghai	Jl. Tol Cisumdawu	10%	9.399.783.534	--	7.312.086.132
Waskita - Bawakaraeng	Irigasi D.I. Batang Alay	70%	(2.066.348.743)	--	7.140.621.695
Waskita - Wika - IPA	Dermaga Semarang	33%	6.101.466.165	--	6.101.466.165
Waskita - IHC	Pengadaan Dredger	99%	6.057.872.365	--	6.057.872.365
Waskita - Baswara - Mahir Jaya	Tulur Aji Jangkat	100%	5.805.911.452	--	5.805.911.452
Waskita - Sinar Intan	PDAM Tanah Grogot	75%	10.475.510.596	--	5.658.241.837
Waskita - Daelim - Wika	Karian Multipurpose Dam Project	65%	--	--	5.031.789.611
Waskita - Cempaka	Bendung Baliase	55%	(158.866.022)	--	4.856.834.059
Waskita - Luhribu	Reservoir Bdg MA Kayu	55%	4.013.077.329	516.000.000	4.529.077.329
Waskita - Abdi Mulia Berkah	Sal Primer Jabung II	70%	570.355.537	(570.355.537)	--
Waskita - Usaha Batanghari	Jembt. Muara Sabak	63%	3.543.677.424	--	3.543.677.424
Waskita - Witada Bangun Gemilang	Timbunan Tanah Bandara Mutiara	55%	3.509.212.953	--	3.509.212.953
Waskita - Siwa Prestasi	Faspela Pantoloan 2013	55%	2.991.566.035	--	2.991.566.035
Waskita - Panca Duta	Peningktn Jln Kambuaya-Klamono	51%	2.829.354.310	--	2.829.354.310
Waskita - Adi Jaya Lima Pradana	Pengendalian Sedimen Bawakaraeng	55%	2.790.349.272	--	2.790.349.272
Waskita - PP - Deltamarga	Jl. Pesisir (Coastal Road Construction)	45%	2.784.798.707	--	2.784.798.707
Waskita - HK	Sal Induk Siderejo	51%	2.763.670.866	--	3.398.250.480
Waskita - Lombok I.P	Jln Gerung - Mataram 4	51%	2.722.234.086	--	2.722.234.086
Waskita - Yasa	Bandara Kalimarau	55%	--	134.327.565	2.500.536.820
Waskita - metallurgical - Wika - NK	Jl Tol Cisumdawu Phase 2	8%	1.323.941.030	--	1.965.713.886
Waskita - JPC	SMM Muara Teweh Div EPC	68%	1.658.073.239	(55.551)	1.658.179.841
Waskita - Nindya - Saena	Irigasi Sapon	40%	1.296.132.700	--	1.296.132.700
Waskita - Rindang	Jl T Besar Bujung Tenuk	55%	1.052.050.539	--	1.052.050.539
Waskita - Tepat Guna	Pelebaran Jl. Ampenan-Pemenang	51%	651.113.247	--	651.113.247
Waskita - IHC	Pengadaan Dredger	99%	327.351.926	--	327.351.926
Waskita - Eka Praya	Jl. Akses Bill Thp II	51%	200.000.000	--	200.000.000
Waskita - Modern	Dermaga Peti Kemas (CY-01)	60%	157.345.739	--	157.345.739
Waskita - Lombok I.P	Jembatan Padolo Cs	51%	1.000.049.232	(937.829.571)	62.219.661
Waskita - Ricky Kencana	Underpass Simpang Patai-Pusri	70%	858.248.680	(524.660.283)	1.134.927
Waskita - Indopenta	Drainase Pekalongan	60%	4.246.873	(4.246.873)	--
Waskita - Statika Mitrasarana	Jalan Sicincin - Malalaki	80%	9.093.592.949	(9.093.592.949)	--
Waskita - Bina Baraga	Ktr Pemda Ogan Hilir	55%	(249.093.954)	249.093.954	--
Waskita - Usaha Batanghari	FO Jl. Gajah Mada - Juanda	55%	985.883.855	(985.883.855)	--
Waskita - Kumodo Intan	Waduk Rajui	70%	(131.179.752)	131.179.752	--
Waskita - Lombok I.P	Jln Lembar - Sekotong - Pelangan	51%	1.863.467.010	(1.863.467.010)	--
Waskita - Manunggal Pratama Mandiri	Pelabuhan Laut Manokwari	45%	--	1.514.469.555	(1.514.469.555)
Waskita - Tirta	Struktur Dalam Jl. Pontianak	67%	(44.888)	--	(44.888)
Waskita - CPA	Sandai Nanga Tayap Kalbar	65%	(433.926)	--	(433.926)
Waskita - Pangkho	BNN Makassar	75%	(3.672.246.730)	3.651.055.568	(21.191.162)
Waskita - Jaya - Nusantara	Jl. Arteri Siring - Porong Paket 1	80%	586.882.781	(619.511.672)	(32.628.891)
Waskita - Lombok I.P	Jembatan Soril Lan Cs	51%	655.571.198	(717.790.859)	(62.219.661)
Waskita - Surya Bakti	Jalan Pendekat Mahakam IV Sisi Samarinda Kota (MYC)	60%	--	--	(145.149.760)
Waskita - Kega	Harris Hotel Yogya	70%	(168.986.561)	--	(168.986.561)
Waskita - Indopenta	Drainase Pekalongan	60%	(300.000.000)	18.000.000	(282.000.000)
Waskita - Tokyo	FO Merak Balaraja	40%	--	--	(982.365.052)
Waskita - Feberco	PLN Curup	60%	255.168.115	(255.168.115)	--
Waskita - Larasati	Pengend Banjir Karang Asam	55%	(1.604.585.800)	--	(1.604.585.800)
Waskita - Rimba - Marinda	Tol Balikpapan-Samarinda	51%	(2.130.903.250)	--	(2.130.903.250)
Waskita - CPA	Spam Samarinda Utara	65%	385.921.816	(1.112.501.882)	(3.939.456.385)
Waskita - Perdasa - Buluh - Larasati	Jl. Talisayan - Batu Lepok	30%	(5.472.834.275)	1.142.000.000	(4.330.834.275)
Waskita - Wika - IPA	Dermaga Semarang	33%	2.044.347.298	(6.791.573.818)	(4.747.226.520)
Waskita - Daya Mulia Turangga	Ipuh Bantal Roads	60%	1.375.016.504	--	(8.237.186.884)
Waskita - ZUG	PLTU Rote	40%	(9.037.932.902)	--	(9.037.932.902)
Waskita - Yasa	Bandara Kuala namu	70%	(4.173.311.520)	12.583.046.305	(17.654.261.704)
Waskita - Andesmont	Jl. Kebayan - Simpang Kraft	70%	3.583.845.697	(3.583.845.697)	--
Waskita - PAL	PLTU Malinau	75%	(26.360.712.892)	36	(44.397.017.721)
Waskita - Kajima	E2 Cilincing - Jamepa	40%	1.505.272.354	7.100.000.000	(35.942.640.448)
Jumlah/ Total			1.070.777.187.727	15.333.732.191	(16.879.095.363)
					1.069.231.824.553

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

31 Desember 2015/ December 31, 2015					
Proyek/ Project	Persentase/ Percentage %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal)/ Correction Rp	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties					
WKR - Senopati	51%	--	338.853.745.621	(149.371.974)	338.704.373.647
WKR - Darma Permai	51%	164.920.921.612	96.816.352.633	4.374.694	261.741.648.939
Waskita - Wika - PP - Jaya	45%	76.395.525.887	(14.067.070.994)	32.327.556.072	94.656.010.965
Waskita - Trinita	51%	74.528.554.014	(74.355.864.024)	73.993.102.915	74.165.792.905
Waskita - JPC	68%	68.028.878.004	--	(3.010.778.699)	65.018.099.305
WKR - Dalawa	41%	--	64.636.479.174	(85.570.379)	64.550.908.795
WKR - Trinita	51%	--	51.575.508.580	(1.961.636.457)	49.613.872.123
Waskita - Brantas	80%	40.967.911.944	--	(4.429.962.161)	36.537.949.783
Waskita - Arkonin	70%	29.728.176.294	--	2.414.849.420	32.143.025.714
Waskita - Sinar Intan	75%	14.102.291.399	--	(3.626.780.803)	10.475.510.596
Waskita - Wika - Shanghai	10%	7.665.740.311	--	1.734.043.223	9.399.783.534
Waskita - Statika Mitrasarana	80%	9.093.592.949	--	--	9.093.592.949
Waskita - Yasa	100%	1.760.667.854	--	4.504.751.327	6.265.419.181
Waskita - Wika - IPA	33%	6.101.466.165	--	--	6.101.466.165
Waskita - IHC	99%	6.057.872.365	--	--	6.057.872.365
Waskita - Baswara - Mahir Jaya	100%	5.227.211.422	578.700.030	--	5.805.911.452
Waskita - Basuki Rahmana Putra	60%	--	--	5.685.204.172	5.685.204.172
Waskita - Luhribu	55%	4.678.836.637	(665.759.308)	--	4.013.077.329
Waskita - Andesmont	70%	4.506.710.877	--	(922.865.180)	3.583.845.697
Waskita - Usaha Batanghari	63%	4.144.397.943	(600.720.519)	--	3.543.677.424
Waskita - Witada Bangun Gemilang	55%	3.509.212.953	--	--	3.509.212.953
Waskita - Siwa Prestasi	55%	2.991.566.035	--	--	2.991.566.035
Waskita - Panca Duta	51%	2.829.354.310	--	--	2.829.354.310
Waskita - Adi Jaya Lima Pradana	55%	2.790.349.272	--	--	2.790.349.272
Waskita - PP - Deltamarga	45%	--	2.336.940.500	447.858.207	2.784.798.707
Waskita - HK	51%	--	--	2.763.670.866	2.763.670.866
Waskita - Lombok I.P	51%	5.722.234.086	(3.000.000.000)	--	2.722.234.086
Waskita - Lombok I.P	51%	2.863.467.010	(1.000.000.000)	--	1.863.467.010
Waskita - JPC	68%	2.534.646.089	(327.558.222)	(549.014.628)	1.658.073.239
Waskita - Kajima	40%	71.594.344.592	7.163.888.552	(77.252.960.790)	1.505.272.354
Waskita - Daya Mulia Turangga	60%	1.375.016.504	94.162.679	(94.162.679)	1.375.016.504
Waskita - metallurgical - Wika - NK	8%	--	--	1.323.941.030	1.323.941.030
Waskita - Nindya - Sacna	40%	1.296.132.700	--	--	1.296.132.700
Waskita - Rindang	55%	1.052.050.539	--	--	1.052.050.539
Waskita - Lombok I.P	51%	2.632.049.232	(1.632.000.000)	--	1.000.049.232
Waskita - Usaha Batanghari	55%	985.883.855	--	--	985.883.855
Waskita - Ricky Kencana	70%	4.140.518.878	(228.623.192)	(3.053.647.006)	858.248.680
Waskita - Lombok I.P	51%	2.185.571.198	(1.530.000.000)	--	655.571.198
Waskita - Tepat Guna	51%	1.194.804.072	(543.690.825)	--	651.113.247
Waskita - Jaya - Nusantara	80%	1.386.882.781	(800.000.000)	--	586.882.781
Waskita - Abdi Mulia Berkah	70%	--	--	570.355.537	570.355.537
Waskita - CPA	65%	385.921.816	--	--	385.921.816
Waskita - IHC	99%	--	--	327.351.926	327.351.926
Waskita - Feberco	60%	92.041.155	--	163.126.960	255.168.115
Waskita - Eka Praya	51%	200.000.000	--	--	200.000.000
Waskita - Modern	60%	503.344.219	(345.998.480)	--	157.345.739
Waskita - Wika - IPA	33%	--	--	2.044.347.298	2.044.347.298
Waskita - Indopenta	60%	--	4.246.873	--	4.246.873
Waskita - PP - Deltamarga	45%	2.245.752.835	(2.245.752.835)	--	--
Waskita - Tirta	67%	(44.888)	--	--	(44.888)
Waskita - CPA	65%	(433.926)	--	--	(433.926)
Waskita - Kumodo Intan	70%	(285.434.202)	154.254.450	--	(131.179.752)
Waskita - Cempaka	55%	--	1	(158.866.023)	(158.866.023)
Waskita - Kega	70%	1.852.194.894	(2.021.181.455)	--	(168.986.561)
Waskita - Bina Baraga	55%	(249.093.954)	--	--	(249.093.954)
Waskita - Indopenta	60%	(295.753.127)	(4.246.873)	--	(300.000.000)
Waskita - Larasati	55%	(1.604.585.800)	--	--	(1.604.585.800)
Waskita - Bawakaraeng	70%	--	1	(2.066.348.744)	(2.066.348.743)
Waskita - Rimba - Maninda	51%	(2.130.903.250)	--	--	(2.130.903.250)
Waskita - Pangkho	75%	(3.672.246.730)	--	--	(3.672.246.730)
Waskita - Yasa	70%	(549.556.588)	(381.758.153)	(3.241.996.779)	(4.173.311.520)
Waskita - Perdasa - Buluh - Larasati	30%	(5.472.834.275)	--	--	(5.472.834.275)
Waskita - ZUG	40%	(7.861.675.531)	--	(1.176.257.371)	(9.037.932.902)
Waskita - PAL	75%	(14.230.702.489)	--	(12.130.010.405)	(26.360.712.894)
Jumlah/ Total		597.918.829.942	458.464.054.214	14.394.303.569	1.070.777.187.725

Tidak terdapat perubahan kepemilikan atau hak suara Grup untuk tahun-tahun yang dilaporkan.

There has been no change in the Group's ownership or voting interests in these joint ventures for the reported years.

Seluruh entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dalam laporan keuangan interim konsolidasian ini.

All of the above associates are accounted for using the equity method in these consolidated interim financial statements.

Operasi bersama

Joint Operation

Perusahaan mempunyai 15% bagian dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium Dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Terminal *Multipurpose* dan Fasilitas Pendukung di Pelabuhan Kuala Tanjung di Propinsi Sumatera Utara. Perusahaan berhak atas proporsi bagian dari penghasilan dan dikenakan proporsi bagian dari biaya operasi bersama.

The Company has a 15% share in the Consortium Agreement for the Construction of Multipurpose Port and Support Facilities at the Port of Kuala Tanjung in North Sumatera Province. The Company is entitled to a proportionate share of the income and bears a proportionate share of the joint operating's expenses.

14. PROPERTI INVESTASI

14. INVESTMENT PROPERTIES

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Harga Perolehan				Acquisition Cost
Tanah	22.187.309	107.994.333	107.994.333	Land
Bangunan	34.437.486.273	167.620.750.539	167.620.750.539	Building
Jumlah Harga Perolehan	34.459.673.582	167.728.744.872	167.728.744.872	Total Acquisition Cost
Nilai Wajar				Fair Value
Tanah	16.272.574.198	79.205.000.000	79.205.000.000	Land
Bangunan	37.137.956.882	180.765.000.000	180.765.000.000	Building
Total Nilai Wajar	53.410.531.080	259.970.000.000	259.970.000.000	Total Fair Value
Pengurangan	--	(206.559.468.920)	--	Deduction
Jumlah Properti Investasi	53.410.531.080	53.410.531.080	259.970.000.000	Total Investment Properties

Properti investasi merupakan proyek gedung perkantoran dan hotel Cawang dalam pengembangan, yang berlokasi di Jalan MT Haryono Cawang, dengan luas lahan sebesar 3.650m².

Property investments consist of office building and Cawang hotel project under development, located in Jalan MT Haryono Cawang, lying on a land area of 3,650sqm.

Terdapat pengalihan properti investasi milik Perusahaan menjadi penambahan penyertaan pada WKR, entitas anak, melalui pengalihan kepemilikan (*inbreng*) berdasarkan akta notaris Yusdin Fahim, S.H., No. 19 tanggal 26 Februari 2016 dengan nilai wajar sebesar Rp 259.970.000.000.

There is a transfer of the Company's investment properties as an additional investment in WKR a subsidiary, through transfer of ownership (inbreng), based on notarial deed by Notary Yusdin Fahim, S.H., No. 19 dated February 26, 2016 with fair value of Rp 259,970,000,000.

Pada tahun 2016, berdasarkan surat persetujuan dari Komisaris WKR No. 001.1/WKR/DK/2016, terdapat persetujuan pengalihan sebagian dari properti investasi dengan nilai Rp 206.559.468.920 untuk dialihkan sebagai aset tetap yang peruntukkan sebagai hotel, pengalihan ini disajikan dalam penambahan aset tetap (Catatan 16).

In 2016, based on approval letter from the Commissioners of WKR No. 001.1/WKR/DK/2016, there are approval to transfer a portion of investment properties amounted to Rp 206,559,468,920, to be transferred as fixed assets with it's designation as hotel, this transfer presented in addition of fixed assets (Note 16).

Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai wajar properti investasi WKR, entitas anak adalah sebesar Rp 259.970.000.000 berdasarkan laporan penilaian tertanggal 8 Januari 2016 dari KJPP Asrori & Rekan, penilai independen.

As of December 31, 2015, the fair value of the investment properties WKR, a subsidiary amounted to Rp 259,970,000,000 respectively, and has been arrived based on the valuation report dated January 8, 2016 of KJPP Asrori & Rekan, independent appraiser.

15. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA

15. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
PT Prima Multi Terminal	212.622.000.000	212.622.000.000	107.222.000.000
PT Citra Wasphutowa	193.532.046.393	193.532.046.393	175.000.000.000
PT Citra Karya Jabar Tol	15.000.000.000	--	--
PT Jasamarga Kualanamu Tol *)	--	142.250.000.000	18.000.000.000
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	--	--	240.000.000.000
Jumlah/ Total	421.154.046.393	548.404.046.393	540.222.000.000

Rincian mutasi investasi jangka panjang lainnya sebagai berikut:

The detail of mutation of other long-term investment are as follows:

	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Saldo Awal/ Beginning Balance 31 Desember 2016/ December 31, 2016	Penambahan (Pengurangan) Addition (Deduction) 31 Maret 2017/ March 31, 2017	Saldo Akhir 31 Maret 2017/ Ending Balance March 31, 2017
	%	Rp	Rp	Rp
PT Prima Multi Terminal	20,00%	212.622.000.000	--	212.622.000.000
PT Citra Wasphutowa	12,50%	193.532.046.393	--	193.532.046.393
PT Jasamarga Kualanamu Tol *)	15,00%	142.250.000.000	(142.250.000.000)	--
PT Citra Karya Jabar Tol	15,00%	--	15.000.000.000	15.000.000.000
Jumlah/ Total		548.404.046.393	(127.250.000.000)	421.154.046.393

*) Reklasifikasi ke investasi pada Entitas Asosiasi

*) Reclassified to Investments in Associates Entities

	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Saldo Awal/ Beginning Balance 31 Desember 2015/ December 31, 2015	Penambahan (Pengurangan) Addition (Deduction) 31 Desember 2016/ December 31, 2016	Saldo Akhir 31 Desember 2016/ Ending Balance December 31, 2016
	%	Rp	Rp	Rp
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	60,00%	240.000.000.000	(240.000.000.000)	--
PT Prima Multi Terminal	20,00%	107.222.000.000	105.400.000.000	212.622.000.000
PT Citra Wasphutowa	12,50%	175.000.000.000	18.532.046.393	193.532.046.393
PT Jasamarga Kualanamu Tol	15,00%	18.000.000.000	124.250.000.000	142.250.000.000
Jumlah/ Total		540.222.000.000	8.182.046.393	548.404.046.393

PT Prima Multi Terminal (PMT)

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 20,00% pada PMT atau setara Rp 26.100.000.000. Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian No. 04 tanggal 26 September 2014 dari Notaris Tuti Sumarni, S.H., MH, bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 16 Desember 2015 dari notaris Tuti Sumarni, S.H., MH, PT Perumahan Pembangunan Tbk melakukan penjualan sebagian saham sebanyak 5% yang dimiliki didalam PMT atau sebesar Rp 9.150.000.000.

PT Citra Waspphutowa (CW)

Perusahaan dan WTR masing-masing memiliki penyertaan sebesar 12,50% pada CW atau setara Rp 50.000.000.000 yang didirikan sesuai Akta Pendirian No. 10 tanggal 13 Januari 2006 dari Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., MH, bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.

PT Citra Karya Jabar Tol (CKT)

WTR memiliki penyertaan sebesar 15,00% dari modal CKT atau sebesar Rp 15.000.000.000. PT Citra Karya Jabar Tol didirikan sesuai Akta Pendirian No. 18 tanggal 30 Januari 2017 dari Notaris Dessi, S.H., M.Kn., bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.

PT Prima Multi Terminal (PMT)

The Company has investments of 20.00% in PMT or equal to Rp 26,100,000,000. The company was established under the Notarial Deed of Establishment No. 04 dated September 26, 2014 of Notary Tuti Sumarni, S.H., MH, engaged in trading and services.

Based on Notarial Deed No. 6 dated December 16, 2015 of notary Tuti Sumarni, S.H., MH, PT Perumahan Pembangunan Tbk sale some of its own shares on PMT amounted to 5% or equivalent to Rp 9,150,000,000.

PT Citra Waspphutowa (CW)

The Company and WTR each owns investment of 12.50% in CW or equivalent to Rp 50,000,000,000. This entity was established based on the Notarial Deed No. 10 dated January 13, 2006 of Notary Drs. Soegeng Santosa, S.H., MH, engaged in toll concession right.

PT Citra Karya Jabar Tol (CKT)

WTR owns investment equivalent to 15.00% of CKT paid in capital or amounted to Rp 15,000,000,000. PT Citra Karya Jabar Tol was established based on the Notarial Deed No. 18 dated January 30, 2017 of Dessi, S.H., M.Kn. and engaged in toll road concession.

16. ASET TETAP - BERSIH

16. FIXED ASSETS - NET

31 Maret 2017/ March, 31 2017						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Revaluasi/ Revaluation	Pengurangan/ Deduction	Hapus buku/ Written Off	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	967.913.020.311	--	--	--	967.913.020.311	Land
Gedung	316.814.062.131	44.332.820.775	--	--	361.146.882.906	Building
Pabrik	354.781.322.737	--	--	--	354.781.322.737	Plant
Perlengkapan Kantor	33.393.768.285	3.539.008.159	--	--	36.932.776.444	Office Supplies
Peralatan Proyek	1.427.356.521.367	82.728.750.443	--	--	1.510.085.271.810	Project Equipments
Kendaraan	27.062.882.568	353.768.182	--	--	27.416.650.750	Vehicles
Jumlah	3.127.321.577.399	130.954.347.559	--	--	3.258.275.924.958	Total
Aset dalam Pelaksanaan						Assets in Progress
Gedung, Pabrik, dan Peralatan Proyek	735.148.352.168	161.781.637.681	--	--	896.929.989.849	Building, Plant Project Equipments
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gedung	68.455.565.556	3.998.325.995	--	--	72.453.891.551	Building
Pabrik	2.183.201.464	2.607.573.353	--	--	4.790.774.817	Plant
Perlengkapan Kantor	21.065.183.152	1.463.382.427	--	--	22.528.565.579	Office Supplies
Peralatan Proyek	484.483.040.175	74.657.037.694	--	--	559.140.077.869	Project Equipments
Kendaraan	10.947.751.252	1.106.310.934	--	--	12.054.062.186	Vehicles
Jumlah	587.134.741.599	83.832.630.403	--	--	670.967.372.002	Total
Nilai Buku	3.275.335.187.968				3.484.238.542.805	Book Value

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

31 Desember 2016/ December 31, 2016							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Revaluasi/ Revaluation	Pengurangan/ Deduction	Hapus buku/ Written Off	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Tanah	536.520.330.000	431.392.690.311	--	--	--	967.913.020.311	Land
Gedung	190.578.174.470	126.235.887.661	--	--	--	316.814.062.131	Building
Pabrik	28.557.974.359	326.223.348.378	--	--	--	354.781.322.737	Plant
Perlengkapan Kantor	25.502.014.103	7.891.754.182	--	--	--	33.393.768.285	Office Supplies
Peralatan Proyek	837.927.095.896	589.429.425.471	--	--	--	1.427.356.521.367	Project Equipments
Kendaraan	13.977.146.066	13.085.736.502	--	--	--	27.062.882.568	Vehicles
Jumlah	1.633.062.734.894	1.494.258.842.505	--	--	--	3.127.321.577.399	Total
Aset dalam Pelaksanaan							Assets in Progress
Gedung, Pabrik, dan Peralatan Proyek	679.292.961.039	78.827.895.750	--	22.584.695.070	387.809.551	735.148.352.168	Building, Plant and Project Equipment
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Gedung	57.119.874.473	11.335.691.083	--	--	--	68.455.565.556	Building
Pabrik	794.309.906	1.388.891.558	--	--	--	2.183.201.464	Plant
Perlengkapan Kantor	16.193.709.851	4.871.473.301	--	--	--	21.065.183.152	Office Supplies
Peralatan Proyek	306.066.347.737	178.416.692.438	--	--	--	484.483.040.175	Project Equipments
Kendaraan	9.037.458.512	1.910.292.740	--	--	--	10.947.751.252	Vehicles
Jumlah	389.211.700.479	197.923.041.120	--	--	--	587.134.741.599	Total
Nilai Buku	1.923.143.995.454					3.275.335.187.968	Book Value

31 Desember 2015/ December 31, 2015							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Revaluasi/ Revaluation	Pengurangan/ Deduction	Hapus buku/ Written Off	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Tanah	77.415.334.843	26.085.702.200	433.019.292.957	--	--	536.520.330.000	Land
Gedung	74.673.298.033	41.552.311.315	74.352.565.122	--	--	190.578.174.470	Building
Pabrik	6.979.484.297	21.578.490.062	--	--	--	28.557.974.359	Plant
Perlengkapan Kantor	15.323.365.035	10.178.649.068	--	--	--	25.502.014.103	Office Supplies
Peralatan Proyek	498.574.943.437	339.352.152.459	--	--	--	837.927.095.896	Project Equipments
Kendaraan	12.042.365.535	5.519.675.000	--	3.584.894.469	--	13.977.146.066	Vehicles
Jumlah	685.008.791.180	444.266.980.104	507.371.858.079	3.584.894.469	--	1.633.062.734.894	Total
Aset dalam Pelaksanaan							Assets in Progress
Gedung, Pabrik, dan Peralatan Proyek	186.328.859.047	495.093.924.968	--	2.129.822.976	--	679.292.961.039	Building, Plant and Project Equipment
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Gedung	51.966.400.695	5.153.473.778	--	--	--	57.119.874.473	Building
Pabrik	58.162.369	736.147.537	--	--	--	794.309.906	Plant
Perlengkapan Kantor	8.746.791.630	7.446.918.221	--	--	--	16.193.709.851	Office Supplies
Peralatan Proyek	178.415.985.913	127.650.361.824	--	--	--	306.066.347.737	Project Equipments
Kendaraan	10.358.474.065	1.731.731.846	--	3.052.747.399	--	9.037.458.512	Vehicles
Jumlah	249.545.814.672	142.718.633.206	--	3.052.747.399	--	389.211.700.479	Total
Nilai Buku	621.791.835.555					1.923.143.995.454	Book Value

Aset tetap, berupa tanah, pabrik, kendaraan dan gedung dijadikan jaminan atas perolehan kredit dari bank. Sebagian tanah berikut gedungnya dijadikan jaminan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 20), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 20), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 20) dan Indonesia Eximbank (Catatan 20) masing-masing sebesar Rp 109.135.230.000, Rp 6.750.000.000, Rp 16.186.000.000, dan Rp 5.153.000.000, dengan nilai keseluruhan Rp 253.698.792.958, dan nilai wajar tanah dan gedung yang dijaminan sebesar Rp 201.353.690.000.000.

Certain land, plants, vehicles and buildings asset are used as collateral for bank loans. Some land and buildings above are used as collaterals to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 20), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 20), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 20) and Indonesia Eximbank (Note 20) amounted to Rp 109,135,230,000, Rp 6,750,000,000, Rp 16,186,000,000, Rp 5,153,000,000, respectively, with total amount of Rp 253,698,792,958, and the fair value of the lands and buildings as collateral amounted to Rp 201,353,690,000,000.

Sejak tahun 2015, Grup menerapkan metode revaluasi untuk aset tetap kelompok tanah dan bangunan (Catatan 2). Berdasarkan penilaian penilai independen KJPP Asrori & Rekan tanggal 8 Januari 2016 atas aset tersebut, nilai wajar aset tetap tanah dan bangunan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 669.978.629.997, sehingga terdapat selisih penilaian aset tetap sebesar Rp 507.371.858.079, dan Grup mencatat selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp 492.150.702.338 pada ekuitas setelah dikurangi dengan pajak.

Since 2015, the Group applied the revaluation model of fixed assets classified as land and buildings (Note 2). Based on revaluation of independent appraisal KJPP Asrori & Rekan dated January 8, 2016 on the assets, the fair value of Fixed Assets on Group land and building as of December 31, 2015 amounted to Rp 669,978,629,997, hence that there is a surplus revaluation amounted to Rp 507,371,858,079 and the Group has recorded surplus revaluation in Fixed Assets amounted to Rp 492,150,702,338 on equity after deducting tax.

Gedung, pabrik dan peralatan dalam penyelesaian pada 31 Maret 2017 sebesar Rp 896.929.989.849 terutama terdiri dari pabrik listrik tenaga hydro dalam penyelesaian dari WSE, entitas anak, sebesar Rp 24.410.910.909, pabrik beton dalam penyelesaian sebesar Rp 829.599.590.863 dan peralatan proyek Perusahaan sebesar Rp 42.919.488.077.

The building, plant and equipment under construction as of March 31, 2017 amounted to Rp 896,929,989,849 mainly consist of hydro electricity power plant in progress belongs to WSE, a subsidiary, amounted to Rp 24,410,910,909, precast plant in progress amounted to Rp 829,599,590,863 and equipment in progress of the Company' project amounted to Rp 42,919,488,077.

Gedung, pabrik dan peralatan dalam penyelesaian pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 735.148.352.168 terutama terdiri dari pabrik listrik tenaga hydro dalam penyelesaian dari WSE, entitas anak, sebesar Rp 1.427.346.779, pabrik beton dalam penyelesaian sebesar Rp 722.792.388.675 dan peralatan proyek Perusahaan sebesar Rp 10.928.616.714.

Building, plant and equipments under construction as of December 31, 2016 amounted to Rp 735,148,352,168 mainly consist of hydro electricity power plant in progress belongs to WSE, a subsidiary, amounted to Rp 1,427,346,779, precast plant in progress amounted to Rp 722,792,388,675 and the Company's project equipments amounted to Rp 10,928,616,714.

Terdapat pengurangan aset tetap dalam penyelesaian pada 31 Desember 2016 yaitu gudang Ciputat sesuai dengan berita acara penghapusbukuan No. 01/WK/TIPAT/2016 tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp 387.809.551.

There is write off of assets in progress as of December 31, 2016 - Ciputat warehouse, based on minutes of write off meeting No. 01/WK/TIPAT/2016 dated December 9, 2016 amounted to Rp 387,809,551.

Gedung dan pabrik dalam penyelesaian per 31 Desember 2015 sebesar Rp 679.292.961.039, terutama terdiri dari pabrik listrik tenaga mini hydro dalam penyelesaian dari PT Waskita Sangir Energi (Entitas Anak) sebesar Rp 173.634.528.618, pabrik beton dalam penyelesaian sebesar Rp 36.107.176.652, proyek gedung PT Waskita Karya Realty sebesar Rp 10.829.725.358, gedung arsip dalam penyelesaian berlokasi di Ciputat sebesar Rp 387.809.551 dan peralatan proyek sebesar Rp 458.333.720.860. Proses penyelesaian PT Waskita Sangir Energi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 96,24%.

The building and plant under construction as of December 31, 2015 amounted to Rp 679,292,961,039 mainly consist of miny hydro electricity power plant in progress belongs to PT Waskita Sangir Energi (Subsidiary) amounted to Rp 173,634,528,618, precast plant in progress amounted to Rp 36,107,176,652, building in progress of PT Waskita Karya Realty amounted to Rp 10,829,725,358, filling building in progress located in Ciputat amounted to Rp 387,809,551 and project equipment amounted to Rp 458,333,720,860. The completion progress of PT Waskita Sangir Energi until December 31, 2015 is about 96.24%.

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses are allocated as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 Tidak Diaudit/ Unaudited	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Pokok Pendapatan	56.137.423.514	29.148.879.872	170.440.658.395	134.631.183.520	Cost of Revenues
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 40)	27.695.206.889	10.668.015.687	27.482.382.725	8.087.449.686	General and Administrative Expenses (Note 40)
Jumlah	83.832.630.403	39.816.895.559	197.923.041.120	142.718.633.206	Total

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Gedung, pabrik, peralatan proyek dan kendaraan untuk seluruh unit bisnis serta kantor pusat telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan dan risiko sebagai berikut:

Buildings, plant, project equipments and vehicles for all business units and head office were insured in the amount and risk as follows:

Nama Asuransi/ Insurer	Jenis Aset/ Type of Assets	Periode Asuransi/ Insurance Period	Nilai Pertanggungan/ The Sum Insured	Perusahaan/ Company
Rp				
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Risiko pemasangan oleh kontraktor/ Contractor Erection All Risk	10 Desember/ December 2014 s.d/ to 29 Juni/ June 2016	3,045,930,766.990	PT Waskita Beton Precast
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Proteksi atas proyek CCTW/ Protection of CCTW Project	29 Juni/ June 2016 s.d/ to 29 Juni/ June 2019	2,453,265,241.000	PT Waskita Beton Precast
PT Asuransi Ramayana (Ramayana)	Bangunan dan Sarana/ Buildings and Housing	25 Desember/ December 2016 s.d/ to 25 Desember/ December 2017	586,753,397.332	PT Waskita Beton Precast
PT Asuransi Ramayana (Ramayana)	Bangunan dan Sarana/ Buildings and Housing	25 Desember/ December 2016 s.d/ to 25 Desember/ December 2017	586,753,397.332	PT Waskita Beton Precast
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Risiko Semua Kontraktor/ Contractor All Risk	18 Januari/ January 2017 s.d/ to 18 Januari/ January 2018	441,773,000.000	PT Waskita Beton Precast
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Proteksi atas proyek CCTW/ Protection of CCTW Project	29 September/ September 2015 s.d/ to 29 September/ September 2018	405,391,466.000	PT Waskita Beton Precast
PT MNC Insurance	Risiko Industri/ Industrial All Risk	23 November/ November 2016 s.d/ to 23 November/ November 2017	327,565,000.000	PT Waskita Karya Energi
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Risiko Kontraktor/ Contractor All Risk	18 Januari/ January 2017 s.d/ to 18 Januari/ January 2018	245,514,000.000	PT Waskita Beton Precast
PT Asuransi Ramayana (Ramayana)	Bangunan dan Sarana/ Buildings and Housing	25 Desember/ December 2016 s.d/ to 25 Desember/ December 2017	177,321,209.000	PT Waskita Beton Precast
PT Asuransi Intra Asia	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	15 Januari/ January 2017 s.d/ to 15 Januari/ January 2018	135,000,000.000	PT Waskita Karya Realty
PT MNC Insurance	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	23 November/ November 2016 s.d/ to 23 November/ November 2017	117,315,000.000	PT Waskita Karya Energi
PT Asuransi Tri Pakarta	Bangunan dan Sarana/ Buildings and Housing	1 Agustus/ August 2016 s.d/ to 1 Agustus/ August 2017	67,429,710.000	PT Waskita Karya
PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	1 Agustus/ August 2016 s.d/ to 1 Agustus/ August 2017	67,429,710.000	PT Waskita Karya
PT Asuransi Ramayana (Ramayana)	Bangunan dan Sarana/ Buildings and Housing	25 Desember/ December 2016 s.d/ to 25 Desember/ December 2017	50,607,319.000	PT Waskita Beton Precast
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi/ Insurance Standard Earthquake	18 Januari/ January 2017 s.d/ to 18 Januari/ January 2018	48,813,750.000	PT Waskita Beton Precast
PT Asuransi Intra Asia	Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown	15 Januari/ January 2017 s.d/ to 15 Januari/ January 2018	20,000,000.000	PT Waskita Karya Realty
PT MNC Insurance	Polis Liabilitas Publik/ Public Liability Policy	23 November/ November 2016 s.d/ to 23 November/ November 2017	10,000,000.000	PT Waskita Karya Energi
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi/ Standard Policy Insurance Earthquake	18 Januari/ January 2017 s.d/ to 18 Januari/ January 2018	9,062,150.200	PT Waskita Beton Precast
PT Asuransi Intra Asia	Polis Liabilitas Publik/ Public Liability Policy	15 Januari/ January 2017 s.d/ to 15 Januari/ January 2018	5,000,000.000	PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Himalaya Pelindung	Bangunan dan Sarana/ Buildings and Housing	1 Agustus/ August 2016 s.d/ to 1 Agustus/ August 2017	2,452,470.000	PT Waskita Karya
PT Asuransi Himalaya pelindung	Bangunan dan Sarana/ Buildings and Housing	1 Agustus/ August 2015 s.d/ to 1 Agustus/ August 2017	2,452,470.000	PT Waskita Karya
PT Aspan General Insurance	Bangunan dan Sarana/ Buildings and Housing	1 Agustus/ August 2016 s.d/ to 1 Agustus/ August 2017	2,022,226.500	PT Waskita Karya
PT MNC Insurance	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia/ Indonesian Insurance Standard Earthquake	23 November/ November 2016 s.d/ to 23 November/ November 2017	1,000,000.000	PT Waskita Karya Energi
Jumlah/ Total			8,808,852,283,354	

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Management believes that insurance coverage for fixed assets which have been insured are adequate to cover the possible losses.

17. GOODWILL

Goodwill diperoleh dari akuisisi saham yang dilakukan oleh WTR, entitas anak, atas PT Cibitung Cimanggis Tollways (CCT) pada bulan Juli 2015, PT Trans Jabar Toll (TJT) pada 30 Nopember 2015 dan inbreng kepemilikan saham atas PT Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR) menjadi penyertaan di PT Waskita MNC Trans-Jawa Toll Road (WMTTR) pada 30 Nopember 2015, PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR) pada bulan Pebruari 2016 dan PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP) pada bulan Mei 2016.

17. GOODWILL

Goodwill recorded from the acquisition of shares by WTR, a subsidiary of PT Cibitung Cimanggis Tollways (CCT) in July 2015, PT Trans Jabar Toll (TJT) on November 30, 2015 and stock transfer (inbreng) of PT Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR) become investment on PT Waskita MNC Trans-Jawa Toll Road (WMTTR) as of November 30, 2015, PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR) at February, 2016 and PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP) on May 2016.

Berikut rincian dari goodwill:

Following the details of goodwill:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Imbalan yang Dialihkan	2.458.169.493.576	2.458.169.493.576	1.846.664.000.000	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih				Identified Net Assets and
Teridentifikasi yang Diperoleh	747.400.096.107	747.400.096.107	455.983.231.624	Liabilities Acquired
Goodwill	1.710.769.397.469	1.710.769.397.469	1.390.680.768.376	Goodwill

Akuisisi CCT

CCT Acquisition

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
CCT (90%)				
Imbalan yang Dialihkan	552.150.000.000	552.150.000.000	552.150.000.000	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih				Identified Net Assets and
Teridentifikasi yang Diperoleh	84.634.741.257	84.634.741.257	85.534.741.257	Liabilities Acquired
Goodwill	467.515.258.743	467.515.258.743	466.615.258.743	Goodwill

Pada tanggal 13 Juli 2015, WTR dan PT Bakrie & Brothers Tbk menandatangani perjanjian pembelian 90% kepemilikan CCT dengan harga perolehan sebesar Rp 552.150.000.000. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On July 13, 2015, WTR and PT Bakrie & Brothers Tbk, entered into an agreement to purchase 90% ownership in CCT amounted to Rp 552,150,000,000. The fair value of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date were as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Kas dan Setara Kas	202.869.015	202.869.015	202.869.015	Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Advances and Prepayments
Piutang Lain-lain Pihak Berelasi	70.519.462.085	70.519.462.085	71.519.462.085	Other Receivables - Related Parties
Aset Tetap dalam Konstruksi	53.886.970.322	53.886.970.322	53.886.970.322	Asset under Construction
Beban Akrua	(758.833.655)	(758.833.655)	(758.833.655)	Accrued Expenses
Liabilitas Lainnya	(875.820.000)	(875.820.000)	(875.820.000)	Other Liabilities
Utang Lain-lain Berelasi	(28.943.046.371)	(28.943.046.371)	(28.943.046.371)	Other Payables - Related Parties
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	94.038.601.396	94.038.601.396	95.038.601.396	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non Pengendali	(9.403.860.139)	(9.403.860.139)	(9.503.860.139)	Fair Value of Non Controlling Interest
Goodwill	467.515.258.743	467.515.258.743	466.615.258.743	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	552.150.000.000	552.150.000.000	552.150.000.000	Fair Value of Consideration

Pada bulan Juni 2016, CCT, entitas anak dari WTR, melakukan perubahan atas saldo cadangan modal disetor sebesar Rp 1.000.000.000 sehingga mengkoreksi saldo goodwill WTR sebesar Rp 900.000.000 menjadi sebesar Rp 467.515.258.743.

In June 2016, CCT, a subsidiary of WTR, make changes on the balance of paid-up capital reserves Rp 1,000,000,000 so the Company changed the balance of WTR's goodwill amounted to Rp 900,000,000 become Rp 467,515,258,743.

Akuisisi PPTR

PPTR Acquisition

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
PPTR (100%)				
Imbalan yang Dialihkan	350.000.000.000	350.000.000.000	350.000.000.000	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih				Identified Net Assets and
Teridentifikasi yang Diperoleh	110.128.915.107	110.128.915.107	110.128.915.107	Liabilities Acquired
Goodwill	239.871.084.893	239.871.084.893	239.871.084.893	Goodwill

Pada tanggal 4 Juli 2015, WTR dan PT Rekatunggal Abadi menandatangani perjanjian pembelian 99,99% kepemilikan PPTR dengan harga perolehan sebesar Rp 350.000.000.000. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On July 4, 2015 WTR and PT Rekatunggal Abadi entered into an agreement to purchase 99.99% ownership in PPTR amounted to Rp 350,000,000,000. The fair value of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date were as follows:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Kas dan Setara Kas	1.934.089.667	1.934.089.667	1.934.089.667	Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	1.481.467.518	1.481.467.518	1.481.467.518	Advances and Prepaid Expenses
Aset Tak Berwujud - Hak Penguasaan Jalan Tol	1.273.349.385.524	1.273.349.385.524	1.273.349.385.524	Intangible Assets - Concession Right Toll Road
Aset Tetap dalam Konstruksi	5.404.318.896	5.404.318.896	5.404.318.896	Asset under Construction
Aset Lain-lain	50.000.473.503	50.000.473.503	50.000.473.503	Other Assets
Utang Usaha	(1.008.122.660.856)	(1.008.122.660.856)	(1.008.122.660.856)	Accounts Payable
Utang Pajak	(158.884.796)	(158.884.796)	(158.884.796)	Tax Payables
Utang Bunga Pihak Berelasi	(6.016.048.680)	(6.016.048.680)	(6.016.048.680)	Interest Loan - Related Parties
Liabilitas Lain-lain	(207.743.225.669)	(207.743.225.669)	(207.743.225.669)	Other Liabilities
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	110.128.915.107	110.128.915.107	110.128.915.107	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Goodwill	239.871.084.893	239.871.084.893	239.871.084.893	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	350.000.000.000	350.000.000.000	350.000.000.000	Fair Value of Consideration

Akuisisi TJT

TJT Acquisition

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
TJT (99.99%)				
Imbalan yang Dialihkan	1.021.019.493.576	1.021.019.493.576	944.514.000.000	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	260.142.218.064	260.142.218.064	260.319.575.260	Identified Net Assets and Liabilities Acquired
Goodwill	760.877.275.512	760.877.275.512	684.194.424.740	Goodwill

Pada tanggal 11 Nopember 2015, WTR bersama PT Bukaka Teknik Utama, PT Graha Multitama Sejahtera dan PT Karya Perkasa Insani menandatangani perjanjian pembelian 81,65% kepemilikan TJT dengan harga perolehan sebesar Rp 944.514.000.000. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On November 11, 2015, WTR and PT Bukaka Teknik Utama, PT Graha Multitama Sejahtera and PT Karya Perkasa Insani entered into an agreement to purchase 81.65% ownership in TJT amounted to Rp 944,514,000,000. The fair value of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date were as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Kas dan Setara Kas	4.525.513.134	4.525.513.134	4.525.513.134	Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	55.380.122.729	55.380.122.729	55.380.122.729	Advances and Prepaid Expenses
Aset Tak Berwujud - Hak Penguasaan Jalan Tol	210.596.774.983	210.596.774.983	210.596.774.983	Intangible Assets - Concession Right Toll Road
Aset Tetap dalam Konstruksi	761.525.928.371	761.525.928.371	761.525.928.371	Asset under Construction
Aset Lain-lain	(544.722.104.382)	(544.722.104.382)	(544.722.104.382)	Other Assets
Utang Usaha	(168.360.859.675)	(168.360.859.675)	(168.360.859.675)	Accounts Payable
Utang Pajak	(40.926.508)	(40.926.508)	(40.926.508)	Tax Payables
Liabilitas Lainnya	(80.750.000)	(80.750.000)	(80.750.000)	Other liabilities
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	318.823.698.652	318.823.698.652	318.823.698.652	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non-Pengendali	(58.681.480.588)	(58.681.480.588)	(58.504.123.391)	Fair Value of Non-Controlling Interest
Goodwill	760.877.275.512	760.877.275.512	684.194.424.739	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	1.021.019.493.576	1.021.019.493.576	944.514.000.000	Fair Value of Consideration

Akuisisi PBTR

PBTR Acquisition

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
PBTR (60 %)				
Imbalan yang Dialihkan	220.000.000.000	220.000.000.000	--	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih				Identified Net Assets and
Teridentifikasi yang Diperoleh	36.276.463.371	36.276.463.371	--	Liabilities Acquired
Goodwill	183.723.536.629	183.723.536.629	--	Goodwill

Pada tanggal 15 Pebruari 2016, WTR dan PT Langkah Utama Perkasa, Countryside Investment Corporation dan PT Sumber Mitra Jaya, menandatangani perjanjian pembelian 60% kepemilikan PBTR dengan harga perolehan sebesar Rp 220.000.000.000. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On February 15, 2016, WTR and PT Langkah Utama Perkasa, Countryside Investment Corporation and PT Sumber Mitra Jaya entered into an agreement to purchase 60% ownership in PBTR amounted to Rp 220,000,000,000. The fair value of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date were as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Kas dan Setara Kas	44.721.174	44.721.174	--	Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	576.893.132	576.893.132	--	Advances and Prepayments
Aset Tak Berwujud -				Intangible Assets -
Hak Pengusahaan Jalan Tol	59.839.157.979	59.839.157.979	--	Concession Right Toll Road
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	60.460.772.285	60.460.772.285	--	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non-Pengendali	(24.184.308.914)	(24.184.308.914)	--	Fair Value of Non-Controlling Interest
Goodwill	183.723.536.629	183.723.536.629	--	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	220.000.000.000	220.000.000.000	--	Fair Value of Consideration

Akuisisi SRIMP

SRIMP Acquisition

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
SRIMP (60 %)				
Imbalan yang Dialihkan	315.000.000.000	315.000.000.000	--	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih				Identified Net Assets and
Teridentifikasi yang Diperoleh	256.217.758.308	256.217.758.308	--	Liabilities Acquired
Goodwill	58.782.241.692	58.782.241.692	--	Goodwill

Pada tanggal 19 Mei 2016, WTR dan PT Persada Tanjung Api-api, menandatangani perjanjian pembelian 60% kepemilikan SRIMP dengan harga perolehan sebesar Rp 315.000.000.000. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On May 19, 2016, WTR and PT Persada Tanjung Api-api entered into an agreement to purchase 60% ownership in SRIMP amounted to Rp 315,000,000,000. The fair value of assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date were as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Kas dan Setara Kas	303.517.604.893	303.517.604.893	--	Cash and Cash Equivalents
Aset Pajak Tangguhan	1.232.557.000	1.232.557.000	--	Deferred Tax Assets
Proyek dalam Pelaksanaan	135.758.968.659	135.758.968.659	--	Project on Progress
Aset Tetap	36.876.125	36.876.125	--	Fixed Assets
Utang Pajak	(6.050.791.698)	(6.050.791.698)	--	Tax Payables
Liabilitas Lain-lain	(7.465.617.800)	(7.465.617.800)	--	Other Liabilities
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	427.029.597.179	427.029.597.179	--	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non-Pengendali	(170.811.838.872)	(170.811.838.872)	--	Fair Value of Non-Controlling Interest
Goodwill	58.782.241.693	58.782.241.693	--	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	315.000.000.000	315.000.000.000	--	Fair Value of Consideration

18. ASET LAIN-LAIN

18. OTHER ASSETS

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Kontrak Sewa Jangka Panjang	55.874.658.512	41.479.463.853	24.306.217.076	Long-Term Rent Contract
Beban Kontrak Ditangguhkan	52.052.306.802	39.391.831.786	15.867.806.142	Contract Deferred Charges
Aset Pengampunan Pajak	1.008.017.938	-	-	Tax Amnesty Assets
Perangkat Lunak	11.360.516.428	11.416.139.618	12.470.548.429	Software
Tanah dan Bangunan	1.700.000.000	1.700.000.000	1.890.993.032	Lands and Buildings
Uang Jaminan	788.647.193	4.164.925.192	-	Warranty
Aset Tetap Tidak Digunakan Untuk Dijual	185.172.515	185.172.515	185.172.516	Fixed Assets are not Used for Sale
Jumlah	122.969.319.388	98.337.532.964	54.720.737.195	Total

Kontrak sewa jangka panjang merupakan biaya sewa tanah jangka panjang dengan jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Long-term rent contracts represent long-term land rent with a period of 1 to 5 years.

Beban kontrak yang ditangguhkan merupakan beban yang ditangguhkan atas proyek-proyek yang sedang berjalan, yang akan dibebankan sebagai beban kontrak pada saat proyek tersebut dilaksanakan.

Contract deferred charges represent deferred expense of the on-going projects, which will be charged as expense when the project contract has executed.

Perangkat lunak merupakan pembayaran dengan tahap enam atas pembelian ERP MS Dynamics AX2012 dan Auto Desk CAD Design dengan nilai perolehan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar Rp 13.510.005.081, Rp 13.298.900.654, dan Rp 12.910.590.640 dengan akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 2.149.488.653, Rp 2.132.119.739 dan Rp 1.882.761.035.

Software represents the payment until the sixth phases for the purchasing of ERP MS Dynamics AX2012 and Auto Desk CAD Design with the acquisition cost as of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 amounted to Rp 13,510,005,081, Rp 13,298,900,654, and Rp 12,910,590,640 respectively with accumulated amortization amounting to Rp 2,149,488,653, Rp 2,132,119,739 and Rp 1,882,761,035, respectively.

Aset lain-lain tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

Other assets land and building as follows:

1. Tanah di Cengkareng yang dibeli oleh Perusahaan pada tanggal 21 Mei 1991. Kemudian ditahun 1996 Perusahaan menyampaikan Surat kepada Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat mengenai peruntukkan tanah tersebut. Kemudian Perusahaan memperoleh jawaban berdasarkan Surat Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat Suku Dinas Tata Kota No. 288/17125 tanggal 18 Juli 1996, yang menyebutkan sesuai dengan Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Kalideres tahun 2005 lokasi tanah tersebut diperuntukkan untuk Penyempurnaan Hijau Umum (PHU). Sehingga Perusahaan tidak dapat memproses sertifikat kepemilikan lebih lanjut.
2. Apartemen Sahid berlokasi di Jalan K.H. Mansur Jakarta yang merupakan kompensasi pembayaran piutang retensi dari PT Sahid Inti Dinamika pada tanggal 22 Oktober 1997.

1. Land located in Cengkareng which purchased by the Company on May 21, 1991. Then in 1996, the Company submitted a letter to the Head of City Planning, West Jakarta regarding the designation of the land. Then the Company received the answer by letter from the Sub Department of City Planning, West Jakarta District No. 288/17125 dated July 18, 1996, which stated that in accordance with the planning of the Kalideres District year 2005, the land is allocated for the Public Green Improvement. Hence the Company can not process the certificated of ownership furthermore.
2. Sahid Apartment located in K.H.Mansur Street Jakarta which represents the payment compensation of retention receivables of PT Sahid Inti Dinamika on the date of October 22, 1997.

Apartemen tersebut telah dinilai oleh Penilai Properti Independen Toto Suharto dan Rekan melalui laporan tanggal 24 Januari 2017 dengan nilai sebesar Rp 4.281.000.000. Penilaian tersebut menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua keterangan, faktor-faktor yang terdapat dalam laporan ini dan berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku.

Apartment has been appraised by an Independent Property Appraiser Toto Suharto and Partners through a report dated January 24, 2017 with a fair value of Rp 4,281,000,000. The assessment using common methods assessments, and considering all informations, the factors contained in this report based on assumptions and limiting condition.

Perusahaan tidak menggunakan tanah dan apartemen tersebut dalam proses produksi ataupun menyewakannya kepada pihak ketiga, sehubungan aset tersebut tidak terkait dengan kegiatan utama Perusahaan. Perusahaan berpendapat bahwa apartemen tanah tersebut tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tetap, sehingga mencatat aset tersebut diatas sebagai aset lain-lain.

The Company does not use the land and the apartment in the process of producing or rent to the third parties in line with those assets are not related to the main activities of the Company. Management believes that the land and the apartment do not meet the criteria to be classified as fixed asset, so that those assets are recorded as other assets.

19. ASET TAK BERWUJUD – HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL

19. INTANGIBLE ASSETS – TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS

31 Maret 2017 / March 31, 2017					
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>		
Rp	Rp	Rp	Rp		
Biaya Perolehan				Acquisition Cost	
Ruas Jalan Tol :				Toll Road Section :	
Kanci - Pejagan	3.177.219.741.986	--	3.177.219.741.986	Kanci - Pejagan	
Pejagan - Pemalang	2.216.218.041.782	--	2.216.218.041.782	Pejagan - Pemalang	
	<u>5.393.437.783.768</u>	<u>--</u>	<u>5.393.437.783.768</u>		
Aset Dalam Penyelesaian				Construction in Progress	
Ruas Jalan Tol :				Toll Road Section :	
Kanci - Pejagan	394.209.181.671	156.415.155.416	--	550.624.337.087	Kanci - Pejagan
Cimanggis - Cibitung	1.014.993.871.691	59.706.771.100	--	1.074.700.642.791	Cimanggis - Cibitung
Pejagan - Pemalang	966.419.003.130	611.025.616.403	--	1.577.444.619.533	Pejagan - Pemalang
Pasuruan - Probolinggo	438.990.667.300	237.668.693.180	--	676.659.360.480	Pasuruan - Probolinggo
Ciawi - Sukabumi	1.636.479.638.503	154.899.977.627	--	1.791.379.616.130	Ciawi - Sukabumi
Kayu Agung -					Kayu Agung -
Palembang - Betung	1.205.059.985.305	508.527.390.625	--	1.713.587.375.930	Palembang - Betung
Pemalang - Batang	482.790.482.969	362.513.729.613	--	845.304.212.582	Pemalang - Batang
Krian-Legundi-Bunder	-	969.382.192.887	--	969.382.192.887	Krian-Legundi-Bunder
	<u>6.138.942.830.569</u>	<u>3.060.139.526.851</u>	<u>-</u>	<u>9.199.082.357.420</u>	
Akumulasi				Accumulated	
Amortisasi				Amortization	
Ruas Jalan Tol :				Toll Road Section :	
Kanci - Pejagan	370.021.754.570	11.603.198.088	--	381.624.952.658	Kanci - Pejagan
Pejagan - Pemalang	8.614.932.709	3.661.344.773	--	12.276.277.482	Pejagan - Pemalang
	<u>378.636.687.279</u>	<u>15.264.542.861</u>	<u>--</u>	<u>393.901.230.140</u>	
Nilai Tercatat	<u>11.153.743.927.058</u>		<u>14.198.618.911.048</u>	Carrying Value	

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

31 Desember 2016/ December 31, 2016			
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan			Acquisition Cost
Hak Konsesi			Concession Right
Ruas Jalan Tol :			Toll Road Section :
Kanci - Pejagan	3.176.818.241.986	401.500.000	--
Pejagan - Pemalang	--	--	2.216.218.041.782
	<u>3.176.818.241.986</u>	<u>401.500.000</u>	<u>2.216.218.041.782</u>
			<u>5.393.437.783.768</u>
Aset Dalam Penyelesaian			Construction in Progress
Ruas Jalan Tol :			Toll Road Section :
Kanci - Pejagan	--	394.209.181.671	--
Cimanggis - Cibitung	191.396.777.136	823.597.094.555	--
Pejagan - Pemalang	1.648.036.150.527	1.534.600.894.385	(2.216.218.041.782)
Pasuruan - Probolinggo	6.672.667.020	432.318.000.280	--
Ciawi - Sukabumi	882.822.920.347	753.656.718.156	--
Kayu Agung -			Kayu Agung -
Palembang - Betung	--	1.205.059.985.305	--
Pemalang - Batang	--	482.790.482.969	--
	<u>2.728.928.515.030</u>	<u>5.626.232.357.321</u>	<u>-</u>
			<u>6.138.942.830.569</u>
Akumulasi			Accumulated
Amortisasi			Amortization
Ruas Jalan Tol :			Toll Road Section :
Kanci - Pejagan	325.414.775.735	44.606.978.835	--
Pejagan - Pemalang	--	8.614.932.709	--
	<u>325.414.775.735</u>	<u>53.221.911.544</u>	<u>--</u>
			<u>378.636.687.279</u>
Nilai Tercatat	<u>5.580.331.981.281</u>		<u>11.153.743.927.058</u>
			Carrying Value
31 Desember 2015/ December 31, 2015			
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan			Acquisition Cost
Hak Konsesi			Concession Right
Ruas Jalan Tol :			Toll Road Section :
Kanci - Pejagan	--	3.176.818.241.986	--
	<u>--</u>	<u>3.176.818.241.986</u>	<u>--</u>
			<u>3.176.818.241.986</u>
Aset Dalam Penyelesaian			Construction in Progress
Ruas Jalan Tol :			Toll Road Section :
Cimanggis - Cibitung	--	191.396.777.136	--
Pejagan - Pemalang	--	1.648.036.150.527	--
Pasuruan - Probolinggo	--	6.672.667.020	--
Ciawi - Sukabumi	--	882.822.920.347	--
	<u>--</u>	<u>2.728.928.515.030</u>	<u>--</u>
			<u>2.728.928.515.030</u>
Akumulasi			Accumulated
Amortisasi			Amortization
Ruas Jalan Tol :			Toll Road Section :
Kanci - Pejagan	--	325.414.775.735	--
	<u>--</u>	<u>325.414.775.735</u>	<u>--</u>
			<u>325.414.775.735</u>
Nilai Tercatat	<u>--</u>		<u>5.580.331.981.281</u>
			Carrying Value

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

20. UTANG BANK JANGKA PENDEK

20. SHORT-TERM BANK LOANS

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
Perusahaan/ The Company			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.807.542.883.839	1.394.923.950.421	739.962.860.569
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.225.212.705.295	1.547.335.448.041	606.774.495.253
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.125.653.934.885	1.261.479.561.965	760.392.364.597
Indonesia Eximbank	626.010.276.504	1.000.109.723.966	--
Entitas Anak/ Subsidiary Entity - WBP			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	945.632.801.837	698.608.576.290	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	293.000.000.000	597.024.225.547	109.686.898.787
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	295.005.103.698	300.000.000.000	301.784.934.720
Sub Jumlah/ Sub Total	6.318.057.706.058	6.799.481.486.230	2.518.601.553.926
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Perusahaan/ The Company			
PT Bank Panin Tbk	1.299.284.146.569	2.097.229.391.891	376.227.481.061
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	949.881.831.616	300.000.000.000	--
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	699.375.000.000	800.000.000.000	299.076.306.842
PT Bank UOB Indonesia	405.048.823.590	484.276.698.208	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	279.810.233.193	729.590.515.075	--
PT Bank Central Asia Tbk	141.656.140.968	141.122.302.812	--
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	--	399.918.778.730	--
Entitas Anak/ Subsidiary Entity - WBP			
PT Bank ICBC Indonesia	700.000.000.000	311.427.978.883	--
Sub Jumlah/ Sub Total	4.475.056.175.936	5.263.565.665.599	675.303.787.903
Jumlah/ Total	10.793.113.881.994	12.063.047.151.829	3.193.905.341.829

Suku bunga per tahun :

Interest rate per annum :

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
Perusahaan/ The Company			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9,00%	9,50%	9,75%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9,50%	10,00%	10,50%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9,18% - 10%	9,18% - 10%	10,00%
Indonesia Eximbank	8,75%	9,25%	9,25%
PT Bank Panin Tbk	8,90%	8,50%	LPS Rate + 2,5%
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	7,90% - 8,05%	8,50%	--
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	Ice Libor + minimum 1,1%	Ice Libor + minimum 1,1%	The bank's cost of fund + 2%
PT Bank UOB Indonesia	Jibor + 2,5%	Jibor + 2,5%	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	9,00%	9,00%	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia - Kredit Sindikasi/ <i>Syndicated Credit</i>	9,70%	9,70%	--
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	8,65%	8,65%	--
Entitas anak/ Subsidiary Entity - WBP			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10,00%	10,00%	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,00%	10,00%	10,00%
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	10,00%	10,00%	10,00%
PT Bank ICBC Indonesia	9,75% - 10%	9,75% - 10%	--

Perusahaan

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Kredit Modal Kerja (KMK) *Revolving* Rp 200.000.000.000.
- b. Kredit Modal Transaksional Rp 1.800.000.000.000.
- c. Kredit Modal Kerja *Supply Chain Financing* (SCF) Rp 1.875.000.000.000.
- d. Bank Garansi Rp 3.625.000.000.000.
- e. *Letter of Credit* (L/C) atau SKBDN sebesar Rp 270.000.000.000.

Berdasarkan surat No. 015/BIN/PK/2017 tanggal 27 Maret 2017, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 27 Maret 2017 dan jatuh tempo 26 Maret 2018. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Persediaan yang telah diikat akta fidusia No. 5 tanggal 13 Agustus 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-4831 HT.04.06. TH.2001/NTSD tanggal 26 Januari 2001 senilai Rp 8.268.049.363.
- b. Satu bidang tanah SHGB No. 724 tanggal 29 Maret 1988 sampai dengan 1 Desember 2027 seluas 2.098m² terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.500.000.000 sesuai dengan SHT No. 397/T/1988, senilai Rp 31.000.000.000 sesuai dengan SHT.II No. 408/2004 (Catatan 16). Senilai Rp 48.320.400.000 sesuai dengan SHT III No. 06386/2014 dan senilai Rp 11.120.940.000 dimana SHT IV sedang dalam proses.
- c. Satu bidang tanah SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003 sampai dengan 20 April 2022, seluas 1.332 m², terletak di Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan Cabang NTB senilai Rp 1.332.000.000 sesuai dengan SHT.I No. 687/2007 (Catatan 16) dan senilai Rp 1.860.010.000 dimana SHT II sedang dalam proses.

The Company

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The Company entered into the credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- a. *Revolving Working Capital Loan* (WCL) of Rp 200,000,000,000.
- b. *Transactional Capital Loan* of Rp 1,800,000,000,000.
- c. *Supply Chain Financing* (SCF) *Working Capital Loan* of Rp 1,875,000,000,000.
- d. *Bank Guarantee* of Rp 3,625,000,000,000.
- e. *Letter of Credit* (L/C) or SKBDN of Rp 270,000,000,000.

According to letter No. 015/BIN/PK/2017 dated March 27, 2017, the term of loan since date March 27, 2017 and will be due on March 26, 2018. The loan facilities are secured and bounded with:

- a. *Inventory* which has been tied by fiduciary deed No. 5 dated August 13, 1998 and was registered at the Fiduciary Registration Office; the Fiduciary Certificate No. C2-4831 HT.04.06.TH. 2001/NTSD dated January 26, 2001 amounted to Rp 8,268,049,363.
- b. A plot of land with land right (SHGB) No. 724 dated March 29, 1988 until December 1, 2027, an area of 2,098sqm located at Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, East Jakarta on behalf of the Company amounted to Rp 1,500,000,000 according to SHT No. 397/T/1988, amounted to Rp 31,000,000,000 according to SHT.II No. 408/2004 (Note 16). Amounted to Rp 48,320,400,000 according to SHT III No. 06386/2014 and Rp 11,120,940,000 while SHT IV still in process.
- c. A plot of land with land right (SHGB) No. 38, April 21, 2003 until April 20, 2022, an area of 1,332sqm, located at Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, West Nusa Tenggara, on behalf of the Company NTB Branch amounted to Rp 1,332,000,000 according to SHT.I No. 687/2007 (Note 16) and amounted Rp 1,860,010,000 while SHT II still in process.

- d. Satu bidang tanah SHGB No. 2001 tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798m², terletak di Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, atas nama Perusahaan senilai Rp 5.191.600.000 sesuai dengan SHT I No. 323 (Catatan 16) dan senilai Rp 9.779.660.000 sesuai SHT II No. 1375/2015.
- e. Satu bidang tanah SHGB No. 4 tanggal 10 Nopember 1998 sampai dengan 19 Desember 2028 seluas 2.511m², terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 651.430.000 (Catatan 16) dan senilai Rp 6.321.020.000 dimana SHT II sedang dalam proses.
- f. Satu bidang tanah SHGB No. 7 tanggal 10 Pebruari 1993 sampai dengan 7 Pebruari 2013 seluas 806m², terletak di Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.270.880.000 sesuai dengan SHT I No. 3129/2001, senilai Rp 460.020.000 sesuai dengan SHT II No. 1151/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 7 Pebruari 2033 dan senilai Rp 3.474.910.000 sesuai SHT III No. 1846/2016 (Catatan 16).
- g. Satu bidang tanah SHGB No. 1518 tanggal 10 Maret 1998 sampai dengan 19 Juni 2036, seluas 1.004m², terletak di Desa Sungai Raya, Kodya Pontianak, Kalimantan Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 464.850.000 sesuai dengan SHT I No. 356/2001, senilai Rp 747.850.000 sesuai dengan SHT II No. 169/2007 dan senilai Rp 3.595.942.000 sesuai dengan SHT III No. 36/2016 (Catatan 16).
- h. Satu bidang tanah SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 23 Nopember 2026, seluas 1.404m², terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.665.700.000 sesuai dengan SHT I No. 2952/2007 dan senilai Rp 3.595.940.000 sesuai SHT III No. 00621/2016 tanggal 28 Januari 2016 (Catatan 16).
- d. A plot of land with land right (SHGB) No. 2001 dated June 1, 2006 until on January 1, 2026, an area of 5,798sqm, located at Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, on behalf of the Company amounted to Rp 5,191,600,000 according to SHT I No. 323 (Note 16) and amounted Rp 9,779,660,000 according to SHT II No. 1375/2015.
- e. A plot of land with land right (SHGB) No. 4 dated November 10, 1998 until December 19, 2028 an area of 2,511sqm, located at Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, West Sumatera, on behalf of the Company amounted to Rp 651,430,000 (Note 16) and amounted Rp 6,321,020,000 while SHT II still in process.
- f. A plot of land with land right (SHGB) No. 7 dated February 10, 1993 until February 7, 2013, an area of 806sqm, located at Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, West Sumatera, on behalf of the Company amounted to Rp 1,270,880,000 according to SHT I No. 3129/2001, amounted to Rp 460,020,000 according to SHT II No. 1151/2007. The land right (SHGB) has been extended until February 7, 2033 and amounted to Rp 3,474,910,000 according to SHT III No 1846/2016 (Note 16).
- g. A plot of land with land right (SHGB) No. 1518 dated March 10, 1998 until June 19, 2036, an area of 1,004sqm, located at Desa Sungai Raya, Pontianak, West Kalimantan, on behalf of the Company amounted to Rp 464,850,000 according to SHT I No. 356/2001, amounted to Rp 747,850,000 according to SHT II No. 169/2007, and according to SHT III No. 36/2016 (Note 16).
- h. A plot of land with land right (SHGB) No. 1085 dated December 18, 2006 until November 23, 2026, an area of 1,404sqm, located at Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, East Java, on behalf of the Company amounted to Rp 2,665,700,000 according to SHT I No. 2952/2007 and amounted Rp 3,595,940,000 according to SHT III No. 00621/016 dated January 28, 2016 (Note 16).

- i. Satu bidang tanah SHGB No. 82 tanggal 20 Oktober 1988 sampai dengan 13 April 2028, seluas 2.013m², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kodya Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.027.710.000 sesuai dengan SHT I No. 4772/2001, senilai Rp 2.474.390.000 sesuai dengan SHT II No. 2948/2007 dan senilai Rp 10.571.030.000 dimana SHT III sedang dalam proses (Catatan 16).
- j. Satu bidang tanah SHGB No. 2 tanggal 25 Juni 1997 sampai dengan 25 Juni 2017, seluas 1.000m², terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 402.860.000 sesuai dengan SHT I No. 390/2001 dan senilai Rp 636.540.000 sesuai dengan SHT II No. 239/2007 senilai Rp 3.085.070.000 sesuai dengan SHT III No. 1387/2015 (Catatan 16).
- k. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 24 Oktober 1997 sampai dengan 24 Oktober 2017, seluas 595m², terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 49.260.000 sesuai dengan SHT I No. 374/2001 dan senilai Rp 39.740.000 sesuai dengan SHT II No. 240/2007 (Catatan 16).
- l. Satu bidang tanah SHGB No. 13 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.830m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 457.590.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001 (Catatan 16).
- m. Satu bidang tanah SHGB No. 14 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 April 2023, seluas 4.800m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 288.000.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001, senilai Rp 602.410.000 sesuai dengan SHT II No. 238/2007 dan senilai Rp 7.828.880.000 dimana SHT III sedang dalam proses (Catatan 16).
- i. A plot of land with land right (SHGB) No. 82 dated October 20, 1988 to April 13, 2028, an area of 2,013sqm, located at Kelurahan Kalirungkut, Kodya Surabaya, East Java, on behalf of the Company amounted to Rp 2,027,710,000 according to SHT I No. 4772/2001, amounted to Rp 2,474,390,000 according to SHT II No. 2948/2007 and amounted to Rp 10,571,030,000 while SHT III still in process (Note 16).
- j. A plot of land with land right (SHGB) No. 2 dated June 25, 1997 until June 25, 2017, an area of 1,000sqm, located at Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 402,860,000 according to SHT I No. 390/2001 and amount to Rp 636,540,000 according to SHT II No. 239/2007 amounted to Rp 3,085,070,000 according to SHT III No. 1387/2015 (Note 16).
- k. A plot of land with land right SHGB No. 24 dated October 24, 1997 until October 24, 2017, an area of 595sqm, located at Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 49,260,000 according to SHT I No. 374/2001 and amounted to Rp 39,740,000 according to SHT II No. 240/2007 (Note 16).
- l. A plot of land with land right (SHGB) No. 13 dated July 22, 1993 until July 22, 2023, an area of 4,830sqm, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 457,590,000 according to SHT I No. 375/2001 (Note 16).
- m. A plot of land with land right (SHGB) No. 14 dated July 22, 1993 until April 22, 2023, an area of 4,800sqm, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 228,000,000 according to SHT I No. 375/2001, amounted to Rp 602,410,000 according to SHT II No. 238/2007 and amounted Rp 7,828,880,000 while SHT III still in process (Note 16).

- n. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 11 Juni 1993 sampai dengan 25 Mei 2013, seluas 276m², terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Kodya Manado, Sulawesi Utara, atas nama Perusahaan senilai Rp 263.530.000, sesuai dengan SHT I No. 737/2001 dan senilai Rp 121.670.000, sesuai dengan SHT II No. 667/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2033 (Catatan 16).
- o. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2020, seluas 4.040m², terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.516.520.000, sesuai dengan SHT I No. 2927/2001, senilai Rp 994.180.000 sesuai dengan SHT II No. 1613/2007 dan senilai Rp 3.182.880.000 sesuai dengan SHT III No. 10710/2015. Tanah yang dijaminkan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada (Catatan 16).
- p. Satu bidang tanah SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan 26 Januari 2027, seluas 1.250m², terletak di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, atas nama Perusahaan senilai Rp 3.404.000.000 sesuai dengan SHT I No. 2012/2007 senilai Rp 18.705.400.000 dimana SHT II sedang dalam proses. Tanah yang dijaminkan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, baik yang telah ada maupun yang akan ada (Catatan 16).
- q. Satu bidang tanah SHGB No. 01 tanggal 13 Nopember 1987 sampai dengan 13 Oktober 2027, seluas 1.905m², terletak di Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung atas nama Perusahaan senilai Rp 30.000.000 sesuai dengan S. Hip No. 3181 tanggal 13 September 1989, senilai Rp 2.222.100.000 sesuai dengan SHT II No. 01057/2007 dan senilai Rp 3.642.670.000 sesuai dengan SHT III No. 02119/2016. (Catatan 16).
- r. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 (satu) unit VW Caravelle 2.0 tahun 2012, yang diikat fidusia sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. W.10.00426020. AH.05.01 tanggal 26 Pebruari 2012 senilai Rp 620.000.000 (Catatan 16).
- n. A plot of land with land right (SHGB) No. 24 dated June 11, 1993 until May 25, 2013, an area of 276sqm, located at Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Manado, North Sulawesi, on behalf of the Company amounted to Rp 263,530,000 according to SHT I No. 737/2001 and amounted to Rp 121,670,000 according to SHT II No. 667/2007. The land right (SHGB) has been extended until May 25, 2033 (Note 16).
- o. A plot of land with land right (SHGB) No. 1 dated January 7, 1992 until December 28, 2020, an area of 4,040sqm, located at Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, West Java, on behalf of the Company amounted to Rp 1,516,520,000 according to SHT I No. 2927/2001, amounted to Rp 994,180,000 according to SHT II No. 1613/2007 and amounted to Rp 3,182,880,000 according to SHT III No. 10710/2015. Land which is pledged as collateral consist of buildings and related things already exist in the land, or to will be exist there (Note 16).
- p. A plot of land with land right (SHGB) No. 30 dated January 26, 2007 until January 26, 2027, an area of 1,250sqm, located at Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, on behalf of the Company amounted to Rp 3,404,000,000 according to SHT I No. 2012/2007 amounted to Rp 18,705,400,000 while SHT II still in process. Land which is pledged as collateral consist of buildings and related things already exist in the land, or to will be exist there (Note 16).
- q. A plot of land with land right (SHGB) No. 01 dated November 13, 1987 until October 13, 2027, an area of 1,905 sqm, located at Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung, on behalf of the Company amounted to Rp 30,000,000 according to S. Hip No. 3181 dated September 13, 1989, amounted to Rp 2,222,100,000 according to SHT II No. 01057/2007 and amounted to Rp 3,642,670,000 according to SHT III No. 02119/2016 (Note 16).
- r. Vehicles consist of 1 (one) unit VW Caravelle 2.0 year 2012 tied by fiduciary in accordance to Fiduciary Guarantee Deed No. W.10.00426020.AH.05.01 dated February 26, 2012 amounted to Rp 620,000,000 (Note 16).

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa proyek Masjid Baiturrahman Banda Aceh, proyek DI Batang Sinamar, proyek Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung, proyek Pengaman Pantai Tahap 2 Paket 1 (*Giant Sea Wall*), proyek Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar, proyek Pembangunan Bendungan Tapin, proyek Rusun Kemayoran D10-2 dan proyek Pembangunan Jalan Simpang Tanjung – Aruk II (MYC) digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 5).

On March 31, 2017, all amount due from customers of project Baiturrahman Mosque of Banda Aceh project, DI Batang Sinamar project, Manado – Bitung Freeway project, Coastal Protection 2 Project Phase I Giant (Sea Wall project), Krian Legundi Bunder Manyar Toll Road Project, Tapin Dam project, Kemayoran D10-2 Flat and Simpang Tanjung – Aruk Road Enlargement project (MYC) were used as collateral bank loans of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 5).

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain melakukan perubahan kegiatan usaha; menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali menjual atau mengalihkan aset kecuali yang bersifat *arm's length*; menjual atau mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe sifat dan kualitasnya; menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dilakukan dengan syarat akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*); melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the Bank such as to change business activities; sell or transfer the rights or transfer all or part of the property/assets owned in a single transaction or in a transaction unless sell or transfer assets unless that is arm's length; sell or transfer assets in exchange for or replacement of other assets that are comparable or better type of the nature and quality; sell or transfer assets in the context of the reorganization by the Government of Republic Indonesia through the sale of these assets do not have material effect; done with requirement will be the surviving legal entity; make amendments to it may cause due to the material; filed a petition for bankruptcy or suspension of payment obligation payable to the relevant authorities.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 4 (empat) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

The Company should maintain the following financial ratios: current ratio at least 1 (one), debt to equity ratio of a maximum 4 (four) and debt service coverage of at least 100%. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman Perusahaan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.807.542.883.839, Rp 1.394.923.950.421, dan Rp 739.962.860.569

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,807,542,883,839, Rp 1,394,923,950,421, and Rp 739,962,860,569 respectively.

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja konstruksi transaksional sebesar Rp 1.800.000.000.000, fasilitas bank garansi sebesar Rp 4.500.000.000.000, fasilitas *cash call* Rp 500.000.000.000 dan fasilitas *bill purchase financing* Rp 1.200.000.000.000 sesuai surat No. R.II.140-ADK/DKR-2/06/2016 tanggal 15 Juni 2016 fasilitas digunakan sampai tanggal 15 Juni 2017.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan sebidang tanah dengan SHGB No. 655 dengan masa berlaku dari tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2020 yang telah diikat hak tanggungan dengan nilai Rp 16.186.000.000.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Bank antara lain: mengajukan pernyataan kepailitan kepada pengadilan, menyewakan aset yang dijaminkan kepada bank; melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *current ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Seluruh tagihan proyek (piutang usaha) pada 31 Maret 2017 yang dijamin atas utang bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 5) adalah tagihan termin atas Proyek Gedung Kantor Satker Perangkat Daerah Pemkot Pekanbaru, Pembangunan Rusun Pasar Rumput, Pembangunan Tol Solo – Ngawi Paket 2 dan Proyek Jalan Tol MKTT (Medan - Kualanam - Tebing Tinggi) seksi 3 dan seksi 6.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman Perusahaan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.225.212.705.295, Rp 1.547.335.448.041, dan Rp 606.774.495.253 termasuk kredit sindikasi masing-masing sebesar Rp 186.611.044.125.

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The Company entered into a working capital construction loan transaction facilities amounted to Rp 1,800,000,000,000, bank guarantee facilities amounted to Rp 4,500,000,000,000, cash call facilities amounted to Rp 500,000,000,000 and bill purchase financing facility amounted to Rp 1,200,000,000,000, according to letter No. R.II.140-ADK/DKR-2/06/2016 dated June 15, 2016, these facilities can be used until June 15, 2017.

Loan facilities are collateralized and tied with a piece of land with land right (SHGB) No. 655 dated January 7, 1992 until December 28, 2020 that have been tied with its guarantee rights amounted to Rp 16,186,000,000.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the Bank such as: filed for bankruptcy to the court, leased assets as collateral to the bank; pay interest on shareholder loans.

Under the agreement the Company should maintain: current ratio at least 1 (one). The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

All the project invoices (accounts receivables) as of March 31, 2017 were pledged against bank loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 5) are accounts receivables from the Pekanbaru Government Building project, Pasar Rumput Flat Project, Solo – Ngawi Phase 2, and Section 3 and 6 of MKTT (Medan Kualanam Tebing Tinggi) Toll Ways.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp1,225,212,705,295, Rp1,547,335,448,041, and Rp 606,774,495,253, respectively, included syndicated credit amounted to Rp 186,611,044,125, respectively.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

Jenis-jenis Fasilitas/ <i>The Facilities</i>
Kredit Modal Kerja Transaksional III (catatan/note 27)
Fasilitas Kredit (<i>Non Cash Loan</i>)
Fasilitas <i>Supply Chain Financing</i> (SCF)
Kredit Modal Kerja Transaksional II
Kredit Modal Kerja Transaksional
L/C / SKBDN (Sub limit dari NCL)
<i>Trust Receipt</i> (Sub limit dari NCL)
Kredit Modal Kerja Rekening Koran

Atas pinjaman tersebut Perusahaan dikenakan bunga 9,18% - 10% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. *Collateral cash/deposito* berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 8.448.200.000 yang telah diikat gadai (Catatan 4).
- b. 3 (*tiga*) bidang tanah berikut bangunan kantor cabang Pekanbaru, yang telah diserahkan dan telah diikat hak tanggungan (HT) dengan nilai Rp 14.075.000.000 (Catatan 16).
- c. Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek CIBIS Tower, Apartemen Brooklyn Alam Sutera, UNS Solo, Sopo Del Office Tower Lifestyle, Indocement Citeureup, PLTM Lebak Tundun, Tanki Oil Sangatta EPC, Waduk Gondang, Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean – Blok M – Ciledug Paket Adam Malik, Fly Over Pegangsaan, Sabo Dam Merapi (8 buah), pengembangan proyek perbaikan Suai Airport, Proyek Peningkatan Jalan Gunung Seriang – Long Beluah, jalan Tanjung Selor – Tanjung Palas – Sekatak, Pekerjaan Arsitektur dan ME Hotel Meritus Seminyak, Jalan Tol Ngawi Kertosono Paket 1, Pelabuhan Belawan dan proyek Bendungan Raknamo dijamin atas utang bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company entered into the credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

Batas/ <i>Limit</i>	Jatuh Tempo/ <i>Due date</i>
Rp	
4.200.000.000.000	14/04/2019
3.000.000.000.000	14/11/2017
1.006.000.000.000	14/11/2017
900.000.000.000	14/11/2018
765.000.000.000	14/11/2017
500.000.000.000	14/11/2017
115.000.000.000	14/11/2017
35.000.000.000	14/11/2017

The loan bears interest by 9.18% - 10% per annum. The loan facilities are collateralized and tied with:

- a. *Collateral cash/time deposit* in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk deposits amounted to Rp 8,448,200,000 which is tied by pledge (Note 4).
- b. 3 (*three*) lots of land and buildings at Pekanbaru Branch offices, which have been submitted and tied with a guarantee rights amounted to Rp 14,075,000,000 (Note 16).
- c. As of March 31, 2017, all amount due from customers of project Development of CIBIS Tower, Brooklyn Alam Sutera Apartment, UNS Solo project, Sopo Del Office Tower Lifestyle project, Indocement Citeureup project, PLTM Lebak Tundun project, Sangatta Oil Tanki EPC project, Waduk Gondang project, Fly Over Kapt. Tendean – Blok M – Ciledug Adam Malik Package project, Fly Over Pegangsaan project, Sabo Dam Merapi Kab. Sleman (8pcs) project, Upgrading of Existing Suai Airport project, Gunung Seriang – Long Beluah Road project, Tanjung Selor – Tanjung Palas – Sekatak Road project, Architecture and Mechanical Electrical Works of Meritus Hotel Seminyak project, Ngawi – Kertosono Toll Road Package 1 project Belawan Port project, and Raknamo Dam project were used as collateral bank loans of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain: memindah tangankan barang jaminan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijaminkan kepada pihak lain; menjaga rasio keuangan aset tetap yang akan diperoleh/dibeli oleh Perusahaan di kemudian hari, maka akan dijadikan agunan kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perusahaan akan memprioritaskan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan afiliasinya untuk menjadi *arranger*, *underwriter* dan lain-lain dalam hal perusahaan melakukan *corporate action* dalam rangka *fund raising* di dalam negeri.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.125.653.934.885, Rp 1.261.479.561.965, dan Rp 760.392.364.597

4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pembiayaan pembangunan ruas jalan tol Pejagan – Pemalang sebesar Rp 850.000.000.000 sesuai Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 50 tanggal 23 Desember 2014, oleh Notaris Dewantari Handayani SH, MPA. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2024.

Perusahaan juga memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Export (KMKE) sebesar Rp 2.000.000.000.000 sesuai dengan Akta Perjanjian KMKE No. 43 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. tanggal 24 Maret 2017. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 27 Maret 2018.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Terminal *Multipurpose* di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pembangunan Tol Solo – Ngawi Paket 1 (Catatan 5) digunakan sebagai jaminan atas utang bank Indonesia Eximbank.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada bank; memperoleh pinjaman baru atas proyek yang telah dibiayai oleh bank; memperluas atau mempersempit usaha yang dapat mempengaruhi

This agreement includes restrictions which the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the Bank, such as: transfer the collateral; bind itself as guarantor of the debt or pledge the Company's assets that have pledged to another party; maintain the financial ratios of fixed assets to be acquired/ purchased by the Company in the future, it will be used as collateral for loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the Company will prioritize PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and its affiliates to be an arranger, underwriter and others in terms of the Company's corporate action in order to internal fund raising.

The Company should maintain the following financial ratios: current ratio at least 1 (one) time, debt to equity ratio of a maximum 3 (three) times and debt service coverage of at least 100%. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp 1,125,653,934,885, Rp 1,261,479,561,965, and Rp 760,392,364,597, respectively.

4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

The Company obtained investment credit facility for funding construction of Pejagan Pemalang Toll Ways amounted to Rp 850,000,000,000 according to the Export Investment Credit Facility Deed No. 50 dated December 23, 2014, by Notary Dewantari Handayani SH, MPA. The facility will be due on December 22, 2024.

The Company obtained an Export Working Capital Loan (EWCL) amounted to Rp 2,000,000,000,000, according to EWCL Deed No. 43 by Notary Ashoya Ratam, S.H., Mkn. dated March 24, 2017. The facility will be due on March 27, 2018.

As of March 31, 2017, all amount due from customers of project Development of Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung Port project and Ngawi Toll Road Package 1 Project (Note 5) were used as collateral bank loans of Indonesia Eximbank.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the Bank such as, a merger, acquisition can be impact to pay the obligation to the bank; obtaining new loans on projects that have been financed by the bank; expand or narrow the business that may affect the repayment of loans; the usage of credit facilities

pengembalian pinjaman; penggunaan fasilitas kredit selain daripada untuk tujuan pembiayaan fasilitas kredit; mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan; menjual atau memindahkan aset yang dijadikan jaminan; meminjamkan uang kepada siapapun, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal; bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan dan dievaluasi oleh bank setiap periode.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman Perusahaan kepada Indonesia Eximbank masing-masing sebesar Rp 626.010.276.504, Rp 1.000.109.723.966, dan nihil.

5. PT Bank Panin Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *money market* sebesar Rp 1.500.000.000.000 dan garansi bank (*switchable*) dan fasilitas *foreign exchange* USD 5.000.000 sesuai dengan surat No. 228/IBD/EXT/16 tanggal 20 Juni 2016. Fasilitas dapat digunakan sampai dengan tanggal 24 Mei 2017.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain menerima pinjaman atau kredit baru dari bank lain atau pihak ketiga yang jumlahnya dapat menyebabkan dilanggarnya rasio keuangan pada *financial covenant*; mengikatkan diri sebagai pinjaman terhadap pihak ketiga; membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada; membubarkan atau melikuidasi Perusahaan; merubah bidang/jenis usahanya; mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas utang-utangnya (*surseance van betaling*); merubah bentuk hukum atau status hukum Perusahaan; merubah anggaran dasar Perusahaan; menyewakan Perusahaan kepada pihak ketiga; menyewakan/ memindahtangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan; memindahtangankan Perusahaan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga; mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada; membayar hutangnya kepada para pemegang saham dan atau para perseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari; melakukan merger atau penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham; memperbolehkan pemegang saham untuk menarik kembali modal yang telah disetor, menjaminkan atau menggadaikan saham Perusahaan.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *debt to equity ratio* maksimum 3 kali, *debt service coverage ratio* lebih besar dari 2 kali dan *current ratio* minimal 1 kali.

for purposes other than financing credit facilities purposes; filed the bankruptcy petition to the court; sell or transfer assets used as collateral; lend money to anyone, except the result of normal business activities; act as a guarantor or pledge assets property to another party.

Under the agreement the Company should maintain the debt to equity ratio maximum 3 (three) times. The fulfillment of bank lending restrictions reported by the Company and will be evaluated by the bank each reporting period.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of Company's loan to Indonesia Eximbank amounted to Rp 626,010,276,504, Rp 1,000,109,723,966, and nil, respectively.

5. PT Bank Panin Tbk

The Company obtained money credit facilities market Rp 1,500,000,000,000 and bank guarantee (switchable) and foreign exchange facility amounted to USD 5,000,000 according to letter No. 228/IBD/EXT/16 dated June 20, 2016. This facility can be used until May 24, 2017.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent Bank, such as, received a loan or new credit from another bank or a third party whose numbers can lead to the violation of financial ratios on financial covenants; bind themselves as a loan against the third parties, new businesses opening other than an existing business; dissolve or liquidate the Company; change fields / types of business; to apply for bankruptcy or delayed payment of its debts (surseance van betaling); change the legal form or legal status of the Company; change the Company's articles of association; leasing the Company to a third party; lease / transfer the goods used as collateral; transfer the Company in any form to any third party; issuing new shares and selling existing shares; to pay their debts to shareholders and shares or the shareholder in any form for existing or that will be arise in the future; a merger or business combination that change the composition of share ownership; allow the shareholders to withdraw the capital that has been deposited, pledged or mortgaged of the Company's shares.

Under the agreement the Company should maintain the following financial ratios: debt to equity ratio maximum 3 times, debt service coverage ratio at least 2 times and current ratio

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

at least 1 times. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek *Frontage* Surabaya dan Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 2 dijaminkan atas utang bank PT Bank Panin Tbk.

As of March 31, 2017, all amount due from Costumers of Projects Frontage Surabaya and the Development of Ciawi – Sukabumi Toll Road Section 2 were pledged against bank loans of PT Bank Panin Tbk.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Panin Tbk masing-masing sebesar Rp 1.299.284.146.569, Rp 2.097.229.391.891, dan Rp 376.227.481.061.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan to PT Bank Panin Tbk amounted to Rp 1,299,284,146,569, Rp 2,097,229,391,891, and Rp 376,227,481,061 respectively.

6. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

6. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Berdasarkan surat No. SMBCI/NS/0447 tanggal 15 Desember 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia berupa fasilitas *cash loan revolving* sebesar Rp 950.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu satu bulan sejak perjanjian kredit ditandatangani, dengan suku bunga 8,50% per tahun.

Based on the letter No. SMBCI/NS/0447 dated December 15, 2016, the Company obtained a credit facility from PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia in the form of cash loan revolving facility of Rp 950.000.000.000. This facility has a term of one month since the agreement is signed, with interest rate of 8.50% per annum.

Perjanjian ini mencakup batasan – batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank antara lain, memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya hak jaminan atas aset-asetnya; menjual, mengalihkan atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Peminjam; menjual, mengalihkan atau melepaskan piutangnya dengan hak regres; mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (*set-off*) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama, dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi dilakukan terutama sebagai suatu cara untuk menambah utang pembiayaan atau membiayai pembelian aset.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the bank, such as, installing or permitting the presence or installation of security rights over its assets; sell, transfer or otherwise dispose of its assets with the provisions in which these assets can be leased or bought back by the Borrower; sell, transfer or dispose of its receivables with recourse; entered into any arrangement where the money or the benefits of a bank or other account may be used for payments, made compensation (set-off) or the possibility of combining multiple accounts; or hold priority setting receipts have the same effect, in a state where the arrangement or transaction is done mainly as a way to add debt financing or finance the purchase of assets.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan pengguna jasa atas proyek Jalan Hampengan-Mendawai II (Multi Years), Apartemen Yukata Alam Sutera, Irigasi DI Batang Alai dan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung (MYC) (Catatan 5) digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.

As at March 31, 2017, all amount due from customers of road project of Hampengan-Mendawai II (Multi Years), Apartment Yukata Alam Sutera, Irrigation DI Batang Alai and freeway project of Manado - Bitung (MYC) (Note 5) were used as collateral bank loans of PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia masing-masing sebesar Rp 949.881.831.616, Rp 300.000.000.000, dan nihil.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan to PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia amounted to Rp 949,881,831,616, Rp 300,000,000,000, and nil, respectively.

7. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp 800.000.000.000 dan fasilitas pinjaman terhadap tagihan sebesar Rp 300.000.000.000 sesuai dengan perjanjian kredit No. 16-0484/LN tanggal 17 Desember 2016. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 17 Desember 2017.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain tidak mengubah bisnis Perusahaan, Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata-rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progress pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan bank.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1,5 kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Saluran Interkoneksi DI. Osaka, proyek Pembangunan Mustika Golf Apartment, proyek Realty The Reiz Condo Medan, proyek Pembangunan Bendung DI Kamijoro Kab. Bantul (MYC), proyek Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Jombang - Madiun, Saluran Induk DI Air Lakitan, proyek Pembangunan Infrastruktur Motaain, and Pembangunan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 Paket 3.2 digunakan sebagai jaminan atas utang Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 saldo pinjaman Perusahaan kepada Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. masing-masing sebesar Rp 699.375.000.000, Rp 800.000.000.000, dan Rp 299.076.306.842.

7. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.

The Company obtained a uncommitted loan facility amounting to Rp 800,000,000,000 and loan against invoice facility amounting to Rp 300,000,000,000 according to credit agreement No. 16-0484/LN dated December 17, 2016. The facility can be used until December 17, 2017.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the Bank, among others: do not change the Company's business, the Company must maintain a licensing matters related to the business of the Company (if any). Do not dispose significant assets, there are no adverse changes in Company's financial condition. Keeping the average ownership directly or indirectly, by the Government of Indonesia for at least 51% over the period. Delivering monthly progress of work on the project financed. Submit the bill issued on the project financed. Delivering the entire case law, arbitrase or other administrative matters. Notify the bank for any failure or potential failure and convey other information as requested by the bank.

Under the agreement the Company should maintain a maximum debt equity ratio of 3 (three) times the maximum debt service coverage ratio of 1.5 times and 1 time the maximum current ratio. Fulfillment restrictions on bank lending reported by the Company at end of the year and will be evaluated by the bank.

As of March 31, 2017, all amount due from customers of projects development project Interconnection Channel DI. Osaka, construction project Mustika Golf Apartment, the project Condo Realty The Reiz Medan, Pembangunan Bendung DI Kamijoro Kab. Bantul (MYC) project, Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Jombang - Madiun project, Saluran Induk DI Air Lakitan, Pembangunan Infrastruktur Motaain project, and Pembangunan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 1 Paket 3.2 were used as collateral bank loans of Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan to Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. amounted to Rp 699,375,000,000, Rp 800,000,000,000, and Rp 299,076,306,842, respectively.

8. PT Bank UOB Indonesia

Perusahaan memperoleh fasilitas KMK sebesar Rp 600.000.000.000 sesuai dengan surat No. 16/CPB/0114 tanggal 20 Juni 2016 dan fasilitas non-kas Rp 600.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 20 Juni 2017.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain: tidak mengubah bisnis Perusahaan. Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata-rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progres pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan bank atas setiap perubahan komposisi dewan direksi dan dewan komisaris. Memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan bank.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Maloy (SPAM), Pembangunan Mako Poldo Papua Barat, Irigasi di COLO Kab. Wonogiri dan Saluran Sungai Karang Anyar digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank UOB Indonesia (Catatan 5).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1,5 kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank UOB Indonesia masing-masing sebesar Rp 405.048.823.590, Rp 484.275.698.208, dan Nihil.

9. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) *sub-limit non-cash loan* yang dapat digunakan untuk SKBDN, L/C dan bank garansi sebesar Rp 750.000.000.000 sesuai addendum perjanjian kredit No. 35 tanggal 28 Nopember 2016 oleh

8. PT Bank UOB Indonesia

The Company obtained WCL facility amounted to Rp 600,000,000,000 according to the letter of credit No. 16/CPB/0114 dated June 20, 2016 and non-cash facility amounted to Rp 600,000,000,000. This facility can be used until June 20, 2017.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the Bank among others: not change the core business of the Company. The Company should maintained important licence regarding with the Company's business (if any). Do not release of significant assets, there is no adverses changes to the Company's financial condition. Maintain the average of direct ownership averages or indirect ownership of Government of Republic of Indonesia at least 51% during the period. To submit the monthly progress of projects funded. To submit all the litigation, arbitration or other administrative suit. To inform bank for every changes of the composition of the board of directors and the board of commissioners. To inform the bank for any failure or potential failure and to inform of other information according to the bank's request.

As of 31 March 2017, all amount due from customers of projects Sistem Penyediaan Maloy (SPAM), Mako Poldo Papua Barat, Irigation in COLO Kab. Wonogiri and Karang Anyar River Canal were used as collateral bank loans of PT Bank UOB Indonesia (Note 5).

Under the agreement the Company should maintain debt to equity ratio maximum 3 (three) times, debt service coverage ratio maximum 1.5 times and current ratio maximum 1 time. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan to PT Bank UOB Indonesia amounted to Rp 405,048,823,590, Rp 484,275,698,208 and Nil, respectively.

9. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

The Company obtained a sub-limit non cash loan Working Capital Loan (WCL) facility that can be used for SKBDN, L/C, and bank guarantee amounted to Rp 750,000,000,000 according to credit agreement addendum

Notaris Indra Meidi, S.H. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 7 Nopember 2017.

No. 35 dated November 28, 2016 by Notary Indra Meidi, S.H. The facility can be used until November 7, 2017.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari bank antara lain: memindah tanggakan agunan/tagihan termin; mengubah bentuk objek agunan kredit; memperoleh fasilitas kredit investasi atau pinjaman lain dari pihak ketiga untuk proyek yang sama kecuali dalam transaksi usaha yang wajar; mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang dibiayai kepada pihak lain; penggabungan dan peleburan dengan pihak ketiga; mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang, meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha debitur; menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

This agreement includes restrictions which the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the Bank, such as: transfer the collateral/billing terms; change the type of the object of credit collateral; obtain an investment credit facility or other loans from third parties for the same project, except for the normal operation transaction; bind itself as guarantor of the debt or mortgage the Company's financed assets that financed the property to another party; acquisition and merger and merger with third parties; to apply and or encouraging others to apply to the court to be declared bankrupt or delay payment of the debt, lend money to anybody, except result of normal business activities in the debtor's business; to give up some or all of the rights and obligations of the credit facility or to another party.

Pada tanggal 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Bagian Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru (Kontrak Anak I), proyek peningkatan DI. Dumpil, rekonstruksi jalan batu Mundom – Tabuyung – Natal dan proyek Rusun Kemayoran C2-2, renovasi stadion renang (Aquatic) GBK dan pembangunan bangunan fasilitas kapal selam paket B2 digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk (Catatan 5).

As of March 31, 2017, all amount due from costumers of project Pembangunan Bagian Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru (Kontrak Anak I), proyek peningkatan DI. Dumpil, rekonstruksi jalan batu Mundom – Tabuyung – Natal dan proyek Rusun Kemayoran C2-2, renovasi stadion renang (Aquatic) GBK dan pembangunan bangunan fasilitas kapal selam paket B2 were used as collateral bank loans of PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk (Note 5).

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk masing-masing sebesar Rp 279.810.233.193, Rp 729.590.515.075, dan nihil.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan to PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk amounted to Rp 279,810,233,193, Rp 729,590,515,075, and nil, respectively.

10. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk sebesar maksimum Rp 4.402.500.000.000 dengan suku bunga *Reference Rate* + Marjin yaitu 9,7% per tahun sesuai surat No. B.101-DIS/SDK/03/2017 tanggal 22 Maret 2017. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun setelah perjanjian kredit ditandatangani.

10. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk

The Company obtained a syndicated credit facility of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk with maximum amount of Rp 4,402,500,000,000 with interest rates *Reference Rate* + Margin reflected to 9.7% per annum according to corresponding letter No. B.101-DIS/SDK/03/2017 dated March 22, 2017. The facility has a term of 4 years after the loan agreement was signed.

Tujuan dari fasilitas kredit sindikasi ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja konstruksi pengadaan transmisi 500 kV Sumatera ("Proyek Transmisi Sumatera") yang terdiri dari pengadaan

The purpose of the syndicated credit facility is to finance the working capital needs for construction procurement of Sumatera 500 kV transmission ("Sumatera Transmission

transmisi dengan rute New Aur Duri – Peranap (Seksi 1) dan rute Peranap – Perawang (Seksi 2).

Project") consisting of procurement transmission route New Aur Duri - Peranap (Section 1) and the Peranap - Perawang (Section 2).

Setelah berita acara serah terima untuk masing-masing paket pekerjaan diserahkan kepada PLN selaku owner proyek, sumber pelunasan dari fasilitas kredit ini akan beralih secara langsung kepada owner. Seluruh tagihan atas pekerjaan dan tagihan atas klaim asuransi terkait proyek yang dibiayai menjadi jaminan atas fasilitas kredit ini.

After handover for each work package submitted to PLN as the owner of the project, the source of repayment of the credit facility will be switched directly to the owner. The entire bill for the work and the bill on insurance claims related to projects financed as collateral for the credit facility.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Central Asia Tbk masing-masing sebesar Rp 141.656.140.968, Rp 141.122.302.812, dan nihil.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of Company's loan to PT Bank Central Asia Tbk amounted to Rp 141,656,140,968, Rp 141,122,302,812, and nil, respectively.

11. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

11. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akad No. 13 tanggal 20 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia berupa Musyarakah sebesar Rp 950.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman sejak 20 Oktober 2016 dan jatuh tempo pada 20 Oktober 2017. Dengan suku bunga 8,65% per tahun.

Based on agreement No. 13 dated October 20, 2016, the Company obtaining credit facility from PT Bank Maybank Indonesia in the form of Musharaka Rp 950,000,000,000 with maturities of loans since October 20, 2016 and due on October 20, 2017. With interest rates at 8.65% per annum.

Perjanjian ini mencakup batasan – batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank antara lain memindahkan hak dan/atau menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dan/atau penjamin atau menjamin/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Nasabah dan/atau Penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal); mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang; melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (kecuali pemegang saham Pemerintah Republik Indonesia).

Under the agreement the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the bank, such as transferring the rights and/or eliminate most or all of the assets of the Customer and/or guarantor or pledging/mortgaging goods moving and goods immovable property of the Customer and/or the Guarantor in any way and also to the person/party anyone (except to sell in order to conduct business normal properties); filed a petition to be declared bankrupt by the Commercial Court or apply delay payment of debts; doing dissolution or liquidation based on the decision of the General Meeting of Shareholders (except for the shareholders of the governments of the Republic of Indonesia).

Per 31 Maret 2017, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Tol Cimanggis – Cibitung Seksi I dan Pembangunan Bendungan Way Sekampung (Paket 2) digunakan sebagai jaminan atas utang PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

As of March 31, 2017, all amount due from costumers of the toll road project of Cimanggis - Cibitung Section I and the development of Dam Way Sekampung (Package 2) were used as collateral bank loans of PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk masing-masing sebesar nihil, Rp 399.918.778.730, dan nihil.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan to PT Bank Maybank Indonesia Tbk amounted to nil, Rp 399,918,778,730, and nil, respectively.

Entitas Anak – WBP

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan surat No. R-II-127-ADK/DKR-2/5/2016 tanggal 30 Mei 2016, WBP memperoleh fasilitas kredit dari BRI berupa kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 1.000.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 30 Mei 2016 dan jatuh tempo 29 Mei 2017, berdasarkan perjanjian kredit No. 116 tanggal 30 Mei 2016 dengan suku bunga 10% per tahun.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh WBP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank antara lain mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan debitur kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini; mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit; menerima pinjaman/pembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya; menyewakan asset yang dijamin di bank atau lembaga keuangan lainnya; melunasi/membayar utang kepada pemegang saham/utang persero sebelum utang di bank dilunasi terlebih dahulu; dan melakukan tindakan merger, akuisisi, *go public* dan penjualan aset debitur.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Piutang usaha dan omset kontrak proyek, baik yang telah dan/atau akan dimiliki oleh debitur yang dibiayai oleh bank dengan nilai sebesar Rp 1.200.000.000.000 akan diikat dengan *cessie* (Catatan 5).
- b. Sepuluh bidang tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Daerah Tingkat II Banyuasin, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang terdiri dari:
 - Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2796/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan Haji Djemain.
 - Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2802/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan Azhar Rumawie.
 - Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2803/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Nyonya Hajjah Ponlati.
 - Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2799/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan Juanedy.

Subsidiary – WBP

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

According to the letter No. R-II-127-ADK/DKR-2/5/2016 dated May 30, 2016, WBP entered into the credit facilities from BRI in the form of construction working capital loan Rp 1,000,000,000,000 the term of loan for 12 months since date of May 30, 2016 and will be due on May 29, 2017, based on loan agreement No. 116 dated May 30, 2016 with an interest rate of 10% per annum (p.a.).

This agreement includes restrictions that are not allowed to be done by WBP without any prior written consent from the bank, which are binds itself as surety against the other party and/or pledging debtor wealth to other parties, except those already existing; filling for bankruptcy declaration to the Commercial Court to declare itself insolvent debtor; receive a loan/new financing from banks or other financial institutions; rent the tangible assets in banks or other financial institutions; refinance/replay the debt to shareholders/limited company's debt before the bank repaid the debt in advance; taking action mergers, acquisitions, *go public* and the sale of debtor's assets.

The loan facility is collateralized and bounded with:

- a. Trade accounts receivable and turnover of project contracts, both of which have been and/or will be owned by the borrower financed by the bank in the amount of Rp 1,200,000,000,000 be tied with *cessie* (Note 5).
- b. Ten plots of land in the Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa District, Level II Daerah Banyuasin, South Sumatra Daerah Level I, which consists of:
 - A piece of land property right certificate No. 2796/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, registered in the name of Mr. Haji Djemain.
 - A piece of land property right certificate No. 2802/Gasing, measuring 20.000 sqm, registered in the name of Mr. Azhar Rumawie.
 - A piece of land property rights sertifikat No. 2803/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, registered in the name of Mrs. Hajjah Ponlati
 - A piece of land property right certificate No. 2799/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, registered in the name of Mr. Juanedy.

- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2800/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan A Makawi.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2801/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan M. Thamrin.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2805/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan Ilyas.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2804/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Nyonya Magdalena.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2798/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Tuan Abdullah Beni.
- Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 2797/Gasing, seluas 20.000 m², tercatat atas nama Nyonya Berta Mai Sundari.

- A piece of land property right certificate No. 2800/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, registered in the name of Mr. A Makawi.
- A piece of land property right certificate No. 2801/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, registered in the name of Mr. M. Thamrin.
- A piece of land property right certificate No. 2805/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, registered in the name of Mr. Ilyas
- A piece of land property right certificate No. 2804/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, registered in the name of Mrs. Magdalena.
- A piece of land property right certificate No. 2798/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, registered in the name of Mr. Abdullah Beni.
- A piece of land property right certificate No. 2797/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, registered in the name of Mrs. Berta Mai Sundari.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan debitur kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur sendiri.
3. Menyewakan aset yang dijaminkan di bank atau lembaga keuangan lainnya.
4. Melunasi / membayar utang kepada pemegang saham / utang persero sebelum utang di bank dilunasi terlebih dahulu.
5. Melakukan tindakan merger, akuisisi, go publik dan penjualan aset debitur.

Restriction of covenant:

1. Binds itself as surety against the other party and / or pledging Debtor wealth to other parties, except those already existing.
2. Filing for bankruptcy declaration to the Commercial Court to declare itself insolvent debtor.
3. Rent the tangible assets in banks or other financial institutions.
4. Refinance / repay the debt to shareholders / limited company's debt before the bank repaid the debt in advance.
5. Taking action mergers, acquisitions, going public and the sale of debtor's assets.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 945.632.801.837, Rp 698.608.576.290, dan Nihil.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan of WBP to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 945,632,801,837, Rp 698,608,576,290, and Nil respectively.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan surat No. BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Kredit modal kerja *revolving* Rp 50.000.000.000, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016. Kredit modal kerja *revolving* tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 23 Juni 2015.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

According to the letter No. BIN/2.2/094/R dated June 10, 2015, the Company entered into the credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- *Revolving working capital loan of Rp 50,000,000,000, the term of loan for 12 months since date of June 23, 2015 and will be due on June 23, 2016. Revolving working capital loan has been notarial deed based on loan agreement No. 150 dated June 23, 2015.*

- Kredit modal transaksional Rp 300.000.000.000, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016. Kredit modal transaksional tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 151 tanggal 23 Juni 2015.
- Kredit modal kerja *supply chain financing* (SCF), bank garansi dan *letter of credit* (L/C) atau SKBDN Rp300.000.000.000, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016. Kredit modal kerja SCF tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 152 tanggal 23 Juni 2015.
- Ketiga fasilitas diatas telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BIN/2.2/154/R tanggal 20 Juni 2016, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan 22 Juni 2017.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196m², terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, atas nama WSBP senilai Rp 66.038.444.437 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS. PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 (Catatan 16) akan diikat Hak Tanggungan (HT).
- Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No. 38 berlaku sejak tanggal 22 Januari 2015 dan akan berakhir pada tanggal 16 Januari 2045, dengan luas 70.099m², terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, atas nama WBP (dahulu atas nama Perusahaan) senilai Rp 88.340.004.000 (Catatan 16) sudah diikat HT.
- Satu bidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 02/Kalijaya berlaku sejak tanggal 16 Pebruari 1988 dan akan berakhir pada tanggal 16 Pebruari 2018, dengan luas 16.620m², terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 58.218.498.201 (Catatan 16) sudah diikat HT.
- Peralatan/mesin/alat berat di *Plant* Karawang, Desa Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebesar Rp 299.866.478.836 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS. PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 (Catatan 16) yang akan diikat secara fidusia.
- Peralatan/mesin/alat berat di *Plant* Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, sebesar

- *Transactional working capital loan of Rp 300,000,000,000, the term of loan for 12 months since date of June 23, 2015 and will be due on June 23, 2016. Transactional working capital loan has been notarial deed based on loan agreement No. 151 dated June 23, 2015.*
- *Working capital supply chain financing (SCF), bank guarantee and letter of credit (L/C) or SKBDN, working capital loan of Rp 300,000,000,000, the term of loan for 12 months since date of June 23, 2015 and will be due on June 23, 2016. SCF has been notarial deed based on loan agreement No. 152 dated June 23, 2015.*
- *All those three loan facilities have been extended based on approval letter of loan extension No. BIN/2.2/154/R dated on June 20, 2016, with the term of loan for 12 months until June 22, 2017.*

The loan facilities are collateral and bounded with:

- *A plot of land and building, an area of 40,196 sqm, located at Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, West Java under the name of WSBP amounted to Rp 66,038,444,437 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC. KSI/II/2015 date February 24, 2015 (Note 16) will be tied by Guarantee Right.*
- *A plot of land and building with land use rights (SHGB) No. 38 dated January 22, 2015 and the right will be expired on January 16, 2045, an area of 70,099 sqm, located at Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, West Java, under the name of WBP (formerly under the name of the Company) amounted to Rp 88,340,004,000 (Note 16) has been tied by Guarantee Right.*
- *A plot of land and building with land use rights (SHGB) No. 02/Kalijaya dated February 16, 1988 and the right will be expired on February 16, 2018, an area of 16,620 sqm, located at Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, West Java, under the name of the Company amounted to Rp 58,218,498,201 (Note 16) has been tied by Guarantee Right.*
- *Equipment/machine/heavy equipment at Karawang Plant, Desa Klari, Kabupaten Karawang, West Java amounted to Rp 299,866,478,836 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS. PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 16) will be tied by fiduciary.*
- *Equipment/machine/heavy equipment at Sidoarjo Plant, Desa Kedungwonokerto,*

Rp 175.490.704.294 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang akan diikat secara fidusia.

- Piutang usaha WBP pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 240.461.410.753 yang akan diikat secara fidusia.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.

2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/ aset dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:

- Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
- Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
- Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.

3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/ diusahakan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi), kecuali:

- Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
- Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam grup dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan.
- Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemisahan dimana perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas.

5. Melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.

6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.

East Java amounted to Rp 175,490,704,294 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS. PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 will be tied by fiduciary.

- Trade accounts receivable of WBP as of March 31, 2017 amounted to Rp 240,461,410,753 will be tied by fiduciary.

Restriction of covenant:

1. Change the business activities as stated in the article of association that can reduce the ability to pay off the credit facility.

2. Sell or transfer all of assets of the company in a single transaction or in multiple transaction, except:

- Selling or transferring assets with the provisions that are *arm's length* for the purpose to perform business activities.
- Selling or transferring assets as a replace or to be replaced with another comparable assets or better in type, nature, and quality.
- Selling or transferring assets for the purpose of government reorganization of Republic Indonesia as long as the sale of assets did not have a material result
- Selling or transferring assets that are not useful or not used with the requirements of *arm's length*.

3. Change the operational of current business that may cause material result unless required by applicable law.

4. Merger, combining, separation, liquidation or reconstruction of the company except the following requirements:

- Reorganization can be done by the Government of Republic Indonesia as long as did not have material result.
- The corporate actions with other members in the group with the provision following the requirements.
- The Company will be survived as legal entity and will have the legal status after the corporate action.
- Separation which the company became the major shareholder.

5. Changes of association that can lead to a material result.

6. Propose file of bankruptcy or postponement of debt payment to authorized parties.

7. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Berdasarkan surat dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 7 Juni 2016 No. BIN/2.2/391/R, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan persetujuan (*waiver*) atas pembatasan melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material terkait rencana WBP untuk melakukan proses penawaran umum perdana saham.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 293.000.000.000, Rp 597.024.225.547, dan Rp 109.686.898.787.

3. PT Bank Rakyat Indonesia Syariah

Berdasarkan surat akad musyarakah dengan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah No. 021/MUSY/KP/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia Syariah berupa kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 17 Oktober 2016 dan jatuh tempo 16 Oktober 2017 dan dengan suku bunga 10% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Tagihan Perusahaan dan/atau tagihan selain kepada Perusahaan (dengan persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah), sebagai *bouwheer* atas kontrak-kontrak pekerjaan yang menjadi underlying pencairan di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah.
2. Inventory berupa material yang dibeli dengan pembiayaan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah melalui skema pra proyek pendanaan.

Nilai fidusia atas jaminan berupa tagihan dan inventory adalah minimal 125% dari *plafond* fasilitas (Catatan 5 dan 9).

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah masing-masing sebesar Rp 295.005.103.698, Rp 300.000.000.000, dan Rp 301.784.934.720.

4. PT Bank ICBC Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 20 Desember 2016, WBP mendapatkan kredit modal kerja dari ICBC dengan jumlah fasilitas Rp 400.000.000.000 yang terbagi atas 2 *tranche* dimana *tranche A* sebesar Rp 200.000.000.000 merupakan *committed line* dan *tranche B* sebesar Rp 200.000.000.000 merupakan *uncommitted line*, jangka waktu pinjaman 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian. Adapun suku bunga

7. Obtain loans from other bank or financial institution.

Based on the letter from the PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dated June 7, 2016 No. BIN/2.2/391/R, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk stated a *waiver* concerning the changes restriction to the articles of association that can lead to material result in relation to the WBP's plan to conduct an initial public offering of shares.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan of WBP to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 293,000,000,000, Rp 597,024,225,547, and Rp 109,686,898,787, respectively.

3. PT Bank Rakyat Indonesia Syariah

Based on the letter of contract with PT Bank Rakyat Indonesia Syariah No. 021/MUSY/KP/10/2016 dated October 17, 2016, WBP obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia Syariah form of working capital credit construction of Rp 300,000,000,000, the loan term for 12 months since date of October 17, 2016 and with maturity date of October 16, 2017 and interest rate of 10% p.a.

This loan facility are secured with:

1. Total bill/receivable to the Company and/or other than the Company (with approval from PT Bank Rakyat Indonesia Syariah), as *bouwheer* based on contract agreement as underlying for drawdown in PT Bank Rakyat Indonesia Syariah.
2. Material inventory bought under financing of from PT Bank Rakyat Indonesia Syariah with pre-project financing scheme.

Fiduciary value with collateralized bill and inventory are minimum 125% from the *plafond* (Notes 5 and 9).

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan of WBP to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 295,005,103,698, Rp 300,000,000,000, and Rp 301,784,934,720, respectively.

4. PT Bank ICBC Indonesia

Based on the Credit Agreement No. 38 dated December 20, 2016, WBP obtained a working capital loan from ICBC with total facility Rp 400,000,000,000 divided over which the 2 *tranche* which *tranche A* amounting Rp 200,000,000,000 is *committed line* and *tranche B* amounting Rp 200,000,000,000 is *uncommitted Line*, loan period of one year from the signing of the agreement. The interest rate

dari *tranche* A sebesar 10% per tahun (*floating*) dan *tranche* B sebesar 9,75% per tahun (*floating*).

on the *tranche* A amounting to 10% p.a. (*floating*) and *tranche* B of 9.75% p.a. (*floating*).

Fasilitas ini diikat dengan agunan berupa:

This facility is collateralized with:

1. Piutang usaha WBP yang diikat secara fidusia, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 39 tanggal 20 Desember 2016 (Catatan 5).
2. Sisa nilai atau omset kontrak WBP - kontraktor harus dengan Perusahaan.

1. Trade accounts receivable WBP bound under fiduciary, based on Fiduciary Security Deed No. 39 dated December 20, 2016 (Note 5).
2. Remaining value or turnover contract of WBP - contractors should be with Company.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank ICBC Indonesia masing-masing sebesar Rp 700.000.000.000, Rp 311.427.978.883, dan nihil.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of loan of WBP to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 700,000,000,000, Rp 311,427,978,883, and nil, respectively.

21. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

21. LOAN TO FINANCIAL INSTITUTION NON-BANK

a. Bagian Jangka Pendek

a. Short-Term Portion

Perusahaan

The Company

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

Perusahaan memperoleh fasilitas KMK sebesar Rp 700.000.000.000 dari SMI sesuai dengan Surat No. S-149/SMI/DPI/04015 tanggal 16 April 2015. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan. Tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang ditarik dan/atau digunakan dan belum dibayar kembali oleh Perusahaan per tahun.

The Company obtained an WCL amounted to Rp 700,000,000,000 from SMI according to the Letter No. S-149/SMI/DPI/04015 dated April 16, 2015. The Facility has a maximum time period of 3 (three) years since the date of signing of the financing agreement. The loan interest rate is 9.5% which was calculated from the loan drawdown and/or used and has not been paid by the Company.

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan memiliki batasan-batasan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMI sejak tanggal perjanjian pembiayaan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang, antara lain:

Based on this agreement, the Company have restrictions which not allowed to do certain action without the prior written approval by SMI since the date of the financing agreement until the settlement of all liabilities, among others:

1. melakukan perubahan kepemilikan atas saham dan hak konsesi;
2. menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian harta kekayaan debitur yang telah dijaminkan;
3. menyerahkan seluruh atau sebagian dari hak atau kewajiban debitur yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada pihak lain;
4. mengadakan perubahan nama, bentuk dan status hukum, serta sifat dan kegiatan usaha debitur seperti yang sedang dilaksanakan saat ini; dan

1. conduct the changes of shares ownership and rights concessions;
2. sell, release or in any other way transfer all or part of the assets debtors who have pledged;
3. submit all or part of the rights or obligations of the debtor which arised based on this financing agreement to another party;
4. held a change of name, form and legal status, as well as the characteristic and business activities of the debtor as it is being implemented at this time; and

5. mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh debitur kepada kreditur.

5. apply for a declaration of bankruptcy to the Commercial Court to declare themselves bankrupt debtor it self since the date of the financing agreement signed until the settlement of all liabilities owned by the debtor to the creditor.

Seluruh tagihan termin pada 31 Maret 2017 yang dijaminan atas utang SMI yaitu termin atas proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang Seksi I, proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang Seksi II (Catatan 5).

All term invoices as at March 31, 2017 were pledged against loan to SMI which are Pejagan Pemalang Toll Road Section I and Pejagan Pemalang Toll Road Section II (Note 5).

Perusahaan juga memperoleh fasilitas pembiayaan dana talangan dari SMI maksimum sebesar Rp 3.703.370.000.000 dengan tarif bunga Lembaga Penjaminan (LPS) + 1,00% per tahun sesuai surat No. S-401/SMI/DPI/0616 tanggal 1 Juni 2016 fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembayaran maksimal 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan.

The Company also obtained financing facility bailout of SMI to a maximum of Rp 3,703,370,000,000 with the Deposit Insurance Agency (LPS) rate interest rate + 1.00% per annum according to the letter No. S-401 / SMI / DPI / 0616 dated June 1, 2016 the facility has a maximum term of payment one year from the date of signing of the financing agreement.

Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk pembiayaan dana talangan pembebasan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Grup, diantaranya KKDM, PPTR, PBTR, CCT, PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol (TJPT), TJT, SNJ, NKJ, JMKT, CSJ, dan CW.

The purpose of this facility is to finance the land acquisition bailout fund for the construction of toll roads owned directly or indirectly by the Group, including KKDM, PPTR, PBTR, CCT, PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol (TJPT), TJT, SNJ, NKJ, JMKT, CSJ, and CW.

Jumlah penggunaan fasilitas pembiayaan ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, and 2015 masing-masing sebesar Rp 2.644.114.049.873, Rp3.281.288.365.177, dan Rp289.295.363.429.

Amount use of this financing facility up to March 31, 2017 December 31, 2016, and 2015 amounted to Rp2,644,114,049,873, Rp 3,281,288,365,177, and Rp 289,295,363,429, respectively.

- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman bergulir sebesar Rp 800.000.000.000 dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) sesuai dengan Surat No.S.2016.612/LA/INV/IX.IIF tanggal 27 September 2016. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan. Tingkat bunga pinjaman sebesar 8,55% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang ditarik dan/atau digunakan dan belum dibayar kembali oleh Perusahaan per tahun.

- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

The Company obtained a revolving loan amounted to Rp 800,000,000,000 from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) according to the Letter No. S.2016.612/LA/INV/IX.IIF dated September 27, 2016. The Facility has a maximum time period of 1 (one) year since the date of signing of the financing agreement. The loan interest rate is 8.55% which was calculated from the loan drawdown and/or used and has not been paid by the Company.

Jumlah keseluruhan penggunaan fasilitas pembiayaan ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 48.405.233.981 dan nihil.

Amount use of this financing facility up to March 31, 2017 and December 31, 2016 amounted to Rp 48,405,233,981 and nil, respectively.

b. Bagian Jangka Panjang

Entitas anak (kepemilikan tidak langsung) – WSE,
 PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

Pada tanggal 8 Maret 2016, WSE memperoleh fasilitas pinjaman berjangka panjang dari IIF sejumlah Rp 175.000.000.000 yang terdiri dari fasilitas Kredit Investasi (KI) dan *Interest During Construction* (IDC) sebesar Rp 10.400.000.000.

Pinjaman ini dibayarkan secara cicilan triwulan sampai dengan bulan Maret 2026 dengan masa tenggang 12 bulan dimana pembayaran cicilan pertama dilakukan setelah 3 bulan setelah masa tenggang. Fasilitas pinjaman berjangka panjang ini diperoleh WSE untuk pembiayaan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hydro 2X5 MW dengan tingkat bunga per tahun sebesar 12,25%. WSE menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan piutang usaha, aset keuangan atas proyek konsesi dan aset tetap WSE.

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu yang mengharuskan Perusahaan mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan dan persyaratan lainnya.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, WSE sudah memakai Fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp 175.000.000.000 yang terdiri dari Fasilitas KI sebesar Rp 169.154.733.895 dan Fasilitas IDC sebesar Rp 5.845.266.105.

b. Long-Term Portion

The subsidiary (indirect ownership) – WSE,
 PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

On March 8, 2016, WSE obtained a long-term loan facility from IIF amounting to Rp 175,000,000,000, which consists of Investment Credit (KI) facility and Interest During Construction (IDC) facility amounting to Rp 10,400,000,000.

The loan is paid in quarterly installments until March 2026 with grace period of 12 months which the first installment payment is made after 3 months of the grace period. This long-term loan facility was obtained by the WSE to finance the construction of 2X5 MW mini-hydro power plant with interest rate per annum of 12.25%. WSE appoints PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as security agent.

The loan is collateralized with accounts receivable, financial asset from concession project and property, plant and equipment of WSE.

The loan agreements include certain requirements for the Company to maintain certain financial ratios calculated based on the financial statements and other covenants.

As of March 31, 2017 and December 31, 2016, WSE has used Loan Facility amounting to Rp 175,000,000,000 that divided into KI Facility amounting to Rp 169,154,733,895 and IDC Facility amounting to Rp 5,845,266,105, respectively.

22. UTANG USAHA

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pemasok	4.405.684.884.582	1.860.675.272.573	3.614.493.804.161
Subkontraktor	3.250.492.016.160	3.395.254.066.541	1.353.647.152.601
Ventura Bersama	1.800.232.507.477	177.101.410.554	296.130.652.816
Sewa Alat	449.715.246.454	365.974.029.747	129.940.430.260
Upah Kerja	83.366.879.214	82.518.625.204	58.779.798.114
Lain-lain	601.368.479.386	1.480.171.667.280	19.029.627.512
Jumlah	10.590.860.013.273	7.361.695.071.899	5.472.021.465.464

22. ACCOUNTS PAYABLE

Suppliers
 Subcontractors
 Joint Ventures
 Rental Equipment
 Wages
 Others
 Total

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Rincian utang usaha berelasi adalah sebagai berikut:

The following are the details related parties of accounts payable:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
KSO/JV Waskita - PP - Wika	245.349.074.249	--	--
KSO/JV Waskita - Nindya	118.865.857.719	--	--
KSO/JO Waskita - Brantas	59.032.241.397	--	--
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	--	487.145.673.781	184.249.499.440
KSO/JV Waskita - Wika	--	174.507.278.804	50.513.631.170
Lain-lain/ Others (di bawah/below Rp 50 Milyar/Billion)	887.105.630.276	2.522.325.646.264	38.819.002.758
Jumlah/ Total	1.310.352.803.641	3.183.978.598.849	273.582.133.368

Rincian utang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Following are the details third parties of accounts payable:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
KSO/JV Dredging dan Embankment	755.804.090.163	--	--
PT Citra Baru Steel	303.506.034.692	287.709.293.715	180.260.269.129
The Master Steel Manufactory	219.991.979.195	137.822.865.771	65.999.217.921
PT Posco E&C Indonesia	187.979.412.754	205.455.109.270	67.788.818.182
PT Voksel Electric	178.622.178.756	168.166.072.660	--
KSO/JV Waskita - Yasa	155.912.968.543	--	--
PT KMI Wire and Cable Tbk	131.737.975.539	98.382.394.236	--
KSO/JO Waskita - Penta	98.346.771.884	--	--
PT Len Industri	91.529.695.890	--	--
PT Hanil Jaya Steel	85.319.547.927	--	94.252.165.249
PT Janti Sarana Material Beton	82.006.505.841	59.645.167.507	--
KSO/JV Waskita - Sinar Intan	81.440.789.294	--	--
KSO/JV Waskita - Wika - Shanghai	73.377.405.695	--	--
PT Dutacipta Pakarperkasa	71.276.660.053	87.564.397.365	--
PT Kreasi Beton Nusapersada	70.054.855.855	60.265.688.877	--
PT Lancar Jaya Mandiri Abadi	69.978.904.744	--	98.344.140.988
PT Sumber Mitra Jaya	68.858.242.526	--	--
PT Inti Sumber Bajasakti	68.395.180.512	--	167.310.000.000
PT Jembo Cable Company Tbk	65.646.960.895	--	--
PT Tiga Sekawan Serasi	64.954.158.485	66.845.211.146	--
PT China Harbour Indonesia	59.478.147.780	--	--
KSO/JV Waskita - Perdasa - Buluh - Larasati	56.767.477.735	--	--
Batuhei Upl Lda	53.262.635.469	71.800.235.976	--
PT Megah Bangun Baja Semesta	52.466.393.992	--	--
PT Bukaka Teknik Utama	52.048.168.106	--	--
KSO/JV Waskita - Cahaya	51.026.769.498	--	--
PT NGK Insulator	--	78.141.662.996	--
PT Kingdom Indah	--	56.308.977.650	88.702.721.645
PT Adhimix Precast Indonesia	--	--	66.364.635.867
PT Wiryia Krenindo Perkasa	--	--	137.531.857.112
PT Sumiden Serasi Wire Product	--	--	166.605.062.353
PT Global Agung Pratama	--	--	61.209.988.687
PT Berkat Jaya Nigatama	--	--	106.447.990.446
PT KHI Pipe Industries	--	--	54.353.248.520
Lain-lain/ Others (di bawah/below Rp 50 Milyar/Billion)	6.030.717.297.809	2.799.609.395.881	3.843.269.215.997
Jumlah/ Total	9.280.507.209.632	4.177.716.473.050	5.198.439.332.096

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Following are the details of aging schedule of accounts payable:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Utang Pemasok				Suppliers Payables
> 30-90 hari				> 30-90 days
Belum Jatuh Tempo	1.756.098.010.019	419.245.773.881	1.711.795.948.053	Before due date
Sudah Jatuh Tempo	902.610.492.784	578.766.530.428	1.228.320.095.302	After due date
> 90 - 180 Hari - Sudah Jatuh Tempo	652.009.783.115	307.001.059.140	231.325.752.752	> 90 - 180 days - After due date
> 180 - 360 Hari - Sudah Jatuh Tempo	418.306.802.388	347.095.655.146	333.846.325.382	> 180 - 360 days - After due date
> 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	676.659.796.276	208.566.253.978	109.205.682.672	> 360 days - After due date
Jumlah	4.405.684.884.582	1.860.675.272.573	3.614.493.804.161	Total
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Utang Subkontraktor				Subcontractors Payables
> 30-90 hari				> 30-90 days
Belum Jatuh Tempo	1.937.694.008.486	1.499.907.158.426	930.928.994.161	Before due date
Sudah Jatuh Tempo	550.384.950.796	1.369.580.268.732	291.509.935.602	After due date
> 90 - 180 Hari - Sudah Jatuh Tempo	422.000.097.743	385.893.064.829	81.288.801.943	> 90 - 180 days - After due date
> 180 - 360 Hari - Sudah Jatuh Tempo	171.145.522.843	81.104.566.843	36.146.647.276	> 180 - 360 days - After due date
> 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	169.267.436.292	58.769.007.711	13.772.773.620	> 360 days - After due date
Jumlah	3.250.492.016.160	3.395.254.066.541	1.353.647.152.601	Total
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Utang Sewa Alat				Rental Equipment Payables
> 30-90 hari				> 30-90 days
Belum Jatuh Tempo	121.311.784.326	266.793.475.099	54.283.007.077	Before due date
Sudah Jatuh Tempo	156.034.654.837	31.117.479.857	39.284.691.136	After due date
> 90 - 180 Hari - Sudah Jatuh Tempo	84.632.309.886	41.767.849.440	18.788.817.374	> 90 - 180 days - After due date
> 180 - 360 Hari - Sudah Jatuh Tempo	68.802.214.771	15.309.753.210	11.419.380.190	> 180 - 360 days - After due date
> 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	18.934.282.634	10.985.472.141	6.164.534.483	> 360 days - After due date
Jumlah	449.715.246.454	365.974.029.747	129.940.430.260	Total
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Utang Upah Kerja				Wages Payables
> 30-90 hari				> 30-90 days
Belum Jatuh Tempo	26.855.796.793	34.056.125.018	37.912.909.431	Before due date
Sudah Jatuh Tempo	13.638.997.178	20.676.532.693	11.985.646.570	After due date
> 90 - 180 Hari - Sudah Jatuh Tempo	18.721.902.125	14.649.687.837	572.989.517	> 90 - 180 days - After due date
> 180 - 360 Hari - Sudah Jatuh Tempo	19.793.726.265	6.221.246.756	5.458.828.597	> 180 - 360 days - After due date
> 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	4.356.456.853	6.915.032.900	2.849.423.999	> 360 days - After due date
Jumlah	83.366.879.214	82.518.625.204	58.779.798.114	Total

23. UTANG BRUTO SUBKONTRAKTOR

Utang bruto subkontraktor merupakan utang kerja subkontraktor yang belum diberita acaranya, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

23. GROSS AMOUNT DUE TO SUBCONTRACTORS

Gross amount due to subcontractors represents payable for uncertified subcontractor's working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress but it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Rincian utang bruto subkontraktor berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due to subcontractors based on business unit are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Perusahaan/ The Company			
Divisi/ Division I	2.831.123.944.463	3.380.010.019.129	1.014.526.192.252
Divisi/ Division III	797.039.373.134	2.027.004.458.386	1.213.710.809.838
Divisi/ Division II	1.126.306.760.239	--	--
Divisi/ Division V	592.037.657.218	1.253.299.605.619	542.605.627.080
Divisi/ Division VI	509.587.026.878	--	--
Divisi/ Division IV	356.131.870.047	122.712.154.006	--
Divisi/ Division Relaty	--	--	10.531.448.163
Sub Jumlah/ Sub Total	6.212.226.631.979	6.783.026.237.140	2.781.374.077.333
Entitas Anak/ Subsidiary			
PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP)	753.645.324.123	508.412.829.088	519.158.615.374
Sub Jumlah/ Sub Total	753.645.324.123	508.412.829.088	519.158.615.374
Jumlah/ Total	6.965.871.956.102	7.291.439.066.228	3.300.532.692.707

Rincian utang bruto subkontraktor adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due to subcontractors are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	13.330.286.108	--	--
PT Brantas Abipraya (Persero)	11.528.829.117	--	--
PT PLN (Persero)	4.774.609.510	--	--
Koperasi Waskita	1.000.000	--	--
PT Hutama Karya (Persero)	--	341.532.562.819	--
Sub Jumlah/ Sub Total	29.634.724.735	341.532.562.819	--
Pihak Ketiga/ Third Parties			
PT Len Railway System	989.855.853.421	--	--
PT Mitra Waskita	318.673.761.353	62.392.093.900	--
PT Adi Banuwa	331.726.404.955	345.998.399.513	--
PT Lancar Jaya Maju Abadi	273.292.354.596	--	--
PT Kisi Anak Negri	245.709.147.978	--	--
PT Citra Baru Steel	226.084.748.062	36.857.758.107	--
PT China Harbour	178.434.443.341	--	--
PT Duta Cipta Pakar Perkasa	152.611.483.902	--	--
PT Berdikari Pondasi Perdana	148.730.419.205	119.085.988.951	56.830.840.532
PT China Harbour Indonesia	114.646.209.103	--	--
PT Wiswani Kharya Mandiri	92.895.645.445	--	--
PT Total Solusi Konstruksi	91.008.647.551	55.072.898.777	--
CV Amoghasida Sukses Abadi	82.081.607.375	--	--
PT Perentjana Djaja	80.809.820.270	--	--
PT Megah Bangun Baja Semesta	66.760.413.987	98.445.235.704	--
PT Hanil Jaya Steel	61.585.601.856	--	--
PT Livitra Dunia Baru	54.553.031.860	--	--
PT Lancar Jaya Mandiri Abadi	48.286.307.231	170.183.574.753	39.854.481.254
PT Mitra Tata Abadi Bersama	46.100.631.924	--	--
PT Bakrie Metal Industries	42.243.584.185	40.385.661.215	--
PT Geotechnical Engineering	41.719.950.606	112.696.940.985	--
PT Tajama Konstruksi	38.561.563.579	--	--
PT The Master Steel Manufactory	38.469.348.945	72.804.728.589	30.773.048.317
PT Jagat Baja Prima Utama	38.301.316.689	--	--
PT Andalas Karya Mulia	38.054.433.173	190.032.521.262	--
PT Brilliant Persada	37.196.193.646	--	--
PT Cahaya Teknindo Majumandiri	34.991.422.424	23.124.856.958	--
PT Spektrum Krisindo ElektriKa	34.057.535.609	46.900.000.000	--
PT Rajawali Sakti Utama	32.724.170.499	--	--
PT Teno Indonesia	32.480.485.335	--	--
PT Vadhana International	31.764.355.966	--	--
PT Geotekindo	31.709.465.793	--	--
PT Kingdom Indah	30.573.018.731	--	--
PT KMI Wire and Cable Tbk	--	189.337.411.519	34.944.648.960
Fatkhur Rozaq	--	180.001.390.861	--
PT Liftindo Prima Perkasa	--	169.474.286.663	--
PT Peret Jana Djaja	--	39.817.147.500	93.171.426.569
PT Frankpile Indonesia	--	33.759.533.638	--
PT Aneka Jaringan	--	31.631.026.048	--
PT Dwiberkah Argakencana	--	--	43.816.316.371
PT Aluphi Hijau Lumina	--	--	30.319.017.496
PT Grant Surya MultiSarana	--	--	102.380.293.997
PT Dutacia Pakar perkasa	--	--	321.514.405.722
PT Virama Karya	--	--	66.813.405.580
PT Voksel Electric Tbk	--	--	56.199.718.000
PT Lianta Surya	--	--	54.983.502.804
PT Sukses Putra Mandiri	--	--	45.515.541.466
PT Megacia Sentra Persada	--	--	45.286.143.680
PT Sukirman	--	--	42.048.858.067
PT Apora Indusma	--	--	39.433.356.267
PT WTJ Contractor Unipessoal	--	--	36.195.656.219
PT Karya Agung Sejahtera	--	--	30.658.116.094
Lain-lain/ Others (di bawah/below Rp 30 Miliar/Billion)	2.829.543.852.772	4.931.905.048.466	2.129.793.915.312
Sub Jumlah/ Sub Total	6.936.237.231.367	6.949.906.503.409	3.300.532.692.707
Jumlah/ Total	6.965.871.956.102	7.291.439.066.228	3.300.532.692.707

24. UANG MUKA KONTRAK JANGKA PENDEK

Uang muka kontrak jangka pendek merupakan uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi jangka pendek; uang muka tersebut akan dikompensasikan dengan progress pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan *progress* lapangan.

Rincian utang bruto subkontraktor berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
<i>Perusahaan/ The Company</i>			
Divisi/ Division I	111.755.192.171	25.405.296.678	68.709.858.014
Divisi/ Division III	99.145.744.289	186.761.648.657	309.675.274.745
Divisi/ Division II	68.432.881.864	--	--
Divisi/ Division V	25.873.135.781	193.757.956.370	206.003.156.224
Divisi/ Division Precast	16.652.492.500	16.652.492.500	16.652.492.500
Divisi/ Division VI	8.594.826.844	--	--
Divisi/ Division IV	5.146.948.896	11.095.618.069	122.332.682.700
Sub Jumlah/ Sub Total	335.601.222.345	433.673.012.274	723.373.464.183
<i>Entitas Anak/ Subsidiaries</i>			
PT Waskita Karya Realty	9.594.364.427	--	--
PT Waskita Beton Precast Tbk	109.908.468.050	123.586.962.146	15.943.268.273
Sub Jumlah/ Sub Total	119.502.832.477	123.586.962.146	15.943.268.273
Jumlah/ Total	455.104.054.822	557.259.974.420	739.316.732.456

Uang muka kontrak jangka pendek berdasarkan pihak-pihak pemberi kerja sebagai berikut:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
<i>Pihak Berelasi/ Related Parties</i>			
PT Ngawi Kertosono Jaya	75.609.848.229	93.480.771.225	134.818.746.910
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	64.228.952.117	79.499.528.087	83.864.100.546
PT Prima Multi Terminal (Pelindo)	34.895.581.220	38.129.041.456	67.850.433.401
KSO Waskita - PP - HK	34.251.913.525	--	--
PT Solo Ngawi Jaya	--	47.549.469.054	88.745.176.588
PT PAL Indonesia (Persero)	--	41.782.700.106	--
PT Utama Karya (Persero)	--	22.485.047.559	--
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	104.777.928.433	12.440.104.423	36.791.233.918
Sub Jumlah/ Sub Total	313.764.223.524	335.366.661.910	412.069.691.363
<i>Pihak Ketiga/ Third Parties</i>			
KSO/ JO CBMI - DDK	23.732.163.635	--	--
Pemerintah Daerah/ District Governments	--	28.237.810.123	91.079.995.683
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Ministry of Public Works and Housing	--	--	86.318.074.622
PT Toba Pengembang Sejahtera	--	--	32.005.255.201
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	117.607.667.663	193.655.502.387	117.843.715.587
Sub Jumlah/ Sub Total	141.339.831.298	221.893.312.510	327.247.041.093
Jumlah/ Total	455.104.054.822	557.259.974.420	739.316.732.456

Uang muka pada WBP, entitas anak, merupakan uang muka yang diterima atas pesanan beton precast dari pelanggan.

24. ADVANCES ON SHORT-TERM CONTRACT

Advance on Short-Term Contract represents advance received from the owners of projects on short-term construction contracts; the advances will be offset with the progress of work and terms of payment in accordance with the progress of work.

The details of gross amount due to subcontractors based on business unit are as follows:

Advance received for short term contracts based on the owner of projects are as follows:

Advances on WBP, a subsidiary, represent advances received on beton precast orders from customers.

25. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

25. ACCRUED EXPENSES

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Beban Bunga Obligasi	72.321.611.114	70.384.951.680	33.170.627.170	Bonds Interest Expenses
Beban Umum	42.408.764.608	97.181.046.474	9.181.741.312	General Expenses
Beban Kantor	45.200.827.198	66.876.092.307	38.180.674.371	Office Expenses
Beban Pegawai	11.279.708.191	7.291.444.766	28.149.313.038	Employee Expenses
Beban Operasional Proyek	275.552.148	367.518.106	7.320.509.058	Projects Operational Charges
Beban Gedung	2.325.000	2.325.000	284.204.000	Building Expenses
Lain-lain	2.487.699.386	9.197.338.892	2.325.000	Others
Jumlah	173.976.487.645	251.300.717.225	116.289.393.949	Total

Biaya yang masih harus dibayar dari operasional proyek adalah utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasional proyek perusahaan, beban gedung, beban kantor, beban pegawai dan beban umum.

Accrued expenses of operational projects represent payables to third parties in line with the project operations of the Company and others are for building expenses, office expenses, employee expense and general expenses.

Pada tanggal 31 Maret 2017, beban bunga obligasi yang masih harus dibayar merupakan beban bunga atas obligasi Perusahaan yang belum dibayar sebagai berikut:

As of March 31, 2017, accrued bonds interest expenses represents interest expenses on the Company's bonds which not yet paid as follows:

- Periode tanggal 6 Maret sampai dengan 31 Maret 2017 untuk obligasi tahun 2012;
- Periode tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 untuk obligasi tahun 2014 Tahap I; dan
- Periode tanggal 16 Januari sampai 31 Maret 2017 untuk obligasi tahun 2014 Tahap II.

- *Period of March 6 until March 31, 2017 for bonds year 2012;*
- *Period of February 18, 2017 until March 31, 2017 for bonds year 2014 Phase I; and*
- *Period of January 16 until March 31, 2017 for bonds year 2014 Phase II.*

Pada tanggal 31 Desember 2016, beban bunga obligasi yang masih harus dibayar merupakan beban bunga atas obligasi Perusahaan yang belum dibayar sebagai berikut:

As of December 31, 2016, accrued bonds interest expenses represents interest expenses on the Company's bonds which not yet paid as follows:

- Periode tanggal 6 September sampai dengan 30 September 2016 untuk obligasi tahun 2012; dan
- Periode tanggal 18 Februari sampai dengan 31 Maret 2016 untuk obligasi tahun 2014 Tahap I.

- *Period of September 6 until September, 30, 2016 for bonds year 2012; and*
- *Period of February 18 until March 31, 2016 for bonds year 2014 Phase I.*

Pada tanggal 31 Desember 2015, beban bunga obligasi yang masih harus dibayar merupakan beban bunga atas obligasi Perusahaan yang belum dibayar sebagai berikut:

As of December 31, 2015, accrued bonds interest expenses represents interest expenses on the Company's bonds which not yet paid as follows:

- Periode tanggal 6 September sampai dengan 30 September 2016 untuk obligasi tahun 2012;
- Periode tanggal 18 Februari sampai dengan 31 Maret 2016 untuk obligasi tahun 2014 Tahap I; dan
- Periode tanggal 16 Januari sampai 31 Maret 2016 untuk Obligasi tahun 2014 Tahap II.

- *Period of September 6 until September 30, 2016 for bonds year 2012;*
- *Period of February 18 until March 31, 2016 for bonds year 2014 Phase I; and*
- *Period of January 16 until March 31, 2016 for bonds year 2014 Phase II.*

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

26. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

26. OTHER SHORT-TERM LIABILITIES

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Dividen				Dividend
Perusahaan (Catatan 37)	513.999.610.755	--	--	The Company (Note 37)
Entitas Anak	126.955.502.297	--	--	Subsidiary
PT Sarana Multi Infrastruktur	515.618.647.251	--	--	PT Sarana Multi Infrastruktur
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	179.822.030.460	--	--	The Ministry of Public Works and Housing
Jasa Produksi dan Tantiem	138.240.846.375	142.770.846.375	73.500.000.000	Production Benefits and Tantiem
PT MNC Tol Investama	10.787.470.997	--	--	PT MNC Tol Investama
Iuran Dana Pensiun	5.749.993.634	3.696.810.787	3.919.393.242	Pension Fund
PT Persada Tanjung Api-api	3.341.807.800	--	--	PT Persada Tanjung Api-api
Jamsostek	2.729.721.275	6.993.861.543	105.322.917	Jamsostek
Jaminan Sewa Gedung	--	--	108.589.627	Building Rent Deposit
Lain-lain	5.271.305.573	85.832.279.787	31.337.162.477	Others
Jumlah	1.502.516.936.417	239.293.798.492	108.970.468.263	Total

27. UTANG BANK JANGKA PANJANG

27. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
Perusahaan/ The Company			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	396.636.814.367	--	--
Entitas anak / Subsidiaries Entities			
WBP:			
Utang Bank Sindikasi / Syndication Bank Loan			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan/ and			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.448.924.225.893	1.448.924.225.893	459.255.313.244
WTR:			
Utang Bank Sindikasi TJT/ Syndication Bank Loan TJT			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			
Kredit Investasi/ Investment Credit	2.438.316.742.074	286.607.670.840	166.084.231.583
Kredit IDC/ IDC Credit	48.889.407.228	18.358.716.865	3.305.895.302
Utang Bank Sindikasi SMR/ Syndication Bank Loan SMR			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
Kredit Investasi/ Investment Credit	493.911.187.234	1.834.450.303.234	574.616.407.003
Kredit IDC/ IDC Credit	35.404.338.158	35.448.868.958	41.189.245.718
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			
Kredit Investasi/ Investment Credit	--	353.438.737.637	410.676.322.411
Kredit IDC/ IDC Credit	--	25.052.816.271	29.110.335.356
Sub Jumlah/ Sub Total	4.862.082.714.954	4.002.281.339.698	1.684.237.750.617
Pihak Ketiga/ Third Parties			
WTR, Entitas Anak/ Subsidiary Entity			
Utang Bank Sindikasi SMR/ Syndication Bank Loan SMR			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			
Kredit Investasi/ Investment Credit	77.487.584.924	77.584.632.725	90.153.365.647
Kredit IDC/ IDC Credit	3.507.929.435	3.512.341.235	4.081.059.071
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			
Kredit Investasi/ Investment Credit	25.961.294.327	57.697.358.268	30.455.287.394
Kredit IDC/ IDC Credit	1.322.599.818	3.117.555.528	1.294.723.503
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur			
Kredit Investasi/ Investment Credit	57.625.298.068	25.993.853.926	67.029.928.485
Kredit IDC/ IDC Credit	3.113.642.528	1.324.268.218	3.621.973.883
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Less: Current Maturity	(5.392.000.000)	(5.392.000.000)	(5.000.000.000)
Jumlah Biaya Restrukturisasi Utang yang Belum Diamortisasi/ Total Unamortized Debt Restructuring Cost	(17.722.125.838)	(18.230.590.997)	--
Sub Jumlah/ Sub Total	145.904.223.262	145.607.418.903	191.636.337.983
Jumlah/ Total	5.007.986.938.216	4.147.888.758.601	1.875.874.088.600

Perusahaan

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional III sebesar Rp 4.200.000.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sesuai dengan surat Perjanjian Pemberian Kredit tanggal 22 Nopember 2016 yang digunakan sebagai pembiayaan belanja modal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Tol Semarang-Batang, dengan jangka waktu pinjaman 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sejak perjanjian di tandatangi dengan suku bunga 9,25% per tahun (Catatan 20).

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, and 2015 saldo pinjaman jangka panjang Perusahaan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 396.636.814.367, nihil, dan nihil.

Entitas Anak - WBP

- Utang Bank Sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan surat No. LMC1/2/442/R dari Akta Perjanjian Kredit No. 66 tanggal 30 Oktober 2015 oleh Notaris Aryani L. Rachim, S.H., di Jakarta. WBP memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan perjanjian sindikasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Tahap I sebesar Rp 1.705.720.000.000. Jangka waktu pinjaman selama 3 tahun sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 10 Agustus 2018. Fasilitas-fasilitas pinjaman ini terdiri dari:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 852.860.000.000, dan
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 852.860.000.000.

Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a) Tagihan/ piutang proyek WBP yang dibiayai diikat fidusia sebesar 100% dari nilai kontrak.
- b) Kepemilikan 60% saham KKDM oleh PT Waskita Toll Road (WTR).

The Company

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company entered into a Work Capital Loan Transactional III Facility amounted to Rp 4,200,000,000,000 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, according to a Letter of Credit Facility dated November 22, 2016 which used as investment financing to support development Semarang Batang Toll Road, with the maturity date 2 (two) years, 4 (four) months since the signed agreement, with interest 9.25% per annum (Note 20).

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of long-term loan to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp 396,636,814,367, nil, and nil, respectively.

The Subsidiary - WBP

- Syndicated Bank Loan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

According to letter No. LMC1/2/442/R from Credit Agreement Deed No. 66 dated October 30, 2015 by Notary Aryani L. Rachim, S.H., at Jakarta. WBP entered into the working capital credit with syndicate agreement facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for the project of Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Highways Section I amounted to Rp 1,705,720,000,000. The term of loan for 3 years since date October 30, 2015 and will be due to on August 10, 2018. The loan facilities consist of:

1. *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 852,860,000,000, and*
2. *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 852,860,000,000.*

The loan facilities are collateralized is guaranteed and bounded with:

- a) *Receivables of project WBP financed and bonded by fiduciary at 100% of the contract value.*
- b) *Ownership 60% shares in KKDM through PT Waskita Toll Road (WTR).*

- c) Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (*cessie*), termasuk hak untuk mengalihkan Hak Penguasaan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk pihak ketiga sebagai Operator Jalan Tol, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Akta Hak Pengelolaan Jalan Tol (*cessie*).
- d) Tagihan atas klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara fidusia sebesar 100% dari nilai pertanggungan.

Pembatasan terhadap tindakan:

- a) Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
- b) Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar debitur yang dapat mengurangi kemampuan debitur melunasi fasilitas kredit.
- c) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.
- d) Mengikat diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain yang terkait dengan aset tertentu yang dijaminkan kepada debitur sindikasi.
- e) Melakukan perubahan atas perjanjian jual beli bersyarat dengan hak untuk membeli kembali atas saham KKDM No. 24 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- f) Menyewakan aset yang dijaminkan di Kreditur Sindikasi kepada pihak lain.
- g) Melakukan penjualan aset tetap per tahun melebihi nilai Rp 500.000.000.000

Berdasarkan perjanjian ini, WBP diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh WBP setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, and 2015 saldo pinjaman jangka panjang Perusahaan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.448.924.225.893, Rp1.448.924.225.893, dan Rp 459.255.313.244.

- c) *Toll Road Concession Right of Bekasi-Cawang-Kampung Melayu based Toll Road Concession Agreement (cessie), including the right to transfer Tenure Toll Road Bekasi-Cawang-Kampung Melayu to third parties and / or appoint a third party Operator Toll Road, as the implementation of Management Rights Act of provisions Toll Road (cessie).*
- d) *The bill on insurance claims projects financed and bonded fiduciary equal to 100% of the insured amount.*

Restrictions of Covenant:

- a) *Hand over to other parties, partially or entirely on the rights and obligations arising in connection with the credit facility.*
- b) *Making changes to business activities as listed in the basic budget of debtors can reduce the ability of debtors to pay off the credit facility.*
- c) *Propose for bankruptcy or a request for a delay debt obligations to the relevant authorities.*
- d) *Act as a guarantor of debt or pledge the assets to other parties related to certain assets as collateral to the debtor syndication.*
- e) *Make changes to the conditional sale and purchase agreement with the right to repurchase the shares of KKDM No. 24 dated October 17, 2014 made in presence of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta.*
- f) *Rent the assets pledged in Syndicated Creditors to other parties.*
- g) *Making sales of property, plant and equipment per year exceeds the value Rp 500,000,000,000.*

Under the agreement, the WBP is required to maintain the following financial ratios: current ratio at least 1 (one), debt to equity ratio of a maximum 2.5 (two point five) and debt service coverage of at least 100%. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by WBP at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

As of March 31, 2017 December 31, 2016, and 2015 the balance of long-term loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,448,924,225,893, Rp1,448,924,924,225,893, and Rp459,255,313,244, respectively.

Entitas Anak - WTR

- Utang Bank Sindikasi TJT, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 29 Mei 2015 dari Muchlis Patahna, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, TJT dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani perjanjian kredit dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.915.000.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 1.754.000.000.000 dan Rp 161.000.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Ciawi - Sukabumi seksi 1 (Ciawi - Cigombong) 15,35 Km.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman jangka panjang TJT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 2.487.206.149.302, Rp 304.966.387.705, dan Rp 169.390.126.885.

- Utang Bank Sindikasi SMR, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., No. 18 tanggal 31 Januari 2008, SMR telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Kelima bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1.356.275.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 1.242.143.000.000 dan Rp 114.132.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Kanci - Pejagan.

Jangka waktu kredit investasi dan kredit *Interest During Construction* (IDC) adalah 38 triwulan atau 9,5 tahun termasuk masa tenggang 8 triwulan atau 2 tahun sejak tanggal efektif. Suku bunga pinjaman ini adalah rata-rata tertimbang atas dasar suku bunga yang disampaikan masing-masing kreditur kepada agen fasilitas untuk pertama kali adalah sebesar 14,5% per tahun.

Subsidiary - WTR

- *Syndicated Bank Loan TJT, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*

Based on Deed No. 86 dated May 29, 2015 of Muchlis Patahna, S.H., MKn, Notary in Jakarta, TJT and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk signed a loan agreement providing a loan facilities with ceiling of Rp 1,915,000,000,000 which consists of investment credit and interest during constructions amounting to Rp 1,754,000,000,000 and Rp 161,000,000,000, respectively. Both loan facilities were provided for construction of Ciawi - Sukabumi Toll Road section 1 (Ciawi - Cigombong) 15.35 Km.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of long-term loan TJT to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 2,487,206,149,302, Rp 304,966,387,705, and Rp 169,390,126,885 respectively.

- *Syndicated Bank Loan SMR, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.*

Based on Notarial Deed No. 18 of Muchlis Patahna, S.H., M Kn., dated January 31, 2008, SMR signed a Syndicated Loan Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

These five banks are providing a credit facility with a credit ceiling of Rp 1,356,275,000,000 which consists of investment credit and interest during constructions amounted to Rp 1,242,143,000,000 and Rp 114,132,000,000, respectively. Both facilities are provided for the construction of Kanci – Pejagan section toll road.

The term loan of investment credit and Interest During Construction credit (IDC) was for 38 quarter or 9.5 years including a grace period of 8 quarter or 2 years from the effective date. The interest rate of this loan is the weighted average interest rate on the basis of submitted by each creditor to the facility agent for the first time is 14.5% per annum.

Berdasarkan Akta Notaris Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., No. 39 tanggal 16 Agustus 2012, Perusahaan telah menandatangani perjanjian perubahan atas perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dimana dilakukan restrukturisasi atas utang WTR dengan merubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi awal, antara lain:

- a) Memperpanjang jangka waktu pelunasan utang menjadi tanggal 30 Januari 2023 untuk kredit investasi dan kredit IDC dengan tanggal pembayaran awal (*prepayment*) pada 31 Desember 2016;
- b) Mengubah suku bunga utang menjadi minimal 6% per tahun sampai dengan tanggal *prepayment* dan 12% per tahun setelah tanggal *prepayment* sampai dengan tanggal pelunasan utang dan menetapkan biaya tambahan yaitu *exit fee* sebesar 6% per tahun dan *administration fee* sebesar minimal 3% per tahun sampai dengan tanggal *prepayment*; dan
- c) Mengizinkan WTR untuk mengubah susunan kepemilikan saham.

Berdasarkan Akta Notaris Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., No. 18 tanggal 31 Mei 2013, WTR telah menandatangani addendum restrukturisasi utang WTR atas Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan mengubah beberapa ketentuan antara lain:

- a) Mengubah suku bunga utang menjadi 11% per tahun setelah tanggal *prepayment* sampai dengan tanggal pelunasan utang dan mengubah biaya *exit fee* sebesar 4% per tahun dan *administration fee* sebesar minimal 1% per tahun sampai dengan tanggal *prepayment*; dan
- b) Mengubah susunan jaminan WTR.

Jaminan atas pinjaman yang disyaratkan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi telah dipenuhi oleh WTR.

Based on Notarial Deed No. 39 of Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., dated August 16, 2012, the Company signed an amendment of loan syndication agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk, and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk where WTR debt restructured by changing certain clause in the initial Syndicated Credit Agreement, among others:

- a) Extend the term of loan payment to January 30, 2023 for investment credit and IDC with the initial payment date (prepayment) at December 31, 2016;*
- b) Changing loan interest rate to a minimum of 6% per annum, up to the date of prepayment and 12% per annum after the date of prepayment until the date of debt payment and determined the additional cost such as exit fee amounted to 6% per annum and administration fee of at least 3% per annum, until the date of prepayment; and*
- c) WTR allowed to change shareholders' structure.*

Based on Notarial Deed No. 18 of Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., dated May 31, 2013, WTR signed an addendum debt restructuring of loan syndication agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk, and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk by changing certain clause among others:

- a) Changing loan interest rate to 11% per annum, after the date of prepayment until the due date of the debt and changing exit fee surcharge of 4% per annum and administration fee of at least 1% per annum to date of prepayment, and*
- b) Changing the composition of WTR guarantee.*

WTR has fulfilled collateral for the loans required in the Syndicated Loan Agreement.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 saldo pinjaman jangka panjang SMR ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk masing-masing sebesar Rp 675.219.748.654, Rp 2.393.998.145.003, dan Rp 1.247.228.648.471.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the balance of long-term loan SMR to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. amounted to Rp 675,219,748,654, Rp 2,393,998,145,003, and Rp 1,247,228,648,471, respectively.

Atas pemberian kredit WTR dikenakan biaya provisi sebesar 0,50% dari jumlah maksimal fasilitas yang akan dibayarkan secara dicicil sebanyak 6 (enam) kali.

Upon granting of WTR credit, there is a provision fee of 0.50% from the maximum of facilities which will be paid with installments of 6 (six) times.

Pembatasan penting dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini adalah sebagai berikut:

Significant restrictions of this syndicated loan agreement are as follows:

- Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum sebesar 2.2 (dua koma dua) kali.
- Current Ratio* (CR) minimum sebesar 1.0 (satu koma nol) kali berdasarkan laporan keuangan 31 Desember 2018 dan selanjutnya.
- Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1.0 (satu koma nol) kali selama masa operasi. Jika DSCR kurang dari 1 (satu) kali maka pemegang saham wajib melakukan *top up*.

- Debt to Equity Ratio* (DER) of a maximum 2,2 (two point two).
- Current Ratio* (CR) of a minimum 1,0 (one) based on financial statements December 31, 2018 and forward.
- Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) of a minimum 1,0 (one) during the operation. If the DSCR is less than 1 (one) then the shareholders are required to *top up*.

28. UTANG BUNGA

Utang bunga merupakan biaya bunga yang sudah ditagihkan namun belum dibayarkan oleh CCT yang berasal dari pinjaman kepada Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun, pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar Rp 5.217.787.638, nihil, dan Rp 262.552.936.305.

28. INTEREST PAYABLE

Interest payable represent interest expense that has been billed but not paid by CCT is derived from loan to Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat and maturity period in 1 (one) year, as of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 amounted to Rp 5,217,787,638, nil, and Rp 262,552,936,305 respectively.

29. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP

Entitas anak, WTR menandatangani Perjanjian Utang Pembelian Aset Tetap untuk pembelian kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

29. DEBT PURCHASES OF FIXED ASSETS

A subsidiary, WTR entered into Loan for Purchase of Fixed Assets Agreement in order to purchase vehicles with detail as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
PT MNC Finance	190.964.354	223.103.688	227.919.189	PT MNC Finance
PT Astra Sedaya Finance	284.544.000	306.432.000	--	PT Astra Sedaya Finance
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(152.858.503)	(224.284.004)	(84.270.000)	Less: current portion maturities in one year
Bagian Jangka Panjang	322.649.851	305.251.684	143.649.189	Long-Term Portion

Utang pembelian aset tetap dikenakan bunga sebesar 17% per tahun dan jatuh tempo paling akhir 23 Mei 2018. Utang pembelian aset tetap dijamin dengan aset yang dibeli.

Debt purchases of fixed assets bears interest at 17% per annum with maturity date on May 23, 2018. Debt of fixed assets secured by the purchased assets.

30. UTANG OBLIGASI - BERSIH

30. BONDS PAYABLE - NET

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Nominal	7.232.000.000.000	5.575.000.000.000	2.675.000.000.000	Face Value
Biaya Emisi Obligasi	(15.556.620.317)	(13.329.116.048)	(7.569.409.006)	Bonds Issuance Cost
Akumulasi Amortisasi	6.895.733.173	5.854.320.716	3.203.950.112	Accumulated Amortization
Jumlah	7.223.339.112.856	5.567.525.204.668	2.670.634.541.106	Total
Biaya Emisi Obligasi	15.556.620.317	13.329.116.048	7.569.409.006	Bonds Issuance Cost
Dikurangi : Akumulasi Amortisasi	(6.895.733.173)	(5.854.320.716)	(3.203.950.112)	Less: Accumulated Amortization
Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi	8.660.887.144	7.474.795.332	4.365.458.894	Unamortized Bond Issuance Costs

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 02 tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 sebesar Rp 1.657.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dengan nilai Rp 747.000.000.000.
- Seri B dengan dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun dengan nilai Rp 910.000.000.000.

Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 02 dated February 2, 2017 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The Company issued Shelf Registration Bond II Waskita Karya Phase III Year 2017 amounted to Rp 1,657,000,000,000 which consists of two tranches:

- Tranche A with fixed interest rate of 8.50% per annum with value of Rp 747,000,000,000.
- Tranche B with fixed interest rate of 9% per annum with value of Rp 910,000,000,000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 55 tanggal 9 September 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016, dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dengan nilai Rp 900.000.000.000.

Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 55 dated September 9, 2016 from Fathiah Helmi, S.H. The Company has issued Shelf Registration Bond II Waskita Karya Phase II Year 2016 with fixed interest rate of 8.5% p.a. with value of Rp 900,000,000,000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 22 tanggal 4 April 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I tahun 2016, dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun dengan nilai Rp 2.000.000.000.000.

Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 22 dated April 4, 2016 from Fathiah Helmi, S.H., The Company has issued Shelf Registration Bond II Waskita Karya Phase I Year 2016 with fixed interest rate of 9.25% p.a. with value of Rp 2,000,000,000,000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II tahun 2015 sebesar Rp 1.500.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 29 dated September 29, 2015 by notary Fathiah Helmi, S.H., The Company has issued Shelf Registration Bond I Waskita Karya Phase II Year 2015 amounted to Rp 1,500,000,000,000 which consist of two tranches:

- Seri A dengan dengan tingkat bunga tetap 11,10% per tahun dengan nilai Rp 1.150.000.000.000.
- Seri B dengan dengan tingkat bunga tetap 10,40% per tahun dengan nilai Rp 350.000.000.000.
- Tranche A with fixed interest rate of 11.10% p.a. with value of Rp 1,150,000,000,000.
- Tranche B with fixed interest rate of 10.40% p.a. with value of Rp 350,000,000,000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 11 tanggal 4 April 2012 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No. 98 tanggal 26 April 2012 sehubungan dengan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan No. 58 tanggal 23 Mei 2012 yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 sebesar Rp 750.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun dengan nilai Rp 75.000.000.000. Obligasi ini telah dibayar lunas pada tanggal 5 Juni 2015.
- Seri B dengan dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp 675.000.000.000.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tanggal 14 Maret 2017, peringkat obligasi adalah idA- (positive outlook).

Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
- *Debt to Equity* tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu); dan
- *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).

Evaluasi pemenuhan atas persyaratan rasio dari penerbitan obligasi dilakukan pada setiap akhir tahun.

Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 11 dated April 4, 2012 in conjunction with the Deed of Amendment I Trustee Agreement No. 98 dated April 26, 2012 in conjunction with the Deed of Amendment II Trustee Agreement No. 58 dated May 23, 2012 which all are made in front of Notary Fathiah Helmi, S.H., The Company has issued Bond II Waskita Karya 2012 amounted to Rp 750,000,000,000 which consist of two tranches:

- *Tranche A* with fixed interest rate of 8.75% p.a. with value of Rp 75,000,000,000. This bond has been fully paid on June 5, 2015.
- *Tranche B* with fixed interest rate of 9.75% p.a. with value of Rp 675,000,000,000.

Based on the rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dated March 14, 2017, the bonds are rated as idA- (positive outlook).

Bonds payable requires the Company to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio* of not less than 1 : 1 (one is to one);
- *Debt to Equity* no more than 3 : 1 (three is to one); and
- *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* to Interest Expense are not less than 1.5 : 1 (one point five is to one).

The evaluation of the fulfillment of these requirements is held on each year end.

31. UTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG

Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	
Koperasi Waskita	--
PT MNC Tol Investama	--
Lain-lain/ <i>Others</i>	23.001
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	23.001
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ <i>The Ministry of Public Works and Housing</i>	
PT Sarana Multi Infrastruktur	1.244.535.951.745
PT MNC Tol Investama	--
Marco Prince Group	--
PT Daya Anugrah Manunggal	725.820.000
Lain-lain/ <i>Others</i>	561.296.678
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	1.245.823.068.423
Jumlah/ <i>Total</i>	1.245.823.091.424

31. OTHER LONG-TERM PAYABLES

31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
Rp	Rp	Rp
--	758.827.856	11.513.866.036
--	--	29.893.047.567
23.001	95.153.273	--
23.001	853.981.129	41.406.913.603
1.244.535.951.745	1.422.598.680.688	736.815.190.782
--	500.000.000.000	--
--	25.680.518.564	--
--	--	4.142.266.462
725.820.000	775.820.000	875.820.000
561.296.678	4.144.882.899	3.611.908.340
1.245.823.068.423	1.953.199.902.151	745.445.185.584
1.245.823.091.424	1.954.053.883.280	786.852.099.187

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

32. UANG MUKA KONTRAK JANGKA PANJANG

Rincian saldo uang muka kontrak jangka panjang sebagai berikut:

32. ADVANCES ON LONG-TERM CONTRACT

The details of outstanding advances on long-term contract were as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>			
PT Solo Ngawi Jaya	124.783.595.934	180.493.834.314	252.808.992.988
PT Jasamarga Kualanamu Toll	--	28.767.463.977	76.299.658.442
Lain-lain/ <i>Others</i> (di bawah/ <i>below</i> Rp 20 Miliar/ <i>Billion</i>)	22.761.179.259	10.410.862.290	39.807.709.952
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	147.544.775.193	219.672.160.581	368.916.361.382
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>			
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ <i>The Ministry of Public Works and Housing</i>	397.718.363.611	433.295.305.569	273.230.836.184
Kementerian Perhubungan/ <i>The Ministry of Transportation</i>	144.393.465.772	173.247.623.377	28.349.942.471
<i>The Ministry of Transport and Communication of the Democratic Republic of Timor Leste</i>	52.527.473.200	53.248.764.894	143.955.674.908
Pemerintah Daerah/ <i>District Governments</i>	75.601.011.230	91.079.922.107	131.859.654.075
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste/ <i>The Ministry of Public Works Democratic Republic of Timor Leste</i>	38.543.191.451	58.115.848.810	76.650.473.577
Bandar udara Internasional Jawa Barat/ <i>West Java International Airport</i>	22.900.845.465	--	--
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/ <i>The National Library of Republic Indonesia</i>	--	--	29.806.463.438
Lain-lain/ <i>Others</i> (di bawah/ <i>below</i> Rp 20 Miliar/ <i>Billion</i>)	53.608.090.173	249.655.170.009	223.333.993.298
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	785.292.440.902	1.058.642.634.766	907.187.037.951
Jumlah/ <i>Total</i>	932.837.216.095	1.278.314.795.347	1.276.103.399.333

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Rincian kewajiban imbalan pascakerja sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan kewajiban manfaat jangka panjang lainnya berdasarkan entitas yang disajikan dalam laporan keuangan interim konsolidasian adalah sebagai berikut:

33. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

The detail of post-employment benefits under Labor Law No 13/2003 and other long-term benefit based on its entities which presented in consolidated interim statements of financial position are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Perusahaan/ <i>the Company</i>	79.880.602.711	58.962.127.016	61.338.083.998
Entitas Anak/ <i>Subsidiaries</i>			
PT Cimanggis Cibitung Tollways	481.573.172	481.573.172	189.250.913
PT Semesta Marga Raya	2.809.690.660	2.809.690.660	2.471.952.310
PT Trans Jabar Tol	2.157.233.328	2.157.233.328	3.116.576.981
PT Sriwijaya Markmore Persada	936.985.992	936.985.992	--
PT Waskita Beton Precast Tbk	2.934.766.505	1.991.939.732	816.122.609
Jumlah/ <i>Total</i>	89.200.852.368	67.339.549.900	67.931.986.811

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan.

The Company provides a defined benefit and other long term benefit covering all the qualified employees.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Nilai kewajiban yang termasuk dalam laporan posisi keuangan interim dari manfaat pasca-kerja di bawah UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan kewajiban manfaat jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The amounts of liabilities included in the interim statements of financial position arising from postemployment benefits under Labor Law No. 13/2003 and other long-term benefit are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp		
Imbalan pascakerja sesuai UU Ketenagakerjaan No.13/2003	61.460.978.249	58.962.127.016	61.338.083.998	Post-employment benefits under Labor Law No. 13/2003
Manfaat jangka panjang lainnya	18.419.624.462	--	--	Other long-term benefit
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja - Akhir	79.880.602.711	58.962.127.016	61.338.083.998	Present Value Benefit Obligation - Ending

Perusahaan

Dana pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan KEP-84/MK/IV/2/1973 tanggal 28 Pebruari 1973. Pada tahun 2006, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama No. WK: L.20/P/WK/2006 dan No. AJS: 079.SJ.U.076 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 28 Juli 2006 tentang Pengelolaan Program Asuransi Pesangon Kumpulan dan Addendum I Perjanjian Kerjasama No.L.20/P/WK/2006; No. 079 Sj. U. 0706 tanggal 25 April 2008.

The Company

The pension plan is managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), the deed of establishment of which was approved by the the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his decision letter KEP-84/MK/IV/2/1973 dated February 28, 1973. In 2006, the Company signed a cooperation agreement No. WK: L.20/P/WK/2006 and No. AJS: 079.SJ.U.076 between PT Waskita Karya (Persero) Tbk and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) on July 28, 2006 concerning to Management of Severance Group Insurance Program and Addendum I to Cooperation Agreement No. L.20/P/WK/2006; No. 079 SJ. U. 0706 on April 25, 2008.

Imbalan kerja memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Employee benefit typically exposes the Company to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, instrumen utang dan real estat. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan real estate untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Investment risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, debt instruments and real estates. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan saling hapus oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko Gaji

Salary Risk

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

a. Program Imbalan Pasca-kerja

a. Post-employment Benefit Plan

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Perusahaan telah membukukan liabilitas manfaat karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan teknik aktuarial, dalam rangka penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja.

The Company established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees. The Company has recorded liabilities of employee benefits in accordance with Law No. 13 Year 2003 regarding to matter pertaining to man power, using actuarial techniques, within the framework of the implementation of Indonesian PSAK No. 24 (Revised 2013) of Employee Benefits.

Dana pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan KEP-84/MK/IV/2/1973 tanggal 28 Pebruari 1973.

The pension plan is managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), the deed of establishment of which was approved by the the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his decision letter KEP-84/MK/IV/2/1973 dated February 28, 1973.

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perusahaan sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from the Company's obligation in respect of the defined benefits plan is as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Nilai Kini Kewajiban	283.939.144.262	280.478.861.727	251.577.075.998	Present Value of Funded Obligations
Nilai Wajar Aset Program	(222.478.166.013)	(221.516.734.711)	(190.238.992.000)	Fair Value of Plan Assets
Liabilitas Bersih yang Timbul dari Kewajiban Imbalan Pasti	61.460.978.249	58.962.127.016	61.338.083.998	Net Liability Arising from Defined Benefits Obligation

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefit obligation were as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo awal nilai kini liabilitas	280.478.861.727	251.577.075.998	240.337.599.324	Beginning Balance
Biaya jasa kini	5.014.482.844	19.563.579.141	17.408.510.884	Current Service Cost
Biaya bunga	5.596.617.964	21.605.767.185	19.227.007.945	Interest Cost
(Keuntungan) Kerugian Curtailment	-	16.907.905.319	-	(Gain) Loss from Curtailment
Imbalan yang Dibayarkan	(6.433.943.701)	(30.188.140.980)	(24.173.199.283)	Benefits Payment
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto:				Remeasurement on the Net Defined Benefit (Asset) Liability:
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial yang Timbul dari Penyesuaian Pengalaman	(2.732.707.338)	3.860.291.168	-	Actuarial (Gains)/Losses Arising from Experience Adjustment
(Keuntungan) Kerugian aktuarial yang Timbul dari Perubahan Asumsi Keuangan	2.015.832.766	(2.847.616.104)	(1.222.842.872)	Actuarial (Gains)/Losses Arising from Changes in Financial Assumptions
Saldo Akhir Nilai Kini Liabilitas	283.939.144.262	280.478.861.727	251.577.075.998	Ending Balance of Present Value Obligation

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
(2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016
(2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Continued)

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets were as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Nilai wajar aset program- awal	221.516.734.711	190.238.992.030	156.486.407.760	Opening fair value of plan assets
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian):				Remeasurement gain (loss):
Imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam beban bunga neto)	4.430.334.694	17.121.509.283	12.518.912.621	Return on plan assets (excluding amounts included in net interest expense)
Kontribusi pemberi kerja	8.619.169.908	40.492.291.238	34.058.700.382	Contributions from the employer
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Aset Program	--	--	6.814.900.272	Actuarial Gain (Loss) on Assets Programs
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(6.019.476.589)	1.279.770.031	--	Exchange Rate on Foreign Exchange
Pembayaran manfaat	(6.068.596.711)	(27.615.827.871)	(19.639.929.005)	Benefits paid
Nilai Wajar Aset Program - Akhir	222.478.166.013	221.516.734.711	190.238.992.030	Closing Fair Value of Plan Assets - Ending

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

31 Desember 2015 / December 31, 2015:

**Perubahan Tingkat Diskonto/
Changes in Discounted Rate**

	Nilai Kini Kewajiban/ Present Value of Obligation Rp	Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost Rp
Naik Menjadi/ Increase to 10%	237.858.469.675	15.953.535.505
Tingkat Diskonto/ Discounted Rate 9%	251.577.075.998	17.408.510.884
Turun Menjadi/ Decrease to 8%	266.956.581.371	19.143.746.023

**Perubahan Tingkat Kenaikan Upah/
Changes in Wages Rate**

Naik Menjadi/ Increase to 9%	266.949.419.346	19.143.199.537
Tingkat Kenaikan Upah/ Wages Increase Rate 8%	251.577.075.998	17.408.510.884
Turun Menjadi/ Decrease to 7%	237.622.625.033	15.929.097.522

31 Desember 2016 / December 31, 2016:

**Perubahan Tingkat Diskonto/
Changes in Discounted Rate**

Naik Menjadi/ Increase to 10%	263.669.270.137	17.592.212.137
Tingkat Diskonto/ Discounted Rate 9%	280.478.861.727	19.563.579.141
Turun Menjadi/ Decrease to 8%	299.544.961.070	21.955.806.776

**Perubahan Tingkat Kenaikan Upah/
Changes in Wages Rate**

Naik Menjadi/ Increase to 9%	299.356.262.378	21.931.285.422
Tingkat Kenaikan Upah/ Wages Increase Rate 8%	280.478.861.727	19.563.579.141
Turun Menjadi/ Decrease to 7%	263.523.613.838	17.575.773.620

31 Maret 2017 / March 31, 2017:

**Perubahan Tingkat Diskonto/
Changes in Discounted Rate**

Naik Menjadi/ Increase to 8.5%	282.844.039.715	4.515.750.901
Tingkat Diskonto/ Discounted Rate 7.5%	283.939.144.262	5.014.482.844
Turun Menjadi/ Decrease to 6.5%	292.329.952.816	5.638.063.808

**Perubahan Tingkat Kenaikan Upah/
Changes in Wages Rate**

Naik Menjadi/ Increase to 9%	292.254.677.749	5.628.643.139
Tingkat Kenaikan Upah/ Wages Increase Rate 8%	283.939.144.262	5.014.482.844
Turun Menjadi/ Decrease to 7%	282.825.254.778	4.513.676.137

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan menurun sebesar Rp 3.976.512.093 (meningkat sebesar Rp 3.895.624.330).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan meningkat (menurun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp 13.444.276.558 (menurun sebesar Rp 13.461.895.466).
- Jika harapan hidup meningkat (menurun) dalam satu tahun untuk pria dan wanita, kewajiban imbalan pasti akan meningkat Rp 9.309.768.093 (menurun sebesar Rp 9.329.957.672).

- If the discount rate is 1% higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by Rp 3,976,512,093 (increase by Rp 3,895,624,330).
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by Rp 13,444,276,558 (decrease by Rp 13,461,895,466).
- If the life expectancy increases (decreases) by one year for both men and women, the defined benefit obligation would increase by Rp 9,309,768,093 (decrease by Rp 9,329,957,672).

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah 17,03 tahun dan 31 Desember 2016 adalah 17,21 tahun.

The average duration of the benefit obligation at March 31, 2017 is 17.03 years and at December 31, 2016 is 17.21 years.

b. Imbalan Jangka Panjang Lainnya

b. Other Long-term Benefits

Perusahaan juga menyediakan manfaat cuti besar untuk karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun dalam bentuk satu kali gaji.

The Company also provides long service leave to the employee who have already rendered 6 years of service in the form of cash amounting one time salary.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Movements in the present value long-term benefits obligations were as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal Nilai Kewajiban Manfaat Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	Beginning Balance Long-Term Benefits Obligation
Biaya Jasa Kini	634.338.661	--	--	Current Service Cost
Biaya Bunga	364.041.804	--	--	Interest Cost
Biaya Jasa Lalu	18.202.090.216	--	--	Past Service Cost
(Keuntungan) Kerugian Kurtailment	(780.846.219)	--	--	(Gain) Loss from Curtailment
Saldo Akhir Nilai Kewajiban Manfaat Jangka Panjang Lainnya	18.419.624.462	--	--	Ending Balance Long-Term Benefits Obligation

Perhitungan imbalan pasca-kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Praptasentosa Gunajasa. Asumsi aktuarial pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefits is calculated by independent actuary, PT Praptasentosa Gunajasa. Actuarial assumptions as of March 31, 2017, December 31, 2016 and 2015 as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
Tingkat Diskonto	7,50%	8%	8%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	8%	8%	8%	Annual Salary Increasing Rate
Tingkat Mortalitas	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011	Mortality Rate
Tingkat Cacat	0% TMI 2011	0% TMI 2011	0% TMI 2011	Disability Rate
Umur Pensiun Normal	56	56	56	Normal retirement age

34. MODAL SAHAM

34. SHARE CAPITAL

a. Modal Saham

Sesuai daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Share Capital

According to shareholders list from Biro Adminstrasi Efek, PT Datindo Entrycom, the composition of the Company's capital were as follows:

31 Maret/ March 31, 2017			
Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid In Capital	
26.000.000.000		2.600.000.000.000	Authorized Capital
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			Subscribed and Fully Paid Capital:
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			Preferred Stock (Dwi Warna Serie A)
1	0,00%	100	Government of Republic of Indonesia
Saham Biasa (Seri B)			Common Stock (Serie B)
8.963.697.886	66,04%	896.369.788.600	Government of Republic of Indonesia
4.610.011.563	33,96%	461.001.156.300	Public (each holding <0.5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			Total Issued and Fully Paid
13.573.709.450	100,00%	1.357.370.945.000	
31 Desember/ December 2016			
Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid In Capital	
26.000.000.000		2.600.000.000.000	Authorized Capital
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			Subscribed and Fully Paid Capital:
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			Preferred Stock (Dwi Warna Serie A)
1	0,00%	100	Government of Republic of Indonesia
Saham Biasa (Seri B)			Common Stock (Serie B)
8.963.697.886	66,04%	896.369.788.600	Government of Republic of Indonesia
4.609.956.663	33,96%	460.995.666.300	Public (each holding 0.5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			Total Issued and Fully Paid
13.573.654.550	100,00%	1.357.365.455.000	
31 Desember/ December 31, 2015			
Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid In Capital	
26.000.000.000		2.600.000.000.000	Authorized Capital
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			Subscribed and Fully Paid Capital:
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			Preferred Stock (Dwi Warna Serie A)
1	0,00%	100	Government of Republic of Indonesia
Saham Biasa (Seri B)			Common Stock (Serie B)
8.963.697.886	66,04%	896.369.788.600	Government of Republic of Indonesia
4.608.795.423	33,96%	460.879.542.300	Public (each holding <0.5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			Total Issued and Fully Paid
13.572.493.310	100,00%	1.357.249.331.000	

Dibawah ini merupakan Akta Notaris terakhir pada tahun 2017, 2016, dan 2015 terkait modal saham:

- Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 26 Mei 2015 oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor sebanyak 186.471.154 lembar. Modal disetor semula 9.727.504.205 atau setara dengan Rp 972.750.420.500 menjadi 9.913.975.359 atau setara Rp 991.397.535.900. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03/0934821 tanggal 26 Mei 2015. Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 30 Juli 2015 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, terdapat penambahan jumlah modal disetor sebanyak 3.653.498 lembar, semula 9.913.975.360 atau setara Rp 991.397.536.000 menjadi 13.567.473.559 atau setara dengan Rp 1.356.747.356.000. Perubahan tersebut disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3536245.AH.01.11 tanggal 30 Juli 2015.
- Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 6 tanggal 4 Pebruari 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui penambahan jumlah modal disetor sebanyak 5.019.750 lembar saham, semula 13.567.473.559 lembar saham atau setara Rp 1.356.747.356.000 menjadi 13.572.493.310 lembar saham atau setara Rp 1.357.249.331.000. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016611-AH.01.03 tanggal 5 Pebruari 2016.
- Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 50 tanggal 25 Nopember 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui penambahan modal disetor sebanyak 842.439 lembar saham, semula 13.572.493.310 lembar saham atau setara dengan Rp 1.357.249.331.000 menjadi 13.573.335.750 lembar saham atau setara dengan Rp 1.357.333.575.000. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0102149 tanggal 25 Nopember 2016.
- Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 126 tanggal 31 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, antara lain berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Below are the latest Notarial Deed in 2017, 2016, and 2015 related to share capital:

- Based on the Deed No. 46 dated May 26, 2015 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Company's shareholders approved the increase in the Company's to 186,471,154 shares. Paid up capital from 9,727,504,205 shares or Rp 972,750,420,500 to 9,913,975,359 shares or Rp 991,397,535,900. This change has been approved by Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03/0934821 dated May, 26, 2015. Based on the Deed No. 37 from dated July 30, 2015 Notary Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, there were increasing the number of paid-in capital as much as 3,653,498 shares, paid up capital from 9,913,975,360 or Rp 991,397,536,000 become 13,567,473,559 or Rp 1,356,747,356,000. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-3536245.AH.01.11 dated July 30, 2015.
- Based on the Deed No. 6 of General Shareholders Meeting dated February 4, 2016 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved increase in the Company's paid-in capital of 5,019,750 shares, from 13,567,473,559 shares (equal to Rp 1,356,747,356,000) to 13,572,493,310 shares (equal to Rp 1,357,249,331,000). This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decree No. AHU-0016611.AH.01.03 dated February 5, 2016.
- Based on the Deed No. 50 of General Shareholders Meeting dated November 25, 2016 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved increase in the Company's paid-in capital of 842,439 shares, from 13,572,493,310 shares or equal to Rp 1,357,249,331,000 to 13,573,335,750 shares or equal to Rp 1,357,333,575,000. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decree No. AHU-AH.01.03-0102149 dated November 25, 2016.
- The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the Notarial Deed No. 126 on March 31, 2017 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, concerning among other increase in the Company's subscribed and paid up capital. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-

Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0043583.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017.

0043583. AH.01.11 Year 2017 dated April 3, 2017.

- Penambahan modal saham sebanyak 373.700 lembar saham atau setara dengan Rp 37.369.997 yang berasal dari eksekusi MESOP periode bulan Nopember 2016 saat ini sedang dalam proses perubahan akta.

- Additional paid in capital of 373,700 shares or equal to Rp 37,369,997 from execution of MESOP for the period November 2016 is still in process of deed amendment.

35. TAMBAHAN MODAL DISETOR

35. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp		
Agio Saham				Premium on Stock
Tambahan modal disetor dari penawaran umum saham				Additional paid-in capital of a public offering
Perusahaan kepada masyarakat sebesar 3.082.315.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang ditawarkan Rp 380 per saham	863.048.200.000	863.048.200.000	863.048.200.000	of shares to the public at 3,082,315,000 shares with a nominal value of Rp 100 per share, which offered Rp 380 per share
Tambahan modal disetor dari eksekusi opsi saham karyawan	118.826.375.828	118.826.375.828	118.186.021.484	Additional paid-in capital from the exercise of employee stock options
Tambahan modal disetor dari penawaran umum terbatas I (PUT I)				Additional paid-in capital of a limited public offering (LOP I)
Perusahaan kepada masyarakat sebesar 3.653.498.200 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang ditawarkan Rp 1.450 per saham	4.969.551.418.508	4.969.551.418.508	4.969.551.418.508	of shares to the public at 3,653,498,200 shares with par value Rp 100 per share, offered Rp 1,450 per share
Dikurangi dengan biaya emisi saham	(31.910.365.455)	(31.910.365.455)	(31.910.365.455)	Less: Share Issuance Cost
Dikurangi dengan biaya emisi saham penawaran umum terbatas	(37.328.848.507)	(37.328.848.507)	(37.328.848.507)	Less: Share Issuance Cost on Limited Public Offering
Saldo Tambahan modal disetor	5.882.186.780.374	5.882.186.780.374	5.881.546.426.030	Total Paid In Capital
Modal Disetor Lainnya				Other Paid in Capital
Opsi Saham				Stock Option
Saldo Awal	490.112.010	74.986.760	43.362.737.418	Beginning Balance
Penambahan	29.612.524	693.095.314	--	Additional
Eksekusi (Catatan 36)	(11.934.124)	(277.970.064)	(43.287.750.658)	Execution (Note 36)
Jumlah	5.882.694.570.784	5.882.676.892.384	5.881.621.412.790	Total

Tambahan modal disetor - agio saham merupakan agio saham yang berasal dari penawaran umum saham Perusahaan setelah dikurangi dengan biaya emisi saham.

Additional paid in capital – premium on share represent share premium resulting from public offering by the Company net off share issuance cost.

Biaya emisi efek ekuitas merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan. Biaya ini mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas dibursa efek, serta biaya promosi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pasar Modal No. Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 yang diubah dengan Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Bab Ekuitas pasal Tambahan Modal Disetor. Biaya Emisi Efek Ekuitas berasal dari penawaran perdana tahun 2012 sebesar Rp 31.910.365.455 dan penawaran umum terbatas I tahun 2015 sebesar Rp 37.328.848.507.

Share issuance cost are payment related to the issuance of Company's equity securities. These costs include fees and commissions paid to the underwriter, supporting institutions and professionals in capital markets, and the registration document printing costs, cost of equity securities listing on the stock exchange, as well as promotional cost in accordance with the Decision of the Chairman of the Capital Market Board No. Kep-97/PM/1996 dated May 28, 1996 as amended by Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000, regulation No. VIII.G.7 of Guidelines for the Preparation of Financial Statements Chapter Equity article Additional Paid-in Capital. Share issuance costs derived from the initial public offering in 2012 amounted to Rp 31,910,365,455 and rights issues year 2015 amounted to Rp 37,328,848,507.

Biaya emisi saham telah di audit oleh Akuntan Independen Soejatna, Mulyana & Rekan tanggal 5 Pebruari 2013 dengan laporan No. 007/SMR/LAI- VIPOWK/II/2013.

Issuance costs have been audited by an Independent Accountant Soejatna, Mulyana & Partners dated February 5, 2013 with report No. 007/SMR/LAI- VIPOWK/II/2013.

36. OPSI SAHAM

36. STOCK OPTION

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal	490.112.010	74.986.760	43.362.737.418	Beginning Balance
Penambahan	-	693.095.314	-	Addition
Eksekusi (Catatan 35)	(11.934.124)	(277.970.064)	(43.287.750.658)	Execution (Note 35)
Jumlah	478.177.886	490.112.010	74.986.760	Total

Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (MESOP)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-576/ MBU/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengenai persetujuan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*), menyetujui IPO maksimum 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, termasuk program MESOP dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Pernyataan persetujuan Menteri BUMN tersebut telah diaktakan melalui akta notaris No. 57 tanggal 24 Oktober 2012, notaris Fathiah Helmi SH, notaris di Jakarta dan telah didaftarkan untuk memperoleh pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-54929.AH.01.02 tahun 2012, tanggal 24 Oktober 2012.

Berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan No. 023/SK/WK/2012 dan No.08/SK/WK/PEN/2013, Direksi memutuskan tentang program MESOP. manajemen dan pegawai Perusahaan yang berhak untuk mengikuti program MESOP terdiri dari:

- a. Komisaris Perusahaan (tidak termasuk Komisaris Independen)
- b. Direksi Perusahaan
- c. Pegawai Tetap (PT)
- d. Pegawai Tetap Unit Kerja/ Unit Bisnis (PTU)
- e. Pegawai Tidak Tetap

Pelaksanaan program MESOP akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:

MESOP Tahap I

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah hak opsi yang diterbitkan dalam program MESOP atau sebesar 173.380.000 saham seri B. Harga eksekusi sebesar Rp 438, dengan periode eksekusi setiap bulan Mei dan Nopember dengan umur opsi selama 5 tahun, dihitung dari tanggal pendistribusian 21 Januari 2013 sampai dengan 20 Januari 2018. Opsi saham mempunyai masa tunggu (*vesting period*) selama satu tahun sejak 21 Januari 2013 yang berakhir pada tanggal 20 Januari 2014.

Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) Program

Based on the letter from Minister of SOE No. S-576 MBU/2012 dated October 23, 2012 related to approval for Initial Public Offering (IPO), it was agreed that IPO is for a maximum 30% of paid up capital after IPO, including plan for MESOP program within paid up capital after IPO.

The Statement of consent from the Minister of SOE has been notarized through notarial deed No. 57 dated October 24, 2012 by Fathiah Helmi SH, Notary in Jakarta and has been registered to get approval from the Minister of Law and Human Rights with its decre No. AHU 54929.AH.01.02 year 2012 dated October 24, 2012.

Based on the decision of the Directors of the Company No. 023/SK/WK/2012 and No.08/SK/WK/PEN/2013, the Board of Directors decided on MESOP program for management and employees of the Company. Management and employees who are eligible to participate MESOP program consists of:

- a. The Commissioner of the Company (not including the Independent Commissioner)
- b. The Directors of the Company
- c. Permanent employees (PT)
- d. Permanent employees Unit/ Business Unit (PTU)
- e. Non Permanent employees

MESOP program implementation will be done by issuing option rights in 2 (two) phases with the detail are as follows:

MESOP Phase I

The total shares to be issued in phase I is 60% (sixty percent) of the number of option rights issued in MESOP program, or amounted to 173,380,000 shares of B Serie. The exercise price amounted to Rp 438, with the period of exercises of each May and November with 5 years option period, starting from the distribution date January 21, 2013 until January 20, 2018. Stock option has vesting period for one year starting January 21, 2013 will be ended on January 20, 2014.

Nilai wajar dari MESOP diestimasi dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binominal Lattice*, sesuai dengan laporan penilaian KJPP Yanuar BEY dan Rekan, tanggal 30 April 2013, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Fair value of MESOP is estimated with using Binominal Lattice model, according to valuated report by KJPP Yanuar BEY and Partner, dated April 30, 2013, with the assumptions as follows:

	MESOP 1 Tahap I/ Phase I	MESOP 1 Tahap II/ Phase II	
Suku Bunga Bebas Risiko	4,71%	6,80%	Risk Free Rate
Ekspektasi Periode Opsi (Tahun)	5	5	Expected Term (Year)
Ekspektasi Faktor Ketidakstabilan Harga Saham	50,99%	46,00%	Expected Volatility of Share PriceTerm
Ekspektasi Dividen yang Dihasilkan	3,48%	1,20%	Expected Dividend Yield

Sesuai dengan surat Perusahaan No. 177/WK/DIR/2013 tanggal 22 Februari 2013 kepada BEI, Perusahaan menyampaikan rencana pelaksanaan program MESOP Perusahaan untuk Opsi Tahap I sejumlah 173.380.000 saham Seri B dengan umur 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan dan terkena *vesting period* yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Harga pelaksanaan untuk Tahap I sebesar Rp 438 (empat ratus tiga puluh delapan) per saham mengacu pada harga rata-rata perdagangan saham Perusahaan di BEI pada penutupan perdagangan tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013.

Based on the Company's letter No.177/WK/DIR/2013 dated February 22, 2013 to the IDX, the Company submitted an implementation plan MESOP program of the Company for Phase I Option number 173,380,000 shares of Series B with the age of 5 (five) years from the date of issuance and exposed to the vesting of 1 (one) year from the date of publication. The exercise price for Phase I of Rp 438 (four hundred and thirty-eight) per share refers to the average trading price of shares on the Company share trading in IDX at the close of trading on January 17, 2013 until the date of February 21, 2013.

Berdasarkan surat No. S-0470/BEI.PPJ/02-2013 tanggal 26 Februari 2013, BEI menyetujui pencatatan saham di BEI yang berasal dari program MESOP sejumlah 173.380.000 saham Seri B.

Based on letter No. S-0470/BEI.PPJ/02-2013 dated February 26, 2013, IDX approved the listing of shares on the IDX from MESOP program amounted to 173,380,000 shares of B Series.

MESOP Tahap II

MESOP Phase II

Jumlah saham yang diterbitkan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang diterbitkan dalam program MESOP atau sebesar 115.587.000 saham Seri B. Harga eksekusi sebesar Rp 396, dengan periode eksekusi setiap bulan Maret dan Nopember dengan umur opsi selama 5 tahun, dihitung dari tanggal pendistribusian 21 Januari 2014 sampai dengan 20 Januari 2019. Opsi saham mempunyai masa tunggu (*vesting period*) selama satu tahun sejak 21 Januari 2014 yang berakhir pada tanggal 20 Januari 2015.

The total shares to be issued in phase II is 40% (forty percent) of the number of option rights issued in MESOP program, or amounted to 115,587,000 shares of B Serie. The exercise price amounted to Rp 396, with the period of exercises of each May and November with 5 years option period, starting from the distribution date on January 21, 2014 until January 20, 2019. Stock option has vesting period for one year starting January 21, 2014 will be ended on January 20, 2015.

Nilai wajar dari MESOP diestimasi dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binominal Lattice*, sesuai dengan laporan penilaian KJPP Yanuar BEY dan Rekan, tanggal 1 Juli 2014.

Fair value of MESOP is estimated with using Binominal Lattice model, according to valuated report by KJPP Yanuar BEY and Partner, dated July 1, 2014.

Berdasarkan surat No. S.00091/BEI.PPJ/01-2014 tanggal 8 Januari 2014, BEI menyetujui pencatatan saham di BEI yang berasal dari program MESOP sejumlah 115.587.000 saham seri B.

Based on letter No. S.00091/BEI.PPJ/01-2014 dated January 8, 2014, IDX approved the listing of shares on the IDX from MESOP program amounted to 115,587,000 of B series shares.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Mutasi opsi saham pada tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut:

Mutation of stock option as of March 31, 2017 as follows:

31 Maret/ March 31, 2017		
Mesop Tahap I/ Phase I		
Jumlah Opsi/ Total Option	Rata-rata Tertimbang Harga Eksekusi/ Weighted Average Execution Price	
Lembar	Rp	
Opsi Beredar		Outstanding Option
Awal Tahun	647.500	Beginning of the Year
Opsi yang Dieksekusi		Option Executed
Selama Periode Berjalan	(34.000)	during the period
Opsi yang telah Lewat		
Masa Berlakunya	--	The Expired option
Sisa Opsi yang Bisa Dieksekusi	613.500	Option can be Executed

31 Maret/ March 31, 2017		
Mesop Tahap II/ Phase II		
Jumlah Opsi/ Total Option	Rata-rata Tertimbang Harga Eksekusi/ Weighted Average Execution Price	
Lembar	Rp	
Opsi Beredar		Outstanding Option
Awal Tahun	399.250	Beginning of the Year
Opsi yang Dieksekusi		Option Executed
Selama Periode Berjalan	(20.900)	during the period
Opsi yang telah Lewat		The Expired option
Masa Berlakunya	--	
Sisa Opsi yang Bisa Dieksekusi	378.350	Option can be Executed

37. SALDO LABA

37. RETAINED EARNINGS

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Telah Ditentukan Penggunaannya				Appropriated
Saldo Awal	578.285.992.592	368.738.372.808	268.432.270.328	Beginning Balance
Penambahan Dana Cadangan	469.327.983.689	209.547.619.784	100.306.102.480	Addition on Reserved Fund
Saldo Akhir	1.047.613.976.281	578.285.992.592	368.738.372.808	Ending Balance
Belum Ditentukan Penggunaannya				Unappropriated
Saldo Awal Tahun	2.755.875.621.660	1.435.901.518.452	601.740.070.881	Beginning Balance
Dividen	(513.999.610.755)	(209.547.624.362)	(100.306.102.480)	Dividend
Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	--	20.951.161.705	(20.951.161.705)	Partnership Program and Community Development Funds
Pembentukan Cadangan Umum	(469.327.983.689)	(209.547.619.784)	(100.306.102.480)	Allocation to General Reserve
Laba Bersih	367.713.169.702	1.713.260.616.725	1.047.738.098.920	Net Income
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	(5.461.602.419)	4.857.568.924	7.986.715.316	Remeasurement of Defined Benefit Plans
Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan atas Entitas Anak	(652.057.934)	--	--	Adjustment for Ownership Changes in Subsidiaries
Saldo Akhir Tahun	2.134.147.536.565	2.755.875.621.660	1.435.901.518.452	Ending Balance

Berdasarkan Risalah Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 17 Maret 2017, pemegang saham menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2016 sebesar Rp 342.652.123.345, pembagian dividen tunai sebesar Rp 513.978.185.018 dan dana untuk PKBL tahun 2017 dihitung maksimal 2% dari laba bersih tahun buku 2016 dan menjadi beban ditahun berjalan.

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) dated March 17, 2017, shareholders approved to provide general reserve from the Company's profits in 2016 amounted to Rp 342,652,123,345, distribution of cash dividend amounted to Rp 513,978,185,018 and the fund of CSR in 2017 calculated maximum 2% of the net profit fiscal year 2016 and become expenses in current year.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 29 Maret 2016, pemegang saham menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2015 sebesar Rp 209.547.624.362, pembagian dividen tunai sebesar Rp 209.547.624.362 dan dana untuk PKBL tahun 2016 dihitung maksimal 2% dari laba bersih tahun buku 2015 dan menjadi beban ditahun berjalan.

Based on the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) dated March 29, 2016, shareholders approved to provide general reserve from the Company's profits in 2015 amounted to Rp 209,547,624,362, distribution of cash dividend amounted to Rp 209,547,624,362 and the fund of CSR in 2016 calculated maximum 2% of the net profit fiscal year 2015 and become expenses in current year.

Perusahaan membuat penyisihan untuk cadangan umum sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas. UU tersebut mengharuskan perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dana cadangan diadakan untuk menutupi kerugian yang diderita dan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan tujuan lain menurut keputusan RUPS.

The Company provided appropriation to general reserve in accordance with the Law No. 40 year 2007 concerning to Limited Company. The law requires companies in Indonesia to provide a general reserve at least 20% of the issued and fully paid capital. Reserve funds should be maintained to cover suffered losses and can be used as working capital and other purposes by the decision of the AGM.

38. PENDAPATAN USAHA

38. REVENUES

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 Tidak Diaudit/ Unaudited	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp
Jasa Konstruksi/ Construction Services	7.179.605.962.165	2.851.557.476.177	22.373.177.020.351	12.041.429.573.938
Penjualan Precast/ Sales Precast	68.534.302.323	191.301.121.143	1.148.465.037.945	2.068.569.584.101
Pendapatan Jalan Tol/ Toll Road Revenue	67.679.252.650	28.532.439.000	218.049.576.995	31.792.262.000
Pendapatan Property/ Property Revenue	19.442.738.576	--	34.123.070.824	--
Pendapatan Hotel/ Hotel Revenue	7.975.223.362	--	11.286.791.142	--
Energi/ Energy	8.787.541.517	--	1.817.717.715	--
Sewa Gedung dan Peralatan/ Buildings and Equipment Rental	2.771.507.407	151.309.367	1.403.411.375	10.961.427.573
Jumlah/ Total	7.354.796.528.000	3.071.542.345.687	23.788.322.626.347	14.152.752.847.612

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

The details of the revenues are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 Tidak Diaudit/ Unaudited	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties				
PT Jasamarga Semarang Batang	597.557.178.993	--	596.234.715.491	--
PT Utama Karya (Persero)	587.135.331.340	85.620.673.300	454.415.888.754	313.567.000.000
PT Solo Ngawi Jaya	335.985.097.884	229.440.603.062	1.672.606.302.636	677.093.192.941
PT Ngawi Kertosono Jaya	298.415.404.176	62.759.836.685	495.192.630.901	73.634.543.207
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	219.004.370.370	--	125.643.387.195	--
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	200.863.056.320	303.216.722.077	1.536.285.402.182	524.525.248.651
PT Jasamarga Kualanamou Tol	160.623.493.639	207.782.496.876	979.253.880.502	75.129.254.035
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	87.634.948.368	117.662.932.285	518.044.070.377	2.094.491.480.505
PT Prima Multi Terminal	--	90.748.583.266	208.326.907.704	283.887.000.000
PT Semen Padang (Persero)	--	26.257.494.367	82.749.366.123	135.454.787.214
PT Dahana (Persero)	--	21.521.767.794	58.722.697.323	--
PT PAL Indonesia (Persero)	--	--	386.735.272.893	77.070.375.353
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Milyar/ Billion)	128.661.504.430	165.126.153.523	353.787.717.352	960.903.603.945
Sub Jumlah/ Sub Total	2.615.880.385.520	1.310.137.263.235	7.467.998.239.433	5.215.756.485.851
Pihak Ketiga/ Third Parties				
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	901.149.551.534	266.505.849.898	3.479.869.336.585	474.248.037.491
BPJT - PT Waskita Bumi Wira	722.413.574.897	--	--	--
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	616.417.235.539	206.544.105.827	2.513.248.310.900	2.297.143.976.942
BPJT - PT Pejagan Pemalang Tol Road	620.899.506.928	374.649.260.641	1.506.913.587.174	775.768.889.077
BPJT - PT Sriwijaya Markmore Persada	508.527.390.625	--	1.069.610.216.646	--
BPJT - PT Pemalang Batang Toll Road	354.392.317.276	--	431.342.347.877	--
BPJT - PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	226.553.761.789	972.210.200	464.878.516.388	--
BPJT - PT Trans Jabar Tol	145.737.671.818	101.695.827.208	750.621.881.839	--
Bandar Udara Jawa Barat/ The International Airport of West Java	106.021.381.818	--	137.631.330.909	28.604.160.000
Pemerintah Daerah/ District Governments	91.447.779.696	167.974.425.567	1.412.671.607.898	1.775.454.566.441
BPJT - PT Cimanggis Cibitung Tollways	59.719.286.442	119.253.898.466	824.191.515.523	66.049.594.231
PT Toba Pengembang Sejahtera	58.181.116.325	30.196.000.000	231.195.854.271	47.289.965.725
The Ministry of Transport and Communication of the Republica Democratica de Timor Leste	--	--	339.050.831.254	132.022.674.165
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Milyar/ Billion)	327.455.567.793	493.613.504.645	3.159.099.049.650	3.340.414.497.689
Sub Jumlah/ Sub Total	4.738.916.142.480	1.761.405.082.452	16.320.324.386.914	8.936.996.361.761
Jumlah/ Total	7.354.796.528.000	3.071.542.345.687	23.788.322.626.347	14.152.752.847.612

Rincian pemberi kerja dengan nilai kontribusi pendapatan melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan untuk tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 sebagai berikut:

Details of the project owners with contribution value exceeding 10% of the Company revenues for March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 Tidak Diaudit/ Unaudited	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp
BPJT/ BPJT	2.578.524.223.333	477.317.298.049	4.223.366.549.924	--
Kementerian Perhubungan/ Ministry of Transportation	901.149.551.534	--	3.479.869.336.585	--
Kemntrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	--	--	2.513.248.310.900	2.297.143.976.942
Pemerintah Daerah/ District Governments	--	--	--	1.775.454.566.441
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	--	--	--	2.094.491.480.505
Jumlah/ Total	3.479.673.774.867	477.317.298.049	10.216.484.197.409	6.167.090.023.888

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

39. BEBAN POKOK PENDAPATAN

39. COST OF REVENUES

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 Tidak Diaudit/ Unaudited	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Jasa Konstruksi					Construction Services
Subkontraktor	2.777.247.319.908	308.774.796.917	10.425.156.132.066	2.781.829.240.030	Subcontractor
Beban Tidak Langsung	1.603.155.045.663	525.419.141.689	1.883.835.711.581	1.855.739.383.491	Indirect Costs
Bahan Baku	1.415.535.264.530	1.234.528.459.034	5.120.030.909.144	4.688.913.482.778	Raw Material
Upah	346.334.989.923	318.357.189.752	1.353.026.655.308	1.148.981.615.143	Wages
Jumlah Jasa Konstruksi	6.142.272.620.024	2.387.079.587.392	18.782.049.408.099	10.475.463.721.442	Total Constructions Services
Jalan Tol	24.958.486.253	27.054.171.135	116.019.023.473	15.430.859.631	Toll Roads
Properti dan Hotel	23.324.385.348	--	29.078.434.240	--	Property and Hotel
Energi	448.958.463	--	93.421.909	--	Energy
Produk Beton					Concrete Products
Persediaan Awal	231.947.161.468	74.775.806.857	54.551.293.293	21.178.898.885	Beginning Balance
Pembelian	146.248.817.115	175.307.391.985	776.772.855.839	1.647.838.409.966	Purchases
Barang tersedia untuk Dijual	378.195.978.583	250.083.198.842	831.324.149.132	1.669.017.308.851	Goods Available for Sale
Persediaan Akhir	373.851.906.108	146.715.430.075	231.947.161.468	54.551.293.293	Ending Balance
Beban Bahan Baku	4.344.072.475	103.367.768.767	599.376.987.664	1.614.466.015.558	Raw Material Expenses
Beban Upah	9.651.659	5.511.146.035	48.074.550.263	62.167.488.369	Direct Labour Expenses
Beban Overhead	45.035.148.036	28.902.732.750	245.792.542.256	63.986.729.135	Overhead Expenses
Jumlah Produk Beton	49.388.872.170	137.781.647.552	893.244.080.183	1.740.820.233.062	Total Concrete Products
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	6.240.393.322.258	2.551.915.406.079	19.820.484.367.904	12.231.514.814.135	Total Cost of Revenues

40. BEBAN PENJUALAN DAN BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

40. SELLING EXPENSES AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 Tidak Diaudit/ Unaudited	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Penjualan/ Selling Expenses				
Pemasaran/ Marketing	4.547.124.677	3.060.375.177	17.454.094.594	24.842.435.891
Tender/ Tender	3.998.653.544	5.025.701.506	14.676.073.710	11.347.970.009
Iklan/ Advertising	745.391.600	266.920.750	1.022.803.693	1.220.491.883
Jumlah/ Total	9.291.169.821	8.352.997.433	33.152.971.997	37.410.897.783
Beban Umum dan Administrasi/ General and Administrative Expenses				
Pegawai/ Employee	68.741.131.128	41.386.547.587	229.191.450.703	169.280.619.105
Penyusutan (Catatan 16)/ Depreciation (Note 16)	27.695.206.889	10.668.015.687	27.482.382.725	8.087.449.686
Pesangon/ Severance	25.331.216.813	9.260.303.398	34.938.064.246	24.435.337.851
Umum/ General	11.600.659.196	9.338.877.468	88.257.352.262	57.698.226.489
Perjalanan Dinas/ Travelling	8.847.500.557	5.819.683.760	30.609.411.811	28.076.564.683
Kantor/ Office	8.403.543.456	10.811.681.764	23.680.684.284	11.648.813.085
Gedung/ Building	4.547.589.606	3.594.345.508	13.945.568.510	17.937.970.633
Jamsostek/ Jamsostek	2.203.936.448	1.228.192.083	8.359.658.840	12.763.768.078
DPLK/ DPLK	197.341.145	--	638.515.036	5.826.031.980
Penyisihan Piutang/ Allowance For Doubtful Account	--	--	138.796.155.649	70.910.494.722
Bonus/THR / Bonus/ THR Allowance	--	--	17.146.161.720	--
Lain-lain/ Others	17.368.915	302.261.586	142.084.216.275	73.500.500.000
Jumlah/ Total	157.585.494.153	92.409.908.841	755.129.622.061	480.433.300.070

41. PENDAPATAN LAIN-LAIN

41. OTHER INCOME

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 Tidak Diaudit/ Unaudited	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan atas Bunga Pinjaman/ <i>Income from Borrowing Interest</i>	68.753.974.013	4.427.110.380	--	--
Pemulihan Piutang/ <i>Recovery of Receivables</i>	4.594.400.004	--	230.000.000	1.138.130.626
Klaim Asuransi/ <i>Insurance Claims</i>	2.872.791.670	219.577.722	2.144.740.300	18.902.860
Pendapatan Lain-lain KSO/ <i>Others JV Income</i>	414.692.362	--	1.445.705.069	53.126.681.480
Pendapatan Lain-lain Proyek/ <i>Others Project Income</i>	237.902.349	4.981.742.777	12.174.602.549	125.400.267.160
Lain-lain/ <i>Others</i>	8.020.890.148	4.143.010.194	131.479.700.074	5.968.360.907
Jumlah/ Total	84.894.650.546	13.771.441.073	147.474.747.992	185.652.343.033

42. BEBAN LAIN-LAIN

42. OTHER EXPENSES

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 Tidak Diaudit/ Unaudited	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban dan Denda Pajak/ <i>Tax Expenses and Penalty</i>	31.698.320.380	3.021.420.933	23.962.074.620	13.196.330.835
Beban Lain-lain Proyek/ <i>Others Project Expenses</i>	8.907.951.963	1.382.059.342	5.056.988.882	1.981.149.553
Beban Lain-lain KSO/ <i>Others JV Expenses</i>	668.996.172	391.301.191	6.353.929.051	21.525.296.830
Lain-lain/ <i>Others</i>	45.969.165.205	104.309.129	8.322.305.097	3.215.977.157
Jumlah/ Total	87.244.433.720	4.899.090.595	43.695.297.650	39.918.754.375

43. BEBAN KEUANGAN

43. FINANCIAL CHARGES

Akun ini merupakan beban bunga atas utang bank/ non-bank, beban provisi, dan beban administrasi bank yang terkait dengan perolehan pinjaman Perusahaan selama periode berjalan setelah dikurangi biaya bunga yang secara langsung dapat diatribusikan dengan biaya perolehan suatu proyek tertentu yang memenuhi syarat dan beban bunga atas utang obligasi Perusahaan.

This account represents interest expenses on bank loans/ non-banks, provision fees, and administrative expenses related to the acquisition of bank loans during the current period after deducting the interest costs which are directly attributable to the cost of a qualifying project and the interest expense on debt Corporate bonds.

44. BAGIAN LABA (RUGI) BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

44. EQUITY IN NET INCOME (LOSS) OF ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 Tidak Diaudit/ Unaudited	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Bagian Laba (Rugi) Bersih Ventura Bersama Konstruksi (Catatan 13)	5.014.275.422	(35.158.248.339)	(18.395.139.264)	11.599.215.444	<i>Equity in Net Income (Loss) of Construction Joint Ventures (Note 13)</i>
Bagian Laba Entitas Asosiasi (Catatan 13)	5.508.780.189	--	11.038.334.301	(1.487.457.144)	<i>Equity in Net Income of Associates Entities (Note 13)</i>
Jumlah	10.523.055.611	(35.158.248.339)	(7.356.804.963)	10.111.758.300	Total

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

45. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

45. NON-CONTROLLING INTEREST

31 Maret/ March, 2017					
Kepemilikan/ Ownership	Nilai Awal/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) Current Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deduction)	Nilai Akhir/ Ending Balance	
%	Rp	Rp	Rp	Rp	
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WKR)	0,01%	997.464	4.510	--	1.001.974
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WTR)	0,01%	1.003.938	(99.820)	--	904.118
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WBP)	0,01%	2.119.069	96.019	--	2.215.088
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WKE)	0,01%	535.927	(122.473)	1.000.000	1.413.454
PT Shalawat Power (Untuk/ for PT WSE)	15,00%	4.960.378.620	(237.624.394)	--	4.722.754.226
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WTTR)	0,00%	956.978	330	--	957.308
PT Bakrie and Brothers Tbk (Untuk/ for PT CCT)	5,00%	4.583.669.249	(127.104.792)	--	4.456.564.457
PT Bakrie Toll Indonesia (Untuk/ for PT CCT)	5,00%	4.583.669.249	(127.104.792)	--	4.456.564.457
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TJT)	10,14%	153.701.404	--	--	153.701.404
PT Jasa Sarana (Untuk/ for TJT)	8,21%	(153.701.404)	--	--	(153.701.404)
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TPJT)	20,00%	46.583.250.871	(3.299.385.054)	--	43.283.865.817
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for SMR)	22,30%	29.101.868.165	(1.165.429.137)	--	27.936.439.028
PT Sumber Mitra Jaya (Untuk/ for PT PBTR)	40,00%	262.371.421.600	60.812.100	--	262.432.233.700
PT Persada Tanjung Api-api (Untuk/ for PT Srimp)	30,00%	128.308.472.355	(992.657.837)	--	127.315.814.518
PT Sriwijaya Marga Persada (Untuk/ for PT Srimp)	4,00%	17.107.796.314	11.078.198	--	17.118.874.512
Perusahaan Daerah Prodexim (Untuk/ for PT Srimp)	1,00%	4.276.949.079	2.769.550	--	4.279.718.629
Kayson Company (Untuk/ for PT Srimp)	5,00%	21.384.745.392	1.089.592.068	--	22.474.337.460
PT Energi Bumi Mining (Untuk/ for PT WBW)	25,00%	--	9.368.170	3.547.920.225	3.557.288.395
PT Panca Wira Usaha	20,00%	--	7.494.537	2.838.336.181	2.845.830.718
PT Dana Tabungan dan Asuransi Negeri (Persero)	16,61%	--	(16.580.091.427)	2.000.084.029.056	1.983.503.937.629
PT Sarana Multi Infrastruktur	12,46%	--	(12.437.564.069)	1.499.914.326.246	1.487.476.762.177
Masyarakat Umum (Untuk/ for PT WBP)	40,00%	5.180.397.473.565	91.744.405.062	(126.955.502.297)	5.145.186.376.330
Jumlah/ Total		5.703.665.307.835	57.958.436.749	3.379.430.109.411	9.141.053.853.995

31 Maret/ March, 2016 (Tidak diaudit/Unaudited)					
Kepemilikan/ Ownership	Nilai Awal/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) Current Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deduction)	Nilai Akhir/ Ending Balance	
%	Rp	Rp	Rp	Rp	
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WKR)	0,01%	975.882	(16.657)	--	959.225
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WTR)	0,01%	1.019.050	(1.360)	--	1.017.690
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WBP)	0,01%	1.779.084	41.723	--	1.820.807
PT Shalawat Power (Untuk/ for PT WSE)	15,00%	5.631.307.120	(86.116.028)	--	5.545.191.092
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WTTR)	0,00%	1.000.000	--	--	1.000.000
PT Bakrie and Brothers Tbk (Untuk/ for PT CCT)	5,00%	4.624.764.223	(75.267.006)	--	4.549.497.217
PT Bakrie Toll Indonesia (Untuk/ for PT CCT)	5,00%	4.624.764.223	(75.267.006)	--	4.549.497.217
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TJT)	10,14%	32.230.665.023	(54.456.234)	--	32.176.208.789
PT Jasa Sarana (Untuk/ for TJT)	8,21%	26.096.031.542	(44.091.290)	--	26.051.940.252
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TPJT)	20,00%	50.114.375.332	(331.666.839)	--	49.782.708.493
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for SMR)	22,30%	33.785.044.286	(2.532.346.580)	--	31.252.697.706
Jumlah/ Total		157.111.725.765	(3.199.187.277)	--	153.912.538.488

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Kepemilikan/ Ownership	31 Desember/ December, 2016				
	Nilai Awal/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) Current Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deduction)	Nilai Akhir/ Ending Balance	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WKR)	0,01%	975.882	21.582	--	997.464
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WTR)	0,01%	1.019.050	(15.112)	--	1.003.938
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WBP)	0,01%	1.779.084	339.985	--	2.119.069
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WKE)	0,01%	--	(464.073)	1.000.000	535.927
PT Shalawat Power (Untuk/ for PT WSE)	15,00%	5.631.307.120	(670.928.500)	--	4.960.378.620
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WTTR)	0,00%	1.000.000	(43.022)	--	956.978
PT Bakrie and Brothers Tbk (Untuk/ for PT CCT)	5,00%	4.624.764.223	8.905.026	(50.000.000)	4.583.669.249
PT Bakrie Toll Indonesia (Untuk/ for PT CCT)	5,00%	4.624.764.223	8.905.026	(50.000.000)	4.583.669.249
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TJT)	10,14%	32.230.665.023	196.061.303	(32.273.024.922)	153.701.404
PT Jasa Sarana (Untuk/ for TJT)	8,21%	26.096.031.542	158.722.720	(26.408.455.666)	(153.701.404)
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TPJT)	20,00%	50.114.375.332	(3.531.124.461)	--	46.583.250.871
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for SMR)	22,30%	33.785.044.286	(4.683.176.121)	--	29.101.868.165
PT Sumber Mitra Jaya (Untuk/ for PT PBTR)	40,00%	--	187.112.686	262.184.308.914	262.371.421.600
PT Persada Tanjung Api-api (Untuk/ for PT Srimp)	30,00%	--	199.593.201	128.108.879.154	128.308.472.355
PT Sriwijaya Marga Persada (Untuk/ for PT Srimp)	4,00%	--	26.612.427	17.081.183.887	17.107.796.314
Perusahaan Daerah Prodekim (Untuk/ for PT Srimp)	1,00%	--	6.653.107	4.270.295.972	4.276.949.079
Kayson Company (Untuk/ for PT Srimp)	5,00%	--	33.265.533	21.351.479.859	21.384.745.392
Masyarakat Umum (Untuk/ for PT WBP)	40,00%	--	107.867.558.752	5.072.529.914.813	5.180.397.473.565
Jumlah/ Total		157.111.725.765	99.808.000.059	5.446.745.582.011	5.703.665.307.835

Kepemilikan/ Ownership	31 Desember/ December, 2015				
	Nilai Awal/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) Current Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deduction)	Nilai Akhir/ Ending Balance	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WKR)	0,01%	942.800	33.082	--	975.882
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WTR)	0,01%	1.006.109	12.941	--	1.019.050
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WBP)	0,01%	1.249.714	529.370	--	1.779.084
PT Shalawat Power (Untuk/ for PT WSE)	15,00%	5.856.327.838	(225.020.718)	--	5.631.307.120
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WTTR)	0,00%	--	--	1.000.000	1.000.000
PT Bakrie and Brothers Tbk (Untuk/ for PT CCT)	5,00%	--	--	4.624.764.223	4.624.764.223
PT Bakrie Toll Indonesia (Untuk/ for PT CCT)	5,00%	--	--	4.624.764.223	4.624.764.223
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TJT)	10,14%	--	--	32.230.665.023	32.230.665.023
PT Jasa Sarana (Untuk/ for TJT)	8,21%	--	--	26.096.031.542	26.096.031.542
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TPJT)	20,00%	--	--	50.114.375.332	50.114.375.332
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for SMR)	22,30%	--	77.019.179	33.708.025.107	33.785.044.286
Jumlah/ Total		5.859.526.461	(147.426.146)	151.399.625.450	157.111.725.765

46. LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

46. EARNING PER SHARE

Following the details of the calculation of basic earning per share:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 Tidak Diaudit/ Unaudited	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk	367.713.169.702	127.311.585.135	1.713.260.616.725	1.047.738.098.920	Net Income Attributable to Parent Entity
Jumlah Saham Awal Periode	13.573.709.450	11.616.999.722	11.616.466.357	9.657.683.327	Beginning Balance of Shares
Tambahan Rata-rata Bertimbang atas Saham Beredar Program MESOP	--	--	533.365	117.019.554	Additional Weighted Average of Shares from MESOP Program
Tambahan Rata-rata Bertimbang atas Saham Beredar dari Penawaran Umum Terbatas I	--	--	--	1.841.763.476	Additional Weighted Average of Shares from Right Issue I
Jumlah Rata-rata Bertimbang Saham	13.573.709.450	11.616.999.722	11.616.999.722	11.616.466.357	Weighted Average of Shares
Laba Per Saham Dasar					Basic Earning Per Shares
Dasar	27,09	10,96	147,48	90,19	Basic
Dilusian	--	--	147,47	90,18	Diluted

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016 Tidak Diaudit/ Unaudited	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Laba yang Digunakan sebagai Pembilang dalam Perhitungan Laba Per Saham dan Per Saham Dilusian	367.713.169.702	127.311.585.135	1.713.260.616.725	1.047.738.098.920	Income Used as Numerator in Calculating Basic Earning Per Share and Diluted Earning Per Share
Rata-rata Tertimbang Efek Dilusi - MESOP	13.573.709.450	13.572.493.310	11.617.848.768	11.618.120.788	
Laba Per Saham Dilusian	<u>27,09</u>	<u>9,38</u>	<u>147,47</u>	<u>90,18</u>	

47. BANK GARANSI DAN LETTER OF CREDIT

Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Indonesia Eximbank masing-masing dengan jumlah maksimum Rp 3.219.689.344.799, Rp 3.000.000.000.000, Rp 4.500.000.000.000 dan Rp 500.000.000.000.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 Perusahaan telah menggunakan bank garansi sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - OAF
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - BPF
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SCF
PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk - SCF
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
Jumlah/ Total

Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. masing-masing dengan jumlah maksimum Rp 100.000.000.000, Rp 100.000.000.000 dan Rp 300.000.000.000.

Perusahaan juga memiliki fasilitas L/C dan SKBDN yang telah digunakan sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - OAF
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - BPF
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SCF
PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk - SCF
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
Jumlah/ Total

47. BANK GUARANTEE AND LETTER OF CREDIT

The Company obtained bank guarantees facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and Indonesia Eximbank with maximum amount of Rp 3,219,689,344,799, Rp 3,000,000,000,000, Rp 4,500,000,000,00 and Rp 500,000,000,000, respectively.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the Company had used related bank guarantees as follow:

31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
Rp	Rp	Rp
1.356.150.000.000	1.875.000.000.000	1.600.000.000.000
1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	600.000.000.000
1.006.000.000.000	1.006.000.000.000	1.006.000.000.000
400.000.000.000	400.000.000.000	--
100.000.000.000	--	--
<u>4.062.150.000.000</u>	<u>4.481.000.000.000</u>	<u>3.206.000.000.000</u>

The Company obtained bank guarantees facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. with maximum amount of Rp 100,000,000,000, Rp 100,000,000,000 and Rp 300,000,000,000, respectively.

The Company also obtained L/C and SKBDN facilities with the total usage as follow:

31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
Rp	Rp	Rp
1.264.203.967.982	839.418.132.782	1.486.918.511.956
708.789.210.643	897.121.450.519	520.059.765.301
673.235.743.313	786.247.342.663	251.128.695.224
354.627.301.085	284.550.843.100	--
9.750.159.840	--	--
<u>3.010.606.382.863</u>	<u>2.807.337.769.064</u>	<u>2.258.106.972.481</u>

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

48. FASILITAS KREDIT MODAL KERJA (KMK) DAN SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF)

Perusahaan dan entitas anak memiliki fasilitas KMK dan SCF yang digunakan untuk membayar tagihan mitra kerja sebagai berikut:

Pihak Berelasi/ *Related Parties*

Perusahaan/ *the Company*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia Syariah

Entitas Anak/ *Subsidiary* - WBP

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pihak Ketiga/ *Third Parties*

Perusahaan/ *the Company*

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.

Jumlah/ Total

48. WORKING CAPITAL LOANS FACILITY (WCL) AND SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF)

The Company and a subsidiary obtained WCL and SCF facilities were used to pay working partners' bill as follow:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>			
Perusahaan/ <i>the Company</i>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.425.000.000.000	1.875.000.000.000	1.600.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	600.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.006.000.000.000	1.006.000.000.000	1.006.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia Syariah	400.000.000.000	400.000.000.000	--
Entitas Anak/ <i>Subsidiary</i> - WBP			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	250.000.000.000	250.000.000.000	--
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>			
Perusahaan/ <i>the Company</i>			
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	100.000.000.000	--	--
Jumlah/ Total	4.381.000.000.000	4.731.000.000.000	3.206.000.000.000

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 jumlah penggunaan fasilitas tersebut sebagai berikut:

As of March 31, 2017, December 31 2016 and 2015 the total amounts of facility utilized, were as follow:

Pihak Berelasi/ *Related Parties*

Perusahaan/ *the Company*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia Syariah

Entitas Anak/ *Subsidiary Entity* - WBP

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pihak Ketiga/ *Third Parties*

Perusahaan/ *the Company*

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.

Jumlah/ Total

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>			
Perusahaan/ <i>the Company</i>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.264.203.967.982	839.418.132.782	1.486.918.511.956
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	708.789.210.643	897.121.450.519	520.059.765.301
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	673.235.743.313	786.247.342.663	251.128.695.224
PT Bank Negara Indonesia Syariah	354.627.301.085	284.550.843.100	--
Entitas Anak/ <i>Subsidiary Entity</i> - WBP			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54.757.491.862	247.228.772.917	--
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>			
Perusahaan/ <i>the Company</i>			
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	9.750.159.840	--	--
Jumlah/ Total	3.065.363.874.725	3.054.566.541.981	2.258.106.972.481

Pada tanggal pelaporan, penggunaan fasilitas SCF masih tercatat dalam utang usaha.

As of reporting date, the total amounts of SCF facility utilized is recognized in accounts payable

49. TRANSAKSI NON-KAS

49. NON-CASH TRANSACTIONS

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Penambahan Aset Tetap Melalui Utang Usaha	896.929.989.848	1.494.258.842.505	512.055.597.970	<i>Acquisition of Fixed Asset Through Accounts Payable</i>
Amortisasi Biaya Obligasi	6.895.733.173	5.854.320.716	3.203.950.112	<i>Amortisation Bonds Expenses</i>
Jumlah	903.825.723.021	1.500.113.163.221	515.259.548.082	Total

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

50. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015, Perusahaan mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent Rp
Aset/ Assets						
<i>Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents</i>						
USD	2.986.872	39.788.120.706	8.103.634	109.042.498.823	2.911.779	40.167.994.484
SGD	31.850	303.592.466	31.879	296.444.409		
YEN	11.898.457	1.414.131.620	11.898.457	1.373.081.942	10.831.419	1.240.414.143
EURO	565	8.033.507	566	8.012.326	579	8.725.989
SAR	243.717	865.712.939	232.904	810.503.705	1.223.558	4.498.069.140
MYR	132.446	470.464.608	174.885	542.725.487	759.888	2.438.973.394
<i>Piutang Usaha/ Accounts Receivable</i>						
SAR	14.706.222	52.238.264.776	14.891.492	51.822.243.284	13.986.601	51.417.821.416
USD	3.666.552	48.842.137.531	--	--	--	--
<i>Piutang Retensi/ Retention Receivables</i>						
SAR	8.427.227	29.934.520.841	8.536.121	29.705.615.846	6.541.890	24.049.426.559
USD	4.230.692	56.357.045.788	3.679.665	49.513.566.703	--	--
<i>Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa/ Gross Amount Due From Customers</i>						
SAR	1.331.773	4.730.617.357	--	--	4.672.221	17.176.111.375
USD	36.772.997	489.853.097.046	38.601.815	519.426.023.065	22.645.475	312.394.324.338
Jumlah/ Total		724.805.739.185		762.540.715.590		453.391.860.838

50. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCY

As of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 the Company have monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were as follow:

51. SEGMENT OPERASI

a. Informasi tentang Produk dan Jasa

Segmen operasi Perusahaan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.

Informasi Segmen berdasarkan jenis usaha/ produk adalah sebagai berikut:

51. OPERATION SEGMENT

a. Information Related to Products and Services

The Company's operation segment is grouped based on the work performed.

Details information of segment based on the type of business/ product were as follow:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017						Jumlah/ Total Rp	
	Konstruksi/ Constructions Rp	Sewa Gedung/ Building Rental Rp	Properti & Hotel/ Property & Hotel Rp	Precast Rp	Energi/ Energy Rp	Toll/ Toll Rp		
Pendapatan Usaha	7.179.605.962.165	2.771.507.407	27.417.961.938	68.534.302.323	8.787.541.517	67.679.252.650	7.354.796.528.000	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	6.142.272.620.024	--	23.324.385.348	49.388.872.170	448.958.463	24.958.486.253	6.240.393.322.258	Cost of Revenues
Laba Bruto	1.037.333.342.141	2.771.507.407	4.093.576.590	19.145.430.153	8.338.583.054	42.720.766.397	1.114.403.205.742	Gross Profit
<i>Tidak Dapat Dialokasikan:</i>								<i>Unallocated:</i>
Beban Usaha	--	--	--	--	--	--	(166.876.663.974)	Operating Expenses
Penghasilan Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	183.746.012.841	Other Revenues - Net
Beban Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	(153.705.036.745)	Other Expenses - Net
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	--	977.567.517.864	Income Before Tax and Financial Charges
Beban keuangan	--	--	--	--	--	--	(466.096.845.137)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	--	--	--	--	--	--	10.523.055.611	Equity in Net Income of Associates and Joint Ventures
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	--	521.994.728.338	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	--	(96.323.121.887)	Income Tax Expenses
Laba Bersih Periode Berjalan							425.671.606.451	Net Income in Current Period

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

31 Maret 2017/March 31, 2017							
Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Precast	Energi/ Energy	Toll/ Toll	Jumlah/ Total	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset							Assets
Piutang Usaha	1.216.299.790.780	551.280.058	--	3.718.269.919.987	--	4.935.120.990.825	Accounts Receivable
Piutang Retensi	995.505.458.205	--	--	--	--	995.505.458.205	Retention Receivable
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	15.297.828.173.046	--	--	--	--	15.297.828.173.046	Gross Amount Due from Customers
Persediaan	1.193.816.091.884	--	742.912.854.476	370.020.548.229	--	2.306.749.494.589	Inventories
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	44.580.271.840.987	Unallocated Assets
Jumlah Aset						68.115.475.957.652	Total Assets
Liabilitas							Liabilities
Utang Usaha	10.590.860.013.273	--	--	--	--	10.590.860.013.273	Accounts Payable
Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga	6.965.871.956.102	--	--	--	--	6.965.871.956.102	Gross Amount Due to Third Parties
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	30.500.992.265.849	Unallocated Liabilities
Jumlah Liabilitas						48.057.724.235.224	Total Liabilities

31 Desember 2016/ December 31, 2016								
Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Precast	Energi/ Energy	Toll/ Toll	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Pendapatan Usaha	22.373.177.020.351	1.403.411.375	45.409.861.966	1.148.465.037.945	1.817.717.715	218.049.576.995	23.788.322.626.347	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	18.782.049.408.099	--	29.078.434.240	893.244.080.183	93.421.909	116.019.023.473	19.820.484.367.904	Cost of Revenues
Laba Bruto	3.591.127.612.252	1.403.411.375	16.331.427.726	255.220.957.762	1.724.295.806	102.030.553.522	3.967.838.258.443	Gross Profit
<u>Tidak Dapat Dialokasikan:</u>							<u>Unallocated:</u>	
Beban Usaha	--	--	--	--	--	(1.112.587.064.071)	Operating Expenses	
Penghasilan Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	334.957.925.290	Other Revenues - Net	
Beban Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	(44.427.617.995)	Other Expenses - Net	
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	3.145.781.501.667	Income Before Tax and Financial Charges	
Beban Keuangan	--	--	--	--	--	(982.835.623.286)	Financial Charges	
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(7.356.804.963)	--	--	--	--	(7.356.804.963)	Equity in Net Income of Associates and Joint Ventures	
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	2.155.589.073.418	Income Before Tax	
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	(342.520.456.635)	Income Tax Expenses	
Laba Bersih Tahun Berjalan						1.813.068.616.783	Net Income in Current Year	

31 Desember 2016/ December 31, 2016							
Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Precast	Energi/ Energy	Toll/ Toll	Jumlah/ Total	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset							Assets
Piutang Usaha	1.889.871.188.326	264.196.029	--	3.353.308.297.700	--	5.243.443.682.055	Accounts Receivable
Piutang Retensi	966.697.328.380	--	--	--	--	966.697.328.380	Retention Receivables
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	13.109.720.040.549	--	--	--	--	13.109.720.040.549	Gross Amount Due from Customers
Persediaan	1.586.613.309.252	--	738.171.352.822	231.947.161.468	--	2.556.731.823.542	Inventories
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	39.556.419.299.921	Unallocated Assets
Jumlah Aset						61.433.012.174.447	Total Assets
Liabilitas							Liabilities
Utang Usaha	7.361.695.071.900	--	--	--	--	7.361.695.071.900	Accounts Payable
Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga	7.291.439.066.228	--	--	--	--	7.291.439.066.228	Gross Amount Due to Third Parties
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	30.006.659.479.371	Unallocated Liabilities
Jumlah Liabilitas						44.659.793.617.499	Total Liabilities

31 Maret 2016/ March 31, 2016							
Tidak Diaudit (Unaudited)							
Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Precast	Toll/ Toll	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Pendapatan Usaha	2.851.557.476.177	151.309.367	--	191.301.121.143	28.532.439.000	3.071.542.345.687	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	2.387.079.587.392	--	--	137.781.647.552	27.054.171.135	2.551.915.406.079	Cost of Revenues
Laba Bruto	464.477.888.785	151.309.367	--	53.519.473.591	1.478.267.865	519.626.939.608	Gross Profit
<u>Tidak Dapat Dialokasikan:</u>						<u>Unallocated:</u>	
Beban Usaha	--	--	--	--	--	(100.762.906.274)	Operating Expenses
Penghasilan Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	51.466.970.115	Other Revenues - Net
Beban Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	(58.260.978.393)	Other Expenses - Net
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	412.070.025.056	Income Before Tax and Financial Charges
Beban Keuangan	--	--	--	--	--	(169.678.527.625)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	--	--	--	--	--	(35.158.248.339)	Equity in Net Income of Associates and Joint Ventures
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	207.233.249.092	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	(83.120.851.234)	Income Tax Expenses
Laba Bersih Periode Berjalan						124.112.397.858	Net Income in Current Period

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

31 Desember 2015/ December 31, 2015								
Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung & Alat/ Building & Equipment Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Precast	Energi/ Energy	Toll/ Toll	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Pendapatan Usaha	12.041.429.573.938	10.961.427.573	--	2.068.569.584.101	--	31.792.262.000	14.152.752.847.612	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	10.475.463.721.442	--	--	1.740.620.233.062	--	15.430.859.631	12.231.514.814.135	Cost of Revenues
Laba Bruto	1.565.965.852.496	10.961.427.573	--	327.949.351.039	--	16.361.402.369	1.921.238.033.477	Gross Profit
Tidak Dapat Dialokasikan:							Unallocated:	
Beban Usaha	--	--	--	--	--	--	(798.758.686.917)	Operating Expenses
Penghasilan Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	364.425.686.299	Other Revenues - Net
Beban Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	(39.918.754.375)	Other Expenses - Net
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	--	1.446.986.278.484	Income Before Tax and Financial Charges
Beban Keuangan	--	--	--	--	--	--	(340.008.402.044)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	10.111.758.300	--	--	--	--	--	10.111.758.300	Equity in Net Income of Associates and Joint Ventures
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	--	1.117.089.634.740	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	--	(69.498.961.966)	Income Tax Expenses
Laba Bersih Tahun Berjalan							1.047.590.672.774	Net Income in Current Year

31 Desember 2015/ December 31, 2015							
Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Precast	Energi/ Energy	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Aset						Assets	
Piutang Usaha	2.039.591.459.987	--	--	344.778.548.830	--	2.384.370.008.817	Accounts Receivable
Piutang Retensi	731.619.042.743	--	--	--	--	731.619.042.743	Retention Receivables
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	5.104.681.626.858	--	--	--	--	5.104.681.626.858	Gross Amount Due from Customers
Persediaan	771.832.842.346	--	--	54.551.293.293	--	826.384.135.639	Inventories
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	21.262.056.163.411	Unallocated Assets
Jumlah Aset						30.309.111.177.468	Total Assets
Liabilitas						Liabilities	
Utang Usaha	5.472.021.465.464	--	--	--	--	5.472.021.465.464	Accounts Payable
Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga	3.300.532.692.707	--	--	--	--	3.300.532.692.707	Gross Amount Due to Third Parties
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	11.832.350.151.633	Unallocated Liabilities
Jumlah Liabilitas						20.604.904.309.804	Total Liabilities

b. Informasi tentang Wilayah Geografis

Grup beroperasi di enam wilayah geografis utama yang berlokasi di Jakarta (Catatan 1).

Informasi segmen berdasarkan daerah geografis adalah sebagai berikut:

b. Information Related to the Geographic

The Group's operation are located in six principal geographical areas which located in Jakarta (Note 1).

Information segment based on geographical area were as follow:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Aset/Assets			
Konstruksi/Constructions			
Divisi I/ Division I - Jakarta	8.099.236.944.839	9.083.190.160.897	5.259.480.924.838
Divisi III/ Division III - Jakarta	7.459.383.737.353	7.408.209.115.819	3.258.238.550.857
Divisi V/ Division V - Jakarta	1.695.359.412.121	3.701.334.360.620	2.880.480.994.343
Divisi IV/ Division IV - Surabaya	2.695.768.125.404	2.425.366.849.797	2.778.545.497.846
Divisi II/ Division II - Jakarta	6.183.431.003.534	--	--
Divisi VI/ Division VI - Palembang	1.694.477.149.179	--	--
	27.827.656.372.430	22.618.100.487.133	14.176.745.967.884
Properti/ Property			
Divisi Realty/ Realty Division - Jakarta	380.344.534.303	380.365.565.902	555.375.264.835
WKR - Jakarta	2.484.714.745.365	2.342.206.940.616	1.201.898.166.481
	2.865.059.279.668	2.722.572.506.518	1.757.273.431.316
Sewa Gedung/ Building Rent			
Kantor Pusat/ Head Office - Jakarta	24.261.900.914.541	24.308.753.026.682	12.619.477.720.804
	24.261.900.914.541	24.308.753.026.682	12.619.477.720.804
Beton Precast/ Precast			
Divisi Precast/ Precast Division - Jakarta	143.918.820.934	153.315.333.616	248.337.880.007
WBP - Jakarta	13.807.976.717.016	13.734.267.485.212	4.332.409.010.247
	13.951.895.537.950	13.887.582.818.828	4.580.746.890.254
Energi/ Energy			
WSE - Jakarta	287.278.584.895	275.343.132.832	226.594.743.949
WKE - Jakarta	42.709.909.165	6.235.309.510	--
	329.988.494.060	281.578.442.342	226.594.743.949
Jalan Toll/ Toll Road			
WTR - Jakarta	27.552.910.834.053	22.740.076.933.040	9.515.304.757.334
	27.552.910.834.053	22.740.076.933.040	9.515.304.757.334
Jumlah Sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	96.789.411.432.702	86.558.664.214.543	42.876.143.511.541
Eliminasi/ Elimination	(28.673.935.475.050)	(25.125.652.040.096)	(12.567.032.334.073)
Jumlah Setelah Eliminasi/ Total After Elimination	68.115.475.957.652	61.433.012.174.447	30.309.111.177.468

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas dan Ekuitas/ Liabilities and Equities			
Konstruksi/Constructions			
Divisi II/ Division I - Jakarta	8.099.236.944.839	9.083.190.160.897	5.259.480.924.838
Divisi III/ Division III - Jakarta	7.459.383.737.353	7.408.209.115.819	3.258.238.550.857
Divisi VI/ Division V - Jakarta	1.695.359.412.121	3.701.334.360.620	2.880.480.994.343
Divisi IV/ Division IV - Surabaya	2.695.768.125.404	2.425.366.849.797	2.778.545.497.846
Divisi III/ Division II - Jakarta	6.183.431.003.534	--	--
Divisi VI/ Division VI - Palembang	1.694.477.149.179	--	--
	27.827.656.372.430	22.618.100.487.133	14.176.745.967.884
Properti/ Property			
Divisi Realty/ Realty Division - Jakarta	380.344.534.303	380.365.565.902	555.375.264.835
WKR - Jakarta	2.484.714.745.365	2.342.206.940.616	1.201.898.166.481
	2.865.059.279.668	2.722.572.506.518	1.757.273.431.316
Sewa Gedung/ Building Rent			
Kantor Pusat - Jakarta	24.261.900.914.541	24.308.753.026.682	12.619.477.720.804
	24.261.900.914.541	24.308.753.026.682	12.619.477.720.804
Beton Precast/ Precast			
Divisi Precast/ Precast Division - Jakarta	143.918.820.934	153.315.333.616	248.337.880.007
WBP - Jakarta	13.807.976.717.016	13.734.267.485.212	4.332.409.010.247
	13.951.895.537.950	13.887.582.818.828	4.580.746.890.254
Energi/ Energy			
WSE - Jakarta	287.278.584.895	275.343.132.832	226.594.743.949
WKE - Jakarta	42.709.909.165	6.235.309.510	--
	329.988.494.060	281.578.442.342	226.594.743.949
Jalan Tol/ Toll Road			
WTR - Jakarta	27.552.910.834.053	22.740.076.933.040	9.515.304.757.334
	27.552.910.834.053	22.740.076.933.040	9.515.304.757.334
Jumlah Sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	96.789.411.432.702	86.558.664.214.543	42.876.143.511.541
Eliminasi/ Elimination	(28.673.935.475.050)	(25.125.652.040.096)	(12.567.032.334.073)
Jumlah Setelah Eliminasi/ Total After Elimination	68.115.475.957.652	61.433.012.174.447	30.309.111.177.468

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Maret 2016/ March 31, 2016	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Tidak Diaudit/ Unaudited	Rp	Rp
Pendapatan Usaha/Sales				
Konstruksi/Constructions				
Divisi II/ Division I - Jakarta	1.639.956.995.690	611.812.739.908	6.443.371.286.260	3.110.881.307.069
Divisi III/ Division III - Jakarta	2.321.624.081.378	1.536.999.973.818	7.074.029.670.280	3.606.396.234.906
Divisi Regional Barat/ West Regional Division - Jakarta	597.335.107.580	291.327.268.277	3.438.511.368.437	3.017.254.197.720
Divisi Regional Timur/ East Regional Division - Bali	416.109.053.334	311.767.096.177	2.786.739.936.610	2.371.433.312.510
Divisi II/ Division II - Jakarta	687.475.218.750	--	--	--
Divisi VI/ Division VI - Jakarta	276.156.656.417	--	--	--
	5.938.657.113.149	2.751.907.078.180	19.742.652.261.587	12.105.965.052.205
Properti/ Property				
Divisi Realty/ Realty Division - Jakarta	--	--	45.366.090.486	--
WKR - Jakarta	29.653.598.607	4.893.595.529	--	--
	29.653.598.607	4.893.595.529	45.366.090.486	--
Sewa Gedung/ Building Rent				
Kantor Pusat - Jakarta	535.870.737	151.309.367	1.447.182.855	616.609.372
	535.870.737	151.309.367	1.447.182.855	616.609.372
Beton Precast/ Precast				
Divisi Precast/ Precast Division - Jakarta	--	--	--	--
WBP - Jakarta	1.218.414.790.803	705.867.000.000	4.717.150.071.779	2.644.319.999.853
	1.218.414.790.803	705.867.000.000	4.717.150.071.779	2.644.319.999.853
Energi/ Energy				
WSE - Jakarta	8.787.541.517	--	1.817.717.715	--
WKE - Jakarta	--	--	--	--
	8.787.541.517	--	1.817.717.715	--
Jalan Tol/ Toll Road				
WTR - Jakarta	2.705.922.762.425	596.492.400.579	5.588.212.227.770	577.761.000.240
	2.705.922.762.425	596.492.400.579	5.588.212.227.770	577.761.000.240
Jumlah Sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	9.901.971.677.238	4.059.311.383.655	30.096.645.552.192	15.328.662.661.670
Eliminasi/ Elimination	(2.547.175.149.238)	(987.769.037.968)	(6.308.322.925.845)	(1.175.909.814.058)
Jumlah Setelah Eliminasi/ Total After Elimination	7.354.796.528.000	3.071.542.345.687	23.788.322.626.347	14.152.752.847.612

52. PERKARA HUKUM

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya persekongkolan horizontal dan vertikal pada Proyek Pembangunan Gedung Perawatan dan Pelayanan Kelas I dan VII Rumah Sakit Sulawesi Tenggara antara panitia pengadaan (terlapor I), Perusahaan (terlapor II), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) (terlapor III) dalam register KPPU No 04/KPPU-L/2012.

Putusan KPPU pada tanggal 25 April 2013, menjatuhkan hukuman kepada terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 3.168.820.000. Atas putusan tersebut terlapor II mengajukan upaya hukum pembatalan putusan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

PN Jaktim mengeluarkan putusan No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Mei 2015 menyatakan batal demi hukum putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 tanggal 26 April 2012 dengan segala akibat hukumnya.

KPPU mengajukan upaya kasasi pada tanggal 15 September 2015 dimana memori kasasi telah diajukan oleh KPPU tertanggal 28 September 2015, dan kontra memori kasasi diajukan oleh Perusahaan pada 3 Desember 2015. Sampai dengan tanggal pelaporan Perusahaan masih menunggu hasil putusan kasasi.

2. Perkara Pekerjaan Tanah Tahap III dan *Aeronautical Pavement Runway* Bandara Medan Baru.

Perusahaan dan PT Yasa Patria Perkasa tergabung dalam suatu kerjasama operasi dengan nama KSO Waskita-Yasa mengajukan gugatan ke PN Lubuk Pakam di Deli Serdang sebagai penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Medan Baru sebagai tergugat dalam perkara No. 15/PDT.G/2014/PN.LP tanggal 25 Februari 2014 karena adanya biaya eskalasi, tambahan biaya pajak galian C, *overhead* dan ganti rugi kerugian *immaterial* dengan jumlah sebesar Rp 168.471.023.440 ditambah bunga sebesar 2% per bulan sejak gugatan ini didaftarkan.

Putusan PN Lubuk Pakam pada tanggal 23 Oktober 2014 yang amar putusannya menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp 97.383.218.000.

Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 9 Desember 2014 ke Pengadilan Tinggi Medan. Tanggal 27 Mei 2015 Pengadilan Tinggi Medan telah mengeluarkan putusan No. 13/PDT/2015 /PT.MDN yaitu menguatkan putusan PN Lubuk Pakam No. 15/Pdt.G/2014 /PN.Lbp.

52. LEGAL CASES

1. *Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) suspects a horizontal and vertical conspiracy in Building Project of Care and Service Class I and VII Building of Southeast Sulawesi Hospital between the procurement committee (Defendant I), the Company (Defendant II), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) (Defendant III) in register of KPPU No. 04 /KPPU-L/2012.*

The verdict of KPPU dated April 25, 2013, passed sentence to the Defendant II to pay a fine amounting Rp 3,168,820,000. On the verdict, the Defendant II has filed an annulment of verdict at District Court (PN) of East Jakarta.

District Court of East Jakarta issued a verdict No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Tim dated May 21, 2015 declared void and null the verdict of KPPU No. 04/KPPU-L/2012 dated April 26, 2012 with all the legal consequences.

KPPU files cassation efforts on September 15, 2015 in which the memory of cassation has been proposed by KPPU dated September 28, 2015, and contra memory of cassation filed by the Company on December 3, 2015. As of the reporting date the Company is still waiting for the appeal results.

2. *Land Work Case Phase III and Aeronautical Pavement Runway of Medan Baru Airport.*

The Company and PT Yasa Patria Perkasa joined in a joint operation under the name KSO Waskita-Yasa filed a lawsuit to the PN Lubuk Pakam in Deli Serdang as plaintiff against the Government of the Republic of Indonesia cq Ministry of Transportation cq Directorate General of Civil Aviation cq Commitment Maker Official of Medan Baru Airport Work Unit as a defendant in case No. 15/PDT.G/2014/PN.LP dated Februari 25, 2014 due to the cost escalation, additional tax expense of excavation C, overhead and immaterial loss compensation totaling Rp 168,471,023,440 plus interest of 2% per month since the lawsuit was filed.

PN Lubuk Pakam verdict on October 23, 2014 that the dictum sentences the defendant to pay material compensation amounting to Rp 97,383,218,000 material.

The Defendant has filed appeal on December 9, 2014 to the High Court of Medan. On May 27, 2015, the High Court of Medan issued a verdict No. 13/PDT/2015/PT.MDN which upheld the verdict of PN Lubuk Pakam No. 15/Pdt.G/2014/PN.Lbp.

- Tergugat mengajukan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015, Perusahaan telah memasukan kontra memori kasasi pada tanggal 7 September 2015.
- Putusan MARI No. 3330K/Pdt/2015 tanggal 23 Maret 2016 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan *Sport Centre* Bukik Bunian Lubuk Basung.
- Perusahaan mengajukan gugatan ke PN Lubuk Basung, Sumatera Barat melawan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Agam sebagai tergugat atas Pembangunan sarana dan prasarana pusat olahraga di Bukit Bunian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, pada tanggal 24 Juli 2014 dengan nomor register gugatan No. 16/PDT.G/2014/PN.LBB dan nilai gugatan atas sisa pembayaran termin sebesar Rp 2.150.080.000.
- PN Lubuk Basung mengeluarkan putusan pada tanggal 13 Mei 2015 menghukum tergugat untuk membayar sisa termin sebesar Rp 2.150.080.000 kepada penggugat.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 127/PDT/2015/PT.PDG tanggal 30 Nopember 2015 dengan amar putusan menguatkan putusan PN Lubuk Basung.
- Tergugat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 11 Pebruari 2016. Memori kasasi diajukan tanggal 18 Maret 2016. Kontra memori kasasi diajukan oleh Perusahaan tanggal 29 Maret 2016. Sampai dengan tanggal pelaporan Perusahaan masih menunggu hasil putusan kasasi.
4. Perkara Pembangunan Jalan Dalam Kota Pontianak – Tayan.
- Perusahaan mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pemohon melawan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 04 Pembangunan Jalan Dalam Kota-Tayan qq. Kementrian Pekerjaan Umum. Permohonan arbitrase telah di daftarkan ke BANI dengan Perkara No. 718/VI/ARB-BANI/2015 pada tanggal 10 Juni 2015 atas biaya *idle* alat, perbaikan *cross fall*, *overhead*, biaya perubahan desain, biaya pekerjaan tambah dan bunga bank dengan jumlah Rp 72.813.123.228.
- Majelis arbiter mengeluarkan putusan pada tanggal 11 April 2016, menyatakan bahwa mewajibkan termohon untuk membayar kepada pemohon sejumlah Rp 50.719.488.256.000, termasuk PPN 10% dan mengembalikan biaya BANI Rp 499.450.000.
- The Defendant filed a cassation on July 14, 2015, the Company has submitted contra memory of cassation on September 7, 2015.*
- MARI verdict No. 3330K/Pdt/2015 on the March 23, 2016 with dictum rejected the cassation. This verdict has a permanent legal force.*
- 3. Case of Construction of Facilities and Infrastructure of Sport Center Bukik Bunian Lubuk Basung.*
- The Company filed a lawsuit to PN Lubuk Basung, West Sumatra against the Department of Public Works of agam Regency Government as a defendant on construction of facilities and Infrastructure of Sports Center in Bukit Bunian Lubuk Basung, Agam Regency, on July 24, 2014 with a lawsuit registration number No. 16/PDT.G/2014/PN.LBB and action on value of lawsuit on remaining payments amounting Rp 2,150,080,000.*
- Lubuk Basung District Court issued a verdict on May 13, 2015 to sentence the defendant to pay the remaining installments of Rp 2,150,080,000 to the Plaintiff.*
- Verdict of High Court Padang No. 127/PDT/2015/PT.PDG dated November 30, 2015 by dictum that upheld of the verdict of District Court of Lubuk Basung.*
- The Defendant filed a cassation against the verdict of High Court of Padang dated 11th February, 2016. Memory of cassation filed on March 18, 2016. Contra memory of cassation filed by the Company on March 29, 2016. As of the reporting date the Company is still awaiting for the lawsuit results.*
- 4. Case of Construction of Pontianak-Tayan Intra Urban Road.*
- The Company has filed an arbitration to the Indonesia National Board of Arbitration (BANI) as a plaintiff against the Commitment Maker Official (PPK) 04 on Construction of Tayan Intra Urban Road qq. Ministry of Public Works. The arbitration appeal has been registered to BANI with Case No. 718/VI/ARB-BANI/2015 on June 10, 2015 on idle tools cost, repair cross fall, overhead, the cost of design changes, the cost of extra work and bank interest by the amount of Rp 72,813,123,228.*
- Arbitration Assembly issued a verdict on 11th April 2016, states that require the defendant to pay to the plaintiff the amount of Rp 50,719,488,256,000, including 10% VAT and refund the cost of BANI amounting Rp 499,450,000.*

- Termohon mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI pada tanggal 27 Mei 2016 di PN Pontianak.
- PN Pontianak mengeluarkan putusan No. 56/pdt.G-ARB/2016/PN.PTK tanggal 24 Agustus 2016 menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- Pada tanggal 26 September 2016, Termohon mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dan tanggal 14 Oktober 2016, Perusahaan mengajukan Kontra Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal pelaporan Perusahaan masih menunggu hasil putusan kasasi.
5. Perkara Pembangunan Mesjid Raca dan *Islamic Centre*.
- Perusahaan mengajukan gugatan ke PN Tanjung Pinang sebagai penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kepulauan Riau cq Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau selaku pengguna anggaran sebagai tergugat pada Proyek Pembangunan Mesjid Raya dan *Islamic Centre* Propinsi Kepulauan Riau atas eskalasi dan denda keterlambatan pekerjaan, sebesar Rp 12.534.461.201 dengan nomor perkara No. 7/PDR.G/2015/PN.Tpg pada tanggal 20 Februari 2015.
- Putusan PN Tanjung Pinang tanggal 18 Juni 2015 menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 8.085.242.999,68 tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pihak tergugat mengajukan banding pada tanggal 3 September 2015.
- Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Tanjung Pinang No. 82/PDT/2016/PT.PBR tanggal 29 Juni 2016 yang amar putusannya menguatkan putusan PN Tanjung Pinang No. 7/PDT.G/2015/PN.Tpg tanggal 18 Juni 2015.
- Tanggal 28 September 2016 tergugat mengajukan memori kasasi dan 11 Oktober 2016 Perusahaan mengajukan Kontra Memori Kasasi. Sampai dengan tanggal pelaporan Perusahaan masih menunggu hasil putusan kasasi.
6. Perkara Kepemilikan Lahan Pada Proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu.
- Para ahli waris Muhammad Ba'at mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan tanah akibat pembangunan Proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) di PN Jakarta Timur dengan register No. 441/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2015, dimana para tergugat adalah:
- Perum Jasa Tirta II (tergugat I);
- The defendant filed a request for annulment of verdict of BANI on May 27, 2016 in Pontianak District Court.*
- Pontianak District Court issued a verdict No. 56/pdt.G-ARB/2016/PN.PTK dated August 24, 2016 states to reject the request of the plaintiff entirely.*
- On September 26, 2016 the defendant filed a cassation on Verdict of Pontianak District Court and on October 14, 2016, the Company filed Contra Memory of Cassation to the Supreme Court. As of the reporting date the Company is still waiting for the lawsuit results.*
- 5. Case of Construction of Great Mosque and Islamic Center.*
- The Company filed a lawsuit to Tanjung Pinang District Court as the plaintiff against the Government of the Republic of Indonesia cq the Government of Riau Islands cq Department of Public Works of Riau Islands cq as Head of Department of Public Works of Riau Islands as user of budget as a defendant in the construction Project of the Great Mosque and Islamic Center of Province of Riau Islands on escalation and penalty of late work, amounting to Rp 12,534,461,201 with case number No. 7/PDR.G/2015/PN.Tpg on February 20, 2015.*
- Tanjung Pinang District Court on June 18, 2015 sentences the Defendant to pay compensation to the Plaintiff amounting Rp 8,085,242,999.68 without Value Added Tax (VAT).*
- The defendant filed an appeal on September 3, 2015.*
- The verdict of Tanjung Pinang High Court No. 82/PDT/2016/ PT.PBR dated June 29, 2016 that the dictum upheld the verdict of Tanjung Pinang District Court No. 7/PDT.G/2015/ PN.Tpg dated June 18, 2015.*
- On September 28, 2016, the defendant filed a memory of cassation and on October 11, 2016 the Company filed Contra memory of cassation. As of the reporting date of the Company is still waiting for the lawsuit results.*
- 6. Case of Land Ownership of Bekasi Cawang Kampung Melayu Toll Road Project.*
- The heirs of Muhammad Ba'at heirs filed a tort on land ownership due to the construction of Bekasi Cawang Kampung Melayu Toll Road Project (Becakayu) at East Jakarta District Court with Register No. 441/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Tim dated November 25, 2015, in which the defendants are:*
- Perum Jasa Tirta II (Defendant I);

- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan and Fasilitas Jalan Daerah cq. PPK Proyek Becakayu (tergugat II);
- Pemerintah provinsi DKI Jakarta cq. Pemerintah kota Administrasi Jakarta Timur cq. Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (tergugat III);
- Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) cq. Kepala Agraria/BPN Jakarta Timur (turut tergugat I); dan
- Perusahaan (turut tergugat II).

Nilai Gugatan yang diajukan materil sebesar Rp 32.100.000.000 dan immateril sebesar Rp 25.000.000.000.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 3 Oktober 2016 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Atas putusan tersebut, tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat.

7. Perkara Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4.

Perusahaan sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada PT Jasa Marga Bali Tol di Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. register 903/Pdt/G/2015/PN DPS tanggal 1 Desember 2015.

Perusahaan mengajukan gugatan terkait biaya tambah pekerjaan tiang pancang paket 2 dan paket 4 beserta bunga keterlambatan dengan nilai gugatan yang diajukan materil sebesar Rp 64.576.067.774 dan immateril sebesar Rp 30.000.000.000.

Amar Putusan PN Denpasar, tanggal 20 Juni 2016 menyatakan tergugat telah wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 64.576.067.774 dan bunga sebesar 2% disetiap bulannya.

PT Jasa Marga Bali Tol mengajukan banding atas putusan PN Denpasar, tanggal 28 Juni 2016.

Amar Putusan PT Denpasar No. 156/Pdt/2016/PT DPS, tanggal 20 Desember 2016. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Tergugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 903/Pdt/G/2015/PN.DPS.

Perusahaan mengajukan Kasasi atas putusan PT Denpasar pada tanggal 14 Pebruari 2017 dengan No. Register 9/Pdt.Kasasi/2017/PN DPS.

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih menunggu Putusan Kasasi.

- Minister of Public Works and Public Housing cq. Directorate of Urban Toll Road and Local Road Facilities cq. PPK Becakayu Project (Defendant II);
- Provincial Government of DKI Jakarta cq. East Jakarta Municipal Administration cq. Land Procurement Committee for public interest (Defendant III);
- Government of the Republic of Indonesia cq. Ministry of Agrarian Affairs and Spatial/National Land Agency (BPN) cq. Head of Agrarian/BPN of East Jakarta (also a defendant I); and
- The Company (co-defendant II).

The value of lawsuit filed material as of Rp 32,100,000,000 immaterial Rp 25,000,000,000

The adictum of East Jakarta District Court, dated October 3, 2016 states that the plaintiff's claim is unacceptable.

Upon the verdict, no legal effort has been filed by the Plaintiff.

7. Case of Nusa Dua Toll Road Construction - Ngurah Rai - Benoa Package 2 and Packages 4.

The company as the plaintiff filed a lawsuit to PT Jasa Marga Bali Tol at Denpasar District Court with No. register 903/Pdt/G/2015/PN DPS dated December 1, 2015.

The Company filed a lawsuit related to extra work of piling of package 2 and 4 with interest for delay with the value of lawsuit submitted material amounting Rp 64,576,067,774 and immaterial amounting Rp 30,000,000,000.

The dictum of Denpasar District Court, dated June 20, 2016 states the defendant has defaulted and sentenced the defendant to pay compensation of Rp 64,576,067,774 and 2% interest in each month.

PT Jasa Marga Bali Toll filed a cassation against the verdict of Denpasar District Court, dated June 28, 2016.

The dictum of Denpasar District Court No. 156/Pdt/2016/PT DPS, on December 20, 2016. To accept the appeal filed by Defendant and annul the District Court's Verdict No. 903/Pdt/G/2015/PN.DPS.

The Company filed the cassation on verdict of PT Denpasar on February 14, 2017 with No. Register 9/Pdt.Kasasi/2017/PN DPS.

As of the reporting date the Company is still waiting for the lawsuit results.

8. Perkara kepemilikan lahan pada proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu.

Para ahli waris Berlin Saragih Manihuruk mengajukan gugatan untuk tidak akan melakukan pembongkaran rumah di PN Jakarta Timur dengan No. register 383/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Oktober 2015, dimana para tergugat adalah:

- Pemerintah provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (tergugat I);
- Perum Jas Tirta (tergugat II);
- BPN Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (tergugat III);
- Pemerintah provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur Kecamatan Makassar (tergugat IV);
- Pemerintah provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur Kecamatan Cipinang Melayu (tergugat V); dan
- Perusahaan (tergugat VI).

Tidak ada nilai gugatan, hanya menyatakan kepemilikan tanah adalah milik para Penggugat dan tidak melakukan pembongkaran rumah.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 21 Nopember 2016 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menerima sebagian eksepsi dari para tergugat.

Atas putusan tersebut, tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat.

9. Perkara pekerjaan pengembangan prasarana pertambangan batubara tahap I Muara Teweh, Kalimantan Tengah.

Perusahaan bagian dari Konsorsium Waskita dan PT Jakarta Prima Cranes (JPC) mengajukan tuntutan kepada PT Suprabari Mapanindo Mineral (SMM) di Badan Arbitrase Nasional (BANI) dengan register No. 794/II/ARB-BANI/2016 tanggal 2 Februari 2016.

Klaim yang diajukan adalah pembayaran tagihan progress bulan Agustus 2014 s/d bulan Januari 2015 serta pembayaran ganti kerugian lainnya. sebesar USD 31.086.851,46 (setara Rp 404 miliar).

PT Suprabari Mapanindo Mineral mengajukan jawaban dan tuntutan balik atas kerugian dan kerusakan yang timbul atas kelalaian pemohon sebesar USD 44.068.855,54 (setara +/- Rp 594 miliar) tanggal 24 Maret 2016.

Sampai tanggal pelaporan, proses persidangan arbitrase masih berlangsung.

8. Case of Land Ownership of Bekasi Cawang Kampung Melayu Toll Road Project.

The heirs of Berlin Saragih Manihuruk filed a lawsuit not to demolish the houses in East Jakarta District Court with register No. 383/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim dated October 19, 2015, where the defendants are:

- Provincial Government of DKI Jakarta, East Jakarta Municipality, Land Procurement Committee for public interest (Defendant I);
- Perum Jasa Tirta (Defendant II);
- National Land Agency (BPN) of East Jakarta Municipality (Defendant III);
- Provincial Government of DKI Jakarta, East Jakarta Municipality, Makassar Sub-district (Defendant IV);
- Provincial Government of DKI Jakarta, East Jakarta Municipality, Cipinang Melayu Sub-district (Defendant V); and
- The Company (defendant VI).

No value of lawsuit filed, it is solely merely stating that the ownership of the land belongs to the Plaintiffs and does not demolish the house.

The dictum of the East Jakarta District Court, dated November 21, 2016, states that the plaintiff's claim is unacceptable and to receive some exception from the defendants.

Upon the verdict, no legal efforts has been filed by the Plaintiff.

9. Case of development of infrastructure of coal mining phase I in Muara Teweh, Central Kalimantan.

The Company is part of Consortium of Waskita and PT Jakarta Prima Cranes (JPC) filed a lawsuit against PT Suprabari Mapanindo Minerals (SMM) in the National Arbitration Board (BANI) with register No. 794/II/ARB-BANI /2016 dated February 2, 2016.

The Claims filed is payment of progress bill of August 2014 to January 2015 and the payment of other compensations amounting USD 31,086,851.46 (equivalent to Rp 404 billion).

PT Suprabari Mapanindo Mineral filed a response and counterclaim for compensations and damages arising from the negligence of the applicant amounted to USD 44,068,855.54 (equivalent to Rp +/- 594 billion) on March 24, 2016.

As of reporting date, the arbitration proceedings are still ongoing.

10. Pekerjaan tanggap darurat (*Emergency Spilway*) dan *Toe Drain* pada proyek Penanganan Bencana Alam Natural Dam Way Ella, Maluku.

Perusahaan sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air qq Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air qq Balai Wilayah Sungai Maluku (BWS) di PN Ambon dengan register No. 90/Pdt.G/2016/PN.Ambn, tanggal 26 April 2016.

Nilai gugatan sebesar Rp 74.524.912.800.

Sidang pada tanggal 26 Mei 2016 dengan agenda mediasi, para pihak sepakat mengadakan perdamaian.

Tanggal 14 Juni 2016 Para pihak mengadakan perjanjian perdamaian yang isinya tergugat wajib melakukan pembayaran uang senilai Rp 55.552.989.000 kepada penggugat selambat-lambatnya dalam kurun waktu tahun anggaran 2016.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Agustus 2016 menguatkan perjanjian Perdamaian tersebut.

11. Permasalahan Pembangunan jalan akses E2 Tanjung Priok dengan nomor perkara No. 843/IV/ARB-BANI/2016.

Perusahaan bagian KSO dengan Kajima Corporation mengajukan tuntutan kepada PT DCA Pracetak Indonesia di Badan Arbitrase Nasional (BANI) dengan No. register 843/IV/ARB-BANI/2016 tanggal 29 April 2016.

Isi gugatan menyatakan bahwa termohon telah wanprestasi karena memasok beton *readymix* yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian vendor.

Nilai gugatan sebesar Rp 227.582.255.938 dan ¥ 865.279.268.

Tanggal 06 Pebruari 2017, sidang pemeriksaan saksi ahli dari para pihak. Sidang selanjutnya pada tanggal 07 April 2017, dengan agenda sidang pembacaan putusan.

12. Perselisihan Hubungan Industrial antara Perusahaan dengan mantan karyawan.

Perusahaan digugat oleh mantan pegawai pada Pengadilan Hubungan Industrial PN. Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2016 dengan nomor perkara No. 357/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST sebagai tergugat terkait kekurangan pembayaran pesangon dan tunjangan hari tua purna karyawan.

10. *Emergency Spilway and Toe Drain on Natural Disaster Management Project of Dam Way Ella, Maluku.*

Company as plaintiff filed a lawsuit against Commitment Maker Official of Operations and Maintenance of Water Resources Unit qq Operation and Maintenance of Water Resources Work Unit qq Sungai Maluku Hall (BWS) in Ambon District Court register No. 90/Pdt.G/2016/PN.Ambn, dated April 26, 2016.

The value of lawsuit is Rp 74,524,912,800.

Assembly on May 26, 2016 with the agenda of mediation, the parties agreed to solve this case in peace.

On June 14, 2016 the parties entered a peace agreement which states that the defendant should pay the money worth Rp 55,552,989,000 to the Defendant at the latest within a period of fiscal year 2016.

The dictum of Ambon District Court on August 4, 2016 upheld such agreement.

11. *Case of Construction of E2 Tanjung Priok access road with the case number No. 843/IV/ARB-BANI/2016.*

The Company is part of Joint Operation with Kajima Corporation filed a lawsuit against PT DCA Pracetak Indonesia at the National Arbitration Board (BANI) with registers No. 843/IV/ARB-BANI/2016 dated April 29, 2016.

The content of lawsuit states that the defendant was in default because it supplies the Readymix concrete that does not comply with those specified in the vendor agreement.

The value of the lawsuit amounted to Rp 227,582,255,938 and ¥ 865,279,268.

On February 06, 2017, an expert witness examination session of the parties. The next trial is on April 7, 2017, with the agenda of the hearing to read out the verdict.

12. *Industrial Relations Disputes between the Company and former employees.*

The company was sued by a former employee to the Industrial Relations Court of Central Jakarta District Court on December 28, 2016 with case number No. 357/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST as the defendant related to the lack of severance pay and post-retirement benefits.

Sidang pertama digelar pada 10 Januari 2017 dengan agenda pengenalan para pihak dan sidang pada tanggal 30 Maret 2017 adalah pemeriksaan saksi penggugat. Agenda sidang selanjutnya pada tanggal 6 April 2017 masih dengan agenda yang sama yaitu pemeriksaan saksi penggugat.

The first hearing was held on January 10, 2017 with the agenda of the introduction of the parties and the hearing on March 30, 2017 was the examination of the plaintiff's witness. The next agenda of the trial on April 6, 2017 is still on the same agenda, namely the examination of the plaintiff's witness.

53. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

53. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan berelasi

Nature of relationship

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perusahaan.
- Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.
- Pihak berelasi yang merupakan perusahaan asosiasi dari entitas anak.
- Manajemen kunci yang meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

- The Government of the Republic of Indonesia represented by Ministry of Finance, is the majority stockholder of the Company.
- All entities that are owned and controlled by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia including entities where the Ministry of Finance Republic of Indonesia have significant influence: State-owned Enterprise (SOE).
- Related parties which main shareholder same with Group.
- Related parties which are associates of the Company's subsidiaries.
- Key management personnel includes Commissioners and Directors of the Company.

Transaksi pihak berelasi

Transactions with related parties

Berikut ini adalah transaksi dengan entitas berelasi:

The following are transactions with related parties:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Transaksi	Transactions
PT Angkasa Pura II (Persero)	Tagihan Bruto	Gross Amount due to from Customer
Indonesia Eximbank	Kas dan Setara Kas, Utang Bank	Cash and Cash Equivalent, Bank Loan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Utang Bank, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Uang Muka	Cash and Cash Equivalent, Bank Loan, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Utang Bank	Cash and Cash Equivalent, Bank Loan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Utang Bank	Cash and Cash Equivalent, Bank Loan
PT Bank Syariah Mandiri (Persero)	Kas dan Setara Kas	Cash and Cash Equivalent
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas	Cash and Cash Equivalent
PT Dok Kodja Bahari (Persero)	Piutang Usaha, Uang Muka	Accounts Receivable, Advance
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, piutang Retensi	Accounts Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues, Retention Receivables
PT Jasa Marga Bali Tol	Piutang Retensi	Retention Receivable
PT Kertas Lece (Persero)	Piutang Usaha	Accounts Receivable
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Piutang Retensi	Accounts Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues, Retention Receivables
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Uang Muka	Accounts Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues, Advance
PT Semen Padang (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Uang Muka	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Advance
PT Trans Marga Jateng	Piutang Retensi, Tagihan Bruto	Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Uang Muka	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Advance
PT Transmarga Jatim Pasuruan	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Piutang Retensi	Accounts Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues, Retention Receivable
PT Rekayasa Industri (Persero)	Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Uang Muka, Pendapatan Usaha, Piutang Usaha	Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Advance, Revenues, Accounts Receivable
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Piutang Usaha, Uang Muka	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Accounts Receivable, Advance
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, Piutang lain-lain	Held to Maturity Financial Assets, Other Receivable
PT Istaka Karya (Persero)	Piutang Lain-lain	Other Receivable
PT Solo Ngawi Jaya	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Uang Muka	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Advance
PT Hutama Karya (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Multi Terminal	Tagihan Bruto,	Gross Amount due to from Customer
PT Ngawi Kertasono	Tagihan Bruto,	Gross Amount due to from Customer

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Transaksi	Transactions
PT Dahana (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
Pokja Papua	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Perhubungan Nusantara	Tagihan Bruto,	Gross Amount due to from Customer
PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Tagihan Bruto, Piutang Usaha, Pendapatan Usaha, Investasi Asosiasi, Uang Muka	Gross Amount due to from Customer, Accounts Receivable, Revenues, Investment in Associates, Advance
PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Perusahaan Gas Negara	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Pejagan Pemalang Toll Road	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Investasi Asosiasi	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Investment in Associates
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Investasi Asosiasi	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Investment in Associates
KSO/JV Waskita Karya - Trinit	Tagihan Bruto, Piutang Usaha, Pendapatan Usaha, Piutang Retensi, Uang Muka	Gross Amount due to from Customer, Accounts Receivable, Revenues, Retention Receivable, Advance
KSO/JV Kawahpejata Indonesia	Tagihan Bruto, Piutang Usaha, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Accounts Receivable, Revenues
PT Prima Multi Terminal	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha, Uang Muka, Investasi Asosiasi	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Advance, Investment in Associates
PT PAL Indonesia (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PTPN III	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
KSO/JV Waskita - Darmo Permai	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Pelindo II (Persero)	Pendapatan Usaha	Revenues
Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Transaksi	Transactions
PT Solo Ngawi Jaya	Uang Muka, Investasi Asosiasi, Piutang Usaha	Investment in Associates, Accounts Receivable, Advance
PT Cimanggis Cibitung Tol	Piutang Usaha	Accounts Receivable
KSO/JV Waskita - WIKA	Pendapatan Usaha, Utang usaha	Revenues, Accounts Payable
Waskita-PP-HK KSO	Pendapatan Usaha	Revenues
PT MNC Tol Investama	Utang Lain-lain	Other Receivable
PT Cinere Serpong Jaya	Utang Lain-lain, Investasi Asosiasi,	Other Receivable, Investment in Associates
PT Adhi Karya	Utang Usaha	Accounts Payable
PT Wika Beton	Utang Usaha	Accounts Payable
KSO/JV Waskita-BRP	Pendapatan Usaha	Revenues
PT Nindya Beton	Utang Usaha	Accounts Payable
Koperasi Waskita	Utang Usaha	Accounts Payable

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak yang berelasi:

The detail of items associated with the related parties transaction:

Aset	31 Maret 2017/	31 Desember 2016/	31 Desember 2015/	31 Maret 2017/	31 Desember 2016/	31 Desember 2015/	Assets
	March 31, 2017	December 31, 2016	December 31, 2015	March 31, 2017	December 31, 2016	December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	%	%	%	
Kas dan Setara kas	8.130.481.167.856	9.185.448.820.366	5.306.028.619.865	88,82%	38,91%	42,31%	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	3.784.962.902.824	1.150.165.994.134	1.082.777.494.682	76,69%	4,87%	8,63%	Accounts Receivable
Piutang Retensi	407.103.614.655	376.206.099.216	259.039.506.370	40,89%	1,59%	2,07%	Retention Receivables
Piutang Lain-lain	3.222.510.222.682	2.916.033.361.590	200.953.055.241	44,88%	12,35%	1,60%	Others Receivable
Tagihan Bruto	8.237.788.361.599	6.910.476.948.481	2.833.722.662.978	53,85%	29,27%	22,59%	Gross Amount due from to Customer
Aset Ventura Bersama	131.226.519.299	63.699.213.747	79.262.844.195	9,70%	0,27%	0,63%	Joint Ventures Assets

Persentase di atas merupakan perbandingan dengan total aset.

Above percentage is a comparison with total assets.

Liabilitas	31 Maret 2017/	31 Desember 2016/	31 Desember 2015/	31 Maret 2017/	31 Desember 2016/	31 Desember 2015/	Liabilities
	March 31, 2017	December 31, 2016	December 31, 2015	March 31, 2017	December 31, 2016	December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	%	%	%	
Utang Bank	11.180.140.421.012	10.801.762.825.928	4.202.839.304.542	70,76%	45,76%	20,08%	Bank Loan
Uang Muka Kontrak	147.544.775.193	219.672.160.581	368.916.361.382	15,82%	0,93%	2,94%	Advance on Contract

Persentase di atas merupakan perbandingan dengan total liabilitas.

Above percentage is a comparison with total liabilities.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	%	%	%	
Pendapatan Usaha	2.615.880.385.520	7.467.998.239.433	6.057.574.969.159	35,57%	31,39%	3,85%	Revenue

Persentase di atas merupakan perbandingan dengan total pendapatan usaha.

Above percentage is a comparison with total revenue.

54. PERJANJIAN

Kontrak Konstruksi

Pada tanggal 31 Maret 2017, berikut perikatan dan perjanjian dalam rangka aktivitas konstruksi:

54. AGREEMENTS

Construction Contract

As of March 31, 2017, following the details commitments and agreement related to construction activity:

No.	Nama Proyek/ Project Name	Nomor Kontrak/ Contract Number	Nilai Kontrak/ Contract Value	Pemberi Kerja/ Owner	Jangka Waktu/ Time Period		Keterangan/ Remark
					Mulai/ Start	Selesai/ Finish	
1	Pekerjaan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan & Tol Trans Sumatera 3 Section Bakauheni - Terbanggi Besar	Ijin Direksi No.: 643/WK/DIR/2015, tanggal 15 Juni 2015;	2.400.000.000.000	PT Hutama Karya (HK)	16-Jun-15	16-Jun-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
2	Pembangunan The Reiz Condo (Residential) Di Medan	Ijin Direksi No.: 717.6/WK/DIR/2015, tanggal 30 Juni 2015; SPK No.: 06/SPK/WKR/2015 tanggal 26 Mei 2015	425.623.000.000	PT Waskita Karya Realty (WKR)	30-Jun-15	30-Jun-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
3	Pekerjaan Design and Build Proyek The Frontage Surabaya	001/Kons/TGU/WK/A.Yani/IX/14	1.440.663.525.108	PT Trikarya Graha Utama	09-Sep-14	09-Sep-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
4	Pembangunan Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 1 : Sta. 1+011 - Sta. 11 + 501	01/SPP-KKDM/XI/2014	1.167.705.617.273	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)	28-Nov-14	28-Nov-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
5	Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat di Kabupaten Penajam Paser Utara (Multi Years)	027788/DISHUBUDPAR/XI/2014	264.486.363.636	DISHUBUDPAR Kab. Penajam	17-Dec-14	01-Dec-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
6	Pembangunan Bendungan Raknomo di Kabupaten Kupang	HK.02.03/SNVT-PJSA-NTT.II/PKSDA-I/223/XI/2014	646.009.581.818	Kemen PU-Dijin SDA	04-Dec-14	11-Feb-19	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
7	Pembangunan Jalan Tol Solo - Ngawi Seksi SN. 1A	Ijin Direksi No.: 682/WK/DIR/2015, tanggal 24 Juni 2015;	937.290.141.818	PT Solo Ngawi Jaya (SNU)	30-Jun-15	30-Jun-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
8	Pembangunan Jalan Tol Solo - Ngawi Seksi SN. 1B	Ijin Direksi No.: 682/WK/DIR/2015, tanggal 24 Juni 2015;	983.180.782.727	PT Solo Ngawi Jaya (SNU)	30-Jun-15	30-Jun-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
9	Pembangunan Jalan Tol Solo - Ngawi Seksi SN. 2A	Ijin Direksi No.: 682/WK/DIR/2015, tanggal 24 Juni 2015;	1.448.983.903.636	PT Solo Ngawi Jaya (SNU)	30-Jun-15	30-Jun-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
10	Pembangunan Jalan Tol Solo - Ngawi Seksi SN. 2B	Ijin Direksi No.: 682/WK/DIR/2015, tanggal 24 Juni 2015;	335.544.012.727	PT Solo Ngawi Jaya (SNU)	30-Jun-15	30-Jun-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
11	Pembangunan Jalan Tol Solo - Kertosono Seksi NK. 1	Ijin Direksi No.: 682/WK/DIR/2015, tanggal 24 Juni 2015;	1.373.067.663.636	PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)	30-Jun-15	30-Jun-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
12	Pembangunan Jalan Tol Solo - Kertosono Seksi NK. 2	Ijin Direksi No.: 682/WK/DIR/2015, tanggal 24 Juni 2015;	391.617.611.818	PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)	30-Jun-15	30-Jun-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
13	Pembangunan Jalan Tol Solo - Kertosono Seksi NK. 3	Ijin Direksi No.: 682/WK/DIR/2015, tanggal 24 Juni 2015;	990.315.945.455	PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)	30-Jun-15	30-Jun-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
14	Pembangunan jalan tol Cimanggis Cibitung Seksi I : STA. 23+900 - STA. 27+070	01/ADD-1KJ/ICCT/2016	657.209.892.727	PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)	09-Okt-15	19 Juli 2017	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
15	Paket 1 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, New Aur Duri - Peranap	0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015	2.466.427.224.374	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	29-Okt-15	28-Okt-18	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
16	Paket 2 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, Peranap - Perawang	0533.PJ/DAN.02.02/DIR/2015	1.776.903.929.363	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	29-Okt-15	28-Okt-18	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
17	Paket 1 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, New Aur Duri - Peranap	0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015	589.360.579.805	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	29-Okt-15	28-Okt-18	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
18	Paket 1 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, New Aur Duri - Peranap	0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015	476.626.581.312	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	29-Okt-15	28-Okt-18	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
19	Paket 2 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, Peranap - Perawang	0533.PJ/DAN.02.02/DIR/2015	452.146.104.412	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	29-Okt-15	28-Okt-18	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
20	Paket 2 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, Peranap - Perawang	0533.PJ/DAN.02.02/DIR/2015	344.451.102.136	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	29-Okt-15	28-Okt-18	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
21	Pembangunan Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan (General)	Ijin Direksi No.: 1111/WK/DIR/2015, tanggal 13 November 2015; Perpres No. 116 Tahun 2015	4.647.345.128.663	Kementerian Perhubungan/ Ministry of Transportation	24-Nov-15	31-Dec-17	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
22	Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	9/SPPJK/WBW/2016	1.863.300.112.983	PT Waskita Bumi Wira (WBW)	09-Dec-16	08-Dec-18	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
23	Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	9/SPPJK/WBW/2016	1.415.812.372.791	PT Waskita Bumi Wira (WBW)	09-Dec-16	08-Dec-18	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
24	Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	9/SPPJK/WBW/2016	3.607.023.760.426	PT Waskita Bumi Wira (WBW)	09-Dec-16	08-Dec-18	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
25	Proyek Pembangunan JalanTol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket IV (Seksi 2 : Sta. 52+200 - 67+400 dan Seksi 3 : Sta. 67+400 s Sta. 96+000)	05/KONTRAKS2.S3-WK/2016	1.550.328.927.273	PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP)	20-Dec-16	34 Bulan	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
26	Proyek Pembangunan JalanTol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket IV (Seksi 2 : Sta. 52+200 - 67+400 dan Seksi 3 : Sta. 67+400 s Sta. 96+000)	05/KONTRAKS2.S3-WK/2016	975.638.029.962	PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP)	20-Dec-16	34 Bulan	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet

Kontrak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol/ Concession Toll Road Right Contract

No	Perusahaan/ The Company	Ruas Tol/ Toll Section	Mitra Kerja/ Partners	Isi Perjanjian/ Content of the Agreement	Jangka Waktu/ Period	
					Mulai/ Start	Selesai/ Finish
1	PT Semesta Marga Raya (SMR)	Kanci - Pejagan	Departemen Pekerjaan Umum	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 35 tahun/ Toll road concession rights for 35 years	2006	2041
2	PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)	Cimanggis - Cibitung	Menteri Pekerjaan Umum	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 35 tahun/ Toll road concession rights for 35 years	2007	2042
3	PT Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR)	Pejagan - Pemalang	Departemen Pekerjaan Umum	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 tahun/ Toll road concession rights for 45 years	2014	2059
4	PT Trans Jabar Tol (TJT)	Ciawi - Sukabumi	Departemen Pekerjaan Umum	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 tahun/ Toll road concession rights for 45 years	2008	2053
5	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol (TJPJT)	Pasuruan - Probolinggo	Departemen Pekerjaan Umum	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 tahun/ Toll road concession rights for 45 years	2015	2060
6	PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR)	Pemalang - Batang	Departemen Pekerjaan Umum	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 40 tahun/ Toll road concession rights for 40 years	2017	2057
7	PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP)	Kayu Agung - Palembang - Betung	Departemen Pekerjaan Umum	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 tahun/ Toll road concession rights for 45 years	2017	2062
8	PT Waskita Bumi Wira (WBW)	Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Departemen Pekerjaan Umum	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 tahun/ Toll road concession rights for 45 years	2016	2061

55. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam pengelolaan keuangan, Grup telah melakukan analisa risiko terhadap persaingan dan ketidakpastian yang dapat berpengaruh pada aset keuangan dan liabilitas keuangan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perbedaan nilai wajar dengan nilai tercatat pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 tidak signifikan.

	31 Maret 2017/ March, 31 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan - Pinjaman yang diberikan dan Piutang			
Kas dan Setara Kas	9.153.434.260.147	10.655.996.501.931	5.511.188.078.778
Investasi Jangka Pendek	13.448.200.000	8.448.200.000	10.663.933.745
Piutang Usaha dan Retensi	5.930.626.449.030	5.464.160.021.656	2.379.739.107.239
Piutang Lain-lain	7.179.905.803.205	5.919.735.425.176	334.095.149.514
Piutang Ventura Bersama	2.443.651.389.632	745.980.988.779	736.249.944.321
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa	15.297.828.173.046	13.109.720.040.549	5.104.681.326.858
Aset Keuangan yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo			
Investasi Jangka Panjang Lainnya	421.154.046.393	548.404.046.393	540.222.000.000
Jumlah	40.440.048.321.453	36.452.445.224.484	14.616.839.540.455

55. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT

In financial management, the Group has conducted risk analysis on competition and uncertainties that could affect the financial assets and financial liabilities as follows:

a. Classification of Financial Assets and Liabilities

The difference between the fair value and the carrying value at March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 was not significant.

	31 Maret 2017/ March, 31 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015
	Rp	Rp	Rp
Financial Assets- Loan and Receivables			
Cash and Equivalents	9.153.434.260.147	10.655.996.501.931	5.511.188.078.778
Short-Term Investments	13.448.200.000	8.448.200.000	10.663.933.745
Trade Receivable and Retention	5.930.626.449.030	5.464.160.021.656	2.379.739.107.239
Other Receivables	7.179.905.803.205	5.919.735.425.176	334.095.149.514
Joint Ventures Receivables	2.443.651.389.632	745.980.988.779	736.249.944.321
Gross Amount Due from Customers	15.297.828.173.046	13.109.720.040.549	5.104.681.326.858
Held to Maturity Financial Assets			
Other Long-Term Investments	421.154.046.393	548.404.046.393	540.222.000.000
Total	40.440.048.321.453	36.452.445.224.484	14.616.839.540.455

	31 Maret 2017/ March, 31 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas Keuangan -				Financial Liabilities-
Biaya perolehan diamortisasi				Amortized cost
Utang Usaha	10.590.860.013.273	7.361.695.071.899	5.472.021.465.464	Accounts Payables
Utang Bruto Subkontraktor	6.965.871.956.102	7.291.439.066.228	3.300.532.692.708	Gross Amount Due to Third Parties
Utang Bank	15.806.492.820.210	16.216.327.910.430	5.069.779.430.429	Bank Loan
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	2.867.519.283.854	3.456.288.365.177	289.295.363.429	Loan to Financial Institution Non-Bank
Biaya yang Masih Harus Dibayar	173.976.487.645	251.300.717.225	116.289.393.949	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	1.245.823.091.424	1.954.053.883.280	895.906.837.450	Other Payables - Long Term
Jumlah	37.650.543.652.508	36.531.105.014.239	15.143.825.183.429	Total

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Bisnis Grup mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko. Grup secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Grup mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Grup.

Tujuan Grup dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Grup.

Risiko keuangan utama yang dihadapi Grup adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

(i) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari pelanggan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Rincian umur piutang usaha dapat dilihat pada Catatan dalam laporan keuangan konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2017 piutang usaha Grup tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

b. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Group's business includes risk-taking activities with specific objectives with professional management. The main function of the Group's risk management is to identify all key risks, measure these risks and manage risk positions. The Group regularly reviews policies and risk management system to adjust to changes in markets, products and best market practices.

The Group defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors that potentially negative impact on achievement of Group goals.

The purpose of the Group in managing financial risks is to achieve an appropriate balance between risk and returns and minimize potential adverse effects of the Group's financial performance.

The main financial risks facing the Group is credit risk, interest rate risk, liquidity risk, foreign currency exchange rates and the risk of changes in government policy, socio-economic and political conditions. Attention to risk management has increased significantly with the changes and consider the financial market volatility in Indonesia and internationally.

(i) Credit Risk

Credit risk is the loss arising from customers who fail to meet their contractual obligations.

The Group's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, retention, gross amount due from customers and other receivables. Total maximum credit risk exposure equal to the carrying value of these accounts. The aging of trade receivables can be seen on notes to Consolidated Financial Statements. On December 31, 2017 accounts receivable of the Group is not concentrated on a particular customer.

Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

The Group manages credit risk by setting limits the amount of acceptable risk for each customer and be more selective in the choice of banks and financial institutions, that is, only banks and financial institutions are predicated famous and well chosen.

(ii) Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Grup memiliki pinjaman jangka pendek dengan bunga mengambang. Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba Grup.

(ii) Interest Rate Risk

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in market interest rates. The Group has short-term loans with floating interest. The interest rate which is quite high and occurs in sudden decrease in income can affect the Group.

Berikut ini merupakan rincian dari liabilitas keuangan berdasarkan jenis tingkat suku bunga:

The following is a breakdown of financial liabilities based on the type of interest rate:

	31 Maret 2017/ March, 31 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	Financial Liabilities
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Suku bunga mengambang	12.063.047.151.829	12.063.047.151.829	3.193.905.341.829	Floating Interest Rate

Analisis sensitivitas suku bunga

Interest rate sensitivity analysis

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk kedua instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 0.5 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 0,5 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 akan turun/naik masing-masing sebesar Rp 25.589.101.367, Rp 51.792.932.634 dan Rp 24.673.880.502. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga variabel.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, profit for the year ended December 31, 2016 and 2015 would decrease/increase by Rp 25,589,101,367, Rp 51,792,932,634 and Rp 24,673,880,502, respectively. This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

(iii) Risiko Likuiditas

(iii) Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Liquidity risk is the risk in which the positions of cash flows show short-term revenues are not sufficient to cover short term expenses.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Grup dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan

Liquidity risk is an exposure of the Group difficulties in meeting financial obligations that must be paid with cash or other

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
(2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016
(2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Continued)

lainnya. Grup diharapkan dapat membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi liabilitas tersebut, maka Grup harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

financial assets. The Group is expected to pay all its obligations in accordance with contractual maturities. In fulfilling this obligation, then the Group must generate sufficient cash inflows.

Berikut ini merupakan liabilitas keuangan non-derivatif berdasarkan nilai sisa jatuh tempo yang tidak didiskonto:

These are non-derivative financial liabilities based on residual maturity value which was not discounted:

31 Maret 2017/ March 31, 2017								
	Jatuh Tempo/ Due Date				Jumlah/ Total	Biaya Emisi/ Issuance Costs	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
	< 1 Tahun/ < 1 Year	>1-2 Tahun/ >1-2 Years	>2-3 Tahun/ >2-3 Years	>3 Tahun/ >3 Years				
	Rp	Rp	Rp	Rp				
Utang Usaha	10.590.860.013.273	--	--	--	10.590.860.013.273	--	10.590.860.013.273	Accounts Payable
Pinjaman Bank Jangka Pendek	10.793.113.881.994	--	--	--	10.793.113.881.994	--	10.793.113.881.994	Short Term Bank Loan
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	1.502.516.936.418	--	--	--	1.502.516.936.418	--	1.502.516.936.418	Other Short Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	22.886.490.831.685	--	--	--	22.886.490.831.685	--	22.886.490.831.685	Total Financial Liabilities
31 Desember 2016/ December 31, 2016								
	Jatuh Tempo/ Due Date				Jumlah/ Total	Biaya Emisi/ Issuance Costs	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
	< 1 Tahun/ < 1 Year	>1-2 Tahun/ >1-2 Years	>2-3 Tahun/ >2-3 Years	>3 Tahun/ >3 Years				
	Rp	Rp	Rp	Rp				
Utang Usaha	7.361.695.071.899	--	--	--	7.361.695.071.899	--	7.361.695.071.899	Accounts Payable
Pinjaman Bank Jangka Pendek	12.063.047.151.829	--	--	--	12.063.047.151.829	--	12.063.047.151.829	Short Term Bank Loan
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	239.293.798.494	--	--	--	239.293.798.494	--	239.293.798.494	Other Short Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	19.664.036.022.222	--	--	--	19.664.036.022.222	--	19.664.036.022.222	Total Financial Liabilities
31 Desember 2015/ December 31, 2015								
	Jatuh Tempo/ Due Date				Jumlah/ Total	Biaya Emisi/ Issuance Costs	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
	< 1 Tahun/ < 1 Year	>1-2 Tahun/ >1-2 Years	>2-3 Tahun/ >2-3 Years	>3 Tahun/ >3 Years				
	Rp	Rp	Rp	Rp				
Utang Usaha	5.472.021.465.464	--	--	--	5.472.021.465.464	--	5.472.021.465.464	Accounts Payable
Pinjaman Bank Jangka Pendek	3.193.905.341.829	--	--	--	3.193.905.341.829	--	3.193.905.341.829	Short Term Bank Loan
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	109.054.738.263	--	--	--	109.054.738.263	--	109.054.738.263	Other Short Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	8.774.981.545.556	--	--	--	8.774.981.545.556	--	8.774.981.545.556	Total Financial Liabilities

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Grup untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan Liabilitas keuangan.

The Group manages liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents sufficient to meet the commitments of the Group for normal operation and regularly evaluates cash flow projections and actual cash flows, and the schedule date of maturity of assets and financial liabilities.

(iv) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

(iv) Foreign Exchange Risk Foreign Currency

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal Perusahaan dan cabang Luar Negeri.

Risk exposure of foreign currency exchange rate is part of normal operations of the Company and the Foreign branches.

Dengan demikian pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.

Thus the effect of foreign exchange currency differences is not significant.

(v) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik.

Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh Grup.

Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variable yang terlibat, sehingga membuat kinerja Grup menurun risiko ini bahkan diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

c. Manajemen Risiko Modal

Tujuan dari Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Grup menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Grup memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas.

Ditahun 2017, strategi Grup untuk mempertahankan rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada batas bawah dari kisaran 4,93. Rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, dan 2015 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2017/ March, 31 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Suku bunga mengambang	12.063.047.151.829	12.063.047.151.829	3.193.905.341.829	Floating Interest Rate
Total Liabilitas	48.057.724.235.224	44.659.793.617.499	20.604.904.305.805	Total Liabilities
Dikurang: Kas dan Setara Kas	9.153.434.260.147	10.655.996.501.931	5.511.188.078.778	Deduct: Cash and Cash Equivalents
Liabilitas Bersih	38.904.289.975.077	34.003.797.115.568	15.093.716.227.027	Net Liabilities
Total Ekuitas	20.057.751.722.428	16.773.218.556.948	9.704.206.867.663	Total Equity
Rasio Utang terhadap Modal	194%	203%	156%	Net Payables to Equity Ratio

(v) Risk of Changes in Government Policy, Economic and Social Politics.

Government policies concerning economic and monetary, and social and political conditions that are less conducive to result in decreased investment and development. This can lead to delays in projects that have been or will be acquired by the Group.

This risk is systemic risk whereby if this happens then the risk will negatively affect all the variables involved, this make the performance of the Group decrease. The risk diversification is not even able to eliminate this risk.

c. Capital Risk Management Policy

The purpose of the Group in managing capital is to protect the ability of the entity in maintaining business continuity, so entity can still deliver results for shareholders and benefits for other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by pricing products and services that are commensurate with the level of risk.

The Group set a number of capital in proportion to the risk. The Group manage its capital structure and makes adjustments taking into account changes in economic conditions and risk characteristics of the underlying asset.

Consistent with other companies in the industry, the Group monitors capital on the basis of the debt ratio of to adjusted capital. This ratio is calculated as follows: net debt divided by adjusted capital. Net debt is total debt (as the amount in the statement of financial position) less cash and cash equivalents.

During the year 2017, the Group's strategy is to maintain ratio of the debt to adjusted capital at the lower limit with the range of 4.93. Debt ratio to capital as of March 31, 2017, December 31, 2016, and 2015 are as follows:

56. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Pemesanan Material Besi Beton Perusahaan dengan PT The Master Steel Manufactory dengan perjanjian No. 46/SPPM/WK/D.II/2016 dengan nilai jual beli material dihitung dari volume dan harga satuan senilai Rp 30.250.000.000 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pengadaan sampai dengan 30 Juni 2017. Cara pembayaran berupa uang muka sebesar 20% dari nilai jual beli sebesar Rp 5.500.000.000 (tidak termasuk PPN), pembayaran selanjutnya sebesar Rp 22.000.000.000, dimana akan diterbitkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Untuk pencairan SKBDN dilakukan secara bertahap sesuai dengan progress material diterima dilapangan dan dipotong secara proposional dengan melampirkan Berita Acara Penerimaan Material (BAPM) dan Berita Acara Pembayaran (BAP).

Entitas Anak, PT Waskita Karya Energy (WKE) dan PT Waskita Sangir Energy (WSE)

WKE dan WSE menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) pada tanggal 23 Maret 2015 dengan perusahaan listrik milik negara, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk (PLN). Berdasarkan ketentuan PPA, PLN telah berkomitmen untuk membeli kapasitas pembangkit listrik WKE dan WSE dan seluruh hasil listrik selama dua puluh tahun sampai 2036.

WKE dan WSE telah membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pabrik yang berlokasi di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Setelah beroperasi secara komersial dalam Proyek, WKE dan WSE berkewajiban menyediakan kepada PLN keluaran listrik bersih dari fasilitas Proyek, yang akan dibeli oleh PLN pada jumlah yang ditentukan berdasarkan formula yang tercantum dalam PJBL. Jumlah yang harus dibayar oleh PLN adalah jumlah keluaran listrik bersih yang dihasilkan. Jangka waktu PPA dimulai pada tanggal 9 Desember 2016 dan akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2036, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan PJBL, sebagaimana telah diubah.

PLN memiliki opsi untuk membeli hak, kepemilikan, dan kepentingan WKE dan WSE dalam proyek dengan nilai terminasi berdasarkan formula tertentu yang tercantum dalam PPA. Harga beli yang harus dibayar oleh PLN, dalam hal PLN melakukan opsi pembelian, mengalami penurunan seiring menjelang berakhirnya PJBL.

Pada tanggal 1 Juni 2016, WKE dan WSE dan PLN menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Di bawah PJBL, kedua belah pihak sepakat untuk mengubah hal-hal tertentu dari PJBL awal.

56. COMMITMENT AND CONTINGENCY

The Company

Based on the Order of Concrete Iron Material Ordering on the Company with PT Master Steel Manufactory with agreement No. 46/SPPM/WK/D.II/2016, the purchase value of the material is calculate from volume and unit price of Rp 30,250,000,000 (including VAT) with the procurement period up to June 30, 2017. The method of payment is 20% down payment from the sales and purchases value of Rp 5,500,000,000 (excluding VAT), the subsequent payment of Rp 22,000,000,000 which will be issued Letter of Credit Documented Domestic (SKBDN). For disbursement of SKBDN shall be made in stages in accordance with the progress of material received in the field and deducted proportionally by attaching the Minutes Receipt of Materials (BAPM) and Payment Proceeds (BAP).

Subsidiaries, PT Waskita Karya Energy (WKE) and PT Waskita Sangir Energy (WSE)

WKE and WSE entered into a Power Purchase Agreement (PPA) on March 23, 2015 with the Indonesian state-owned electricity company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk (PLN). Under the terms of the PPA, PLN has committed to purchase the available capacity of the WKE dan WSE's power stations and all generation of electricity for a period of twenty years until 2036.

WKE and WSE has build, owned and operated the plant facilities at site which is located at South Solok, West Sumatera.

Upon commercial operation of the Project, WKE and WSE is obligated to make available to PLN the net electrical output of the Project's plant facilities, which will be purchased by PLN at amounts determined under formula set forth in the PPA. The amounts to be paid by PLN for the purchase of net electrical output. The term of the PPA commenced on December 9, 2016 and will expire on December 9, 2036, unless terminated earlier in accordance with the terms of the PPA, as amended.

PLN has an option to purchase the WKE and WSE's right, title and interest in the project for a termination value based on a certain formula set forth in the PPA. The purchase price to be paid by PLN, in case PLN exercises the purchase option, decreases as the end of the PPA approaches.

On June 1, 2016, WKE and WSE and PLN entered into the Amendment to Power Purchase Agreement (PPA). Under the PPA, both parties agreed to amend certain matters of the original PPA.

Entitas Anak, PT Waskita Karya Realty (WKR)

Dalam rangka melakukan kegiatan usaha, WKR memiliki perjanjian-perjanjian penting. Perjanjian dan ikatan penting yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 24 Maret 2016, WKR mengadakan perjanjian manajemen dengan PT Dafam Hotel Management (Operator). Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Dafam Hotel Management bertanggungjawab sebagai operator atas Hotel Dafam Teraskita milik WKR.

Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian ini dapat diperpanjang jika disetujui oleh kedua belah pihak paling lambat 90 hari kerja sebelum tanggal berakhirnya.

PT Dafam Hotel Management sebagai Operator berhak menerima:

1. *Technical Assistant Fee* sebesar Rp 600.000.000 yang sudah dibayarkan lunas seluruhnya oleh WKR kepada PT Dafam Hotel Management berdasarkan Nota Kesepahaman No. 02/MOU/ WKR/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang telah ditandatangani sebelumnya oleh kedua belah pihak.
2. *Base fee* sebesar 2% pada tahun pertama dan 2,5% di tahun-tahun berikutnya dari Total Pendapatan Operasional.
3. *Incentive Fee* berdasarkan tinggi rendahnya *Gross Operating Profit (GOP)* :
 - a. 0% dari GOP apabila GOP kurang dari 35% dari Pendapatan Hotel Total;
 - b. 5% dari GOP apabila GOP lebih dari 35% dan kurang dari atau sama dengan 45% dari Pendapatan Hotel Total; dan
 - c. 7% dari GOP apabila GOP lebih dari 45% dari Pendapatan Hotel Total.
4. *Sales and Marketing Fee* adalah 1% dari Pendapatan Kotor kamar per bulan.

Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Asiana Senopati

Pada tanggal 25 Juni 2015, Perusahaan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 40 dengan PT Asiana Senopati dalam rangka pengembangan tanah seluas 5.453m² yang terletak di Jalan Senopati Dalam RT 02/RW 03, kelurahan Senayan, kecamatan Kebayoran Baru. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Subsidiary, PT Waskita Karya Realty (WKR)

In connection with its operations, WKR entered into significant agreements. The outstanding significant agreements and commitments applied until March 31, 2017 are as follows:

Based on the Deed No. 2 dated March 24, 2016, WKR entered into management agreement with PT Dafam Hotel Management (the Operator). Based on agreement, PT Dafam Hotel Management responsible as operator Hotel Dafam Teraskita owned by WKR.

The period of the agreement is 10 (ten) years since the signing date of this agreement. This agreement could be renewed if agreed upon by both parties at least 90 working days before the expiration date.

PT Dafam Hotel Management as Operator entitled to receive:

1. *Technical Assistant Fee* amounting to Rp 600,000,000 which has been fully paid by WKR to PT Dafam Hotel Management based on Memorandum of Understanding No. 02/MOU/WKR/V/2015 dated May 26, 2015 which has been signed by both parties.
2. *Base fee* of 2% for first year and 2,5% for following years from of Total Operating Revenue.
3. *Incentive Fee* based on high and low of *Gross Operating Profit ("GOP")* :
 - a. 0% of GOP if GOP less than 35% of Total Revenue Hotel;
 - b. 5% of GOP if GOP more than 35% and less than or equivalent with 45% of Total Revenue Hotel;
 - c. 7% of GOP if GOP more than 45% of Total Revenue Hotel.
4. *Sales and Marketing Fee* are 1% of Gross Revenue Room per month.

Joint Venture Agreement with PT Asiana Senopati

On June 25, 2015 the Company entered into joint venture agreement No. 40 with PT Asiana Senopati in order to develop 5,453m² land areas at Jalan Senopati Dalam RT 02/RW 03, Senayan, Kebayoran Baru. The agreement terminates when the execution of the joint venture's project work has been complete demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies which concerned and the competent in the implementation anbuad completion of the joint venture has been fulfilled without arising any obligation.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari PT Waskita Karya Realty (WKR) sebesar 51% dan PT Asiana Senopati sebesar 49%, dengan modal awal sebesar Rp 603.345.343.137.

The composition of shareholders consists of PT Waskita Karya Realty (WKR) at 51% and PT Asiana Senopati at 49%, with an initial capital of Rp 603,345,343,137.

Perjanjian KSO dengan PT Perintis Trinitis Properti

Joint Venture Agreement with PT Perintis Trinitis Properti

Pada tanggal 26 Mei 2015, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 166 dengan PT Perintis Trinitis Properti dan PT Perintis Trusmi Properti dalam rangka pengembangan tanah seluas 5.000m² yang terletak di Jalan Sutera Boulevard, Alam Sutera, Tangerang. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

As of May 26, 2015, WKR entered into KSO agreement No. 166 with PT Perintis Trinitis Properti dan PT Perintis Trusmi Properti in order to develop 5,000m² land areas at Jalan Sutera Boulevard, Alam Sutera, Tangerang. The agreement terminates when the execution of the joint venture's project work has been completed demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies which concerned and the competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without arising any obligation.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 40,8%, PT Perintis Trinitis Properti sebesar 39,2%, dan PT Perintis Trusmi Properti sebesar 20% dengan modal awal sebesar Rp 125.000.000.000.

The composition of shareholders consists of WKR at 40.8%, PT Perintis Properti Trinitis at 39.2%, and PT Perintis Trusmi Properti at 20% with an initial capital of Rp 125,000,000,000.

Pada tanggal 30 Oktober 2015, terdapat pembaharuan perjanjian KSO Waskita Trinitis II. Disepakati bahwa posisi PT Perintis Trinitis Properti digantikan oleh PT Sirius Terang Cemerlang. Seluruh hak dan kewajiban PT Waskita Trinitis Properti dialihkan kepada PT Sirius Terang Cemerlang.

In October 30, 2015, there is a renewal of the KSO Waskita Trinitis II agreement. It was agreed that the position PT Perintis Trinitis Properti replaced by PT Sirius Terang Cemerlang. All rights and obligations of PT Waskita Trinitis Properti had been transferred to PT Sirius Terang Cemerlang.

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 3 Oktober 2016, terdapat perubahan perjanjian KSO Waskita Trinitis II yang berisi komposisi penyertaan saham yang baru, yaitu PT Waskita Karya Realty sebesar 50,8% atau senilai Rp 69.646.800.000 dan PT Sirius Terang Cemerlang sebesar 49,2% atau senilai Rp 67.453.200.000.

Based on the Deed No. 9 dated October 3, 2016, there is a change of the KSO Waskita Trinitis II agreement which contains the composition of investments in new shares, namely PT Waskita Karya Realty of 50.8% or equivalent Rp 69,646,800,000 and PT Sirius Terang Cemerlang by 49.2% or equivalent Rp 67,453,200,000.

Perjanjian KSO dengan PT Darmo Permai

Joint Venture Agreement with PT Darmo Permai

Pada tanggal 21 Mei 2014, Perusahaan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 6 dengan PT Darmo Permai dalam rangka pengembangan tanah seluas 34.089m² yang terletak di Segi 8 Darmo Jalan Raya Darmo Permai III, Surabaya Barat. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

As of May 21, 2014 the Company entered into KSO agreement No. 6 with PT Darmo Permai in order to develop 34,089m² land areas at Segi 8 Darmo Jalan Raya Darmo Permai III, Surabaya Barat. The agreement terminates when the execution of the joint venture's project work has been completed demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies which concerned and the competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without arising any obligation.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari PT Waskita Karya Realty sebesar 51%, PT Darmo Permai sebesar 49% dengan modal awal sebesar Rp 426.112.500.000.

The composition of shareholders consists of PT Waskita Realty at 51%, PT Darmo Permai at 49% with an initial capital of Rp 426,112,500,000.

Perjanjian KSO dengan PT Dawala Paralia

Joint Venture Agreement with PT Dawala Paralia

Pada tanggal 5 Mei 2015, Perusahaan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 2 dengan PT Dalawa Paralia Lembang dalam rangka pengembangan tanah seluas 29.020m² yang terletak di Kelurahan Gelgel, Kabupaten Klungkung, Bali. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

As of May 5, 2015 the Company entered into KSO agreement No. 2 with PT Dalawa Paralia Lembang in order to develop 29.020m² land areas at Kelurahan Gelgel, Kabupaten Klungkung, Bali. The agreement terminates when the execution of the joint venture's project work has been completed demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies which concerned and the competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without arising any obligation.

Komposisi penyertaan saham di dalam KSO Waskita Dalawa terdiri dari PT Waskita Karya Realty sebesar 51%, PT Dalawa Paralia Lembang sebesar 49% dengan modal awal sebesar Rp 116.080.000.000.

The composition of the shareholder in the Waskita Dalawa joint venture consists of PT Waskita Karya Realty at 51%, PT Dalawa Paralia Lembang at 49% with an initial capital of Rp 116,080,000,000.

Perjanjian KSO dengan PT Graha Jasa Ekatama

Joint Venture Agreement with PT Graha Jasa Ekatama

Pada tanggal 6 Juni 2016, Perusahaan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 17 dengan PT Graha Jasa Ekatama dalam rangka pengembangan tanah seluas 11.090m² di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban. Komposisi penyertaan saham di dalam KSO Waskita Ekatama terdiri dari PT Waskita Karya Realty sebesar 60%, PT Graha Jasa Ekatama sebesar 40% dengan modal awal sebesar Rp 331.000.000.000.

As of June 6, 2016 the Company entered into KSO agreement No. 17 with PT Graha Jasa Ekatama in order to develop 11,090m² at Pejaten Barat, Jakarta Selatan. The agreement terminates when the execution of the joint venture's project work has been completed demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies which concerned and the competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without arising any obligation. The composition of the shareholder in the Waskita Ekatama joint venture consists of PT Waskita Karya Realty at 60%, PT Graha Jasa Ekatama at 40% with initial capital of Rp 331,000,000,000.

Perjanjian KSO dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia

Joint Venture Agreement with PT Rajawali Nusantara Indonesia

Pada tanggal 10 Oktober 2016, Perusahaan menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 2079 dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam rangka pengembangan tanah seluas 7.025m² di Jalan MT. Haryono Kav 12-13, Jakarta Timur. Jangka waktu operasi berlaku selama 48 bulan dan perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan

As of October 10, 2016 the Company entered into KSO agreement No. 2079 with PT Rajawali Nusantara Indonesia in order to develop 7,025m² at Jalan MT. Haryono Kav 12-13, Jakarta Timur. The operating periods is valid for 48 months and the agreement terminates when the execution of the joint venture's project work has been completed demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party,

berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

government agencies which concerned and the competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without arising any obligation.

Komposisi penyertaan modal di dalam KSO RNI – Waskita terdiri dari PT Rajawali Nusantara Indonesia berupa tanah seluas 7.052m², dan WKR berupa modal kerja awal sebesar Rp 361.912.928.457.

The composition of the capital investment in the KSO RNI - Waskita consists of PT Rajawali Nusantara Indonesia with land areas of 7,052m² and WKR with initial capital of Rp 361,912,928,457.

Pada akhir periode perjanjian KSO, PT Rajawali Nusantara Indonesia akan menerima bagi hasil sebesar Rp 367.544.705.882.

At the end of joint venture agreement, PT Rajawali Nusantara Indonesia will receive profit sharing amounting to Rp 367,544,705,882.

57. PENGKLASIFIKASIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN

57. RECLASSIFICATION OF CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

Saldo akun-akun tertentu pada laporan posisi keuangan interim konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah direklasifikasi untuk disesuaikan dengan penyajian pada laporan posisi keuangan interim konsolidasian 31 Maret 2017, sebagai berikut:

Certain account balances in the consolidated statement of interim financial position as of December 31, 2016 and 2015 were reclassified to conform with the statement of 2017 consolidated interim financial position presentation as of March 31, 2017, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2016			
	Sebelum Direklasifikasi		Setelah Direklasifikasi	
	Kembali/		Kembali/	
	Before Reclassifications	Reklasifikasi/	After Reclassifications	
	2016	Reclassification	2016	
	Rp	Rp	Rp	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS
INTERIM KONSOLIDASIAN				OF FINANCIAL POSITION
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	10.653.780.768.186	2.215.733.745	10.655.996.501.931	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	10.663.933.745	(2.215.733.745)	8.448.200.000	Short-Term Investments
Piutang Usaha - Bersih			--	Account Receivable - Net
Pihak Berelasi	1.356.258.910.298	2.078.953.217.468	3.435.212.127.766	Related Parties
Pihak Berelasi	--	745.980.988.779	745.980.988.779	Joint Venture Receivables
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang Usaha Tidak Lancar				Long-Term Accounts Receivable
Pihak Berelasi	3.004.936.546.247	(2.824.936.206.247)	180.000.340.000	Related Parties
Aset Pajak Tangguhan	187.307.694.607	7.830.452.417	195.138.147.024	Deferred Tax Assets
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Biaya yang Masih Harus Dibayar	339.496.785.106	88.196.067.881	251.300.717.225	Accrued Expenses
Utang Bruto Subkontraktor				Gross Amount Due to Subcontractors
Pihak Berelasi	--	(341.532.562.819)	341.532.562.819	Related Parties
Pihak Ketiga	7.291.439.066.228	341.532.562.819	6.949.906.503.409	Third Parties
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	469.063.906.539	(88.196.067.881)	557.259.974.420	Advances on Short-Term Contract
LIABILITAS PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Pajak Tangguhan	780.510.744	(7.830.452.417)	8.610.963.161	Deferred Tax Liabilities

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 INTERIM KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
 YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
 (2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED
 INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
 MARCH 31, 2017 AND 2016
 (2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2016 AND 2015
 (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2015			CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
	Sebelum Direklasifikasi		Setelah Direklasifikasi	
	Kembali/ Before Reclassifications	Reklasifikasi/ Reclassification	Kembali/ After Reclassifications	
	2015	2015	2015	
	Rp	Rp	Rp	
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN				CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				Account Receivable - Net Related Parties
Piutang Usaha - Bersih				Joint Venture Receivables
Pihak Berelasi	1.174.449.804.260	(736.249.994.321)	438.199.809.939	
Piutang Ventura Bersama	--	736.249.994.321	736.249.994.321	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Bunga	--	262.552.936.305	262.552.936.305	Interest Payable
Utang Pembelian Aset Tetap				Debt Purchase of Fixed Assets
Bagian Jangka Pendek	--	84.270.000	84.270.000	Current Portion
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bunga Jangka Panjang	262.552.936.305	(262.552.936.305)	--	Long-term Interest Payable
Utang Pembelian Aset Tetap				Debt Purchase of Fixed Assets
Bagian Jangka Panjang	109.054.738.263	(84.270.000)	108.970.468.263	Long-term Portion

58. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Perusahaan

- Pada tanggal 15 Mei 2017, fasilitas pinjaman Perusahaan dari PT Bank Panin Tbk (Catatan 20) yang telah jatuh tempo pada 20 June 2017 telah diperpanjang dan disesuaikan menjadi sebesar Rp 2.500.000.000.000 yang merupakan fasilitas pinjaman *money market* dan garansi bank (*switchable*) dan fasilitas mata uang asing sebesar USD 5.000.000 sesuai dengan surat No. 190/IBD/EXT/17. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 24 Mei 2018.
- Pada tanggal 17 April 2017, Perusahaan memperoleh Surat Penawaran dari PT Bank UOB Indonesia (Catatan 20) yang menyatakan atas peningkatan fasilitas KMK menjadi Rp 1.200.000.000.000 dengan jatuh tempo menjadi tanggal 17 April 2018.
- Pada tanggal 2 Juni 2017, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman pokok dan bunga obligasi II tahun 2012 Seri B (Catatan 30) sebesar Rp 691.453.125.000 kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang telah jatuh tempo pada 5 Juni 2017.
- Pada tanggal 11 April 2017, Perusahaan menerima pengembalian pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terkait PPN masukan tahun 2014 sebesar Rp 182.144.320.382 (termasuk pengurangan dari Surat Tagihan Pajak atas PPN masukan sebesar Rp 722.653.679).
- Pada tanggal 3 Mei 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dengan BNP Paribas atas fasilitas pinjaman bergulir sebesar Rp 500.000.000.000 untuk membiayai kebutuhan modal kerja dengan suku bunga 1,20% per tahun dengan jangka waktu penarikan fasilitas sampai dengan 31 Januari 2018.

58. SUBSEQUENT EVENTS

The Company

- On May 15, 2017, credit facilities from PT Bank Panin Tbk (Note 20) which due on June 20, 2017 was extended and amended to Rp 2,500,000,000,000 with money market credit facilities and the bank guarantee (*switchable*) and foreign exchange facility amounted to USD 5,000,000 according to letter No. 190/IBD/EXT/17. This facility can be used until May 24, 2018.
- On April 17, 2017, the Company obtained Offering Letter from PT Bank UOB Indonesia (Note 20) which increase the WCL facility to become Rp 1,200,000,000,000 with maturity date ended on April 17, 2018.
- On June 2, 2017, the Company has fully paid its loan and interest of bond II 2012 Tranche B (Note 30) amounted to Rp 691,453,125,000 to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia which due on June 5, 2017.
- On April 11, 2017, the Company has received refund of overpayment tax assessment letter of VAT in year 2014 amounting to Rp 182,144,320,382 (including deduction from Tax Collection Letter of VAT in amounting to Rp 722,653,679).
- On May 3, 2017, the Company entered into banking facilities agreement with BNP Paribas of Revolving Credit Facility of Rp 500,000,000,000 for finance working capital with interest rate 1.20% per annum with availability period of facility until January 31, 2018.

- Pada tanggal 8 Juni 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank HSBC Indonesia atas fasilitas impor dengan sublimit gabungan sebesar Rp 650.000.000.000 untuk memfasilitasi pembelian barang atau produk impor terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 28 Pebruari 2018.
- Perusahaan menetapkan struktur organisasi unit kerja dan unit bisnis baru dilingkungan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 09/SK/WK/2017 tanggal 20 April 2017 dimana unit bisnis menjadi 7 (tujuh) divisi.
- Pada tanggal 20 April 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terkait PPN masukan tahun 2015 sebesar Rp 259.101.952.203 dan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi PPN sebesar Rp 3.837.002.660.
- Pada tanggal 18 April 2017, Perusahaan telah membayar seluruh dividen untuk setoran buku yang berakhir 31 Desember 2016.

Entitas Anak, WBP

- Berdasarkan surat No. 064/Krd.Komersial/BB/IV/2017, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (Bank BPD Banten) berupa kredit modal kerja sebesar Rp 90.000.000.000, dengan jangka waktu 12 bulan sejak 21 April 2017 dan dapat diperpanjang dengan suku bunga 0,5% p.a efektif rate.
- Berdasarkan surat No. 0745/GKK/VI/2017 pada tanggal 13 Pebruari 2017, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank DKI berupa kredit modal kerja sebesar Rp 200.000.000.000, dengan jangka waktu 12 bulan semenjak penandatanganan perjanjian kredit.
- Berdasarkan surat No. 0745/GKK/VI/2017 pada tanggal 13 Pebruari 2017, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank DKI berupa kredit modal kerja sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu 12 bulan semenjak penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan 28 Pebruari 2019.
- Pada tanggal 30 Mei 2017, fasilitas pinjaman WBP dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 1.000.000.000.000 yang telah jatuh tempo pada 29 Mei 2017 telah diperpanjang sesuai dengan surat No. R.II.120-ADK/DKR-2/06/2017 tanggal 12 Juni 2017. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Mei 2018.

- On June 8, 2017, the Company entered into corporate facility agreement with PT HSBC Indonesia to facilitate importation of goods or products related to the Company's core business operation with combined limit amounting Rp 650,000,000,000 with availability period of facility until February 28, 2018.
- The Company has determined for new organizational structure of business unit in the Company based on Director Decision Letter No. 09/SK/WK/2017 dated April 20, 2017, where the business units become 7 (seven) divisions.
- On April 20, 2017, the Company received overpayment tax assessment letter of VAT in year 2015 of Rp 259,101,952,203 and tax collection letter of VAT administrative sanctions amounting to Rp 3,837,002,660.
- On April 18, 2017, the Company has paid all the dividends for the year ended December 31, 2016.

Subsidiary, WBP

- According to the letter No. 064/Krd.Komersial/BB/IV/2017, WBP obtained credit facilities from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (Bank BPD Banten) in the form of working capital credit amounting to Rp 90,000,000,000, the loan term is for 12 months from April 21, 2017 and may be extended with interest rate of 0.5% p.a.
- According to the letter No. 0745/GKK/VI/2017 dated February 13, 2017, WBP obtained credit facilities from PT Bank DKI in the form of working capital credit amounting to Rp 200,000,000,000, the loan term is for 12 months after the agreement signed.
- According to the letter No. 00745/GKK/VI/2017 dated February 13, 2017, WBP obtained credit facilities from PT Bank DKI in the form of working capital credit amounting to Rp 300,000,000,000, the loan term start after the agreement signed and due on February 28, 2019.
- On May 30, 2017, WBP obtained credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 1,000,000,000,000 which due on May 29, 2017 was extended according to letter No. R.II.120-ADK/DKR-2/06/2017 dated June 12, 2017. This facility can be used until May 30, 2018.

- Pada tanggal 29 Mei 2017, fasilitas pinjaman WBP dari PT Bank Rakyat Indonesia Syariah sebesar Rp 300.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada 16 Oktober 2017 telah diperpanjang sesuai dengan surat No. B033/OL/CBG/V/2017 tanggal 29 Mei 2017. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018.
- Pada tanggal 23 Juni 2017, fasilitas pinjaman WBP dari PT Bank Nasional Indonesia sebesar Rp 50.000.000.000, Rp 300.000.000.000 dan Rp 300.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada 23 Juni 2017 telah diperpanjang sesuai dengan surat No. BIN/2.2/445/R tanggal 21 Juni 2017. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 22 Juni 2018.
- Pada tanggal 3 April 2017, WBP telah membayar seluruh deviden untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Entitas Anak, WTR

Pada tanggal 8 Juni 2017, WTR meningkatkan kepemilikan saham di KKDM menjadi 98,97%. Peningkatan saham ini dilakukan dengan pembelian saham dari pihak-pihak sebagai berikut:

- PT Remaja Bangun Kencana sebesar 6% dengan nilai nominal Rp 44.718.866.000 dan nilai pengalihan saham sebesar Rp 80.823.968.235, berdasarkan Akta No. 26 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- PT Indadi Utama sebesar 6% dengan nilai nominal Rp 44.718.866.000 dan nilai pengalihan saham sebesar Rp 80.823.968.235, berdasarkan Akta No. 27 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- PT Tirtobumi Prakarsatama sebesar 14,97% dengan nilai nominal Rp 111.600.309.000 dan nilai pengalihan saham sebesar Rp 201.704.127.060, berdasarkan Akta No. 28 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- PT PT Citra Mandiri Sukses Sejati sebesar 12% dengan nilai nominal Rp 89.437.732.000 dan nilai pengalihan saham sebesar Rp 161.647.936.470, berdasarkan Akta No. 29 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

- On May 29, 2017, WBP obtained credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia Syariah amounting to Rp 300,000,000,000 which due on October 16, 2017 was extended according to letter No. B033/OL/CBG/V/2017 dated May 29, 2017. This facility can be used until August 29, 2018
- On June 23, 2017, WBP obtained credit facilities from PT Bank Nasional Indonesia amounting to Rp 50,000,000,000, Rp 300,000,000,000 and Rp 300,000,000,000 which due on June 23, 2017 was extended according to letter No. BIN/2.2/445/R dated June 21, 2017. This facility can be used until June 22, 2018.
- On April 3, 2017, WBP has paid all dividends for the year ended December 31, 2016.

Subsidiary, WTR

On June 8, 2017, WTR increased its shares ownership in KKDM up to 98,97%. The increase was through purchase of shares from the following parties:

- PT Remaja Bangun Kencana amounted to 6% with par value of Rp 44,718,866,000 and purchase amount of Rp 80,823,968,235, based on Notarial Deed No. 26 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta.
- PT Indadi Utama amounted to 6% with par value of Rp 44,718,866,000 and purchase amount of Rp 80,823,968,235, based on Notarial Deed No. 27 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta.
- PT Tirtobumi Prakarsatama amounted to 14.97% with par value of Rp 111,600,309,000 and purchase amount of Rp 201,704,127,060, based on Notarial Deed No. 28 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta.
- PT Citra Mandiri Sukses Sejati amounted to 12% with par value of Rp 89,437,732,000 and purchase amount of Rp 161,647,936,470, based on Notarial Deed No. 29 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR 31 MARET 2017 DAN 2016
(2016 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Lanjutan)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE THREE-MONTHS PERIODS ENDED
MARCH 31, 2017 AND 2016
(2016 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Continued)

59. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk mengeluarkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah menerbitkan kembali laporan keuangan interim konsolidasian untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan informasi pada Catatan 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 21, 26, 27, 33, 55, 56, 58, dan 59 atas laporan keuangan konsolidasian.

60. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim konsolidasian dari halaman 1 sampai 173 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2017.

59. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with PT Waskita Karya (Persero) Tbk plan to issue a Shelf Registration Bonds Public Offering III Waskita Karya Phase I Year 2017 PT Waskita Karya (Persero) Tbk has reissued its consolidated interim financial statements for the three-months periods ended March 31, 2017 and 2016 (2016 - unaudited) and for the years ended December 31, 2016 and 2015 to conform with prevailing capital markets regulations. These reissued consolidated financial statements include additional information and/or changes in the Notes 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 21, 26, 27, 33, 55, 56, 58, and 59 to the consolidated financial statements

60. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated interim financial statements on pages 1 to 173 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on August 23, 2017.

Halaman ini sengaja dikosongkan



WASKITA

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.

Gedung Waskita

Jl. MT Haryono Kav. No 10 Cawang - Jakarta 13340

Telp. (021) 8508510 - 8508520

Fax. (021) 8508506

Email. waskita@waskita.co.id

Homepage : www.waskita.co.id

 PT Waskita Karya

 @waskita_karya

 @waskita_karya

 PT Waskita Karya